



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 12);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.019.358.071.248,49
b. Belanja	<u>Rp.</u>	<u>1.036.553.410.711,15</u>
Defisit	Rp.	(17.195.339.462,66)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	23.588.791.075,98
- Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>2.500.000.000,00</u>
Surplus	Rp.	21.088.791.075,98

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp45.542.915.534,51 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.064.900.986.783,00
2. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>1.019.358.071.248,49</u>
Selisih kurang	Rp.	45.542.915.534,51
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp49.436.367.147,85 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.085.989.777.859,00
2. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>1.036.553.410.711,15</u>
Selisih kurang	Rp.	49.436.367.147,85
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(3.893.451.613,34) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp.	21.088.791.076,00
2. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>(17.195.339.462,66)</u>
Selisih lebih	Rp.	(3.893.451.613,34)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp0,02 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	23.588.791.076,00
2. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>23.588.791.075,98</u>
Selisih kurang	Rp.	0,02
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>2.500.000.000,00</u>
Selisih kurang	Rp.	0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,02 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	21.088.791.076,00
2. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>21.088.791.075,98</u>
Selisih kurang	Rp.	0,02

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	2.453.074.205.588,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	28.629.183.585,27
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.424.445.022.003,03

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2019	Rp.	14.544.592.538,98
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	209.204.142.453,99
c. arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp.	(226.399.481.916,65)
d. arus kas dari aktivitas Pendanaan	Rp.	(2.500.000.000,00)
e. arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	(17.121.934,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2019	Rp.	3.884.396.946,32

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	86.582.014.545,56
2. Pendapatan Transfer	Rp.	909.305.392.520,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp.</u>	<u>34.748.278.793,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.030.635.685.858,56
b. Beban		
a. Beban Operasi	Rp.	1.004.914.438.011,22
b. Surplus/Defisit Beban Operasi	Rp.	25.721.247.847,34
c. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	25.919.855.847,34
d. Pos Luar Biasa	Rp.	(24.176.925,00)
c. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp.	25.895.678.922,34

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	23.588.791.075,98
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	23.588.791.075,98
c. Subtotal (a-b)	Rp.	0,00

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	3.893.451.613,32
e. Subtotal (c+d)	Rp.	3.893.451.613,32
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
g. Lain-lain	Rp.	0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g)	Rp	3.893.451.613,32

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.408.920.868.365,27
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	25.895.678.922,34
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :		
1. Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan	Rp.	0,00
2. Dampak Komulatif Kesalahan Mendasar	Rp.	(10.371.525.284,58)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	2.424.445.022.003,03

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Panambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
 - t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal : 26 Agustus 2020

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung

Pada tanggal : 26 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT : (1/51/2020)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
 Nomor : 1 Tahun 2020
 Tanggal : 26 Agustus 2020
 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
 Dharmasraya Tahun Anggaran 2019



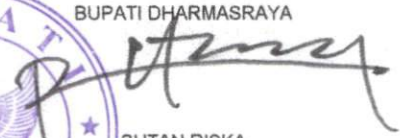
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

Kode Rek	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	1.064.900.986.783,00	1.019.358.071.248,49	(45.542.915.534,51)	95,72
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.170.000.000,00	78.882.919.152,49	(21.287.080.847,51)	78,75
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	27.926.281.048,00	19.178.964.229,67	(8.747.316.818,33)	68,68
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.635.697.267,00	3.054.849.682,00	(2.580.847.585,00)	54,21
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.641.438.934,00	3.590.314.080,00	(1.051.124.854,00)	77,35
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61.966.582.751,00	53.058.791.160,82	(8.907.791.590,18)	85,62
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	930.336.586.783,00	906.775.173.371,00	(23.561.413.412,00)	97,47
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	781.832.120.600,00	761.630.742.880,00	(20.201.377.720,00)	97,42
4.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.378.118.000,00	15.828.178.551,00	(6.549.939.449,00)	70,73
4.2.1.3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	524.890.763.000,00	524.888.502.000,00	(2.261.000,00)	100,00
4.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	234.563.239.600,00	220.914.062.329,00	(13.649.177.271,00)	94,18
4.2.2.	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya	97.546.293.000,00	97.546.293.000,00	-	100,00
4.2.2.1.	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
4.2.2.2.	Dana Penyesuaian	97.546.293.000,00	97.546.293.000,00	-	100,00
4.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	50.958.173.183,00	47.598.137.491,00	(3.360.035.692,00)	93,41
4.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	48.899.228.183,00	47.598.137.491,00	(1.301.090.692,00)	97,34
4.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
4.2.4.	Bantuan keuangan	2.058.945.000,00	-	(2.058.945.000,00)	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	34.394.400.000,00	33.699.978.725,00	(694.421.275,00)	97,98
4.3.1.	Pendapatan Hibah	34.394.400.000,00	33.699.978.725,00	(694.421.275,00)	97,98
4.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.3.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.064.900.986.783,00	1.019.358.071.248,49	(45.542.915.534,51)	95,72
5.	BELANJA DAERAH	966.583.860.859,00	917.364.843.711,15	49.219.017.147,85	94,91
5.1.	BELANJA OPERASI	718.931.526.036,75	690.742.576.869,50	28.188.949.167,25	96,08
5.1.1.	Belanja Pegawai	447.850.530.635,75	430.141.092.583,00	17.709.438.052,75	96,05
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	214.435.859.282,00	207.300.127.555,20	7.135.731.726,80	96,67
5.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.5.	Belanja Hibah	52.668.321.529,00	49.451.249.739,30	3.217.071.789,70	93,89
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	3.200.000.000,00	3.132.000.000,00	68.000.000,00	97,88
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	776.814.590,00	718.106.992,00	58.707.598,00	92,44
5.2.	BELANJA MODAL	246.852.334.822,25	226.598.089.916,65	20.254.244.905,60	91,79
5.2.1.	Tanah	-	-	-	-
5.2.2.	Peralatan dan mesin	50.671.994.945,00	45.512.218.370,50	5.159.776.574,50	89,82
5.2.3.	Gedung dan Bangunan	125.175.711.605,00	112.232.961.295,51	12.942.750.309,49	-
5.2.4.	Jalan, irigasi dan jaringan	63.111.054.576,25	61.210.263.507,34	1.900.791.068,91	96,99
5.2.5.	Aset Tetap lainnya	7.893.573.696,00	7.642.646.743,30	250.926.952,70	96,82
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	800.000.000,00	24.176.925,00	775.823.075,00	3,02
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	24.176.925,00	775.823.075,00	3,02
	JUMLAH BELANJA	966.583.860.859,00	917.364.843.711,15	49.219.017.147,85	94,91

Kode Rek	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
6.	TRANSFER	119.405.917.000,00	119.188.567.000,00	217.350.000,00	99,82
6.1.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	3.188.000.000,00	3.170.650.000,00	17.350.000,00	99,46
6.1.1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.188.000.000,00	3.170.650.000,00	17.350.000,00	99,46
6.1.2.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
6.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	116.217.917.000,00	116.017.917.000,00	200.000.000,00	99,83
6.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	200.000.000,00		200.000.000,00	-
6.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	116.017.917.000,00	116.017.917.000,00	-	100,00
6.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.085.989.777.859,00	1.036.553.410.711,15	49.436.367.147,85	95,45
	SURPLUS/(DEFISIT)	(21.088.791.076,00)	(17.195.339.462,66)	(3.893.451.613,34)	81,54
7.	PEMBIAYAAN	23.588.791.076,00	23.588.791.075,98	(0,02)	100,00
7.1.	PENERIMAAN DAERAH	23.588.791.076,00	23.588.791.075,98	(0,02)	100,00
7.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	23.588.791.076,00	23.588.791.075,98	(0,02)	100,00
7.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
7.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
7.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
7.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah	-	-	-	-
7.1.6.	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.588.791.076,00	23.588.791.075,98	(0,02)	100,00
7.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	100,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	21.088.791.076,00	21.088.791.075,98		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) SEBELUM KOREKSI	-	3.893.451.613,32	3.893.451.613,32	-
	Koreksi SILPA				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)SETELAH KOREKSI	-	3.893.451.613,32	3.893.451.613,32	-



BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 1 Tahun 2020
Tanggal : 26 Agustus 2020
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun Anggaran 2019



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

Kode Rek	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	1.064.900.986.783,00	1.019.358.071.248,49	(45.542.915.534,51)	95,72
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.170.000.000,00	78.882.919.152,49	(21.287.080.847,51)	78,75
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	27.926.281.048,00	19.178.964.229,67	(8.747.316.818,33)	68,68
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.635.697.267,00	3.054.849.682,00	(2.580.847.585,00)	54,21
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.641.438.934,00	3.590.314.080,00	(1.051.124.854,00)	77,35
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61.966.582.751,00	53.058.791.160,82	(8.907.791.590,18)	85,62
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	930.336.586.783,00	906.775.173.371,00	(23.561.413.412,00)	97,47
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	781.832.120.600,00	761.630.742.880,00	(20.201.377.720,00)	97,42
4.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.378.118.000,00	15.828.178.551,00	(6.549.939.449,00)	70,73
4.2.1.3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	524.890.763.000,00	524.888.502.000,00	(2.261.000,00)	100,00
4.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	234.563.239.600,00	220.914.062.329,00	(13.649.177.271,00)	94,18
4.2.2.	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya	97.546.293.000,00	97.546.293.000,00	-	100,00
4.2.2.1.	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	
4.2.2.2.	Dana Penyesuaian	97.546.293.000,00	97.546.293.000,00	-	100,00
4.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	50.958.173.183,00	47.598.137.491,00	(3.360.035.692,00)	93,41
4.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	48.899.228.183,00	47.598.137.491,00	(1.301.090.692,00)	97,34
4.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	
4.2.4.	Bantuan keuangan	2.058.945.000,00	-	(2.058.945.000,00)	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	34.394.400.000,00	33.699.978.725,00	(694.421.275,00)	97,98
4.3.1.	Pendapatan Hibah	34.394.400.000,00	33.699.978.725,00	(694.421.275,00)	97,98
4.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	
4.3.3.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.064.900.986.783,00	1.019.358.071.248,49	(45.542.915.534,51)	95,72
5.	BELANJA DAERAH	966.583.860.859,00	917.364.843.711,15	49.219.017.147,85	94,91
5.1.	BELANJA OPERASI	718.931.526.036,75	690.742.576.869,50	28.188.949.167,25	96,08
5.1.1.	Belanja Pegawai	447.850.530.635,75	430.141.092.583,00	17.709.438.052,75	96,05
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	214.435.859.282,00	207.300.127.555,20	7.135.731.726,80	96,67
5.1.3.	Belanja Bunga			-	-
5.1.4.	Belanja Subsidi			-	-
5.1.5.	Belanja Hibah	52.668.321.529,00	49.451.249.739,30	3.217.071.789,70	93,89
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	3.200.000.000,00	3.132.000.000,00	68.000.000,00	97,88
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	776.814.590,00	718.106.992,00	58.707.598,00	92,44
5.2.	BELANJA MODAL	246.852.334.822,25	226.598.089.916,65	20.254.244.905,60	91,79
5.2.1.	Tanah	-	-	-	-
5.2.2.	Peralatan dan mesin	50.671.994.945,00	45.512.218.370,50	5.159.776.574,50	89,82
5.2.3.	Gedung dan Bangunan	125.175.711.605,00	112.232.961.295,51	12.942.750.309,49	
5.2.4.	Jalan, irigasi dan jaringan	63.111.054.576,25	61.210.263.507,34	1.900.791.068,91	96,99
5.2.5.	Aset Tetap lainnya	7.893.573.696,00	7.642.646.743,30	250.926.952,70	96,82

Kode Rek	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	800.000.000,00	24.176.925,00	775.823.075,00	3,02
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	24.176.925,00	775.823.075,00	3,02
	JUMLAH BELANJA	966.583.860.859,00	917.364.843.711,15	49.219.017.147,85	94,91
6.	TRANSFER	119.405.917.000,00	119.188.567.000,00	217.350.000,00	99,82
6.1.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	3.188.000.000,00	3.170.650.000,00	17.350.000,00	99,46
6.1.1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.188.000.000,00	3.170.650.000,00	17.350.000,00	99,46
6.1.2.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	
6.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	116.217.917.000,00	116.017.917.000,00	200.000.000,00	99,83
6.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	200.000.000,00		200.000.000,00	-
6.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	116.017.917.000,00	116.017.917.000,00	-	100,00
6.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.085.989.777.859,00	1.036.553.410.711,15	49.436.367.147,85	95,45
	SURPLUS/(DEFISIT)	(21.088.791.076,00)	(17.195.339.462,66)	3.893.451.613,34	81,54
7.	PEMBIAYAAN	23.588.791.076,00	23.588.791.075,98	(0,02)	100,00
7.1.	PENERIMAAN DAERAH	23.588.791.076,00	23.588.791.075,98	(0,02)	100,00
7.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	23.588.791.076,00	23.588.791.075,98	(0,02)	100,00
7.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
7.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
7.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
7.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah	-	-	-	
7.1.6.	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.588.791.076,00	23.588.791.075,98	(0,02)	100,00
7.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-		-	100,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	21.088.791.076,00	21.088.791.075,98		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SEBELUM KOREKSI	-	3.893.451.613,32	3.893.451.613,32	-
	Koreksi SILPA				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)SETELAH KOREKSI	-	3.893.451.613,32	3.893.451.613,32	-

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran I.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor :
Tanggal :

Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2019					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN	1.057.719.781.183,00	1.019.358.071.248,49	(38.361.709.934,51)	96,37
4 . 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	85.639.490.018,00	82.286.000.270,56	(3.353.489.747,44)	96,08
4 . 1.01	Pendidikan	28.206.400.000,00	32.238.533.000,00	4.032.133.000,00	114,30
4 . 1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	28.206.400.000,00	32.238.533.000,00	4.032.133.000,00	114,30
4 . 1.02	Kesehatan	52.944.162.751,00	48.609.464.784,00	(4.334.697.967,00)	91,81
4 . 1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	10.577.524.800,00	10.712.659.192,00	135.134.392,00	101,28
4 . 1.02 . 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	42.366.637.951,00	37.896.805.592,00	(4.469.832.359,00)	89,45
4 . 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.298.367.267,00	1.315.733.686,56	(2.982.633.580,44)	30,61
4 . 1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.298.367.267,00	1.315.733.686,56	(2.982.633.580,44)	30,61
4 . 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	190.560.000,00	122.268.800,00	(68.291.200,00)	64,16
4 . 1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	190.560.000,00	122.268.800,00	(68.291.200,00)	64,16
4 . 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2.581.500.000,00	1.459.246.365,00	(1.122.253.635,00)	56,53
4 . 2.03	Pangan	874.000.000,00	161.270.000,00	(712.730.000,00)	18,45
4 . 2.03 . 2.03.01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	874.000.000,00	161.270.000,00	(712.730.000,00)	18,45
4 . 2.05	Lingkungan Hidup	45.000.000,00	79.310.000,00	34.310.000,00	176,24
4 . 2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	45.000.000,00	79.310.000,00	34.310.000,00	176,24
4 . 2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00
4 . 2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00
4 . 2.09	Perhubungan	467.500.000,00	319.230.000,00	(148.270.000,00)	68,28
4 . 2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	467.500.000,00	319.230.000,00	(148.270.000,00)	68,28
4 . 2.10	Komunikasi dan Informatika	470.000.000,00	480.575.000,00	10.575.000,00	102,25
4 . 2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	470.000.000,00	480.575.000,00	10.575.000,00	102,25
4 . 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	125.000.000,00	80.629.000,00	(44.371.000,00)	64,50

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4 . 2.11 . 2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	125.000.000,00	80.629.000,00	(44.371.000,00)	64,50
4 . 2.12	Penanaman Modal	600.000.000,00	333.452.365,00	(266.547.635,00)	55,58
4 . 2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	600.000.000,00	333.452.365,00	(266.547.635,00)	55,58
4 . 3	Urusan Pilihan	143.980.000,00	64.526.817,00	(79.453.183,00)	44,82
4 . 3.03	Pertanian	130.000.000,00	48.952.600,00	(81.047.400,00)	37,66
4 . 3.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN	130.000.000,00	48.952.600,00	(81.047.400,00)	37,66
4 . 3.08	Transmigrasi	13.980.000,00	15.574.217,00	1.594.217,00	111,40
4 . 3.08 . 3.08.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	13.980.000,00	15.574.217,00	1.594.217,00	111,40
4 . 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	969.354.811.165,00	935.548.297.795,93	(33.806.513.369,07)	96,51
4 . 4.01	Administrasi Pemerintahan	93.710.000,00	89.538.750,00	(4.171.250,00)	95,55
4 . 4.01 . 4.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	24.000.000,00	23.650.000,00	(350.000,00)	98,54
4 . 4.01 . 4.01.05	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	19.560.000,00	15.625.000,00	(3.935.000,00)	79,88
4 . 4.01 . 4.01.06	KECAMATAN SITIUNG	19.460.000,00	16.183.000,00	(3.277.000,00)	83,16
4 . 4.01 . 4.01.07	KECAMATAN KOTO BARU	3.600.000,00	3.617.000,00	17.000,00	100,47
4 . 4.01 . 4.01.08	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	10.180.000,00	13.111.250,00	2.931.250,00	128,79
4 . 4.01 . 4.01.09	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
4 . 4.01 . 4.01.10	KECAMATAN TIMPEH	6.160.000,00	4.862.500,00	(1.297.500,00)	78,94
4 . 4.01 . 4.01.11	KECAMATAN KOTO SALAK	1.000.000,00	5.340.000,00	4.340.000,00	534,00
4 . 4.01 . 4.01.12	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
4 . 4.01 . 4.01.13	KECAMATAN KOTO BESAR	3.500.000,00	3.470.000,00	(30.000,00)	99,14
4 . 4.01 . 4.01.14	KECAMATAN PADANG LAWEH	1.500.000,00	250.000,00	(1.250.000,00)	16,67
4 . 4.01 . 4.01.15	KECAMATAN TIUMANG	2.500.000,00	2.180.000,00	(320.000,00)	87,20
4 . 4.04	Keuangan	969.261.101.165,00	935.458.759.045,93	(33.802.342.119,07)	96,51
4 . 4.04 . 4.04.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	969.261.101.165,00	935.458.759.045,93	(33.802.342.119,07)	96,51

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5	BELANJA	1.078.808.572.259,00	1.036.553.410.711,15	(42.255.161.547,85)	96,08
5 . 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	666.152.992.859,00	639.206.089.911,44	(26.946.902.947,56)	95,95
5 . 1.01	Pendidikan	292.886.368.077,75	285.003.208.798,77	(7.883.159.278,98)	97,31
5 . 1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	292.770.673.077,75	284.887.618.098,77	(7.883.054.978,98)	97,31
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	209.470.750.754,75	202.096.891.171,00	(7.373.859.583,75)	96,48
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	209.470.750.754,75	202.096.891.171,00	(7.373.859.583,75)	96,48
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	83.299.922.323,00	82.790.726.927,77	(509.195.395,23)	99,39
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.404.355.000,00	7.919.069.000,00	(485.286.000,00)	94,23
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.892.656.773,00	28.989.319.395,00	(903.337.378,00)	96,98
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3	Belanja Modal	45.002.910.550,00	45.882.338.532,77	879.427.982,77	101,95
5 . 1.01 . 4.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	115.695.000,00	115.590.700,00	(104.300,00)	99,91
5 . 1.01 . 4.01.02 . 2	BELANJA LANGSUNG	115.695.000,00	115.590.700,00	(104.300,00)	99,91
5 . 1.01 . 4.01.02 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.695.000,00	115.590.700,00	(104.300,00)	99,91
5 . 1.02	Kesehatan	198.430.283.248,00	191.276.909.021,40	(7.153.374.226,60)	96,40
5 . 1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	110.744.373.984,00	107.536.079.028,40	(3.208.294.955,60)	97,10
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	49.102.182.000,00	47.613.202.299,00	(1.488.979.701,00)	96,97
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	49.102.182.000,00	47.613.202.299,00	(1.488.979.701,00)	96,97
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	61.642.191.984,00	59.922.876.729,40	(1.719.315.254,60)	97,21
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.889.152.200,00	7.114.023.319,00	(775.128.881,00)	90,17
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.418.583.535,00	33.135.220.497,30	716.636.962,30	102,21
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3	Belanja Modal	21.334.456.249,00	19.673.632.913,10	(1.660.823.335,90)	92,22
5 . 1.02 . 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	87.685.909.264,00	83.740.829.993,00	(3.945.079.271,00)	95,50
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.301.247.000,00	22.888.898.968,00	(412.348.032,00)	98,23
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	23.301.247.000,00	22.888.898.968,00	(412.348.032,00)	98,23
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2	BELANJA LANGSUNG	64.384.662.264,00	60.851.931.025,00	(3.532.731.239,00)	94,51
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 1	Belanja Pegawai	629.500.000,00	548.965.000,00	(80.535.000,00)	87,21
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.203.249.951,00	41.025.179.916,00	(178.070.035,00)	99,57
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 3	Belanja Modal	22.551.912.313,00	19.277.786.109,00	(3.274.126.204,00)	85,48
5 . 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	147.990.815.442,25	136.789.512.321,34	(11.201.303.120,91)	92,43
5 . 1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	147.990.815.442,25	136.789.512.321,34	(11.201.303.120,91)	92,43
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.108.491.000,00	4.905.357.555,00	(203.133.445,00)	96,02
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.108.491.000,00	4.905.357.555,00	(203.133.445,00)	96,02
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	142.882.324.442,25	131.884.154.766,34	(10.998.169.675,91)	92,30

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.916.130.000,00	2.740.811.000,00	(175.319.000,00)	93,99
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.224.534.696,00	29.924.076.331,00	(3.300.458.365,00)	90,07
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3	Belanja Modal	106.741.659.746,25	99.219.267.435,34	(7.522.392.310,91)	92,95
5 . 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.860.524.440,00	6.579.588.717,93	(280.935.722,07)	95,91
5 . 1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	6.860.524.440,00	6.579.588.717,93	(280.935.722,07)	95,91
5 . 1.04 . 1.04.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.902.036.000,00	1.786.496.019,00	(115.539.981,00)	93,93
5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.902.036.000,00	1.786.496.019,00	(115.539.981,00)	93,93
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.958.488.440,00	4.793.092.698,93	(165.395.741,07)	96,66
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	689.943.000,00	590.570.000,00	(99.373.000,00)	85,60
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.709.885.440,00	2.653.179.498,93	(56.705.941,07)	97,91
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 3	Belanja Modal	1.558.660.000,00	1.549.343.200,00	(9.316.800,00)	99,40
5 . 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	12.050.583.875,00	11.831.940.576,00	(218.643.299,00)	98,19
5 . 1.05 . 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8.477.930.725,00	8.287.220.631,00	(190.710.094,00)	97,75
5 . 1.05 . 1.05.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.316.538.000,00	2.257.101.608,00	(59.436.392,00)	97,43
5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.316.538.000,00	2.257.101.608,00	(59.436.392,00)	97,43
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.161.392.725,00	6.030.119.023,00	(131.273.702,00)	97,87
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.184.580.000,00	4.158.237.550,00	(26.342.450,00)	99,37
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.883.262.725,00	1.781.205.598,00	(102.057.127,00)	94,58
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 3	Belanja Modal	93.550.000,00	90.675.875,00	(2.874.125,00)	96,93
5 . 1.05 . 4.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	3.195.738.100,00	3.192.378.972,00	(3.359.128,00)	99,89
5 . 1.05 . 4.01.02 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.195.738.100,00	3.192.378.972,00	(3.359.128,00)	99,89
5 . 1.05 . 4.01.02 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.195.738.100,00	3.192.378.972,00	(3.359.128,00)	99,89
5 . 1.05 . 4.01.16	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	376.915.050,00	352.340.973,00	(24.574.077,00)	93,48
5 . 1.05 . 4.01.16 . 2	BELANJA LANGSUNG	376.915.050,00	352.340.973,00	(24.574.077,00)	93,48
5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.080.000,00	24.880.000,00	(4.200.000,00)	85,56
5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	347.835.050,00	327.460.973,00	(20.374.077,00)	94,14
5 . 1.06	Sosial	7.934.417.776,00	7.724.930.476,00	(209.487.300,00)	97,36
5 . 1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KB	5.546.478.676,00	5.426.431.157,00	(120.047.519,00)	97,84
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.156.872.000,00	3.046.459.811,00	(110.412.189,00)	96,50
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.156.872.000,00	3.046.459.811,00	(110.412.189,00)	96,50
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.389.606.676,00	2.379.971.346,00	(9.635.330,00)	99,60
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	789.070.000,00	786.910.000,00	(2.160.000,00)	99,73
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.574.086.676,00	1.566.611.346,00	(7.475.330,00)	99,53

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3	Belanja Modal	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	100,00
5 . 1.06 . 1.06.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.107.939.100,00	2.018.544.319,00	(89.394.781,00)	95,76
5 . 1.06 . 1.06.02 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	832.413.000,00	776.825.499,00	(55.587.501,00)	93,32
5 . 1.06 . 1.06.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	832.413.000,00	776.825.499,00	(55.587.501,00)	93,32
5 . 1.06 . 1.06.02 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.275.526.100,00	1.241.718.820,00	(33.807.280,00)	97,35
5 . 1.06 . 1.06.02 . 2 . 1	Belanja Pegawai	589.900.000,00	586.700.000,00	(3.200.000,00)	99,46
5 . 1.06 . 1.06.02 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	639.226.100,00	609.040.820,00	(30.185.280,00)	95,28
5 . 1.06 . 1.06.02 . 2 . 3	Belanja Modal	46.400.000,00	45.978.000,00	(422.000,00)	99,09
5 . 1.06 . 4.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	280.000.000,00	279.955.000,00	(45.000,00)	99,98
5 . 1.06 . 4.01.02 . 2	BELANJA LANGSUNG	280.000.000,00	279.955.000,00	(45.000,00)	99,98
5 . 1.06 . 4.01.02 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	279.955.000,00	(45.000,00)	99,98
5 . 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	68.244.679.369,00	66.156.497.805,00	(2.088.181.564,00)	96,94
5 . 2.01	Tenaga Kerja	944.904.700,00	855.390.675,00	(89.514.025,00)	90,53
5 . 2.01 . 3.08.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	944.904.700,00	855.390.675,00	(89.514.025,00)	90,53
5 . 2.01 . 3.08.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	944.904.700,00	855.390.675,00	(89.514.025,00)	90,53
5 . 2.01 . 3.08.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00
5 . 2.01 . 3.08.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	942.704.700,00	853.190.675,00	(89.514.025,00)	90,50
5 . 2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	868.540.900,00	854.591.221,00	(13.949.679,00)	98,39
5 . 2.02 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KB	868.540.900,00	854.591.221,00	(13.949.679,00)	98,39
5 . 2.02 . 1.06.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	868.540.900,00	854.591.221,00	(13.949.679,00)	98,39
5 . 2.02 . 1.06.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.500.000,00	27.550.000,00	(3.950.000,00)	87,46
5 . 2.02 . 1.06.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	837.040.900,00	827.041.221,00	(9.999.679,00)	98,81
5 . 2.02 . 1.06.01 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.03	Pangan	4.091.835.500,00	3.958.811.868,00	(133.023.632,00)	96,75
5 . 2.03 . 2.03.01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	4.091.835.500,00	3.958.811.868,00	(133.023.632,00)	96,75
5 . 2.03 . 2.03.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.556.767.000,00	2.466.088.721,00	(90.678.279,00)	96,45
5 . 2.03 . 2.03.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.556.767.000,00	2.466.088.721,00	(90.678.279,00)	96,45
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.535.068.500,00	1.492.723.147,00	(42.345.353,00)	97,24
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	570.180.000,00	545.220.000,00	(24.960.000,00)	95,62
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	944.753.500,00	927.368.147,00	(17.385.353,00)	98,16
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 3	Belanja Modal	20.135.000,00	20.135.000,00	0,00	100,00
5 . 2.04	Pertanahan	269.362.000,00	251.881.394,00	(17.480.606,00)	93,51
5 . 2.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	269.362.000,00	251.881.394,00	(17.480.606,00)	93,51

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.04 . 1.04.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	269.362.000,00	251.881.394,00	(17.480.606,00)	93,51
5 . 2.04 . 1.04.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.000.000,00	31.650.000,00	(6.350.000,00)	83,29
5 . 2.04 . 1.04.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.862.000,00	214.767.894,00	(11.094.106,00)	95,09
5 . 2.04 . 1.04.01 . 2 . 3	Belanja Modal	5.500.000,00	5.463.500,00	(36.500,00)	99,34
5 . 2.05	Lingkungan Hidup	6.289.294.360,00	6.113.802.939,00	(175.491.421,00)	97,21
5 . 2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.289.294.360,00	6.113.802.939,00	(175.491.421,00)	97,21
5 . 2.05 . 2.05.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.674.965.000,00	2.525.695.945,00	(149.269.055,00)	94,42
5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.674.965.000,00	2.525.695.945,00	(149.269.055,00)	94,42
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.614.329.360,00	3.588.106.994,00	(26.222.366,00)	99,27
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	928.190.000,00	926.450.000,00	(1.740.000,00)	99,81
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.631.839.360,00	2.607.774.594,00	(24.064.766,00)	99,09
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 3	Belanja Modal	54.300.000,00	53.882.400,00	(417.600,00)	99,23
5 . 2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	6.817.287.250,00	6.700.997.571,00	(116.289.679,00)	98,29
5 . 2.06 . 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.817.287.250,00	6.700.997.571,00	(116.289.679,00)	98,29
5 . 2.06 . 2.06.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.874.072.000,00	2.806.433.388,00	(67.638.612,00)	97,65
5 . 2.06 . 2.06.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.874.072.000,00	2.806.433.388,00	(67.638.612,00)	97,65
5 . 2.06 . 2.06.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.943.215.250,00	3.894.564.183,00	(48.651.067,00)	98,77
5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	838.130.000,00	819.550.000,00	(18.580.000,00)	97,78
5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.780.819.850,00	1.751.036.614,00	(29.783.236,00)	98,33
5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 3	Belanja Modal	1.324.265.400,00	1.323.977.569,00	(287.831,00)	99,98
5 . 2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.924.189.500,00	5.681.698.673,00	(242.490.827,00)	95,91
5 . 2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.924.189.500,00	5.681.698.673,00	(242.490.827,00)	95,91
5 . 2.07 . 2.07.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.137.008.000,00	2.906.657.592,00	(230.350.408,00)	92,66
5 . 2.07 . 2.07.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.137.008.000,00	2.906.657.592,00	(230.350.408,00)	92,66
5 . 2.07 . 2.07.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.787.181.500,00	2.775.041.081,00	(12.140.419,00)	99,56
5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	418.530.000,00	415.220.000,00	(3.310.000,00)	99,21
5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.314.551.500,00	2.305.721.081,00	(8.830.419,00)	99,62
5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 3	Belanja Modal	54.100.000,00	54.100.000,00	0,00	100,00
5 . 2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.876.558.250,00	3.771.720.883,00	(104.837.367,00)	97,30
5 . 2.08 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KB	3.876.558.250,00	3.771.720.883,00	(104.837.367,00)	97,30
5 . 2.08 . 1.06.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.876.558.250,00	3.771.720.883,00	(104.837.367,00)	97,30
5 . 2.08 . 1.06.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	662.940.000,00	643.430.000,00	(19.510.000,00)	97,06
5 . 2.08 . 1.06.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.474.418.250,00	2.426.215.883,00	(48.202.367,00)	98,05

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.08 . 1.06.01 . 2 . 3	Belanja Modal	739.200.000,00	702.075.000,00	(37.125.000,00)	94,98
5 . 2.09	Perhubungan	6.920.105.334,00	6.450.660.794,00	(469.444.540,00)	93,22
5 . 2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	6.920.105.334,00	6.450.660.794,00	(469.444.540,00)	93,22
5 . 2.09 . 2.09.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.131.169.334,00	2.997.561.210,00	(133.608.124,00)	95,73
5 . 2.09 . 2.09.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.131.169.334,00	2.997.561.210,00	(133.608.124,00)	95,73
5 . 2.09 . 2.09.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.788.936.000,00	3.453.099.584,00	(335.836.416,00)	91,14
5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.879.940.000,00	1.799.340.000,00	(80.600.000,00)	95,71
5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.121.034.350,00	1.004.839.984,00	(116.194.366,00)	89,64
5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 3	Belanja Modal	787.961.650,00	648.919.600,00	(139.042.050,00)	82,35
5 . 2.10	Komunikasi dan Informatika	8.144.816.350,00	7.993.337.581,00	(151.478.769,00)	98,14
5 . 2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.055.236.350,00	4.923.918.581,00	(131.317.769,00)	97,40
5 . 2.10 . 2.10.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.214.435.000,00	2.148.359.131,00	(66.075.869,00)	97,02
5 . 2.10 . 2.10.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.214.435.000,00	2.148.359.131,00	(66.075.869,00)	97,02
5 . 2.10 . 2.10.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.840.801.350,00	2.775.559.450,00	(65.241.900,00)	97,70
5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	273.985.000,00	258.045.000,00	(15.940.000,00)	94,18
5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.023.626.350,00	1.977.004.450,00	(46.621.900,00)	97,70
5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 3	Belanja Modal	543.190.000,00	540.510.000,00	(2.680.000,00)	99,51
5 . 2.10 . 4.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	3.089.580.000,00	3.069.419.000,00	(20.161.000,00)	99,35
5 . 2.10 . 4.01.02 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.089.580.000,00	3.069.419.000,00	(20.161.000,00)	99,35
5 . 2.10 . 4.01.02 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
5 . 2.10 . 4.01.02 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.027.080.000,00	3.007.069.000,00	(20.011.000,00)	99,34
5 . 2.10 . 4.01.02 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	49.850.000,00	(150.000,00)	99,70
5 . 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.476.436.250,00	4.345.893.476,00	(130.542.774,00)	97,08
5 . 2.11 . 2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	4.476.436.250,00	4.345.893.476,00	(130.542.774,00)	97,08
5 . 2.11 . 2.11.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.683.614.000,00	2.578.905.438,00	(104.708.562,00)	96,10
5 . 2.11 . 2.11.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.683.614.000,00	2.578.905.438,00	(104.708.562,00)	96,10
5 . 2.11 . 2.11.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.792.822.250,00	1.766.988.038,00	(25.834.212,00)	98,56
5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	439.140.000,00	436.230.000,00	(2.910.000,00)	99,34
5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.334.982.250,00	1.312.058.038,00	(22.924.212,00)	98,28
5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 . 3	Belanja Modal	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	100,00
5 . 2.12	Penanaman Modal	3.866.473.100,00	3.760.721.459,00	(105.751.641,00)	97,26
5 . 2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.866.473.100,00	3.760.721.459,00	(105.751.641,00)	97,26
5 . 2.12 . 2.12.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.219.131.000,00	2.150.258.007,00	(68.872.993,00)	96,90
5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.219.131.000,00	2.150.258.007,00	(68.872.993,00)	96,90

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.12 . 2.12.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.647.342.100,00	1.610.463.452,00	(36.878.648,00)	97,76
5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	445.160.000,00	441.730.000,00	(3.430.000,00)	99,23
5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.182.100,00	1.068.243.453,00	(31.938.647,00)	97,10
5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 3	Belanja Modal	102.000.000,00	100.489.999,00	(1.510.001,00)	98,52
5 . 2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	5.377.952.500,00	5.313.798.012,00	(64.154.488,00)	98,81
5 . 2.13 . 2.16.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	5.377.952.500,00	5.313.798.012,00	(64.154.488,00)	98,81
5 . 2.13 . 2.16.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.377.952.500,00	5.313.798.012,00	(64.154.488,00)	98,81
5 . 2.13 . 2.16.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	328.075.000,00	319.889.000,00	(8.186.000,00)	97,50
5 . 2.13 . 2.16.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.911.277.500,00	4.855.309.012,00	(55.968.488,00)	98,86
5 . 2.13 . 2.16.01 . 2 . 3	Belanja Modal	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	100,00
5 . 2.14	Statistik	207.485.000,00	206.910.946,00	(574.054,00)	99,72
5 . 2.14 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	207.485.000,00	206.910.946,00	(574.054,00)	99,72
5 . 2.14 . 2.10.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	207.485.000,00	206.910.946,00	(574.054,00)	99,72
5 . 2.14 . 2.10.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.850.000,00	23.650.000,00	(200.000,00)	99,16
5 . 2.14 . 2.10.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.635.000,00	183.260.946,00	(374.054,00)	99,80
5 . 2.15	Persandian	104.520.000,00	101.301.655,00	(3.218.345,00)	96,92
5 . 2.15 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	104.520.000,00	101.301.655,00	(3.218.345,00)	96,92
5 . 2.15 . 2.10.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	104.520.000,00	101.301.655,00	(3.218.345,00)	96,92
5 . 2.15 . 2.10.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.15 . 2.10.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.520.000,00	101.301.655,00	(3.218.345,00)	96,92
5 . 2.16	Kebudayaan	5.999.768.425,00	5.849.153.839,00	(150.614.586,00)	97,49
5 . 2.16 . 2.16.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	5.999.768.425,00	5.849.153.839,00	(150.614.586,00)	97,49
5 . 2.16 . 2.16.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.538.648.000,00	2.470.001.475,00	(68.646.525,00)	97,30
5 . 2.16 . 2.16.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.538.648.000,00	2.470.001.475,00	(68.646.525,00)	97,30
5 . 2.16 . 2.16.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.461.120.425,00	3.379.152.364,00	(81.968.061,00)	97,63
5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	761.760.000,00	746.458.000,00	(15.302.000,00)	97,99
5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.594.838.425,00	2.528.253.364,00	(66.585.061,00)	97,43
5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 . 3	Belanja Modal	104.522.000,00	104.441.000,00	(81.000,00)	99,92
5 . 2.17	Perpustakaan	3.851.931.950,00	3.732.791.569,00	(119.140.381,00)	96,91
5 . 2.17 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.851.931.950,00	3.732.791.569,00	(119.140.381,00)	96,91
5 . 2.17 . 2.17.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.529.217.000,00	2.448.212.282,00	(81.004.718,00)	96,80
5 . 2.17 . 2.17.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.529.217.000,00	2.448.212.282,00	(81.004.718,00)	96,80
5 . 2.17 . 2.17.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.322.714.950,00	1.284.579.287,00	(38.135.663,00)	97,12

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	304.630.000,00	296.685.000,00	(7.945.000,00)	97,39
5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	766.101.950,00	742.983.287,00	(23.118.663,00)	96,98
5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 3	Belanja Modal	251.983.000,00	244.911.000,00	(7.072.000,00)	97,19
5 . 2.18	Kearsipan	213.218.000,00	213.033.250,00	(184.750,00)	99,91
5 . 2.18 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	213.218.000,00	213.033.250,00	(184.750,00)	99,91
5 . 2.18 . 2.17.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	213.218.000,00	213.033.250,00	(184.750,00)	99,91
5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.650.000,00	17.650.000,00	0,00	100,00
5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.568.000,00	195.383.250,00	(184.750,00)	99,91
5 . 3	Urusan Pilihan	69.344.460.648,00	63.312.679.595,71	(6.031.781.052,29)	91,30
5 . 3.01	Kelautan dan Perikanan	2.148.729.698,00	2.108.695.386,00	(40.034.312,00)	98,14
5 . 3.01 . 2.03.01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	2.148.729.698,00	2.108.695.386,00	(40.034.312,00)	98,14
5 . 3.01 . 2.03.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.148.729.698,00	2.108.695.386,00	(40.034.312,00)	98,14
5 . 3.01 . 2.03.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
5 . 3.01 . 2.03.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.697.357.102,00	1.659.361.886,00	(37.995.216,00)	97,76
5 . 3.01 . 2.03.01 . 2 . 3	Belanja Modal	448.372.596,00	446.333.500,00	(2.039.096,00)	99,55
5 . 3.02	Pariwisata	2.681.041.200,00	2.481.417.683,85	(199.623.516,15)	92,55
5 . 3.02 . 2.16.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	2.681.041.200,00	2.481.417.683,85	(199.623.516,15)	92,55
5 . 3.02 . 2.16.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.681.041.200,00	2.481.417.683,85	(199.623.516,15)	92,55
5 . 3.02 . 2.16.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.650.000,00	46.450.000,00	(1.200.000,00)	97,48
5 . 3.02 . 2.16.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	774.129.200,00	767.394.513,00	(6.734.687,00)	99,13
5 . 3.02 . 2.16.01 . 2 . 3	Belanja Modal	1.859.262.000,00	1.667.573.170,85	(191.688.829,15)	89,69
5 . 3.03	Pertanian	26.581.595.750,00	25.552.598.147,30	(1.028.997.602,70)	96,13
5 . 3.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN	26.581.595.750,00	25.552.598.147,30	(1.028.997.602,70)	96,13
5 . 3.03 . 3.03.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.967.876.000,00	11.417.181.350,00	(550.694.650,00)	95,40
5 . 3.03 . 3.03.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	11.967.876.000,00	11.417.181.350,00	(550.694.650,00)	95,40
5 . 3.03 . 3.03.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	14.613.719.750,00	14.135.416.797,30	(478.302.952,70)	96,73
5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.743.210.000,00	1.702.635.000,00	(40.575.000,00)	97,67
5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.908.164.950,00	10.625.981.115,00	(282.183.835,00)	97,41
5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 3	Belanja Modal	1.962.344.800,00	1.806.800.682,30	(155.544.117,70)	92,07
5 . 3.06	Perdagangan	3.852.072.000,00	3.394.954.622,56	(457.117.377,44)	88,13
5 . 3.06 . 2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	3.852.072.000,00	3.394.954.622,56	(457.117.377,44)	88,13
5 . 3.06 . 2.11.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.852.072.000,00	3.394.954.622,56	(457.117.377,44)	88,13
5 . 3.06 . 2.11.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00
5 . 3.06 . 2.11.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	274.508.000,00	273.171.561,00	(1.336.439,00)	99,51

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 3.06 . 2.11.01 . 2 . 3	Belanja Modal	3.566.764.000,00	3.110.983.061,56	(455.780.938,44)	87,22
5 . 3.07	Perindustrian	30.379.541.000,00	26.400.220.095,00	(3.979.320.905,00)	86,90
5 . 3.07 . 2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	30.379.541.000,00	26.400.220.095,00	(3.979.320.905,00)	86,90
5 . 3.07 . 2.11.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	30.379.541.000,00	26.400.220.095,00	(3.979.320.905,00)	86,90
5 . 3.07 . 2.11.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
5 . 3.07 . 2.11.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.081.926.000,00	1.080.619.006,00	(1.306.994,00)	99,88
5 . 3.07 . 2.11.01 . 2 . 3	Belanja Modal	29.294.115.000,00	25.316.101.089,00	(3.978.013.911,00)	86,42
5 . 3.08	Transmigrasi	3.701.481.000,00	3.374.793.661,00	(326.687.339,00)	91,17
5 . 3.08 . 3.08.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	3.701.481.000,00	3.374.793.661,00	(326.687.339,00)	91,17
5 . 3.08 . 3.08.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.645.545.000,00	2.471.445.374,00	(174.099.626,00)	93,42
5 . 3.08 . 3.08.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.645.545.000,00	2.471.445.374,00	(174.099.626,00)	93,42
5 . 3.08 . 3.08.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.055.936.000,00	903.348.287,00	(152.587.713,00)	85,55
5 . 3.08 . 3.08.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	406.920.000,00	401.840.000,00	(5.080.000,00)	98,75
5 . 3.08 . 3.08.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	625.466.000,00	477.958.287,00	(147.507.713,00)	76,42
5 . 3.08 . 3.08.01 . 2 . 3	Belanja Modal	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	100,00
5 . 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	275.066.439.383,00	267.878.143.399,00	(7.188.295.984,00)	97,39
5 . 4.01	Administrasi Pemerintahan	99.467.973.496,00	94.312.545.073,00	(5.155.428.423,00)	94,82
5 . 4.01 . 4.01.01	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	579.365.900,00	567.690.766,00	(11.675.134,00)	97,98
5 . 4.01 . 4.01.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	579.365.900,00	567.690.766,00	(11.675.134,00)	97,98
5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	579.365.900,00	567.690.766,00	(11.675.134,00)	97,98
5 . 4.01 . 4.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	38.846.281.442,00	38.332.041.890,00	(514.239.552,00)	98,68
5 . 4.01 . 4.01.02 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.522.684.000,00	8.064.644.520,00	(458.039.480,00)	94,63
5 . 4.01 . 4.01.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.522.684.000,00	8.064.644.520,00	(458.039.480,00)	94,63
5 . 4.01 . 4.01.02 . 2	BELANJA LANGSUNG	30.323.597.442,00	30.267.397.370,00	(56.200.072,00)	99,81
5 . 4.01 . 4.01.02 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.252.565.000,00	4.227.045.000,00	(25.520.000,00)	99,40
5 . 4.01 . 4.01.02 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.723.496.442,00	21.700.276.470,00	(23.219.972,00)	99,89
5 . 4.01 . 4.01.02 . 2 . 3	Belanja Modal	4.347.536.000,00	4.340.075.900,00	(7.460.100,00)	99,83
5 . 4.01 . 4.01.03	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	12.307.643.950,00	10.811.606.532,00	(1.496.037.418,00)	87,84
5 . 4.01 . 4.01.03 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.307.643.950,00	10.811.606.532,00	(1.496.037.418,00)	87,84
5 . 4.01 . 4.01.03 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.307.643.950,00	10.811.606.532,00	(1.496.037.418,00)	87,84
5 . 4.01 . 4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	24.937.450.500,00	22.457.348.724,00	(2.480.101.776,00)	90,05
5 . 4.01 . 4.01.04 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.315.473.000,00	2.121.485.680,00	(193.987.320,00)	91,62
5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.315.473.000,00	2.121.485.680,00	(193.987.320,00)	91,62

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.01 . 4.01.04 . 2	BELANJA LANGSUNG	22.621.977.500,00	20.335.863.044,00	(2.286.114.456,00)	89,89
5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.629.440.000,00	1.382.428.000,00	(247.012.000,00)	84,84
5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.906.537.500,00	17.935.139.244,00	(1.971.398.256,00)	90,10
5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 3	Belanja Modal	1.086.000.000,00	1.018.295.800,00	(67.704.200,00)	93,77
5 . 4.01 . 4.01.05	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	1.969.733.250,00	1.926.880.772,00	(42.852.478,00)	97,82
5 . 4.01 . 4.01.05 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.418.627.000,00	1.376.132.730,00	(42.494.270,00)	97,00
5 . 4.01 . 4.01.05 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.418.627.000,00	1.376.132.730,00	(42.494.270,00)	97,00
5 . 4.01 . 4.01.05 . 2	BELANJA LANGSUNG	551.106.250,00	550.748.042,00	(358.208,00)	99,94
5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 1	Belanja Pegawai	176.410.000,00	176.230.000,00	(180.000,00)	99,90
5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	374.696.250,00	374.518.042,00	(178.208,00)	99,95
5 . 4.01 . 4.01.06	KECAMATAN SITIUNG	2.519.000.000,00	2.448.661.425,00	(70.338.575,00)	97,21
5 . 4.01 . 4.01.06 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.054.900.000,00	1.984.868.125,00	(70.031.875,00)	96,59
5 . 4.01 . 4.01.06 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.054.900.000,00	1.984.868.125,00	(70.031.875,00)	96,59
5 . 4.01 . 4.01.06 . 2	BELANJA LANGSUNG	464.100.000,00	463.793.300,00	(306.700,00)	99,93
5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 . 1	Belanja Pegawai	143.910.000,00	143.910.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	295.190.000,00	294.883.300,00	(306.700,00)	99,90
5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 4.01.07	KECAMATAN KOTO BARU	2.319.356.589,00	2.270.448.938,00	(48.907.651,00)	97,89
5 . 4.01 . 4.01.07 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.723.394.000,00	1.678.175.313,00	(45.218.687,00)	97,38
5 . 4.01 . 4.01.07 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.723.394.000,00	1.678.175.313,00	(45.218.687,00)	97,38
5 . 4.01 . 4.01.07 . 2	BELANJA LANGSUNG	595.962.589,00	592.273.625,00	(3.688.964,00)	99,38
5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 . 1	Belanja Pegawai	248.640.000,00	245.860.000,00	(2.780.000,00)	98,88
5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	282.602.800,00	281.693.837,00	(908.963,00)	99,68
5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 . 3	Belanja Modal	64.719.789,00	64.719.788,00	(1,00)	100,00
5 . 4.01 . 4.01.08	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	2.127.996.400,00	2.060.442.328,00	(67.554.072,00)	96,83
5 . 4.01 . 4.01.08 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.653.280.000,00	1.588.629.315,00	(64.650.685,00)	96,09
5 . 4.01 . 4.01.08 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.653.280.000,00	1.588.629.315,00	(64.650.685,00)	96,09
5 . 4.01 . 4.01.08 . 2	BELANJA LANGSUNG	474.716.400,00	471.813.013,00	(2.903.387,00)	99,39
5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 . 1	Belanja Pegawai	152.750.000,00	152.750.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	293.351.400,00	290.448.013,00	(2.903.387,00)	99,01
5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 . 3	Belanja Modal	28.615.000,00	28.615.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 4.01.09	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	1.915.916.400,00	1.873.675.398,00	(42.241.002,00)	97,80
5 . 4.01 . 4.01.09 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.447.934.000,00	1.408.234.582,00	(39.699.418,00)	97,26
5 . 4.01 . 4.01.09 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.447.934.000,00	1.408.234.582,00	(39.699.418,00)	97,26

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.01 . 4.01.09 . 2	BELANJA LANGSUNG	467.982.400,00	465.440.816,00	(2.541.584,00)	99,46
5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 1	Belanja Pegawai	151.230.000,00	151.230.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	286.252.400,00	283.861.191,00	(2.391.209,00)	99,16
5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 3	Belanja Modal	30.500.000,00	30.349.625,00	(150.375,00)	99,51
5 . 4.01 . 4.01.10	KECAMATAN TIMPEH	1.718.464.950,00	1.697.475.245,00	(20.989.705,00)	98,78
5 . 4.01 . 4.01.10 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.238.947.000,00	1.218.762.145,00	(20.184.855,00)	98,37
5 . 4.01 . 4.01.10 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.238.947.000,00	1.218.762.145,00	(20.184.855,00)	98,37
5 . 4.01 . 4.01.10 . 2	BELANJA LANGSUNG	479.517.950,00	478.713.100,00	(804.850,00)	99,83
5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.220.000,00	150.220.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	318.297.950,00	317.563.600,00	(734.350,00)	99,77
5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 3	Belanja Modal	11.000.000,00	10.929.500,00	(70.500,00)	99,36
5 . 4.01 . 4.01.11	KECAMATAN KOTO SALAK	1.826.329.100,00	1.775.522.659,00	(50.806.441,00)	97,22
5 . 4.01 . 4.01.11 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.277.125.000,00	1.226.406.652,00	(50.718.348,00)	96,03
5 . 4.01 . 4.01.11 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.277.125.000,00	1.226.406.652,00	(50.718.348,00)	96,03
5 . 4.01 . 4.01.11 . 2	BELANJA LANGSUNG	549.204.100,00	549.116.007,00	(88.093,00)	99,98
5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 1	Belanja Pegawai	170.010.000,00	169.960.000,00	(50.000,00)	99,97
5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	320.726.900,00	320.688.807,00	(38.093,00)	99,99
5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 3	Belanja Modal	58.467.200,00	58.467.200,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 4.01.12	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	1.630.329.500,00	1.592.251.599,00	(38.077.901,00)	97,66
5 . 4.01 . 4.01.12 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.110.129.000,00	1.074.436.020,00	(35.692.980,00)	96,78
5 . 4.01 . 4.01.12 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.110.129.000,00	1.074.436.020,00	(35.692.980,00)	96,78
5 . 4.01 . 4.01.12 . 2	BELANJA LANGSUNG	520.200.500,00	517.815.579,00	(2.384.921,00)	99,54
5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 . 1	Belanja Pegawai	153.190.000,00	152.050.000,00	(1.140.000,00)	99,26
5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	354.060.500,00	352.815.579,00	(1.244.921,00)	99,65
5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 . 3	Belanja Modal	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 4.01.13	KECAMATAN KOTO BESAR	2.033.485.644,00	1.939.501.382,00	(93.984.262,00)	95,38
5 . 4.01 . 4.01.13 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.469.260.000,00	1.376.314.038,00	(92.945.962,00)	93,67
5 . 4.01 . 4.01.13 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.469.260.000,00	1.376.314.038,00	(92.945.962,00)	93,67
5 . 4.01 . 4.01.13 . 2	BELANJA LANGSUNG	564.225.644,00	563.187.344,00	(1.038.300,00)	99,82
5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 1	Belanja Pegawai	156.250.000,00	156.250.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	393.075.644,00	392.037.344,00	(1.038.300,00)	99,74
5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 3	Belanja Modal	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 4.01.14	KECAMATAN PADANG LAWEH	1.543.971.871,00	1.517.687.796,00	(26.284.075,00)	98,30
5 . 4.01 . 4.01.14 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.090.163.000,00	1.065.602.531,00	(24.560.469,00)	97,75

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.01 . 4.01.14 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.090.163.000,00	1.065.602.531,00	(24.560.469,00)	97,75
5 . 4.01 . 4.01.14 . 2	BELANJA LANGSUNG	453.808.871,00	452.085.265,00	(1.723.606,00)	99,62
5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 1	Belanja Pegawai	138.940.000,00	137.720.000,00	(1.220.000,00)	99,12
5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	279.901.671,00	279.398.065,00	(503.606,00)	99,82
5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 3	Belanja Modal	34.967.200,00	34.967.200,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 4.01.15	KECAMATAN TIUMANG	1.895.559.250,00	1.822.363.687,00	(73.195.563,00)	96,14
5 . 4.01 . 4.01.15 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.332.772.000,00	1.261.157.475,00	(71.614.525,00)	94,63
5 . 4.01 . 4.01.15 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.332.772.000,00	1.261.157.475,00	(71.614.525,00)	94,63
5 . 4.01 . 4.01.15 . 2	BELANJA LANGSUNG	562.787.250,00	561.206.212,00	(1.581.038,00)	99,72
5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 1	Belanja Pegawai	206.050.000,00	205.550.000,00	(500.000,00)	99,76
5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	326.737.250,00	325.656.212,00	(1.081.038,00)	99,67
5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 4.01.16	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.297.088.750,00	1.218.945.932,00	(78.142.818,00)	93,98
5 . 4.01 . 4.01.16 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	769.333.000,00	707.493.394,00	(61.839.606,00)	91,96
5 . 4.01 . 4.01.16 . 1 . 1	Belanja Pegawai	769.333.000,00	707.493.394,00	(61.839.606,00)	91,96
5 . 4.01 . 4.01.16 . 2	BELANJA LANGSUNG	527.755.750,00	511.452.538,00	(16.303.212,00)	96,91
5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 . 1	Belanja Pegawai	169.900.000,00	161.460.000,00	(8.440.000,00)	95,03
5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	341.855.750,00	334.492.538,00	(7.363.212,00)	97,85
5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 . 3	Belanja Modal	16.000.000,00	15.500.000,00	(500.000,00)	96,88
5 . 4.02	Pengawasan	4.968.004.000,00	4.859.874.826,00	(108.129.174,00)	97,82
5 . 4.02 . 4.02.01	INSPEKTORAT KABUPATEN	4.968.004.000,00	4.859.874.826,00	(108.129.174,00)	97,82
5 . 4.02 . 4.02.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.850.802.000,00	2.778.090.667,00	(72.711.333,00)	97,45
5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.850.802.000,00	2.778.090.667,00	(72.711.333,00)	97,45
5 . 4.02 . 4.02.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.117.202.000,00	2.081.784.159,00	(35.417.841,00)	98,33
5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.580.000,00	833.288.000,00	(17.292.000,00)	97,97
5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.266.622.000,00	1.248.496.159,00	(18.125.841,00)	98,57
5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.03	Perencanaan	8.220.226.300,00	8.020.123.051,00	(200.103.249,00)	97,57
5 . 4.03 . 4.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	152.000.000,00	151.870.350,00	(129.650,00)	99,91
5 . 4.03 . 4.01.02 . 2	BELANJA LANGSUNG	152.000.000,00	151.870.350,00	(129.650,00)	99,91
5 . 4.03 . 4.01.02 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	117.870.350,00	(129.650,00)	99,89
5 . 4.03 . 4.01.02 . 2 . 3	Belanja Modal	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.068.226.300,00	7.868.252.701,00	(199.973.599,00)	97,52
5 . 4.03 . 4.03.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.001.134.000,00	2.918.129.589,00	(83.004.411,00)	97,23

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.03 . 4.03.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.001.134.000,00	2.918.129.589,00	(83.004.411,00)	97,23
5 . 4.03 . 4.03.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.067.092.300,00	4.950.123.112,00	(116.969.188,00)	97,69
5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.238.790.000,00	1.231.788.000,00	(7.002.000,00)	99,43
5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.620.162.300,00	3.512.155.384,00	(108.006.916,00)	97,02
5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 3	Belanja Modal	208.140.000,00	206.179.728,00	(1.960.272,00)	99,06
5 . 4.04	Keuangan	154.886.258.737,00	153.672.018.394,00	(1.214.240.343,00)	99,22
5 . 4.04 . 4.04.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	154.886.258.737,00	153.672.018.394,00	(1.214.240.343,00)	99,22
5 . 4.04 . 4.04.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	148.107.285.487,00	147.183.268.472,00	(924.017.015,00)	99,38
5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.690.453.897,00	11.762.916.066,00	(927.537.831,00)	92,69
5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 4	Belanja Hibah	11.234.100.000,00	12.357.501.489,00	1.123.401.489,00	110,00
5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	3.200.000.000,00	3.132.000.000,00	(68.000.000,00)	97,88
5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.188.000.000,00	3.170.650.000,00	(17.350.000,00)	99,46
5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	116.994.731.590,00	116.736.023.992,00	(258.707.598,00)	99,78
5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	24.176.925,00	(775.823.075,00)	3,02
5 . 4.04 . 4.04.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.778.973.250,00	6.488.749.922,00	(290.223.328,00)	95,72
5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.983.297.000,00	1.859.932.000,00	(123.365.000,00)	93,78
5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.180.176.250,00	4.025.992.922,00	(154.183.328,00)	96,31
5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 3	Belanja Modal	615.500.000,00	602.825.000,00	(12.675.000,00)	97,94
5 . 4.05	Kepegawaian	7.523.976.850,00	7.013.582.055,00	(510.394.795,00)	93,22
5 . 4.05 . 4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.523.976.850,00	7.013.582.055,00	(510.394.795,00)	93,22
5 . 4.05 . 4.05.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.293.514.000,00	4.015.373.731,00	(278.140.269,00)	93,52
5 . 4.05 . 4.05.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.293.514.000,00	4.015.373.731,00	(278.140.269,00)	93,52
5 . 4.05 . 4.05.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.230.462.850,00	2.998.208.324,00	(232.254.526,00)	92,81
5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	464.921.000,00	437.401.000,00	(27.520.000,00)	94,08
5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.719.091.850,00	2.514.357.324,00	(204.734.526,00)	92,47
5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 3	Belanja Modal	46.450.000,00	46.450.000,00	0,00	100,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 . 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
6 . 1.01	Pendidikan				
6 . 1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN				
6 . 1.01 . 1.01.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	252.649.085.098,77	252.649.085.098,77	0,00
6 . 1.01 . 1.01.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	252.649.085.098,77	252.649.085.098,77	0,00
6 . 1.02	Kesehatan				
6 . 1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN				
6 . 1.02 . 1.02.01 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	1.113.253.056,00	1.113.253.056,00	0,00
6 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	1.113.253.056,00	1.113.253.056,00	0,00
6 . 1.02 . 1.02.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	95.710.166.780,40	95.710.166.780,40	0,00
6 . 1.02 . 1.02.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	95.710.166.780,40	95.710.166.780,40	0,00
6 . 1.02 . 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				
6 . 1.02 . 1.02.02 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	7.437.104.106,00	7.437.104.106,00	0,00
6 . 1.02 . 1.02.02 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	7.437.104.106,00	7.437.104.106,00	0,00
6 . 1.02 . 1.02.02 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	38.406.920.295,00	38.406.920.295,00	0,00
6 . 1.02 . 1.02.02 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	38.406.920.295,00	38.406.920.295,00	0,00
6 . 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
6 . 1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
6 . 1.03 . 1.03.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	135.473.778.634,78	135.473.778.634,78	0,00
6 . 1.03 . 1.03.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	135.473.778.634,78	135.473.778.634,78	0,00
6 . 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
6 . 1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN				
6 . 1.04 . 1.04.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	6.709.201.311,93	6.709.201.311,93	0,00
6 . 1.04 . 1.04.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	6.709.201.311,93	6.709.201.311,93	0,00
6 . 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
6 . 1.05 . 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
6 . 1.05 . 1.05.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	8.287.220.631,00	8.287.220.631,00	0,00
6 . 1.05 . 1.05.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	8.287.220.631,00	8.287.220.631,00	0,00
6 . 1.06	Sosial				
6 . 1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KB				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6 . 1.06 . 1.06.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	10.052.743.261,00	10.052.743.261,00	0,00
6 . 1.06 . 1.06.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	10.052.743.261,00	10.052.743.261,00	0,00
6 . 1.06 . 1.06.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
6 . 1.06 . 1.06.02 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	2.018.544.319,00	2.018.544.319,00	0,00
6 . 1.06 . 1.06.02 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	2.018.544.319,00	2.018.544.319,00	0,00
6 . 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
6 . 2.03	Pangan				
6 . 2.03 . 2.03.01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN				
6 . 2.03 . 2.03.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	5.906.237.254,00	5.906.237.254,00	0,00
6 . 2.03 . 2.03.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	5.906.237.254,00	5.906.237.254,00	0,00
6 . 2.05	Lingkungan Hidup				
6 . 2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
6 . 2.05 . 2.05.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	6.034.492.939,00	6.034.492.939,00	0,00
6 . 2.05 . 2.05.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	6.034.492.939,00	6.034.492.939,00	0,00
6 . 2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil				
6 . 2.06 . 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
6 . 2.06 . 2.06.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	6.700.997.571,00	6.700.997.571,00	0,00
6 . 2.06 . 2.06.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	6.700.997.571,00	6.700.997.571,00	0,00
6 . 2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
6 . 2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
6 . 2.07 . 2.07.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	5.676.918.673,00	5.676.918.673,00	0,00
6 . 2.07 . 2.07.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	5.676.918.673,00	5.676.918.673,00	0,00
6 . 2.09	Perhubungan				
6 . 2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN				
6 . 2.09 . 2.09.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	6.131.430.794,00	6.131.430.794,00	0,00
6 . 2.09 . 2.09.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	6.131.430.794,00	6.131.430.794,00	0,00
6 . 2.10	Komunikasi dan Informatika				
6 . 2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
6 . 2.10 . 2.10.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	4.751.556.182,00	4.751.556.182,00	0,00
6 . 2.10 . 2.10.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	4.751.556.182,00	4.751.556.182,00	0,00
6 . 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
6 . 2.11 . 2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6 . 2.11 . 2.11.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	34.060.439.193,56	34.060.439.193,56	0,00
6 . 2.11 . 2.11.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	34.060.439.193,56	34.060.439.193,56	0,00
6 . 2.12	Penanaman Modal				
6 . 2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
6 . 2.12 . 2.12.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	3.427.269.094,00	3.427.269.094,00	0,00
6 . 2.12 . 2.12.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	3.427.269.094,00	3.427.269.094,00	0,00
6 . 2.16	Kebudayaan				
6 . 2.16 . 2.16.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA				
6 . 2.16 . 2.16.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	13.644.369.534,85	13.644.369.534,85	0,00
6 . 2.16 . 2.16.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	13.644.369.534,85	13.644.369.534,85	0,00
6 . 2.17	Perpustakaan				
6 . 2.17 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
6 . 2.17 . 2.17.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	3.945.824.819,00	3.945.824.819,00	0,00
6 . 2.17 . 2.17.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	3.945.824.819,00	3.945.824.819,00	0,00
6 . 3	Urusan Pilihan				
6 . 3.03	Pertanian				
6 . 3.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN				
6 . 3.03 . 3.03.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	25.503.645.547,30	25.503.645.547,30	0,00
6 . 3.03 . 3.03.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	25.503.645.547,30	25.503.645.547,30	0,00
6 . 3.08	Transmigrasi				
6 . 3.08 . 3.08.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				
6 . 3.08 . 3.08.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	4.214.610.119,00	4.214.610.119,00	0,00
6 . 3.08 . 3.08.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	4.214.610.119,00	4.214.610.119,00	0,00
6 . 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
6 . 4.01	Administrasi Pemerintahan				
6 . 4.01 . 4.01.01	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH				
6 . 4.01 . 4.01.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	567.690.766,00	567.690.766,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	567.690.766,00	567.690.766,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.02	SEKRETARIAT DAERAH				
6 . 4.01 . 4.01.02 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	45.117.605.912,00	45.117.605.912,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.02 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	45.117.605.912,00	45.117.605.912,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.03	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6 . 4.01 . 4.01.03 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	10.811.606.532,00	10.811.606.532,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.03 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	10.811.606.532,00	10.811.606.532,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.04	SEKRETARIAT DPRD				
6 . 4.01 . 4.01.04 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	22.457.348.724,00	22.457.348.724,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.04 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	22.457.348.724,00	22.457.348.724,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.05	KECAMATAN PULAU PUNJUNG				
6 . 4.01 . 4.01.05 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	1.911.255.772,00	1.911.255.772,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.05 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	1.911.255.772,00	1.911.255.772,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.07	KECAMATAN KOTO BARU				
6 . 4.01 . 4.01.07 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	2.266.831.938,00	2.266.831.938,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.07 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	2.266.831.938,00	2.266.831.938,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.08	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI				
6 . 4.01 . 4.01.08 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	2.047.331.078,00	2.047.331.078,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.08 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	2.047.331.078,00	2.047.331.078,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.09	KECAMATAN SEMBILAN KOTO				
6 . 4.01 . 4.01.09 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	1.872.425.398,00	1.872.425.398,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.09 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	1.872.425.398,00	1.872.425.398,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.10	KECAMATAN TIMPEH				
6 . 4.01 . 4.01.10 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	1.692.612.745,00	1.692.612.745,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.10 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	1.692.612.745,00	1.692.612.745,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.11	KECAMATAN KOTO SALAK				
6 . 4.01 . 4.01.11 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	1.770.182.659,00	1.770.182.659,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.11 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	1.770.182.659,00	1.770.182.659,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.12	KECAMATAN ASAM JUJUHAN				
6 . 4.01 . 4.01.12 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	1.592.251.599,00	1.592.251.599,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.12 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	1.592.251.599,00	1.592.251.599,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.13	KECAMATAN KOTO BESAR				
6 . 4.01 . 4.01.13 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	1.936.031.382,00	1.936.031.382,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.13 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	1.936.031.382,00	1.936.031.382,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.14	KECAMATAN PADANG LAWEH				
6 . 4.01 . 4.01.14 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	1.517.437.796,00	1.517.437.796,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.14 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	1.517.437.796,00	1.517.437.796,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6 . 4.01 . 4.01.15	KECAMATAN TIUMANG				
6 . 4.01 . 4.01.15 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	1.820.183.687,00	1.820.183.687,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.15 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	1.820.183.687,00	1.820.183.687,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.16	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
6 . 4.01 . 4.01.16 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	1.571.286.905,00	1.571.286.905,00	0,00
6 . 4.01 . 4.01.16 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	1.571.286.905,00	1.571.286.905,00	0,00
6 . 4.02	Pengawasan				
6 . 4.02 . 4.02.01	INSPEKTORAT KABUPATEN				
6 . 4.02 . 4.02.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	4.859.874.826,00	4.859.874.826,00	0,00
6 . 4.02 . 4.02.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	4.859.874.826,00	4.859.874.826,00	0,00
6 . 4.03	Perencanaan				
6 . 4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
6 . 4.03 . 4.03.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	7.868.252.701,00	7.868.252.701,00	0,00
6 . 4.03 . 4.03.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	7.868.252.701,00	7.868.252.701,00	0,00
6 . 4.04	Keuangan				
6 . 4.04 . 4.04.01	BADAN KEUANGAN DAERAH				
6 . 4.04 . 4.04.01 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	23.588.791.076,00	15.038.433.913,98	(8.550.357.162,02)	63,75
6 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	23.588.791.076,00	15.038.433.913,98	(8.550.357.162,02)	63,75
6 . 4.04 . 4.04.01 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	100,00
6 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	100,00
6 . 4.04 . 4.04.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	(794.325.174.565,91)	(794.325.174.565,91)	0,00
6 . 4.04 . 4.04.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	(794.325.174.565,91)	(794.325.174.565,91)	0,00
6 . 4.05	Kepegawaian				
6 . 4.05 . 4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
6 . 4.05 . 4.05.01 . 4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	7.013.582.055,00	7.013.582.055,00	0,00
6 . 4.05 . 4.05.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	7.013.582.055,00	7.013.582.055,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)

Pulau Punjung,



BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	28.206.400.000,00	32.238.533.000,00	4.032.133.000,00	114,30	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.000.000,00	91.933.000,00	51.933.000,00	229,83	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	40.000.000,00	91.933.000,00	51.933.000,00	229,83	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.166.400.000,00	32.146.600.000,00	3.980.200.000,00	114,13	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	28.166.400.000,00	32.146.600.000,00	3.980.200.000,00	114,13	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	292.770.673.077,75	284.887.618.098,77	(7.883.054.978,98)	97,31	Kemendikbud RI Nomor 364/P/2019 Permendikbud RI Nomor 364/P/2019 Permendikbud Nomor 364/P/2019 Permendikbudn Nomor 364/P/2019 Permendikbud Nomor 364/P/2019 Permendikbud 364/P/2019 Permendikbud Nomor 364/P/2019 Permendikbud 364/P/2019 Permendikbud Nomor 364/P/2019
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	209.470.750.754,75	202.096.891.171,00	(7.373.859.583,75)	96,48	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	209.470.750.754,75	202.096.891.171,00	(7.373.859.583,75)	96,48	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	83.299.922.323,00	82.790.726.927,77	(509.195.395,23)	99,39	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.324.362.600,00	3.237.634.041,00	(86.728.559,00)	97,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	174.000.000,00	144.744.659,00	(29.255.341,00)	83,19	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.000.000,00	144.744.659,00	(29.255.341,00)	83,19	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	2.366.900.000,00	2.314.100.000,00	(52.800.000,00)	97,77	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.246.000.000,00	2.203.820.000,00	(42.180.000,00)	98,12	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.900.000,00	110.280.000,00	(10.620.000,00)	91,22	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	37.875.000,00	37.815.000,00	(60.000,00)	99,84	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.875.000,00	37.815.000,00	(60.000,00)	99,84	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	162.441.700,00	161.208.000,00	(1.233.700,00)	99,24	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.441.700,00	161.208.000,00	(1.233.700,00)	99,24	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	39.470.000,00	39.389.000,00	(81.000,00)	99,79	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.470.000,00	39.389.000,00	(81.000,00)	99,79	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	59.994.000,00	59.988.000,00	(6.000,00)	99,99	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.994.000,00	59.988.000,00	(6.000,00)	99,99	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	364.982.400,00	364.885.459,00	(96.941,00)	99,97	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	364.982.400,00	364.885.459,00	(96.941,00)	99,97	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 35	<i>Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset</i>	71.499.500,00	68.303.923,00	(3.195.577,00)	95,53	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 01 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.499.500,00	68.303.923,00	(3.195.577,00)	95,53	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	856.985.600,00	838.566.100,00	(18.419.500,00)	97,85	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	600.000.000,00	593.000.000,00	(7.000.000,00)	98,83	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	600.000.000,00	593.000.000,00	(7.000.000,00)	98,83	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	105.000.000,00	104.800.000,00	(200.000,00)	99,81	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	105.000.000,00	104.800.000,00	(200.000,00)	99,81	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	151.985.600,00	140.766.100,00	(11.219.500,00)	92,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.985.600,00	140.766.100,00	(11.219.500,00)	92,62	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.402.044.050,00	2.155.164.092,50	(246.879.957,50)	89,72	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 09	<i>Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir</i>	165.130.950,00	164.081.150,00	(1.049.800,00)	99,36	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.633.750,00	105.171.750,00	(462.000,00)	99,56	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	59.497.200,00	58.909.400,00	(587.800,00)	99,01	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 57	<i>Pelatihan kompetensi tenaga pendidik</i>	30.857.000,00	30.070.000,00	(787.000,00)	97,45	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.857.000,00	23.070.000,00	(787.000,00)	96,70	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 70	<i>Jambore PAUD</i>	27.703.000,00	27.634.025,00	(68.975,00)	99,75	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.203.000,00	25.134.025,00	(68.975,00)	99,73	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 78	<i>Operasional HIMPAUDI</i>	79.793.450,00	78.106.950,00	(1.686.500,00)	97,89	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.793.450,00	48.106.950,00	(1.686.500,00)	96,61	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 79	<i>Pengadaan Alat Bermain PAUD</i>	154.223.000,00	153.823.000,00	(400.000,00)	99,74	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.223.000,00	153.823.000,00	(400.000,00)	99,74	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 80	<i>Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)</i>	29.880.000,00	29.880.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.880.000,00	29.880.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 81	<i>Bantuan Operasional Penilik PAUD Kab. Dharmasraya</i>	36.350.000,00	35.853.600,00	(496.400,00)	98,63	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.350.000,00	35.853.600,00	(496.400,00)	98,63	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 82	<i>Apresiasi PTK PAUDNi Berprestasi</i>	47.839.500,00	47.645.400,00	(194.100,00)	99,59	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.839.500,00	42.645.400,00	(194.100,00)	99,55	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 83	<i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)</i>	630.960.000,00	406.720.817,50	(224.239.182,50)	64,46	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 83 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	630.960.000,00	406.720.817,50	(224.239.182,50)	64,46	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 84	<i>Pengembangan Akreditasi PAUD dan PNF</i>	23.327.150,00	23.327.150,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.327.150,00	23.327.150,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 85	<i>Penambahan ruang kelas sekolah (DAK)</i>	721.892.000,00	713.267.000,00	(8.625.000,00)	98,81	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 85 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	721.892.000,00	713.267.000,00	(8.625.000,00)	98,81	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 87	<i>Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK (DAK)</i>	242.115.000,00	233.610.000,00	(8.505.000,00)	96,49	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 87 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	242.115.000,00	233.610.000,00	(8.505.000,00)	96,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 88	Penambahan ruang kelas baru TK	211.973.000,00	211.145.000,00	(828.000,00)	99,61	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.973.000,00	211.145.000,00	(828.000,00)	99,61	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	66.102.669.073,00	66.577.175.253,27	474.506.180,27	100,72	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah SD (DAK)	1.710.331.200,00	1.684.928.991,00	(25.402.209,00)	98,51	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.710.331.200,00	1.684.928.991,00	(25.402.209,00)	98,51	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	1.543.172.250,00	1.525.642.750,00	(17.529.500,00)	98,86	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	278.959.750,00	277.498.750,00	(1.461.000,00)	99,48	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.264.212.500,00	1.248.144.000,00	(16.068.500,00)	98,73	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 11	Pembangunan ruang ibadah	26.500.000,00	26.350.000,00	(150.000,00)	99,43	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.500.000,00	26.350.000,00	(150.000,00)	99,43	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	65.000.000,00	64.700.000,00	(300.000,00)	99,54	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.000.000,00	64.700.000,00	(300.000,00)	99,54	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 19	Sharing Anggaran Pengadaan Mobiler SD	20.000.000,00	19.478.000,00	(522.000,00)	97,39	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	19.478.000,00	(522.000,00)	97,39	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	70.500.000,00	70.144.000,00	(356.000,00)	99,50	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.500.000,00	70.144.000,00	(356.000,00)	99,50	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah	20.000.000,00	19.940.000,00	(60.000,00)	99,70	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.940.000,00	(60.000,00)	99,70	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 62	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	154.093.765,00	151.269.900,00	(2.823.865,00)	98,17	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.336.775,00	102.512.910,00	(2.823.865,00)	97,32	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.756.990,00	48.756.990,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	28.496.000.158,00	29.783.812.651,00	1.287.812.493,00	104,52	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.844.190.298,00	21.297.396.878,00	(546.793.420,00)	97,50	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.651.809.860,00	8.486.415.773,00	1.834.605.913,00	127,58	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 84	Pembinaan dan Olimpiade SAINS (OSN) SMP	49.080.000,00	48.202.500,00	(877.500,00)	98,21	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.980.000,00	35.102.500,00	(877.500,00)	97,56	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 85	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD *)	38.429.900,00	38.184.900,00	(245.000,00)	99,36	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	8.940.000,00	(60.000,00)	99,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.429.900,00	29.244.900,00	(185.000,00)	99,37	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 86	<i>Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP *)</i>	39.910.000,00	39.714.500,00	(195.500,00)	99,51	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.160.000,00	26.964.500,00	(195.500,00)	99,28	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 88	<i>Pembinaan dan Lomba Olimpiade SAINS (OSN) SD</i>	49.170.000,00	48.544.000,00	(626.000,00)	98,73	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.300.000,00	13.200.000,00	(100.000,00)	99,25	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.870.000,00	35.344.000,00	(526.000,00)	98,53	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 119	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (DAK TAHUN 2019)</i>	899.845.000,00	591.331.182,03	(308.513.817,97)	65,71	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	899.845.000,00	591.331.182,03	(308.513.817,97)	65,71	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 122	<i>Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra UASDA/UASDA SD/MI</i>	383.471.000,00	331.466.136,00	(52.004.864,00)	86,44	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 122 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.400.000,00	13.200.000,00	(14.200.000,00)	48,18	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	325.371.000,00	287.615.000,00	(37.756.000,00)	88,40	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 122 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.700.000,00	30.651.136,00	(48.864,00)	99,84	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 123	<i>Pelatihan Kurikulum 2013 SD</i>	173.070.000,00	164.289.000,00	(8.781.000,00)	94,93	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 123 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.950.000,00	44.100.000,00	(850.000,00)	98,11	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.120.000,00	70.460.000,00	(7.660.000,00)	90,19	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	49.729.000,00	(271.000,00)	99,46	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 125	<i>Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD</i>	50.000.000,00	49.913.000,00	(87.000,00)	99,83	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.913.000,00	(87.000,00)	99,83	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 126	<i>Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP</i>	281.350.000,00	248.533.500,00	(32.816.500,00)	88,34	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 126 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.100.000,00	19.800.000,00	(9.300.000,00)	68,04	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.250.000,00	228.733.500,00	(23.516.500,00)	90,68	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 128	<i>Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP</i>	39.895.000,00	39.568.000,00	(327.000,00)	99,18	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 128 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.495.000,00	28.168.000,00	(327.000,00)	98,85	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 129	<i>Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum SMP (DAK)</i>	1.362.345.000,00	1.360.363.580,00	(1.981.420,00)	99,85	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 129 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.362.345.000,00	1.360.363.580,00	(1.981.420,00)	99,85	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 130	<i>Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK)</i>	1.534.085.000,00	1.533.602.240,00	(482.760,00)	99,97	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.534.085.000,00	1.533.602.240,00	(482.760,00)	99,97	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 131	<i>Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK)</i>	4.577.250.000,00	4.570.289.443,31	(6.960.556,69)	99,85	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.577.250.000,00	4.570.289.443,31	(6.960.556,69)	99,85	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 132	<i>Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)</i>	9.195.310.000,00	9.188.744.374,00	(6.565.626,00)	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.195.310.000,00	9.188.744.374,00	(6.565.626,00)	99,93	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 133	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SD (DAK)	441.735.000,00	439.641.530,00	(2.093.470,00)	99,53	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	441.735.000,00	439.641.530,00	(2.093.470,00)	99,53	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 134	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	198.000.000,00	197.468.158,14	(531.841,86)	99,73	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 134 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	198.000.000,00	197.468.158,14	(531.841,86)	99,73	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 135	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah (DAK)	290.385.000,00	264.932.320,00	(25.452.680,00)	91,23	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 135 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	290.385.000,00	264.932.320,00	(25.452.680,00)	91,23	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 136	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SD (DAK)	220.735.000,00	218.930.500,00	(1.804.500,00)	99,18	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 136 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	220.735.000,00	218.930.500,00	(1.804.500,00)	99,18	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 137	Pembangunan perpustakaan SMP (DAK)	652.580.000,00	651.541.496,00	(1.038.504,00)	99,84	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 137 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	652.580.000,00	651.541.496,00	(1.038.504,00)	99,84	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 138	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD (DAK)	1.956.360.800,00	1.850.498.250,00	(105.862.550,00)	94,59	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.956.360.800,00	1.850.498.250,00	(105.862.550,00)	94,59	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 139	Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SD (DAK)	214.590.000,00	213.566.280,00	(1.023.720,00)	99,52	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 139 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	214.590.000,00	213.566.280,00	(1.023.720,00)	99,52	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 140	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah (DAK)	2.284.095.000,00	2.283.098.710,00	(996.290,00)	99,96	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 140 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.284.095.000,00	2.283.098.710,00	(996.290,00)	99,96	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 142	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SMP (DAK)	472.735.000,00	469.574.990,00	(3.160.010,00)	99,33	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	472.735.000,00	469.574.990,00	(3.160.010,00)	99,33	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 143	Penambahan ruang kelas sekolah SMP (DAK)	1.343.155.000,00	1.341.988.480,00	(1.166.520,00)	99,91	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 143 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.343.155.000,00	1.341.988.480,00	(1.166.520,00)	99,91	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 144	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SMP (DAK)	1.819.260.000,00	1.818.296.510,00	(963.490,00)	99,95	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 144 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.819.260.000,00	1.818.296.510,00	(963.490,00)	99,95	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 145	Pengadaan Buku Perpustakaan SMP (DAK)	312.110.000,00	303.656.604,79	(8.453.395,21)	97,29	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 145 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	312.110.000,00	303.656.604,79	(8.453.395,21)	97,29	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 146	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP (DAK)	4.251.200.000,00	4.065.603.997,00	(185.596.003,00)	95,63	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 146 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.251.200.000,00	4.065.603.997,00	(185.596.003,00)	95,63	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 147	Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SMP (DAK)	673.360.000,00	673.104.780,00	(255.220,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 147 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	673.360.000,00	673.104.780,00	(255.220,00)	99,96	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 148	Peningkatan Kualitas Siswa SMP Unggul	193.560.000,00	186.260.000,00	(7.300.000,00)	96,23	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 148 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	126.300.000,00	126.150.000,00	(150.000,00)	99,88	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 148 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.260.000,00	60.110.000,00	(7.150.000,00)	89,37	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18	Program Pendidikan Non Formal	461.142.000,00	424.376.800,00	(36.765.200,00)	92,03	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	25.001.000,00	24.549.500,00	(451.500,00)	98,19	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.001.000,00	24.549.500,00	(451.500,00)	98,19	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 21	Operasinal Mobil Pintar	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 22	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	222.987.000,00	211.506.000,00	(11.481.000,00)	94,85	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.500.000,00	49.394.000,00	(106.000,00)	99,79	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.487.000,00	162.112.000,00	(11.375.000,00)	93,44	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 23	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	79.935.000,00	74.115.000,00	(5.820.000,00)	92,72	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.985.000,00	31.385.000,00	(600.000,00)	98,12	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.950.000,00	42.730.000,00	(5.220.000,00)	89,11	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 24	Penyelenggaraan Paket A setara SD	29.120.000,00	25.707.300,00	(3.412.700,00)	88,28	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	5.700.000,00	(500.000,00)	91,94	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.920.000,00	20.007.300,00	(2.912.700,00)	87,29	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 25	Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	46.349.000,00	30.749.000,00	(15.600.000,00)	66,34	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.849.000,00	24.249.000,00	(15.600.000,00)	60,85	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 26	Pelaksanaan Pendidikan Karakter PAUD	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.199.739.000,00	5.642.803.091,00	(556.935.909,00)	91,02	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	34.900.000,00	33.819.138,00	(1.080.862,00)	96,90	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	23.819.138,00	(1.080.862,00)	95,66	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	58.929.000,00	53.010.000,00	(5.919.000,00)	89,96	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	7.500.000,00	(4.000.000,00)	65,22	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.429.000,00	45.510.000,00	(1.919.000,00)	95,95	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 18	Gebyar Pendidikan	47.312.500,00	44.100.250,00	(3.212.250,00)	93,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.812.500,00	36.600.250,00	(3.212.250,00)	91,93	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 24	<i>Lomba-lomba Kreatifitas Guru</i>	33.217.000,00	31.717.000,00	(1.500.000,00)	95,48	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	7.500.000,00	(1.500.000,00)	83,33	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.217.000,00	24.217.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 25	<i>Lomba Guru Berprestasi</i>	49.842.000,00	45.469.100,00	(4.372.900,00)	91,23	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.162.000,00	40.789.100,00	(4.372.900,00)	90,32	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 26	<i>Pelatihan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</i>	30.000.000,00	26.503.017,00	(3.496.983,00)	88,34	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	22.503.017,00	(3.496.983,00)	86,55	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 27	<i>Sosialisasi dan Diseminasi Kurikulum 2013 (SD)</i>	46.675.000,00	36.880.000,00	(9.795.000,00)	79,01	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	29.080.000,00	(4.520.000,00)	86,55	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.075.000,00	7.800.000,00	(5.275.000,00)	59,66	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 28	<i>Pelatihan Operator sekolah</i>	30.010.000,00	15.929.000,00	(14.081.000,00)	53,08	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	2.250.000,00	(8.150.000,00)	21,63	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.610.000,00	13.679.000,00	(5.931.000,00)	69,76	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 29	<i>Pembinaan UKS</i>	42.252.500,00	41.996.211,00	(256.289,00)	99,39	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.252.500,00	36.996.211,00	(256.289,00)	99,31	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 30	<i>Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan dan PGRI</i>	155.040.000,00	50.297.875,00	(104.742.125,00)	32,44	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.040.000,00	50.297.875,00	(104.742.125,00)	32,44	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 31	<i>Pembinaan PTK Berprestasi TK, SD, SMP</i>	53.550.500,00	53.493.250,00	(57.250,00)	99,89	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.550.500,00	41.493.250,00	(57.250,00)	99,86	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 32	<i>Peningkatan Kapasitas Kepala sekolah dan Pengawas</i>	55.065.000,00	49.237.600,00	(5.827.400,00)	89,42	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	6.200.000,00	(2.050.000,00)	75,15	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.815.000,00	43.037.600,00	(3.777.400,00)	91,93	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 34	<i>Lomba Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (OSN)</i>	44.996.500,00	44.677.250,00	(319.250,00)	99,29	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.016.500,00	42.697.250,00	(319.250,00)	99,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 35	<i>AnekaTunjangan Guru Tingkat PAUD, SD dan SMP</i>	5.420.003.500,00	5.025.512.900,00	(394.490.600,00)	92,72	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.378.400.000,00	4.985.700.000,00	(392.700.000,00)	92,70	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.603.500,00	39.812.900,00	(1.790.600,00)	95,70	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 36	<i>Pembinaan Kelompok Kerja KKG dan MGMP</i>	97.945.500,00	90.160.500,00	(7.785.000,00)	92,05	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.445.500,00	82.660.500,00	(7.785.000,00)	91,39	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.952.980.000,00	3.915.007.550,00	(37.972.450,00)	99,04	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 30	<i>Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru</i>	167.580.000,00	159.135.550,00	(8.444.450,00)	94,96	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.060.000,00	46.740.000,00	(4.320.000,00)	91,54	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.520.000,00	112.395.550,00	(4.124.450,00)	96,46	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 36	<i>Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMP</i>	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 37	<i>Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD</i>	2.175.000.000,00	2.175.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000.000,00	2.175.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 38	<i>Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK</i>	320.000.000,00	319.975.000,00	(25.000,00)	99,99	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	159.975.000,00	(25.000,00)	99,98	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 39	<i>Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah</i>	61.900.000,00	61.750.000,00	(150.000,00)	99,76	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.900.000,00	61.750.000,00	(150.000,00)	99,76	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 40	<i>Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Neger/ DAK 2018</i>	536.865.000,00	507.764.600,00	(29.100.400,00)	94,58	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	536.865.000,00	507.764.600,00	(29.100.400,00)	94,58	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 41	<i>Penyusunan Profil dan Data Pokok Pendidikan</i>	31.635.000,00	31.382.400,00	(252.600,00)	99,20	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.635.000,00	31.382.400,00	(252.600,00)	99,20	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(264.564.273.077,75)	(252.649.085.098,77)	11.915.187.978,98	95,50	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020						
Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 1 . 02		Kesehatan				
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01		DINAS KESEHATAN				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	11.410.827.000,00	10.193.506.060,00	(1.217.320.940,00)	89,33	Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelaya Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.410.827.000,00	10.193.506.060,00	(1.217.320.940,00)	89,33	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	254.680.000,00	180.307.000,00	(74.373.000,00)	70,80	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.156.147.000,00	10.013.199.060,00	(1.142.947.940,00)	89,75	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	125.857.187.632,00	118.976.460.846,00	(6.880.726.786,00)	94,53	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	42.317.468.000,00	42.080.072.639,00	(237.395.361,00)	99,44	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	42.317.468.000,00	42.080.072.639,00	(237.395.361,00)	99,44	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	83.539.719.632,00	76.896.388.207,00	(6.643.331.425,00)	92,05	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.767.405.250,00	4.718.353.393,00	(49.051.857,00)	98,97	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	92.304.000,00	80.953.452,00	(11.350.548,00)	87,70	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.304.000,00	80.953.452,00	(11.350.548,00)	87,70	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.000.000,00	12.281.050,00	(718.950,00)	94,47	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.281.050,00	(718.950,00)	94,47	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4.208.065.000,00	4.171.593.000,00	(36.472.000,00)	99,13	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.785.925.000,00	3.772.415.000,00	(13.510.000,00)	99,64	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	422.140.000,00	399.178.000,00	(22.962.000,00)	94,56	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	104.489.000,00	104.464.250,00	(24.750,00)	99,98	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.489.000,00	104.464.250,00	(24.750,00)	99,98	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	70.000.000,00	69.990.000,00	(10.000,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.990.000,00	(10.000,00)	99,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	5.000.000,00	4.980.000,00	(20.000,00)	99,60	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.980.000,00	(20.000,00)	99,60	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	13.176.000,00	13.168.000,00	(8.000,00)	99,94	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.176.000,00	13.168.000,00	(8.000,00)	99,94	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	16.380.000,00	16.370.000,00	(10.000,00)	99,94	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.380.000,00	16.370.000,00	(10.000,00)	99,94	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	244.991.250,00	244.553.641,00	(437.609,00)	99,82	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.991.250,00	244.553.641,00	(437.609,00)	99,82	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.109.150.000,00	1.020.712.983,00	(88.437.017,00)	92,03	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	750.000.000,00	663.289.000,00	(86.711.000,00)	88,44	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	750.000.000,00	663.289.000,00	(86.711.000,00)	88,44	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	44.700.000,00	44.405.000,00	(295.000,00)	99,34	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.700.000,00	44.405.000,00	(295.000,00)	99,34	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	125.000.000,00	124.586.800,00	(413.200,00)	99,67	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	124.586.800,00	(413.200,00)	99,67	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	189.450.000,00	188.432.183,00	(1.017.817,00)	99,46	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.450.000,00	188.432.183,00	(1.017.817,00)	99,46	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	31.315.250,00	31.315.250,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 03 . 06	<i>Evaluasi Kinerja Pegawai</i>	12.015.250,00	12.015.250,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.015.250,00	12.015.250,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 03 . 07	<i>Penilaian Angka kredit tenaga fungsional kesehatan</i>	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24.690.000,00	24.268.000,00	(422.000,00)	98,29	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 34	<i>Kegiatan Pelatihan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional</i>	21.690.000,00	21.268.000,00	(422.000,00)	98,05	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.690.000,00	21.268.000,00	(422.000,00)	98,05	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.237.076.002,00	2.209.791.685,00	(27.284.317,00)	98,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01	<i>Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</i>	2.155.611.002,00	2.132.531.685,00	(23.079.317,00)	98,93	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.155.611.002,00	2.132.531.685,00	(23.079.317,00)	98,93	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 05	<i>Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</i>	81.465.000,00	77.260.000,00	(4.205.000,00)	94,84	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.465.000,00	77.260.000,00	(4.205.000,00)	94,84	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	225.205.000,00	211.296.000,00	(13.909.000,00)	93,82	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16	<i>Pelayanan Transfusi Darah di Rumah sakitdan Puskesmas Ponet/Rawatan</i>	27.115.000,00	26.973.500,00	(141.500,00)	99,48	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.115.000,00	26.973.500,00	(141.500,00)	99,48	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 53	<i>Program kesehatan jiwa</i>	64.380.000,00	60.060.500,00	(4.319.500,00)	93,29	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.380.000,00	60.060.500,00	(4.319.500,00)	93,29	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 62	<i>Pembinaan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat</i>	133.710.000,00	124.262.000,00	(9.448.000,00)	92,93	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.710.000,00	124.262.000,00	(9.448.000,00)	92,93	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	231.391.000,00	172.910.000,00	(58.481.000,00)	74,73	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 01	<i>Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan</i>	55.839.000,00	43.100.000,00	(12.739.000,00)	77,19	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.839.000,00	43.100.000,00	(12.739.000,00)	77,19	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02	<i>Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya</i>	175.552.000,00	129.810.000,00	(45.742.000,00)	73,94	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.552.000,00	129.810.000,00	(45.742.000,00)	73,94	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	213.170.000,00	197.491.000,00	(15.679.000,00)	92,64	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 04	<i>Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan</i>	45.725.000,00	43.425.500,00	(2.299.500,00)	94,97	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.725.000,00	43.425.500,00	(2.299.500,00)	94,97	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 16	<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka Pengembangan PHBS dan Nagari Siaga</i>	59.795.000,00	57.045.000,00	(2.750.000,00)	95,40	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.795.000,00	57.045.000,00	(2.750.000,00)	95,40	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 18	<i>Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok (DAK Non Fisik)</i>	30.170.000,00	26.735.500,00	(3.434.500,00)	88,62	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.170.000,00	26.735.500,00	(3.434.500,00)	88,62	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 20	<i>Orientasi Krida Saka Bhakti Husada (DAK Non Fisik)</i>	77.480.000,00	70.285.000,00	(7.195.000,00)	90,71	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.480.000,00	70.285.000,00	(7.195.000,00)	90,71	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	71.000.000,00	64.151.500,00	(6.848.500,00)	90,35	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 17	<i>Revitalisasi Nagari Sadar Gizi (DAK Non Fisik)</i>	71.000.000,00	64.151.500,00	(6.848.500,00)	90,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	64.151.500,00	(6.848.500,00)	90,35	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	183.000.000,00	182.336.500,00	(663.500,00)	99,64	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01	<i>Pengkajian pengembangan lingkungan sehat</i>	52.115.000,00	51.949.000,00	(166.000,00)	99,68	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.115.000,00	51.949.000,00	(166.000,00)	99,68	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 13	<i>Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat (DAK Non Fisik)</i>	130.885.000,00	130.387.500,00	(497.500,00)	99,62	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.685.000,00	105.187.500,00	(497.500,00)	99,53	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	9.893.512.803,00	8.459.647.405,00	(1.433.865.398,00)	85,51	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 08	<i>Peningkatan imunisasi</i>	58.810.000,00	55.101.250,00	(3.708.750,00)	93,69	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.810.000,00	55.101.250,00	(3.708.750,00)	93,69	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 12	<i>Pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang</i>	41.290.000,00	38.864.250,00	(2.425.750,00)	94,13	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.290.000,00	38.864.250,00	(2.425.750,00)	94,13	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 14	<i>Penatalaksanaan penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB) *)</i>	4.489.960.000,00	3.677.948.406,00	(812.011.594,00)	81,91	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.084.040.000,00	728.060.000,00	(355.980.000,00)	67,16	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.078.020.000,00	1.622.038.406,00	(455.981.594,00)	78,06	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.327.900.000,00	1.327.850.000,00	(50.000,00)	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 27	<i>Peningkatan surveilans</i>	5.089.967.803,00	4.489.567.249,00	(600.400.554,00)	88,20	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.089.967.803,00	4.489.567.249,00	(600.400.554,00)	88,20	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 28	<i>Pelayanan Kesehatan Matra</i>	6.695.000,00	6.695.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.695.000,00	6.695.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 29	<i>Pengendalian penyakit tidak menular</i>	67.270.000,00	59.667.000,00	(7.603.000,00)	88,70	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.270.000,00	59.667.000,00	(7.603.000,00)	88,70	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 31	<i>Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular</i>	139.520.000,00	131.804.250,00	(7.715.750,00)	94,47	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.520.000,00	131.804.250,00	(7.715.750,00)	94,47	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.461.796.250,00	446.637.904,00	(1.015.158.346,00)	30,55	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 03	<i>Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan</i>	38.871.250,00	38.871.250,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.871.250,00	38.871.250,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 07	<i>Akreditasi Puskesmas</i>	1.320.825.000,00	305.690.000,00	(1.015.135.000,00)	23,14	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.320.825.000,00	305.690.000,00	(1.015.135.000,00)	23,14	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 15	<i>Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan</i>	100.000.000,00	99.976.654,00	(23.346,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.976.654,00	(23.346,00)	99,98	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 18	Pengelolaan perizinan bidang kesehatan (sarana)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	17.289.249.998,00	16.310.281.307,50	(978.968.690,50)	94,34	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 01	Pembangunan puskesmas	3.010.000.000,00	2.655.168.250,00	(354.831.750,00)	88,21	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.816.250,00	(183.750,00)	98,16	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000.000,00	2.645.352.000,00	(354.648.000,00)	88,18	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 22	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	50.735.000,00	0,00	(50.735.000,00)	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.735.000,00	0,00	(50.735.000,00)	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)	12.410.514.998,00	11.912.468.457,50	(498.046.540,50)	95,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	37.856.539,00	(2.143.461,00)	94,64	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.370.514.998,00	11.874.611.918,50	(495.903.079,50)	95,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 35	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.818.000.000,00	1.742.644.600,00	(75.355.400,00)	95,86	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.818.000.000,00	1.742.644.600,00	(75.355.400,00)	95,86	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	13.216.116.035,00	12.583.668.791,65	(632.447.243,35)	95,21	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 01	Pembangunan rumah sakit	5.382.588.193,00	4.755.815.626,00	(626.772.567,00)	88,36	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.382.588.193,00	4.755.815.626,00	(626.772.567,00)	88,36	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 29	Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit	712.931.296,50	709.709.294,65	(3.222.001,85)	99,55	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	712.931.296,50	709.709.294,65	(3.222.001,85)	99,55	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 30	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	7.120.596.545,50	7.118.143.871,00	(2.452.674,50)	99,97	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.120.596.545,50	7.118.143.871,00	(2.452.674,50)	99,97	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	7.850.415.000,00	7.839.936.300,00	(10.478.700,00)	99,87	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 28 . 07	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	7.850.415.000,00	7.839.936.300,00	(10.478.700,00)	99,87	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.850.415.000,00	7.839.936.300,00	(10.478.700,00)	99,87	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	52.452.000,00	32.182.000,00	(20.270.000,00)	61,36	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 10	Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia (DAK Non Fisik)	52.452.000,00	32.182.000,00	(20.270.000,00)	61,36	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.452.000,00	32.182.000,00	(20.270.000,00)	61,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	278.085.000,00	248.012.500,00	(30.072.500,00)	89,19	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 13	<i>Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal</i>	278.085.000,00	248.012.500,00	(30.072.500,00)	89,19	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	278.085.000,00	248.012.500,00	(30.072.500,00)	89,19	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	13.297.953.544,00	11.367.615.178,85	(1.930.338.365,15)	85,48	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 20	<i>Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT LABKESDA</i>	460.074.395,00	457.379.950,00	(2.694.445,00)	99,41	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	323.299.395,00	321.062.450,00	(2.236.945,00)	99,31	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	136.775.000,00	136.317.500,00	(457.500,00)	99,67	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 21	<i>Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT/ Instalasi Gudang Farmasi</i>	187.930.000,00	184.158.281,00	(3.771.719,00)	97,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.821.000,00	175.058.281,00	(3.762.719,00)	97,90	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.109.000,00	9.100.000,00	(9.000,00)	99,90	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 23	<i>Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)</i>	11.187.149.149,00	9.611.575.012,85	(1.575.574.136,15)	85,92	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.235.897.433,00	8.955.631.276,85	(1.280.266.156,15)	87,49	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	951.251.716,00	655.943.736,00	(295.307.980,00)	68,96	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 25	<i>Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Type D Sungai Rumbai</i>	662.800.000,00	614.582.481,00	(48.217.519,00)	92,73	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	148.842.000,00	148.832.000,00	(10.000,00)	99,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	480.958.000,00	432.752.781,00	(48.205.219,00)	89,98	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.000.000,00	32.997.700,00	(2.300,00)	99,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 26	<i>Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit</i>	800.000.000,00	499.919.454,00	(300.080.546,00)	62,49	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	388.865.000,00	261.420.865,00	(127.444.135,00)	67,23	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	383.740.000,00	215.525.589,00	(168.214.411,00)	56,16	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 41 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.395.000,00	22.973.000,00	(4.422.000,00)	83,86	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.351.500,00	18.351.500,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 01	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja</i>	18.351.500,00	18.351.500,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.351.500,00	18.351.500,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44	Program Jaminan Persalinan (Jampersal)	693.935.000,00	534.257.650,00	(159.677.350,00)	76,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 01	<i>Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas (DAK Non Fisik)</i>	693.935.000,00	534.257.650,00	(159.677.350,00)	76,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	693.935.000,00	534.257.650,00	(159.677.350,00)	76,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51	Program Bantuan Operasional kesehatan	10.394.450.000,00	10.223.171.359,00	(171.278.641,00)	98,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 01	Bantuan Operasional kesehatan (Manajemen) (DAK Non Fisik)	97.845.000,00	97.393.500,00	(451.500,00)	99,54	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.845.000,00	97.393.500,00	(451.500,00)	99,54	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 02	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Dareh (DAK)	620.000.000,00	598.974.449,00	(21.025.551,00)	96,61	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	536.000.000,00	514.974.449,00	(21.025.551,00)	96,08	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 03	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sialang (DAK)	829.667.000,00	817.447.000,00	(12.220.000,00)	98,53	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	745.667.000,00	733.447.000,00	(12.220.000,00)	98,36	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 04	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sitiung I (DAK)	760.000.000,00	749.609.300,00	(10.390.700,00)	98,63	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	676.000.000,00	665.609.300,00	(10.390.700,00)	98,46	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 05	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunung Medan (DAK)	740.000.000,00	736.250.000,00	(3.750.000,00)	99,49	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	656.000.000,00	652.250.000,00	(3.750.000,00)	99,43	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 06	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Timpeh (DAK)	835.000.000,00	821.995.074,00	(13.004.926,00)	98,44	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	751.000.000,00	737.995.074,00	(13.004.926,00)	98,27	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 07	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Padang Laweh(DAK)	810.000.000,00	806.718.238,00	(3.281.762,00)	99,59	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	726.000.000,00	722.718.238,00	(3.281.762,00)	99,55	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 08	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Beringin Sakti (DAK)	602.000.000,00	583.582.040,00	(18.417.960,00)	96,94	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	518.000.000,00	499.582.040,00	(18.417.960,00)	96,44	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 09	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Baru (DAK)	650.000.000,00	644.954.000,00	(5.046.000,00)	99,22	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	566.000.000,00	560.954.000,00	(5.046.000,00)	99,11	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 10	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tiumbang(DAK)	800.000.000,00	799.944.700,00	(55.300,00)	99,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	716.000.000,00	715.944.700,00	(55.300,00)	99,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 11	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sitiung II (DAK)	630.000.000,00	629.220.000,00	(780.000,00)	99,88	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	546.000.000,00	545.220.000,00	(780.000,00)	99,86	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 12	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Besar(DAK)	640.000.000,00	588.752.833,00	(51.247.167,00)	91,99	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	79.800.000,00	(4.200.000,00)	95,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	556.000.000,00	508.952.833,00	(47.047.167,00)	91,54	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 13	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Rumbai(DAK)	645.000.000,00	644.815.775,00	(184.225,00)	99,97	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	561.000.000,00	560.815.775,00	(184.225,00)	99,97	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 14	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Limau(DAK)	802.000.000,00	773.323.300,00	(28.676.700,00)	96,42	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	739.000.000,00	710.323.300,00	(28.676.700,00)	96,12	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 15	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Silago (DAK)	820.000.000,00	818.250.000,00	(1.750.000,00)	99,79	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	736.000.000,00	734.250.000,00	(1.750.000,00)	99,76	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 16	Bantuan Operasional Kesehatan (e-Logistik) Farmasi (DAK Non Fisik)	112.938.000,00	111.941.150,00	(996.850,00)	99,12	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.938.000,00	111.941.150,00	(996.850,00)	99,12	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(114.446.360.632,00)	(108.782.954.786,00)	5.663.405.846,00	95,05	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH					
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	831.002.168,80	831.002.168,80	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	831.002.168,80	831.002.168,80	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	831.002.168,80	831.002.168,80	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	45.012.500.000,00	45.472.675.614,00	460.175.614,00	101,02	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	45.012.500.000,00	45.472.675.614,00	460.175.614,00	101,02	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	12.500.000,00	11.230.800,00	(1.269.200,00)	89,85	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.000.000.000,00	45.461.444.814,00	461.444.814,00	101,03	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	106.809.243.415,00	105.264.952.667,00	(1.544.290.748,00)	98,55	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.569.340.000,00	21.486.112.062,00	(83.227.938,00)	99,61	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	21.569.340.000,00	21.486.112.062,00	(83.227.938,00)	99,61	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	85.239.903.415,00	83.778.840.605,00	(1.461.062.810,00)	98,29	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.241.079.450,00	1.241.079.450,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	974.102.450,00	974.102.450,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	974.102.450,00	974.102.450,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 02 . 66	<i>Pengadaan Instalasi Air Bersih</i>	266.977.000,00	266.977.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 02 . 66 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	266.977.000,00	266.977.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	4.432.990.000,00	3.789.181.968,00	(643.808.032,00)	85,48	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 22 . 14	<i>Penatalaksanaan penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB) *</i>	4.432.990.000,00	3.789.181.968,00	(643.808.032,00)	85,48	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.123.947.500,00	1.699.287.062,00	(424.660.438,00)	80,01	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.309.042.500,00	2.089.894.906,00	(219.147.594,00)	90,51	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	34.565.833.965,00	33.817.607.756,00	(748.226.209,00)	97,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 16	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	82.360.000,00	82.360.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	82.360.000,00	82.360.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 30	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	4.000.000.000,00	3.890.093.256,00	(109.906.744,00)	97,25	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.000.000.000,00	3.890.093.256,00	(109.906.744,00)	97,25	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 35	Lanjutan Pembangunan Gedung Baru (DAK 2018)	30.483.473.965,00	29.845.154.500,00	(638.319.465,00)	97,91	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.483.473.965,00	29.845.154.500,00	(638.319.465,00)	97,91	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 40	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	45.000.000.000,00	44.930.971.431,00	(69.028.569,00)	99,85	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 40 . 01	Pelayanan Kesehatan (BLUD)	45.000.000.000,00	44.930.971.431,00	(69.028.569,00)	99,85	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.410.000.000,00	43.384.802.194,00	(25.197.806,00)	99,94	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.590.000.000,00	1.546.169.237,00	(43.830.763,00)	97,24	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(61.796.743.415,00)	(59.792.277.053,00)	2.004.466.362,00	96,76	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH					
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	263.387.688,00	263.387.688,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	263.387.688,00	263.387.688,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	263.387.688,00	263.387.688,00	0,00	

Lampiran I.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	4.298.367.267,00	1.315.733.686,56	(2.982.633.580,44)	30,61	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai Perda Nomor Tahun tentang
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.298.367.267,00	1.315.733.686,56	(2.982.633.580,44)	30,61	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.698.367.267,00	520.564.500,00	(1.177.802.767,00)	30,65	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.600.000.000,00	795.169.186,56	(1.804.830.813,44)	30,58	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	147.990.815.442,25	136.789.512.321,34	(11.201.303.120,91)	92,43	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.108.491.000,00	4.905.357.555,00	(203.133.445,00)	96,02	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.108.491.000,00	4.905.357.555,00	(203.133.445,00)	96,02	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	142.882.324.442,25	131.884.154.766,34	(10.998.169.675,91)	92,30	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.763.286.402,00	4.413.846.994,00	(349.439.408,00)	92,66	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	722.400.000,00	624.439.476,00	(97.960.524,00)	86,44	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	722.400.000,00	624.439.476,00	(97.960.524,00)	86,44	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	201.500.000,00	201.230.000,00	(270.000,00)	99,87	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	201.500.000,00	201.230.000,00	(270.000,00)	99,87	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	88.150.000,00	31.776.450,00	(56.373.550,00)	36,05	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.150.000,00	31.776.450,00	(56.373.550,00)	36,05	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.010.090.000,00	2.852.561.000,00	(157.529.000,00)	94,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.736.130.000,00	2.587.361.000,00	(148.769.000,00)	94,56	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	273.960.000,00	265.200.000,00	(8.760.000,00)	96,80	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	8.409.000,00	8.409.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.409.000,00	8.409.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	16.900.000,00	16.850.000,00	(50.000,00)	99,70	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	16.850.000,00	(50.000,00)	99,70	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	94.998.700,00	94.996.550,00	(2.150,00)	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.998.700,00	94.996.550,00	(2.150,00)	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	87.579.500,00	87.579.500,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.579.500,00	87.579.500,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	5.387.500,00	5.387.000,00	(500,00)	99,99	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.387.500,00	5.387.000,00	(500,00)	99,99	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	38.299.000,00	35.439.000,00	(2.860.000,00)	92,53	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.299.000,00	20.439.000,00	(2.860.000,00)	87,72	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	22.540.000,00	21.912.000,00	(628.000,00)	97,21	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.540.000,00	21.912.000,00	(628.000,00)	97,21	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	460.432.702,00	426.667.018,00	(33.765.684,00)	92,67	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	460.432.702,00	426.667.018,00	(33.765.684,00)	92,67	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49.374.346.335,00	43.071.034.131,00	(6.303.312.204,00)	87,23	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 03	<i>Pembangunan gedung kantor</i>	48.775.586.335,00	42.561.899.748,00	(6.213.686.587,00)	87,26	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.723.751.700,00	4.088.242.736,00	(635.508.964,00)	86,55	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	44.051.834.635,00	38.473.657.012,00	(5.578.177.623,00)	87,34	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	211.000.000,00	209.270.000,00	(1.730.000,00)	99,18	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	211.000.000,00	209.270.000,00	(1.730.000,00)	99,18	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	88.700.000,00	88.700.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	88.700.000,00	88.700.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	299.060.000,00	211.164.383,00	(87.895.617,00)	70,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.060.000,00	211.164.383,00	(87.895.617,00)	70,61	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	111.000.000,00	94.402.884,00	(16.597.116,00)	85,05	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	111.000.000,00	94.402.884,00	(16.597.116,00)	85,05	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.000.000,00	94.402.884,00	(16.597.116,00)	85,05	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	48.712.699.411,25	48.103.210.141,73	(609.489.269,52)	98,75	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 03	<i>Pembangunan jalan</i>	19.302.383.411,25	18.724.745.771,06	(577.637.640,19)	97,01	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.500.000,00	159.344.440,00	(2.155.560,00)	98,67	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.140.883.411,25	18.565.401.331,06	(575.482.080,19)	96,99	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05	<i>Pembangunan jembatan</i>	3.068.599.000,00	3.054.702.420,67	(13.896.579,33)	99,55	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.900.000,00	36.150.000,00	(4.750.000,00)	88,39	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	93.445.359,00	(2.554.641,00)	97,34	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.931.699.000,00	2.925.107.061,67	(6.591.938,33)	99,78	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 13	<i>Pembangunan jalan (DAK Reguler)</i>	26.341.717.000,00	26.323.761.950,00	(17.955.050,00)	99,93	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.000.000,00	166.011.950,00	(1.988.050,00)	98,82	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.173.717.000,00	26.157.750.000,00	(15.967.000,00)	99,94	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.802.200.000,00	2.606.203.500,00	(195.996.500,00)	93,01	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 03	<i>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</i>	2.802.200.000,00	2.606.203.500,00	(195.996.500,00)	93,01	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.802.200.000,00	2.606.203.500,00	(195.996.500,00)	93,01	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	3.646.750.000,00	3.606.691.000,00	(40.059.000,00)	98,90	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan</i>	2.229.050.000,00	2.197.161.500,00	(31.888.500,00)	98,57	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.050.000,00	36.650.000,00	(4.400.000,00)	89,28	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	37.326.500,00	(673.500,00)	98,23	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.150.000.000,00	2.123.185.000,00	(26.815.000,00)	98,75	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 04	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan</i>	1.417.700.000,00	1.409.529.500,00	(8.170.500,00)	99,42	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.489.500,00	(510.500,00)	98,18	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.389.700.000,00	1.382.040.000,00	(7.660.000,00)	99,45	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.437.550.000,00	1.417.622.750,00	(19.927.250,00)	98,61	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 06	<i>Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan</i>	136.150.000,00	123.788.000,00	(12.362.000,00)	90,92	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.150.000,00	44.698.000,00	(11.452.000,00)	79,60	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	80.000.000,00	79.090.000,00	(910.000,00)	98,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 10	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat</i>	1.301.400.000,00	1.293.834.750,00	(7.565.250,00)	99,42	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.301.400.000,00	1.293.834.750,00	(7.565.250,00)	99,42	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	6.011.666.700,00	5.522.548.284,61	(489.118.415,39)	91,86	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 10	<i>Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi</i>	999.240.600,00	940.292.518,00	(58.948.082,00)	94,10	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.670.000,00	84.406.268,00	(9.263.732,00)	90,11	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	905.570.600,00	855.886.250,00	(49.684.350,00)	94,51	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 27	<i>Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)</i>	2.866.854.000,00	2.469.233.280,61	(397.620.719,39)	86,13	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.450.000,00	18.716.500,00	(1.733.500,00)	91,52	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.846.404.000,00	2.450.516.780,61	(395.887.219,39)	86,09	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 28	<i>Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi</i>	360.750.000,00	346.984.507,00	(13.765.493,00)	96,18	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	360.750.000,00	346.984.507,00	(13.765.493,00)	96,18	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 29	<i>Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai</i>	1.784.822.100,00	1.766.037.979,00	(18.784.121,00)	98,95	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.170.000,00	35.154.379,00	(1.015.621,00)	97,19	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.748.652.100,00	1.730.883.600,00	(17.768.500,00)	98,98	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	10.824.624.444,00	10.256.193.664,00	(568.430.780,00)	94,75	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 01	<i>Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah</i>	1.094.353.444,00	1.083.366.694,00	(10.986.750,00)	99,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.870.000,00	16.850.000,00	(20.000,00)	99,88	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.077.483.444,00	1.066.516.694,00	(10.966.750,00)	98,98	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 08	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah</i>	157.319.000,00	87.125.350,00	(70.193.650,00)	55,38	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.519.000,00	87.125.350,00	(15.393.650,00)	84,98	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 12	<i>Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK Fisik TA. 2019)</i>	3.381.996.500,00	3.100.127.671,00	(281.868.829,00)	91,67	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.970.000,00	13.500.000,00	(470.000,00)	96,64	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.318.026.500,00	3.086.627.671,00	(231.398.829,00)	93,03	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 13	<i>Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan Air Limbah (DAK Sanitasi Reguler 2019)</i>	5.155.650.500,00	5.128.292.361,00	(27.358.139,00)	99,47	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.160.000,00	10.150.000,00	(10.000,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.145.490.500,00	5.118.142.361,00	(27.348.139,00)	99,47	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 14	<i>Pengebangan Sistem Pelayanan dan Distrbusi Air Minum (Operasional UPT SPAM)</i>	1.035.305.000,00	857.281.588,00	(178.023.412,00)	82,80	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	605.305.000,00	491.274.188,00	(114.030.812,00)	81,16	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 27 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	430.000.000,00	366.007.400,00	(63.992.600,00)	85,12	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	7.671.850.000,00	6.114.360.450,00	(1.557.489.550,00)	79,70	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 30 . 02	<i>Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan</i>	7.671.850.000,00	6.114.360.450,00	(1.557.489.550,00)	79,70	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.671.850.000,00	6.114.360.450,00	(1.557.489.550,00)	79,70	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 35	Program Pengembangan Tata Ruang	840.350.000,00	297.549.129,00	(542.800.871,00)	35,41	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 35 . 01	<i>Penataan RTH</i>	840.350.000,00	297.549.129,00	(542.800.871,00)	35,41	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.850.000,00	13.550.000,00	(3.300.000,00)	80,42	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.500.000,00	57.861.129,00	(65.638.871,00)	46,85	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	700.000.000,00	226.138.000,00	(473.862.000,00)	32,31	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 36	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6.496.487.500,00	6.272.188.396,00	(224.299.104,00)	96,55	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 36 . 01	<i>Pembayaran Rekening listrik PJU</i>	5.316.337.500,00	5.171.824.593,00	(144.512.907,00)	97,28	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.316.337.500,00	5.171.824.593,00	(144.512.907,00)	97,28	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 36 . 02	<i>Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan</i>	846.500.000,00	801.682.253,00	(44.817.747,00)	94,71	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.600.000,00	24.250.000,00	(1.350.000,00)	94,73	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.900.000,00	21.169.753,00	(34.730.247,00)	37,87	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	765.000.000,00	756.262.500,00	(8.737.500,00)	98,86	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 36 . 03	<i>Pemeliharaan dan Perawatan PJU</i>	333.650.000,00	298.681.550,00	(34.968.450,00)	89,52	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.350.000,00	(450.000,00)	83,93	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	330.850.000,00	296.331.550,00	(34.518.450,00)	89,57	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 37	Program Perencanaan Tata Ruang	71.150.000,00	56.816.978,00	(14.333.022,00)	79,86	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 37 . 01	<i>Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)</i>	71.150.000,00	56.816.978,00	(14.333.022,00)	79,86	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.150.000,00	56.816.978,00	(11.333.022,00)	83,37	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 38	Program Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi	118.363.650,00	51.486.464,00	(66.877.186,00)	43,50	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 38 . 01	<i>Perencanaan dan Pembinaan Teknis ke PU an</i>	44.713.650,00	18.564.000,00	(26.149.650,00)	41,52	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.713.650,00	18.564.000,00	(26.149.650,00)	41,52	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 38 . 02	<i>Pembinaan Jasa Konstruksi</i>	73.650.000,00	32.922.464,00	(40.727.536,00)	44,70	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 1 . 04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
Unit Organisasi : 1 . 04 . 01		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	190.560.000,00	122.268.800,00	(68.291.200,00)	64,16	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	190.560.000,00	122.268.800,00	(68.291.200,00)	64,16	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	190.560.000,00	122.268.800,00	(68.291.200,00)	64,16	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.129.886.440,00	6.831.470.111,93	(298.416.328,07)	95,81	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.902.036.000,00	1.786.496.019,00	(115.539.981,00)	93,93	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.902.036.000,00	1.786.496.019,00	(115.539.981,00)	93,93	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.227.850.440,00	5.044.974.092,93	(182.876.347,07)	96,50	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	777.381.440,00	699.305.785,00	(78.075.655,00)	89,96	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	12.900.000,00	12.760.675,00	(139.325,00)	98,92	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	12.760.675,00	(139.325,00)	98,92	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	8.050.000,00	3.387.600,00	(4.662.400,00)	42,08	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	3.387.600,00	(4.662.400,00)	42,08	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	259.500.000,00	190.550.000,00	(68.950.000,00)	73,43	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	259.500.000,00	190.550.000,00	(68.950.000,00)	73,43	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	43.854.500,00	43.064.500,00	(790.000,00)	98,20	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.440.000,00	36.660.000,00	(780.000,00)	97,92	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.414.500,00	6.404.500,00	(10.000,00)	99,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	7.100.000,00	7.065.000,00	(35.000,00)	99,51	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.065.000,00	(35.000,00)	99,51	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	41.749.440,00	41.470.000,00	(279.440,00)	99,33	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.749.440,00	41.470.000,00	(279.440,00)	99,33	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	70.692.500,00	69.686.000,00	(1.006.500,00)	98,58	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.692.500,00	69.686.000,00	(1.006.500,00)	98,58	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	2.855.000,00	2.855.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.855.000,00	2.855.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	93.750.000,00	93.390.000,00	(360.000,00)	99,62	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	93.750.000,00	93.390.000,00	(360.000,00)	99,62	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	35.340.000,00	34.344.000,00	(996.000,00)	97,18	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.340.000,00	34.344.000,00	(996.000,00)	97,18	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	194.410.000,00	193.553.010,00	(856.990,00)	99,56	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.410.000,00	193.553.010,00	(856.990,00)	99,56	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	161.453.000,00	158.189.050,00	(3.263.950,00)	97,98	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	38.500.000,00	36.800.000,00	(1.700.000,00)	95,58	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.500.000,00	36.800.000,00	(1.700.000,00)	95,58	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	110.953.000,00	109.389.050,00	(1.563.950,00)	98,59	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.353.000,00	69.789.050,00	(1.563.950,00)	97,81	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	19.762.500,00	18.000.000,00	(1.762.500,00)	91,08	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 03 . 05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	19.762.500,00	18.000.000,00	(1.762.500,00)	91,08	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.762.500,00	18.000.000,00	(1.762.500,00)	91,08	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00	7.675.000,00	(7.325.000,00)	51,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	15.000.000,00	7.675.000,00	(7.325.000,00)	51,17	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	7.675.000,00	(7.325.000,00)	51,17	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 15	Program Pengembangan Perumahan	1.017.777.500,00	958.713.904,00	(59.063.596,00)	94,20	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 15 . 06	<i>Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu</i>	813.515.000,00	754.990.954,00	(58.524.046,00)	92,81	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	208.800.000,00	179.160.000,00	(29.640.000,00)	85,80	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	239.715.000,00	214.895.754,00	(24.819.246,00)	89,65	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	365.000.000,00	360.935.200,00	(4.064.800,00)	98,89	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 15 . 16	<i>Pendamping Program Pengembangan Perumahan (Pendamping Program BSPS)</i>	204.262.500,00	203.722.950,00	(539.550,00)	99,74	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.803.000,00	91.800.000,00	(3.000,00)	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.459.500,00	111.922.950,00	(536.550,00)	99,52	
2.04 . 1.04.01 . 00 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	160.155.000,00	157.310.994,00	(2.844.006,00)	98,22	
2.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 01	<i>Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</i>	160.155.000,00	157.310.994,00	(2.844.006,00)	98,22	
2.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.655.000,00	151.847.494,00	(2.807.506,00)	98,18	
2.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.500.000,00	5.463.500,00	(36.500,00)	99,34	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2.967.114.000,00	2.951.208.959,93	(15.905.040,07)	99,46	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 17 . 08	<i>Pembangunan dan Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman</i>	2.967.114.000,00	2.951.208.959,93	(15.905.040,07)	99,46	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.864.904.000,00	1.852.190.959,93	(12.713.040,07)	99,32	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.049.410.000,00	1.046.218.000,00	(3.192.000,00)	99,70	
2.04 . 1.04.01 . 00 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	109.207.000,00	94.570.400,00	(14.636.600,00)	86,60	
2.04 . 1.04.01 . 00 . 17 . 01	<i>Penanganan konflik-konflik pertanahan</i>	109.207.000,00	94.570.400,00	(14.636.600,00)	86,60	
2.04 . 1.04.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.000.000,00	31.650.000,00	(6.350.000,00)	83,29	
2.04 . 1.04.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.207.000,00	62.920.400,00	(8.286.600,00)	88,36	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.939.326.440,00)	(6.709.201.311,93)	230.125.128,07	96,68	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 1 . 05		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
Unit Organisasi : 1 . 05 . 01		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.477.930.725,00	8.287.220.631,00	(190.710.094,00)	97,75	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.316.538.000,00	2.257.101.608,00	(59.436.392,00)	97,43	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.316.538.000,00	2.257.101.608,00	(59.436.392,00)	97,43	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.161.392.725,00	6.030.119.023,00	(131.273.702,00)	97,87	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.603.599.925,00	4.568.334.471,00	(35.265.454,00)	99,23	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	885.000,00	885.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	885.000,00	885.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	25.900.000,00	25.163.214,00	(736.786,00)	97,16	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.900.000,00	25.163.214,00	(736.786,00)	97,16	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	32.800.000,00	25.368.300,00	(7.431.700,00)	77,34	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.800.000,00	25.368.300,00	(7.431.700,00)	77,34	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	4.180.380.000,00	4.154.037.550,00	(26.342.450,00)	99,37	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.180.380.000,00	4.154.037.550,00	(26.342.450,00)	99,37	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	1.719.400,00	1.719.000,00	(400,00)	99,98	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.719.400,00	1.719.000,00	(400,00)	99,98	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	11.750.000,00	11.745.500,00	(4.500,00)	99,96	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000,00	11.745.500,00	(4.500,00)	99,96	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	26.249.525,00	26.244.500,00	(5.025,00)	99,98	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.249.525,00	26.244.500,00	(5.025,00)	99,98	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	20.540.000,00	20.271.501,00	(268.499,00)	98,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.540.000,00	20.271.501,00	(268.499,00)	98,69	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1.220.000,00	1.137.000,00	(83.000,00)	93,20	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	1.137.000,00	(83.000,00)	93,20	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	6.596.000,00	6.596.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.596.000,00	6.596.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	18.800.000,00	18.646.000,00	(154.000,00)	99,18	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	18.646.000,00	(154.000,00)	99,18	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	276.760.000,00	276.520.906,00	(239.094,00)	99,91	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	276.760.000,00	276.520.906,00	(239.094,00)	99,91	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	370.918.800,00	367.817.513,00	(3.101.287,00)	99,16	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	58.550.000,00	58.465.125,00	(84.875,00)	99,86	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	58.550.000,00	58.465.125,00	(84.875,00)	99,86	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	35.000.000,00	32.210.750,00	(2.789.250,00)	92,03	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	32.210.750,00	(2.789.250,00)	92,03	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	48.500.000,00	48.398.055,00	(101.945,00)	99,79	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	48.398.055,00	(101.945,00)	99,79	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	228.868.800,00	228.743.583,00	(125.217,00)	99,95	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	228.868.800,00	228.743.583,00	(125.217,00)	99,95	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	29.902.371,00	(97.629,00)	99,67	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	30.000.000,00	29.902.371,00	(97.629,00)	99,67	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.902.371,00	(97.629,00)	99,67	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	972.839.000,00	887.802.468,00	(85.036.532,00)	91,26	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 05	<i>Pengendalian keamanan lingkungan</i>	800.579.000,00	720.137.718,00	(80.441.282,00)	89,95	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.579.000,00	720.137.718,00	(80.441.282,00)	89,95	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 18	<i>Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	147.080.000,00	145.768.000,00	(1.312.000,00)	99,11	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.880.000,00	141.568.000,00	(1.312.000,00)	99,08	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 19	<i>Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat</i>	25.180.000,00	21.896.750,00	(3.283.250,00)	86,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.180.000,00	21.896.750,00	(3.283.250,00)	86,96	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	60.697.000,00	58.974.800,00	(1.722.200,00)	97,16	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 16 . 01	<i>Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja</i>	60.697.000,00	58.974.800,00	(1.722.200,00)	97,16	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.697.000,00	58.974.800,00	(1.722.200,00)	97,16	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	123.338.000,00	117.287.400,00	(6.050.600,00)	95,09	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 20 . 15	<i>Operasi Penertiban Pekat, Perda, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ</i>	123.338.000,00	117.287.400,00	(6.050.600,00)	95,09	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.338.000,00	117.287.400,00	(6.050.600,00)	95,09	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.477.930.725,00)	(8.287.220.631,00)	190.710.094,00	97,75	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 1 Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KB						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	10.291.577.826,00	10.052.743.261,00	(238.834.565,00)	97,68	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.156.872.000,00	3.046.459.811,00	(110.412.189,00)	96,50	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.156.872.000,00	3.046.459.811,00	(110.412.189,00)	96,50	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.134.705.826,00	7.006.283.450,00	(128.422.376,00)	98,20	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.416.420.526,00	1.412.179.279,00	(4.241.247,00)	99,70	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	9.000.000,00	8.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	40.480.000,00	38.444.427,00	(2.035.573,00)	94,97	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.480.000,00	38.444.427,00	(2.035.573,00)	94,97	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	10.229.126,00	10.229.100,00	(26,00)	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.229.126,00	10.229.100,00	(26,00)	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	789.070.000,00	786.910.000,00	(2.160.000,00)	99,73	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	789.070.000,00	786.910.000,00	(2.160.000,00)	99,73	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	94.040.500,00	94.040.000,00	(500,00)	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.040.500,00	94.040.000,00	(500,00)	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	76.250.900,00	76.250.800,00	(100,00)	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.250.900,00	76.250.800,00	(100,00)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	6.854.000,00	6.853.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.854.000,00	6.853.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2.760.000,00	2.755.000,00	(5.000,00)	99,82	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.760.000,00	2.755.000,00	(5.000,00)	99,82	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	293.561.000,00	293.537.952,00	(23.048,00)	99,99	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	293.561.000,00	293.537.952,00	(23.048,00)	99,99	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 36	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan</i>	44.350.000,00	44.335.000,00	(15.000,00)	99,97	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	44.350.000,00	44.335.000,00	(15.000,00)	99,97	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	244.004.700,00	243.999.999,00	(4.701,00)	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	217.554.700,00	217.549.999,00	(4.701,00)	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	217.554.700,00	217.549.999,00	(4.701,00)	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21.193.300,00	21.193.300,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	21.193.300,00	21.193.300,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	21.193.300,00	21.193.300,00	0,00	100,00	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 15	Program Keluarga Berencana	3.851.172.650,00	3.746.481.383,00	(104.691.267,00)	97,28	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05	<i>Pembinaan Keluarga Berencana</i>	38.868.250,00	38.843.250,00	(25.000,00)	99,94	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30.168.250,00	30.143.250,00	(25.000,00)	99,92	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06	<i>Pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>	1.174.000.000,00	1.117.356.000,00	(56.644.000,00)	95,18	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	5.000.000,00	4.600.000,00	(400.000,00)	92,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.08 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	429.800.000,00	410.681.000,00	(19.119.000,00)	95,55	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	739.200.000,00	702.075.000,00	(37.125.000,00)	94,98	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 15 . 12	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.529.320.000,00	2.481.604.540,00	(47.715.460,00)	98,11	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	648.340.000,00	629.230.000,00	(19.110.000,00)	97,05	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.880.980.000,00	1.852.374.540,00	(28.605.460,00)	98,48	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 15 . 13	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	108.984.400,00	108.677.593,00	(306.807,00)	99,72	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.984.400,00	108.677.593,00	(306.807,00)	99,72	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	110.415.000,00	108.949.500,00	(1.465.500,00)	98,67	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06	Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	110.415.000,00	108.949.500,00	(1.465.500,00)	98,67	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	12.150.000,00	(650.000,00)	94,92	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.615.000,00	96.799.500,00	(815.500,00)	99,16	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	146.605.000,00	145.980.000,00	(625.000,00)	99,57	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	102.860.000,00	102.530.500,00	(329.500,00)	99,68	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.860.000,00	102.530.500,00	(329.500,00)	99,68	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 11	Monitoring dan Evaluasi Bansos Rastra/BPNT	43.745.000,00	43.449.500,00	(295.500,00)	99,32	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.745.000,00	43.449.500,00	(295.500,00)	99,32	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	25.385.600,00	25.239.500,00	(146.100,00)	99,42	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 16 . 01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	17.795.800,00	17.672.750,00	(123.050,00)	99,31	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.895.800,00	16.772.750,00	(123.050,00)	99,27	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 16 . 03	Temu Kreatif Remaja Saka Kencana	7.589.800,00	7.566.750,00	(23.050,00)	99,70	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.06.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.589.800,00	7.566.750,00	(23.050,00)	99,70	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	374.055.200,00	370.153.868,00	(3.901.332,00)	98,96	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	23.590.000,00	22.513.500,00	(1.076.500,00)	95,44	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.590.000,00	22.513.500,00	(1.076.500,00)	95,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 04	<i>Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal</i>	9.775.200,00	9.769.000,00	(6.200,00)	99,94	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.775.200,00	9.769.000,00	(6.200,00)	99,94	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 10	<i>Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa</i>	76.585.000,00	74.699.750,00	(1.885.250,00)	97,54	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.585.000,00	74.699.750,00	(1.885.250,00)	97,54	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 15	<i>Pelayanan dan perlindungan sosial lansia</i>	81.115.000,00	80.894.750,00	(220.250,00)	99,73	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.115.000,00	80.894.750,00	(220.250,00)	99,73	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 16	<i>Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan PMKS lainnya</i>	115.460.000,00	115.284.718,00	(175.282,00)	99,85	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.460.000,00	115.284.718,00	(175.282,00)	99,85	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 17	<i>Pelayanan dan Pendampingan Penyandang Disabilitas diluar Panti</i>	34.365.000,00	34.137.500,00	(227.500,00)	99,34	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.365.000,00	34.137.500,00	(227.500,00)	99,34	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 18	<i>Pelayanan dan Pembinaan bagi Tuna Sosial dan PMKS Lainnya di Luar Panti.</i>	33.165.000,00	32.854.650,00	(310.350,00)	99,06	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.165.000,00	32.854.650,00	(310.350,00)	99,06	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	629.885.900,00	622.946.489,00	(6.939.411,00)	98,90	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 18 . 01	<i>Kegiatan pembinaan organisasi perempuan</i>	629.885.900,00	622.946.489,00	(6.939.411,00)	98,90	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.500.000,00	(300.000,00)	93,75	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	625.085.900,00	618.446.489,00	(6.639.411,00)	98,94	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	128.240.000,00	122.695.232,00	(5.544.768,00)	95,68	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 19 . 08	<i>Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PeTP2A)</i>	50.637.500,00	45.108.732,00	(5.528.768,00)	89,08	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	25,00	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.637.500,00	44.108.732,00	(2.528.768,00)	94,58	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 19 . 09	<i>Penguatan Kelembagaan PUG</i>	77.602.500,00	77.586.500,00	(16.000,00)	99,98	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
2.02 . 1.06.01 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.702.500,00	67.686.500,00	(16.000,00)	99,98	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	51.481.500,00	50.953.750,00	(527.750,00)	98,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 06	<i>Penguatan Kelembagaan Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)</i>	51.481.500,00	50.953.750,00	(527.750,00)	98,97	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.481.500,00	50.953.750,00	(527.750,00)	98,97	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 24	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	135.846.450,00	135.511.150,00	(335.300,00)	99,75	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 24 . 01	<i>Jaminan Sosial untuk Anak Yatim dari Keluarga Miskin</i>	50.001.450,00	49.867.250,00	(134.200,00)	99,73	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.001.450,00	49.867.250,00	(134.200,00)	99,73	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 24 . 02	<i>Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan</i>	85.845.000,00	85.643.900,00	(201.100,00)	99,77	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.845.000,00	85.643.900,00	(201.100,00)	99,77	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.291.577.826,00)	(10.052.743.261,00)	238.834.565,00	97,68	

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA						
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN						
TAHUN ANGGARAN 2019						
 Urusan Pemerintahan : 1 Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Unit Organisasi : 1 . 06 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.107.939.100,00	2.018.544.319,00	(89.394.781,00)	95,76	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	832.413.000,00	776.825.499,00	(55.587.501,00)	93,32	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	832.413.000,00	776.825.499,00	(55.587.501,00)	93,32	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.275.526.100,00	1.241.718.820,00	(33.807.280,00)	97,35	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	972.657.100,00	945.176.570,00	(27.480.530,00)	97,17	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	24.000.000,00	23.991.000,00	(9.000,00)	99,96	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.991.000,00	(9.000,00)	99,96	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	56.950.000,00	40.508.800,00	(16.441.200,00)	71,13	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.950.000,00	40.508.800,00	(16.441.200,00)	71,13	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	579.900.000,00	576.700.000,00	(3.200.000,00)	99,45	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	579.900.000,00	576.700.000,00	(3.200.000,00)	99,45	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	7.817.300,00	6.477.070,00	(1.340.230,00)	82,86	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.817.300,00	6.477.070,00	(1.340.230,00)	82,86	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	5.400.000,00	4.395.000,00	(1.005.000,00)	81,39	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	4.395.000,00	(1.005.000,00)	81,39	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	13.691.800,00	13.685.800,00	(6.000,00)	99,96	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.691.800,00	13.685.800,00	(6.000,00)	99,96	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	13.100.000,00	12.047.900,00	(1.052.100,00)	91,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	12.047.900,00	(1.052.100,00)	91,97	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	15.400.000,00	15.386.000,00	(14.000,00)	99,91	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.400.000,00	15.386.000,00	(14.000,00)	99,91	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	8.478.000,00	8.071.500,00	(406.500,00)	95,21	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.478.000,00	8.071.500,00	(406.500,00)	95,21	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	67.650.000,00	63.820.000,00	(3.830.000,00)	94,34	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.650.000,00	63.820.000,00	(3.830.000,00)	94,34	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	175.275.000,00	175.098.500,00	(176.500,00)	99,90	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.275.000,00	175.098.500,00	(176.500,00)	99,90	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	159.289.000,00	153.668.500,00	(5.620.500,00)	96,47	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	31.000.000,00	30.592.000,00	(408.000,00)	98,68	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.000.000,00	30.592.000,00	(408.000,00)	98,68	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	34.000.000,00	30.000.000,00	(4.000.000,00)	88,24	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	30.000.000,00	(4.000.000,00)	88,24	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	94.289.000,00	93.076.500,00	(1.212.500,00)	98,71	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.289.000,00	93.076.500,00	(1.212.500,00)	98,71	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	41.300.000,00	41.000.000,00	(300.000,00)	99,27	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 03 . 02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	41.300.000,00	41.000.000,00	(300.000,00)	99,27	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.300.000,00	41.000.000,00	(300.000,00)	99,27	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	29.627.250,00	(372.750,00)	98,76	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	30.000.000,00	29.627.250,00	(372.750,00)	98,76	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.627.250,00	(372.750,00)	98,76	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	25.830.000,00	25.830.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 22 . 12	<i>Jambore Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Propinsi</i>	25.830.000,00	25.830.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.830.000,00	25.830.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 23	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	46.450.000,00	46.416.500,00	(33.500,00)	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06 . 1.06.02 . 00 . 23 . 02	Operasional Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)	46.450.000,00	46.416.500,00	(33.500,00)	99,93	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2		36.450.000,00	36.416.500,00	(33.500,00)	99,91	
		(2.107.939.100,00)	(2.018.544.319,00)	89.394.781,00	95,76	

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 2 . 03		Pangan				
Unit Organisasi : 2 . 03 . 01		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	874.000.000,00	161.270.000,00	(712.730.000,00)	18,45	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai Perda Nomor Tahun tentang
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	874.000.000,00	161.270.000,00	(712.730.000,00)	18,45	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	874.000.000,00	161.270.000,00	(712.730.000,00)	18,45	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.240.565.198,00	6.067.507.254,00	(173.057.944,00)	97,23	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.556.767.000,00	2.466.088.721,00	(90.678.279,00)	96,45	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.556.767.000,00	2.466.088.721,00	(90.678.279,00)	96,45	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.683.798.198,00	3.601.418.533,00	(82.379.665,00)	97,76	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.049.956.000,00	1.017.992.481,00	(31.963.519,00)	96,96	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	58.800.000,00	54.108.552,00	(4.691.448,00)	92,02	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	54.108.552,00	(4.691.448,00)	92,02	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.000.000,00	5.903.000,00	(3.097.000,00)	65,59	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	5.903.000,00	(3.097.000,00)	65,59	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	561.480.000,00	537.520.000,00	(23.960.000,00)	95,73	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	561.480.000,00	537.520.000,00	(23.960.000,00)	95,73	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.250.000,00	9.248.000,00	(2.000,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	9.248.000,00	(2.000,00)	99,98	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	40.000.000,00	39.999.000,00	(1.000,00)	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.999.000,00	(1.000,00)	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	21.850.000,00	21.849.926,00	(74,00)	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.850.000,00	21.849.926,00	(74,00)	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	4.206.000,00	4.202.000,00	(4.000,00)	99,90	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.206.000,00	4.202.000,00	(4.000,00)	99,90	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	20.135.000,00	20.135.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.135.000,00	20.135.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	11.215.000,00	11.208.000,00	(7.000,00)	99,94	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.215.000,00	11.208.000,00	(7.000,00)	99,94	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	64.380.000,00	64.318.500,00	(61.500,00)	99,90	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.380.000,00	64.318.500,00	(61.500,00)	99,90	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	247.075.000,00	246.935.503,00	(139.497,00)	99,94	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	247.075.000,00	246.935.503,00	(139.497,00)	99,94	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	209.557.500,00	208.312.166,00	(1.245.334,00)	99,41	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	179.557.500,00	178.312.166,00	(1.245.334,00)	99,31	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.557.500,00	178.312.166,00	(1.245.334,00)	99,31	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.950.000,00	8.945.000,00	(5.000,00)	99,94	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	8.950.000,00	8.945.000,00	(5.000,00)	99,94	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	8.945.000,00	(5.000,00)	99,94	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	47.360.850,00	46.647.550,00	(713.300,00)	98,49	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 16 . 02	<i>Pembinaan dan Pokmaswas Perairan umum</i>	47.360.850,00	46.647.550,00	(713.300,00)	98,49	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.360.850,00	46.647.550,00	(713.300,00)	98,49	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	266.605.000,00	257.473.500,00	(9.131.500,00)	96,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.03 . 2.03.01 . 00 . 18 . 05	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	41.400.000,00	41.312.500,00	(87.500,00)	99,79	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	41.312.500,00	(87.500,00)	99,79	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 18 . 08	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	57.010.000,00	50.377.500,00	(6.632.500,00)	88,37	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.010.000,00	50.377.500,00	(6.632.500,00)	88,37	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 18 . 13	Lomba cipta menu B2SA tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Nasional	71.865.000,00	71.669.000,00	(196.000,00)	99,73	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.165.000,00	69.969.000,00	(196.000,00)	99,72	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 18 . 14	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	18.995.000,00	18.499.750,00	(495.250,00)	97,39	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.995.000,00	12.499.750,00	(495.250,00)	96,19	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 18 . 15	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	12.675.000,00	11.517.000,00	(1.158.000,00)	90,86	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.675.000,00	11.517.000,00	(158.000,00)	98,65	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 18 . 17	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	64.660.000,00	64.097.750,00	(562.250,00)	99,13	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.660.000,00	64.097.750,00	(562.250,00)	99,13	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 20	Program pengembangan kawasan budidaya perikanan	1.715.836.498,00	1.700.725.500,00	(15.110.998,00)	99,12	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 20 . 11	Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)	365.175.004,00	359.234.800,00	(5.940.204,00)	98,37	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	365.175.004,00	359.234.800,00	(5.940.204,00)	98,37	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 20 . 12	Pembangunan Kolam Budidaya	399.949.998,00	397.989.950,00	(1.960.048,00)	99,51	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	399.949.998,00	397.989.950,00	(1.960.048,00)	99,51	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 20 . 13	Bantuan Benih dan Pakan	49.162.500,00	48.193.600,00	(968.900,00)	98,03	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.162.500,00	48.193.600,00	(968.900,00)	98,03	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 20 . 14	Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Budidaya Perikanan (DAPBD + AK 2019)	445.726.400,00	444.055.150,00	(1.671.250,00)	99,63	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	445.726.400,00	444.055.150,00	(1.671.250,00)	99,63	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 20 . 15	Rehabilitasi sarana dan prasarana Balai Benih Ikan (DAPBD + AK 2019)	455.822.596,00	451.252.000,00	(4.570.596,00)	99,00	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	4.918.500,00	(2.531.500,00)	66,02	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	448.372.596,00	446.333.500,00	(2.039.096,00)	99,55	
3.01 . 2.03.01 . 00 . 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	250.197.750,00	226.240.686,00	(23.957.064,00)	90,42	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 2 . 05		Lingkungan Hidup				
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01		DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	45.000.000,00	79.310.000,00	34.310.000,00	176,24	Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	45.000.000,00	79.310.000,00	34.310.000,00	176,24	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	45.000.000,00	79.310.000,00	34.310.000,00	176,24	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.289.294.360,00	6.113.802.939,00	(175.491.421,00)	97,21	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.674.965.000,00	2.525.695.945,00	(149.269.055,00)	94,42	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.674.965.000,00	2.525.695.945,00	(149.269.055,00)	94,42	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.614.329.360,00	3.588.106.994,00	(26.222.366,00)	99,27	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.255.733.550,00	1.246.867.837,00	(8.865.713,00)	99,29	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.500.000,00	2.490.000,00	(10.000,00)	99,60	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.490.000,00	(10.000,00)	99,60	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	52.596.000,00	52.489.591,00	(106.409,00)	99,80	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.596.000,00	52.489.591,00	(106.409,00)	99,80	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	14.750.000,00	8.513.550,00	(6.236.450,00)	57,72	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00	8.513.550,00	(6.236.450,00)	57,72	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	855.140.000,00	853.850.000,00	(1.290.000,00)	99,85	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	855.140.000,00	853.850.000,00	(1.290.000,00)	99,85	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	13.800.000,00	13.776.000,00	(24.000,00)	99,83	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.776.000,00	(24.000,00)	99,83	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	34.975.650,00	34.950.200,00	(25.450,00)	99,93	
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN						

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.975.650,00	34.950.200,00	(25.450,00)	99,93	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	60.637.500,00	60.137.680,00	(499.820,00)	99,18	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.637.500,00	60.137.680,00	(499.820,00)	99,18	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	910.400,00	910.400,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	910.400,00	910.400,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	7.000.000,00	6.930.000,00	(70.000,00)	99,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.000.000,00	6.930.000,00	(70.000,00)	99,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	9.589.000,00	9.438.000,00	(151.000,00)	98,43	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.589.000,00	6.523.000,00	(66.000,00)	99,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000,00	2.915.000,00	(85.000,00)	97,17	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	49.380.000,00	49.338.000,00	(42.000,00)	99,91	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.380.000,00	49.338.000,00	(42.000,00)	99,91	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	154.455.000,00	154.044.416,00	(410.584,00)	99,73	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.455.000,00	154.044.416,00	(410.584,00)	99,73	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	102.814.500,00	102.661.250,00	(153.250,00)	99,85	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	30.000.000,00	29.969.150,00	(30.850,00)	99,90	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.969.150,00	(30.850,00)	99,90	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	72.814.500,00	72.692.100,00	(122.400,00)	99,83	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.814.500,00	72.692.100,00	(122.400,00)	99,83	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.750.000,00	19.697.602,00	(52.398,00)	99,73	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	19.750.000,00	19.697.602,00	(52.398,00)	99,73	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	19.697.602,00	(52.398,00)	99,73	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	425.262.600,00	415.387.000,00	(9.875.600,00)	97,68	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 01	<i>Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah</i>	19.996.000,00	19.846.500,00	(149.500,00)	99,25	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.996.000,00	19.846.500,00	(149.500,00)	99,25	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 04	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</i>	405.266.600,00	395.540.500,00	(9.726.100,00)	97,60	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	403.466.600,00	393.780.500,00	(9.686.100,00)	97,60	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.800.000,00	1.760.000,00	(40.000,00)	97,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	581.900.100,00	577.355.774,00	(4.544.326,00)	99,22	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 01	<i>Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura</i>	152.970.000,00	151.044.204,00	(1.925.796,00)	98,74	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.970.000,00	151.044.204,00	(1.925.796,00)	98,74	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 03	<i>Pemantauan Kualitas Lingkungan</i>	16.443.800,00	16.245.500,00	(198.300,00)	98,79	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.443.800,00	16.245.500,00	(198.300,00)	98,79	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 12	<i>Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</i>	207.034.000,00	206.362.792,00	(671.208,00)	99,68	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.000.000,00	64.700.000,00	(300.000,00)	99,54	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.034.000,00	141.662.792,00	(371.208,00)	99,74	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 14	<i>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup</i>	4.341.050,00	3.965.500,00	(375.550,00)	91,35	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.341.050,00	3.965.500,00	(375.550,00)	91,35	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 25	<i>Pengkajian dampak lingkungan dan pengawasan jenis usaha / kegiatan</i>	34.504.500,00	34.228.242,00	(276.258,00)	99,20	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.504.500,00	34.228.242,00	(276.258,00)	99,20	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 27	<i>Pendukung Operasional Laboratorium</i>	84.465.000,00	84.089.536,00	(375.464,00)	99,56	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.165.000,00	66.892.136,00	(272.864,00)	99,59	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.300.000,00	17.197.400,00	(102.600,00)	99,41	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 28	<i>Pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3</i>	17.218.750,00	17.109.500,00	(109.250,00)	99,37	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.218.750,00	17.109.500,00	(109.250,00)	99,37	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 29	<i>Gerakan SUMBAR Bersih (GSB)</i>	64.923.000,00	64.310.500,00	(612.500,00)	99,06	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.723.000,00	41.210.500,00	(512.500,00)	98,77	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.200.000,00	23.100.000,00	(100.000,00)	99,57	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	81.689.300,00	80.323.050,00	(1.366.250,00)	98,33	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 09	<i>Koordinasi pengelolaan konservasi SDA</i>	36.556.050,00	36.350.550,00	(205.500,00)	99,44	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.556.050,00	36.350.550,00	(205.500,00)	99,44	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 21	<i>Pengembangan Dampak Perubahan Iklim</i>	36.537.500,00	36.515.750,00	(21.750,00)	99,94	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.537.500,00	36.515.750,00	(21.750,00)	99,94	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 22	<i>Fasilitasi Pengaduan Masyarakat</i>	8.595.750,00	7.456.750,00	(1.139.000,00)	86,75	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.595.750,00	7.456.750,00	(1.139.000,00)	86,75	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	165.313.250,00	164.358.302,00	(954.948,00)	99,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	83.242.750,00	82.374.402,00	(868.348,00)	98,96	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.242.750,00	81.374.402,00	(868.348,00)	98,94	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 07	Inventarisasi Penyusunan Data Base Pengelolaan Lingkungan	25.855.500,00	25.773.000,00	(82.500,00)	99,68	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.855.500,00	25.773.000,00	(82.500,00)	99,68	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 12	Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)	56.215.000,00	56.210.900,00	(4.100,00)	99,99	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.215.000,00	56.210.900,00	(4.100,00)	99,99	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	29.677.900,00	29.638.179,00	(39.721,00)	99,87	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	29.677.900,00	29.638.179,00	(39.721,00)	99,87	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.677.900,00	27.658.179,00	(19.721,00)	99,93	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	99,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 25	Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan	952.188.160,00	951.818.000,00	(370.160,00)	99,96	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 25 . 01	Penanaman Pohon Bambu dan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (DBH DR)	952.188.160,00	951.818.000,00	(370.160,00)	99,96	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.050.000,00	6.900.000,00	(150.000,00)	97,87	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	945.138.160,00	944.918.000,00	(220.160,00)	99,98	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.244.294.360,00)	(6.034.492.939,00)	209.801.421,00	96,64	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 2 . 06		Administrasi Kependudukan dan Capil				
Unit Organisasi : 2 . 06 . 01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.817.287.250,00	6.700.997.571,00	(116.289.679,00)	98,29	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.874.072.000,00	2.806.433.388,00	(67.638.612,00)	97,65	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.874.072.000,00	2.806.433.388,00	(67.638.612,00)	97,65	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.943.215.250,00	3.894.564.183,00	(48.651.067,00)	98,77	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.165.399.650,00	1.145.607.074,00	(19.792.576,00)	98,30	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.800.000,00	3.638.000,00	(162.000,00)	95,74	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.638.000,00	(162.000,00)	95,74	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	202.800.000,00	193.470.402,00	(9.329.598,00)	95,40	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.800.000,00	193.470.402,00	(9.329.598,00)	95,40	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	46.000.000,00	45.972.000,00	(28.000,00)	99,94	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	45.972.000,00	(28.000,00)	99,94	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	4.000.000,00	3.374.050,00	(625.950,00)	84,35	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.374.050,00	(625.950,00)	84,35	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	523.480.000,00	517.000.000,00	(6.480.000,00)	98,76	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	523.480.000,00	517.000.000,00	(6.480.000,00)	98,76	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	46.641.650,00	46.509.400,00	(132.250,00)	99,72	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.641.650,00	46.509.400,00	(132.250,00)	99,72	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	151.790.000,00	151.064.800,00	(725.200,00)	99,52	

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.290.000,00	150.564.800,00	(725.200,00)	99,52	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1.827.000,00	1.821.000,00	(6.000,00)	99,67	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.827.000,00	1.821.000,00	(6.000,00)	99,67	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	25.010.000,00	24.819.000,00	(191.000,00)	99,24	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.010.000,00	24.819.000,00	(191.000,00)	99,24	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	154.371.000,00	152.258.422,00	(2.112.578,00)	98,63	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.371.000,00	152.258.422,00	(2.112.578,00)	98,63	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.295.055.600,00	1.283.558.000,00	(11.497.600,00)	99,11	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	930.860.000,00	930.860.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	930.360.000,00	930.360.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	41.600.000,00	41.530.000,00	(70.000,00)	99,83	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	41.600.000,00	41.530.000,00	(70.000,00)	99,83	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	81.900.000,00	81.900.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	81.400.000,00	81.400.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	149.705.400,00	149.508.000,00	(197.400,00)	99,87	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	149.205.400,00	149.008.000,00	(197.400,00)	99,87	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	90.990.200,00	79.760.000,00	(11.230.200,00)	87,66	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.990.200,00	79.760.000,00	(11.230.200,00)	87,66	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00	14.758.106,00	(241.894,00)	98,39	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	15.000.000,00	14.758.106,00	(241.894,00)	98,39	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.758.106,00	(241.894,00)	98,39	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.467.760.000,00	1.450.641.003,00	(17.118.997,00)	98,83	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 07	<i>Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan</i>	257.520.000,00	256.134.250,00	(1.385.750,00)	99,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	0,00	(550.000,00)	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	256.970.000,00	256.134.250,00	(835.750,00)	99,67	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 11	<i>Sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>	53.575.000,00	53.575.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.525.000,00	36.525.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 39	<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK)</i>	39.000.000,00	38.790.000,00	(210.000,00)	99,46	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	38.790.000,00	(210.000,00)	99,46	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 42	<i>Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</i>	303.781.000,00	303.557.506,00	(223.494,00)	99,93	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	303.781.000,00	303.557.506,00	(223.494,00)	99,93	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 46	<i>Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online</i>	140.200.000,00	136.694.247,00	(3.505.753,00)	97,50	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	14.514.678,00	(3.485.322,00)	80,64	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.700.000,00	121.679.569,00	(20.431,00)	99,98	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 47	<i>Pelayanan Dokumen Kependudukan</i>	293.550.000,00	282.000.000,00	(11.550.000,00)	96,07	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	293.550.000,00	282.000.000,00	(11.550.000,00)	96,07	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 48	<i>Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak</i>	380.134.000,00	379.890.000,00	(244.000,00)	99,94	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	379.134.000,00	378.890.000,00	(244.000,00)	99,94	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.817.287.250,00)	(6.700.997.571,00)	116.289.679,00	98,29	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 2 . 07		Pemberdayaan Masyarakat Desa				
Unit Organisasi : 2 . 07 . 01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.924.189.500,00	5.681.698.673,00	(242.490.827,00)	95,91	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.137.008.000,00	2.906.657.592,00	(230.350.408,00)	92,66	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.137.008.000,00	2.906.657.592,00	(230.350.408,00)	92,66	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.787.181.500,00	2.775.041.081,00	(12.140.419,00)	99,56	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	853.735.600,00	846.621.124,00	(7.114.476,00)	99,17	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	47.700.000,00	45.664.724,00	(2.035.276,00)	95,73	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.700.000,00	45.664.724,00	(2.035.276,00)	95,73	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	5.320.000,00	4.316.800,00	(1.003.200,00)	81,14	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.320.000,00	4.316.800,00	(1.003.200,00)	81,14	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	359.580.000,00	357.120.000,00	(2.460.000,00)	99,32	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	359.580.000,00	357.120.000,00	(2.460.000,00)	99,32	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	7.600.000,00	7.550.000,00	(50.000,00)	99,34	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.550.000,00	(50.000,00)	99,34	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	82.640.600,00	82.637.100,00	(3.500,00)	100,00	
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN						

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.640.600,00	82.637.100,00	(3.500,00)	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	74.050.000,00	74.019.200,00	(30.800,00)	99,96	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.050.000,00	74.019.200,00	(30.800,00)	99,96	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	3.590.000,00	3.445.000,00	(145.000,00)	95,96	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.590.000,00	3.445.000,00	(145.000,00)	95,96	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	9.676.000,00	8.504.000,00	(1.172.000,00)	87,89	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.676.000,00	8.504.000,00	(1.172.000,00)	87,89	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	28.030.000,00	27.879.000,00	(151.000,00)	99,46	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.030.000,00	27.879.000,00	(151.000,00)	99,46	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	224.725.000,00	224.665.300,00	(59.700,00)	99,97	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.725.000,00	224.665.300,00	(59.700,00)	99,97	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 27	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan</i>	4.794.000,00	4.790.000,00	(4.000,00)	99,92	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.794.000,00	4.790.000,00	(4.000,00)	99,92	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	195.332.000,00	195.259.696,00	(72.304,00)	99,96	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	141.232.000,00	141.159.696,00	(72.304,00)	99,95	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.232.000,00	141.159.696,00	(72.304,00)	99,95	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.000.750,00	18.880.000,00	(120.750,00)	99,36	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	19.000.750,00	18.880.000,00	(120.750,00)	99,36	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.750,00	18.880.000,00	(120.750,00)	99,36	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	557.028.050,00	554.866.215,00	(2.161.835,00)	99,61	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 17	<i>Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan dan Aset Nagari</i>	31.935.000,00	31.878.250,00	(56.750,00)	99,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.935.000,00	31.878.250,00	(56.750,00)	99,82	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 19	Pembinaan Administrasi Program (PAP) Dana Desa	281.697.700,00	280.805.315,00	(892.385,00)	99,68	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	263.997.700,00	263.105.315,00	(892.385,00)	99,66	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 20	Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Perdesaan	31.200.500,00	30.675.000,00	(525.500,00)	98,32	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.200.500,00	30.675.000,00	(525.500,00)	98,32	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 23	Gerakan Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM)	60.041.250,00	59.954.400,00	(86.850,00)	99,86	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.141.250,00	59.054.400,00	(86.850,00)	99,85	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 24	Pokjanal Posyandu	62.238.600,00	62.164.250,00	(74.350,00)	99,88	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.238.600,00	61.164.250,00	(74.350,00)	99,88	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 25	Pembinaan Nagari Berprestasi	72.117.000,00	71.823.750,00	(293.250,00)	99,59	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.150.000,00	12.100.000,00	(50.000,00)	99,59	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.967.000,00	59.723.750,00	(243.250,00)	99,59	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 26	Fasilitasi Kemitraan dan Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat dengan Perguruan Tinggi	17.798.000,00	17.565.250,00	(232.750,00)	98,69	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.198.000,00	15.965.250,00	(232.750,00)	98,56	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	136.658.000,00	135.657.900,00	(1.000.100,00)	99,27	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 09	Pemberdayaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari(BUMNAG)*	123.195.000,00	122.205.400,00	(989.600,00)	99,20	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.795.000,00	116.805.400,00	(989.600,00)	99,16	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 14	Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/ Nagari	13.463.000,00	13.452.500,00	(10.500,00)	99,92	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.463.000,00	13.452.500,00	(10.500,00)	99,92	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	37.343.250,00	36.567.000,00	(776.250,00)	97,92	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 12	Koordinasi Pembinaan LPM Nagari	9.502.000,00	9.172.000,00	(330.000,00)	96,53	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.502.000,00	8.172.000,00	(330.000,00)	96,12	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 16	Pelatihan Pembinaan Teknis PemerintahanDesa/Nagari (PTPD) di Kecamatan	27.841.250,00	27.395.000,00	(446.250,00)	98,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.291.250,00	19.845.000,00	(446.250,00)	97,80	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 22	Program penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	913.843.850,00	913.066.646,00	(777.204,00)	99,91	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 22 . 01	<i>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan</i>	913.843.850,00	913.066.646,00	(777.204,00)	99,91	
	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga</i>					
2.07 . 2.07.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.000.000,00	(750.000,00)	80,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	910.093.850,00	910.066.646,00	(27.204,00)	100,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 23	Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	74.240.000,00	74.122.500,00	(117.500,00)	99,84	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 23 . 03	<i>Peningkatan Kemampuan dan kemandirian LKAAM</i>	74.240.000,00	74.122.500,00	(117.500,00)	99,84	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	7.850.000,00	(50.000,00)	99,37	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.340.000,00	66.272.500,00	(67.500,00)	99,90	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.924.189.500,00)	(5.676.918.673,00)	247.270.827,00	95,83	

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 2 . 09		Perhubungan				
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01		DINAS PERHUBUNGAN				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	467.500.000,00	319.230.000,00	(148.270.000,00)	68,28	Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Penguj Perda Nomor Tahun 201 tentang Retribusi Terminal
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	467.500.000,00	319.230.000,00	(148.270.000,00)	68,28	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	467.500.000,00	319.230.000,00	(148.270.000,00)	68,28	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.920.105.334,00	6.450.660.794,00	(469.444.540,00)	93,22	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.131.169.334,00	2.997.561.210,00	(133.608.124,00)	95,73	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.131.169.334,00	2.997.561.210,00	(133.608.124,00)	95,73	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.788.936.000,00	3.453.099.584,00	(335.836.416,00)	91,14	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.479.766.450,00	2.351.877.784,00	(127.888.666,00)	94,84	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	94.800.000,00	50.091.757,00	(44.708.243,00)	52,84	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.800.000,00	50.091.757,00	(44.708.243,00)	52,84	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	51.732.950,00	43.179.100,00	(8.553.850,00)	83,47	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.732.950,00	43.179.100,00	(8.553.850,00)	83,47	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.825.690.000,00	1.751.290.000,00	(74.400.000,00)	95,92	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.825.690.000,00	1.751.290.000,00	(74.400.000,00)	95,92	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	36.170.500,00	36.170.500,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.170.500,00	36.170.500,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	144.325.000,00	144.325.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.325.000,00	144.325.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	26.748.000,00	26.638.000,00	(110.000,00)	99,59	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.748.000,00	21.748.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	4.890.000,00	(110.000,00)	97,80	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	29.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	227.920.000,00	227.805.427,00	(114.573,00)	99,95	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	227.920.000,00	227.805.427,00	(114.573,00)	99,95	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	798.252.800,00	748.660.100,00	(49.592.700,00)	93,79	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	227.505.000,00	226.650.000,00	(855.000,00)	99,62	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	226.805.000,00	225.950.000,00	(855.000,00)	99,62	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	40.000.500,00	40.000.500,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	39.750.500,00	39.750.500,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	197.407.000,00	154.514.500,00	(42.892.500,00)	78,27	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.407.000,00	154.514.500,00	(42.892.500,00)	78,27	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	333.340.300,00	327.495.100,00	(5.845.200,00)	98,25	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	1.000.000,00	(3.200.000,00)	23,81	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	329.140.300,00	326.495.100,00	(2.645.200,00)	99,20	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	57.715.500,00	51.764.700,00	(5.950.800,00)	89,69	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	57.715.500,00	51.764.700,00	(5.950.800,00)	89,69	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.715.500,00	51.764.700,00	(5.950.800,00)	89,69	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	61.874.750,00	57.534.500,00	(4.340.250,00)	92,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00 . 15 . 30	Pembangunan Pelataran, Sarana dan Prasarana Parkir terpadu	61.874.750,00	57.534.500,00	(4.340.250,00)	92,99	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.000.000,00	(900.000,00)	52,63	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.974.750,00	4.700.500,00	(274.250,00)	94,49	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	55.000.000,00	51.834.000,00	(3.166.000,00)	94,24	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	169.373.850,00	32.146.000,00	(137.227.850,00)	18,98	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	169.373.850,00	32.146.000,00	(137.227.850,00)	18,98	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.008.000,00	32.146.000,00	(2.862.000,00)	91,82	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	132.265.850,00	0,00	(132.265.850,00)	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	116.456.000,00	106.003.750,00	(10.452.250,00)	91,02	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya	54.545.000,00	54.545.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.950.000,00	43.950.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.595.000,00	10.595.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	10.900.000,00	2.287.000,00	(8.613.000,00)	20,98	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	2.287.000,00	(8.613.000,00)	20,98	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 33	Pemilihan dan Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan	51.011.000,00	49.171.750,00	(1.839.250,00)	96,39	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.261.000,00	48.421.750,00	(1.839.250,00)	96,34	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	105.496.650,00	105.112.750,00	(383.900,00)	99,64	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	105.496.650,00	105.112.750,00	(383.900,00)	99,64	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.096.650,00	104.712.750,00	(383.900,00)	99,63	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.452.605.334,00)	(6.131.430.794,00)	321.174.540,00	95,02	

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	470.000.000,00	480.575.000,00	10.575.000,00	102,25	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	470.000.000,00	480.575.000,00	10.575.000,00	102,25	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	470.000.000,00	480.575.000,00	10.575.000,00	102,25	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.367.241.350,00	5.232.131.182,00	(135.110.168,00)	97,48	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.214.435.000,00	2.148.359.131,00	(66.075.869,00)	97,02	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.214.435.000,00	2.148.359.131,00	(66.075.869,00)	97,02	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.152.806.350,00	3.083.772.051,00	(69.034.299,00)	97,81	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.489.239.850,00	1.451.911.070,00	(37.328.780,00)	97,49	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	220.000,00	0,00	(220.000,00)	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.000,00	0,00	(220.000,00)	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	683.560.000,00	680.183.727,00	(3.376.273,00)	99,51	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	645.560.000,00	642.783.727,00	(2.776.273,00)	99,57	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.000.000,00	37.400.000,00	(600.000,00)	98,42	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.200.000,00	2.371.900,00	(828.100,00)	74,12	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	2.371.900,00	(828.100,00)	74,12	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	415.268.000,00	382.795.000,00	(32.473.000,00)	92,18	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	270.185.000,00	254.245.000,00	(15.940.000,00)	94,10	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.083.000,00	128.550.000,00	(16.533.000,00)	88,60	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.551.000,00	4.464.000,00	(87.000,00)	98,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.551.000,00	4.464.000,00	(87.000,00)	98,09	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	9.100.000,00	9.060.000,00	(40.000,00)	99,56	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	9.060.000,00	(40.000,00)	99,56	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	27.138.650,00	27.121.310,00	(17.340,00)	99,94	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.138.650,00	27.121.310,00	(17.340,00)	99,94	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	21.825.200,00	21.778.200,00	(47.000,00)	99,78	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.825.200,00	21.778.200,00	(47.000,00)	99,78	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	4.295.000,00	4.280.000,00	(15.000,00)	99,65	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.295.000,00	4.280.000,00	(15.000,00)	99,65	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	4.472.000,00	4.464.000,00	(8.000,00)	99,82	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.472.000,00	4.464.000,00	(8.000,00)	99,82	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	37.500.000,00	37.449.000,00	(51.000,00)	99,86	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.449.000,00	(51.000,00)	99,86	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	275.350.000,00	275.183.933,00	(166.067,00)	99,94	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.350.000,00	275.183.933,00	(166.067,00)	99,94	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	241.403.000,00	238.996.700,00	(2.406.300,00)	99,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	17.060.000,00	17.060.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.060.000,00	17.060.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	83.000.000,00	82.560.000,00	(440.000,00)	99,47	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	83.000.000,00	82.560.000,00	(440.000,00)	99,47	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	23.300.000,00	22.345.000,00	(955.000,00)	95,90	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.300.000,00	22.345.000,00	(955.000,00)	95,90	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	23.703.000,00	23.400.000,00	(303.000,00)	98,72	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.703.000,00	23.400.000,00	(303.000,00)	98,72	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	94.340.000,00	93.631.700,00	(708.300,00)	99,25	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.340.000,00	93.631.700,00	(708.300,00)	99,25	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.360.000,00	30.262.115,00	(97.885,00)	99,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.10 . 2.10.01 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	30.360.000,00	30.262.115,00	(97.885,00)	99,68	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.360.000,00	30.262.115,00	(97.885,00)	99,68	
2.14 . 2.10.01 . 00 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	120.230.000,00	119.902.696,00	(327.304,00)	99,73	
2.14 . 2.10.01 . 00 . 15 . 10	<i>Kompilasi Produk Adminstrasi Bidang Sosial</i>	69.485.000,00	69.379.446,00	(105.554,00)	99,85	
2.14 . 2.10.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
2.14 . 2.10.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.485.000,00	55.379.446,00	(105.554,00)	99,81	
2.14 . 2.10.01 . 00 . 15 . 11	<i>Sosialisasi Statistik Daerah</i>	50.745.000,00	50.523.250,00	(221.750,00)	99,56	
2.14 . 2.10.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	6.000.000,00	(100.000,00)	98,36	
2.14 . 2.10.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.645.000,00	44.523.250,00	(121.750,00)	99,73	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	918.240.000,00	895.185.192,00	(23.054.808,00)	97,49	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 02	<i>Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi</i>	320.260.000,00	299.295.900,00	(20.964.100,00)	93,45	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	320.260.000,00	299.295.900,00	(20.964.100,00)	93,45	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 25	<i>Pembangunan Jaringan antar Organisasi Pemerintah Daerah</i>	486.205.000,00	484.551.042,00	(1.653.958,00)	99,66	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.375.000,00	103.406.042,00	(968.958,00)	99,07	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	381.830.000,00	381.145.000,00	(685.000,00)	99,82	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 29	<i>Pemeliharaan Jaringan antar OPD</i>	111.775.000,00	111.338.250,00	(436.750,00)	99,61	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.775.000,00	111.338.250,00	(436.750,00)	99,61	
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah	98.820.000,00	95.747.405,00	(3.072.595,00)	96,89	
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 01	<i>Penyediaan Kebijakan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</i>	18.990.000,00	18.015.250,00	(974.750,00)	94,87	
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.990.000,00	18.015.250,00	(974.750,00)	94,87	
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 02	<i>Pengelolaan Peralatan Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi yang Digunakan Pemerintah Daerah</i>	19.960.000,00	19.850.250,00	(109.750,00)	99,45	
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.960.000,00	19.850.250,00	(109.750,00)	99,45	
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 03	<i>Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</i>	59.870.000,00	57.881.905,00	(1.988.095,00)	96,68	
2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.870.000,00	57.881.905,00	(1.988.095,00)	96,68	
2.14 . 2.10.01 . 00 . 16	Pengembangan Statistik Sektoral	87.255.000,00	87.008.250,00	(246.750,00)	99,72	
2.14 . 2.10.01 . 00 . 16 . 02	<i>Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah</i>	87.255.000,00	87.008.250,00	(246.750,00)	99,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.14 . 2.10.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.650.000,00	(100.000,00)	97,33	
2.14 . 2.10.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.505.000,00	83.358.250,00	(146.750,00)	99,82	
2.15 . 2.10.01 . 00 . 16	Program Persandian Daerah	5.700.000,00	5.554.250,00	(145.750,00)	97,44	
2.15 . 2.10.01 . 00 . 16 . 01	<i>IT Security Aseessment pada Aplikasi yang di gunakan Pemerintah Daerah</i>	5.700.000,00	5.554.250,00	(145.750,00)	97,44	
2.15 . 2.10.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.10.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.554.250,00	(145.750,00)	97,44	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	64.058.500,00	62.611.000,00	(1.447.500,00)	97,74	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 17 . 06	<i>Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi</i>	16.290.000,00	15.794.750,00	(495.250,00)	96,96	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.590.000,00	13.094.750,00	(495.250,00)	96,36	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 17 . 08	<i>Pembinaan dan peningkatan peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</i>	47.768.500,00	46.816.250,00	(952.250,00)	98,01	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.668.500,00	45.716.250,00	(952.250,00)	97,96	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	97.500.000,00	96.593.373,00	(906.627,00)	99,07	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 08	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Prasarana Komunikasi</i>	97.500.000,00	96.593.373,00	(906.627,00)	99,07	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	96.593.373,00	(906.627,00)	99,07	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.897.241.350,00)	(4.751.556.182,00)	145.685.168,00	97,03	

Lampiran I.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2 . 11 Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	125.000.000,00	80.629.000,00	(44.371.000,00)	64,50	Perda Nomor Tahun 201 Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	125.000.000,00	80.629.000,00	(44.371.000,00)	64,50	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	125.000.000,00	80.629.000,00	(44.371.000,00)	64,50	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	38.708.049.250,00	34.141.068.193,56	(4.566.981.056,44)	88,20	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.683.614.000,00	2.578.905.438,00	(104.708.562,00)	96,10	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.683.614.000,00	2.578.905.438,00	(104.708.562,00)	96,10	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	36.024.435.250,00	31.562.162.755,56	(4.462.272.494,44)	87,61	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	962.388.750,00	959.024.809,00	(3.363.941,00)	99,65	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.600.000,00	59.342.759,00	(1.257.241,00)	97,93	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.600.000,00	59.342.759,00	(1.257.241,00)	97,93	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	361.940.000,00	360.380.000,00	(1.560.000,00)	99,57	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	361.940.000,00	360.380.000,00	(1.560.000,00)	99,57	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	48.930.750,00	48.930.750,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.930.750,00	48.930.750,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.115.000,00	29.115.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.115.000,00	29.115.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	15.804.000,00	15.804.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.804.000,00	15.804.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.380.000,00	920.000,00	(460.000,00)	66,67	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	920.000,00	(460.000,00)	66,67	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	79.700.000,00	79.660.000,00	(40.000,00)	99,95	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.700.000,00	79.660.000,00	(40.000,00)	99,95	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	344.179.000,00	344.132.300,00	(46.700,00)	99,99	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	344.179.000,00	344.132.300,00	(46.700,00)	99,99	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	176.000.000,00	175.869.702,00	(130.298,00)	99,93	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 19	Pengadaan Jasa Sewa Kantor	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	104.300.000,00	104.169.702,00	(130.298,00)	99,88	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.300.000,00	104.169.702,00	(130.298,00)	99,88	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	49.958.251,00	(41.749,00)	99,92	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	49.958.251,00	(41.749,00)	99,92	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.958.251,00	(41.749,00)	99,92	
3.06 . 2.11.01 . 00 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	133.444.000,00	132.745.942,00	(698.058,00)	99,48	
3.06 . 2.11.01 . 00 . 15 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	133.444.000,00	132.745.942,00	(698.058,00)	99,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.06 . 2.11.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
3.06 . 2.11.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.644.000,00	121.945.942,00	(698.058,00)	99,43	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	30.379.541.000,00	26.400.220.095,00	(3.979.320.905,00)	86,90	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 16 . 02	<i>Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri</i>	898.065.000,00	897.237.910,00	(827.090,00)	99,91	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	898.065.000,00	897.237.910,00	(827.090,00)	99,91	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 16 . 16	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendamping DAK)</i>	29.424.090.000,00	25.446.030.135,00	(3.978.059.865,00)	86,48	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.975.000,00	129.929.046,00	(45.954,00)	99,96	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.294.115.000,00	25.316.101.089,00	(3.978.013.911,00)	86,42	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 16 . 17	<i>Pelatihan Teknologi Informasi bagi Industri Kecil dan Menengah.</i>	30.366.000,00	30.197.800,00	(168.200,00)	99,45	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.866.000,00	26.697.800,00	(168.200,00)	99,37	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 16 . 18	<i>Pengendalian dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah.</i>	27.020.000,00	26.754.250,00	(265.750,00)	99,02	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.020.000,00	26.754.250,00	(265.750,00)	99,02	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 16 . 19	<i>Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19	Program peningkatan daya saing koperasi dan UKM	575.803.000,00	555.727.526,00	(20.075.474,00)	96,51	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 05	<i>Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi</i>	47.682.000,00	47.264.300,00	(417.700,00)	99,12	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.682.000,00	47.264.300,00	(417.700,00)	99,12	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 22	<i>Pembinaan & Penilaian KSP Koperasi</i>	37.085.000,00	36.523.850,00	(561.150,00)	98,49	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.085.000,00	36.523.850,00	(561.150,00)	98,49	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 25	<i>Pembinaan peningkatan dan pengembangan kemitraan usaha bagi UMKM</i>	133.036.000,00	132.691.208,00	(344.792,00)	99,74	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.036.000,00	132.691.208,00	(344.792,00)	99,74	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 30	<i>Kegiatan Pembinaan Manajemen Pengelolaan koperasi/KUD</i>	149.486.000,00	149.197.350,00	(288.650,00)	99,81	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.650.000,00	42.650.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.836.000,00	106.547.350,00	(288.650,00)	99,73	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 31	<i>Kegiatan Pelatihan Akuntansi Koperasi</i>	64.480.000,00	62.402.250,00	(2.077.750,00)	96,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.830.000,00	57.752.250,00	(2.077.750,00)	96,53	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 32	<i>Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM</i>	144.034.000,00	127.648.568,00	(16.385.432,00)	88,62	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.900.000,00	28.550.000,00	(1.350.000,00)	95,48	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.134.000,00	99.098.568,00	(15.035.432,00)	86,83	
3.06 . 2.11.01 . 00 . 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	3.650.974.000,00	3.195.171.780,56	(455.802.219,44)	87,52	
3.06 . 2.11.01 . 00 . 22 . 04	<i>Peningkatan Prasarana Pasar Rakyat (DAK Penugasan)</i>	3.650.974.000,00	3.195.171.780,56	(455.802.219,44)	87,52	
3.06 . 2.11.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.210.000,00	84.188.719,00	(21.281,00)	99,97	
3.06 . 2.11.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.566.764.000,00	3.110.983.061,56	(455.780.938,44)	87,22	
3.06 . 2.11.01 . 00 . 23	Program pengembangan perdagangan	67.654.000,00	67.036.900,00	(617.100,00)	99,09	
3.06 . 2.11.01 . 00 . 23 . 01	<i>Pemantauan dan pengendalian sembako dan barang strategis lainnya</i>	50.714.000,00	50.172.650,00	(541.350,00)	98,93	
3.06 . 2.11.01 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.714.000,00	50.172.650,00	(541.350,00)	98,93	
3.06 . 2.11.01 . 00 . 23 . 03	<i>Operasional retribusi pasar & kerjasama kemitraan dengan pengurus pasar</i>	16.940.000,00	16.864.250,00	(75.750,00)	99,55	
3.06 . 2.11.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.940.000,00	16.864.250,00	(75.750,00)	99,55	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 23	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	28.630.500,00	26.407.750,00	(2.222.750,00)	92,24	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 23 . 02	<i>Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi</i>	28.630.500,00	26.407.750,00	(2.222.750,00)	92,24	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.630.500,00	26.407.750,00	(2.222.750,00)	92,24	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.583.049.250,00)	(34.060.439.193,56)	4.522.610.056,44	88,28	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 2 . 12		Penanaman Modal				
Unit Organisasi : 2 . 12 . 01		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	600.000.000,00	333.452.365,00	(266.547.635,00)	55,58	Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	600.000.000,00	333.452.365,00	(266.547.635,00)	55,58	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	600.000.000,00	333.452.365,00	(266.547.635,00)	55,58	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.866.473.100,00	3.760.721.459,00	(105.751.641,00)	97,26	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.219.131.000,00	2.150.258.007,00	(68.872.993,00)	96,90	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.219.131.000,00	2.150.258.007,00	(68.872.993,00)	96,90	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.647.342.100,00	1.610.463.452,00	(36.878.648,00)	97,76	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	955.054.650,00	943.199.703,00	(11.854.947,00)	98,76	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.760.000,00	2.759.000,00	(1.000,00)	99,96	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	2.759.000,00	(1.000,00)	99,96	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	134.700.000,00	126.208.153,00	(8.491.847,00)	93,70	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.700.000,00	126.208.153,00	(8.491.847,00)	93,70	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.600.000,00	1.569.900,00	(30.100,00)	98,12	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.569.900,00	(30.100,00)	98,12	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	441.210.000,00	438.030.000,00	(3.180.000,00)	99,28	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	441.210.000,00	438.030.000,00	(3.180.000,00)	99,28	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	8.066.400,00	8.063.400,00	(3.000,00)	99,96	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.066.400,00	8.063.400,00	(3.000,00)	99,96	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	14.100.000,00	14.075.000,00	(25.000,00)	99,82	
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN						

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	14.075.000,00	(25.000,00)	99,82	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	57.539.900,00	57.533.100,00	(6.800,00)	99,99	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.539.900,00	57.533.100,00	(6.800,00)	99,99	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.270.000,00	40.263.200,00	(6.800,00)	99,98	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.270.000,00	40.263.200,00	(6.800,00)	99,98	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.208.000,00	8.199.000,00	(9.000,00)	99,89	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.208.000,00	8.199.000,00	(9.000,00)	99,89	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.416.000,00	2.406.000,00	(10.000,00)	99,59	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.416.000,00	2.406.000,00	(10.000,00)	99,59	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	25.650.000,00	25.594.500,00	(55.500,00)	99,78	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.650.000,00	25.594.500,00	(55.500,00)	99,78	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	218.534.350,00	218.498.450,00	(35.900,00)	99,98	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	218.534.350,00	218.498.450,00	(35.900,00)	99,98	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164.942.000,00	163.388.999,00	(1.553.001,00)	99,06	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	91.500.000,00	91.025.000,00	(475.000,00)	99,48	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.500.000,00	91.025.000,00	(475.000,00)	99,48	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	8.000.000,00	6.964.999,00	(1.035.001,00)	87,06	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.000.000,00	6.964.999,00	(1.035.001,00)	87,06	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.092.000,00	50.049.000,00	(43.000,00)	99,91	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.092.000,00	50.049.000,00	(43.000,00)	99,91	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 52	Penyediaan Perlengkapan Kantor	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21.140.000,00	21.070.400,00	(69.600,00)	99,67	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	21.140.000,00	21.070.400,00	(69.600,00)	99,67	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.140.000,00	21.070.400,00	(69.600,00)	99,67	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	207.880.350,00	204.071.500,00	(3.808.850,00)	98,17	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 16	Pemantauan, pembinaan dan pengawasan	46.095.100,00	45.698.400,00	(396.700,00)	99,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.095.100,00	45.698.400,00	(396.700,00)	99,14	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 18	<i>Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Hambatan</i>	38.984.500,00	38.549.100,00	(435.400,00)	98,88	
	<i>Pelaksanaan Penanaman Modal (TIM Task Force)</i>					
2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.984.500,00	38.549.100,00	(435.400,00)	98,88	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 19	<i>Penyelenggaraan Promosi dan investasi</i>	122.800.750,00	119.824.000,00	(2.976.750,00)	97,58	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.800.750,00	119.824.000,00	(2.976.750,00)	97,58	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	284.225.600,00	276.049.350,00	(8.176.250,00)	97,12	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 04	<i>Pengembangan System Informasi Penanaman Modal</i>	35.696.750,00	35.678.850,00	(17.900,00)	99,95	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.696.750,00	35.678.850,00	(17.900,00)	99,95	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 06	<i>Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal</i>	76.994.000,00	75.787.169,00	(1.206.831,00)	98,43	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.994.000,00	75.787.169,00	(1.206.831,00)	98,43	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 10	<i>Penyusunan kajian pengembangan potensi dan peluang investasi daerah</i>	29.030.000,00	28.622.050,00	(407.950,00)	98,59	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.030.000,00	28.622.050,00	(407.950,00)	98,59	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 14	<i>Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP Secara Elektronik</i>	56.340.500,00	54.800.803,00	(1.539.697,00)	97,27	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.340.500,00	54.800.803,00	(1.539.697,00)	97,27	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 15	<i>Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan</i>	61.954.950,00	58.712.700,00	(3.242.250,00)	94,77	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.950.000,00	3.700.000,00	(250.000,00)	93,67	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.004.950,00	55.012.700,00	(2.992.250,00)	94,84	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 16	<i>Peningkatan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Perizinan (Banchmarketing)</i>	24.209.400,00	22.447.778,00	(1.761.622,00)	92,72	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.209.400,00	22.447.778,00	(1.761.622,00)	92,72	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 19	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	14.099.500,00	2.683.500,00	(11.416.000,00)	19,03	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 19 . 01	<i>Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat</i>	14.099.500,00	2.683.500,00	(11.416.000,00)	19,03	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.099.500,00	2.683.500,00	(11.416.000,00)	19,03	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.266.473.100,00)	(3.427.269.094,00)	(160.795.994,00)	104,92	



TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2 . 16	Kebudayaan
Unit Organisasi	: 2 . 16 . 01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	14.058.762.125,00	13.644.369.534,85	(414.392.590,15)	97,05	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.538.648.000,00	2.470.001.475,00	(68.646.525,00)	97,30	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.538.648.000,00	2.470.001.475,00	(68.646.525,00)	97,30	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	11.520.114.125,00	11.174.368.059,85	(345.746.065,15)	97,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.289.332.675,00	1.271.629.913,00	(17.702.762,00)	98,63	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	132.840.000,00	130.386.368,00	(2.453.632,00)	98,15	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.840.000,00	130.386.368,00	(2.453.632,00)	98,15	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	28.471.000,00	28.451.000,00	(20.000,00)	99,93	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.471.000,00	28.451.000,00	(20.000,00)	99,93	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00	2.638.950,00	(2.361.050,00)	52,78	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.638.950,00	(2.361.050,00)	52,78	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	670.210.000,00	659.258.000,00	(10.952.000,00)	98,37	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	670.210.000,00	659.258.000,00	(10.952.000,00)	98,37	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	46.795.375,00	46.782.175,00	(13.200,00)	99,97	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.795.375,00	46.782.175,00	(13.200,00)	99,97	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	56.807.500,00	56.777.390,00	(30.110,00)	99,95	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.807.500,00	56.777.390,00	(30.110,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	17.968.800,00	17.960.000,00	(8.800,00)	99,95	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	17.968.800,00	17.960.000,00	(8.800,00)	99,95	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2.100.000,00	1.920.000,00	(180.000,00)	91,43	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.100.000,00	1.920.000,00	(180.000,00)	91,43	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	29.850.000,00	29.727.000,00	(123.000,00)	99,59	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	29.850.000,00	29.727.000,00	(123.000,00)	99,59	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	286.790.000,00	285.229.030,00	(1.560.970,00)	99,46	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	286.790.000,00	285.229.030,00	(1.560.970,00)	99,46	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	224.060.500,00	223.830.400,00	(230.100,00)	99,90	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	18.837.000,00	18.837.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	18.837.000,00	18.837.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	33.895.000,00	33.850.000,00	(45.000,00)	99,87	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	33.895.000,00	33.850.000,00	(45.000,00)	99,87	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	76.106.000,00	76.080.800,00	(25.200,00)	99,97	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	76.106.000,00	76.080.800,00	(25.200,00)	99,97	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	52.932.500,00	52.808.600,00	(123.900,00)	99,77	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	52.932.500,00	52.808.600,00	(123.900,00)	99,77	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 52	<i>Penyediaan Perlengkapan Kantor</i>	42.290.000,00	42.254.000,00	(36.000,00)	99,91	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	42.290.000,00	42.254.000,00	(36.000,00)	99,91	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21.800.000,00	19.160.000,00	(2.640.000,00)	87,89	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	21.800.000,00	19.160.000,00	(2.640.000,00)	87,89	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	21.800.000,00	19.160.000,00	(2.640.000,00)	87,89	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21.975.000,00	21.460.900,00	(514.100,00)	97,66	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	21.975.000,00	21.460.900,00	(514.100,00)	97,66	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	21.975.000,00	21.460.900,00	(514.100,00)	97,66	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 15	Program Pengembangan dan Kesperasian Kebijakan Pemuda	1.338.061.000,00	1.319.272.440,00	(18.788.560,00)	98,60	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 15 . 11	<i>Seleksi pendidikan dan pelatihan paskibra</i>	1.338.061.000,00	1.319.272.440,00	(18.788.560,00)	98,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13 . 2.16.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	203.275.000,00	195.289.000,00	(7.986.000,00)	96,07	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	996.186.000,00	985.383.440,00	(10.802.560,00)	98,92	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	148.093.250,00	148.069.250,00	(24.000,00)	99,98	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 01	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	148.093.250,00	148.069.250,00	(24.000,00)	99,98	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.793.250,00	140.769.250,00	(24.000,00)	99,98	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	717.043.950,00	710.371.515,00	(6.672.435,00)	99,07	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 15 . 16	<i>Dukungan Event Tour d' Singkarak</i>	432.884.150,00	429.603.399,00	(3.280.751,00)	99,24	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.800.000,00	11.750.000,00	(50.000,00)	99,58	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	421.084.150,00	417.853.399,00	(3.230.751,00)	99,23	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 15 . 17	<i>Pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kabupaten Dharmasraya</i>	174.286.200,00	172.748.777,00	(1.537.423,00)	99,12	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.350.000,00	33.200.000,00	(1.150.000,00)	96,65	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.936.200,00	139.548.777,00	(387.423,00)	99,72	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 15 . 18	<i>Fasilitasi Event - event kepariwisataan</i>	16.745.000,00	16.545.000,00	(200.000,00)	98,81	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.245.000,00	15.045.000,00	(200.000,00)	98,69	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 15 . 19	<i>Promosi pariwisata dalam dan luar negeri</i>	93.128.600,00	91.474.339,00	(1.654.261,00)	98,22	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.128.600,00	91.474.339,00	(1.654.261,00)	98,22	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	159.385.000,00	159.302.746,00	(82.254,00)	99,95	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 . 16	<i>Pelestarian Kawasan Cagar Budaya</i>	159.385.000,00	159.302.746,00	(82.254,00)	99,95	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.285.000,00	110.202.746,00	(82.254,00)	99,93	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	1.953.737.000,00	1.761.914.168,85	(191.822.831,15)	90,18	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 02	<i>Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</i>	1.679.262.000,00	1.497.314.170,85	(181.947.829,15)	89,17	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.679.262.000,00	1.497.314.170,85	(181.947.829,15)	89,17	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 19	<i>Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata</i>	274.475.000,00	264.599.998,00	(9.875.002,00)	96,40	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.475.000,00	94.340.998,00	(134.002,00)	99,86	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	180.000.000,00	170.259.000,00	(9.741.000,00)	94,59	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	335.270.500,00	303.465.550,00	(31.804.950,00)	90,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13 . 2.16.01 . 00 . 16 . 16	<i>Kirab dan Jambore Pemuda</i>	88.750.500,00	69.805.450,00	(18.945.050,00)	78,65	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.750.500,00	69.805.450,00	(18.945.050,00)	78,65	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 16 . 17	<i>Kursus Mahir Lanjut (KML) Pembina Pramuka dan Jambore Daerah</i>	148.464.000,00	135.728.100,00	(12.735.900,00)	91,42	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.400.000,00	19.200.000,00	(200.000,00)	98,97	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.064.000,00	116.528.100,00	(12.535.900,00)	90,29	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 16 . 18	<i>Pelatihan Pemuda Kreatif</i>	98.056.000,00	97.932.000,00	(124.000,00)	99,87	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.056.000,00	67.932.000,00	(124.000,00)	99,82	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.522.305.000,00	1.463.225.155,00	(59.079.845,00)	96,12	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 01	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah</i>	42.720.000,00	41.676.000,00	(1.044.000,00)	97,56	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.150.000,00	(50.000,00)	98,44	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.520.000,00	38.526.000,00	(994.000,00)	97,48	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 04	<i>Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah</i>	66.415.000,00	63.403.048,00	(3.011.952,00)	95,46	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	1.950.000,00	(1.850.000,00)	51,32	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.615.000,00	61.453.048,00	(1.161.952,00)	98,14	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 05	<i>Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah</i>	1.395.985.000,00	1.341.543.307,00	(54.441.693,00)	96,10	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.650.000,00	33.200.000,00	(2.450.000,00)	93,13	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.360.335.000,00	1.308.343.307,00	(51.991.693,00)	96,18	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 12	<i>Workshop Penetapan Cagar Budaya</i>	17.185.000,00	16.602.800,00	(582.200,00)	96,61	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.185.000,00	14.602.800,00	(582.200,00)	96,17	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17	Program pengembangan Kemitraan dan Ekonomi Kreatif	10.260.250,00	9.132.000,00	(1.128.250,00)	89,00	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 11	<i>Peningkatan dan Pengembangan Gerakan Kelompok Sadar Wisata</i>	10.260.250,00	9.132.000,00	(1.128.250,00)	89,00	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.260.250,00	9.132.000,00	(1.128.250,00)	89,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 19	Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya	74.169.000,00	72.474.000,00	(1.695.000,00)	97,71	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 19 . 01	<i>Pengadaan sarana dan prasarana kesenian</i>	65.545.000,00	64.065.000,00	(1.480.000,00)	97,74	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.545.000,00	64.065.000,00	(1.480.000,00)	97,74	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 19 . 02	<i>Pembuatan dokumen budaya daerah</i>	8.624.000,00	8.409.000,00	(215.000,00)	97,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.16 . 2.16.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.624.000,00	8.409.000,00	(215.000,00)	97,51	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	120.321.500,00	118.183.419,00	(2.138.081,00)	98,22	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 20 . 07	<i>Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga</i>	120.321.500,00	118.183.419,00	(2.138.081,00)	98,22	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.321.500,00	118.183.419,00	(2.138.081,00)	98,22	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 21	Program Pembinaan dan Perasyarakatan Olah Raga	3.584.299.500,00	3.572.876.603,00	(11.422.897,00)	99,68	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 21 . 01	<i>Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>	399.937.500,00	396.430.803,00	(3.506.697,00)	99,12	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.400.000,00	75.400.000,00	0,00	100,00	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	324.537.500,00	321.030.803,00	(3.506.697,00)	98,92	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 21 . 02	<i>Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga</i>	431.612.000,00	423.695.800,00	(7.916.200,00)	98,17	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	431.612.000,00	423.695.800,00	(7.916.200,00)	98,17	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 21 . 04	<i>Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi</i>	2.752.750.000,00	2.752.750.000,00	0,00	100,00	
2.13 . 2.16.01 . 00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.752.750.000,00	2.752.750.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.058.762.125,00)	(13.644.369.534,85)	414.392.590,15	97,05	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 2 . 17		Perpustakaan				
Unit Organisasi : 2 . 17 . 01		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.065.149.950,00	3.945.824.819,00	(119.325.131,00)	97,06	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.529.217.000,00	2.448.212.282,00	(81.004.718,00)	96,80	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.529.217.000,00	2.448.212.282,00	(81.004.718,00)	96,80	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.535.932.950,00	1.497.612.537,00	(38.320.413,00)	97,51	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	712.850.500,00	692.463.506,00	(20.386.994,00)	97,14	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	31.080.000,00	27.122.750,00	(3.957.250,00)	87,27	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.080.000,00	27.122.750,00	(3.957.250,00)	87,27	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	16.954.000,00	11.488.150,00	(5.465.850,00)	67,76	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.954.000,00	11.488.150,00	(5.465.850,00)	67,76	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	305.430.000,00	297.475.000,00	(7.955.000,00)	97,40	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	302.430.000,00	294.485.000,00	(7.945.000,00)	97,37	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.990.000,00	(10.000,00)	99,67	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	5.175.500,00	5.115.500,00	(60.000,00)	98,84	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.175.500,00	5.115.500,00	(60.000,00)	98,84	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	9.350.000,00	8.776.000,00	(574.000,00)	93,86	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	8.776.000,00	(574.000,00)	93,86	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	15.309.600,00	15.216.600,00	(93.000,00)	99,39	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.309.600,00	15.216.600,00	(93.000,00)	99,39	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	25.150.900,00	24.593.000,00	(557.900,00)	97,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.150.900,00	24.593.000,00	(557.900,00)	97,78	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	28.748.000,00	27.696.000,00	(1.052.000,00)	96,34	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.248.000,00	21.196.000,00	(52.000,00)	99,76	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,67	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	252.642.500,00	251.970.506,00	(671.994,00)	99,73	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.642.500,00	251.970.506,00	(671.994,00)	99,73	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	289.602.600,00	277.418.850,00	(12.183.750,00)	95,79	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	50.735.000,00	50.535.000,00	(200.000,00)	99,61	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.735.000,00	50.535.000,00	(200.000,00)	99,61	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	133.748.000,00	127.926.000,00	(5.822.000,00)	95,65	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	133.748.000,00	127.926.000,00	(5.822.000,00)	95,65	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	67.119.600,00	60.957.850,00	(6.161.750,00)	90,82	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.119.600,00	60.957.850,00	(6.161.750,00)	90,82	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.250.000,00	34.867.581,00	(1.382.419,00)	96,19	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	36.250.000,00	34.867.581,00	(1.382.419,00)	96,19	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.250.000,00	34.867.581,00	(1.382.419,00)	96,19	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	284.011.850,00	279.829.350,00	(4.182.500,00)	98,53	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07 . 01	<i>Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan</i>	26.840.000,00	26.107.500,00	(732.500,00)	97,27	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.840.000,00	26.107.500,00	(732.500,00)	97,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07 . 07	<i>Pengembangan Minat dan Budaya Baca</i>	42.515.000,00	42.313.250,00	(201.750,00)	99,53	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.315.000,00	40.113.250,00	(201.750,00)	99,50	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07 . 08	<i>Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah</i>	99.331.600,00	97.655.350,00	(1.676.250,00)	98,31	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.331.600,00	37.705.350,00	(1.626.250,00)	95,87	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	59.950.000,00	(50.000,00)	99,92	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07 . 12	<i>Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar</i>	115.325.250,00	113.753.250,00	(1.572.000,00)	98,64	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.325.250,00	113.753.250,00	(1.572.000,00)	98,64	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	127.935.000,00	127.837.750,00	(97.250,00)	99,92	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 06	<i>Kajian sistem administrasi kearsipan</i>	49.126.000,00	49.073.750,00	(52.250,00)	99,89	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.076.000,00	41.023.750,00	(52.250,00)	99,87	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 10	<i>Bintek Penyusunan JRA Subtantif</i>	78.809.000,00	78.764.000,00	(45.000,00)	99,94	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.209.000,00	69.164.000,00	(45.000,00)	99,93	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	85.283.000,00	85.195.500,00	(87.500,00)	99,90	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 02	<i>Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah</i>	85.283.000,00	85.195.500,00	(87.500,00)	99,90	
2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.283.000,00	85.195.500,00	(87.500,00)	99,90	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.065.149.950,00)	(3.945.824.819,00)	119.325.131,00	97,06	

Lampiran I.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	130.000.000,00	48.952.600,00	(81.047.400,00)	37,66	Perda Nomor Tahun 201 Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Perda Nomor Tahun tentang
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	130.000.000,00	48.952.600,00	(81.047.400,00)	37,66	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	130.000.000,00	48.952.600,00	(81.047.400,00)	37,66	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	26.581.595.750,00	25.552.598.147,30	(1.028.997.602,70)	96,13	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.967.876.000,00	11.417.181.350,00	(550.694.650,00)	95,40	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	11.967.876.000,00	11.417.181.350,00	(550.694.650,00)	95,40	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	14.613.719.750,00	14.135.416.797,30	(478.302.952,70)	96,73	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.742.725.800,00	2.641.069.246,00	(101.656.554,00)	96,29	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	13.740.000,00	13.728.000,00	(12.000,00)	99,91	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.740.000,00	13.728.000,00	(12.000,00)	99,91	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	178.500.000,00	150.902.887,00	(27.597.113,00)	84,54	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.500.000,00	143.952.887,00	(27.547.113,00)	83,94	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.000.000,00	6.950.000,00	(50.000,00)	99,29	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	61.650.000,00	19.241.350,00	(42.408.650,00)	31,21	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.650.000,00	19.241.350,00	(42.408.650,00)	31,21	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.600.600.000,00	1.569.185.000,00	(31.415.000,00)	98,04	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.600.000,00	1.569.185.000,00	(31.415.000,00)	98,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	11.965.000,00	11.964.000,00	(1.000,00)	99,99	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.965.000,00	11.964.000,00	(1.000,00)	99,99	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	60.150.000,00	60.100.000,00	(50.000,00)	99,92	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.150.000,00	60.100.000,00	(50.000,00)	99,92	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	109.653.300,00	109.653.300,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.653.300,00	109.653.300,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	73.985.000,00	73.985.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.985.000,00	73.985.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	10.912.500,00	10.912.500,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.912.500,00	10.912.500,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	183.060.000,00	183.055.000,00	(5.000,00)	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.060.000,00	183.055.000,00	(5.000,00)	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	438.510.000,00	438.342.209,00	(167.791,00)	99,96	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	438.510.000,00	438.342.209,00	(167.791,00)	99,96	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.124.616.000,00	1.122.384.676,00	(2.231.324,00)	99,80	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 03	<i>Pembangunan gedung kantor</i>	207.300.000,00	206.750.000,00	(550.000,00)	99,73	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	207.300.000,00	206.750.000,00	(550.000,00)	99,73	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	109.100.000,00	108.829.000,00	(271.000,00)	99,75	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	109.100.000,00	108.829.000,00	(271.000,00)	99,75	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	808.216.000,00	806.805.676,00	(1.410.324,00)	99,83	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	808.216.000,00	806.805.676,00	(1.410.324,00)	99,83	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.700.000,00	22.623.000,00	(77.000,00)	99,66	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	22.700.000,00	22.623.000,00	(77.000,00)	99,66	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.700.000,00	22.623.000,00	(77.000,00)	99,66	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	292.068.700,00	286.780.297,00	(5.288.403,00)	98,19	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 12	<i>Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (Pengendalian OPT)</i>	2.524.900,00	2.524.000,00	(900,00)	99,96	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.524.900,00	2.524.000,00	(900,00)	99,96	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 13	<i>Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (Pendamping Air Irigasi Pertanian)</i>	170.035.000,00	166.578.297,00	(3.456.703,00)	97,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	975.000,00	0,00	(975.000,00)	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.060.000,00	166.578.297,00	(2.481.703,00)	98,53	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 14	<i>Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis</i>	39.225.000,00	38.022.250,00	(1.202.750,00)	96,93	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.225.000,00	38.022.250,00	(1.202.750,00)	96,93	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 15	<i>Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani</i>	80.283.800,00	79.655.750,00	(628.050,00)	99,22	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.683.800,00	78.055.750,00	(628.050,00)	99,20	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	550.472.400,00	547.251.150,00	(3.221.250,00)	99,41	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 15	<i>Promosi atas hasil produksi pertanian</i>	494.206.600,00	494.136.050,00	(70.550,00)	99,99	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	444.211.600,00	444.141.050,00	(70.550,00)	99,98	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.995.000,00	49.995.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 21	<i>Desa Pertanian Organik</i>	56.265.800,00	53.115.100,00	(3.150.700,00)	94,40	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.265.800,00	53.115.100,00	(3.150.700,00)	94,40	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	5.362.870.200,00	5.226.712.128,00	(136.158.072,00)	97,46	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 03	<i>Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan (Perkebunan)*)</i>	593.786.000,00	583.207.450,00	(10.578.550,00)	98,22	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	593.786.000,00	583.207.450,00	(10.578.550,00)	98,22	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 05	<i>Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian</i>	43.740.000,00	43.613.500,00	(126.500,00)	99,71	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.740.000,00	43.613.500,00	(126.500,00)	99,71	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 13	<i>Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Pendamping Ditjenbun)</i>	17.225.000,00	16.500.000,00	(725.000,00)	95,79	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.225.000,00	16.500.000,00	(725.000,00)	95,79	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 26	<i>Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian/ Perkebunan</i>	2.639.185.000,00	2.638.417.367,00	(767.633,00)	99,97	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.620.135.000,00	2.619.367.367,00	(767.633,00)	99,97	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 27	<i>Pembangunan Demplot Tanaman Kelapa Sawit</i>	93.110.000,00	92.496.000,00	(614.000,00)	99,34	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.110.000,00	92.496.000,00	(614.000,00)	99,34	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 29	<i>Pendataan Ubinan Statistik Pertanian</i>	20.190.000,00	19.155.550,00	(1.034.450,00)	94,88	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.190.000,00	19.155.550,00	(1.034.450,00)	94,88	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 32	<i>pengawasan dan pengembangan alsintan</i>	21.210.000,00	20.955.850,00	(254.150,00)	98,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.210.000,00	20.955.850,00	(254.150,00)	98,80	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 34	<i>Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan (Jalan Usaha Tani/ DAK 2019)</i>	1.681.934.200,00	1.560.666.550,00	(121.267.650,00)	92,79	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.825.000,00	99.300.000,00	(525.000,00)	99,47	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.582.109.200,00	1.461.366.550,00	(120.742.650,00)	92,37	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 35	<i>Pendamping Replenting</i>	252.490.000,00	251.699.861,00	(790.139,00)	99,69	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.490.000,00	225.839.861,00	(650.139,00)	99,71	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.000.000,00	25.860.000,00	(140.000,00)	99,46	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	2.001.845.500,00	1.842.963.584,30	(158.881.915,70)	92,06	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 03	<i>Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan</i>	32.285.000,00	30.535.250,00	(1.749.750,00)	94,58	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.150.000,00	(150.000,00)	88,46	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.985.000,00	29.385.250,00	(1.599.750,00)	94,84	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 21	<i>Penyusunan Programa dan RDKK Penyuluh</i>	65.504.200,00	64.568.250,00	(935.950,00)	98,57	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.504.200,00	64.568.250,00	(935.950,00)	98,57	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 32	<i>Penunjang Operasional BP3K</i>	615.556.500,00	613.488.402,00	(2.068.098,00)	99,66	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	382.756.500,00	380.883.402,00	(1.873.098,00)	99,51	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	232.800.000,00	232.605.000,00	(195.000,00)	99,92	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 40	<i>Pembangunan Kantor BPP Pertanian (DAK 2019)</i>	1.288.499.800,00	1.134.371.682,30	(154.128.117,70)	88,04	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 20 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.288.499.800,00	1.134.371.682,30	(154.128.117,70)	88,04	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	415.772.000,00	413.558.812,00	(2.213.188,00)	99,47	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21 . 08	<i>Pengendalian dan pemberantasan Penyakit Strategis</i>	80.030.000,00	79.671.823,00	(358.177,00)	99,55	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.030.000,00	79.671.823,00	(358.177,00)	99,55	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21 . 09	<i>Operasional Puskesmas</i>	80.202.000,00	78.937.440,00	(1.264.560,00)	98,42	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.202.000,00	78.937.440,00	(1.264.560,00)	98,42	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21 . 10	<i>Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies</i>	94.190.000,00	93.858.527,00	(331.473,00)	99,65	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.190.000,00	93.858.527,00	(331.473,00)	99,65	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21 . 11	<i>Pengadaan Peralatan dan Obat-obatan Puskesmas</i>	161.350.000,00	161.091.022,00	(258.978,00)	99,84	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.350.000,00	149.101.022,00	(248.978,00)	99,83	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.000.000,00	11.990.000,00	(10.000,00)	99,92	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.091.420.400,00	1.039.293.504,00	(52.126.896,00)	95,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 14	<i>Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio</i>	64.369.200,00	62.971.892,00	(1.397.308,00)	97,83	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.369.200,00	62.971.892,00	(1.397.308,00)	97,83	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 15	<i>Operasional UPT Pembibitan</i>	242.882.300,00	241.830.000,00	(1.052.300,00)	99,57	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.882.300,00	241.830.000,00	(1.052.300,00)	99,57	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 16	<i>Operasional Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan</i>	34.750.000,00	33.024.500,00	(1.725.500,00)	95,03	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.750.000,00	33.024.500,00	(1.725.500,00)	95,03	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 17	<i>Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah</i>	189.420.000,00	182.327.750,00	(7.092.250,00)	96,26	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.420.000,00	182.327.750,00	(7.092.250,00)	96,26	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 18	<i>Budidaya Sapi Potong</i>	559.998.900,00	519.139.362,00	(40.859.538,00)	92,70	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.960.000,00	1.050.000,00	(2.910.000,00)	26,52	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	556.038.900,00	518.089.362,00	(37.949.538,00)	93,18	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 31	Pengembangan Agribisnis Pertanian	102.771.700,00	100.510.750,00	(2.260.950,00)	97,80	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 31 . 10	<i>Kegiatan Sekolah Lapangan Tanaman Hortikultura (salak)</i>	47.355.000,00	45.572.500,00	(1.782.500,00)	96,24	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.355.000,00	41.072.500,00	(1.282.500,00)	96,97	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 31 . 12	<i>Pemasyarakatan Tanaman Holtikultura (Sayur-Sayuran)</i>	55.416.700,00	54.938.250,00	(478.450,00)	99,14	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 31 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.416.700,00	54.938.250,00	(478.450,00)	99,14	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 33	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pembangunan Pertanian/Peternakan/Perkebunan	875.031.550,00	862.104.650,00	(12.926.900,00)	98,52	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 33 . 06	<i>Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pola Partisipatif</i>	875.031.550,00	862.104.650,00	(12.926.900,00)	98,52	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	5.800.000,00	(3.600.000,00)	61,70	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	835.981.550,00	826.854.650,00	(9.126.900,00)	98,91	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 33 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.650.000,00	29.450.000,00	(200.000,00)	99,33	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 36	kesehatan masyarakat veteriner	31.425.500,00	30.165.000,00	(1.260.500,00)	95,99	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 36 . 02	<i>Pengawasan peredaran pangan asal hewan (PAH) yang aman,sehat,utuh,dan Halal (ASUH)</i>	31.425.500,00	30.165.000,00	(1.260.500,00)	95,99	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	66,67	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.925.500,00	29.165.000,00	(760.500,00)	97,46	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.451.595.750,00)	(25.503.645.547,30)	947.950.202,70	96,42	

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 08 Transmigrasi Unit Organisasi : 3 . 08 . 01 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	13.980.000,00	15.574.217,00	1.594.217,00	111,40	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.980.000,00	15.574.217,00	1.594.217,00	111,40	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	13.980.000,00	15.574.217,00	1.594.217,00	111,40	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.646.385.700,00	4.230.184.336,00	(416.201.364,00)	91,04	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.645.545.000,00	2.471.445.374,00	(174.099.626,00)	93,42	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.645.545.000,00	2.471.445.374,00	(174.099.626,00)	93,42	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.000.840.700,00	1.758.738.962,00	(242.101.738,00)	87,90	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	801.170.000,00	772.684.887,00	(28.485.113,00)	96,44	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85.200.000,00	75.115.933,00	(10.084.067,00)	88,16	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.200.000,00	75.115.933,00	(10.084.067,00)	88,16	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.500.000,00	2.419.750,00	(2.080.250,00)	53,77	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	2.419.750,00	(2.080.250,00)	53,77	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	406.920.000,00	401.840.000,00	(5.080.000,00)	98,75	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	406.920.000,00	401.840.000,00	(5.080.000,00)	98,75	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.376.000,00	10.326.000,00	(50.000,00)	99,52	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.376.000,00	10.326.000,00	(50.000,00)	99,52	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.500.000,00	6.400.000,00	(3.100.000,00)	67,37	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	6.400.000,00	(3.100.000,00)	67,37	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	32.955.550,00	32.853.550,00	(102.000,00)	99,69	
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN						

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.955.550,00	32.853.550,00	(102.000,00)	99,69	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	39.174.000,00	37.037.300,00	(2.136.700,00)	94,55	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.174.000,00	37.037.300,00	(2.136.700,00)	94,55	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	6.905.000,00	6.905.000,00	0,00	100,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.905.000,00	6.905.000,00	0,00	100,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	16.800.000,00	13.410.000,00	(3.390.000,00)	79,82	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	13.410.000,00	(3.390.000,00)	79,82	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	158.429.450,00	156.261.036,00	(2.168.414,00)	98,63	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.429.450,00	156.261.036,00	(2.168.414,00)	98,63	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 36	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan</i>	30.410.000,00	30.116.318,00	(293.682,00)	99,03	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.410.000,00	30.116.318,00	(293.682,00)	99,03	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	117.430.000,00	113.630.200,00	(3.799.800,00)	96,76	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	40.000.000,00	39.450.000,00	(550.000,00)	98,63	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.450.000,00	(550.000,00)	98,63	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	53.880.000,00	50.630.200,00	(3.249.800,00)	93,97	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.880.000,00	50.630.200,00	(3.249.800,00)	93,97	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	156.739.000,00	140.562.787,00	(16.176.213,00)	89,68	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 15 . 06	<i>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja</i>	93.059.000,00	85.817.538,00	(7.241.462,00)	92,22	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.059.000,00	85.817.538,00	(7.241.462,00)	92,22	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 15 . 15	<i>Operasional Administrasi BLK</i>	63.680.000,00	54.745.249,00	(8.934.751,00)	85,97	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.280.000,00	53.345.249,00	(8.934.751,00)	85,65	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	313.864.250,00	288.999.838,00	(24.864.412,00)	92,08	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 16 . 01	<i>Penyusunan informasi bursa tenaga kerja</i>	28.086.750,00	26.507.250,00	(1.579.500,00)	94,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.01 . 3.08.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.086.750,00	26.507.250,00	(1.579.500,00)	94,38	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 16 . 11	<i>Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja</i>	240.752.500,00	232.799.835,00	(7.952.665,00)	96,70	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.752.500,00	232.799.835,00	(7.952.665,00)	96,70	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 16 . 16	<i>Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</i>	45.025.000,00	29.692.753,00	(15.332.247,00)	65,95	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.025.000,00	29.692.753,00	(15.332.247,00)	65,95	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	71.474.950,00	39.285.150,00	(32.189.800,00)	54,96	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 17 . 02	<i>Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial</i>	23.551.200,00	18.745.000,00	(4.806.200,00)	79,59	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.551.200,00	18.745.000,00	(4.806.200,00)	79,59	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 17 . 26	<i>Pendataan Perusahaan dan Penyerapan Tenaga Kerja</i>	17.128.750,00	9.569.150,00	(7.559.600,00)	55,87	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.128.750,00	9.569.150,00	(7.559.600,00)	55,87	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 17 . 33	<i>Pembinaan P2K3 dan LKS Bipartit</i>	30.795.000,00	10.971.000,00	(19.824.000,00)	35,63	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.795.000,00	10.971.000,00	(19.824.000,00)	35,63	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 20	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	137.336.000,00	17.033.200,00	(120.302.800,00)	12,40	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 20 . 06	<i>Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Transmigrasi</i>	15.864.000,00	5.509.200,00	(10.354.800,00)	34,73	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.864.000,00	5.509.200,00	(10.354.800,00)	34,73	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 20 . 07	<i>Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi</i>	121.472.000,00	11.524.000,00	(109.948.000,00)	9,49	
3.08 . 3.08.01 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.472.000,00	11.524.000,00	(109.948.000,00)	9,49	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 27	Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja	402.826.500,00	386.542.900,00	(16.283.600,00)	95,96	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 27 . 01	<i>Padat Karya Infrastruktur</i>	402.826.500,00	386.542.900,00	(16.283.600,00)	95,96	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
2.01 . 3.08.01 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	402.026.500,00	385.742.900,00	(16.283.600,00)	95,95	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.632.405.700,00)	(4.214.610.119,00)	417.795.581,00	90,98	

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai SURPLUS / (DEFISIT)	579.365.900,00	567.690.766,00	(11.675.134,00)	97,98	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1		579.365.900,00	567.690.766,00	(11.675.134,00)	97,98	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1		579.365.900,00	567.690.766,00	(11.675.134,00)	97,98	
		(579.365.900,00)	(567.690.766,00)	11.675.134,00	97,98	

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 SEKRETARIAT DAERAH						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	24.000.000,00	23.650.000,00	(350.000,00)	98,54	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.000.000,00	23.650.000,00	(350.000,00)	98,54	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	24.000.000,00	23.650.000,00	(350.000,00)	98,54	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	45.679.294.542,00	45.141.255.912,00	(538.038.630,00)	98,82	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.522.684.000,00	8.064.644.520,00	(458.039.480,00)	94,63	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.522.684.000,00	8.064.644.520,00	(458.039.480,00)	94,63	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	37.156.610.542,00	37.076.611.392,00	(79.999.150,00)	99,78	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.290.105.842,00	13.289.665.278,00	(440.564,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	825.600.000,00	825.600.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	825.600.000,00	825.600.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	200.000.000,00	199.924.365,00	(75.635,00)	99,96	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.924.365,00	(75.635,00)	99,96	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	98.250.000,00	98.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.250.000,00	98.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.470.750.000,00	3.470.533.000,00	(217.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.434.750.000,00	3.434.536.000,00	(214.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	35.997.000,00	(3.000,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	660.350.000,00	660.258.471,00	(91.529,00)	99,99	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	660.350.000,00	660.258.471,00	(91.529,00)	99,99	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	169.081.800,00	169.080.500,00	(1.300,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.081.800,00	169.080.500,00	(1.300,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	143.350.000,00	143.344.900,00	(5.100,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.350.000,00	143.344.900,00	(5.100,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	1.910.000.000,00	1.909.956.000,00	(44.000,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.910.000.000,00	1.909.956.000,00	(44.000,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	53.250.000,00	53.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.250.000,00	53.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	2.999.600.000,00	2.999.594.000,00	(6.000,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.999.600.000,00	2.999.594.000,00	(6.000,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	2.336.174.042,00	2.336.174.042,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.336.174.042,00	2.336.174.042,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 27	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.302.585.500,00	6.296.808.900,00	(5.776.600,00)	99,91	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	2.859.582.500,00	2.858.782.500,00	(800.000,00)	99,97	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.859.582.500,00	2.858.782.500,00	(800.000,00)	99,97	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	266.400.000,00	265.317.000,00	(1.083.000,00)	99,59	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.400.000,00	145.400.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.000.000,00	119.917.000,00	(1.083.000,00)	99,10	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 08	<i>Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas</i>	153.000.000,00	151.682.000,00	(1.318.000,00)	99,14	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	153.000.000,00	151.682.000,00	(1.318.000,00)	99,14	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	165.900.000,00	165.300.000,00	(600.000,00)	99,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	165.900.000,00	165.300.000,00	(600.000,00)	99,64	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	220.000.000,00	219.360.000,00	(640.000,00)	99,71	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	220.000.000,00	219.360.000,00	(640.000,00)	99,71	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	210.000.000,00	209.960.000,00	(40.000,00)	99,98	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	49.960.000,00	(40.000,00)	99,92	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	778.566.000,00	777.325.400,00	(1.240.600,00)	99,84	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	698.566.000,00	697.325.400,00	(1.240.600,00)	99,82	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	379.108.000,00	379.108.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	379.108.000,00	379.108.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.236.029.000,00	1.235.974.000,00	(55.000,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.236.029.000,00	1.235.974.000,00	(55.000,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Listrik, Air dan Telepon	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	449.000.000,00	449.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	449.000.000,00	449.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	449.000.000,00	449.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96.752.300,00	96.662.300,00	(90.000,00)	99,91	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 05 . 27	Peningkatkan kompetensi SDM Aparatur bidang keprotokolan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 05 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 05 . 28	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah	96.752.300,00	96.662.300,00	(90.000,00)	99,91	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 05 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.790.000,00	10.775.000,00	(15.000,00)	99,86	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.962.300,00	85.887.300,00	(75.000,00)	99,91	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.089.580.000,00	3.069.419.000,00	(20.161.000,00)	99,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 30	<i>Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi media cetak dan elektronik</i>	1.282.667.000,00	1.282.667.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.282.667.000,00	1.282.667.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 31	<i>Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi KDH/ WKDH</i>	444.426.000,00	444.276.000,00	(150.000,00)	99,97	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	394.426.000,00	394.426.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	49.850.000,00	(150.000,00)	99,70	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 32	<i>Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)</i>	418.959.000,00	398.958.000,00	(20.001.000,00)	95,23	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	416.259.000,00	396.258.000,00	(20.001.000,00)	95,20	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 33	<i>Peningkatan Hubungan Dengan Media Massa/ Media Relations</i>	153.717.000,00	153.717.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.167.000,00	149.167.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 34	<i>Pembinaan Kompetensi SDM Jurnalistik</i>	58.700.000,00	58.700.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.450.000,00	53.450.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 35	<i>Pengadaan Media Internal</i>	731.111.000,00	731.101.000,00	(10.000,00)	100,00	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.01.02 . 00 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	731.111.000,00	731.101.000,00	(10.000,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	5.190.141.900,00	5.188.830.122,00	(1.311.778,00)	99,97	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 16 . 05	<i>Kunjungan kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah.</i>	584.600.000,00	584.600.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	584.600.000,00	584.600.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 16 . 06	<i>Kordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.</i>	3.424.774.000,00	3.424.774.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.424.774.000,00	3.424.774.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 16 . 17	<i>Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan</i>	123.416.000,00	122.614.122,00	(801.878,00)	99,35	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.416.000,00	113.415.122,00	(878,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	9.199.000,00	(801.000,00)	91,99	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 16 . 18	<i>Peningkatan Pelayanan Keprotokolan KDH/ WKDH</i>	1.057.351.900,00	1.056.842.000,00	(509.900,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.700.000,00	99.700.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	957.651.900,00	957.142.000,00	(509.900,00)	99,95	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.02 . 00 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	3.195.738.100,00	3.192.378.972,00	(3.359.128,00)	99,89	
1.05 . 4.01.02 . 00 . 17 . 04	<i>Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji</i>	332.104.000,00	332.104.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 4.01.02 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	332.104.000,00	332.104.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 4.01.02 . 00 . 17 . 05	<i>Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi</i>	1.424.715.000,00	1.421.636.315,00	(3.078.685,00)	99,78	
1.05 . 4.01.02 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.424.715.000,00	1.421.636.315,00	(3.078.685,00)	99,78	
1.05 . 4.01.02 . 00 . 17 . 06	<i>Pelaksanaan Hari Besar Islam</i>	30.361.000,00	30.291.000,00	(70.000,00)	99,77	
1.05 . 4.01.02 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.361.000,00	30.291.000,00	(70.000,00)	99,77	
1.05 . 4.01.02 . 00 . 17 . 07	<i>Safari Ramadhan</i>	1.043.222.800,00	1.043.207.800,00	(15.000,00)	100,00	
1.05 . 4.01.02 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.043.222.800,00	1.043.207.800,00	(15.000,00)	100,00	
1.05 . 4.01.02 . 00 . 17 . 08	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	365.335.300,00	365.139.857,00	(195.443,00)	99,95	
1.05 . 4.01.02 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	365.335.300,00	365.139.857,00	(195.443,00)	99,95	
1.06 . 4.01.02 . 00 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	280.000.000,00	279.955.000,00	(45.000,00)	99,98	
1.06 . 4.01.02 . 00 . 21 . 07	<i>Sosialisasi dan Fasilitasi Operasi Bibir Sumbing</i>	280.000.000,00	279.955.000,00	(45.000,00)	99,98	
1.06 . 4.01.02 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	279.955.000,00	(45.000,00)	99,98	
4.03 . 4.01.02 . 00 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	152.000.000,00	151.870.350,00	(129.650,00)	99,91	
4.03 . 4.01.02 . 00 . 21 . 24	<i>Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan</i>	152.000.000,00	151.870.350,00	(129.650,00)	99,91	
4.03 . 4.01.02 . 00 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	117.870.350,00	(129.650,00)	99,89	
4.03 . 4.01.02 . 00 . 21 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 4.01.02 . 00 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	115.695.000,00	115.590.700,00	(104.300,00)	99,91	
1.01 . 4.01.02 . 00 . 22 . 42	<i>Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)</i>	115.695.000,00	115.590.700,00	(104.300,00)	99,91	
1.01 . 4.01.02 . 00 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.695.000,00	115.590.700,00	(104.300,00)	99,91	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 22	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*)	29.057.500,00	29.057.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 22 . 01	<i>PATEN*)</i>	29.057.500,00	29.057.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.057.500,00	29.057.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	756.798.850,00	730.328.649,00	(26.470.201,00)	96,50	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 12	<i>Publikasi Peraturan Perundang-undangan*)</i>	79.692.100,00	79.545.715,00	(146.385,00)	99,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.048.000,00	5.018.000,00	(30.000,00)	99,41	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.644.100,00	74.527.715,00	(116.385,00)	99,84	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 15	<i>Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan*)</i>	275.525.500,00	275.302.250,00	(223.250,00)	99,92	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.440.000,00	26.244.000,00	(196.000,00)	99,26	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	249.085.500,00	249.058.250,00	(27.250,00)	99,99	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 17	<i>Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan OPD</i>	132.175.000,00	132.079.433,00	(95.567,00)	99,93	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.925.000,00	118.829.433,00	(95.567,00)	99,92	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 18	<i>Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari</i>	38.582.500,00	38.578.300,00	(4.200,00)	99,99	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.800.000,00	15.796.000,00	(4.000,00)	99,97	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.782.500,00	22.782.300,00	(200,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 19	<i>Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan</i>	137.569.450,00	111.569.450,00	(26.000.000,00)	81,10	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.569.450,00	111.569.450,00	(6.000.000,00)	94,90	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 20	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan</i>	63.709.800,00	63.709.001,00	(799,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.859.800,00	59.859.001,00	(799,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 21	<i>Fasilitasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara</i>	29.544.500,00	29.544.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.852.000,00	1.852.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.692.500,00	27.692.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	298.227.200,00	297.920.549,00	(306.651,00)	99,90	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 27 . 09	<i>Pembakuan Nama Rupa Bumi</i>	31.222.700,00	31.169.300,00	(53.400,00)	99,83	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.222.700,00	31.169.300,00	(53.400,00)	99,83	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 27 . 13	<i>Penyusunan Analisis Jabatan OPD</i>	123.954.500,00	123.776.000,00	(178.500,00)	99,86	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.954.500,00	123.776.000,00	(178.500,00)	99,86	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 27 . 17	<i>Penyusunan Evaluasi Jabatan OPD</i>	143.050.000,00	142.975.249,00	(74.751,00)	99,95	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.750.000,00	118.675.249,00	(74.751,00)	99,94	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 54	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur *)	103.704.950,00	103.639.950,00	(65.000,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00 . 54 . 17	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/ Berprestasi</i>	39.498.000,00	39.433.000,00	(65.000,00)	99,84	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 54 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 54 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.598.000,00	31.533.000,00	(65.000,00)	99,79	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 54 . 18	<i>Penilaian Nagari Terbaik Bidang Keagamaan dan Ketertiban</i>	27.817.500,00	27.817.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 54 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 54 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.317.500,00	18.317.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 54 . 21	<i>Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan PMD, PPKB, Transmigrasi dan Dukcapil</i>	36.389.450,00	36.389.450,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 54 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.389.450,00	36.389.450,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 55	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan *)	78.367.500,00	78.365.926,00	(1.574,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 55 . 02	<i>Fasilitasi dan Pelaporan Rencana Aksi HAM</i>	78.367.500,00	78.365.926,00	(1.574,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.647.500,00	71.645.926,00	(1.574,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 55 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 59	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	27.900.700,00	27.791.600,00	(109.100,00)	99,61	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 59 . 29	<i>koordinasi Bidang Perhubungan</i>	27.900.700,00	27.791.600,00	(109.100,00)	99,61	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.900.700,00	27.791.600,00	(109.100,00)	99,61	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 60	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.099.227.000,00	1.098.017.475,00	(1.209.525,00)	99,89	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 60 . 01	<i>Penyusunan Analisa Standar Belanja</i>	200.000.000,00	199.933.550,00	(66.450,00)	99,97	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 60 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 60 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.000.000,00	148.933.550,00	(66.450,00)	99,96	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 60 . 02	<i>Penyusunan standar satuan harga</i>	63.639.500,00	63.244.500,00	(395.000,00)	99,38	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.639.500,00	63.244.500,00	(395.000,00)	99,38	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 60 . 75	<i>Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)</i>	276.587.500,00	275.858.925,00	(728.575,00)	99,74	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 60 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 60 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	257.445.000,00	257.303.925,00	(141.075,00)	99,95	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 60 . 75 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.587.500,00	17.000.000,00	(587.500,00)	96,66	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 60 . 77	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah</i>	559.000.000,00	558.980.500,00	(19.500,00)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00 . 60 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 60 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	556.540.000,00	556.520.500,00	(19.500,00)	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 61	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	143.690.000,00	143.650.096,00	(39.904,00)	99,97	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 61 . 05	<i>Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah, Pihak Ketiga dan Luar Negeri</i>	143.690.000,00	143.650.096,00	(39.904,00)	99,97	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.090.000,00	110.050.096,00	(39.904,00)	99,96	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 65	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	24.438.000,00	24.355.500,00	(82.500,00)	99,66	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 65 . 01	<i>Dialog Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota LSM/ Organisasi Sosial</i>	24.438.000,00	24.355.500,00	(82.500,00)	99,66	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 65 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.438.000,00	24.355.500,00	(82.500,00)	99,66	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 66	Program Pengembangan Wilayah	136.236.600,00	136.091.736,00	(144.864,00)	99,89	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 66 . 01	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah dan Batas Nagari</i>	136.236.600,00	136.091.736,00	(144.864,00)	99,89	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.236.600,00	136.091.736,00	(144.864,00)	99,89	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67	Program Optimalisasi Lelang terpadu	1.056.392.500,00	1.050.133.517,00	(6.258.983,00)	99,41	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 01	<i>Operasional LPSE</i>	95.369.000,00	91.365.000,00	(4.004.000,00)	95,80	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	80.000.000,00	(4.000.000,00)	95,24	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.369.000,00	11.365.000,00	(4.000,00)	99,96	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 02	<i>Operasional ULP</i>	390.028.000,00	389.123.344,00	(904.656,00)	99,77	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	258.930.000,00	258.605.000,00	(325.000,00)	99,87	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.098.000,00	95.868.344,00	(229.656,00)	99,76	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	34.650.000,00	(350.000,00)	99,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 04	<i>Performance Management Monitoring ULP</i>	34.107.000,00	34.100.900,00	(6.100,00)	99,98	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.107.000,00	34.100.900,00	(6.100,00)	99,98	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 05	<i>Peningkatan SDM Penyelenggaraan dan Penyedia Barang dan Jasa</i>	79.423.000,00	79.121.674,00	(301.326,00)	99,62	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.423.000,00	79.121.674,00	(301.326,00)	99,62	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 06	<i>Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE</i>	57.710.000,00	57.617.931,00	(92.069,00)	99,84	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.710.000,00	57.617.931,00	(92.069,00)	99,84	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 08	<i>Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)</i>	164.840.000,00	164.266.697,00	(573.303,00)	99,65	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.840.000,00	152.266.697,00	(573.303,00)	99,62	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 09	<i>Penanganan Permasalahan PBJ</i>	65.036.500,00	64.843.336,00	(193.164,00)	99,70	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.036.500,00	64.843.336,00	(193.164,00)	99,70	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 10	<i>KoordinasiPembinaan, Peningkatan kelembagaan bidang PBJ</i>	169.879.000,00	169.694.635,00	(184.365,00)	99,89	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 67 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.879.000,00	169.694.635,00	(184.365,00)	99,89	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 68	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam	159.747.500,00	159.283.600,00	(463.900,00)	99,71	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 68 . 01	<i>Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA</i>	85.148.500,00	84.739.600,00	(408.900,00)	99,52	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 68 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.148.500,00	84.739.600,00	(408.900,00)	99,52	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 68 . 02	<i>Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA</i>	74.599.000,00	74.544.000,00	(55.000,00)	99,93	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.599.000,00	74.544.000,00	(55.000,00)	99,93	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 69	Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah	341.776.100,00	334.060.001,00	(7.716.099,00)	97,74	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 69 . 01	<i>Koordinasi Bidang Perekonomian</i>	282.275.100,00	280.740.601,00	(1.534.499,00)	99,46	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 69 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 69 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	281.575.100,00	280.740.601,00	(834.499,00)	99,70	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 69 . 02	<i>Monitoring dan Pengendalian Inflasi</i>	59.501.000,00	53.319.400,00	(6.181.600,00)	89,61	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 69 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.501.000,00	53.319.400,00	(6.181.600,00)	89,61	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 70	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	83.242.500,00	77.814.482,00	(5.428.018,00)	93,48	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 70 . 01	<i>Pengawasan Barang Barang Bersubsdi</i>	83.242.500,00	77.814.482,00	(5.428.018,00)	93,48	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.242.500,00	77.814.482,00	(5.428.018,00)	93,48	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 70 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 72	Program pengembangan promosi dan kerja sama investasi	36.691.000,00	36.691.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 72 . 01	<i>Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (CSR)</i>	36.691.000,00	36.691.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.691.000,00	36.691.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 73	Program Pelaksanaan Pembangunan Daerah	586.092.000,00	585.807.189,00	(284.811,00)	99,95	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 73 . 01	<i>Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	204.620.000,00	204.555.893,00	(64.107,00)	99,97	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 73 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.650.000,00	45.650.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 73 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.970.000,00	158.905.893,00	(64.107,00)	99,96	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 73 . 03	<i>Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)</i>	75.027.000,00	75.027.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 73 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 73 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.877.000,00	49.877.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00 . 73 . 04	<i>Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</i>	220.336.250,00	220.229.888,00	(106.362,00)	99,95	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 73 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.820.000,00	48.784.000,00	(36.000,00)	99,93	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 73 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.516.250,00	171.445.888,00	(70.362,00)	99,96	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 73 . 07	<i>Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari</i>	15.309.750,00	15.309.750,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 73 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.309.750,00	15.309.750,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 73 . 10	<i>Fasilitasi Nagari Binaan Perantau Kerjasama Rantau</i>	54.995.000,00	54.880.658,00	(114.342,00)	99,79	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 73 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.995.000,00	54.880.658,00	(114.342,00)	99,79	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 73 . 11	<i>Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Kerjasama Daerah</i>	15.804.000,00	15.804.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 73 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.804.000,00	15.804.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 74	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	33.422.000,00	33.422.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 74 . 01	<i>Bimtek Penyusunan LPPD</i>	33.422.000,00	33.422.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 74 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 74 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.722.000,00	27.722.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(45.655.294.542,00)	(45.117.605.912,00)	537.688.630,00	98,82	

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai SURPLUS / (DEFISIT)	12.307.643.950,00	10.811.606.532,00	(1.496.037.418,00)	87,84	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1		12.307.643.950,00	10.811.606.532,00	(1.496.037.418,00)	87,84	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1		12.307.643.950,00	10.811.606.532,00	(1.496.037.418,00)	87,84	
		(12.307.643.950,00)	(10.811.606.532,00)	1.496.037.418,00	87,84	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	24.937.450.500,00	22.457.348.724,00	(2.480.101.776,00)	90,05	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.315.473.000,00	2.121.485.680,00	(193.987.320,00)	91,62	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.315.473.000,00	2.121.485.680,00	(193.987.320,00)	91,62	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	22.621.977.500,00	20.335.863.044,00	(2.286.114.456,00)	89,89	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.670.546.000,00	3.145.116.001,00	(525.429.999,00)	85,69	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	32.175.000,00	25.358.750,00	(6.816.250,00)	78,82	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.175.000,00	25.358.750,00	(6.816.250,00)	78,82	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	438.000.000,00	362.748.822,00	(75.251.178,00)	82,82	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	438.000.000,00	362.748.822,00	(75.251.178,00)	82,82	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	222.837.500,00	212.550.250,00	(10.287.250,00)	95,38	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	2.500.000,00	(3.500.000,00)	41,67	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.837.500,00	210.050.250,00	(6.787.250,00)	96,87	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 04	<i>Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS</i>	103.486.500,00	13.548.750,00	(89.937.750,00)	13,09	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.486.500,00	13.548.750,00	(89.937.750,00)	13,09	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	110.000.000,00	89.130.150,00	(20.869.850,00)	81,03	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	89.130.150,00	(20.869.850,00)	81,03	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	1.393.840.000,00	1.200.213.000,00	(193.627.000,00)	86,11	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.393.840.000,00	1.200.213.000,00	(193.627.000,00)	86,11	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	64.387.000,00	56.888.000,00	(7.499.000,00)	88,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.887.000,00	53.388.000,00	(7.499.000,00)	87,68	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	105.950.000,00	58.325.000,00	(47.625.000,00)	55,05	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.950.000,00	58.325.000,00	(47.625.000,00)	55,05	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	60.055.000,00	60.033.500,00	(21.500,00)	99,96	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.055.000,00	60.033.500,00	(21.500,00)	99,96	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	189.150.000,00	168.297.900,00	(20.852.100,00)	88,98	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.150.000,00	168.297.900,00	(20.852.100,00)	88,98	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	31.850.000,00	28.300.000,00	(3.550.000,00)	88,85	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.850.000,00	28.300.000,00	(3.550.000,00)	88,85	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	130.000.000,00	112.175.000,00	(17.825.000,00)	86,29	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	112.175.000,00	(17.825.000,00)	86,29	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	304.000.000,00	303.435.000,00	(565.000,00)	99,81	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	304.000.000,00	303.435.000,00	(565.000,00)	99,81	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	113.050.000,00	86.232.000,00	(26.818.000,00)	76,28	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.050.000,00	86.232.000,00	(26.818.000,00)	76,28	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	371.765.000,00	367.879.879,00	(3.885.121,00)	98,95	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	371.765.000,00	367.879.879,00	(3.885.121,00)	98,95	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.556.611.500,00	1.324.557.146,00	(232.054.354,00)	85,09	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	60.000.000,00	57.600.000,00	(2.400.000,00)	96,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	57.600.000,00	(2.400.000,00)	96,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	342.000.000,00	305.230.000,00	(36.770.000,00)	89,25	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	342.000.000,00	305.230.000,00	(36.770.000,00)	89,25	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	251.154.500,00	219.357.600,00	(31.796.900,00)	87,34	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.654.500,00	24.514.600,00	(31.139.900,00)	44,05	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	195.500.000,00	194.843.000,00	(657.000,00)	99,66	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 23	<i>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</i>	189.708.000,00	127.269.746,00	(62.438.254,00)	67,09	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.708.000,00	127.269.746,00	(62.438.254,00)	67,09	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	225.999.000,00	157.977.000,00	(68.022.000,00)	69,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.999.000,00	157.977.000,00	(68.022.000,00)	69,90	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	487.750.000,00	457.122.800,00	(30.627.200,00)	93,72	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	485.000.000,00	457.122.800,00	(27.877.200,00)	94,25	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	463.500.000,00	440.880.000,00	(22.620.000,00)	95,12	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	463.500.000,00	440.880.000,00	(22.620.000,00)	95,12	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	463.500.000,00	440.880.000,00	(22.620.000,00)	95,12	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	381.488.500,00	186.772.100,00	(194.716.400,00)	48,96	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	381.488.500,00	186.772.100,00	(194.716.400,00)	48,96	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	381.488.500,00	186.772.100,00	(194.716.400,00)	48,96	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	16.549.831.500,00	15.238.537.797,00	(1.311.293.703,00)	92,08	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 01	Pembahasan rancangan peraturan daerah dan Peraturan lainnya	6.150.825.000,00	5.602.499.894,00	(548.325.106,00)	91,09	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.600.000,00	8.715.000,00	(4.885.000,00)	64,08	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.137.225.000,00	5.593.784.894,00	(543.440.106,00)	91,15	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	423.700.000,00	310.532.500,00	(113.167.500,00)	73,29	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	423.700.000,00	310.532.500,00	(113.167.500,00)	73,29	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 05	Kegiatan Reses	419.627.500,00	245.226.900,00	(174.400.600,00)	58,44	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	419.627.500,00	245.226.900,00	(174.400.600,00)	58,44	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	6.267.200.000,00	6.076.348.425,00	(190.851.575,00)	96,95	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.267.200.000,00	6.076.348.425,00	(190.851.575,00)	96,95	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2.597.360.000,00	2.460.021.390,00	(137.338.610,00)	94,71	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.597.360.000,00	2.460.021.390,00	(137.338.610,00)	94,71	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 11	Fasilitasi Penyusunan Standar Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 12	Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD	471.498.000,00	372.908.688,00	(98.589.312,00)	79,09	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	471.498.000,00	372.908.688,00	(98.589.312,00)	79,09	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 13	Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli	219.621.000,00	171.000.000,00	(48.621.000,00)	77,86	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	216.000.000,00	171.000.000,00	(45.000.000,00)	79,17	

Lampiran I.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
Bidang Pemerintahan : 4 . 01		Administrasi Pemerintahan				
Unit Organisasi : 4 . 01 . 05		KECAMATAN PULAU PUNJUNG				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	19.560.000,00	15.625.000,00	(3.935.000,00)	79,88	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19.560.000,00	15.625.000,00	(3.935.000,00)	79,88	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	19.560.000,00	15.625.000,00	(3.935.000,00)	79,88	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.969.733.250,00	1.926.880.772,00	(42.852.478,00)	97,82	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.418.627.000,00	1.376.132.730,00	(42.494.270,00)	97,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.418.627.000,00	1.376.132.730,00	(42.494.270,00)	97,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	551.106.250,00	550.748.042,00	(358.208,00)	99,94	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	506.708.900,00	506.354.492,00	(354.408,00)	99,93	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.716.000,00	16.637.753,00	(78.247,00)	99,53	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.716.000,00	16.637.753,00	(78.247,00)	99,53	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	2.951.500,00	(48.500,00)	98,38	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.951.500,00	(48.500,00)	98,38	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	176.410.000,00	176.230.000,00	(180.000,00)	99,90	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	176.410.000,00	176.230.000,00	(180.000,00)	99,90	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.291.500,00	3.291.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.291.500,00	3.291.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	36.898.200,00	36.898.200,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.898.200,00	36.898.200,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	14.924.000,00	14.924.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.924.000,00	14.924.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1.391.500,00	1.391.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.391.500,00	1.391.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	8.045.000,00	8.045.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.045.000,00	8.045.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2.700.000,00	2.695.000,00	(5.000,00)	99,81	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.695.000,00	(5.000,00)	99,81	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	61.670.000,00	61.670.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.670.000,00	61.670.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	174.612.700,00	174.570.039,00	(42.661,00)	99,98	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.612.700,00	174.570.039,00	(42.661,00)	99,98	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	28.783.550,00	28.783.550,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	28.783.550,00	28.783.550,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.783.550,00	28.783.550,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	15.613.800,00	15.610.000,00	(3.800,00)	99,98	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 57 . 01	<i>Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa</i>	12.083.800,00	12.080.000,00	(3.800,00)	99,97	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.083.800,00	12.080.000,00	(3.800,00)	99,97	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 57 . 02	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan</i>	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.950.173.250,00)	(1.911.255.772,00)	38.917.478,00	98,00	

Lampiran I.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
Bidang Pemerintahan : 4 . 01		Administrasi Pemerintahan				
Unit Organisasi : 4 . 01 . 06		KECAMATAN SITIUNG				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	19.460.000,00	16.183.000,00	(3.277.000,00)	83,16	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19.460.000,00	16.183.000,00	(3.277.000,00)	83,16	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	19.460.000,00	16.183.000,00	(3.277.000,00)	83,16	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.519.000.000,00	2.448.661.425,00	(70.338.575,00)	97,21	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.054.900.000,00	1.984.868.125,00	(70.031.875,00)	96,59	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.054.900.000,00	1.984.868.125,00	(70.031.875,00)	96,59	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	464.100.000,00	463.793.300,00	(306.700,00)	99,93	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	379.011.200,00	378.894.900,00	(116.300,00)	99,97	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000,00	5.996.900,00	(3.100,00)	99,95	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.996.900,00	(3.100,00)	99,95	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.400.000,00	1.369.050,00	(30.950,00)	97,79	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.369.050,00	(30.950,00)	97,79	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	133.160.000,00	133.160.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.160.000,00	133.160.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.682.700,00	2.682.000,00	(700,00)	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.682.700,00	2.682.000,00	(700,00)	99,97	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	4.427.500,00	4.427.000,00	(500,00)	99,99	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.427.500,00	4.427.000,00	(500,00)	99,99	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	12.203.000,00	12.202.950,00	(50,00)	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.203.000,00	12.202.950,00	(50,00)	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	8.618.500,00	8.613.500,00	(5.000,00)	99,94	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.618.500,00	8.613.500,00	(5.000,00)	99,94	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	373.000,00	373.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	373.000,00	373.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	26.008.000,00	26.008.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.008.000,00	26.008.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	151.938.500,00	151.862.500,00	(76.000,00)	99,95	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.938.500,00	151.862.500,00	(76.000,00)	99,95	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.108.800,00	65.048.400,00	(60.400,00)	99,91	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	20.108.800,00	20.048.400,00	(60.400,00)	99,70	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.108.800,00	20.048.400,00	(60.400,00)	99,70	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 03 . 05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.06 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.06 . 00 . 57 4.01 . 4.01.06 . 00 . 57 . 01 4.01 . 4.01.06 . 00 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.06 . 00 . 57 . 02 4.01 . 4.01.06 . 00 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	8.730.000,00	8.600.000,00	(130.000,00)	98,51	
	<i>Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa</i>	8.630.000,00	8.600.000,00	(30.000,00)	99,65	
	Belanja Barang dan Jasa	8.630.000,00	8.600.000,00	(30.000,00)	99,65	
	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan</i>	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.499.540.000,00)	(2.432.478.425,00)	67.061.575,00	97,32	

Lampiran I.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 KECAMATAN KOTO BARU						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	3.600.000,00	3.617.000,00	17.000,00	100,47	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.600.000,00	3.617.000,00	17.000,00	100,47	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	3.600.000,00	3.617.000,00	17.000,00	100,47	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.319.356.589,00	2.270.448.938,00	(48.907.651,00)	97,89	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.723.394.000,00	1.678.175.313,00	(45.218.687,00)	97,38	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.723.394.000,00	1.678.175.313,00	(45.218.687,00)	97,38	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	595.962.589,00	592.273.625,00	(3.688.964,00)	99,38	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	511.191.510,00	507.600.546,00	(3.590.964,00)	99,30	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.400.000,00	8.062.663,00	(337.337,00)	95,98	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.062.663,00	(337.337,00)	95,98	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.700.000,00	1.577.550,00	(122.450,00)	92,80	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.577.550,00	(122.450,00)	92,80	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	226.590.000,00	223.810.000,00	(2.780.000,00)	98,77	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	226.590.000,00	223.810.000,00	(2.780.000,00)	98,77	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.609.000,00	4.609.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.609.000,00	4.609.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	17.042.000,00	17.042.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.042.000,00	17.042.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	6.866.800,00	6.866.800,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.866.800,00	6.866.800,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	2.779.000,00	2.779.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.779.000,00	2.779.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	54.293.910,00	54.293.909,00	(1,00)	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.293.910,00	46.293.909,00	(1,00)	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	517.800,00	517.800,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	517.800,00	517.800,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	29.500.000,00	29.486.000,00	(14.000,00)	99,95	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	29.486.000,00	(14.000,00)	99,95	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	155.093.000,00	154.755.824,00	(337.176,00)	99,78	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.843.000,00	152.505.824,00	(337.176,00)	99,78	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	67.971.079,00	67.923.079,00	(48.000,00)	99,93	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	18.425.879,00	18.425.879,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.425.879,00	18.425.879,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	44.545.200,00	44.497.200,00	(48.000,00)	99,89	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.745.200,00	24.697.200,00	(48.000,00)	99,81	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 03 . 05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 KECAMATAN SUNGAI RUMBAI						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	10.180.000,00	13.111.250,00	2.931.250,00	128,79	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.180.000,00	13.111.250,00	2.931.250,00	128,79	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	10.180.000,00	13.111.250,00	2.931.250,00	128,79	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.127.996.400,00	2.060.442.328,00	(67.554.072,00)	96,83	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.653.280.000,00	1.588.629.315,00	(64.650.685,00)	96,09	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.653.280.000,00	1.588.629.315,00	(64.650.685,00)	96,09	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	474.716.400,00	471.813.013,00	(2.903.387,00)	99,39	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	381.721.400,00	381.063.013,00	(658.387,00)	99,83	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.300.000,00	15.292.000,00	(8.000,00)	99,95	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	15.292.000,00	(8.000,00)	99,95	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.729.900,00	1.291.000,00	(438.900,00)	74,63	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.729.900,00	1.291.000,00	(438.900,00)	74,63	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	152.750.000,00	152.750.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	152.750.000,00	152.750.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.866.000,00	2.861.000,00	(5.000,00)	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.866.000,00	2.861.000,00	(5.000,00)	99,83	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	6.967.500,00	6.967.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.967.500,00	6.967.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	16.778.100,00	16.778.100,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.778.100,00	16.778.100,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	7.759.900,00	7.750.750,00	(9.150,00)	99,88	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.759.900,00	7.750.750,00	(9.150,00)	99,88	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	29.400.000,00	29.366.000,00	(34.000,00)	99,88	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	29.366.000,00	(34.000,00)	99,88	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	136.615.000,00	136.451.663,00	(163.337,00)	99,88	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.615.000,00	136.451.663,00	(163.337,00)	99,88	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	64.245.000,00	62.005.000,00	(2.240.000,00)	96,51	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	20.640.000,00	20.640.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.640.000,00	20.640.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	26.605.000,00	24.365.000,00	(2.240.000,00)	91,58	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.605.000,00	24.365.000,00	(2.240.000,00)	91,58	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	17.000.000,00	16.995.000,00	(5.000,00)	99,97	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 03 . 05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	17.000.000,00	16.995.000,00	(5.000,00)	99,97	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.995.000,00	(5.000,00)	99,97	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
 Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan KECAMATAN SEMBILAN KOTO						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.915.916.400,00	1.873.675.398,00	(42.241.002,00)	97,80	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.447.934.000,00	1.408.234.582,00	(39.699.418,00)	97,26	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.447.934.000,00	1.408.234.582,00	(39.699.418,00)	97,26	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	467.982.400,00	465.440.816,00	(2.541.584,00)	99,46	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	365.080.100,00	363.047.166,00	(2.032.934,00)	99,44	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000,00	4.746.250,00	(1.253.750,00)	79,10	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.746.250,00	(1.253.750,00)	79,10	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.900.000,00	2.550.450,00	(349.550,00)	87,95	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.550.450,00	(349.550,00)	87,95	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	151.230.000,00	151.230.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	151.230.000,00	151.230.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	12.762.300,00	12.643.566,00	(118.734,00)	99,07	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.762.300,00	12.643.566,00	(118.734,00)	99,07	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	10.288.800,00	10.271.375,00	(17.425,00)	99,83	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.288.800,00	10.271.375,00	(17.425,00)	99,83	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1.493.000,00	1.493.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.493.000,00	1.493.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	4.500.000,00	4.480.875,00	(19.125,00)	99,58	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.500.000,00	4.480.875,00	(19.125,00)	99,58	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	19.728.000,00	19.728.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.728.000,00	19.728.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	149.228.000,00	148.953.650,00	(274.350,00)	99,82	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.228.000,00	148.953.650,00	(274.350,00)	99,82	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.038.800,00	74.804.550,00	(234.250,00)	99,69	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	19.000.000,00	18.900.000,00	(100.000,00)	99,47	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.000.000,00	18.900.000,00	(100.000,00)	99,47	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	7.000.000,00	6.968.750,00	(31.250,00)	99,55	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.000.000,00	6.968.750,00	(31.250,00)	99,55	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	8.000.000,00	7.988.500,00	(11.500,00)	99,86	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.988.500,00	(11.500,00)	99,86	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	41.038.800,00	40.947.300,00	(91.500,00)	99,78	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.038.800,00	40.947.300,00	(91.500,00)	99,78	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 03 . 05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor :
 Tanggal :
 Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan KECAMATAN TIMPEH						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	6.160.000,00	4.862.500,00	(1.297.500,00)	78,94	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.160.000,00	4.862.500,00	(1.297.500,00)	78,94	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	6.160.000,00	4.862.500,00	(1.297.500,00)	78,94	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.718.464.950,00	1.697.475.245,00	(20.989.705,00)	98,78	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.238.947.000,00	1.218.762.145,00	(20.184.855,00)	98,37	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.238.947.000,00	1.218.762.145,00	(20.184.855,00)	98,37	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	479.517.950,00	478.713.100,00	(804.850,00)	99,83	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	437.985.950,00	437.229.600,00	(756.350,00)	99,83	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	2.846.000,00	2.825.500,00	(20.500,00)	99,28	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.846.000,00	2.825.500,00	(20.500,00)	99,28	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	1.300.000,00	1.285.650,00	(14.350,00)	98,90	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.285.650,00	(14.350,00)	98,90	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	150.220.000,00	150.220.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.220.000,00	150.220.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	1.481.000,00	1.481.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.481.000,00	1.481.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	2.800.000,00	2.780.000,00	(20.000,00)	99,29	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.780.000,00	(20.000,00)	99,29	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	12.671.950,00	12.450.000,00	(221.950,00)	98,25	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.671.950,00	12.450.000,00	(221.950,00)	98,25	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	7.235.000,00	7.139.000,00	(96.000,00)	98,67	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.235.000,00	7.139.000,00	(96.000,00)	98,67	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	8.000.000,00	7.929.500,00	(70.500,00)	99,12	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.000.000,00	7.929.500,00	(70.500,00)	99,12	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	612.000,00	612.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	612.000,00	612.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	21.485.000,00	21.475.000,00	(10.000,00)	99,95	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.485.000,00	21.475.000,00	(10.000,00)	99,95	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	226.415.000,00	226.111.950,00	(303.050,00)	99,87	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.415.000,00	226.111.950,00	(303.050,00)	99,87	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	28.520.000,00	28.471.500,00	(48.500,00)	99,83	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	2.500.000,00	2.460.000,00	(40.000,00)	98,40	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.460.000,00	(40.000,00)	98,40	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	23.020.000,00	23.011.500,00	(8.500,00)	99,96	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.020.000,00	23.011.500,00	(8.500,00)	99,96	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	13.012.000,00	13.012.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 57 . 01	<i>Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa</i>	3.762.000,00	3.762.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.762.000,00	3.762.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 57 . 02	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan</i>	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.712.304.950,00)	(1.692.612.745,00)	19.692.205,00	98,85	

Lampiran I.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 KECAMATAN KOTO SALAK						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.000.000,00	5.340.000,00	4.340.000,00	534,00	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.000.000,00	5.340.000,00	4.340.000,00	534,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.000.000,00	5.340.000,00	4.340.000,00	534,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.826.329.100,00	1.775.522.659,00	(50.806.441,00)	97,22	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.277.125.000,00	1.226.406.652,00	(50.718.348,00)	96,03	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.277.125.000,00	1.226.406.652,00	(50.718.348,00)	96,03	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	549.204.100,00	549.116.007,00	(88.093,00)	99,98	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	517.704.100,00	517.625.007,00	(79.093,00)	99,98	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.500.000,00	10.493.000,00	(7.000,00)	99,93	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.493.000,00	(7.000,00)	99,93	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	170.010.000,00	169.960.000,00	(50.000,00)	99,97	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	170.010.000,00	169.960.000,00	(50.000,00)	99,97	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.124.000,00	3.124.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.124.000,00	3.124.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	8.293.000,00	8.293.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.293.000,00	8.293.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	17.215.900,00	17.215.000,00	(900,00)	99,99	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.215.900,00	17.215.000,00	(900,00)	99,99	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	9.477.500,00	9.477.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.477.500,00	9.477.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	3.957.500,00	3.957.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.957.500,00	3.957.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	58.467.200,00	58.467.200,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	58.467.200,00	58.467.200,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	23.100.000,00	23.090.000,00	(10.000,00)	99,96	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	23.090.000,00	(10.000,00)	99,96	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	210.209.000,00	210.197.807,00	(11.193,00)	99,99	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	210.209.000,00	210.197.807,00	(11.193,00)	99,99	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23.500.000,00	23.491.000,00	(9.000,00)	99,96	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	16.000.000,00	15.991.000,00	(9.000,00)	99,94	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.991.000,00	(9.000,00)	99,94	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 03 . 05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 57 . 01	<i>Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa</i>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.825.329.100,00)	(1.770.182.659,00)	55.146.441,00	96,98	

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 KECAMATAN ASAM JUJUHAN						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.630.329.500,00	1.592.251.599,00	(38.077.901,00)	97,66	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.110.129.000,00	1.074.436.020,00	(35.692.980,00)	96,78	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.110.129.000,00	1.074.436.020,00	(35.692.980,00)	96,78	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	520.200.500,00	517.815.579,00	(2.384.921,00)	99,54	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	469.705.500,00	468.200.930,00	(1.504.570,00)	99,68	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.400.000,00	5.367.750,00	(32.250,00)	99,40	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.367.750,00	(32.250,00)	99,40	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.100.000,00	2.040.750,00	(59.250,00)	97,18	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.040.750,00	(59.250,00)	97,18	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	160.660.000,00	159.495.000,00	(1.165.000,00)	99,27	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	153.190.000,00	152.050.000,00	(1.140.000,00)	99,26	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.470.000,00	7.445.000,00	(25.000,00)	99,67	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.349.500,00	2.349.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.349.500,00	2.349.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	15.788.000,00	15.787.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.788.000,00	15.787.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	6.776.000,00	6.774.200,00	(1.800,00)	99,97	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.776.000,00	6.774.200,00	(1.800,00)	99,97	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	877.000,00	877.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	877.000,00	877.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	45.900.000,00	45.890.000,00	(10.000,00)	99,98	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.900.000,00	45.890.000,00	(10.000,00)	99,98	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	213.825.000,00	213.589.730,00	(235.270,00)	99,89	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	213.825.000,00	213.589.730,00	(235.270,00)	99,89	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.095.000,00	29.214.650,00	(880.350,00)	97,07	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	30.095.000,00	29.214.650,00	(880.350,00)	97,07	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.095.000,00	29.214.650,00	(880.350,00)	97,07	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	13.400.000,00	13.399.999,00	(1,00)	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 03 . 02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	13.400.000,00	13.399.999,00	(1,00)	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	13.399.999,00	(1,00)	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 57 . 01	<i>Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.629.329.500,00)	(1.592.251.599,00)	37.077.901,00	97,72	

Lampiran I.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 KECAMATAN KOTO BESAR						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	3.500.000,00	3.470.000,00	(30.000,00)	99,14	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.500.000,00	3.470.000,00	(30.000,00)	99,14	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	3.500.000,00	3.470.000,00	(30.000,00)	99,14	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.033.485.644,00	1.939.501.382,00	(93.984.262,00)	95,38	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.469.260.000,00	1.376.314.038,00	(92.945.962,00)	93,67	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.469.260.000,00	1.376.314.038,00	(92.945.962,00)	93,67	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	564.225.644,00	563.187.344,00	(1.038.300,00)	99,82	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	509.465.644,00	508.677.344,00	(788.300,00)	99,85	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.200.000,00	4.167.500,00	(32.500,00)	99,23	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.167.500,00	(32.500,00)	99,23	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.540.000,00	820.700,00	(719.300,00)	53,29	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	820.700,00	(719.300,00)	53,29	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	156.250.000,00	156.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	156.250.000,00	156.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	4.358.400,00	4.353.450,00	(4.950,00)	99,89	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.358.400,00	4.353.450,00	(4.950,00)	99,89	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	21.629.050,00	21.628.700,00	(350,00)	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.629.050,00	21.628.700,00	(350,00)	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	15.140.000,00	15.108.800,00	(31.200,00)	99,79	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.140.000,00	15.108.800,00	(31.200,00)	99,79	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	34.160.000,00	34.160.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.160.000,00	34.160.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	241.719.194,00	241.719.194,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.719.194,00	241.719.194,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.110.000,00	30.110.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	25.610.000,00	25.610.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.610.000,00	25.610.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 03 . 05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.13 . 00 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa <i>Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa</i> Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 57 . 01		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
		(2.029.985.644,00)	(1.936.031.382,00)	93.954.262,00	95,37	

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 KECAMATAN PADANG LAWEH						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.500.000,00	250.000,00	(1.250.000,00)	16,67	Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.500.000,00	250.000,00	(1.250.000,00)	16,67	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.500.000,00	250.000,00	(1.250.000,00)	16,67	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.543.971.871,00	1.517.687.796,00	(26.284.075,00)	98,30	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.090.163.000,00	1.065.602.531,00	(24.560.469,00)	97,75	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.090.163.000,00	1.065.602.531,00	(24.560.469,00)	97,75	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	453.808.871,00	452.085.265,00	(1.723.606,00)	99,62	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	394.411.500,00	392.717.915,00	(1.693.585,00)	99,57	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.363.000,00	3.363.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.363.000,00	3.363.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.520.000,00	2.502.500,00	(17.500,00)	99,31	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.502.500,00	(17.500,00)	99,31	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	138.940.000,00	137.720.000,00	(1.220.000,00)	99,12	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	138.940.000,00	137.720.000,00	(1.220.000,00)	99,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	8.196.200,00	8.095.500,00	(100.700,00)	98,77	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.196.200,00	8.095.500,00	(100.700,00)	98,77	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	7.395.000,00	7.324.900,00	(70.100,00)	99,05	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.395.000,00	7.324.900,00	(70.100,00)	99,05	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1.088.000,00	1.087.100,00	(900,00)	99,92	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.088.000,00	1.087.100,00	(900,00)	99,92	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	3.244.500,00	3.184.000,00	(60.500,00)	98,14	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.344.500,00	1.284.000,00	(60.500,00)	95,50	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	185.374.800,00	185.150.915,00	(223.885,00)	99,88	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.374.800,00	185.150.915,00	(223.885,00)	99,88	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	46.077.371,00	46.047.350,00	(30.021,00)	99,93	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	17.067.200,00	17.067.200,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.067.200,00	17.067.200,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	29.010.171,00	28.980.150,00	(30.021,00)	99,90	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.010.171,00	28.980.150,00	(30.021,00)	99,90	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 57 . 01	<i>Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa</i>	8.290.000,00	8.290.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.290.000,00	8.290.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 57 . 02	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan</i>	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.542.471.871,00)	(1.517.437.796,00)	25.034.075,00	98,38	

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 KECAMATAN TIUMANG						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.500.000,00	2.180.000,00	(320.000,00)	87,20	Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin M
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.500.000,00	2.180.000,00	(320.000,00)	87,20	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.500.000,00	2.180.000,00	(320.000,00)	87,20	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.895.559.250,00	1.822.363.687,00	(73.195.563,00)	96,14	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.332.772.000,00	1.261.157.475,00	(71.614.525,00)	94,63	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.332.772.000,00	1.261.157.475,00	(71.614.525,00)	94,63	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	562.787.250,00	561.206.212,00	(1.581.038,00)	99,72	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	502.989.300,00	501.524.368,00	(1.464.932,00)	99,71	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.400.000,00	7.725.265,00	(674.735,00)	91,97	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	7.725.265,00	(674.735,00)	91,97	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.500.000,00	1.449.068,00	(50.932,00)	96,60	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.449.068,00	(50.932,00)	96,60	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	207.925.000,00	207.425.000,00	(500.000,00)	99,76	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	206.050.000,00	205.550.000,00	(500.000,00)	99,76	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.746.000,00	2.746.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.746.000,00	2.746.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	12.774.500,00	12.774.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.774.500,00	12.774.500,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	13.145.500,00	13.014.545,00	(130.955,00)	99,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.145.500,00	13.014.545,00	(130.955,00)	99,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	21.120.000,00	21.118.000,00	(2.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.120.000,00	21.118.000,00	(2.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	199.358.300,00	199.251.990,00	(106.310,00)	99,95	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.358.300,00	199.251.990,00	(106.310,00)	99,95	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24.004.950,00	23.998.344,00	(6.606,00)	99,97	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	22.504.950,00	22.498.344,00	(6.606,00)	99,97	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.504.950,00	22.498.344,00	(6.606,00)	99,97	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	19.275.000,00	19.275.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 03 . 05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	19.275.000,00	19.275.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.275.000,00	19.275.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	16.518.000,00	16.408.500,00	(109.500,00)	99,34	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 57 . 01	<i>Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa</i>	10.903.000,00	10.838.500,00	(64.500,00)	99,41	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.903.000,00	10.838.500,00	(64.500,00)	99,41	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 57 . 02	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan</i>	5.615.000,00	5.570.000,00	(45.000,00)	99,20	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.615.000,00	5.570.000,00	(45.000,00)	99,20	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.893.059.250,00)	(1.820.183.687,00)	72.875.563,00	96,15	

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.674.003.800,00	1.571.286.905,00	(102.716.895,00)	93,86	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	769.333.000,00	707.493.394,00	(61.839.606,00)	91,96	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	769.333.000,00	707.493.394,00	(61.839.606,00)	91,96	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	904.670.800,00	863.793.511,00	(40.877.289,00)	95,48	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	453.645.750,00	439.699.339,00	(13.946.411,00)	96,93	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	17.580.000,00	17.366.590,00	(213.410,00)	98,79	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.580.000,00	17.366.590,00	(213.410,00)	98,79	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	800.000,00	646.650,00	(153.350,00)	80,83	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	646.650,00	(153.350,00)	80,83	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	169.900.000,00	161.460.000,00	(8.440.000,00)	95,03	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	169.900.000,00	161.460.000,00	(8.440.000,00)	95,03	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	4.850.000,00	(650.000,00)	88,18	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	16.220.000,00	16.219.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.220.000,00	16.219.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	37.831.250,00	37.831.200,00	(50,00)	100,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.831.250,00	37.831.200,00	(50,00)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1.945.000,00	1.905.000,00	(40.000,00)	97,94	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.945.000,00	1.905.000,00	(40.000,00)	97,94	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	7.920.000,00	7.876.000,00	(44.000,00)	99,44	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.920.000,00	7.876.000,00	(44.000,00)	99,44	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	16.200.000,00	15.030.000,00	(1.170.000,00)	92,78	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16.200.000,00	15.030.000,00	(1.170.000,00)	92,78	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	177.499.500,00	174.264.899,00	(3.234.601,00)	98,18	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	177.499.500,00	174.264.899,00	(3.234.601,00)	98,18	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	74.110.000,00	71.753.199,00	(2.356.801,00)	96,82	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	83,33	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	83,33	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	33.110.000,00	31.253.199,00	(1.856.801,00)	94,39	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	33.110.000,00	31.253.199,00	(1.856.801,00)	94,39	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	25.164.000,00	20.686.700,00	(4.477.300,00)	82,21	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 18 . 13	<i>Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama(FKUB)</i>	25.164.000,00	20.686.700,00	(4.477.300,00)	82,21	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	3.920.000,00	2.720.000,00	(1.200.000,00)	69,39	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	21.244.000,00	17.966.700,00	(3.277.300,00)	84,57	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	233.958.050,00	218.112.173,00	(15.845.877,00)	93,23	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 16	<i>Penunjang Koordinasi Forum Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)</i>	145.719.000,00	145.555.073,00	(163.927,00)	99,89	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	145.719.000,00	145.555.073,00	(163.927,00)	99,89	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 17	<i>Pemantauan dan Pengendalian Warga Negara Asing (WNA)</i>	20.732.500,00	17.767.000,00	(2.965.500,00)	85,70	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	3.980.000,00	2.980.000,00	(1.000.000,00)	74,87	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16.752.500,00	14.787.000,00	(1.965.500,00)	88,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 18	<i>Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</i>	28.405.000,00	23.753.600,00	(4.651.400,00)	83,62	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.980.000,00	2.980.000,00	(1.000.000,00)	74,87	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.425.000,00	20.773.600,00	(3.651.400,00)	85,05	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 19	<i>Penyuluhan Anti Narkoba dalam rangka Peringatan Hari HANI</i>	39.101.550,00	31.036.500,00	(8.065.050,00)	79,37	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.681.550,00	26.616.500,00	(8.065.050,00)	76,75	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 21	Program peningkatan pendidikan politik masyarakat	117.793.000,00	113.542.100,00	(4.250.900,00)	96,39	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 21 . 08	<i>Bimbingan Teknis Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol Pengurus Partai Politik</i>	33.155.000,00	30.960.500,00	(2.194.500,00)	93,38	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	2.600.000,00	(1.000.000,00)	72,22	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.555.000,00	28.360.500,00	(1.194.500,00)	95,96	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 21 . 10	<i>Penyuluhan kepada masyarakat (politik)</i>	58.837.250,00	58.667.250,00	(170.000,00)	99,71	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.657.250,00	49.487.250,00	(170.000,00)	99,66	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 21 . 12	<i>Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Pemilu</i>	25.800.750,00	23.914.350,00	(1.886.400,00)	92,69	
1.05 . 4.01.16 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.800.750,00	23.914.350,00	(1.886.400,00)	92,69	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.674.003.800,00)	(1.571.286.905,00)	102.716.895,00	93,86	

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan INSPEKTORAT KABUPATEN						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.968.004.000,00	4.859.874.826,00	(108.129.174,00)	97,82	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.850.802.000,00	2.778.090.667,00	(72.711.333,00)	97,45	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.850.802.000,00	2.778.090.667,00	(72.711.333,00)	97,45	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.117.202.000,00	2.081.784.159,00	(35.417.841,00)	98,33	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	840.004.150,00	828.840.829,00	(11.163.321,00)	98,67	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	9.100.000,00	8.257.496,00	(842.504,00)	90,74	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	8.257.496,00	(842.504,00)	90,74	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	86.400.000,00	86.136.500,00	(263.500,00)	99,70	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	86.136.500,00	(263.500,00)	99,70	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	5.150.000,00	5.104.650,00	(45.350,00)	99,12	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	5.104.650,00	(45.350,00)	99,12	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	251.480.000,00	242.924.000,00	(8.556.000,00)	96,60	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	251.480.000,00	242.924.000,00	(8.556.000,00)	96,60	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	12.150.400,00	12.150.000,00	(400,00)	100,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.150.400,00	12.150.000,00	(400,00)	100,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	30.100.000,00	30.065.000,00	(35.000,00)	99,88	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.100.000,00	30.065.000,00	(35.000,00)	99,88	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	11.625.000,00	11.580.000,00	(45.000,00)	99,61	

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.625.000,00	11.580.000,00	(45.000,00)	99,61	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	14.695.000,00	14.695.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.695.000,00	14.695.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2.400.000,00	2.255.000,00	(145.000,00)	93,96	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.255.000,00	(145.000,00)	93,96	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	48.400.000,00	47.447.000,00	(953.000,00)	98,03	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.400.000,00	47.447.000,00	(953.000,00)	98,03	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	318.503.750,00	318.226.183,00	(277.567,00)	99,91	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	318.503.750,00	318.226.183,00	(277.567,00)	99,91	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.232.500,00	90.206.500,00	(26.000,00)	99,97	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	90.232.500,00	90.206.500,00	(26.000,00)	99,97	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.232.500,00	90.206.500,00	(26.000,00)	99,97	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.124.195.350,00	1.101.986.359,00	(22.208.991,00)	98,02	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 01	<i>Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala</i>	498.985.750,00	496.992.750,00	(1.993.000,00)	99,60	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	409.760.000,00	408.650.000,00	(1.110.000,00)	99,73	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.225.750,00	88.342.750,00	(883.000,00)	99,01	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 02	<i>Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah</i>	18.120.000,00	15.070.000,00	(3.050.000,00)	83,17	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.120.000,00	15.070.000,00	(3.050.000,00)	83,17	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 06	<i>Tindak lanjut hasil temuan pengawasan</i>	20.824.600,00	20.347.750,00	(476.850,00)	97,71	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.824.600,00	20.347.750,00	(476.850,00)	97,71	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 18	<i>Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif</i>	124.725.000,00	124.240.130,00	(484.870,00)	99,61	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	1.984.000,00	(16.000,00)	99,20	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.725.000,00	122.256.130,00	(468.870,00)	99,62	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 19	<i>Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah daerah</i>	23.915.000,00	20.209.000,00	(3.706.000,00)	84,50	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.320.000,00	18.740.000,00	(2.580.000,00)	87,90	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.595.000,00	1.469.000,00	(1.126.000,00)	56,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 20	<i>Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja</i>	167.300.000,00	162.134.250,00	(5.165.750,00)	96,91	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	137.900.000,00	135.920.000,00	(1.980.000,00)	98,56	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	26.214.250,00	(3.185.750,00)	89,16	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 21	<i>Monitoring Program dan Kegiatan SKPD</i>	63.620.000,00	61.446.750,00	(2.173.250,00)	96,58	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.620.000,00	61.446.750,00	(2.173.250,00)	96,58	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 22	<i>Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi (UPG)</i>	25.198.000,00	23.937.829,00	(1.260.171,00)	95,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.198.000,00	23.937.829,00	(1.260.171,00)	95,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 23	<i>Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)</i>	30.893.000,00	30.614.750,00	(278.250,00)	99,10	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.893.000,00	30.614.750,00	(278.250,00)	99,10	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 24	<i>SPIP</i>	50.755.000,00	50.291.400,00	(463.600,00)	99,09	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.755.000,00	43.291.400,00	(463.600,00)	98,94	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 25	<i>Kapabilitas APIP</i>	41.155.000,00	40.653.500,00	(501.500,00)	98,78	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.155.000,00	40.653.500,00	(501.500,00)	98,78	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 26	<i>Sapu Bersih Pungutan Liar</i>	58.704.000,00	56.048.250,00	(2.655.750,00)	95,48	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.704.000,00	53.048.250,00	(2.655.750,00)	95,23	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	62.770.000,00	60.750.471,00	(2.019.529,00)	96,78	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 21 . 01	<i>Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan *)</i>	62.770.000,00	60.750.471,00	(2.019.529,00)	96,78	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.770.000,00	60.750.471,00	(2.019.529,00)	96,78	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.968.004.000,00)	(4.859.874.826,00)	108.129.174,00	97,82	

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.068.226.300,00	7.868.252.701,00	(199.973.599,00)	97,52	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.001.134.000,00	2.918.129.589,00	(83.004.411,00)	97,23	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.001.134.000,00	2.918.129.589,00	(83.004.411,00)	97,23	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.067.092.300,00	4.950.123.112,00	(116.969.188,00)	97,69	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.467.121.400,00	1.440.415.334,00	(26.706.066,00)	98,18	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.100.000,00	3.025.000,00	(75.000,00)	97,58	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	3.025.000,00	(75.000,00)	97,58	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	142.505.000,00	140.849.088,00	(1.655.912,00)	98,84	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.505.000,00	140.849.088,00	(1.655.912,00)	98,84	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	3.513.900,00	3.507.000,00	(6.900,00)	99,80	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.513.900,00	3.507.000,00	(6.900,00)	99,80	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	527.350.000,00	520.347.700,00	(7.002.300,00)	98,67	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	518.140.000,00	511.138.000,00	(7.002.000,00)	98,65	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.210.000,00	9.209.700,00	(300,00)	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	11.016.000,00	10.876.000,00	(140.000,00)	98,73	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.016.000,00	10.876.000,00	(140.000,00)	98,73	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	9.200.000,00	8.350.000,00	(850.000,00)	90,76	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	8.350.000,00	(850.000,00)	90,76	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	97.498.400,00	97.440.400,00	(58.000,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.498.400,00	97.440.400,00	(58.000,00)	99,94	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	35.160.000,00	32.620.800,00	(2.539.200,00)	92,78	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.160.000,00	32.620.800,00	(2.539.200,00)	92,78	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	6.350.000,00	6.276.000,00	(74.000,00)	98,83	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	6.276.000,00	(74.000,00)	98,83	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	64.140.000,00	62.192.728,00	(1.947.272,00)	96,96	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	64.140.000,00	62.192.728,00	(1.947.272,00)	96,96	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	20.100.000,00	19.955.909,00	(144.091,00)	99,28	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	19.955.909,00	(144.091,00)	99,28	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	4.200.000,00	4.145.000,00	(55.000,00)	98,69	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.145.000,00	(55.000,00)	98,69	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	42.600.000,00	42.565.000,00	(35.000,00)	99,92	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	42.565.000,00	(35.000,00)	99,92	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	500.388.100,00	488.264.709,00	(12.123.391,00)	97,58	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.388.100,00	488.264.709,00	(12.123.391,00)	97,58	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	229.164.600,00	228.835.385,00	(329.215,00)	99,86	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	92.664.600,00	92.348.385,00	(316.215,00)	99,66	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.664.600,00	92.348.385,00	(316.215,00)	99,66	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 42	<i>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</i>	100.000.000,00	99.987.000,00	(13.000,00)	99,99	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	99.987.000,00	(13.000,00)	99,99	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.375.000,00	80.032.738,00	(342.262,00)	99,57	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	80.375.000,00	80.032.738,00	(342.262,00)	99,57	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.375.000,00	80.032.738,00	(342.262,00)	99,57	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 15	Program pengembangan data/informasi	36.563.200,00	35.515.700,00	(1.047.500,00)	97,14	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 15 . 08	<i>Fasilitasi dan Penguatan Gugus Tugas Informasi Geospasial Daerah</i>	36.563.200,00	35.515.700,00	(1.047.500,00)	97,14	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.563.200,00	35.515.700,00	(1.047.500,00)	97,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.03.01 . 00 . 19	Program perencanaan kota-kota menengah dan besar	42.073.000,00	41.198.953,00	(874.047,00)	97,92	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 19 . 09	<i>Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan</i>	42.073.000,00	41.198.953,00	(874.047,00)	97,92	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.073.000,00	41.198.953,00	(874.047,00)	97,92	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.917.046.200,00	1.899.285.821,00	(17.760.379,00)	99,07	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 03	<i>Penyelenggaraan musrenbang RKPD</i>	201.277.000,00	200.300.474,00	(976.526,00)	99,51	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	201.277.000,00	200.300.474,00	(976.526,00)	99,51	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 04	<i>Penetapan RKPD</i>	31.810.000,00	31.776.000,00	(34.000,00)	99,89	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.810.000,00	31.776.000,00	(34.000,00)	99,89	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 08	<i>Penyusunan rancangan RKPD</i>	409.640.000,00	409.269.082,00	(370.918,00)	99,91	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.640.000,00	175.269.082,00	(370.918,00)	99,79	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 17	<i>Monitoring dan evaluasi pengendalian pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah</i>	46.120.000,00	44.947.919,00	(1.172.081,00)	97,46	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.120.000,00	44.947.919,00	(1.172.081,00)	97,46	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 21	<i>Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Anggaran</i>	1.054.478.500,00	1.052.902.750,00	(1.575.750,00)	99,85	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	436.650.000,00	436.650.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	617.828.500,00	616.252.750,00	(1.575.750,00)	99,74	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 22	<i>Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan</i>	67.818.000,00	66.646.696,00	(1.171.304,00)	98,27	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.818.000,00	66.646.696,00	(1.171.304,00)	98,27	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 23	<i>Implementasi Sistem Informasi e-Planning</i>	52.002.700,00	51.552.000,00	(450.700,00)	99,13	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.002.700,00	51.552.000,00	(450.700,00)	99,13	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 25	<i>Inovasi Daerah</i>	53.900.000,00	41.890.900,00	(12.009.100,00)	77,72	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.900.000,00	41.890.900,00	(12.009.100,00)	77,72	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	217.170.200,00	214.727.200,00	(2.443.000,00)	98,88	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 04	<i>koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi</i>	51.699.400,00	50.696.400,00	(1.003.000,00)	98,06	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.699.400,00	50.696.400,00	(1.003.000,00)	98,06	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 13	<i>Penyusunan ICOR</i>	67.088.800,00	66.677.800,00	(411.000,00)	99,39	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.088.800,00	66.677.800,00	(411.000,00)	99,39	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 15	<i>Penyusunan Analisis Tabel Input Output Daerah</i>	98.382.000,00	97.353.000,00	(1.029.000,00)	98,95	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.382.000,00	97.353.000,00	(1.029.000,00)	98,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	412.277.500,00	407.736.816,00	(4.540.684,00)	98,90	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 11	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya</i>	171.841.000,00	170.585.730,00	(1.255.270,00)	99,27	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.841.000,00	170.585.730,00	(1.255.270,00)	99,27	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 12	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat</i>	154.144.500,00	153.437.036,00	(707.464,00)	99,54	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.144.500,00	153.437.036,00	(707.464,00)	99,54	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 13	<i>Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG)</i>	49.452.000,00	49.129.050,00	(322.950,00)	99,35	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.452.000,00	49.129.050,00	(322.950,00)	99,35	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 14	<i>Fasilitasi Tim Koordinasi Kemiskinan</i>	36.840.000,00	34.585.000,00	(2.255.000,00)	93,88	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.840.000,00	34.585.000,00	(2.255.000,00)	93,88	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 31	Program Perencanaan Tata ruang	614.052.300,00	551.813.265,00	(62.239.035,00)	89,86	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 31 . 01	<i>Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, RTBL</i>	110.449.800,00	56.685.530,00	(53.764.270,00)	51,32	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.449.800,00	56.685.530,00	(53.764.270,00)	51,32	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 31 . 02	<i>Legislasi perda RevisiRTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2031</i>	503.602.500,00	495.127.735,00	(8.474.765,00)	98,32	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	446.102.500,00	437.627.735,00	(8.474.765,00)	98,10	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 32	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	51.248.900,00	50.561.900,00	(687.000,00)	98,66	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 32 . 01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)</i>	51.248.900,00	50.561.900,00	(687.000,00)	98,66	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.248.900,00	50.561.900,00	(687.000,00)	98,66	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.068.226.300,00)	(7.868.252.701,00)	199.973.599,00	97,52	

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN KEUANGAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	27.956.281.048,00	19.189.684.229,67	(8.766.596.818,33)	68,64	Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang PBB P2 Perda Nomor Tahun tentang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	27.956.281.048,00	19.189.684.229,67	(8.766.596.818,33)	68,64	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	27.926.281.048,00	19.178.964.229,67	(8.747.316.818,33)	68,68	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.000.000,00	10.720.000,00	(19.280.000,00)	35,73	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	19.469.427.147,00	18.251.665.988,00	(1.217.761.159,00)	93,75	PP Nomor 18 Tahun 2017
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.690.453.897,00	11.762.916.066,00	(927.537.831,00)	92,69	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.690.453.897,00	11.762.916.066,00	(927.537.831,00)	92,69	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.778.973.250,00	6.488.749.922,00	(290.223.328,00)	95,72	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.321.760.690,00	2.236.569.746,00	(85.190.944,00)	96,33	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	227.180.000,00	200.939.713,00	(26.240.287,00)	88,45	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	227.180.000,00	200.939.713,00	(26.240.287,00)	88,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	12.800.000,00	4.734.150,00	(8.065.850,00)	36,99	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.800.000,00	4.734.150,00	(8.065.850,00)	36,99	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	830.156.000,00	779.988.000,00	(50.168.000,00)	93,96	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	799.970.000,00	749.802.000,00	(50.168.000,00)	93,73	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30.186.000,00	30.186.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	63.940.000,00	63.903.000,00	(37.000,00)	99,94	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	63.940.000,00	63.903.000,00	(37.000,00)	99,94	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	157.533.000,00	157.474.416,00	(58.584,00)	99,96	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	157.533.000,00	157.474.416,00	(58.584,00)	99,96	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	236.305.300,00	236.280.100,00	(25.200,00)	99,99	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	236.305.300,00	236.280.100,00	(25.200,00)	99,99	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	30.280.000,00	30.272.000,00	(8.000,00)	99,97	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30.280.000,00	30.272.000,00	(8.000,00)	99,97	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	6.340.000,00	6.240.000,00	(100.000,00)	98,42	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.340.000,00	6.240.000,00	(100.000,00)	98,42	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	91.996.840,00	91.955.500,00	(41.340,00)	99,96	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	91.996.840,00	91.955.500,00	(41.340,00)	99,96	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	600.429.550,00	599.982.867,00	(446.683,00)	99,93	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	600.429.550,00	599.982.867,00	(446.683,00)	99,93	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	443.966.200,00	417.552.250,00	(26.413.950,00)	94,05	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 03	<i>Pembangunan gedung kantor</i>	25.000.000,00	24.750.000,00	(250.000,00)	99,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	25.000.000,00	24.750.000,00	(250.000,00)	99,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	152.600.000,00	142.400.000,00	(10.200.000,00)	93,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	152.600.000,00	142.400.000,00	(10.200.000,00)	93,32	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	29.900.000,00	28.800.000,00	(1.100.000,00)	96,32	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.900.000,00	28.800.000,00	(1.100.000,00)	96,32	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	95.000.000,00	94.955.000,00	(45.000,00)	99,95	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	94.955.000,00	(45.000,00)	99,95	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	141.466.200,00	126.647.250,00	(14.818.950,00)	89,52	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.466.200,00	126.647.250,00	(14.818.950,00)	89,52	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	156.168.500,00	155.962.595,00	(205.905,00)	99,87	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	156.168.500,00	155.962.595,00	(205.905,00)	99,87	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.168.500,00	155.962.595,00	(205.905,00)	99,87	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.857.077.860,00	3.678.665.331,00	(178.412.529,00)	95,37	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 03	<i>Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah</i>	10.210.000,00	10.164.051,00	(45.949,00)	99,55	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.210.000,00	10.164.051,00	(45.949,00)	99,55	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06	<i>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2020</i>	578.925.000,00	561.248.908,00	(17.676.092,00)	96,95	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	285.960.000,00	268.436.000,00	(17.524.000,00)	93,87	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	292.965.000,00	292.812.908,00	(152.092,00)	99,95	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08	<i>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2019</i>	608.860.000,00	588.434.301,00	(20.425.699,00)	96,65	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	295.310.000,00	276.792.000,00	(18.518.000,00)	93,73	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	313.550.000,00	311.642.301,00	(1.907.699,00)	99,39	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10	<i>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD *)</i>	181.132.350,00	181.126.750,00	(5.600,00)	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.830.000,00	53.825.000,00	(5.000,00)	99,99	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.302.350,00	127.301.750,00	(600,00)	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 13	<i>penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah</i>	691.720.860,00	690.433.944,00	(1.286.916,00)	99,81	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	136.500.000,00	136.500.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.220.860,00	147.058.944,00	(161.916,00)	99,89	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	408.000.000,00	406.875.000,00	(1.125.000,00)	99,72	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 15	<i>Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.</i>	154.955.000,00	126.270.831,00	(28.684.169,00)	81,49	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.200.000,00	21.120.000,00	(12.080.000,00)	63,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.755.000,00	105.150.831,00	(16.604.169,00)	86,36	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah.	171.027.750,00	161.790.604,00	(9.237.146,00)	94,60	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.036.000,00	12.000.000,00	(36.000,00)	99,70	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.991.750,00	149.790.604,00	(9.201.146,00)	94,21	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	202.185.000,00	194.407.500,00	(7.777.500,00)	96,15	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.345.000,00	38.855.000,00	(3.490.000,00)	91,76	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.840.000,00	155.552.500,00	(4.287.500,00)	97,32	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 40	Penatausahaan Barang Milik Daerah	214.155.450,00	212.767.013,00	(1.388.437,00)	99,35	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.100.000,00	24.000.000,00	(100.000,00)	99,59	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.055.450,00	188.767.013,00	(1.288.437,00)	99,32	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 73	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	48.835.950,00	47.312.564,00	(1.523.386,00)	96,88	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.036.000,00	12.000.000,00	(36.000,00)	99,70	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.799.950,00	35.312.564,00	(1.487.386,00)	95,96	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 74	Pengelolaan penyaluran belanja PPKD (Hibah Bansos)	100.659.500,00	90.077.500,00	(10.582.000,00)	89,49	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.675.000,00	13.640.000,00	(35.000,00)	99,74	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.984.500,00	76.437.500,00	(10.547.000,00)	87,87	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 75	Operasional pajak daerah	182.587.000,00	155.289.750,00	(27.297.250,00)	85,05	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.400.000,00	39.264.000,00	(17.136.000,00)	69,62	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.187.000,00	116.025.750,00	(10.161.250,00)	91,95	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 76	Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	40.074.850,00	38.437.935,00	(1.636.915,00)	95,92	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.700.000,00	21.750.000,00	(950.000,00)	95,81	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.374.850,00	16.687.935,00	(686.915,00)	96,05	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 77	Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PLL	101.745.000,00	84.997.942,00	(16.747.058,00)	83,54	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.745.000,00	84.997.942,00	(16.747.058,00)	83,54	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 78	Penyusunan Potensi dan Dokumen Pendapatan Daerah	39.325.000,00	29.412.700,00	(9.912.300,00)	74,79	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.020.000,00	4.420.000,00	(2.600.000,00)	62,96	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.305.000,00	24.992.700,00	(7.312.300,00)	77,36	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 79	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (IKPD)	137.092.500,00	136.454.763,00	(637.737,00)	99,53	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.920.000,00	80.920.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.172.500,00	55.534.763,00	(637.737,00)	98,86	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 80	Analisis Dokumen Anggaran Perubahan APBD 2019	25.377.650,00	24.130.809,00	(1.246.841,00)	95,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.545.000,00	9.522.000,00	(23.000,00)	99,76	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.832.650,00	14.608.809,00	(1.223.841,00)	92,27	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 81	<i>Analisis Dokumen Anggaran APBD 2020</i>	35.160.000,00	33.987.292,00	(1.172.708,00)	96,66	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.830.000,00	10.598.000,00	(232.000,00)	97,86	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.330.000,00	23.389.292,00	(940.708,00)	96,13	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 82	<i>Penyusunan Laporan Semesteran Pelaksanaan APBD</i>	70.151.000,00	66.171.864,00	(3.979.136,00)	94,33	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.071.000,00	44.091.864,00	(3.979.136,00)	91,72	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 83	<i>Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS</i>	87.140.000,00	86.375.450,00	(764.550,00)	99,12	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.140.000,00	29.900.000,00	(240.000,00)	99,20	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	56.475.450,00	(524.550,00)	99,08	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 84	<i>Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah</i>	106.793.000,00	101.268.160,00	(5.524.840,00)	94,83	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.700.000,00	34.508.000,00	(192.000,00)	99,45	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.093.000,00	66.760.160,00	(5.332.840,00)	92,60	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 85	<i>Penyusunan Produk Hukum Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)</i>	68.965.000,00	58.104.700,00	(10.860.300,00)	84,25	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.965.000,00	58.104.700,00	(10.860.300,00)	84,25	
	SURPLUS / (DEFISIT)	8.486.853.901,00	938.018.241,67	(7.548.835.659,33)	11,05	

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019						
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.523.976.850,00	7.013.582.055,00	(510.394.795,00)	93,22	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.293.514.000,00	4.015.373.731,00	(278.140.269,00)	93,52	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.293.514.000,00	4.015.373.731,00	(278.140.269,00)	93,52	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.230.462.850,00	2.998.208.324,00	(232.254.526,00)	92,81	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	708.459.200,00	700.260.240,00	(8.198.960,00)	98,84	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	8.250.000,00	7.449.000,00	(801.000,00)	90,29	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	7.449.000,00	(801.000,00)	90,29	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	51.660.000,00	47.067.437,00	(4.592.563,00)	91,11	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.660.000,00	47.067.437,00	(4.592.563,00)	91,11	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	2.400.000,00	2.272.050,00	(127.950,00)	94,67	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.272.050,00	(127.950,00)	94,67	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	313.480.000,00	311.296.000,00	(2.184.000,00)	99,30	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	313.480.000,00	311.296.000,00	(2.184.000,00)	99,30	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	7.349.200,00	7.349.000,00	(200,00)	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.349.200,00	7.349.000,00	(200,00)	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	12.750.000,00	12.675.000,00	(75.000,00)	99,41	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	12.675.000,00	(75.000,00)	99,41	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	49.910.700,00	49.868.000,00	(42.700,00)	99,91	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.910.700,00	49.868.000,00	(42.700,00)	99,91	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	29.896.300,00	29.890.000,00	(6.300,00)	99,98	
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.896.300,00	29.890.000,00	(6.300,00)	99,98	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	4.008.000,00	3.955.000,00	(53.000,00)	98,68	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.008.000,00	3.955.000,00	(53.000,00)	98,68	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	26.160.000,00	26.120.000,00	(40.000,00)	99,85	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.160.000,00	26.120.000,00	(40.000,00)	99,85	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	202.595.000,00	202.318.753,00	(276.247,00)	99,86	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.595.000,00	202.318.753,00	(276.247,00)	99,86	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	113.588.000,00	108.074.600,00	(5.513.400,00)	95,15	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	67.138.000,00	61.624.600,00	(5.513.400,00)	91,79	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.138.000,00	61.624.600,00	(5.513.400,00)	91,79	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.117.883.600,00	1.094.668.739,00	(23.214.861,00)	97,92	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 05	<i>Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD *)</i>	1.000.000.000,00	977.104.039,00	(22.895.961,00)	97,71	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	7.636.000,00	(14.000,00)	99,82	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	992.350.000,00	969.468.039,00	(22.881.961,00)	97,69	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 27	<i>Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah</i>	117.883.600,00	117.564.700,00	(318.900,00)	99,73	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.238.000,00	3.228.000,00	(10.000,00)	99,69	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.645.600,00	114.336.700,00	(308.900,00)	99,73	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 30	Program Pendidikan Kedinasan *)	267.590.400,00	266.332.498,00	(1.257.902,00)	99,53	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 30 . 05	<i>Pendidikan Penjenjangan Struktural *)</i>	205.500.400,00	205.234.000,00	(266.400,00)	99,87	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	205.500.400,00	205.234.000,00	(266.400,00)	99,87	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 30 . 06	<i>Pendidikan dan Pelatihan Teknis *)</i>	62.090.000,00	61.098.498,00	(991.502,00)	98,40	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.090.000,00	61.098.498,00	(991.502,00)	98,40	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur *)	1.022.941.650,00	828.872.247,00	(194.069.403,00)	81,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 01	<i>Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) *)</i>	420.000.000,00	264.162.152,00	(155.837.848,00)	62,90	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.675.000,00	69.020.000,00	(21.655.000,00)	76,12	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	329.325.000,00	195.142.152,00	(134.182.848,00)	59,26	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 02	<i>Pemberian Penghargaan pada ASN yang Berprestasi *)</i>	31.575.000,00	31.499.033,00	(75.967,00)	99,76	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	4.596.000,00	(4.000,00)	99,91	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.975.000,00	26.903.033,00	(71.967,00)	99,73	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 14	<i>Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN *)</i>	49.478.500,00	49.277.500,00	(201.000,00)	99,59	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.752.000,00	9.751.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.726.500,00	39.526.500,00	(200.000,00)	99,50	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 22	<i>Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan *)</i>	39.170.000,00	39.073.877,00	(96.123,00)	99,75	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.710.000,00	36.613.877,00	(96.123,00)	99,74	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 26	<i>Penempatan ASN *)</i>	216.904.800,00	181.509.741,00	(35.395.059,00)	83,68	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.485.000,00	12.949.000,00	(3.536.000,00)	78,55	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.419.800,00	168.560.741,00	(31.859.059,00)	84,10	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 29	<i>Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS</i>	32.650.000,00	32.238.961,00	(411.039,00)	98,74	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.464.000,00	(36.000,00)	99,20	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.150.000,00	27.774.961,00	(375.039,00)	98,67	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 30	<i>Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas</i>	32.240.000,00	32.025.378,00	(214.622,00)	99,33	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.870.000,00	1.850.000,00	(20.000,00)	98,93	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.370.000,00	30.175.378,00	(194.622,00)	99,36	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 31	<i>Pelayanan SKPP Pengabdian dan SK Pensiun</i>	36.000.000,00	35.082.133,00	(917.867,00)	97,45	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	35.082.133,00	(917.867,00)	97,45	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 32	<i>Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah</i>	41.911.750,00	41.891.750,00	(20.000,00)	99,95	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.010.750,00	38.990.750,00	(20.000,00)	99,95	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 33	<i>Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan TASPEN</i>	28.490.000,00	28.447.233,00	(42.767,00)	99,85	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.890.000,00	26.847.233,00	(42.767,00)	99,84	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 34	<i>Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah</i>	64.170.000,00	63.741.239,00	(428.761,00)	99,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.670.000,00	2.660.000,00	(10.000,00)	99,63	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.500.000,00	61.081.239,00	(418.761,00)	99,32	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 36	Pengelolaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	30.351.600,00	29.923.250,00	(428.350,00)	98,59	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.040.000,00	2.990.000,00	(50.000,00)	98,36	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 31 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.311.600,00	26.933.250,00	(378.350,00)	98,61	
SURPLUS / (DEFISIT)		(7.523.976.850,00)	(7.013.582.055,00)	510.394.795,00	93,22	

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor :

Tanggal :

Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	26.121.710.200,00	147.484.754.046,00	197.355.998.858,25	370.962.463.104,25	(17.127.606.122,81)	95,38
		24.470.165.869,00	143.599.219.047,23	185.765.472.065,21	353.834.856.981,44		
1.01	Pendidikan	8.404.355.000,00	30.008.351.773,00	45.002.910.550,00	83.415.617.323,00	(509.299.695,23)	99,39
		7.919.069.000,00	29.104.910.095,00	45.882.338.532,77	82.906.317.627,77		
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	8.404.355.000,00	29.892.656.773,00	45.002.910.550,00	83.299.922.323,00	(509.195.395,23)	99,39
		7.919.069.000,00	28.989.319.395,00	45.882.338.532,77	82.790.726.927,77		
1.01 . 1.01.01 . 01	DINAS PENDIDIKAN	8.404.355.000,00	7.943.129.700,00	38.302.343.700,00	54.649.828.400,00	(1.794.184.023,23)	96,72
		7.919.069.000,00	7.589.409.607,00	37.347.165.769,77	52.855.644.376,77		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.246.000.000,00	1.078.362.600,00	0,00	3.324.362.600,00	(86.728.559,00)	97,39
		2.203.820.000,00	1.033.814.041,00	0,00	3.237.634.041,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	100,00
		0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	174.000.000,00	0,00	174.000.000,00	(29.255.341,00)	83,19
		0,00	144.744.659,00	0,00	144.744.659,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.246.000.000,00	120.900.000,00	0,00	2.366.900.000,00	(52.800.000,00)	97,77
		2.203.820.000,00	110.280.000,00	0,00	2.314.100.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	37.875.000,00	0,00	37.875.000,00	(60.000,00)	99,84
		0,00	37.815.000,00	0,00	37.815.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	162.441.700,00	0,00	162.441.700,00	(1.233.700,00)	99,24
		0,00	161.208.000,00	0,00	161.208.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	39.470.000,00	0,00	39.470.000,00	(81.000,00)	99,79
		0,00	39.389.000,00	0,00	39.389.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	59.994.000,00	0,00	59.994.000,00	(6.000,00)	99,99
		0,00	59.988.000,00	0,00	59.988.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	364.982.400,00	0,00	364.982.400,00	(96.941,00)	99,97
		0,00	364.885.459,00	0,00	364.885.459,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 35	Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset	0,00	71.499.500,00	0,00	71.499.500,00	(3.195.577,00)	95,53
		0,00	68.303.923,00	0,00	68.303.923,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	151.985.600,00	705.000.000,00	856.985.600,00	(18.419.500,00)	97,85
		0,00	140.766.100,00	697.800.000,00	838.566.100,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	(7.000.000,00)	98,83
		0,00	0,00	593.000.000,00	593.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	(200.000,00)	99,81
		0,00	0,00	104.800.000,00	104.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	151.985.600,00	0,00	151.985.600,00	(11.219.500,00)	92,62
		0,00	140.766.100,00	0,00	140.766.100,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	44.500.000,00	703.079.850,00	1.654.464.200,00	2.402.044.050,00	(246.879.957,50)	89,72
		44.500.000,00	698.156.875,00	1.412.507.217,50	2.155.164.092,50		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	0,00	105.633.750,00	59.497.200,00	165.130.950,00	(1.049.800,00)	99,36
		0,00	105.171.750,00	58.909.400,00	164.081.150,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	7.000.000,00	23.857.000,00	0,00	30.857.000,00	(787.000,00)	97,45
		7.000.000,00	23.070.000,00	0,00	30.070.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 70	Jambore PAUD	2.500.000,00	25.203.000,00	0,00	27.703.000,00	(68.975,00)	99,75
		2.500.000,00	25.134.025,00	0,00	27.634.025,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78	Operasional HIMPAUDI	30.000.000,00	49.793.450,00	0,00	79.793.450,00	(1.686.500,00)	97,89
		30.000.000,00	48.106.950,00	0,00	78.106.950,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79	Pengadaan Alat Bermain PAUD	0,00	154.223.000,00	0,00	154.223.000,00	(400.000,00)	99,74
		0,00	153.823.000,00	0,00	153.823.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 80	Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)	0,00	29.880.000,00	0,00	29.880.000,00	0,00	100,00
		0,00	29.880.000,00	0,00	29.880.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 81	Bantuan Operasional Penilik PAUD Kab. Dharmasraya	0,00	36.350.000,00	0,00	36.350.000,00	(496.400,00)	98,63
		0,00	35.853.600,00	0,00	35.853.600,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 82	Apresiasi PTK PAUDNi Berprestasi	5.000.000,00	42.839.500,00	0,00	47.839.500,00	(194.100,00)	99,59
		5.000.000,00	42.645.400,00	0,00	47.645.400,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 83	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)	0,00	0,00	630.960.000,00	630.960.000,00	(224.239.182,50)	64,46
		0,00	0,00	406.720.817,50	406.720.817,50		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 84	Pengembangan Akreditasi PAUD dan PNF	0,00	23.327.150,00	0,00	23.327.150,00	0,00	100,00
		0,00	23.327.150,00	0,00	23.327.150,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85	Penambahan ruang kelas sekolah (DAK)	0,00	0,00	721.892.000,00	721.892.000,00	(8.625.000,00)	98,81
		0,00	0,00	713.267.000,00	713.267.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 87	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK (DAK)	0,00	0,00	242.115.000,00	242.115.000,00	(8.505.000,00)	96,49
		0,00	0,00	233.610.000,00	233.610.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 88	Penambahan ruang kelas baru TK	0,00	211.973.000,00	0,00	211.973.000,00	(828.000,00)	99,61
		0,00	211.145.000,00	0,00	211.145.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	287.300.000,00	1.228.895.650,00	35.936.379.500,00	37.452.575.150,00	(810.482.447,73)	97,84
		262.640.000,00	1.149.094.150,00	35.230.358.552,27	36.642.092.702,27		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah SD (DAK)	0,00	0,00	1.710.331.200,00	1.710.331.200,00	(25.402.209,00)	98,51
		0,00	0,00	1.684.928.991,00	1.684.928.991,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	0,00	278.959.750,00	1.264.212.500,00	1.543.172.250,00	(17.529.500,00)	98,86
		0,00	277.498.750,00	1.248.144.000,00	1.525.642.750,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11	Pembangunan ruang ibadah	0,00	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	(150.000,00)	99,43
		0,00	0,00	26.350.000,00	26.350.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	(300.000,00)	99,54
		0,00	0,00	64.700.000,00	64.700.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19	Sharing Anggaran Pengadaan Mobiler SD	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	(522.000,00)	97,39
		0,00	0,00	19.478.000,00	19.478.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	0,00	0,00	70.500.000,00	70.500.000,00	(356.000,00)	99,50
		0,00	0,00	70.144.000,00	70.144.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	(60.000,00)	99,70
		0,00	19.940.000,00	0,00	19.940.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 84	Pembinaan dan Olimpiade SAINS (OSN) SMP	13.100.000,00	35.980.000,00	0,00	49.080.000,00	(877.500,00)	98,21
		13.100.000,00	35.102.500,00	0,00	48.202.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 85	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD *)	9.000.000,00	29.429.900,00	0,00	38.429.900,00	(245.000,00)	99,36
		8.940.000,00	29.244.900,00	0,00	38.184.900,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 86	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP *)	12.750.000,00	27.160.000,00	0,00	39.910.000,00	(195.500,00)	99,51
		12.750.000,00	26.964.500,00	0,00	39.714.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 88	Pembinaan dan Lomba Olimpiade SAINS (OSN) SD	13.300.000,00	35.870.000,00	0,00	49.170.000,00	(626.000,00)	98,73
		13.200.000,00	35.344.000,00	0,00	48.544.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 119	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (DAK TAHUN 2019)	0,00	0,00	899.845.000,00	899.845.000,00	(308.513.817,97)	65,71
		0,00	0,00	591.331.182,03	591.331.182,03		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 122	Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra UASDA/UASDA SD/MI	27.400.000,00	325.371.000,00	30.700.000,00	383.471.000,00	(52.004.864,00)	86,44
		13.200.000,00	287.615.000,00	30.651.136,00	331.466.136,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123	Pelatihan Kurikulum 2013 SD	44.950.000,00	78.120.000,00	50.000.000,00	173.070.000,00	(8.781.000,00)	94,93
		44.100.000,00	70.460.000,00	49.729.000,00	164.289.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 125	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(87.000,00)	99,83
		0,00	49.913.000,00	0,00	49.913.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 126	Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP	29.100.000,00	252.250.000,00	0,00	281.350.000,00	(32.816.500,00)	88,34
		19.800.000,00	228.733.500,00	0,00	248.533.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 128	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP	11.400.000,00	28.495.000,00	0,00	39.895.000,00	(327.000,00)	99,18
		11.400.000,00	28.168.000,00	0,00	39.568.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 129	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum SMP (DAK)	0,00	0,00	1.362.345.000,00	1.362.345.000,00	(1.981.420,00)	99,85
		0,00	0,00	1.360.363.580,00	1.360.363.580,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 130	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK)	0,00	0,00	1.534.085.000,00	1.534.085.000,00	(482.760,00)	99,97
		0,00	0,00	1.533.602.240,00	1.533.602.240,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 131	Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK)	0,00	0,00	4.577.250.000,00	4.577.250.000,00	(6.960.556,69)	99,85
		0,00	0,00	4.570.289.443,31	4.570.289.443,31		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 132	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	0,00	0,00	9.195.310.000,00	9.195.310.000,00	(6.565.626,00)	99,93
		0,00	0,00	9.188.744.374,00	9.188.744.374,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 133	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SD (DAK)	0,00	0,00	441.735.000,00	441.735.000,00	(2.093.470,00)	99,53
		0,00	0,00	439.641.530,00	439.641.530,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 134	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	0,00	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00	(531.841,86)	99,73
		0,00	0,00	197.468.158,14	197.468.158,14		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 135	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah (DAK)	0,00	0,00	290.385.000,00	290.385.000,00	(25.452.680,00)	91,23
		0,00	0,00	264.932.320,00	264.932.320,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 136	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SD (DAK)	0,00	0,00	220.735.000,00	220.735.000,00	(1.804.500,00)	99,18
		0,00	0,00	218.930.500,00	218.930.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 137	Pembangunan perpustakaan SMP (DAK)	0,00	0,00	652.580.000,00	652.580.000,00	(1.038.504,00)	99,84
		0,00	0,00	651.541.496,00	651.541.496,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 138	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD (DAK)	0,00	0,00	1.956.360.800,00	1.956.360.800,00	(105.862.550,00)	94,59
		0,00	0,00	1.850.498.250,00	1.850.498.250,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 139	Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SD (DAK)	0,00	0,00	214.590.000,00	214.590.000,00	(1.023.720,00)	99,52
		0,00	0,00	213.566.280,00	213.566.280,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 140	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah (DAK)	0,00	0,00	2.284.095.000,00	2.284.095.000,00	(996.290,00)	99,96
		0,00	0,00	2.283.098.710,00	2.283.098.710,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 142	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SMP (DAK)	0,00	0,00	472.735.000,00	472.735.000,00	(3.160.010,00)	99,33
		0,00	0,00	469.574.990,00	469.574.990,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 143	Penambahan ruang kelas sekolah SMP (DAK)	0,00	0,00	1.343.155.000,00	1.343.155.000,00	(1.166.520,00)	99,91
		0,00	0,00	1.341.988.480,00	1.341.988.480,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 144	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SMP (DAK)	0,00	0,00	1.819.260.000,00	1.819.260.000,00	(963.490,00)	99,95
		0,00	0,00	1.818.296.510,00	1.818.296.510,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145	Pengadaan Buku Perpustakaan SMP (DAK)	0,00	0,00	312.110.000,00	312.110.000,00	(8.453.395,21)	97,29
		0,00	0,00	303.656.604,79	303.656.604,79		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 146	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP (DAK)	0,00	0,00	4.251.200.000,00	4.251.200.000,00	(185.596.003,00)	95,63
		0,00	0,00	4.065.603.997,00	4.065.603.997,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 147	Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SMP (DAK)	0,00	0,00	673.360.000,00	673.360.000,00	(255.220,00)	99,96
		0,00	0,00	673.104.780,00	673.104.780,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 148	Peningkatan Kualitas Siswa SMP Unggul	126.300.000,00	67.260.000,00	0,00	193.560.000,00	(7.300.000,00)	96,23
		126.150.000,00	60.110.000,00	0,00	186.260.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	111.685.000,00	342.957.000,00	6.500.000,00	461.142.000,00	(36.765.200,00)	92,03
		110.479.000,00	307.397.800,00	6.500.000,00	424.376.800,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	0,00	25.001.000,00	0,00	25.001.000,00	(451.500,00)	98,19
		0,00	24.549.500,00	0,00	24.549.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 21	Operasinal Mobil Pintar	24.000.000,00	15.900.000,00	0,00	39.900.000,00	0,00	100,00
		24.000.000,00	15.900.000,00	0,00	39.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 22	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	49.500.000,00	173.487.000,00	0,00	222.987.000,00	(11.481.000,00)	94,85
		49.394.000,00	162.112.000,00	0,00	211.506.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 23	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	31.985.000,00	47.950.000,00	0,00	79.935.000,00	(5.820.000,00)	92,72
		31.385.000,00	42.730.000,00	0,00	74.115.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 24	Penyelenggaraan Paket A setara SD	6.200.000,00	22.920.000,00	0,00	29.120.000,00	(3.412.700,00)	88,28
		5.700.000,00	20.007.300,00	0,00	25.707.300,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 25	Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	0,00	39.849.000,00	6.500.000,00	46.349.000,00	(15.600.000,00)	66,34
		0,00	24.249.000,00	6.500.000,00	30.749.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 26	Pelaksanaan Pendidikan Karakter PAUD	0,00	17.850.000,00	0,00	17.850.000,00	0,00	100,00
		0,00	17.850.000,00	0,00	17.850.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.503.810.000,00	695.929.000,00	0,00	6.199.739.000,00	(556.935.909,00)	91,02
		5.090.890.000,00	551.913.091,00	0,00	5.642.803.091,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	10.000.000,00	24.900.000,00	0,00	34.900.000,00	(1.080.862,00)	96,90
		10.000.000,00	23.819.138,00	0,00	33.819.138,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	11.500.000,00	47.429.000,00	0,00	58.929.000,00	(5.919.000,00)	89,96
		7.500.000,00	45.510.000,00	0,00	53.010.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 18	Gebyar Pendidikan	7.500.000,00	39.812.500,00	0,00	47.312.500,00	(3.212.250,00)	93,21
		7.500.000,00	36.600.250,00	0,00	44.100.250,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 24	Lomba-lomba Kreatifitas Guru	9.000.000,00	24.217.000,00	0,00	33.217.000,00	(1.500.000,00)	95,48
		7.500.000,00	24.217.000,00	0,00	31.717.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 25	Lomba Guru Berprestasi	4.680.000,00	45.162.000,00	0,00	49.842.000,00	(4.372.900,00)	91,23
		4.680.000,00	40.789.100,00	0,00	45.469.100,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 26	Pelatihan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	4.000.000,00	26.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(3.496.983,00)	88,34
		4.000.000,00	22.503.017,00	0,00	26.503.017,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 27	Sosialisasi dan Diseminasi Kurikulum 2013 (SD)	33.600.000,00	13.075.000,00	0,00	46.675.000,00	(9.795.000,00)	79,01
		29.080.000,00	7.800.000,00	0,00	36.880.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 28	Pelatihan Operator sekolah	10.400.000,00	19.610.000,00	0,00	30.010.000,00	(14.081.000,00)	53,08
		2.250.000,00	13.679.000,00	0,00	15.929.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 29	Pembinaan UKS	5.000.000,00	37.252.500,00	0,00	42.252.500,00	(256.289,00)	99,39
		5.000.000,00	36.996.211,00	0,00	41.996.211,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 30	Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan dan PGRI	0,00	155.040.000,00	0,00	155.040.000,00	(104.742.125,00)	32,44
		0,00	50.297.875,00	0,00	50.297.875,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 31	Pembinaan PTK Berprestasi TK, SD, SMP	12.000.000,00	41.550.500,00	0,00	53.550.500,00	(57.250,00)	99,89
		12.000.000,00	41.493.250,00	0,00	53.493.250,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 32	Peningkatan Kapasitas Kepala sekolah dan Pengawas	8.250.000,00	46.815.000,00	0,00	55.065.000,00	(5.827.400,00)	89,42
		6.200.000,00	43.037.600,00	0,00	49.237.600,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 34	Lomba Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (OSN)	1.980.000,00	43.016.500,00	0,00	44.996.500,00	(319.250,00)	99,29
		1.980.000,00	42.697.250,00	0,00	44.677.250,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 35	AnekaTunjangan Guru Tingkat PAUD, SD dan SMP	5.378.400.000,00	41.603.500,00	0,00	5.420.003.500,00	(394.490.600,00)	92,72
		4.985.700.000,00	39.812.900,00	0,00	5.025.512.900,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 36	Pembinaan Kelompok Kerja KKG dan MGMP	7.500.000,00	90.445.500,00	0,00	97.945.500,00	(7.785.000,00)	92,05
		7.500.000,00	82.660.500,00	0,00	90.160.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	211.060.000,00	3.741.920.000,00	0,00	3.952.980.000,00	(37.972.450,00)	99,04
		206.740.000,00	3.708.267.550,00	0,00	3.915.007.550,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 30	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	51.060.000,00	116.520.000,00	0,00	167.580.000,00	(8.444.450,00)	94,96
		46.740.000,00	112.395.550,00	0,00	159.135.550,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 36	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMP	0,00	660.000.000,00	0,00	660.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	660.000.000,00	0,00	660.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 37	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD	0,00	2.175.000.000,00	0,00	2.175.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.175.000.000,00	0,00	2.175.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 38	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	320.000.000,00	(25.000,00)	99,99
		160.000.000,00	159.975.000,00	0,00	319.975.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 39	Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah	0,00	61.900.000,00	0,00	61.900.000,00	(150.000,00)	99,76
		0,00	61.750.000,00	0,00	61.750.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 40	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Neger/ DAK 2018	0,00	536.865.000,00	0,00	536.865.000,00	(29.100.400,00)	94,58
		0,00	507.764.600,00	0,00	507.764.600,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41	Penyusunan Profil dan Data Pokok Pendidikan	0,00	31.635.000,00	0,00	31.635.000,00	(252.600,00)	99,20
		0,00	31.382.400,00	0,00	31.382.400,00		
1.01 . 1.01.01 . 02	Satdik Negeri SDN 01 Koto Baru (BOS)	0,00	302.281.216,00	78.389.900,00	380.671.116,00	(2.791.116,00)	99,27
		0,00	299.490.100,00	78.389.900,00	377.880.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	302.281.216,00	78.389.900,00	380.671.116,00	(2.791.116,00)	99,27
		0,00	299.490.100,00	78.389.900,00	377.880.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	302.281.216,00	78.389.900,00	380.671.116,00	(2.791.116,00)	99,27
		0,00	299.490.100,00	78.389.900,00	377.880.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 03	Satdik Negeri SDN 02 Koto Baru (BOS)	0,00	165.913.945,00	60.192.420,00	226.106.365,00	(1.544.265,00)	99,32
		0,00	164.369.680,00	60.192.420,00	224.562.100,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	165.913.945,00	60.192.420,00	226.106.365,00	(1.544.265,00)	99,32
		0,00	164.369.680,00	60.192.420,00	224.562.100,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	165.913.945,00	60.192.420,00	226.106.365,00	(1.544.265,00)	99,32
		0,00	164.369.680,00	60.192.420,00	224.562.100,00		
1.01 . 1.01.01 . 04	Satdik Negeri SDN 03 Koto Baru (BOS)	0,00	84.793.683,00	28.527.200,00	113.320.883,00	(2.174.466,00)	98,08
		0,00	82.619.217,00	28.527.200,00	111.146.417,00		
1.01 . 1.01.01 . 04 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	84.793.683,00	28.527.200,00	113.320.883,00	(2.174.466,00)	98,08
		0,00	82.619.217,00	28.527.200,00	111.146.417,00		
1.01 . 1.01.01 . 04 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	84.793.683,00	28.527.200,00	113.320.883,00	(2.174.466,00)	98,08
		0,00	82.619.217,00	28.527.200,00	111.146.417,00		
1.01 . 1.01.01 . 05	Satdik Negeri SDN 04 Koto Baru (BOS)	0,00	87.819.266,00	10.755.620,00	98.574.886,00	32.365.634,00	132,83
		0,00	82.203.900,00	48.736.620,00	130.940.520,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	87.819.266,00	10.755.620,00	98.574.886,00	32.365.634,00	132,83
		0,00	82.203.900,00	48.736.620,00	130.940.520,00		
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	87.819.266,00	10.755.620,00	98.574.886,00	32.365.634,00	132,83
		0,00	82.203.900,00	48.736.620,00	130.940.520,00		
1.01 . 1.01.01 . 06	Satdik Negeri SDN 05 Koto Baru (BOS)	0,00	107.468.624,00	41.047.200,00	148.515.824,00	(854.973,00)	99,42
		0,00	106.734.516,00	40.926.335,00	147.660.851,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	107.468.624,00	41.047.200,00	148.515.824,00	(854.973,00)	99,42
		0,00	106.734.516,00	40.926.335,00	147.660.851,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	107.468.624,00	41.047.200,00	148.515.824,00	(854.973,00)	99,42
		0,00	106.734.516,00	40.926.335,00	147.660.851,00		
1.01 . 1.01.01 . 07	Satdik Negeri SDN 06 Koto Baru (BOS)	0,00	149.406.852,00	39.709.700,00	189.116.552,00	(3.520.000,00)	98,14
		0,00	145.886.852,00	39.709.700,00	185.596.552,00		
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	149.406.852,00	39.709.700,00	189.116.552,00	(3.520.000,00)	98,14
		0,00	145.886.852,00	39.709.700,00	185.596.552,00		
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	149.406.852,00	39.709.700,00	189.116.552,00	(3.520.000,00)	98,14
		0,00	145.886.852,00	39.709.700,00	185.596.552,00		
1.01 . 1.01.01 . 08	Satdik Negeri SDN 07 Koto Baru (BOS)	0,00	155.844.935,00	75.035.065,00	230.880.000,00	(6.888.943,00)	97,02
		0,00	148.955.992,00	75.035.065,00	223.991.057,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	155.844.935,00	75.035.065,00	230.880.000,00	(6.888.943,00)	97,02
		0,00	148.955.992,00	75.035.065,00	223.991.057,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	155.844.935,00	75.035.065,00	230.880.000,00	(6.888.943,00)	97,02
		0,00	148.955.992,00	75.035.065,00	223.991.057,00		
1.01 . 1.01.01 . 09	Satdik Negeri SDN 08 Koto Baru (BOS)	0,00	76.343.581,00	26.935.220,00	103.278.801,00	(1.760.000,00)	98,30
		0,00	74.583.581,00	26.935.220,00	101.518.801,00		
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	76.343.581,00	26.935.220,00	103.278.801,00	(1.760.000,00)	98,30
		0,00	74.583.581,00	26.935.220,00	101.518.801,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	76.343.581,00	26.935.220,00	103.278.801,00	(1.760.000,00)	98,30
		0,00	74.583.581,00	26.935.220,00	101.518.801,00		
1.01 . 1.01.01 . 10	Satdik Negeri SDN 09 Koto Baru (BOS)	0,00	77.351.826,00	34.208.665,00	111.560.491,00	(2.760.491,00)	97,53
		0,00	74.591.335,00	34.208.665,00	108.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	77.351.826,00	34.208.665,00	111.560.491,00	(2.760.491,00)	97,53
		0,00	74.591.335,00	34.208.665,00	108.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	77.351.826,00	34.208.665,00	111.560.491,00	(2.760.491,00)	97,53
		0,00	74.591.335,00	34.208.665,00	108.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 11	Satdik Negeri SDN 10 Koto Baru (BOS)	0,00	69.777.170,00	22.062.830,00	91.840.000,00	(960.000,00)	98,95
		0,00	68.817.170,00	22.062.830,00	90.880.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 11 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	69.777.170,00	22.062.830,00	91.840.000,00	(960.000,00)	98,95
		0,00	68.817.170,00	22.062.830,00	90.880.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 11 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	69.777.170,00	22.062.830,00	91.840.000,00	(960.000,00)	98,95
		0,00	68.817.170,00	22.062.830,00	90.880.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 12	Satdik Negeri SDN 11 Koto Baru (BOS)	0,00	188.947.756,00	46.382.665,00	235.330.421,00	(5.760.000,00)	97,55
		0,00	183.187.756,00	46.382.665,00	229.570.421,00		
1.01 . 1.01.01 . 12 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	188.947.756,00	46.382.665,00	235.330.421,00	(5.760.000,00)	97,55
		0,00	183.187.756,00	46.382.665,00	229.570.421,00		
1.01 . 1.01.01 . 12 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	188.947.756,00	46.382.665,00	235.330.421,00	(5.760.000,00)	97,55
		0,00	183.187.756,00	46.382.665,00	229.570.421,00		
1.01 . 1.01.01 . 13	Satdik Negeri SDN 12 Koto Baru (BOS)	0,00	87.576.303,00	38.000.000,00	125.576.303,00	(1.576.303,00)	98,74
		0,00	86.000.000,00	38.000.000,00	124.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 13 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	87.576.303,00	38.000.000,00	125.576.303,00	(1.576.303,00)	98,74
		0,00	86.000.000,00	38.000.000,00	124.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 13 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	87.576.303,00	38.000.000,00	125.576.303,00	(1.576.303,00)	98,74
		0,00	86.000.000,00	38.000.000,00	124.000.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 14	Satdik Negeri SDN 13 Koto Baru (BOS)	0,00	245.155.102,00	56.065.615,00	301.220.717,00	(10.888.717,00)	96,39
		0,00	234.266.385,00	56.065.615,00	290.332.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 14 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	245.155.102,00	56.065.615,00	301.220.717,00	(10.888.717,00)	96,39
		0,00	234.266.385,00	56.065.615,00	290.332.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 14 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	245.155.102,00	56.065.615,00	301.220.717,00	(10.888.717,00)	96,39
		0,00	234.266.385,00	56.065.615,00	290.332.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15	Satdik Negeri SDN 14 Koto Baru (BOS)	0,00	113.028.904,00	25.255.290,00	138.284.194,00	23.501.299,00	116,99
		0,00	112.530.203,00	49.255.290,00	161.785.493,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	113.028.904,00	25.255.290,00	138.284.194,00	23.501.299,00	116,99
		0,00	112.530.203,00	49.255.290,00	161.785.493,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	113.028.904,00	25.255.290,00	138.284.194,00	23.501.299,00	116,99
		0,00	112.530.203,00	49.255.290,00	161.785.493,00		
1.01 . 1.01.01 . 16	Satdik Negeri SDN 15 Koto Baru (BOS)	0,00	75.489.751,00	22.141.320,00	97.631.071,00	(31.071,00)	99,97
		0,00	75.458.680,00	22.141.320,00	97.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	75.489.751,00	22.141.320,00	97.631.071,00	(31.071,00)	99,97
		0,00	75.458.680,00	22.141.320,00	97.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	75.489.751,00	22.141.320,00	97.631.071,00	(31.071,00)	99,97
		0,00	75.458.680,00	22.141.320,00	97.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17	Satdik Negeri SDN 16 Koto Baru (BOS)	0,00	227.056.540,00	79.128.970,00	306.185.510,00	(5.097.676,00)	98,34
		0,00	224.974.534,00	76.113.300,00	301.087.834,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	227.056.540,00	79.128.970,00	306.185.510,00	(5.097.676,00)	98,34
		0,00	224.974.534,00	76.113.300,00	301.087.834,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	227.056.540,00	79.128.970,00	306.185.510,00	(5.097.676,00)	98,34
		0,00	224.974.534,00	76.113.300,00	301.087.834,00		
1.01 . 1.01.01 . 18	Satdik Negeri SDN 01 Pulau Punjung (BOS)	0,00	158.579.904,00	37.272.495,00	195.852.399,00	(49.999,00)	99,97
		0,00	158.529.905,00	37.272.495,00	195.802.400,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	158.579.904,00	37.272.495,00	195.852.399,00	(49.999,00)	99,97
		0,00	158.529.905,00	37.272.495,00	195.802.400,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	158.579.904,00	37.272.495,00	195.852.399,00	(49.999,00)	99,97
		0,00	158.529.905,00	37.272.495,00	195.802.400,00		
1.01 . 1.01.01 . 19	Satdik Negeri SDN 02 Pulau Punjung (BOS)	0,00	37.277.597,00	6.013.015,00	43.290.612,00	0,00	100,00
		0,00	37.277.597,00	6.013.015,00	43.290.612,00		
1.01 . 1.01.01 . 19 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	37.277.597,00	6.013.015,00	43.290.612,00	0,00	100,00
		0,00	37.277.597,00	6.013.015,00	43.290.612,00		
1.01 . 1.01.01 . 19 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	37.277.597,00	6.013.015,00	43.290.612,00	0,00	100,00
		0,00	37.277.597,00	6.013.015,00	43.290.612,00		
1.01 . 1.01.01 . 20	Satdik Negeri SDN 03 Pulau Punjung (BOS)	0,00	153.784.100,00	55.330.000,00	209.114.100,00	(2.017.479,00)	99,04
		0,00	151.766.621,00	55.330.000,00	207.096.621,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	153.784.100,00	55.330.000,00	209.114.100,00	(2.017.479,00)	99,04
		0,00	151.766.621,00	55.330.000,00	207.096.621,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	153.784.100,00	55.330.000,00	209.114.100,00	(2.017.479,00)	99,04
		0,00	151.766.621,00	55.330.000,00	207.096.621,00		
1.01 . 1.01.01 . 21	Satdik Negeri SDN 04 Pulau Punjung (BOS)	0,00	165.306.130,00	76.828.710,00	242.134.840,00	(9.280.943,00)	96,17
		0,00	156.025.187,00	76.828.710,00	232.853.897,00		
1.01 . 1.01.01 . 21 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	165.306.130,00	76.828.710,00	242.134.840,00	(9.280.943,00)	96,17
		0,00	156.025.187,00	76.828.710,00	232.853.897,00		
1.01 . 1.01.01 . 21 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	165.306.130,00	76.828.710,00	242.134.840,00	(9.280.943,00)	96,17
		0,00	156.025.187,00	76.828.710,00	232.853.897,00		
1.01 . 1.01.01 . 22	Satdik Negeri SDN 05 Pulau Punjung (BOS)	0,00	104.332.007,00	27.646.345,00	131.978.352,00	(383.607,00)	99,71
		0,00	103.948.400,00	27.646.345,00	131.594.745,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	104.332.007,00	27.646.345,00	131.978.352,00	(383.607,00)	99,71
		0,00	103.948.400,00	27.646.345,00	131.594.745,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	104.332.007,00	27.646.345,00	131.978.352,00	(383.607,00)	99,71
		0,00	103.948.400,00	27.646.345,00	131.594.745,00		
1.01 . 1.01.01 . 23	Satdik Negeri SDN 06 Pulau Punjung (BOS)	0,00	230.936.139,00	80.479.405,00	311.415.544,00	(3.520.000,00)	98,87
		0,00	227.416.139,00	80.479.405,00	307.895.544,00		
1.01 . 1.01.01 . 23 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	230.936.139,00	80.479.405,00	311.415.544,00	(3.520.000,00)	98,87
		0,00	227.416.139,00	80.479.405,00	307.895.544,00		
1.01 . 1.01.01 . 23 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	230.936.139,00	80.479.405,00	311.415.544,00	(3.520.000,00)	98,87
		0,00	227.416.139,00	80.479.405,00	307.895.544,00		
1.01 . 1.01.01 . 24	Satdik Negeri SDN 07 Pulau Punjung (BOS)	0,00	112.564.136,00	40.355.080,00	152.919.216,00	(4.171.736,00)	97,27
		0,00	108.392.400,00	40.355.080,00	148.747.480,00		
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	112.564.136,00	40.355.080,00	152.919.216,00	(4.171.736,00)	97,27
		0,00	108.392.400,00	40.355.080,00	148.747.480,00		
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	112.564.136,00	40.355.080,00	152.919.216,00	(4.171.736,00)	97,27
		0,00	108.392.400,00	40.355.080,00	148.747.480,00		
1.01 . 1.01.01 . 25	Satdik Negeri SDN 08 Pulau Punjung (BOS)	0,00	367.825.367,00	64.664.605,00	432.489.972,00	(10.400.000,00)	97,60
		0,00	357.425.367,00	64.664.605,00	422.089.972,00		
1.01 . 1.01.01 . 25 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	367.825.367,00	64.664.605,00	432.489.972,00	(10.400.000,00)	97,60
		0,00	357.425.367,00	64.664.605,00	422.089.972,00		
1.01 . 1.01.01 . 25 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	367.825.367,00	64.664.605,00	432.489.972,00	(10.400.000,00)	97,60
		0,00	357.425.367,00	64.664.605,00	422.089.972,00		
1.01 . 1.01.01 . 26	Satdik Negeri SDN 09 Pulau Punjung (BOS)	0,00	189.609.058,00	86.831.380,00	276.440.438,00	(6.132.028,00)	97,78
		0,00	183.477.030,00	86.831.380,00	270.308.410,00		
1.01 . 1.01.01 . 26 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	189.609.058,00	86.831.380,00	276.440.438,00	(6.132.028,00)	97,78
		0,00	183.477.030,00	86.831.380,00	270.308.410,00		
1.01 . 1.01.01 . 26 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	189.609.058,00	86.831.380,00	276.440.438,00	(6.132.028,00)	97,78
		0,00	183.477.030,00	86.831.380,00	270.308.410,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 27	Satdik Negeri SDN 10 Pulau Punjung (BOS)	0,00	122.900.000,00	50.380.000,00	173.280.000,00	(7.040.000,00)	95,94
		0,00	115.860.000,00	50.380.000,00	166.240.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 27 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	122.900.000,00	50.380.000,00	173.280.000,00	(7.040.000,00)	95,94
		0,00	115.860.000,00	50.380.000,00	166.240.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 27 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	122.900.000,00	50.380.000,00	173.280.000,00	(7.040.000,00)	95,94
		0,00	115.860.000,00	50.380.000,00	166.240.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 28	Satdik Negeri SDN 11 Pulau Punjung (BOS)	0,00	110.380.102,00	58.725.870,00	169.105.972,00	(922.972,00)	99,45
		0,00	109.457.130,00	58.725.870,00	168.183.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 28 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	110.380.102,00	58.725.870,00	169.105.972,00	(922.972,00)	99,45
		0,00	109.457.130,00	58.725.870,00	168.183.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 28 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	110.380.102,00	58.725.870,00	169.105.972,00	(922.972,00)	99,45
		0,00	109.457.130,00	58.725.870,00	168.183.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 29	Satdik Negeri SDN 12 Pulau Punjung (BOS)	0,00	31.833.012,00	16.997.000,00	48.830.012,00	(16.909,00)	99,97
		0,00	31.816.103,00	16.997.000,00	48.813.103,00		
1.01 . 1.01.01 . 29 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	31.833.012,00	16.997.000,00	48.830.012,00	(16.909,00)	99,97
		0,00	31.816.103,00	16.997.000,00	48.813.103,00		
1.01 . 1.01.01 . 29 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	31.833.012,00	16.997.000,00	48.830.012,00	(16.909,00)	99,97
		0,00	31.816.103,00	16.997.000,00	48.813.103,00		
1.01 . 1.01.01 . 30	Satdik Negeri SDN 13 Pulau Punjung (BOS)	0,00	124.877.537,00	25.613.980,00	150.491.517,00	(9.537.031,00)	93,66
		0,00	115.340.506,00	25.613.980,00	140.954.486,00		
1.01 . 1.01.01 . 30 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	124.877.537,00	25.613.980,00	150.491.517,00	(9.537.031,00)	93,66
		0,00	115.340.506,00	25.613.980,00	140.954.486,00		
1.01 . 1.01.01 . 30 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	124.877.537,00	25.613.980,00	150.491.517,00	(9.537.031,00)	93,66
		0,00	115.340.506,00	25.613.980,00	140.954.486,00		
1.01 . 1.01.01 . 31	Satdik Negeri SDN 14 Pulau Punjung (BOS)	0,00	117.160.702,00	42.963.125,00	160.123.827,00	(1.280.000,00)	99,20
		0,00	115.880.702,00	42.963.125,00	158.843.827,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 31 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	117.160.702,00	42.963.125,00	160.123.827,00	(1.280.000,00)	99,20
		0,00	115.880.702,00	42.963.125,00	158.843.827,00		
1.01 . 1.01.01 . 31 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	117.160.702,00	42.963.125,00	160.123.827,00	(1.280.000,00)	99,20
		0,00	115.880.702,00	42.963.125,00	158.843.827,00		
1.01 . 1.01.01 . 32	Satdik Negeri SDN 15 Pulau Punjung (BOS)	0,00	62.299.771,00	21.046.000,00	83.345.771,00	(145.771,00)	99,83
		0,00	62.154.000,00	21.046.000,00	83.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 32 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	62.299.771,00	21.046.000,00	83.345.771,00	(145.771,00)	99,83
		0,00	62.154.000,00	21.046.000,00	83.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 32 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	62.299.771,00	21.046.000,00	83.345.771,00	(145.771,00)	99,83
		0,00	62.154.000,00	21.046.000,00	83.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 33	Satdik Negeri SDN 16 Pulau Punjung (BOS)	0,00	145.539.371,00	38.473.505,00	184.012.876,00	(2.880.664,00)	98,43
		0,00	142.658.707,00	38.473.505,00	181.132.212,00		
1.01 . 1.01.01 . 33 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	145.539.371,00	38.473.505,00	184.012.876,00	(2.880.664,00)	98,43
		0,00	142.658.707,00	38.473.505,00	181.132.212,00		
1.01 . 1.01.01 . 33 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	145.539.371,00	38.473.505,00	184.012.876,00	(2.880.664,00)	98,43
		0,00	142.658.707,00	38.473.505,00	181.132.212,00		
1.01 . 1.01.01 . 34	Satdik Negeri SDN 17 Pulau Punjung (BOS)	0,00	66.619.925,00	28.607.575,00	95.227.500,00	(23.500,00)	99,98
		0,00	66.619.925,00	28.584.075,00	95.204.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 34 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	66.619.925,00	28.607.575,00	95.227.500,00	(23.500,00)	99,98
		0,00	66.619.925,00	28.584.075,00	95.204.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 34 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	66.619.925,00	28.607.575,00	95.227.500,00	(23.500,00)	99,98
		0,00	66.619.925,00	28.584.075,00	95.204.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 35	Satdik Negeri SDN 18 Pulau Punjung (BOS)	0,00	64.141.474,00	25.061.430,00	89.202.904,00	(6.011.904,00)	93,26
		0,00	59.333.070,00	23.857.930,00	83.191.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 35 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	64.141.474,00	25.061.430,00	89.202.904,00	(6.011.904,00)	93,26
		0,00	59.333.070,00	23.857.930,00	83.191.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 35 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	64.141.474,00	25.061.430,00	89.202.904,00	(6.011.904,00)	93,26
		0,00	59.333.070,00	23.857.930,00	83.191.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 36	Satdik Negeri SDN 19 Pulau Punjung (BOS)	0,00	182.008.632,00	85.272.790,00	267.281.422,00	(847.000,00)	99,68
		0,00	181.161.632,00	85.272.790,00	266.434.422,00		
1.01 . 1.01.01 . 36 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	182.008.632,00	85.272.790,00	267.281.422,00	(847.000,00)	99,68
		0,00	181.161.632,00	85.272.790,00	266.434.422,00		
1.01 . 1.01.01 . 36 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	182.008.632,00	85.272.790,00	267.281.422,00	(847.000,00)	99,68
		0,00	181.161.632,00	85.272.790,00	266.434.422,00		
1.01 . 1.01.01 . 37	Satdik Negeri SDN 20 Pulau Punjung (BOS)	0,00	57.127.573,00	16.269.795,00	73.397.368,00	(3.894.701,00)	94,69
		0,00	53.232.872,00	16.269.795,00	69.502.667,00		
1.01 . 1.01.01 . 37 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	57.127.573,00	16.269.795,00	73.397.368,00	(3.894.701,00)	94,69
		0,00	53.232.872,00	16.269.795,00	69.502.667,00		
1.01 . 1.01.01 . 37 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	57.127.573,00	16.269.795,00	73.397.368,00	(3.894.701,00)	94,69
		0,00	53.232.872,00	16.269.795,00	69.502.667,00		
1.01 . 1.01.01 . 38	Satdik Negeri SDN 21 Pulau Punjung (BOS)	0,00	169.626.647,00	70.297.010,00	239.923.657,00	(1.489.078,00)	99,38
		0,00	169.517.769,00	68.916.810,00	238.434.579,00		
1.01 . 1.01.01 . 38 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	169.626.647,00	70.297.010,00	239.923.657,00	(1.489.078,00)	99,38
		0,00	169.517.769,00	68.916.810,00	238.434.579,00		
1.01 . 1.01.01 . 38 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	169.626.647,00	70.297.010,00	239.923.657,00	(1.489.078,00)	99,38
		0,00	169.517.769,00	68.916.810,00	238.434.579,00		
1.01 . 1.01.01 . 39	Satdik Negeri SDN 22 Pulau Punjung (BOS)	0,00	107.833.129,00	44.514.017,00	152.347.146,00	(3.840.000,00)	97,48
		0,00	103.993.129,00	44.514.017,00	148.507.146,00		
1.01 . 1.01.01 . 39 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	107.833.129,00	44.514.017,00	152.347.146,00	(3.840.000,00)	97,48
		0,00	103.993.129,00	44.514.017,00	148.507.146,00		
1.01 . 1.01.01 . 39 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	107.833.129,00	44.514.017,00	152.347.146,00	(3.840.000,00)	97,48
		0,00	103.993.129,00	44.514.017,00	148.507.146,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 40	Satdik Negeri SDN 23 Pulau Punjung (BOS)	0,00	44.355.272,00	5.244.980,00	49.600.252,00	0,00	100,00
		0,00	44.355.272,00	5.244.980,00	49.600.252,00		
1.01 . 1.01.01 . 40 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	44.355.272,00	5.244.980,00	49.600.252,00	0,00	100,00
		0,00	44.355.272,00	5.244.980,00	49.600.252,00		
1.01 . 1.01.01 . 40 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	44.355.272,00	5.244.980,00	49.600.252,00	0,00	100,00
		0,00	44.355.272,00	5.244.980,00	49.600.252,00		
1.01 . 1.01.01 . 41	Satdik Negeri SDN 24 Pulau Punjung (BOS)	0,00	115.688.052,00	27.912.000,00	143.600.052,00	(6.800.052,00)	95,26
		0,00	108.888.000,00	27.912.000,00	136.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 41 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	115.688.052,00	27.912.000,00	143.600.052,00	(6.800.052,00)	95,26
		0,00	108.888.000,00	27.912.000,00	136.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 41 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	115.688.052,00	27.912.000,00	143.600.052,00	(6.800.052,00)	95,26
		0,00	108.888.000,00	27.912.000,00	136.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 42	Satdik Negeri SDN 01 Sungai Rumbai (BOS)	0,00	131.097.868,00	36.329.615,00	167.427.483,00	(227.483,00)	99,86
		0,00	130.870.385,00	36.329.615,00	167.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 42 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	131.097.868,00	36.329.615,00	167.427.483,00	(227.483,00)	99,86
		0,00	130.870.385,00	36.329.615,00	167.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 42 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	131.097.868,00	36.329.615,00	167.427.483,00	(227.483,00)	99,86
		0,00	130.870.385,00	36.329.615,00	167.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 43	Satdik Negeri SDN 02 Sungai Rumbai (BOS)	0,00	173.111.586,00	52.570.000,00	225.681.586,00	(880,00)	100,00
		0,00	173.111.586,00	52.569.120,00	225.680.706,00		
1.01 . 1.01.01 . 43 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	173.111.586,00	52.570.000,00	225.681.586,00	(880,00)	100,00
		0,00	173.111.586,00	52.569.120,00	225.680.706,00		
1.01 . 1.01.01 . 43 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	173.111.586,00	52.570.000,00	225.681.586,00	(880,00)	100,00
		0,00	173.111.586,00	52.569.120,00	225.680.706,00		
1.01 . 1.01.01 . 44	Satdik Negeri SDN 03 Sungai Rumbai (BOS)	0,00	143.880.000,00	55.000.000,00	198.880.000,00	(7.520.000,00)	96,22
		0,00	136.360.000,00	55.000.000,00	191.360.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 44 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	143.880.000,00	55.000.000,00	198.880.000,00	(7.520.000,00)	96,22
		0,00	136.360.000,00	55.000.000,00	191.360.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 44 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	143.880.000,00	55.000.000,00	198.880.000,00	(7.520.000,00)	96,22
		0,00	136.360.000,00	55.000.000,00	191.360.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 45	Satdik Negeri SDN 04 Sungai Rumbai (BOS)	0,00	138.400.732,00	40.189.260,00	178.589.992,00	(1.082.232,00)	99,39
		0,00	137.318.500,00	40.189.260,00	177.507.760,00		
1.01 . 1.01.01 . 45 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	138.400.732,00	40.189.260,00	178.589.992,00	(1.082.232,00)	99,39
		0,00	137.318.500,00	40.189.260,00	177.507.760,00		
1.01 . 1.01.01 . 45 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	138.400.732,00	40.189.260,00	178.589.992,00	(1.082.232,00)	99,39
		0,00	137.318.500,00	40.189.260,00	177.507.760,00		
1.01 . 1.01.01 . 46	Satdik Negeri SDN 05 Sungai Rumbai (BOS)	0,00	302.710.382,00	117.105.693,00	419.816.075,00	(12.592.996,00)	97,00
		0,00	290.117.386,00	117.105.693,00	407.223.079,00		
1.01 . 1.01.01 . 46 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	302.710.382,00	117.105.693,00	419.816.075,00	(12.592.996,00)	97,00
		0,00	290.117.386,00	117.105.693,00	407.223.079,00		
1.01 . 1.01.01 . 46 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	302.710.382,00	117.105.693,00	419.816.075,00	(12.592.996,00)	97,00
		0,00	290.117.386,00	117.105.693,00	407.223.079,00		
1.01 . 1.01.01 . 47	Satdik Negeri SDN 06 Sungai Rumbai (BOS)	0,00	86.248.245,00	35.191.755,00	121.440.000,00	(2.240.000,00)	98,16
		0,00	84.008.245,00	35.191.755,00	119.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 47 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	86.248.245,00	35.191.755,00	121.440.000,00	(2.240.000,00)	98,16
		0,00	84.008.245,00	35.191.755,00	119.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 47 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	86.248.245,00	35.191.755,00	121.440.000,00	(2.240.000,00)	98,16
		0,00	84.008.245,00	35.191.755,00	119.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 48	Satdik Negeri SDN 07 Sungai Rumbai (BOS)	0,00	93.273.985,00	35.314.800,00	128.588.785,00	(636.085,00)	99,51
		0,00	92.637.900,00	35.314.800,00	127.952.700,00		
1.01 . 1.01.01 . 48 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	93.273.985,00	35.314.800,00	128.588.785,00	(636.085,00)	99,51
		0,00	92.637.900,00	35.314.800,00	127.952.700,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 48 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	93.273.985,00	35.314.800,00	128.588.785,00	(636.085,00)	99,51
		0,00	92.637.900,00	35.314.800,00	127.952.700,00		
1.01 . 1.01.01 . 49	Satdik Negeri SDN 08 Sungai Rumbai (BOS)	0,00	393.326.871,00	46.584.050,00	439.910.921,00	(11.680.921,00)	97,34
		0,00	381.645.950,00	46.584.050,00	428.230.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 49 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	393.326.871,00	46.584.050,00	439.910.921,00	(11.680.921,00)	97,34
		0,00	381.645.950,00	46.584.050,00	428.230.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 49 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	393.326.871,00	46.584.050,00	439.910.921,00	(11.680.921,00)	97,34
		0,00	381.645.950,00	46.584.050,00	428.230.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 50	Satdik Negeri SDN 09 Sungai Rumbai (BOS)	0,00	191.030.332,00	95.563.525,00	286.593.857,00	(4.193.857,00)	98,54
		0,00	188.336.475,00	94.063.525,00	282.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 50 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	191.030.332,00	95.563.525,00	286.593.857,00	(4.193.857,00)	98,54
		0,00	188.336.475,00	94.063.525,00	282.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 50 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	191.030.332,00	95.563.525,00	286.593.857,00	(4.193.857,00)	98,54
		0,00	188.336.475,00	94.063.525,00	282.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 51	Satdik Negeri SDN 10 Sungai Rumbai (BOS)	0,00	55.696.905,00	16.808.095,00	72.505.000,00	40.167.595,00	155,40
		0,00	53.885.500,00	58.787.095,00	112.672.595,00		
1.01 . 1.01.01 . 51 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	55.696.905,00	16.808.095,00	72.505.000,00	40.167.595,00	155,40
		0,00	53.885.500,00	58.787.095,00	112.672.595,00		
1.01 . 1.01.01 . 51 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	55.696.905,00	16.808.095,00	72.505.000,00	40.167.595,00	155,40
		0,00	53.885.500,00	58.787.095,00	112.672.595,00		
1.01 . 1.01.01 . 52	Satdik Negeri SDN 01 Sitiung (BOS)	0,00	97.288.417,00	42.866.490,00	140.154.907,00	(7.834.907,00)	94,41
		0,00	89.753.510,00	42.566.490,00	132.320.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 52 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	97.288.417,00	42.866.490,00	140.154.907,00	(7.834.907,00)	94,41
		0,00	89.753.510,00	42.566.490,00	132.320.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 52 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	97.288.417,00	42.866.490,00	140.154.907,00	(7.834.907,00)	94,41
		0,00	89.753.510,00	42.566.490,00	132.320.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 53	Satdik Negeri SDN 02 Sitiung (BOS)	0,00	75.539.867,00	26.107.220,00	101.647.087,00	52.265.346,00	151,42
		0,00	74.633.213,00	79.279.220,00	153.912.433,00		
1.01 . 1.01.01 . 53 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	75.539.867,00	26.107.220,00	101.647.087,00	52.265.346,00	151,42
		0,00	74.633.213,00	79.279.220,00	153.912.433,00		
1.01 . 1.01.01 . 53 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	75.539.867,00	26.107.220,00	101.647.087,00	52.265.346,00	151,42
		0,00	74.633.213,00	79.279.220,00	153.912.433,00		
1.01 . 1.01.01 . 54	Satdik Negeri SDN 03 Sitiung (BOS)	0,00	71.036.428,00	28.417.420,00	99.453.848,00	35.820.000,00	136,02
		0,00	66.876.428,00	68.397.420,00	135.273.848,00		
1.01 . 1.01.01 . 54 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	71.036.428,00	28.417.420,00	99.453.848,00	35.820.000,00	136,02
		0,00	66.876.428,00	68.397.420,00	135.273.848,00		
1.01 . 1.01.01 . 54 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	71.036.428,00	28.417.420,00	99.453.848,00	35.820.000,00	136,02
		0,00	66.876.428,00	68.397.420,00	135.273.848,00		
1.01 . 1.01.01 . 55	Satdik Negeri SDN 04 Sitiung (BOS)	0,00	180.312.007,00	59.792.100,00	240.104.107,00	(3.284.107,00)	98,63
		0,00	177.027.900,00	59.792.100,00	236.820.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 55 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	180.312.007,00	59.792.100,00	240.104.107,00	(3.284.107,00)	98,63
		0,00	177.027.900,00	59.792.100,00	236.820.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 55 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	180.312.007,00	59.792.100,00	240.104.107,00	(3.284.107,00)	98,63
		0,00	177.027.900,00	59.792.100,00	236.820.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 56	Satdik Negeri SDN 05 Sitiung (BOS)	0,00	62.513.206,00	14.165.940,00	76.679.146,00	(25.146,00)	99,97
		0,00	62.488.060,00	14.165.940,00	76.654.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 56 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	62.513.206,00	14.165.940,00	76.679.146,00	(25.146,00)	99,97
		0,00	62.488.060,00	14.165.940,00	76.654.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 56 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	62.513.206,00	14.165.940,00	76.679.146,00	(25.146,00)	99,97
		0,00	62.488.060,00	14.165.940,00	76.654.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 57	Satdik Negeri SDN 06 Sitiung (BOS)	0,00	73.559.305,00	36.939.900,00	110.499.205,00	(11.982.505,00)	89,16
		0,00	72.660.000,00	25.856.700,00	98.516.700,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 57 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	73.559.305,00	36.939.900,00	110.499.205,00	(11.982.505,00)	89,16
		0,00	72.660.000,00	25.856.700,00	98.516.700,00		
1.01 . 1.01.01 . 57 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	73.559.305,00	36.939.900,00	110.499.205,00	(11.982.505,00)	89,16
		0,00	72.660.000,00	25.856.700,00	98.516.700,00		
1.01 . 1.01.01 . 58	Satdik Negeri SDN 07 Sitiung (BOS)	0,00	73.582.580,00	25.777.420,00	99.360.000,00	(2.560.000,00)	97,42
		0,00	71.022.580,00	25.777.420,00	96.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 58 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	73.582.580,00	25.777.420,00	99.360.000,00	(2.560.000,00)	97,42
		0,00	71.022.580,00	25.777.420,00	96.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 58 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	73.582.580,00	25.777.420,00	99.360.000,00	(2.560.000,00)	97,42
		0,00	71.022.580,00	25.777.420,00	96.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 59	Satdik Negeri SDN 08 Sitiung (BOS)	0,00	106.667.793,00	26.400.000,00	133.067.793,00	(4.640.000,00)	96,51
		0,00	102.027.793,00	26.400.000,00	128.427.793,00		
1.01 . 1.01.01 . 59 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	106.667.793,00	26.400.000,00	133.067.793,00	(4.640.000,00)	96,51
		0,00	102.027.793,00	26.400.000,00	128.427.793,00		
1.01 . 1.01.01 . 59 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	106.667.793,00	26.400.000,00	133.067.793,00	(4.640.000,00)	96,51
		0,00	102.027.793,00	26.400.000,00	128.427.793,00		
1.01 . 1.01.01 . 60	Satdik Negeri SDN 09 Sitiung (BOS)	0,00	55.220.288,00	16.944.995,00	72.165.283,00	(3.474.188,00)	95,19
		0,00	51.746.100,00	16.944.995,00	68.691.095,00		
1.01 . 1.01.01 . 60 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	55.220.288,00	16.944.995,00	72.165.283,00	(3.474.188,00)	95,19
		0,00	51.746.100,00	16.944.995,00	68.691.095,00		
1.01 . 1.01.01 . 60 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	55.220.288,00	16.944.995,00	72.165.283,00	(3.474.188,00)	95,19
		0,00	51.746.100,00	16.944.995,00	68.691.095,00		
1.01 . 1.01.01 . 61	Satdik Negeri SDN 10 Sitiung (BOS)	0,00	72.513.725,00	23.806.275,00	96.320.000,00	(964.352,00)	99,00
		0,00	71.549.373,00	23.806.275,00	95.355.648,00		
1.01 . 1.01.01 . 61 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	72.513.725,00	23.806.275,00	96.320.000,00	(964.352,00)	99,00
		0,00	71.549.373,00	23.806.275,00	95.355.648,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 61 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	72.513.725,00	23.806.275,00	96.320.000,00	(964.352,00)	99,00
		0,00	71.549.373,00	23.806.275,00	95.355.648,00		
1.01 . 1.01.01 . 62	Satdik Negeri SDN 11 Sitiung (BOS)	0,00	78.776.543,00	31.251.865,00	110.028.408,00	(4.160.000,00)	96,22
		0,00	74.616.543,00	31.251.865,00	105.868.408,00		
1.01 . 1.01.01 . 62 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	78.776.543,00	31.251.865,00	110.028.408,00	(4.160.000,00)	96,22
		0,00	74.616.543,00	31.251.865,00	105.868.408,00		
1.01 . 1.01.01 . 62 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	78.776.543,00	31.251.865,00	110.028.408,00	(4.160.000,00)	96,22
		0,00	74.616.543,00	31.251.865,00	105.868.408,00		
1.01 . 1.01.01 . 63	Satdik Negeri SDN 12 Sitiung (BOS)	0,00	61.107.949,00	13.827.440,00	74.935.389,00	31.208.951,00	141,65
		0,00	58.333.900,00	47.810.440,00	106.144.340,00		
1.01 . 1.01.01 . 63 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	61.107.949,00	13.827.440,00	74.935.389,00	31.208.951,00	141,65
		0,00	58.333.900,00	47.810.440,00	106.144.340,00		
1.01 . 1.01.01 . 63 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	61.107.949,00	13.827.440,00	74.935.389,00	31.208.951,00	141,65
		0,00	58.333.900,00	47.810.440,00	106.144.340,00		
1.01 . 1.01.01 . 64	Satdik Negeri SDN 13 Sitiung (BOS)	0,00	97.523.405,00	40.779.445,00	138.302.850,00	(3.902.850,00)	97,18
		0,00	93.620.555,00	40.779.445,00	134.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 64 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	97.523.405,00	40.779.445,00	138.302.850,00	(3.902.850,00)	97,18
		0,00	93.620.555,00	40.779.445,00	134.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 64 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	97.523.405,00	40.779.445,00	138.302.850,00	(3.902.850,00)	97,18
		0,00	93.620.555,00	40.779.445,00	134.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 65	Satdik Negeri SDN 14 Sitiung (BOS)	0,00	164.131.163,00	34.380.995,00	198.512.158,00	(912.158,00)	99,54
		0,00	163.219.005,00	34.380.995,00	197.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 65 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	164.131.163,00	34.380.995,00	198.512.158,00	(912.158,00)	99,54
		0,00	163.219.005,00	34.380.995,00	197.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 65 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	164.131.163,00	34.380.995,00	198.512.158,00	(912.158,00)	99,54
		0,00	163.219.005,00	34.380.995,00	197.600.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 66	Satdik Negeri SDN 15 Sitiung (BOS)	0,00	186.561.800,00	42.078.200,00	228.640.000,00	(7.040.000,00)	96,92
		0,00	179.521.800,00	42.078.200,00	221.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 66 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	186.561.800,00	42.078.200,00	228.640.000,00	(7.040.000,00)	96,92
		0,00	179.521.800,00	42.078.200,00	221.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 66 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	186.561.800,00	42.078.200,00	228.640.000,00	(7.040.000,00)	96,92
		0,00	179.521.800,00	42.078.200,00	221.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 67	Satdik Negeri SDN 16 Sitiung (BOS)	0,00	42.344.179,00	25.071.495,00	67.415.674,00	(4.513.094,00)	93,31
		0,00	37.831.085,00	25.071.495,00	62.902.580,00		
1.01 . 1.01.01 . 67 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	42.344.179,00	25.071.495,00	67.415.674,00	(4.513.094,00)	93,31
		0,00	37.831.085,00	25.071.495,00	62.902.580,00		
1.01 . 1.01.01 . 67 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	42.344.179,00	25.071.495,00	67.415.674,00	(4.513.094,00)	93,31
		0,00	37.831.085,00	25.071.495,00	62.902.580,00		
1.01 . 1.01.01 . 68	Satdik Negeri SDN 17 Sitiung (BOS)	0,00	71.915.782,00	20.600.630,00	92.516.412,00	(320.000,00)	99,65
		0,00	71.595.782,00	20.600.630,00	92.196.412,00		
1.01 . 1.01.01 . 68 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	71.915.782,00	20.600.630,00	92.516.412,00	(320.000,00)	99,65
		0,00	71.595.782,00	20.600.630,00	92.196.412,00		
1.01 . 1.01.01 . 68 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	71.915.782,00	20.600.630,00	92.516.412,00	(320.000,00)	99,65
		0,00	71.595.782,00	20.600.630,00	92.196.412,00		
1.01 . 1.01.01 . 69	Satdik Negeri SDN 18 Sitiung (BOS)	0,00	126.158.821,00	44.237.415,00	170.396.236,00	(3.882.574,00)	97,72
		0,00	122.276.247,00	44.237.415,00	166.513.662,00		
1.01 . 1.01.01 . 69 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	126.158.821,00	44.237.415,00	170.396.236,00	(3.882.574,00)	97,72
		0,00	122.276.247,00	44.237.415,00	166.513.662,00		
1.01 . 1.01.01 . 69 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	126.158.821,00	44.237.415,00	170.396.236,00	(3.882.574,00)	97,72
		0,00	122.276.247,00	44.237.415,00	166.513.662,00		
1.01 . 1.01.01 . 70	Satdik Negeri SDN 19 Sitiung (BOS)	0,00	77.072.091,00	40.700.000,00	117.772.091,00	0,00	100,00
		0,00	77.072.091,00	40.700.000,00	117.772.091,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 70 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	77.072.091,00	40.700.000,00	117.772.091,00	0,00	100,00
		0,00	77.072.091,00	40.700.000,00	117.772.091,00		
1.01 . 1.01.01 . 70 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	77.072.091,00	40.700.000,00	117.772.091,00	0,00	100,00
		0,00	77.072.091,00	40.700.000,00	117.772.091,00		
1.01 . 1.01.01 . 71	Satdik Negeri SDN 20 Sitiung (BOS)	0,00	208.414.201,00	46.185.000,00	254.599.201,00	(967.201,00)	99,62
		0,00	207.447.000,00	46.185.000,00	253.632.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 71 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	208.414.201,00	46.185.000,00	254.599.201,00	(967.201,00)	99,62
		0,00	207.447.000,00	46.185.000,00	253.632.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 71 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	208.414.201,00	46.185.000,00	254.599.201,00	(967.201,00)	99,62
		0,00	207.447.000,00	46.185.000,00	253.632.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 72	Satdik Negeri SDN 01 IX Koto (BOS)	0,00	55.573.254,00	15.973.895,00	71.547.149,00	0,00	100,00
		0,00	55.573.254,00	15.973.895,00	71.547.149,00		
1.01 . 1.01.01 . 72 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	55.573.254,00	15.973.895,00	71.547.149,00	0,00	100,00
		0,00	55.573.254,00	15.973.895,00	71.547.149,00		
1.01 . 1.01.01 . 72 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	55.573.254,00	15.973.895,00	71.547.149,00	0,00	100,00
		0,00	55.573.254,00	15.973.895,00	71.547.149,00		
1.01 . 1.01.01 . 73	Satdik Negeri SDN 02 IX Koto (BOS)	0,00	49.240.243,00	10.987.905,00	60.228.148,00	20.712.152,00	134,39
		0,00	45.964.395,00	34.975.905,00	80.940.300,00		
1.01 . 1.01.01 . 73 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	49.240.243,00	10.987.905,00	60.228.148,00	20.712.152,00	134,39
		0,00	45.964.395,00	34.975.905,00	80.940.300,00		
1.01 . 1.01.01 . 73 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	49.240.243,00	10.987.905,00	60.228.148,00	20.712.152,00	134,39
		0,00	45.964.395,00	34.975.905,00	80.940.300,00		
1.01 . 1.01.01 . 74	Satdik Negeri SDN 03 IX Koto (BOS)	0,00	48.857.938,00	5.310.560,00	54.168.498,00	19.190.902,00	135,43
		0,00	48.058.840,00	25.300.560,00	73.359.400,00		
1.01 . 1.01.01 . 74 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	48.857.938,00	5.310.560,00	54.168.498,00	19.190.902,00	135,43
		0,00	48.058.840,00	25.300.560,00	73.359.400,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 74 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	48.857.938,00	5.310.560,00	54.168.498,00	19.190.902,00	135,43
		0,00	48.058.840,00	25.300.560,00	73.359.400,00		
1.01 . 1.01.01 . 75	Satdik Negeri SDN 04 IX Koto (BOS)	0,00	77.185.904,00	18.885.875,00	96.071.779,00	(804.017,00)	99,16
		0,00	76.381.887,00	18.885.875,00	95.267.762,00		
1.01 . 1.01.01 . 75 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	77.185.904,00	18.885.875,00	96.071.779,00	(804.017,00)	99,16
		0,00	76.381.887,00	18.885.875,00	95.267.762,00		
1.01 . 1.01.01 . 75 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	77.185.904,00	18.885.875,00	96.071.779,00	(804.017,00)	99,16
		0,00	76.381.887,00	18.885.875,00	95.267.762,00		
1.01 . 1.01.01 . 76	Satdik Negeri SDN 05 IX Koto (BOS)	0,00	52.237.260,00	22.843.740,00	75.081.000,00	(5.440.000,00)	92,75
		0,00	46.797.260,00	22.843.740,00	69.641.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 76 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	52.237.260,00	22.843.740,00	75.081.000,00	(5.440.000,00)	92,75
		0,00	46.797.260,00	22.843.740,00	69.641.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 76 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	52.237.260,00	22.843.740,00	75.081.000,00	(5.440.000,00)	92,75
		0,00	46.797.260,00	22.843.740,00	69.641.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 77	Satdik Negeri SDN 06 IX Koto (BOS)	0,00	54.946.406,00	26.692.185,00	81.638.591,00	(138.591,00)	99,83
		0,00	54.807.815,00	26.692.185,00	81.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 77 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	54.946.406,00	26.692.185,00	81.638.591,00	(138.591,00)	99,83
		0,00	54.807.815,00	26.692.185,00	81.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 77 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	54.946.406,00	26.692.185,00	81.638.591,00	(138.591,00)	99,83
		0,00	54.807.815,00	26.692.185,00	81.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 78	Satdik Negeri SDN 07 IX Koto (BOS)	0,00	36.210.237,00	11.190.215,00	47.400.452,00	(30.237,00)	99,94
		0,00	36.180.000,00	11.190.215,00	47.370.215,00		
1.01 . 1.01.01 . 78 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	36.210.237,00	11.190.215,00	47.400.452,00	(30.237,00)	99,94
		0,00	36.180.000,00	11.190.215,00	47.370.215,00		
1.01 . 1.01.01 . 78 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	36.210.237,00	11.190.215,00	47.400.452,00	(30.237,00)	99,94
		0,00	36.180.000,00	11.190.215,00	47.370.215,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 79	Satdik Negeri SDN 08 IX Koto (BOS)	0,00	90.882.420,00	20.133.110,00	111.015.530,00	51.891.000,00	146,74
		0,00	84.802.420,00	78.104.110,00	162.906.530,00		
1.01 . 1.01.01 . 79 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	90.882.420,00	20.133.110,00	111.015.530,00	51.891.000,00	146,74
		0,00	84.802.420,00	78.104.110,00	162.906.530,00		
1.01 . 1.01.01 . 79 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	90.882.420,00	20.133.110,00	111.015.530,00	51.891.000,00	146,74
		0,00	84.802.420,00	78.104.110,00	162.906.530,00		
1.01 . 1.01.01 . 80	Satdik Negeri SDN 09 IX Koto (BOS)	0,00	45.656.926,00	10.532.705,00	56.189.631,00	(1.388.871,00)	97,53
		0,00	44.268.055,00	10.532.705,00	54.800.760,00		
1.01 . 1.01.01 . 80 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	45.656.926,00	10.532.705,00	56.189.631,00	(1.388.871,00)	97,53
		0,00	44.268.055,00	10.532.705,00	54.800.760,00		
1.01 . 1.01.01 . 80 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	45.656.926,00	10.532.705,00	56.189.631,00	(1.388.871,00)	97,53
		0,00	44.268.055,00	10.532.705,00	54.800.760,00		
1.01 . 1.01.01 . 81	Satdik Negeri SDN 10 IX Koto (BOS)	0,00	34.975.117,00	10.681.200,00	45.656.317,00	(5.639.312,00)	87,65
		0,00	29.335.805,00	10.681.200,00	40.017.005,00		
1.01 . 1.01.01 . 81 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	34.975.117,00	10.681.200,00	45.656.317,00	(5.639.312,00)	87,65
		0,00	29.335.805,00	10.681.200,00	40.017.005,00		
1.01 . 1.01.01 . 81 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	34.975.117,00	10.681.200,00	45.656.317,00	(5.639.312,00)	87,65
		0,00	29.335.805,00	10.681.200,00	40.017.005,00		
1.01 . 1.01.01 . 82	Satdik Negeri SDN 11 IX Koto (BOS)	0,00	53.528.875,00	14.578.595,00	68.107.470,00	(25.475,00)	99,96
		0,00	53.503.400,00	14.578.595,00	68.081.995,00		
1.01 . 1.01.01 . 82 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	53.528.875,00	14.578.595,00	68.107.470,00	(25.475,00)	99,96
		0,00	53.503.400,00	14.578.595,00	68.081.995,00		
1.01 . 1.01.01 . 82 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	53.528.875,00	14.578.595,00	68.107.470,00	(25.475,00)	99,96
		0,00	53.503.400,00	14.578.595,00	68.081.995,00		
1.01 . 1.01.01 . 83	Satdik Negeri SDN 12 IX Koto (BOS)	0,00	35.227.629,00	14.376.960,00	49.604.589,00	21.936.781,00	144,22
		0,00	35.175.410,00	36.365.960,00	71.541.370,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 83 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	35.227.629,00	14.376.960,00	49.604.589,00	21.936.781,00	144,22
		0,00	35.175.410,00	36.365.960,00	71.541.370,00		
1.01 . 1.01.01 . 83 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	35.227.629,00	14.376.960,00	49.604.589,00	21.936.781,00	144,22
		0,00	35.175.410,00	36.365.960,00	71.541.370,00		
1.01 . 1.01.01 . 84	Satdik Negeri SDN 13 IX Koto (BOS)	0,00	69.845.626,00	23.894.975,00	93.740.601,00	(2.899.326,00)	96,91
		0,00	66.966.900,00	23.874.375,00	90.841.275,00		
1.01 . 1.01.01 . 84 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	69.845.626,00	23.894.975,00	93.740.601,00	(2.899.326,00)	96,91
		0,00	66.966.900,00	23.874.375,00	90.841.275,00		
1.01 . 1.01.01 . 84 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	69.845.626,00	23.894.975,00	93.740.601,00	(2.899.326,00)	96,91
		0,00	66.966.900,00	23.874.375,00	90.841.275,00		
1.01 . 1.01.01 . 85	Satdik Negeri SDN 14 IX Koto (BOS)	0,00	36.135.773,00	6.336.815,00	42.472.588,00	(72.588,00)	99,83
		0,00	36.063.185,00	6.336.815,00	42.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 85 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	36.135.773,00	6.336.815,00	42.472.588,00	(72.588,00)	99,83
		0,00	36.063.185,00	6.336.815,00	42.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 85 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	36.135.773,00	6.336.815,00	42.472.588,00	(72.588,00)	99,83
		0,00	36.063.185,00	6.336.815,00	42.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 86	Satdik Negeri SDN 01 Timpeh (BOS)	0,00	174.545.918,00	52.261.900,00	226.807.818,00	(4.670.843,00)	97,94
		0,00	174.545.100,00	47.591.875,00	222.136.975,00		
1.01 . 1.01.01 . 86 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	174.545.918,00	52.261.900,00	226.807.818,00	(4.670.843,00)	97,94
		0,00	174.545.100,00	47.591.875,00	222.136.975,00		
1.01 . 1.01.01 . 86 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	174.545.918,00	52.261.900,00	226.807.818,00	(4.670.843,00)	97,94
		0,00	174.545.100,00	47.591.875,00	222.136.975,00		
1.01 . 1.01.01 . 87	Satdik Negeri SDN 02 Timpeh (BOS)	0,00	170.454.609,00	67.495.210,00	237.949.819,00	(8.015.678,00)	96,63
		0,00	162.438.931,00	67.495.210,00	229.934.141,00		
1.01 . 1.01.01 . 87 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	170.454.609,00	67.495.210,00	237.949.819,00	(8.015.678,00)	96,63
		0,00	162.438.931,00	67.495.210,00	229.934.141,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 87 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	170.454.609,00	67.495.210,00	237.949.819,00	(8.015.678,00)	96,63
		0,00	162.438.931,00	67.495.210,00	229.934.141,00		
1.01 . 1.01.01 . 88	Satdik Negeri SDN 03 Timpeh (BOS)	0,00	96.275.305,00	33.040.000,00	129.315.305,00	39.464.695,00	130,52
		0,00	95.760.000,00	73.020.000,00	168.780.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 88 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	96.275.305,00	33.040.000,00	129.315.305,00	39.464.695,00	130,52
		0,00	95.760.000,00	73.020.000,00	168.780.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 88 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	96.275.305,00	33.040.000,00	129.315.305,00	39.464.695,00	130,52
		0,00	95.760.000,00	73.020.000,00	168.780.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 89	Satdik Negeri SDN 04 Timpeh (BOS)	0,00	49.862.374,00	9.572.005,00	59.434.379,00	24.952.621,00	141,98
		0,00	48.827.995,00	35.559.005,00	84.387.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 89 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	49.862.374,00	9.572.005,00	59.434.379,00	24.952.621,00	141,98
		0,00	48.827.995,00	35.559.005,00	84.387.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 89 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	49.862.374,00	9.572.005,00	59.434.379,00	24.952.621,00	141,98
		0,00	48.827.995,00	35.559.005,00	84.387.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 90	Satdik Negeri SDN 05 Timpeh (BOS)	0,00	103.470.576,00	37.774.000,00	141.244.576,00	(6.750.000,00)	95,22
		0,00	103.470.576,00	31.024.000,00	134.494.576,00		
1.01 . 1.01.01 . 90 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	103.470.576,00	37.774.000,00	141.244.576,00	(6.750.000,00)	95,22
		0,00	103.470.576,00	31.024.000,00	134.494.576,00		
1.01 . 1.01.01 . 90 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	103.470.576,00	37.774.000,00	141.244.576,00	(6.750.000,00)	95,22
		0,00	103.470.576,00	31.024.000,00	134.494.576,00		
1.01 . 1.01.01 . 91	Satdik Negeri SDN 06 Timpeh (BOS)	0,00	172.380.774,00	50.958.275,00	223.339.049,00	(5.920.000,00)	97,35
		0,00	166.460.774,00	50.958.275,00	217.419.049,00		
1.01 . 1.01.01 . 91 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	172.380.774,00	50.958.275,00	223.339.049,00	(5.920.000,00)	97,35
		0,00	166.460.774,00	50.958.275,00	217.419.049,00		
1.01 . 1.01.01 . 91 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	172.380.774,00	50.958.275,00	223.339.049,00	(5.920.000,00)	97,35
		0,00	166.460.774,00	50.958.275,00	217.419.049,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 92	Satdik Negeri SDN 07 Timpeh (BOS)	0,00	109.581.757,00	43.661.680,00	153.243.437,00	(2.476.257,00)	98,38
		0,00	107.105.500,00	43.661.680,00	150.767.180,00		
1.01 . 1.01.01 . 92 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	109.581.757,00	43.661.680,00	153.243.437,00	(2.476.257,00)	98,38
		0,00	107.105.500,00	43.661.680,00	150.767.180,00		
1.01 . 1.01.01 . 92 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	109.581.757,00	43.661.680,00	153.243.437,00	(2.476.257,00)	98,38
		0,00	107.105.500,00	43.661.680,00	150.767.180,00		
1.01 . 1.01.01 . 93	Satdik Negeri SDN 08 Timpeh (BOS)	0,00	74.489.952,00	27.964.720,00	102.454.672,00	43.121.328,00	142,09
		0,00	69.635.280,00	75.940.720,00	145.576.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 93 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	74.489.952,00	27.964.720,00	102.454.672,00	43.121.328,00	142,09
		0,00	69.635.280,00	75.940.720,00	145.576.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 93 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	74.489.952,00	27.964.720,00	102.454.672,00	43.121.328,00	142,09
		0,00	69.635.280,00	75.940.720,00	145.576.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 94	Satdik Negeri SDN 09 Timpeh (BOS)	0,00	57.450.365,00	16.997.000,00	74.447.365,00	(2.607.365,00)	96,50
		0,00	54.843.000,00	16.997.000,00	71.840.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 94 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	57.450.365,00	16.997.000,00	74.447.365,00	(2.607.365,00)	96,50
		0,00	54.843.000,00	16.997.000,00	71.840.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 94 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	57.450.365,00	16.997.000,00	74.447.365,00	(2.607.365,00)	96,50
		0,00	54.843.000,00	16.997.000,00	71.840.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 95	Satdik Negeri SDN 10 Timpeh (BOS)	0,00	67.366.474,00	11.545.040,00	78.911.514,00	23.987.269,00	130,40
		0,00	67.365.743,00	35.533.040,00	102.898.783,00		
1.01 . 1.01.01 . 95 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	67.366.474,00	11.545.040,00	78.911.514,00	23.987.269,00	130,40
		0,00	67.365.743,00	35.533.040,00	102.898.783,00		
1.01 . 1.01.01 . 95 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	67.366.474,00	11.545.040,00	78.911.514,00	23.987.269,00	130,40
		0,00	67.365.743,00	35.533.040,00	102.898.783,00		
1.01 . 1.01.01 . 96	Satdik Negeri SDN 11 Timpeh (BOS)	0,00	79.438.682,00	13.524.375,00	92.963.057,00	(2.999.497,00)	96,77
		0,00	76.439.185,00	13.524.375,00	89.963.560,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 96 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	79.438.682,00	13.524.375,00	92.963.057,00	(2.999.497,00)	96,77
		0,00	76.439.185,00	13.524.375,00	89.963.560,00		
1.01 . 1.01.01 . 96 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	79.438.682,00	13.524.375,00	92.963.057,00	(2.999.497,00)	96,77
		0,00	76.439.185,00	13.524.375,00	89.963.560,00		
1.01 . 1.01.01 . 97	Satdik Negeri SDN 01 Koto Salak (BOS)	0,00	101.182.035,00	27.023.000,00	128.205.035,00	42.808.965,00	133,39
		0,00	92.017.000,00	78.997.000,00	171.014.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 97 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	101.182.035,00	27.023.000,00	128.205.035,00	42.808.965,00	133,39
		0,00	92.017.000,00	78.997.000,00	171.014.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 97 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	101.182.035,00	27.023.000,00	128.205.035,00	42.808.965,00	133,39
		0,00	92.017.000,00	78.997.000,00	171.014.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 98	Satdik Negeri SDN 02 Koto Salak (BOS)	0,00	199.830.945,00	51.319.400,00	251.150.345,00	(644.915,00)	99,74
		0,00	199.610.730,00	50.894.700,00	250.505.430,00		
1.01 . 1.01.01 . 98 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	199.830.945,00	51.319.400,00	251.150.345,00	(644.915,00)	99,74
		0,00	199.610.730,00	50.894.700,00	250.505.430,00		
1.01 . 1.01.01 . 98 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	199.830.945,00	51.319.400,00	251.150.345,00	(644.915,00)	99,74
		0,00	199.610.730,00	50.894.700,00	250.505.430,00		
1.01 . 1.01.01 . 99	Satdik Negeri SDN 03 Koto Salak (BOS)	0,00	109.352.835,00	36.515.735,00	145.868.570,00	(667.635,00)	99,54
		0,00	108.685.200,00	36.515.735,00	145.200.935,00		
1.01 . 1.01.01 . 99 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	109.352.835,00	36.515.735,00	145.868.570,00	(667.635,00)	99,54
		0,00	108.685.200,00	36.515.735,00	145.200.935,00		
1.01 . 1.01.01 . 99 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	109.352.835,00	36.515.735,00	145.868.570,00	(667.635,00)	99,54
		0,00	108.685.200,00	36.515.735,00	145.200.935,00		
1.01 . 1.01.01 . 00	Satdik Negeri SDN 04 Koto Salak (BOS)	0,00	71.674.686,00	18.960.630,00	90.635.316,00	23.331.184,00	125,74
		0,00	71.185.870,00	42.780.630,00	113.966.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	71.674.686,00	18.960.630,00	90.635.316,00	23.331.184,00	125,74
		0,00	71.185.870,00	42.780.630,00	113.966.500,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 00 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	71.674.686,00	18.960.630,00	90.635.316,00	23.331.184,00	125,74
		0,00	71.185.870,00	42.780.630,00	113.966.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 01	Satdik Negeri SDN 05 Koto Salak (BOS)	0,00	141.168.006,00	25.329.370,00	166.497.376,00	51.876.624,00	131,16
		0,00	141.070.630,00	77.303.370,00	218.374.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	141.168.006,00	25.329.370,00	166.497.376,00	51.876.624,00	131,16
		0,00	141.070.630,00	77.303.370,00	218.374.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	141.168.006,00	25.329.370,00	166.497.376,00	51.876.624,00	131,16
		0,00	141.070.630,00	77.303.370,00	218.374.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02	Satdik Negeri SDN 06 Koto Salak (BOS)	0,00	53.702.210,00	17.616.395,00	71.318.605,00	24.707.000,00	134,64
		0,00	52.422.210,00	43.603.395,00	96.025.605,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	53.702.210,00	17.616.395,00	71.318.605,00	24.707.000,00	134,64
		0,00	52.422.210,00	43.603.395,00	96.025.605,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	53.702.210,00	17.616.395,00	71.318.605,00	24.707.000,00	134,64
		0,00	52.422.210,00	43.603.395,00	96.025.605,00		
1.01 . 1.01.01 . 03	Satdik Negeri SDN 07 Koto Salak (BOS)	0,00	74.713.057,00	20.512.375,00	95.225.432,00	(320.000,00)	99,66
		0,00	74.393.057,00	20.512.375,00	94.905.432,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	74.713.057,00	20.512.375,00	95.225.432,00	(320.000,00)	99,66
		0,00	74.393.057,00	20.512.375,00	94.905.432,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	74.713.057,00	20.512.375,00	95.225.432,00	(320.000,00)	99,66
		0,00	74.393.057,00	20.512.375,00	94.905.432,00		
1.01 . 1.01.01 . 04	Satdik Negeri SDN 08 Koto Salak (BOS)	0,00	73.332.326,00	42.680.910,00	116.013.236,00	(589.536,00)	99,49
		0,00	72.742.790,00	42.680.910,00	115.423.700,00		
1.01 . 1.01.01 . 04 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	73.332.326,00	42.680.910,00	116.013.236,00	(589.536,00)	99,49
		0,00	72.742.790,00	42.680.910,00	115.423.700,00		
1.01 . 1.01.01 . 04 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	73.332.326,00	42.680.910,00	116.013.236,00	(589.536,00)	99,49
		0,00	72.742.790,00	42.680.910,00	115.423.700,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 05	Satdik Negeri SDN 09 Koto Salak (BOS)	0,00	40.165.441,00	21.704.000,00	61.869.441,00	(1.760.000,00)	97,16
		0,00	38.405.441,00	21.704.000,00	60.109.441,00		
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	40.165.441,00	21.704.000,00	61.869.441,00	(1.760.000,00)	97,16
		0,00	38.405.441,00	21.704.000,00	60.109.441,00		
1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	40.165.441,00	21.704.000,00	61.869.441,00	(1.760.000,00)	97,16
		0,00	38.405.441,00	21.704.000,00	60.109.441,00		
1.01 . 1.01.01 . 06	Satdik Negeri SDN 10 Koto Salak (BOS)	0,00	56.191.118,00	34.414.910,00	90.606.028,00	41.098.000,00	145,36
		0,00	53.311.118,00	78.392.910,00	131.704.028,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	56.191.118,00	34.414.910,00	90.606.028,00	41.098.000,00	145,36
		0,00	53.311.118,00	78.392.910,00	131.704.028,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	56.191.118,00	34.414.910,00	90.606.028,00	41.098.000,00	145,36
		0,00	53.311.118,00	78.392.910,00	131.704.028,00		
1.01 . 1.01.01 . 07	Satdik Negeri SDN 11 Koto Salak (BOS)	0,00	69.009.354,00	23.020.130,00	92.029.484,00	32.231.396,00	135,02
		0,00	65.258.750,00	59.002.130,00	124.260.880,00		
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	69.009.354,00	23.020.130,00	92.029.484,00	32.231.396,00	135,02
		0,00	65.258.750,00	59.002.130,00	124.260.880,00		
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	69.009.354,00	23.020.130,00	92.029.484,00	32.231.396,00	135,02
		0,00	65.258.750,00	59.002.130,00	124.260.880,00		
1.01 . 1.01.01 . 08	Satdik Negeri SDN 12 Koto Salak (BOS)	0,00	49.450.917,00	14.288.850,00	63.739.767,00	21.337.083,00	133,48
		0,00	46.968.000,00	38.108.850,00	85.076.850,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	49.450.917,00	14.288.850,00	63.739.767,00	21.337.083,00	133,48
		0,00	46.968.000,00	38.108.850,00	85.076.850,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	49.450.917,00	14.288.850,00	63.739.767,00	21.337.083,00	133,48
		0,00	46.968.000,00	38.108.850,00	85.076.850,00		
1.01 . 1.01.01 . 09	Satdik Negeri SDN 01 Tiumang (BOS)	0,00	135.499.690,00	52.675.405,00	188.175.095,00	(7.516.190,00)	96,01
		0,00	127.983.500,00	52.675.405,00	180.658.905,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	135.499.690,00	52.675.405,00	188.175.095,00	(7.516.190,00)	96,01
		0,00	127.983.500,00	52.675.405,00	180.658.905,00		
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	135.499.690,00	52.675.405,00	188.175.095,00	(7.516.190,00)	96,01
		0,00	127.983.500,00	52.675.405,00	180.658.905,00		
1.01 . 1.01.01 . 10	Satdik Negeri SDN 02 Tiumang (BOS)	0,00	88.090.971,00	25.214.210,00	113.305.181,00	(1.785.181,00)	98,42
		0,00	86.305.790,00	25.214.210,00	111.520.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	88.090.971,00	25.214.210,00	113.305.181,00	(1.785.181,00)	98,42
		0,00	86.305.790,00	25.214.210,00	111.520.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	88.090.971,00	25.214.210,00	113.305.181,00	(1.785.181,00)	98,42
		0,00	86.305.790,00	25.214.210,00	111.520.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 11	Satdik Negeri SDN 03 Tiumang (BOS)	0,00	125.753.762,00	43.020.215,00	168.773.977,00	(1.958.262,00)	98,84
		0,00	123.795.500,00	43.020.215,00	166.815.715,00		
1.01 . 1.01.01 . 11 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	125.753.762,00	43.020.215,00	168.773.977,00	(1.958.262,00)	98,84
		0,00	123.795.500,00	43.020.215,00	166.815.715,00		
1.01 . 1.01.01 . 11 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	125.753.762,00	43.020.215,00	168.773.977,00	(1.958.262,00)	98,84
		0,00	123.795.500,00	43.020.215,00	166.815.715,00		
1.01 . 1.01.01 . 12	Satdik Negeri SDN 04 Tiumang (BOS)	0,00	57.167.878,00	13.530.395,00	70.698.273,00	(2.299.724,00)	96,75
		0,00	54.868.154,00	13.530.395,00	68.398.549,00		
1.01 . 1.01.01 . 12 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	57.167.878,00	13.530.395,00	70.698.273,00	(2.299.724,00)	96,75
		0,00	54.868.154,00	13.530.395,00	68.398.549,00		
1.01 . 1.01.01 . 12 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	57.167.878,00	13.530.395,00	70.698.273,00	(2.299.724,00)	96,75
		0,00	54.868.154,00	13.530.395,00	68.398.549,00		
1.01 . 1.01.01 . 13	Satdik Negeri SDN 05 Tiumang (BOS)	0,00	26.467.303,00	26.408.400,00	52.875.703,00	7.996.000,00	115,12
		0,00	26.467.303,00	34.404.400,00	60.871.703,00		
1.01 . 1.01.01 . 13 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	26.467.303,00	26.408.400,00	52.875.703,00	7.996.000,00	115,12
		0,00	26.467.303,00	34.404.400,00	60.871.703,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 13 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	26.467.303,00	26.408.400,00	52.875.703,00	7.996.000,00	115,12
		0,00	26.467.303,00	34.404.400,00	60.871.703,00		
1.01 . 1.01.01 . 14	Satdik Negeri SDN 06 Tiumang (BOS)	0,00	33.586.665,00	19.650.660,00	53.237.325,00	(190.025,00)	99,64
		0,00	33.396.640,00	19.650.660,00	53.047.300,00		
1.01 . 1.01.01 . 14 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	33.586.665,00	19.650.660,00	53.237.325,00	(190.025,00)	99,64
		0,00	33.396.640,00	19.650.660,00	53.047.300,00		
1.01 . 1.01.01 . 14 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	33.586.665,00	19.650.660,00	53.237.325,00	(190.025,00)	99,64
		0,00	33.396.640,00	19.650.660,00	53.047.300,00		
1.01 . 1.01.01 . 15	Satdik Negeri SDN 07 Tiumang (BOS)	0,00	74.046.891,00	26.144.720,00	100.191.611,00	27.954.389,00	127,90
		0,00	74.015.280,00	54.130.720,00	128.146.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	74.046.891,00	26.144.720,00	100.191.611,00	27.954.389,00	127,90
		0,00	74.015.280,00	54.130.720,00	128.146.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	74.046.891,00	26.144.720,00	100.191.611,00	27.954.389,00	127,90
		0,00	74.015.280,00	54.130.720,00	128.146.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16	Satdik Negeri SDN 08 Tiumang (BOS)	0,00	38.608.828,00	9.562.360,00	48.171.188,00	(171.188,00)	99,64
		0,00	38.437.640,00	9.562.360,00	48.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	38.608.828,00	9.562.360,00	48.171.188,00	(171.188,00)	99,64
		0,00	38.437.640,00	9.562.360,00	48.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	38.608.828,00	9.562.360,00	48.171.188,00	(171.188,00)	99,64
		0,00	38.437.640,00	9.562.360,00	48.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17	Satdik Negeri SDN 09 Tiumang (BOS)	0,00	87.142.412,00	29.380.510,00	116.522.922,00	35.818.078,00	130,74
		0,00	84.979.490,00	67.361.510,00	152.341.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	87.142.412,00	29.380.510,00	116.522.922,00	35.818.078,00	130,74
		0,00	84.979.490,00	67.361.510,00	152.341.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	87.142.412,00	29.380.510,00	116.522.922,00	35.818.078,00	130,74
		0,00	84.979.490,00	67.361.510,00	152.341.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 18	Satdik Negeri SDN 10 Tiumang (BOS)	0,00	110.223.463,00	23.098.345,00	133.321.808,00	(3.680.399,00)	97,24
		0,00	106.543.064,00	23.098.345,00	129.641.409,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	110.223.463,00	23.098.345,00	133.321.808,00	(3.680.399,00)	97,24
		0,00	106.543.064,00	23.098.345,00	129.641.409,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	110.223.463,00	23.098.345,00	133.321.808,00	(3.680.399,00)	97,24
		0,00	106.543.064,00	23.098.345,00	129.641.409,00		
1.01 . 1.01.01 . 19	Satdik Negeri SDN 11 Tiumang (BOS)	0,00	77.153.135,00	22.732.220,00	99.885.355,00	(49.735,00)	99,95
		0,00	77.103.400,00	22.732.220,00	99.835.620,00		
1.01 . 1.01.01 . 19 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	77.153.135,00	22.732.220,00	99.885.355,00	(49.735,00)	99,95
		0,00	77.103.400,00	22.732.220,00	99.835.620,00		
1.01 . 1.01.01 . 19 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	77.153.135,00	22.732.220,00	99.885.355,00	(49.735,00)	99,95
		0,00	77.103.400,00	22.732.220,00	99.835.620,00		
1.01 . 1.01.01 . 20	Satdik Negeri SDN 12 Tiumang (BOS)	0,00	45.669.611,00	13.257.805,00	58.927.416,00	(72.416,00)	99,88
		0,00	45.597.195,00	13.257.805,00	58.855.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	45.669.611,00	13.257.805,00	58.927.416,00	(72.416,00)	99,88
		0,00	45.597.195,00	13.257.805,00	58.855.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	45.669.611,00	13.257.805,00	58.927.416,00	(72.416,00)	99,88
		0,00	45.597.195,00	13.257.805,00	58.855.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 21	Satdik Negeri SDN 01 Padang Laweh (BOS)	0,00	88.520.922,00	21.886.365,00	110.407.287,00	58.362.713,00	152,86
		0,00	86.913.635,00	81.856.365,00	168.770.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 21 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	88.520.922,00	21.886.365,00	110.407.287,00	58.362.713,00	152,86
		0,00	86.913.635,00	81.856.365,00	168.770.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 21 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	88.520.922,00	21.886.365,00	110.407.287,00	58.362.713,00	152,86
		0,00	86.913.635,00	81.856.365,00	168.770.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22	Satdik Negeri SDN 02 Padang Laweh (BOS)	0,00	89.866.000,00	28.374.000,00	118.240.000,00	49.572.000,00	141,92
		0,00	83.466.000,00	84.346.000,00	167.812.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	89.866.000,00	28.374.000,00	118.240.000,00	49.572.000,00	141,92
		0,00	83.466.000,00	84.346.000,00	167.812.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	89.866.000,00	28.374.000,00	118.240.000,00	49.572.000,00	141,92
		0,00	83.466.000,00	84.346.000,00	167.812.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 23	Satdik Negeri SDN 03 Padang Laweh (BOS)	0,00	37.623.301,00	10.220.215,00	47.843.516,00	17.990.984,00	137,60
		0,00	37.623.285,00	28.211.215,00	65.834.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 23 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	37.623.301,00	10.220.215,00	47.843.516,00	17.990.984,00	137,60
		0,00	37.623.285,00	28.211.215,00	65.834.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 23 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	37.623.301,00	10.220.215,00	47.843.516,00	17.990.984,00	137,60
		0,00	37.623.285,00	28.211.215,00	65.834.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 24	Satdik Negeri SDN 04 Padang Laweh (BOS)	0,00	165.535.500,00	73.701.510,00	239.237.010,00	(1.076.540,00)	99,55
		0,00	164.458.960,00	73.701.510,00	238.160.470,00		
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	165.535.500,00	73.701.510,00	239.237.010,00	(1.076.540,00)	99,55
		0,00	164.458.960,00	73.701.510,00	238.160.470,00		
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	165.535.500,00	73.701.510,00	239.237.010,00	(1.076.540,00)	99,55
		0,00	164.458.960,00	73.701.510,00	238.160.470,00		
1.01 . 1.01.01 . 25	Satdik Negeri SDN 05 Padang Laweh (BOS)	0,00	82.082.490,00	31.772.510,00	113.855.000,00	23.819.955,00	120,92
		0,00	82.082.490,00	55.592.465,00	137.674.955,00		
1.01 . 1.01.01 . 25 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	82.082.490,00	31.772.510,00	113.855.000,00	23.819.955,00	120,92
		0,00	82.082.490,00	55.592.465,00	137.674.955,00		
1.01 . 1.01.01 . 25 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	82.082.490,00	31.772.510,00	113.855.000,00	23.819.955,00	120,92
		0,00	82.082.490,00	55.592.465,00	137.674.955,00		
1.01 . 1.01.01 . 26	Satdik Negeri SDN 01 Asam Jujuhan (BOS)	0,00	104.681.001,00	44.165.300,00	148.846.301,00	(5.245.300,00)	96,48
		0,00	104.681.001,00	38.920.000,00	143.601.001,00		
1.01 . 1.01.01 . 26 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	104.681.001,00	44.165.300,00	148.846.301,00	(5.245.300,00)	96,48
		0,00	104.681.001,00	38.920.000,00	143.601.001,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 26 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	104.681.001,00	44.165.300,00	148.846.301,00	(5.245.300,00)	96,48
		0,00	104.681.001,00	38.920.000,00	143.601.001,00		
1.01 . 1.01.01 . 27	Satdik Negeri SDN 02 Asam Jujuhan (BOS)	0,00	49.832.857,00	13.586.650,00	63.419.507,00	19.017.993,00	129,99
		0,00	48.860.850,00	33.576.650,00	82.437.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 27 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	49.832.857,00	13.586.650,00	63.419.507,00	19.017.993,00	129,99
		0,00	48.860.850,00	33.576.650,00	82.437.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 27 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	49.832.857,00	13.586.650,00	63.419.507,00	19.017.993,00	129,99
		0,00	48.860.850,00	33.576.650,00	82.437.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 28	Satdik Negeri SDN 03 Asam Jujuhan (BOS)	0,00	177.209.456,00	22.456.050,00	199.665.506,00	(800.550,00)	99,60
		0,00	176.408.906,00	22.456.050,00	198.864.956,00		
1.01 . 1.01.01 . 28 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	177.209.456,00	22.456.050,00	199.665.506,00	(800.550,00)	99,60
		0,00	176.408.906,00	22.456.050,00	198.864.956,00		
1.01 . 1.01.01 . 28 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	177.209.456,00	22.456.050,00	199.665.506,00	(800.550,00)	99,60
		0,00	176.408.906,00	22.456.050,00	198.864.956,00		
1.01 . 1.01.01 . 29	Satdik Negeri SDN 04 Asam Jujuhan (BOS)	0,00	44.862.368,00	29.929.500,00	74.791.868,00	(1.091.768,00)	98,54
		0,00	43.770.600,00	29.929.500,00	73.700.100,00		
1.01 . 1.01.01 . 29 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	44.862.368,00	29.929.500,00	74.791.868,00	(1.091.768,00)	98,54
		0,00	43.770.600,00	29.929.500,00	73.700.100,00		
1.01 . 1.01.01 . 29 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	44.862.368,00	29.929.500,00	74.791.868,00	(1.091.768,00)	98,54
		0,00	43.770.600,00	29.929.500,00	73.700.100,00		
1.01 . 1.01.01 . 30	Satdik Negeri SDN 05 Asam Jujuhan (BOS)	0,00	38.260.782,00	6.089.815,00	44.350.597,00	0,00	100,00
		0,00	38.260.782,00	6.089.815,00	44.350.597,00		
1.01 . 1.01.01 . 30 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	38.260.782,00	6.089.815,00	44.350.597,00	0,00	100,00
		0,00	38.260.782,00	6.089.815,00	44.350.597,00		
1.01 . 1.01.01 . 30 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	38.260.782,00	6.089.815,00	44.350.597,00	0,00	100,00
		0,00	38.260.782,00	6.089.815,00	44.350.597,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 31	Satdik Negeri SDN 01 Koto Besar (BOS)	0,00	205.935.536,00	62.586.535,00	268.522.071,00	(5.188.536,00)	98,07
		0,00	200.747.000,00	62.586.535,00	263.333.535,00		
1.01 . 1.01.01 . 31 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	205.935.536,00	62.586.535,00	268.522.071,00	(5.188.536,00)	98,07
		0,00	200.747.000,00	62.586.535,00	263.333.535,00		
1.01 . 1.01.01 . 31 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	205.935.536,00	62.586.535,00	268.522.071,00	(5.188.536,00)	98,07
		0,00	200.747.000,00	62.586.535,00	263.333.535,00		
1.01 . 1.01.01 . 32	Satdik Negeri SDN 02 Koto Besar (BOS)	0,00	112.900.553,00	16.045.400,00	128.945.953,00	(6.545.953,00)	94,92
		0,00	106.354.600,00	16.045.400,00	122.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 32 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	112.900.553,00	16.045.400,00	128.945.953,00	(6.545.953,00)	94,92
		0,00	106.354.600,00	16.045.400,00	122.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 32 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	112.900.553,00	16.045.400,00	128.945.953,00	(6.545.953,00)	94,92
		0,00	106.354.600,00	16.045.400,00	122.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 33	Satdik Negeri SDN 03 Koto Besar (BOS)	0,00	105.185.436,00	42.957.735,00	148.143.171,00	(4.800.000,00)	96,76
		0,00	100.385.436,00	42.957.735,00	143.343.171,00		
1.01 . 1.01.01 . 33 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	105.185.436,00	42.957.735,00	148.143.171,00	(4.800.000,00)	96,76
		0,00	100.385.436,00	42.957.735,00	143.343.171,00		
1.01 . 1.01.01 . 33 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	105.185.436,00	42.957.735,00	148.143.171,00	(4.800.000,00)	96,76
		0,00	100.385.436,00	42.957.735,00	143.343.171,00		
1.01 . 1.01.01 . 34	Satdik Negeri SDN 04 Koto Besar (BOS)	0,00	77.972.712,00	34.864.510,00	112.837.222,00	(255.222,00)	99,77
		0,00	77.717.490,00	34.864.510,00	112.582.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 34 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	77.972.712,00	34.864.510,00	112.837.222,00	(255.222,00)	99,77
		0,00	77.717.490,00	34.864.510,00	112.582.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 34 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	77.972.712,00	34.864.510,00	112.837.222,00	(255.222,00)	99,77
		0,00	77.717.490,00	34.864.510,00	112.582.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 35	Satdik Negeri SDN 05 Koto Besar (BOS)	0,00	127.077.000,00	69.563.000,00	196.640.000,00	(1.440.000,00)	99,27
		0,00	126.437.000,00	68.763.000,00	195.200.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 35 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	127.077.000,00	69.563.000,00	196.640.000,00	(1.440.000,00)	99,27
		0,00	126.437.000,00	68.763.000,00	195.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 35 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	127.077.000,00	69.563.000,00	196.640.000,00	(1.440.000,00)	99,27
		0,00	126.437.000,00	68.763.000,00	195.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 36	Satdik Negeri SDN 06 Koto Besar (BOS)	0,00	100.439.036,00	44.791.700,00	145.230.736,00	0,00	100,00
		0,00	100.439.036,00	44.791.700,00	145.230.736,00		
1.01 . 1.01.01 . 36 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	100.439.036,00	44.791.700,00	145.230.736,00	0,00	100,00
		0,00	100.439.036,00	44.791.700,00	145.230.736,00		
1.01 . 1.01.01 . 36 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	100.439.036,00	44.791.700,00	145.230.736,00	0,00	100,00
		0,00	100.439.036,00	44.791.700,00	145.230.736,00		
1.01 . 1.01.01 . 37	Satdik Negeri SDN 07 Koto Besar (BOS)	0,00	134.634.510,00	38.924.215,00	173.558.725,00	(3.664.051,00)	97,89
		0,00	130.970.459,00	38.924.215,00	169.894.674,00		
1.01 . 1.01.01 . 37 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	134.634.510,00	38.924.215,00	173.558.725,00	(3.664.051,00)	97,89
		0,00	130.970.459,00	38.924.215,00	169.894.674,00		
1.01 . 1.01.01 . 37 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	134.634.510,00	38.924.215,00	173.558.725,00	(3.664.051,00)	97,89
		0,00	130.970.459,00	38.924.215,00	169.894.674,00		
1.01 . 1.01.01 . 38	Satdik Negeri SDN 08 Koto Besar (BOS)	0,00	50.582.348,00	69.959.000,00	120.541.348,00	(1.341.348,00)	98,89
		0,00	50.582.348,00	68.617.652,00	119.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 38 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	50.582.348,00	69.959.000,00	120.541.348,00	(1.341.348,00)	98,89
		0,00	50.582.348,00	68.617.652,00	119.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 38 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	50.582.348,00	69.959.000,00	120.541.348,00	(1.341.348,00)	98,89
		0,00	50.582.348,00	68.617.652,00	119.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 39	Satdik Negeri SDN 09 Koto Besar (BOS)	0,00	105.336.775,00	48.756.990,00	154.093.765,00	(2.823.865,00)	98,17
		0,00	102.512.910,00	48.756.990,00	151.269.900,00		
1.01 . 1.01.01 . 39 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	105.336.775,00	48.756.990,00	154.093.765,00	(2.823.865,00)	98,17
		0,00	102.512.910,00	48.756.990,00	151.269.900,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 39 . 16 . 62	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	0,00	105.336.775,00	48.756.990,00	154.093.765,00	(2.823.865,00)	98,17
		0,00	102.512.910,00	48.756.990,00	151.269.900,00		
1.01 . 1.01.01 . 40	Satdik Negeri SDN 10 Koto Besar (BOS)	0,00	106.664.900,00	36.535.100,00	143.200.000,00	(8.160.000,00)	94,30
		0,00	98.504.900,00	36.535.100,00	135.040.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 40 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	106.664.900,00	36.535.100,00	143.200.000,00	(8.160.000,00)	94,30
		0,00	98.504.900,00	36.535.100,00	135.040.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 40 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	106.664.900,00	36.535.100,00	143.200.000,00	(8.160.000,00)	94,30
		0,00	98.504.900,00	36.535.100,00	135.040.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 41	Satdik Negeri SDN 11 Koto Besar (BOS)	0,00	133.128.254,00	27.324.500,00	160.452.754,00	(1.252.754,00)	99,22
		0,00	131.875.500,00	27.324.500,00	159.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 41 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	133.128.254,00	27.324.500,00	160.452.754,00	(1.252.754,00)	99,22
		0,00	131.875.500,00	27.324.500,00	159.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 41 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	133.128.254,00	27.324.500,00	160.452.754,00	(1.252.754,00)	99,22
		0,00	131.875.500,00	27.324.500,00	159.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 42	Satdik Negeri SDN 12 Koto Besar (BOS)	0,00	84.207.390,00	32.912.610,00	117.120.000,00	(480.833,00)	99,59
		0,00	83.726.557,00	32.912.610,00	116.639.167,00		
1.01 . 1.01.01 . 42 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	84.207.390,00	32.912.610,00	117.120.000,00	(480.833,00)	99,59
		0,00	83.726.557,00	32.912.610,00	116.639.167,00		
1.01 . 1.01.01 . 42 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	84.207.390,00	32.912.610,00	117.120.000,00	(480.833,00)	99,59
		0,00	83.726.557,00	32.912.610,00	116.639.167,00		
1.01 . 1.01.01 . 43	Satdik Negeri SDN 13 Koto Besar (BOS)	0,00	128.665.804,00	58.915.000,00	187.580.804,00	(6.320.804,00)	96,63
		0,00	122.345.000,00	58.915.000,00	181.260.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 43 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	128.665.804,00	58.915.000,00	187.580.804,00	(6.320.804,00)	96,63
		0,00	122.345.000,00	58.915.000,00	181.260.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 43 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	128.665.804,00	58.915.000,00	187.580.804,00	(6.320.804,00)	96,63
		0,00	122.345.000,00	58.915.000,00	181.260.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 44	Satdik Negeri SDN 14 Koto Besar (BOS)	0,00	46.385.100,00	5.664.900,00	52.050.000,00	(150.000,00)	99,71
		0,00	46.235.100,00	5.664.900,00	51.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 44 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	46.385.100,00	5.664.900,00	52.050.000,00	(150.000,00)	99,71
		0,00	46.235.100,00	5.664.900,00	51.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 44 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	46.385.100,00	5.664.900,00	52.050.000,00	(150.000,00)	99,71
		0,00	46.235.100,00	5.664.900,00	51.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 45	Satdik Negeri SDN 15 Koto Besar (BOS)	0,00	85.578.320,00	40.783.900,00	126.362.220,00	45.554.494,00	136,05
		0,00	83.156.814,00	88.759.900,00	171.916.714,00		
1.01 . 1.01.01 . 45 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	85.578.320,00	40.783.900,00	126.362.220,00	45.554.494,00	136,05
		0,00	83.156.814,00	88.759.900,00	171.916.714,00		
1.01 . 1.01.01 . 45 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	85.578.320,00	40.783.900,00	126.362.220,00	45.554.494,00	136,05
		0,00	83.156.814,00	88.759.900,00	171.916.714,00		
1.01 . 1.01.01 . 46	Satdik Negeri SMPN 1 Koto Baru (BOS)	0,00	291.688.680,00	64.261.320,00	355.950.000,00	(8.550.000,00)	97,60
		0,00	283.138.680,00	64.261.320,00	347.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 46 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	291.688.680,00	64.261.320,00	355.950.000,00	(8.550.000,00)	97,60
		0,00	283.138.680,00	64.261.320,00	347.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 46 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	291.688.680,00	64.261.320,00	355.950.000,00	(8.550.000,00)	97,60
		0,00	283.138.680,00	64.261.320,00	347.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 47	Satdik Negeri SMPN 2 Koto Baru (BOS)	0,00	432.237.460,00	111.000.000,00	543.237.460,00	0,00	100,00
		0,00	432.237.460,00	111.000.000,00	543.237.460,00		
1.01 . 1.01.01 . 47 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	432.237.460,00	111.000.000,00	543.237.460,00	0,00	100,00
		0,00	432.237.460,00	111.000.000,00	543.237.460,00		
1.01 . 1.01.01 . 47 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	432.237.460,00	111.000.000,00	543.237.460,00	0,00	100,00
		0,00	432.237.460,00	111.000.000,00	543.237.460,00		
1.01 . 1.01.01 . 48	Satdik Negeri SMPN 3 Koto Baru (BOS)	0,00	146.038.587,00	36.488.115,00	182.526.702,00	103.341.946,00	156,62
		0,00	133.438.533,00	152.430.115,00	285.868.648,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 48 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	146.038.587,00	36.488.115,00	182.526.702,00	103.341.946,00	156,62
		0,00	133.438.533,00	152.430.115,00	285.868.648,00		
1.01 . 1.01.01 . 48 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	146.038.587,00	36.488.115,00	182.526.702,00	103.341.946,00	156,62
		0,00	133.438.533,00	152.430.115,00	285.868.648,00		
1.01 . 1.01.01 . 49	Satdik Negeri SMPN 4 Koto Baru (BOS)	0,00	215.929.800,00	43.600.000,00	259.529.800,00	(26.530.000,00)	89,78
		0,00	189.399.800,00	43.600.000,00	232.999.800,00		
1.01 . 1.01.01 . 49 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	215.929.800,00	43.600.000,00	259.529.800,00	(26.530.000,00)	89,78
		0,00	189.399.800,00	43.600.000,00	232.999.800,00		
1.01 . 1.01.01 . 49 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	215.929.800,00	43.600.000,00	259.529.800,00	(26.530.000,00)	89,78
		0,00	189.399.800,00	43.600.000,00	232.999.800,00		
1.01 . 1.01.01 . 50	Satdik Negeri SMPN 1 Pulau Punjung (BOS)	0,00	553.444.582,00	155.361.440,00	708.806.022,00	(22.017.794,00)	96,89
		0,00	531.426.788,00	155.361.440,00	686.788.228,00		
1.01 . 1.01.01 . 50 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	553.444.582,00	155.361.440,00	708.806.022,00	(22.017.794,00)	96,89
		0,00	531.426.788,00	155.361.440,00	686.788.228,00		
1.01 . 1.01.01 . 50 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	553.444.582,00	155.361.440,00	708.806.022,00	(22.017.794,00)	96,89
		0,00	531.426.788,00	155.361.440,00	686.788.228,00		
1.01 . 1.01.01 . 51	Satdik Negeri SMPN 2 Pulau Punjung (BOS)	0,00	451.920.400,00	56.079.600,00	508.000.000,00	(10.656.909,00)	97,90
		0,00	441.263.491,00	56.079.600,00	497.343.091,00		
1.01 . 1.01.01 . 51 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	451.920.400,00	56.079.600,00	508.000.000,00	(10.656.909,00)	97,90
		0,00	441.263.491,00	56.079.600,00	497.343.091,00		
1.01 . 1.01.01 . 51 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	451.920.400,00	56.079.600,00	508.000.000,00	(10.656.909,00)	97,90
		0,00	441.263.491,00	56.079.600,00	497.343.091,00		
1.01 . 1.01.01 . 52	Satdik Negeri SMPN 3 Pulau Punjung (BOS)	0,00	275.524.005,00	42.685.995,00	318.210.000,00	(210.000,00)	99,93
		0,00	275.314.005,00	42.685.995,00	318.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 52 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	275.524.005,00	42.685.995,00	318.210.000,00	(210.000,00)	99,93
		0,00	275.314.005,00	42.685.995,00	318.000.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 52 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	275.524.005,00	42.685.995,00	318.210.000,00	(210.000,00)	99,93
		0,00	275.314.005,00	42.685.995,00	318.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 53	Satdik Negeri SMPN 4 Pulau Punjung (BOS)	0,00	76.394.621,00	20.632.530,00	97.027.151,00	(445.361,00)	99,54
		0,00	75.949.260,00	20.632.530,00	96.581.790,00		
1.01 . 1.01.01 . 53 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	76.394.621,00	20.632.530,00	97.027.151,00	(445.361,00)	99,54
		0,00	75.949.260,00	20.632.530,00	96.581.790,00		
1.01 . 1.01.01 . 53 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	76.394.621,00	20.632.530,00	97.027.151,00	(445.361,00)	99,54
		0,00	75.949.260,00	20.632.530,00	96.581.790,00		
1.01 . 1.01.01 . 54	Satdik Negeri SMPN 5 Pulau Punjung (BOS)	0,00	51.538.890,00	18.639.895,00	70.178.785,00	(92.140,00)	99,87
		0,00	51.446.750,00	18.639.895,00	70.086.645,00		
1.01 . 1.01.01 . 54 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	51.538.890,00	18.639.895,00	70.178.785,00	(92.140,00)	99,87
		0,00	51.446.750,00	18.639.895,00	70.086.645,00		
1.01 . 1.01.01 . 54 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	51.538.890,00	18.639.895,00	70.178.785,00	(92.140,00)	99,87
		0,00	51.446.750,00	18.639.895,00	70.086.645,00		
1.01 . 1.01.01 . 55	Satdik Negeri SMPN 6 Pulau Punjung (BOS)	0,00	72.804.553,00	18.477.530,00	91.282.083,00	(1.122.090,00)	98,77
		0,00	71.682.463,00	18.477.530,00	90.159.993,00		
1.01 . 1.01.01 . 55 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	72.804.553,00	18.477.530,00	91.282.083,00	(1.122.090,00)	98,77
		0,00	71.682.463,00	18.477.530,00	90.159.993,00		
1.01 . 1.01.01 . 55 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	72.804.553,00	18.477.530,00	91.282.083,00	(1.122.090,00)	98,77
		0,00	71.682.463,00	18.477.530,00	90.159.993,00		
1.01 . 1.01.01 . 56	Satdik Negeri SMPN Unggul Dharmasraya (BOS)	0,00	187.025.024,00	68.000.055,00	255.025.079,00	(2.237.019,00)	99,12
		0,00	184.788.005,00	68.000.055,00	252.788.060,00		
1.01 . 1.01.01 . 56 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	187.025.024,00	68.000.055,00	255.025.079,00	(2.237.019,00)	99,12
		0,00	184.788.005,00	68.000.055,00	252.788.060,00		
1.01 . 1.01.01 . 56 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	187.025.024,00	68.000.055,00	255.025.079,00	(2.237.019,00)	99,12
		0,00	184.788.005,00	68.000.055,00	252.788.060,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 57	Satdik Negeri SMPN 1 Sungai Rumbai (BOS)	0,00	490.261.012,00	90.896.540,00	581.157.552,00	(13.200.000,00)	97,73
		0,00	477.061.012,00	90.896.540,00	567.957.552,00		
1.01 . 1.01.01 . 57 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	490.261.012,00	90.896.540,00	581.157.552,00	(13.200.000,00)	97,73
		0,00	477.061.012,00	90.896.540,00	567.957.552,00		
1.01 . 1.01.01 . 57 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	490.261.012,00	90.896.540,00	581.157.552,00	(13.200.000,00)	97,73
		0,00	477.061.012,00	90.896.540,00	567.957.552,00		
1.01 . 1.01.01 . 58	Satdik Negeri SMPN 2 Sungai Rumbai (BOS)	0,00	216.704.711,00	68.274.025,00	284.978.736,00	(3.000.000,00)	98,95
		0,00	216.704.711,00	65.274.025,00	281.978.736,00		
1.01 . 1.01.01 . 58 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	216.704.711,00	68.274.025,00	284.978.736,00	(3.000.000,00)	98,95
		0,00	216.704.711,00	65.274.025,00	281.978.736,00		
1.01 . 1.01.01 . 58 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	216.704.711,00	68.274.025,00	284.978.736,00	(3.000.000,00)	98,95
		0,00	216.704.711,00	65.274.025,00	281.978.736,00		
1.01 . 1.01.01 . 59	Satdik Negeri SMPN 3 Sungai Rumbai (BOS)	0,00	105.763.745,00	35.436.255,00	141.200.000,00	0,00	100,00
		0,00	105.763.745,00	35.436.255,00	141.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 59 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	105.763.745,00	35.436.255,00	141.200.000,00	0,00	100,00
		0,00	105.763.745,00	35.436.255,00	141.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 59 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	105.763.745,00	35.436.255,00	141.200.000,00	0,00	100,00
		0,00	105.763.745,00	35.436.255,00	141.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 60	Satdik Negeri SMPN 1 Sitiung (BOS)	0,00	524.899.172,00	99.567.310,00	624.466.482,00	(6.454.240,00)	98,97
		0,00	518.444.932,00	99.567.310,00	618.012.242,00		
1.01 . 1.01.01 . 60 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	524.899.172,00	99.567.310,00	624.466.482,00	(6.454.240,00)	98,97
		0,00	518.444.932,00	99.567.310,00	618.012.242,00		
1.01 . 1.01.01 . 60 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	524.899.172,00	99.567.310,00	624.466.482,00	(6.454.240,00)	98,97
		0,00	518.444.932,00	99.567.310,00	618.012.242,00		
1.01 . 1.01.01 . 61	Satdik Negeri SMPN 2 Sitiung (BOS)	0,00	200.301.711,00	48.378.710,00	248.680.421,00	(14.280.421,00)	94,26
		0,00	186.021.290,00	48.378.710,00	234.400.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 61 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	200.301.711,00	48.378.710,00	248.680.421,00	(14.280.421,00)	94,26
		0,00	186.021.290,00	48.378.710,00	234.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 61 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	200.301.711,00	48.378.710,00	248.680.421,00	(14.280.421,00)	94,26
		0,00	186.021.290,00	48.378.710,00	234.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 62	Satdik Negeri SMPN 3 Sitiung (BOS)	0,00	77.117.989,00	138.111.670,00	215.229.659,00	17.995.091,00	108,36
		0,00	77.117.989,00	156.106.761,00	233.224.750,00		
1.01 . 1.01.01 . 62 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	77.117.989,00	138.111.670,00	215.229.659,00	17.995.091,00	108,36
		0,00	77.117.989,00	156.106.761,00	233.224.750,00		
1.01 . 1.01.01 . 62 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	77.117.989,00	138.111.670,00	215.229.659,00	17.995.091,00	108,36
		0,00	77.117.989,00	156.106.761,00	233.224.750,00		
1.01 . 1.01.01 . 63	Satdik Negeri SMPN 1 IX Koto (BOS)	0,00	101.504.870,00	25.956.900,00	127.461.770,00	85.494.230,00	167,07
		0,00	99.043.100,00	113.912.900,00	212.956.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 63 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	101.504.870,00	25.956.900,00	127.461.770,00	85.494.230,00	167,07
		0,00	99.043.100,00	113.912.900,00	212.956.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 63 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	101.504.870,00	25.956.900,00	127.461.770,00	85.494.230,00	167,07
		0,00	99.043.100,00	113.912.900,00	212.956.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 64	Satdik Negeri SMPN 2 IX Koto (BOS)	0,00	101.326.688,00	20.683.300,00	122.009.988,00	(1.010.988,00)	99,17
		0,00	100.315.700,00	20.683.300,00	120.999.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 64 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	101.326.688,00	20.683.300,00	122.009.988,00	(1.010.988,00)	99,17
		0,00	100.315.700,00	20.683.300,00	120.999.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 64 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	101.326.688,00	20.683.300,00	122.009.988,00	(1.010.988,00)	99,17
		0,00	100.315.700,00	20.683.300,00	120.999.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 65	Satdik Negeri SMPN 3 IX Koto (BOS)	0,00	38.052.042,00	22.064.250,00	60.116.292,00	0,00	100,00
		0,00	38.052.042,00	22.064.250,00	60.116.292,00		
1.01 . 1.01.01 . 65 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	38.052.042,00	22.064.250,00	60.116.292,00	0,00	100,00
		0,00	38.052.042,00	22.064.250,00	60.116.292,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 65 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	38.052.042,00	22.064.250,00	60.116.292,00	0,00	100,00
		0,00	38.052.042,00	22.064.250,00	60.116.292,00		
1.01 . 1.01.01 . 66	Satdik Negeri SMPN 1 Timpeh (BOS)	0,00	212.410.200,00	44.189.800,00	256.600.000,00	141.325.000,00	155,08
		0,00	203.810.200,00	194.114.800,00	397.925.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 66 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	212.410.200,00	44.189.800,00	256.600.000,00	141.325.000,00	155,08
		0,00	203.810.200,00	194.114.800,00	397.925.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 66 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	212.410.200,00	44.189.800,00	256.600.000,00	141.325.000,00	155,08
		0,00	203.810.200,00	194.114.800,00	397.925.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 67	Satdik Negeri SMPN 2 Timpeh (BOS)	0,00	158.589.131,00	47.611.585,00	206.200.716,00	141.048.034,00	168,40
		0,00	155.709.165,00	191.539.585,00	347.248.750,00		
1.01 . 1.01.01 . 67 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	158.589.131,00	47.611.585,00	206.200.716,00	141.048.034,00	168,40
		0,00	155.709.165,00	191.539.585,00	347.248.750,00		
1.01 . 1.01.01 . 67 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	158.589.131,00	47.611.585,00	206.200.716,00	141.048.034,00	168,40
		0,00	155.709.165,00	191.539.585,00	347.248.750,00		
1.01 . 1.01.01 . 68	Satdik Negeri SMPN 3 Timpeh (BOS)	0,00	107.665.325,00	21.596.300,00	129.261.625,00	(4.761.717,00)	96,32
		0,00	102.903.608,00	21.596.300,00	124.499.908,00		
1.01 . 1.01.01 . 68 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	107.665.325,00	21.596.300,00	129.261.625,00	(4.761.717,00)	96,32
		0,00	102.903.608,00	21.596.300,00	124.499.908,00		
1.01 . 1.01.01 . 68 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	107.665.325,00	21.596.300,00	129.261.625,00	(4.761.717,00)	96,32
		0,00	102.903.608,00	21.596.300,00	124.499.908,00		
1.01 . 1.01.01 . 69	Satdik Negeri SMPN 4 Timpeh (BOS)	0,00	93.715.535,00	32.884.755,00	126.600.290,00	91.719.158,00	172,45
		0,00	93.480.693,00	124.838.755,00	218.319.448,00		
1.01 . 1.01.01 . 69 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	93.715.535,00	32.884.755,00	126.600.290,00	91.719.158,00	172,45
		0,00	93.480.693,00	124.838.755,00	218.319.448,00		
1.01 . 1.01.01 . 69 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	93.715.535,00	32.884.755,00	126.600.290,00	91.719.158,00	172,45
		0,00	93.480.693,00	124.838.755,00	218.319.448,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 70	Satdik Negeri SMPN 1 Koto Salak (BOS)	0,00	280.622.990,00	94.977.500,00	375.600.490,00	(1.631.295,00)	99,57
		0,00	280.497.040,00	93.472.155,00	373.969.195,00		
1.01 . 1.01.01 . 70 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	280.622.990,00	94.977.500,00	375.600.490,00	(1.631.295,00)	99,57
		0,00	280.497.040,00	93.472.155,00	373.969.195,00		
1.01 . 1.01.01 . 70 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	280.622.990,00	94.977.500,00	375.600.490,00	(1.631.295,00)	99,57
		0,00	280.497.040,00	93.472.155,00	373.969.195,00		
1.01 . 1.01.01 . 71	Satdik Negeri SMPN 2 Koto Salak (BOS)	0,00	57.276.450,00	14.723.550,00	72.000.000,00	11.820.000,00	116,42
		0,00	45.552.450,00	38.267.550,00	83.820.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 71 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	57.276.450,00	14.723.550,00	72.000.000,00	11.820.000,00	116,42
		0,00	45.552.450,00	38.267.550,00	83.820.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 71 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	57.276.450,00	14.723.550,00	72.000.000,00	11.820.000,00	116,42
		0,00	45.552.450,00	38.267.550,00	83.820.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 72	Satdik Negeri SMPN 3 Koto Salak (BOS)	0,00	145.836.732,00	39.314.805,00	185.151.537,00	16.675.276,00	109,01
		0,00	138.692.008,00	63.134.805,00	201.826.813,00		
1.01 . 1.01.01 . 72 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	145.836.732,00	39.314.805,00	185.151.537,00	16.675.276,00	109,01
		0,00	138.692.008,00	63.134.805,00	201.826.813,00		
1.01 . 1.01.01 . 72 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	145.836.732,00	39.314.805,00	185.151.537,00	16.675.276,00	109,01
		0,00	138.692.008,00	63.134.805,00	201.826.813,00		
1.01 . 1.01.01 . 73	Satdik Negeri SMPN 1 Tiumang (BOS)	0,00	154.728.140,00	24.871.860,00	179.600.000,00	23.820.000,00	113,26
		0,00	154.728.140,00	48.691.860,00	203.420.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 73 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	154.728.140,00	24.871.860,00	179.600.000,00	23.820.000,00	113,26
		0,00	154.728.140,00	48.691.860,00	203.420.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 73 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	154.728.140,00	24.871.860,00	179.600.000,00	23.820.000,00	113,26
		0,00	154.728.140,00	48.691.860,00	203.420.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 74	Satdik Negeri SMPN 1 Padang Laweh (BOS)	0,00	133.857.800,00	11.259.200,00	145.117.000,00	(3.063.450,00)	97,89
		0,00	130.794.350,00	11.259.200,00	142.053.550,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 74 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	133.857.800,00	11.259.200,00	145.117.000,00	(3.063.450,00)	97,89
		0,00	130.794.350,00	11.259.200,00	142.053.550,00		
1.01 . 1.01.01 . 74 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	133.857.800,00	11.259.200,00	145.117.000,00	(3.063.450,00)	97,89
		0,00	130.794.350,00	11.259.200,00	142.053.550,00		
1.01 . 1.01.01 . 75	Satdik Negeri SMPN 1 Asam Jujuhan (BOS)	0,00	79.233.788,00	20.000.000,00	99.233.788,00	(2.618,00)	100,00
		0,00	79.231.170,00	20.000.000,00	99.231.170,00		
1.01 . 1.01.01 . 75 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	79.233.788,00	20.000.000,00	99.233.788,00	(2.618,00)	100,00
		0,00	79.231.170,00	20.000.000,00	99.231.170,00		
1.01 . 1.01.01 . 75 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	79.233.788,00	20.000.000,00	99.233.788,00	(2.618,00)	100,00
		0,00	79.231.170,00	20.000.000,00	99.231.170,00		
1.01 . 1.01.01 . 76	Satdik Negeri SMPN 1 Koto Besar (BOS)	0,00	185.062.109,00	26.427.085,00	211.489.194,00	147.836.806,00	169,90
		0,00	184.972.915,00	174.353.085,00	359.326.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 76 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	185.062.109,00	26.427.085,00	211.489.194,00	147.836.806,00	169,90
		0,00	184.972.915,00	174.353.085,00	359.326.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 76 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	185.062.109,00	26.427.085,00	211.489.194,00	147.836.806,00	169,90
		0,00	184.972.915,00	174.353.085,00	359.326.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 77	Satdik Negeri SMPN 2 Koto Besar (BOS)	0,00	371.813.365,00	103.606.375,00	475.419.740,00	(6.701.584,00)	98,59
		0,00	365.111.781,00	103.606.375,00	468.718.156,00		
1.01 . 1.01.01 . 77 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	371.813.365,00	103.606.375,00	475.419.740,00	(6.701.584,00)	98,59
		0,00	365.111.781,00	103.606.375,00	468.718.156,00		
1.01 . 1.01.01 . 77 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	371.813.365,00	103.606.375,00	475.419.740,00	(6.701.584,00)	98,59
		0,00	365.111.781,00	103.606.375,00	468.718.156,00		
1.01 . 1.01.01 . 78	Satdik Negeri SMPN 3 Koto Besar (BOS)	0,00	92.187.135,00	18.842.865,00	111.030.000,00	(4.030.000,00)	96,37
		0,00	88.157.135,00	18.842.865,00	107.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 78 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0,00	92.187.135,00	18.842.865,00	111.030.000,00	(4.030.000,00)	96,37
		0,00	88.157.135,00	18.842.865,00	107.000.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 78 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	0,00	92.187.135,00	18.842.865,00	111.030.000,00	(4.030.000,00)	96,37
		0,00	88.157.135,00	18.842.865,00	107.000.000,00		
1.01 . 4.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	115.695.000,00	0,00	115.695.000,00	(104.300,00)	99,91
		0,00	115.590.700,00	0,00	115.590.700,00		
1.01 . 4.01.02 . 01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	115.695.000,00	0,00	115.695.000,00	(104.300,00)	99,91
		0,00	115.590.700,00	0,00	115.590.700,00		
1.01 . 4.01.02 . 01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	0,00	115.695.000,00	0,00	115.695.000,00	(104.300,00)	99,91
		0,00	115.590.700,00	0,00	115.590.700,00		
1.01 . 4.01.02 . 01 . 22 . 42	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	0,00	115.695.000,00	0,00	115.695.000,00	(104.300,00)	99,91
		0,00	115.590.700,00	0,00	115.590.700,00		
1.02	Kesehatan	8.518.652.200,00	73.621.833.486,00	43.886.368.562,00	126.026.854.248,00	(5.252.046.493,60)	95,83
		7.662.988.319,00	74.160.400.413,30	38.951.419.022,10	120.774.807.754,40		
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	7.889.152.200,00	32.418.583.535,00	21.334.456.249,00	61.642.191.984,00	(1.719.315.254,60)	97,21
		7.114.023.319,00	33.135.220.497,30	19.673.632.913,10	59.922.876.729,40		
1.02 . 1.02.01 . 01	DINAS KESEHATAN	7.889.152.200,00	22.464.045.239,00	20.477.896.689,00	50.831.094.128,00	(1.207.586.227,80)	97,62
		7.114.023.319,00	23.616.036.123,10	18.893.448.458,10	49.623.507.900,20		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.769.000,00	0,00
		0,00	2.284.769.000,00	0,00	2.284.769.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.769.000,00	0,00
		0,00	2.284.769.000,00	0,00	2.284.769.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.719.870.000,00	839.455.100,00	20.000.000,00	4.579.325.100,00	(136.486.777,00)	97,02
		3.651.030.000,00	771.843.323,00	19.965.000,00	4.442.838.323,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.809.000,00	0,00	4.809.000,00	0,00	100,00
		0,00	4.809.000,00	0,00	4.809.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	183.854.000,00	20.000.000,00	203.854.000,00	(65.122.553,00)	68,05
		0,00	118.766.447,00	19.965.000,00	138.731.447,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	(2.470.200,00)	81,00
		0,00	10.529.800,00	0,00	10.529.800,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.719.870.000,00	0,00	0,00	3.719.870.000,00	(68.840.000,00)	98,15
		3.651.030.000,00	0,00	0,00	3.651.030.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	83.629.000,00	0,00	83.629.000,00	0,00	100,00
		0,00	83.629.000,00	0,00	83.629.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	80.122.100,00	0,00	80.122.100,00	(20.400,00)	99,97
		0,00	80.101.700,00	0,00	80.101.700,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	0,00	100,00
		0,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	32.176.000,00	0,00	32.176.000,00	0,00	100,00
		0,00	32.176.000,00	0,00	32.176.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	21.380.000,00	0,00	21.380.000,00	(30.000,00)	99,86
		0,00	21.350.000,00	0,00	21.350.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	415.035.000,00	0,00	415.035.000,00	(3.624,00)	100,00
		0,00	415.031.376,00	0,00	415.031.376,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	1.153.898.500,00	24.000.000,00	1.177.898.500,00	(10.392.625,90)	99,12
		0,00	1.143.525.874,10	23.980.000,00	1.167.505.874,10		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	(9.999.997,90)	98,89
		0,00	890.000.002,10	0,00	890.000.002,10		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	(20.000,00)	99,92
		0,00	0,00	23.980.000,00	23.980.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	(41.300,00)	99,79
		0,00	19.558.700,00	0,00	19.558.700,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	224.848.500,00	0,00	224.848.500,00	(281.328,00)	99,87
		0,00	224.567.172,00	0,00	224.567.172,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	(50.000,00)	99,47
		0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	35.900.000,00	130.908.900,00	0,00	166.808.900,00	(823.324,00)	99,51
		35.850.000,00	130.135.576,00	0,00	165.985.576,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 06	Evaluasi Kinerja Pegawai	7.400.000,00	124.403.650,00	0,00	131.803.650,00	(547.074,00)	99,58
		7.350.000,00	123.906.576,00	0,00	131.256.576,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 07	Penilaian Angka kredit tenaga fungsional kesehatan	28.500.000,00	6.505.250,00	0,00	35.005.250,00	(276.250,00)	99,21
		28.500.000,00	6.229.000,00	0,00	34.729.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.000.000,00	57.655.000,00	0,00	59.655.000,00	(409.750,00)	99,31
		2.000.000,00	57.245.250,00	0,00	59.245.250,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	(200.000,00)	99,39
		0,00	32.800.000,00	0,00	32.800.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 34	Kegiatan Pelatihan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional	2.000.000,00	24.655.000,00	0,00	26.655.000,00	(209.750,00)	99,21
		2.000.000,00	24.445.250,00	0,00	26.445.250,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.000.000,00	2.739.495.605,00	122.148.445,00	2.868.644.050,00	(291.023.168,00)	89,86
		7.000.000,00	2.449.490.882,00	121.130.000,00	2.577.620.882,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	0,00	2.681.841.555,00	116.153.445,00	2.797.995.000,00	(290.967.868,00)	89,60
		0,00	2.391.892.132,00	115.135.000,00	2.507.027.132,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.000.000,00	31.174.550,00	5.995.000,00	39.169.550,00	(10.300,00)	99,97
		2.000.000,00	31.164.250,00	5.995.000,00	39.159.250,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 13	pengawasan dan pembinaan penggunaan alat kesehatan dan PKRT	5.000.000,00	26.479.500,00	0,00	31.479.500,00	(45.000,00)	99,86
		5.000.000,00	26.434.500,00	0,00	31.434.500,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	17.500.000,00	212.445.000,00	0,00	229.945.000,00	(339.250,00)	99,85
		17.500.000,00	212.105.750,00	0,00	229.605.750,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 53	Program kesehatan jiwa	12.050.000,00	52.940.000,00	0,00	64.990.000,00	(231.750,00)	99,64
		12.050.000,00	52.708.250,00	0,00	64.758.250,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 62	Pembinaan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat	5.450.000,00	159.505.000,00	0,00	164.955.000,00	(107.500,00)	99,93
		5.450.000,00	159.397.500,00	0,00	164.847.500,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	5.800.000,00	70.611.000,00	0,00	76.411.000,00	(85.000,00)	99,89
		5.800.000,00	70.526.000,00	0,00	76.326.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	5.800.000,00	70.611.000,00	0,00	76.411.000,00	(85.000,00)	99,89
		5.800.000,00	70.526.000,00	0,00	76.326.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	16.140.000,00	135.461.400,00	0,00	151.601.400,00	(1.592.500,00)	98,95
		16.140.000,00	133.868.900,00	0,00	150.008.900,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	6.500.000,00	38.166.400,00	0,00	44.666.400,00	(514.400,00)	98,85
		6.500.000,00	37.652.000,00	0,00	44.152.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 16	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka Pengembangan PHBS dan Nagari Siaga	0,00	39.590.000,00	0,00	39.590.000,00	(450.600,00)	98,86
		0,00	39.139.400,00	0,00	39.139.400,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 20	Orientasi Krida Saka Bhakti Husada (DAK Non Fisik)	9.640.000,00	57.705.000,00	0,00	67.345.000,00	(627.500,00)	99,07
		9.640.000,00	57.077.500,00	0,00	66.717.500,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.000.000,00	70.153.000,00	0,00	72.153.000,00	(3.503.905,00)	95,14
		2.000.000,00	66.649.095,00	0,00	68.649.095,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	0,00	32.239.000,00	0,00	32.239.000,00	(3.277.655,00)	89,83
		0,00	28.961.345,00	0,00	28.961.345,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 17	Revitalisasi Nagari Sadar Gizi (DAK Non Fisik)	2.000.000,00	37.914.000,00	0,00	39.914.000,00	(226.250,00)	99,43
		2.000.000,00	37.687.750,00	0,00	39.687.750,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	23.850.000,00	117.150.000,00	0,00	141.000.000,00	(575.185,00)	99,59
		23.850.000,00	116.574.815,00	0,00	140.424.815,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(93.435,00)	99,81
		0,00	49.906.565,00	0,00	49.906.565,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 13	Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat (DAK Non Fisik)	23.850.000,00	67.150.000,00	0,00	91.000.000,00	(481.750,00)	99,47
		23.850.000,00	66.668.250,00	0,00	90.518.250,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	27.100.000,00	366.229.306,00	0,00	393.329.306,00	(2.664.256,00)	99,32
		26.800.000,00	363.865.050,00	0,00	390.665.050,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	7.000.000,00	54.487.506,00	0,00	61.487.506,00	(193.006,00)	99,69
		7.000.000,00	54.294.500,00	0,00	61.294.500,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08	Peningkatan imunisasi	6.100.000,00	85.162.500,00	0,00	91.262.500,00	(217.000,00)	99,76
		6.000.000,00	85.045.500,00	0,00	91.045.500,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 27	Peningkatan surveilans	1.500.000,00	23.650.000,00	0,00	25.150.000,00	(51.750,00)	99,79
		1.500.000,00	23.598.250,00	0,00	25.098.250,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 28	Pelayanan Kesehatan Matra	4.000.000,00	91.293.300,00	0,00	95.293.300,00	(626.250,00)	99,34
		3.800.000,00	90.867.050,00	0,00	94.667.050,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 29	Pengendalian penyakit tidak menular	8.500.000,00	76.636.000,00	0,00	85.136.000,00	(289.000,00)	99,66
		8.500.000,00	76.347.000,00	0,00	84.847.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 32	Penanggulangan penyakit bersumber binatang (DAK Non Fisik)	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	(1.287.250,00)	96,32
		0,00	33.712.750,00	0,00	33.712.750,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	931.600.000,00	976.359.782,00	0,00	1.907.959.782,00	(228.818.824,00)	88,01
		831.000.000,00	848.140.958,00	0,00	1.679.140.958,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	4.000.000,00	3.890.000,00	0,00	7.890.000,00	0,00	100,00
		4.000.000,00	3.890.000,00	0,00	7.890.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	5.600.000,00	68.204.500,00	0,00	73.804.500,00	(27.750,00)	99,96
		5.600.000,00	68.176.750,00	0,00	73.776.750,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07	Akreditasi Puskesmas	702.700.000,00	613.080.000,00	0,00	1.315.780.000,00	(104.674.100,00)	92,04
		685.600.000,00	525.505.900,00	0,00	1.211.105.900,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 15	Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan	0,00	79.494.832,00	0,00	79.494.832,00	(6.032,00)	99,99
		0,00	79.488.800,00	0,00	79.488.800,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 18	Pengelolaan perizinan bidang kesehatan (sarana)	0,00	30.990.450,00	0,00	30.990.450,00	0,00	100,00
		0,00	30.990.450,00	0,00	30.990.450,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 20	Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)	219.300.000,00	180.700.000,00	0,00	400.000.000,00	(124.110.942,00)	68,97
		135.800.000,00	140.089.058,00	0,00	275.889.058,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	0,00	27.835.150,00	0,00	27.835.150,00	(21.900,00)	99,92
		0,00	27.813.250,00	0,00	27.813.250,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 17	Pelayanan kesehatan daerah terpencil dan sunatan masal	0,00	27.835.150,00	0,00	27.835.150,00	(21.900,00)	99,92
		0,00	27.813.250,00	0,00	27.813.250,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	0,00	0,00	4.906.743.304,00	4.906.743.304,00	(357.824.900,90)	92,71
		0,00	0,00	4.548.918.403,10	4.548.918.403,10		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 22	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	0,00	0,00	671.591.300,00	671.591.300,00	(51.803.000,00)	92,29
		0,00	0,00	619.788.300,00	619.788.300,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)	0,00	0,00	2.781.056.000,00	2.781.056.000,00	(214.478.998,00)	92,29
		0,00	0,00	2.566.577.002,00	2.566.577.002,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 32	Pembangunan Pagar Puskesmas	0,00	0,00	500.096.004,00	500.096.004,00	(1.883.679,10)	99,62
		0,00	0,00	498.212.324,90	498.212.324,90		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 34	Pembangunan Pustu/ Polindes/ Poskesri	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	(1.611.000,00)	99,19
		0,00	0,00	198.389.000,00	198.389.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 35	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	754.000.000,00	754.000.000,00	(88.048.223,80)	88,32
		0,00	0,00	665.951.776,20	665.951.776,20		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	0,00	0,00	14.517.574.440,00	14.517.574.440,00	(1.041.221.213,00)	92,83
		0,00	0,00	13.476.353.227,00	13.476.353.227,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 01	Pembangunan rumah sakit	0,00	0,00	5.476.322.053,00	5.476.322.053,00	(287.694.053,00)	94,75
		0,00	0,00	5.188.628.000,00	5.188.628.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	0,00	0,00	947.184.000,00	947.184.000,00	(11.084.000,00)	98,83
		0,00	0,00	936.100.000,00	936.100.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 30	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	0,00	0,00	8.094.068.387,00	8.094.068.387,00	(742.443.160,00)	90,83
		0,00	0,00	7.351.625.227,00	7.351.625.227,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	0,00	5.372.885.400,00	0,00	5.372.885.400,00	(22.576.659,00)	99,58
		0,00	5.350.308.741,00	0,00	5.350.308.741,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 07	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	0,00	5.372.885.400,00	0,00	5.372.885.400,00	(22.576.659,00)	99,58
		0,00	5.350.308.741,00	0,00	5.350.308.741,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	3.000.000,00	12.955.000,00	0,00	15.955.000,00	(726.500,00)	95,45
		3.000.000,00	12.228.500,00	0,00	15.228.500,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 10	Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia (DAK Non Fisik)	3.000.000,00	12.955.000,00	0,00	15.955.000,00	(726.500,00)	95,45
		3.000.000,00	12.228.500,00	0,00	15.228.500,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	15.950.000,00	51.455.000,00	0,00	67.405.000,00	(70.500,00)	99,90
		15.950.000,00	51.384.500,00	0,00	67.334.500,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 13	Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal	12.000.000,00	16.430.000,00	0,00	28.430.000,00	(45.000,00)	99,84
		12.000.000,00	16.385.000,00	0,00	28.385.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 14	Pertemuan Review pemantapan P4K Nagari (DAK Non Fisik)	3.950.000,00	35.025.000,00	0,00	38.975.000,00	(25.500,00)	99,93
		3.950.000,00	34.999.500,00	0,00	38.949.500,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 41	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	104.869.000,00	997.119.447,00	887.430.500,00	1.989.418.947,00	(226.403.333,00)	88,62
		104.687.388,00	955.226.398,00	703.101.828,00	1.763.015.614,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 41 . 20	Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT LABKESDA	0,00	274.363.823,00	623.500.000,00	897.863.823,00	(173.150.348,00)	80,72
		0,00	267.424.618,00	457.288.857,00	724.713.475,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 41 . 21	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT/ Instalasi Gudang Farmasi	0,00	242.261.624,00	0,00	242.261.624,00	(20.689.439,00)	91,46
		0,00	221.572.185,00	0,00	221.572.185,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 41 . 25	Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Type D Sungai Rumbai	104.869.000,00	480.494.000,00	263.930.500,00	849.293.500,00	(32.563.546,00)	96,17
		104.687.388,00	466.229.595,00	245.812.971,00	816.729.954,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 42	Program Kesehatan Anaka Usia Sekolah dan Remaja	0,00	4.012.000,00	0,00	4.012.000,00	(902.250,00)	77,51
		0,00	3.109.750,00	0,00	3.109.750,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 42 . 03	Peningkatan dan pengembangan kesehatan anak dan remaja (DAK Non Fisik)	0,00	4.012.000,00	0,00	4.012.000,00	(902.250,00)	77,51
		0,00	3.109.750,00	0,00	3.109.750,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 43	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.000.000,00	93.562.849,00	0,00	100.562.849,00	(122.507,00)	99,88
		7.000.000,00	93.440.342,00	0,00	100.440.342,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 43 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	7.000.000,00	93.562.849,00	0,00	100.562.849,00	(122.507,00)	99,88
		7.000.000,00	93.440.342,00	0,00	100.440.342,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44	Program Jaminan Persalinan (Jampersal)	1.462.223.200,00	453.776.800,00	0,00	1.916.000.000,00	(840.336.019,00)	56,14
		903.265.931,00	172.398.050,00	0,00	1.075.663.981,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 01	Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufras (DAK Non Fisik)	1.462.223.200,00	453.776.800,00	0,00	1.916.000.000,00	(840.336.019,00)	56,14
		903.265.931,00	172.398.050,00	0,00	1.075.663.981,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51	Program Bantuan Operasional kesehatan	1.507.350.000,00	8.580.621.000,00	0,00	10.087.971.000,00	(325.434.881,00)	96,77
		1.461.150.000,00	8.301.386.119,00	0,00	9.762.536.119,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 01	Bantuan Operasional kesehatan (Manajemen) (DAK Non Fisik)	216.950.000,00	388.050.000,00	0,00	605.000.000,00	(1.045.505,00)	99,83
		216.050.000,00	387.904.495,00	0,00	603.954.495,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 02	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Dareh (DAK)	74.100.000,00	510.900.000,00	0,00	585.000.000,00	(2.100.000,00)	99,64
		72.000.000,00	510.900.000,00	0,00	582.900.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 03	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sialang (DAK)	85.500.000,00	672.000.000,00	0,00	757.500.000,00	(19.260.000,00)	97,46
		82.700.000,00	655.540.000,00	0,00	738.240.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 04	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sitiung I (DAK)	92.600.000,00	507.400.000,00	0,00	600.000.000,00	(55.560.600,00)	90,74
		82.850.000,00	461.589.400,00	0,00	544.439.400,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 05	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunung Medan (DAK)	92.700.000,00	607.300.000,00	0,00	700.000.000,00	(25.857.000,00)	96,31
		91.900.000,00	582.243.000,00	0,00	674.143.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 06	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Timpeh (DAK)	104.100.000,00	663.000.000,00	0,00	767.100.000,00	(16.163.000,00)	97,89
		96.200.000,00	654.737.000,00	0,00	750.937.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 07	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Padang Laweh(DAK)	104.250.000,00	662.850.000,00	0,00	767.100.000,00	(3.150.000,00)	99,59
		102.100.000,00	661.850.000,00	0,00	763.950.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 08	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Beringin Sakti (DAK)	97.850.000,00	461.750.000,00	0,00	559.600.000,00	(19.072.650,00)	96,59
		97.350.000,00	443.177.350,00	0,00	540.527.350,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 09	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Baru (DAK)	78.100.000,00	524.400.000,00	0,00	602.500.000,00	(118.000,00)	99,98
		78.000.000,00	524.382.000,00	0,00	602.382.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 10	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tiumang(DAK)	110.850.000,00	639.150.000,00	0,00	750.000.000,00	(6.316.000,00)	99,16
		104.550.000,00	639.134.000,00	0,00	743.684.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 11	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sitiung II (DAK)	93.100.000,00	499.400.000,00	0,00	592.500.000,00	(28.226.000,00)	95,24
		92.100.000,00	472.174.000,00	0,00	564.274.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 12	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Besar(DAK)	84.100.000,00	495.900.000,00	0,00	580.000.000,00	(15.085.100,00)	97,40
		79.900.000,00	485.014.900,00	0,00	564.914.900,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 13	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Rumbai(DAK)	82.800.000,00	509.700.000,00	0,00	592.500.000,00	0,00	100,00
		82.800.000,00	509.700.000,00	0,00	592.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 14	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Limau(DAK)	76.700.000,00	682.900.000,00	0,00	759.600.000,00	(117.796.026,00)	84,49
		73.000.000,00	568.803.974,00	0,00	641.803.974,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 15	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Silago (DAK)	95.650.000,00	663.950.000,00	0,00	759.600.000,00	(14.980.000,00)	98,03
		91.650.000,00	652.970.000,00	0,00	744.620.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 16	Bantuan Operasional Kesehatan (e-Logistik) Farmasi (DAK Non Fisik)	18.000.000,00	91.971.000,00	0,00	109.971.000,00	(705.000,00)	99,36
		18.000.000,00	91.266.000,00	0,00	109.266.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 02	Puskesmas Sungai Rumbai	0,00	855.995.996,00	29.170.000,00	885.165.996,00	(183,00)	100,00
		0,00	855.995.813,00	29.170.000,00	885.165.813,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0,00	855.995.996,00	29.170.000,00	885.165.996,00	(183,00)	100,00
		0,00	855.995.813,00	29.170.000,00	885.165.813,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 23	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)	0,00	855.995.996,00	29.170.000,00	885.165.996,00	(183,00)	100,00
		0,00	855.995.813,00	29.170.000,00	885.165.813,00		
1.02 . 1.02.01 . 03	Puskesmas Sungai Limau	0,00	559.561.201,00	24.300.000,00	583.861.201,00	(81.577.292,00)	86,03
		0,00	478.757.309,00	23.526.600,00	502.283.909,00		
1.02 . 1.02.01 . 03 . 41	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0,00	559.561.201,00	24.300.000,00	583.861.201,00	(81.577.292,00)	86,03
		0,00	478.757.309,00	23.526.600,00	502.283.909,00		
1.02 . 1.02.01 . 03 . 41 . 23	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)	0,00	559.561.201,00	24.300.000,00	583.861.201,00	(81.577.292,00)	86,03
		0,00	478.757.309,00	23.526.600,00	502.283.909,00		
1.02 . 1.02.01 . 04	Puskesmas Sitiung II	0,00	636.661.527,00	33.700.000,00	670.361.527,00	0,00	100,00
		0,00	636.661.527,00	33.700.000,00	670.361.527,00		
1.02 . 1.02.01 . 04 . 41	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0,00	636.661.527,00	33.700.000,00	670.361.527,00	0,00	100,00
		0,00	636.661.527,00	33.700.000,00	670.361.527,00		
1.02 . 1.02.01 . 04 . 41 . 23	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)	0,00	636.661.527,00	33.700.000,00	670.361.527,00	0,00	100,00
		0,00	636.661.527,00	33.700.000,00	670.361.527,00		
1.02 . 1.02.01 . 05	Puskesmas Padang Laweh	0,00	447.707.059,00	44.142.200,00	491.849.259,00	(4.718.900,00)	99,04
		0,00	443.966.859,00	43.163.500,00	487.130.359,00		
1.02 . 1.02.01 . 05 . 41	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0,00	447.707.059,00	44.142.200,00	491.849.259,00	(4.718.900,00)	99,04
		0,00	443.966.859,00	43.163.500,00	487.130.359,00		
1.02 . 1.02.01 . 05 . 41 . 23	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)	0,00	447.707.059,00	44.142.200,00	491.849.259,00	(4.718.900,00)	99,04
		0,00	443.966.859,00	43.163.500,00	487.130.359,00		
1.02 . 1.02.01 . 06	Puskesmas Sungai Dareh	0,00	1.448.244.773,00	215.928.080,00	1.664.172.853,00	(159.877.030,00)	90,39
		0,00	1.288.622.823,00	215.673.000,00	1.504.295.823,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 41	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0,00	1.448.244.773,00	215.928.080,00	1.664.172.853,00	(159.877.030,00)	90,39
		0,00	1.288.622.823,00	215.673.000,00	1.504.295.823,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 41 . 23	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)	0,00	1.448.244.773,00	215.928.080,00	1.664.172.853,00	(159.877.030,00)	90,39
		0,00	1.288.622.823,00	215.673.000,00	1.504.295.823,00		
1.02 . 1.02.01 . 07	Puskesmas Silago	0,00	702.267.098,00	55.000.000,00	757.267.098,00	(29.349.603,00)	96,12
		0,00	675.882.995,00	52.034.500,00	727.917.495,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 07 . 41	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0,00	702.267.098,00	55.000.000,00	757.267.098,00	(29.349.603,00)	96,12
		0,00	675.882.995,00	52.034.500,00	727.917.495,00		
1.02 . 1.02.01 . 07 . 41 . 23	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)	0,00	702.267.098,00	55.000.000,00	757.267.098,00	(29.349.603,00)	96,12
		0,00	675.882.995,00	52.034.500,00	727.917.495,00		
1.02 . 1.02.01 . 08	Puskesmas Gunung Medan	0,00	604.204.934,00	53.960.000,00	658.164.934,00	(41.477.086,18)	93,70
		0,00	572.567.497,82	44.120.350,00	616.687.847,82		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 41	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0,00	604.204.934,00	53.960.000,00	658.164.934,00	(41.477.086,18)	93,70
		0,00	572.567.497,82	44.120.350,00	616.687.847,82		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 41 . 23	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)	0,00	604.204.934,00	53.960.000,00	658.164.934,00	(41.477.086,18)	93,70
		0,00	572.567.497,82	44.120.350,00	616.687.847,82		
1.02 . 1.02.01 . 09	Puskesmas Sitiung I	0,00	996.103.513,00	57.585.000,00	1.053.688.513,00	(875.813,62)	99,92
		0,00	996.053.199,38	56.759.500,00	1.052.812.699,38		
1.02 . 1.02.01 . 09 . 41	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0,00	996.103.513,00	57.585.000,00	1.053.688.513,00	(875.813,62)	99,92
		0,00	996.053.199,38	56.759.500,00	1.052.812.699,38		
1.02 . 1.02.01 . 09 . 41 . 23	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)	0,00	996.103.513,00	57.585.000,00	1.053.688.513,00	(875.813,62)	99,92
		0,00	996.053.199,38	56.759.500,00	1.052.812.699,38		
1.02 . 1.02.01 . 10	Puskesmas Koto Baru	0,00	1.416.258.119,00	100.000.000,00	1.516.258.119,00	(9.977.268,00)	99,34
		0,00	1.406.486.091,00	99.794.760,00	1.506.280.851,00		
1.02 . 1.02.01 . 10 . 41	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0,00	1.416.258.119,00	100.000.000,00	1.516.258.119,00	(9.977.268,00)	99,34
		0,00	1.406.486.091,00	99.794.760,00	1.506.280.851,00		
1.02 . 1.02.01 . 10 . 41 . 23	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)	0,00	1.416.258.119,00	100.000.000,00	1.516.258.119,00	(9.977.268,00)	99,34
		0,00	1.406.486.091,00	99.794.760,00	1.506.280.851,00		
1.02 . 1.02.01 . 11	Puskesmas Timpeh	0,00	735.974.118,00	72.854.280,00	808.828.398,00	(63.023.512,00)	92,21
		0,00	693.128.841,00	52.676.045,00	745.804.886,00		
1.02 . 1.02.01 . 11 . 41	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0,00	735.974.118,00	72.854.280,00	808.828.398,00	(63.023.512,00)	92,21
		0,00	693.128.841,00	52.676.045,00	745.804.886,00		
1.02 . 1.02.01 . 11 . 41 . 23	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)	0,00	735.974.118,00	72.854.280,00	808.828.398,00	(63.023.512,00)	92,21
		0,00	693.128.841,00	52.676.045,00	745.804.886,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 12	Puskesmas Sialang	0,00	432.649.647,00	56.880.000,00	489.529.647,00	(78.505.165,00)	83,96
		0,00	376.094.982,00	34.929.500,00	411.024.482,00		
1.02 . 1.02.01 . 12 . 41	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0,00	432.649.647,00	56.880.000,00	489.529.647,00	(78.505.165,00)	83,96
		0,00	376.094.982,00	34.929.500,00	411.024.482,00		
1.02 . 1.02.01 . 12 . 41 . 23	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)	0,00	432.649.647,00	56.880.000,00	489.529.647,00	(78.505.165,00)	83,96
		0,00	376.094.982,00	34.929.500,00	411.024.482,00		
1.02 . 1.02.01 . 13	Puskesmas Tiumang	0,00	300.972.487,00	18.040.000,00	319.012.487,00	(8.103.438,00)	97,46
		0,00	294.079.049,00	16.830.000,00	310.909.049,00		
1.02 . 1.02.01 . 13 . 41	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0,00	300.972.487,00	18.040.000,00	319.012.487,00	(8.103.438,00)	97,46
		0,00	294.079.049,00	16.830.000,00	310.909.049,00		
1.02 . 1.02.01 . 13 . 41 . 23	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)	0,00	300.972.487,00	18.040.000,00	319.012.487,00	(8.103.438,00)	97,46
		0,00	294.079.049,00	16.830.000,00	310.909.049,00		
1.02 . 1.02.01 . 14	Puskesmas Koto Besar	0,00	817.937.824,00	95.000.000,00	912.937.824,00	(34.243.736,00)	96,25
		0,00	800.887.388,00	77.806.700,00	878.694.088,00		
1.02 . 1.02.01 . 14 . 41	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0,00	817.937.824,00	95.000.000,00	912.937.824,00	(34.243.736,00)	96,25
		0,00	800.887.388,00	77.806.700,00	878.694.088,00		
1.02 . 1.02.01 . 14 . 41 . 23	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)	0,00	817.937.824,00	95.000.000,00	912.937.824,00	(34.243.736,00)	96,25
		0,00	800.887.388,00	77.806.700,00	878.694.088,00		
1.02 . 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	629.500.000,00	41.203.249.951,00	22.551.912.313,00	64.384.662.264,00	(3.532.731.239,00)	94,51
		548.965.000,00	41.025.179.916,00	19.277.786.109,00	60.851.931.025,00		
1.02 . 1.02.02 . 01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	629.500.000,00	6.000.000,00	20.858.206.313,00	21.493.706.313,00	(3.201.067.098,00)	85,11
		548.965.000,00	6.000.000,00	17.737.674.215,00	18.292.639.215,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	629.500.000,00	6.000.000,00	0,00	635.500.000,00	(80.535.000,00)	87,33
		548.965.000,00	6.000.000,00	0,00	554.965.000,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	629.500.000,00	6.000.000,00	0,00	635.500.000,00	(80.535.000,00)	87,33
		548.965.000,00	6.000.000,00	0,00	554.965.000,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	0,00	3.122.573.500,00	3.122.573.500,00	(1.323.918.490,00)	57,60
		0,00	0,00	1.798.655.010,00	1.798.655.010,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	1.100.891.500,00	1.100.891.500,00	(1.035.077.490,00)	5,98
		0,00	0,00	65.814.010,00	65.814.010,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 52	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Lanjutan)	0,00	0,00	1.732.882.000,00	1.732.882.000,00	(10.621.000,00)	99,39
		0,00	0,00	1.722.261.000,00	1.722.261.000,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 66	Pengadaan Instalasi Air Bersih	0,00	0,00	288.800.000,00	288.800.000,00	(278.220.000,00)	3,66
		0,00	0,00	10.580.000,00	10.580.000,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	0,00	0,00	17.735.632.813,00	17.735.632.813,00	(1.796.613.608,00)	89,87
		0,00	0,00	15.939.019.205,00	15.939.019.205,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 16	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	0,00	0,00	668.413.357,00	668.413.357,00	(194.933.357,00)	70,84
		0,00	0,00	473.480.000,00	473.480.000,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 30	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	0,00	0,00	4.534.886.643,00	4.534.886.643,00	(126.911.163,00)	97,20
		0,00	0,00	4.407.975.480,00	4.407.975.480,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 35	Lanjutan Pembangunan Gedung Baru (DAK 2018)	0,00	0,00	11.906.032.813,00	11.906.032.813,00	(1.474.169.088,00)	87,62
		0,00	0,00	10.431.863.725,00	10.431.863.725,00		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 36	Pengadaan Ambulance	0,00	0,00	626.300.000,00	626.300.000,00	(600.000,00)	99,90
		0,00	0,00	625.700.000,00	625.700.000,00		
1.02 . 1.02.02 . 02	BLUD RSUD	0,00	41.197.249.951,00	1.693.706.000,00	42.890.955.951,00	(331.664.141,00)	99,23
		0,00	41.019.179.916,00	1.540.111.894,00	42.559.291.810,00		
1.02 . 1.02.02 . 02 . 40	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	0,00	41.197.249.951,00	1.693.706.000,00	42.890.955.951,00	(331.664.141,00)	99,23
		0,00	41.019.179.916,00	1.540.111.894,00	42.559.291.810,00		
1.02 . 1.02.02 . 02 . 40 . 01	Pelayanan Kesehatan (BLUD)	0,00	41.197.249.951,00	1.693.706.000,00	42.890.955.951,00	(331.664.141,00)	99,23
		0,00	41.019.179.916,00	1.540.111.894,00	42.559.291.810,00		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.916.130.000,00	33.224.534.696,00	106.741.659.746,25	142.882.324.442,25	(10.998.169.675,91)	92,30
		2.740.811.000,00	29.924.076.331,00	99.219.267.435,34	131.884.154.766,34		
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.916.130.000,00	33.224.534.696,00	106.741.659.746,25	142.882.324.442,25	(10.998.169.675,91)	92,30
		2.740.811.000,00	29.924.076.331,00	99.219.267.435,34	131.884.154.766,34		
1.03 . 1.03.01 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.916.130.000,00	33.224.534.696,00	106.741.659.746,25	142.882.324.442,25	(10.998.169.675,91)	92,30
		2.740.811.000,00	29.924.076.331,00	99.219.267.435,34	131.884.154.766,34		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.736.130.000,00	1.800.857.402,00	226.299.000,00	4.763.286.402,00	(349.439.408,00)	92,66
		2.587.361.000,00	1.603.316.994,00	223.169.000,00	4.413.846.994,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	100,00
		0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	722.400.000,00	0,00	722.400.000,00	(97.960.524,00)	86,44
		0,00	624.439.476,00	0,00	624.439.476,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	201.500.000,00	201.500.000,00	(270.000,00)	99,87
		0,00	0,00	201.230.000,00	201.230.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	88.150.000,00	0,00	88.150.000,00	(56.373.550,00)	36,05
		0,00	31.776.450,00	0,00	31.776.450,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.736.130.000,00	273.960.000,00	0,00	3.010.090.000,00	(157.529.000,00)	94,77
		2.587.361.000,00	265.200.000,00	0,00	2.852.561.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	8.409.000,00	0,00	8.409.000,00	0,00	100,00
		0,00	8.409.000,00	0,00	8.409.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	(50.000,00)	99,70
		0,00	16.850.000,00	0,00	16.850.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	94.998.700,00	0,00	94.998.700,00	(2.150,00)	100,00
		0,00	94.996.550,00	0,00	94.996.550,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	87.579.500,00	0,00	87.579.500,00	0,00	100,00
		0,00	87.579.500,00	0,00	87.579.500,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	5.387.500,00	0,00	5.387.500,00	(500,00)	99,99
		0,00	5.387.000,00	0,00	5.387.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	15.000.000,00	23.299.000,00	38.299.000,00	(2.860.000,00)	92,53
		0,00	15.000.000,00	20.439.000,00	35.439.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	22.540.000,00	0,00	22.540.000,00	(628.000,00)	97,21
		0,00	21.912.000,00	0,00	21.912.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	460.432.702,00	0,00	460.432.702,00	(33.765.684,00)	92,67
		0,00	426.667.018,00	0,00	426.667.018,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	5.022.811.700,00	44.351.534.635,00	49.374.346.335,00	(6.303.312.204,00)	87,23
		0,00	4.299.407.119,00	38.771.627.012,00	43.071.034.131,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	4.723.751.700,00	44.051.834.635,00	48.775.586.335,00	(6.213.686.587,00)	87,26
		0,00	4.088.242.736,00	38.473.657.012,00	42.561.899.748,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	211.000.000,00	211.000.000,00	(1.730.000,00)	99,18
		0,00	0,00	209.270.000,00	209.270.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	88.700.000,00	88.700.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	88.700.000,00	88.700.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	299.060.000,00	0,00	299.060.000,00	(87.895.617,00)	70,61
		0,00	211.164.383,00	0,00	211.164.383,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	(16.597.116,00)	85,05
		0,00	94.402.884,00	0,00	94.402.884,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	(16.597.116,00)	85,05
		0,00	94.402.884,00	0,00	94.402.884,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	40.900.000,00	425.500.000,00	48.246.299.411,25	48.712.699.411,25	(609.489.269,52)	98,75
		36.150.000,00	418.801.749,00	47.648.258.392,73	48.103.210.141,73		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03	Pembangunan jalan	0,00	161.500.000,00	19.140.883.411,25	19.302.383.411,25	(577.637.640,19)	97,01
		0,00	159.344.440,00	18.565.401.331,06	18.724.745.771,06		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05	Pembangunan jembatan	40.900.000,00	96.000.000,00	2.931.699.000,00	3.068.599.000,00	(13.896.579,33)	99,55
		36.150.000,00	93.445.359,00	2.925.107.061,67	3.054.702.420,67		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13	Pembangunan jalan (DAK Reguler)	0,00	168.000.000,00	26.173.717.000,00	26.341.717.000,00	(17.955.050,00)	99,93
		0,00	166.011.950,00	26.157.750.000,00	26.323.761.950,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	0,00	0,00	2.802.200.000,00	2.802.200.000,00	(195.996.500,00)	93,01
		0,00	0,00	2.606.203.500,00	2.606.203.500,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	0,00	0,00	2.802.200.000,00	2.802.200.000,00	(195.996.500,00)	93,01
		0,00	0,00	2.606.203.500,00	2.606.203.500,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	41.050.000,00	66.000.000,00	3.539.700.000,00	3.646.750.000,00	(40.059.000,00)	98,90
		36.650.000,00	64.816.000,00	3.505.225.000,00	3.606.691.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	41.050.000,00	38.000.000,00	2.150.000.000,00	2.229.050.000,00	(31.888.500,00)	98,57
		36.650.000,00	37.326.500,00	2.123.185.000,00	2.197.161.500,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	0,00	28.000.000,00	1.389.700.000,00	1.417.700.000,00	(8.170.500,00)	99,42
		0,00	27.489.500,00	1.382.040.000,00	1.409.529.500,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	0,00	1.357.550.000,00	80.000.000,00	1.437.550.000,00	(19.927.250,00)	98,61
		0,00	1.338.532.750,00	79.090.000,00	1.417.622.750,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	0,00	56.150.000,00	80.000.000,00	136.150.000,00	(12.362.000,00)	90,92
		0,00	44.698.000,00	79.090.000,00	123.788.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	0,00	1.301.400.000,00	0,00	1.301.400.000,00	(7.565.250,00)	99,42
		0,00	1.293.834.750,00	0,00	1.293.834.750,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	0,00	511.040.000,00	5.500.626.700,00	6.011.666.700,00	(489.118.415,39)	91,86
		0,00	485.261.654,00	5.037.286.630,61	5.522.548.284,61		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/pe meliharaan jaringan irigasi	0,00	93.670.000,00	905.570.600,00	999.240.600,00	(58.948.082,00)	94,10
		0,00	84.406.268,00	855.886.250,00	940.292.518,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 27	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pe meliharaan Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)	0,00	20.450.000,00	2.846.404.000,00	2.866.854.000,00	(397.620.719,39)	86,13
		0,00	18.716.500,00	2.450.516.780,61	2.469.233.280,61		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 28	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	0,00	360.750.000,00	0,00	360.750.000,00	(13.765.493,00)	96,18
		0,00	346.984.507,00	0,00	346.984.507,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 29	Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai	0,00	36.170.000,00	1.748.652.100,00	1.784.822.100,00	(18.784.121,00)	98,95
		0,00	35.154.379,00	1.730.883.600,00	1.766.037.979,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	45.800.000,00	10.248.824.444,00	530.000.000,00	10.824.624.444,00	(568.430.780,00)	94,75
		40.500.000,00	9.849.686.264,00	366.007.400,00	10.256.193.664,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	16.870.000,00	1.077.483.444,00	0,00	1.094.353.444,00	(10.986.750,00)	99,00
		16.850.000,00	1.066.516.694,00	0,00	1.083.366.694,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 08	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	4.800.000,00	102.519.000,00	50.000.000,00	157.319.000,00	(70.193.650,00)	55,38
		0,00	87.125.350,00	0,00	87.125.350,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 12	Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK Fisik TA. 2019)	13.970.000,00	3.318.026.500,00	50.000.000,00	3.381.996.500,00	(281.868.829,00)	91,67
		13.500.000,00	3.086.627.671,00	0,00	3.100.127.671,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 13	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan Air Limbah (DAK Sanitasi Reguler 2019)	10.160.000,00	5.145.490.500,00	0,00	5.155.650.500,00	(27.358.139,00)	99,47
		10.150.000,00	5.118.142.361,00	0,00	5.128.292.361,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 14	Pengebangan Sistem Pelayanan dan Distrbusi Air Minum (Operasional UPT SPAM)	0,00	605.305.000,00	430.000.000,00	1.035.305.000,00	(178.023.412,00)	82,80
		0,00	491.274.188,00	366.007.400,00	857.281.588,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	0,00	7.671.850.000,00	0,00	7.671.850.000,00	(1.557.489.550,00)	79,70
		0,00	6.114.360.450,00	0,00	6.114.360.450,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	0,00	7.671.850.000,00	0,00	7.671.850.000,00	(1.557.489.550,00)	79,70
		0,00	6.114.360.450,00	0,00	6.114.360.450,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 35	Program Pengembangan Tata Ruang	16.850.000,00	123.500.000,00	700.000.000,00	840.350.000,00	(542.800.871,00)	35,41
		13.550.000,00	57.861.129,00	226.138.000,00	297.549.129,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 01	Penataan RTH	16.850.000,00	123.500.000,00	700.000.000,00	840.350.000,00	(542.800.871,00)	35,41
		13.550.000,00	57.861.129,00	226.138.000,00	297.549.129,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 36	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	28.400.000,00	5.703.087.500,00	765.000.000,00	6.496.487.500,00	(224.299.104,00)	96,55
		26.600.000,00	5.489.325.896,00	756.262.500,00	6.272.188.396,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 36 . 01	Pembayaran Rekening listrik PJU	0,00	5.316.337.500,00	0,00	5.316.337.500,00	(144.512.907,00)	97,28
		0,00	5.171.824.593,00	0,00	5.171.824.593,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 36 . 02	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	25.600.000,00	55.900.000,00	765.000.000,00	846.500.000,00	(44.817.747,00)	94,71
		24.250.000,00	21.169.753,00	756.262.500,00	801.682.253,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 36 . 03	Pemeliharaan dan Perawatan PJU	2.800.000,00	330.850.000,00	0,00	333.650.000,00	(34.968.450,00)	89,52
		2.350.000,00	296.331.550,00	0,00	298.681.550,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 37	Program Perencanaan Tata Ruang	3.000.000,00	68.150.000,00	0,00	71.150.000,00	(14.333.022,00)	79,86
		0,00	56.816.978,00	0,00	56.816.978,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 37 . 01	Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	3.000.000,00	68.150.000,00	0,00	71.150.000,00	(14.333.022,00)	79,86
		0,00	56.816.978,00	0,00	56.816.978,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 38	Program Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi	4.000.000,00	114.363.650,00	0,00	118.363.650,00	(66.877.186,00)	43,50
		0,00	51.486.464,00	0,00	51.486.464,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 38 . 01	Perencanaan dan Pembinaan Teknis ke PU an	0,00	44.713.650,00	0,00	44.713.650,00	(26.149.650,00)	41,52
		0,00	18.564.000,00	0,00	18.564.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 38 . 02	Pembinaan Jasa Konstruksi	4.000.000,00	69.650.000,00	0,00	73.650.000,00	(40.727.536,00)	44,70
		0,00	32.922.464,00	0,00	32.922.464,00		
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	689.943.000,00	2.709.885.440,00	1.558.660.000,00	4.958.488.440,00	(165.395.741,07)	96,66
		590.570.000,00	2.653.179.498,93	1.549.343.200,00	4.793.092.698,93		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	689.943.000,00	2.709.885.440,00	1.558.660.000,00	4.958.488.440,00	(165.395.741,07)	96,66
		590.570.000,00	2.653.179.498,93	1.549.343.200,00	4.793.092.698,93		
1.04 . 1.04.01 . 01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN P	689.943.000,00	2.709.885.440,00	1.558.660.000,00	4.958.488.440,00	(165.395.741,07)	96,66
		590.570.000,00	2.653.179.498,93	1.549.343.200,00	4.793.092.698,93		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	296.940.000,00	386.691.440,00	93.750.000,00	777.381.440,00	(78.075.655,00)	89,96
		227.210.000,00	378.705.785,00	93.390.000,00	699.305.785,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00	(139.325,00)	98,92
		0,00	12.760.675,00	0,00	12.760.675,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00	(4.662.400,00)	42,08
		0,00	3.387.600,00	0,00	3.387.600,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	259.500.000,00	0,00	0,00	259.500.000,00	(68.950.000,00)	73,43
		190.550.000,00	0,00	0,00	190.550.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	37.440.000,00	6.414.500,00	0,00	43.854.500,00	(790.000,00)	98,20
		36.660.000,00	6.404.500,00	0,00	43.064.500,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	(35.000,00)	99,51
		0,00	7.065.000,00	0,00	7.065.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	41.749.440,00	0,00	41.749.440,00	(279.440,00)	99,33
		0,00	41.470.000,00	0,00	41.470.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	70.692.500,00	0,00	70.692.500,00	(1.006.500,00)	98,58
		0,00	69.686.000,00	0,00	69.686.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	93.750.000,00	93.750.000,00	(360.000,00)	99,62
		0,00	0,00	93.390.000,00	93.390.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00	0,00	100,00
		0,00	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	35.340.000,00	0,00	35.340.000,00	(996.000,00)	97,18
		0,00	34.344.000,00	0,00	34.344.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	194.410.000,00	0,00	194.410.000,00	(856.990,00)	99,56
		0,00	193.553.010,00	0,00	193.553.010,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	39.600.000,00	71.353.000,00	50.500.000,00	161.453.000,00	(3.263.950,00)	97,98
		39.600.000,00	69.789.050,00	48.800.000,00	158.189.050,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00	(1.700.000,00)	95,58
		0,00	0,00	36.800.000,00	36.800.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	39.600.000,00	71.353.000,00	0,00	110.953.000,00	(1.563.950,00)	98,59
		39.600.000,00	69.789.050,00	0,00	109.389.050,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	19.762.500,00	0,00	19.762.500,00	(1.762.500,00)	91,08
		0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	19.762.500,00	0,00	19.762.500,00	(1.762.500,00)	91,08
		0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	(7.325.000,00)	51,17
		0,00	7.675.000,00	0,00	7.675.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	(7.325.000,00)	51,17
		0,00	7.675.000,00	0,00	7.675.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	300.603.000,00	352.174.500,00	365.000.000,00	1.017.777.500,00	(59.063.596,00)	94,20
		270.960.000,00	326.818.704,00	360.935.200,00	958.713.904,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	208.800.000,00	239.715.000,00	365.000.000,00	813.515.000,00	(58.524.046,00)	92,81
		179.160.000,00	214.895.754,00	360.935.200,00	754.990.954,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 16	Pendamping Program Pengembangan Perumahan (Pendamping Program BSPS)	91.803.000,00	112.459.500,00	0,00	204.262.500,00	(539.550,00)	99,74
		91.800.000,00	111.922.950,00	0,00	203.722.950,00		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	52.800.000,00	1.864.904.000,00	1.049.410.000,00	2.967.114.000,00	(15.905.040,07)	99,46
		52.800.000,00	1.852.190.959,93	1.046.218.000,00	2.951.208.959,93		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 08	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman	52.800.000,00	1.864.904.000,00	1.049.410.000,00	2.967.114.000,00	(15.905.040,07)	99,46
		52.800.000,00	1.852.190.959,93	1.046.218.000,00	2.951.208.959,93		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	4.213.660.000,00	5.426.835.875,00	93.550.000,00	9.734.045.875,00	(159.206.907,00)	98,36
		4.183.117.550,00	5.301.045.543,00	90.675.875,00	9.574.838.968,00		
1.05 . 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4.184.580.000,00	1.883.262.725,00	93.550.000,00	6.161.392.725,00	(131.273.702,00)	97,87
		4.158.237.550,00	1.781.205.598,00	90.675.875,00	6.030.119.023,00		
1.05 . 1.05.01 . 01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEB,	4.184.580.000,00	1.883.262.725,00	93.550.000,00	6.161.392.725,00	(131.273.702,00)	97,87
		4.158.237.550,00	1.781.205.598,00	90.675.875,00	6.030.119.023,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.180.380.000,00	423.219.925,00	0,00	4.603.599.925,00	(35.265.454,00)	99,23
		4.154.037.550,00	414.296.921,00	0,00	4.568.334.471,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00	100,00
		0,00	885.000,00	0,00	885.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00	(736.786,00)	97,16
		0,00	25.163.214,00	0,00	25.163.214,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	32.800.000,00	0,00	32.800.000,00	(7.431.700,00)	77,34
		0,00	25.368.300,00	0,00	25.368.300,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4.180.380.000,00	0,00	0,00	4.180.380.000,00	(26.342.450,00)	99,37
		4.154.037.550,00	0,00	0,00	4.154.037.550,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	1.719.400,00	0,00	1.719.400,00	(400,00)	99,98
		0,00	1.719.000,00	0,00	1.719.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	(4.500,00)	99,96
		0,00	11.745.500,00	0,00	11.745.500,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	26.249.525,00	0,00	26.249.525,00	(5.025,00)	99,98
		0,00	26.244.500,00	0,00	26.244.500,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	20.540.000,00	0,00	20.540.000,00	(268.499,00)	98,69
		0,00	20.271.501,00	0,00	20.271.501,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	(83.000,00)	93,20
		0,00	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	6.596.000,00	0,00	6.596.000,00	0,00	100,00
		0,00	6.596.000,00	0,00	6.596.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	(154.000,00)	99,18
		0,00	18.646.000,00	0,00	18.646.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	276.760.000,00	0,00	276.760.000,00	(239.094,00)	99,91
		0,00	276.520.906,00	0,00	276.520.906,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	277.368.800,00	93.550.000,00	370.918.800,00	(3.101.287,00)	99,16
		0,00	277.141.638,00	90.675.875,00	367.817.513,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	58.550.000,00	58.550.000,00	(84.875,00)	99,86
		0,00	0,00	58.465.125,00	58.465.125,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	(2.789.250,00)	92,03
		0,00	0,00	32.210.750,00	32.210.750,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00	(101.945,00)	99,79
		0,00	48.398.055,00	0,00	48.398.055,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	228.868.800,00	0,00	228.868.800,00	(125.217,00)	99,95
		0,00	228.743.583,00	0,00	228.743.583,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(97.629,00)	99,67
		0,00	29.902.371,00	0,00	29.902.371,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(97.629,00)	99,67
		0,00	29.902.371,00	0,00	29.902.371,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.200.000,00	968.639.000,00	0,00	972.839.000,00	(85.036.532,00)	91,26
		4.200.000,00	883.602.468,00	0,00	887.802.468,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	0,00	800.579.000,00	0,00	800.579.000,00	(80.441.282,00)	89,95
		0,00	720.137.718,00	0,00	720.137.718,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 18	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.200.000,00	142.880.000,00	0,00	147.080.000,00	(1.312.000,00)	99,11
		4.200.000,00	141.568.000,00	0,00	145.768.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 19	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	0,00	25.180.000,00	0,00	25.180.000,00	(3.283.250,00)	86,96
		0,00	21.896.750,00	0,00	21.896.750,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	0,00	60.697.000,00	0,00	60.697.000,00	(1.722.200,00)	97,16
		0,00	58.974.800,00	0,00	58.974.800,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	0,00	60.697.000,00	0,00	60.697.000,00	(1.722.200,00)	97,16
		0,00	58.974.800,00	0,00	58.974.800,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	0,00	123.338.000,00	0,00	123.338.000,00	(6.050.600,00)	95,09
		0,00	117.287.400,00	0,00	117.287.400,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 15	Operasi Penertiban Pekat, Perda, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ	0,00	123.338.000,00	0,00	123.338.000,00	(6.050.600,00)	95,09
		0,00	117.287.400,00	0,00	117.287.400,00		
1.05 . 4.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	3.195.738.100,00	0,00	3.195.738.100,00	(3.359.128,00)	99,89
		0,00	3.192.378.972,00	0,00	3.192.378.972,00		
1.05 . 4.01.02 . 01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	3.195.738.100,00	0,00	3.195.738.100,00	(3.359.128,00)	99,89
		0,00	3.192.378.972,00	0,00	3.192.378.972,00		
1.05 . 4.01.02 . 01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	0,00	3.195.738.100,00	0,00	3.195.738.100,00	(3.359.128,00)	99,89
		0,00	3.192.378.972,00	0,00	3.192.378.972,00		
1.05 . 4.01.02 . 01 . 17 . 04	Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	0,00	332.104.000,00	0,00	332.104.000,00	0,00	100,00
		0,00	332.104.000,00	0,00	332.104.000,00		
1.05 . 4.01.02 . 01 . 17 . 05	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi	0,00	1.424.715.000,00	0,00	1.424.715.000,00	(3.078.685,00)	99,78
		0,00	1.421.636.315,00	0,00	1.421.636.315,00		
1.05 . 4.01.02 . 01 . 17 . 06	Pelaksanaan Hari Besar Islam	0,00	30.361.000,00	0,00	30.361.000,00	(70.000,00)	99,77
		0,00	30.291.000,00	0,00	30.291.000,00		
1.05 . 4.01.02 . 01 . 17 . 07	Safari Ramadhan	0,00	1.043.222.800,00	0,00	1.043.222.800,00	(15.000,00)	100,00
		0,00	1.043.207.800,00	0,00	1.043.207.800,00		
1.05 . 4.01.02 . 01 . 17 . 08	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	0,00	365.335.300,00	0,00	365.335.300,00	(195.443,00)	99,95
		0,00	365.139.857,00	0,00	365.139.857,00		
1.05 . 4.01.16	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29.080.000,00	347.835.050,00	0,00	376.915.050,00	(24.574.077,00)	93,48
		24.880.000,00	327.460.973,00	0,00	352.340.973,00		
1.05 . 4.01.16 . 01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29.080.000,00	347.835.050,00	0,00	376.915.050,00	(24.574.077,00)	93,48
		24.880.000,00	327.460.973,00	0,00	352.340.973,00		
1.05 . 4.01.16 . 01 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	3.920.000,00	21.244.000,00	0,00	25.164.000,00	(4.477.300,00)	82,21
		2.720.000,00	17.966.700,00	0,00	20.686.700,00		
1.05 . 4.01.16 . 01 . 18 . 13	Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama(FKUB)	3.920.000,00	21.244.000,00	0,00	25.164.000,00	(4.477.300,00)	82,21
		2.720.000,00	17.966.700,00	0,00	20.686.700,00		
1.05 . 4.01.16 . 01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	12.380.000,00	221.578.050,00	0,00	233.958.050,00	(15.845.877,00)	93,23
		10.380.000,00	207.732.173,00	0,00	218.112.173,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.05 . 4.01.16 . 01 . 20 . 16	Penunjang Koordinasi Forum Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	0,00	145.719.000,00	0,00	145.719.000,00	(163.927,00)	99,89
		0,00	145.555.073,00	0,00	145.555.073,00		
1.05 . 4.01.16 . 01 . 20 . 17	Pemantauan dan Pengendalian Warga Negara Asing (WNA)	3.980.000,00	16.752.500,00	0,00	20.732.500,00	(2.965.500,00)	85,70
		2.980.000,00	14.787.000,00	0,00	17.767.000,00		
1.05 . 4.01.16 . 01 . 20 . 18	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	3.980.000,00	24.425.000,00	0,00	28.405.000,00	(4.651.400,00)	83,62
		2.980.000,00	20.773.600,00	0,00	23.753.600,00		
1.05 . 4.01.16 . 01 . 20 . 19	Penyuluhan Anti Narkoba dalam rangka Peringatan Hari HANI	4.420.000,00	34.681.550,00	0,00	39.101.550,00	(8.065.050,00)	79,37
		4.420.000,00	26.616.500,00	0,00	31.036.500,00		
1.05 . 4.01.16 . 01 . 21	Program peningkatan pendidikan politik masyarakat	12.780.000,00	105.013.000,00	0,00	117.793.000,00	(4.250.900,00)	96,39
		11.780.000,00	101.762.100,00	0,00	113.542.100,00		
1.05 . 4.01.16 . 01 . 21 . 08	Bimbingan Teknis Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol Pengurus Partai Politik	3.600.000,00	29.555.000,00	0,00	33.155.000,00	(2.194.500,00)	93,38
		2.600.000,00	28.360.500,00	0,00	30.960.500,00		
1.05 . 4.01.16 . 01 . 21 . 10	Penyuluhan kepada masyarakat (politik)	9.180.000,00	49.657.250,00	0,00	58.837.250,00	(170.000,00)	99,71
		9.180.000,00	49.487.250,00	0,00	58.667.250,00		
1.05 . 4.01.16 . 01 . 21 . 12	Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Pemilu	0,00	25.800.750,00	0,00	25.800.750,00	(1.886.400,00)	92,69
		0,00	23.914.350,00	0,00	23.914.350,00		
1.06	Sosial	1.378.970.000,00	2.493.312.776,00	72.850.000,00	3.945.132.776,00	(43.487.610,00)	98,90
		1.373.610.000,00	2.455.607.166,00	72.428.000,00	3.901.645.166,00		
1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KB	789.070.000,00	1.574.086.676,00	26.450.000,00	2.389.606.676,00	(9.635.330,00)	99,60
		786.910.000,00	1.566.611.346,00	26.450.000,00	2.379.971.346,00		
1.06 . 1.06.01 . 01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLI	789.070.000,00	1.574.086.676,00	26.450.000,00	2.389.606.676,00	(9.635.330,00)	99,60
		786.910.000,00	1.566.611.346,00	26.450.000,00	2.379.971.346,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	789.070.000,00	627.350.526,00	0,00	1.416.420.526,00	(4.241.247,00)	99,70
		786.910.000,00	625.269.279,00	0,00	1.412.179.279,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	(1.000,00)	99,99
		0,00	8.999.000,00	0,00	8.999.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	40.480.000,00	0,00	40.480.000,00	(2.035.573,00)	94,97
		0,00	38.444.427,00	0,00	38.444.427,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	10.229.126,00	0,00	10.229.126,00	(26,00)	100,00
		0,00	10.229.100,00	0,00	10.229.100,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	789.070.000,00	0,00	0,00	789.070.000,00	(2.160.000,00)	99,73
		786.910.000,00	0,00	0,00	786.910.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	94.040.500,00	0,00	94.040.500,00	(500,00)	100,00
		0,00	94.040.000,00	0,00	94.040.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	76.250.900,00	0,00	76.250.900,00	(100,00)	100,00
		0,00	76.250.800,00	0,00	76.250.800,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	6.854.000,00	0,00	6.854.000,00	(1.000,00)	99,99
		0,00	6.853.000,00	0,00	6.853.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	(5.000,00)	99,82
		0,00	2.755.000,00	0,00	2.755.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	293.561.000,00	0,00	293.561.000,00	(23.048,00)	99,99
		0,00	293.537.952,00	0,00	293.537.952,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	0,00	44.350.000,00	0,00	44.350.000,00	(15.000,00)	99,97
		0,00	44.335.000,00	0,00	44.335.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	217.554.700,00	26.450.000,00	244.004.700,00	(4.701,00)	100,00
		0,00	217.549.999,00	26.450.000,00	243.999.999,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	10.950.000,00	10.950.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	217.554.700,00	0,00	217.554.700,00	(4.701,00)	100,00
		0,00	217.549.999,00	0,00	217.549.999,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.06 . 1.06.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	21.193.300,00	0,00	21.193.300,00	0,00	100,00
		0,00	21.193.300,00	0,00	21.193.300,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	21.193.300,00	0,00	21.193.300,00	0,00	100,00
		0,00	21.193.300,00	0,00	21.193.300,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	0,00	146.605.000,00	0,00	146.605.000,00	(625.000,00)	99,57
		0,00	145.980.000,00	0,00	145.980.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	0,00	102.860.000,00	0,00	102.860.000,00	(329.500,00)	99,68
		0,00	102.530.500,00	0,00	102.530.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 11	Monitoring dan Evaluasi Bansos Rastra/BPNT	0,00	43.745.000,00	0,00	43.745.000,00	(295.500,00)	99,32
		0,00	43.449.500,00	0,00	43.449.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	0,00	374.055.200,00	0,00	374.055.200,00	(3.901.332,00)	98,96
		0,00	370.153.868,00	0,00	370.153.868,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	0,00	23.590.000,00	0,00	23.590.000,00	(1.076.500,00)	95,44
		0,00	22.513.500,00	0,00	22.513.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	0,00	9.775.200,00	0,00	9.775.200,00	(6.200,00)	99,94
		0,00	9.769.000,00	0,00	9.769.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	0,00	76.585.000,00	0,00	76.585.000,00	(1.885.250,00)	97,54
		0,00	74.699.750,00	0,00	74.699.750,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 15	Pelayanan dan pelindungan sosial lansia	0,00	81.115.000,00	0,00	81.115.000,00	(220.250,00)	99,73
		0,00	80.894.750,00	0,00	80.894.750,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 16	Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan PMKS lainnya	0,00	115.460.000,00	0,00	115.460.000,00	(175.282,00)	99,85
		0,00	115.284.718,00	0,00	115.284.718,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 17	Pelayanan dan Pendampingan Penyandang Disabilitas diluar Panti	0,00	34.365.000,00	0,00	34.365.000,00	(227.500,00)	99,34
		0,00	34.137.500,00	0,00	34.137.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 18	Pelayanan dan Pembinaan bagi Tuna Sosial dan PMKS Lainnya di Luar Panti.	0,00	33.165.000,00	0,00	33.165.000,00	(310.350,00)	99,06
		0,00	32.854.650,00	0,00	32.854.650,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	0,00	51.481.500,00	0,00	51.481.500,00	(527.750,00)	98,97
		0,00	50.953.750,00	0,00	50.953.750,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 06	Penguatan Kelembagaan Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	0,00	51.481.500,00	0,00	51.481.500,00	(527.750,00)	98,97
		0,00	50.953.750,00	0,00	50.953.750,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	0,00	135.846.450,00	0,00	135.846.450,00	(335.300,00)	99,75
		0,00	135.511.150,00	0,00	135.511.150,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 01	Jaminan Sosial untuk Anak Yatim dari Keluarga Miskin	0,00	50.001.450,00	0,00	50.001.450,00	(134.200,00)	99,73
		0,00	49.867.250,00	0,00	49.867.250,00		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 02	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan	0,00	85.845.000,00	0,00	85.845.000,00	(201.100,00)	99,77
		0,00	85.643.900,00	0,00	85.643.900,00		
1.06 . 1.06.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	589.900.000,00	919.226.100,00	46.400.000,00	1.555.526.100,00	(33.852.280,00)	97,82
		586.700.000,00	888.995.820,00	45.978.000,00	1.521.673.820,00		
1.06 . 1.06.02 . 01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	589.900.000,00	919.226.100,00	46.400.000,00	1.555.526.100,00	(33.852.280,00)	97,82
		586.700.000,00	888.995.820,00	45.978.000,00	1.521.673.820,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	579.900.000,00	377.357.100,00	15.400.000,00	972.657.100,00	(27.480.530,00)	97,17
		576.700.000,00	353.090.570,00	15.386.000,00	945.176.570,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	(9.000,00)	99,96
		0,00	23.991.000,00	0,00	23.991.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	56.950.000,00	0,00	56.950.000,00	(16.441.200,00)	71,13
		0,00	40.508.800,00	0,00	40.508.800,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	579.900.000,00	0,00	0,00	579.900.000,00	(3.200.000,00)	99,45
		576.700.000,00	0,00	0,00	576.700.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	7.817.300,00	0,00	7.817.300,00	(1.340.230,00)	82,86
		0,00	6.477.070,00	0,00	6.477.070,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	(1.005.000,00)	81,39
		0,00	4.395.000,00	0,00	4.395.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	13.691.800,00	0,00	13.691.800,00	(6.000,00)	99,96
		0,00	13.685.800,00	0,00	13.685.800,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	(1.052.100,00)	91,97
		0,00	12.047.900,00	0,00	12.047.900,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	0,00	100,00
		0,00	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	(14.000,00)	99,91
		0,00	0,00	15.386.000,00	15.386.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	8.478.000,00	0,00	8.478.000,00	(406.500,00)	95,21
		0,00	8.071.500,00	0,00	8.071.500,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	67.650.000,00	0,00	67.650.000,00	(3.830.000,00)	94,34
		0,00	63.820.000,00	0,00	63.820.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	175.275.000,00	0,00	175.275.000,00	(176.500,00)	99,90
		0,00	175.098.500,00	0,00	175.098.500,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	128.289.000,00	31.000.000,00	159.289.000,00	(5.620.500,00)	96,47
		0,00	123.076.500,00	30.592.000,00	153.668.500,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	(408.000,00)	98,68
		0,00	0,00	30.592.000,00	30.592.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	(4.000.000,00)	88,24
		0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	94.289.000,00	0,00	94.289.000,00	(1.212.500,00)	98,71
		0,00	93.076.500,00	0,00	93.076.500,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	41.300.000,00	0,00	41.300.000,00	(300.000,00)	99,27
		0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	41.300.000,00	0,00	41.300.000,00	(300.000,00)	99,27
		0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(372.750,00)	98,76
		0,00	29.627.250,00	0,00	29.627.250,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(372.750,00)	98,76
		0,00	29.627.250,00	0,00	29.627.250,00		
1.06 . 4.01.02 . 01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	0,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	(45.000,00)	99,98
		0,00	279.955.000,00	0,00	279.955.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.06 . 4.01.02 . 01 . 21 . 07	Sosialisasi dan Fasilitasi Operasi Bibir Sumbing	0,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	(45.000,00)	99,98
		0,00	279.955.000,00	0,00	279.955.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	0,00	25.830.000,00	0,00	25.830.000,00	0,00	100,00
		0,00	25.830.000,00	0,00	25.830.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 22 . 12	Jambore Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Propinsi	0,00	25.830.000,00	0,00	25.830.000,00	0,00	100,00
		0,00	25.830.000,00	0,00	25.830.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 23	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	10.000.000,00	36.450.000,00	0,00	46.450.000,00	(33.500,00)	99,93
		10.000.000,00	36.416.500,00	0,00	46.416.500,00		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 23 . 02	Operasional Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB)	10.000.000,00	36.450.000,00	0,00	46.450.000,00	(33.500,00)	99,93
		10.000.000,00	36.416.500,00	0,00	46.416.500,00		
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	7.976.360.000,00	29.514.835.985,00	4.194.457.050,00	41.685.653.035,00	(1.027.328.419,00)	97,54
		7.763.447.000,00	28.888.822.548,00	4.006.055.068,00	40.658.324.616,00		
2.01	Tenaga Kerja	2.200.000,00	942.704.700,00	0,00	944.904.700,00	(89.514.025,00)	90,53
		2.200.000,00	853.190.675,00	0,00	855.390.675,00		
2.01 . 3.08.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	2.200.000,00	942.704.700,00	0,00	944.904.700,00	(89.514.025,00)	90,53
		2.200.000,00	853.190.675,00	0,00	855.390.675,00		
2.01 . 3.08.01 . 01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	2.200.000,00	942.704.700,00	0,00	944.904.700,00	(89.514.025,00)	90,53
		2.200.000,00	853.190.675,00	0,00	855.390.675,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.400.000,00	155.339.000,00	0,00	156.739.000,00	(16.176.213,00)	89,68
		1.400.000,00	139.162.787,00	0,00	140.562.787,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 15 . 06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	0,00	93.059.000,00	0,00	93.059.000,00	(7.241.462,00)	92,22
		0,00	85.817.538,00	0,00	85.817.538,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 15 . 15	Operasional Administrasi BLK	1.400.000,00	62.280.000,00	0,00	63.680.000,00	(8.934.751,00)	85,97
		1.400.000,00	53.345.249,00	0,00	54.745.249,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	0,00	313.864.250,00	0,00	313.864.250,00	(24.864.412,00)	92,08
		0,00	288.999.838,00	0,00	288.999.838,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 16 . 01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	0,00	28.086.750,00	0,00	28.086.750,00	(1.579.500,00)	94,38
		0,00	26.507.250,00	0,00	26.507.250,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.01 . 3.08.01 . 01 . 16 . 11	Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja	0,00	240.752.500,00	0,00	240.752.500,00	(7.952.665,00)	96,70
		0,00	232.799.835,00	0,00	232.799.835,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 16 . 16	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	0,00	45.025.000,00	0,00	45.025.000,00	(15.332.247,00)	65,95
		0,00	29.692.753,00	0,00	29.692.753,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	0,00	71.474.950,00	0,00	71.474.950,00	(32.189.800,00)	54,96
		0,00	39.285.150,00	0,00	39.285.150,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 17 . 02	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	0,00	23.551.200,00	0,00	23.551.200,00	(4.806.200,00)	79,59
		0,00	18.745.000,00	0,00	18.745.000,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 17 . 26	Pendataan Perusahaan dan Penyerapan Tenaga Kerja	0,00	17.128.750,00	0,00	17.128.750,00	(7.559.600,00)	55,87
		0,00	9.569.150,00	0,00	9.569.150,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 17 . 33	Pembinaan P2K3 dan LKS Bipartit	0,00	30.795.000,00	0,00	30.795.000,00	(19.824.000,00)	35,63
		0,00	10.971.000,00	0,00	10.971.000,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 27	Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja	800.000,00	402.026.500,00	0,00	402.826.500,00	(16.283.600,00)	95,96
		800.000,00	385.742.900,00	0,00	386.542.900,00		
2.01 . 3.08.01 . 01 . 27 . 01	Padat Karya Infrastruktur	800.000,00	402.026.500,00	0,00	402.826.500,00	(16.283.600,00)	95,96
		800.000,00	385.742.900,00	0,00	386.542.900,00		
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.500.000,00	837.040.900,00	0,00	868.540.900,00	(13.949.679,00)	98,39
		27.550.000,00	827.041.221,00	0,00	854.591.221,00		
2.02 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KB	31.500.000,00	837.040.900,00	0,00	868.540.900,00	(13.949.679,00)	98,39
		27.550.000,00	827.041.221,00	0,00	854.591.221,00		
2.02 . 1.06.01 . 01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLI	31.500.000,00	837.040.900,00	0,00	868.540.900,00	(13.949.679,00)	98,39
		27.550.000,00	827.041.221,00	0,00	854.591.221,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	12.800.000,00	97.615.000,00	0,00	110.415.000,00	(1.465.500,00)	98,67
		12.150.000,00	96.799.500,00	0,00	108.949.500,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 15 . 06	Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	12.800.000,00	97.615.000,00	0,00	110.415.000,00	(1.465.500,00)	98,67
		12.150.000,00	96.799.500,00	0,00	108.949.500,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	4.800.000,00	625.085.900,00	0,00	629.885.900,00	(6.939.411,00)	98,90
		4.500.000,00	618.446.489,00	0,00	622.946.489,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.02 . 1.06.01 . 01 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	4.800.000,00	625.085.900,00	0,00	629.885.900,00	(6.939.411,00)	98,90
		4.500.000,00	618.446.489,00	0,00	622.946.489,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	13.900.000,00	114.340.000,00	0,00	128.240.000,00	(5.544.768,00)	95,68
		10.900.000,00	111.795.232,00	0,00	122.695.232,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 19 . 08	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PeTP2A)	4.000.000,00	46.637.500,00	0,00	50.637.500,00	(5.528.768,00)	89,08
		1.000.000,00	44.108.732,00	0,00	45.108.732,00		
2.02 . 1.06.01 . 01 . 19 . 09	Penguatan Kelembagaan PUG	9.900.000,00	67.702.500,00	0,00	77.602.500,00	(16.000,00)	99,98
		9.900.000,00	67.686.500,00	0,00	77.586.500,00		
2.03	Pangan	570.180.000,00	944.753.500,00	20.135.000,00	1.535.068.500,00	(42.345.353,00)	97,24
		545.220.000,00	927.368.147,00	20.135.000,00	1.492.723.147,00		
2.03 . 2.03.01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	570.180.000,00	944.753.500,00	20.135.000,00	1.535.068.500,00	(42.345.353,00)	97,24
		545.220.000,00	927.368.147,00	20.135.000,00	1.492.723.147,00		
2.03 . 2.03.01 . 01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	570.180.000,00	944.753.500,00	20.135.000,00	1.535.068.500,00	(42.345.353,00)	97,24
		545.220.000,00	927.368.147,00	20.135.000,00	1.492.723.147,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	561.480.000,00	468.341.000,00	20.135.000,00	1.049.956.000,00	(31.963.519,00)	96,96
		537.520.000,00	460.337.481,00	20.135.000,00	1.017.992.481,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	58.800.000,00	0,00	58.800.000,00	(4.691.448,00)	92,02
		0,00	54.108.552,00	0,00	54.108.552,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	(3.097.000,00)	65,59
		0,00	5.903.000,00	0,00	5.903.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	561.480.000,00	0,00	0,00	561.480.000,00	(23.960.000,00)	95,73
		537.520.000,00	0,00	0,00	537.520.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	(2.000,00)	99,98
		0,00	9.248.000,00	0,00	9.248.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	(1.000,00)	100,00
		0,00	39.999.000,00	0,00	39.999.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	21.850.000,00	0,00	21.850.000,00	(74,00)	100,00
		0,00	21.849.926,00	0,00	21.849.926,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	4.206.000,00	0,00	4.206.000,00	(4.000,00)	99,90
		0,00	4.202.000,00	0,00	4.202.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	20.135.000,00	20.135.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	20.135.000,00	20.135.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	11.215.000,00	0,00	11.215.000,00	(7.000,00)	99,94
		0,00	11.208.000,00	0,00	11.208.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	64.380.000,00	0,00	64.380.000,00	(61.500,00)	99,90
		0,00	64.318.500,00	0,00	64.318.500,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	247.075.000,00	0,00	247.075.000,00	(139.497,00)	99,94
		0,00	246.935.503,00	0,00	246.935.503,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	209.557.500,00	0,00	209.557.500,00	(1.245.334,00)	99,41
		0,00	208.312.166,00	0,00	208.312.166,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	179.557.500,00	0,00	179.557.500,00	(1.245.334,00)	99,31
		0,00	178.312.166,00	0,00	178.312.166,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00	(5.000,00)	99,94
		0,00	8.945.000,00	0,00	8.945.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00	(5.000,00)	99,94
		0,00	8.945.000,00	0,00	8.945.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	8.700.000,00	257.905.000,00	0,00	266.605.000,00	(9.131.500,00)	96,57
		7.700.000,00	249.773.500,00	0,00	257.473.500,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 05	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	0,00	41.400.000,00	0,00	41.400.000,00	(87.500,00)	99,79
		0,00	41.312.500,00	0,00	41.312.500,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 08	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	0,00	57.010.000,00	0,00	57.010.000,00	(6.632.500,00)	88,37
		0,00	50.377.500,00	0,00	50.377.500,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 13	Lomba cipta menu B2SA tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Nasional	1.700.000,00	70.165.000,00	0,00	71.865.000,00	(196.000,00)	99,73
		1.700.000,00	69.969.000,00	0,00	71.669.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 14	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	6.000.000,00	12.995.000,00	0,00	18.995.000,00	(495.250,00)	97,39
		6.000.000,00	12.499.750,00	0,00	18.499.750,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 15	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	1.000.000,00	11.675.000,00	0,00	12.675.000,00	(1.158.000,00)	90,86
		0,00	11.517.000,00	0,00	11.517.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 17	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	0,00	64.660.000,00	0,00	64.660.000,00	(562.250,00)	99,13
		0,00	64.097.750,00	0,00	64.097.750,00		
2.04	Pertanahan	38.000.000,00	225.862.000,00	5.500.000,00	269.362.000,00	(17.480.606,00)	93,51
		31.650.000,00	214.767.894,00	5.463.500,00	251.881.394,00		
2.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	38.000.000,00	225.862.000,00	5.500.000,00	269.362.000,00	(17.480.606,00)	93,51
		31.650.000,00	214.767.894,00	5.463.500,00	251.881.394,00		
2.04 . 1.04.01 . 01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	38.000.000,00	225.862.000,00	5.500.000,00	269.362.000,00	(17.480.606,00)	93,51
		31.650.000,00	214.767.894,00	5.463.500,00	251.881.394,00		
2.04 . 1.04.01 . 01 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	0,00	154.655.000,00	5.500.000,00	160.155.000,00	(2.844.006,00)	98,22
		0,00	151.847.494,00	5.463.500,00	157.310.994,00		
2.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	0,00	154.655.000,00	5.500.000,00	160.155.000,00	(2.844.006,00)	98,22
		0,00	151.847.494,00	5.463.500,00	157.310.994,00		
2.04 . 1.04.01 . 01 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	38.000.000,00	71.207.000,00	0,00	109.207.000,00	(14.636.600,00)	86,60
		31.650.000,00	62.920.400,00	0,00	94.570.400,00		
2.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 01	Penanganan konflik-konflik pertanahan	38.000.000,00	71.207.000,00	0,00	109.207.000,00	(14.636.600,00)	86,60
		31.650.000,00	62.920.400,00	0,00	94.570.400,00		
2.05	Lingkungan Hidup	928.190.000,00	2.631.839.360,00	54.300.000,00	3.614.329.360,00	(26.222.366,00)	99,27
		926.450.000,00	2.607.774.594,00	53.882.400,00	3.588.106.994,00		
2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	928.190.000,00	2.631.839.360,00	54.300.000,00	3.614.329.360,00	(26.222.366,00)	99,27
		926.450.000,00	2.607.774.594,00	53.882.400,00	3.588.106.994,00		
2.05 . 2.05.01 . 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	928.190.000,00	2.631.839.360,00	54.300.000,00	3.614.329.360,00	(26.222.366,00)	99,27
		926.450.000,00	2.607.774.594,00	53.882.400,00	3.588.106.994,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	855.140.000,00	390.593.550,00	10.000.000,00	1.255.733.550,00	(8.865.713,00)	99,29
		853.850.000,00	383.172.837,00	9.845.000,00	1.246.867.837,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	(10.000,00)	99,60
		0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	52.596.000,00	0,00	52.596.000,00	(106.409,00)	99,80
		0,00	52.489.591,00	0,00	52.489.591,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00	(6.236.450,00)	57,72
		0,00	8.513.550,00	0,00	8.513.550,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	855.140.000,00	0,00	0,00	855.140.000,00	(1.290.000,00)	99,85
		853.850.000,00	0,00	0,00	853.850.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	(24.000,00)	99,83
		0,00	13.776.000,00	0,00	13.776.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	34.975.650,00	0,00	34.975.650,00	(25.450,00)	99,93
		0,00	34.950.200,00	0,00	34.950.200,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	60.637.500,00	0,00	60.637.500,00	(499.820,00)	99,18
		0,00	60.137.680,00	0,00	60.137.680,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	910.400,00	0,00	910.400,00	0,00	100,00
		0,00	910.400,00	0,00	910.400,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	(70.000,00)	99,00
		0,00	0,00	6.930.000,00	6.930.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	6.589.000,00	3.000.000,00	9.589.000,00	(151.000,00)	98,43
		0,00	6.523.000,00	2.915.000,00	9.438.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	49.380.000,00	0,00	49.380.000,00	(42.000,00)	99,91
		0,00	49.338.000,00	0,00	49.338.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	154.455.000,00	0,00	154.455.000,00	(410.584,00)	99,73
		0,00	154.044.416,00	0,00	154.044.416,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	102.814.500,00	0,00	102.814.500,00	(153.250,00)	99,85
		0,00	102.661.250,00	0,00	102.661.250,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(30.850,00)	99,90
		0,00	29.969.150,00	0,00	29.969.150,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	72.814.500,00	0,00	72.814.500,00	(122.400,00)	99,83
		0,00	72.692.100,00	0,00	72.692.100,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	19.750.000,00	0,00	19.750.000,00	(52.398,00)	99,73
		0,00	19.697.602,00	0,00	19.697.602,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	19.750.000,00	0,00	19.750.000,00	(52.398,00)	99,73
		0,00	19.697.602,00	0,00	19.697.602,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	0,00	423.462.600,00	1.800.000,00	425.262.600,00	(9.875.600,00)	97,68
		0,00	413.627.000,00	1.760.000,00	415.387.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	0,00	19.996.000,00	0,00	19.996.000,00	(149.500,00)	99,25
		0,00	19.846.500,00	0,00	19.846.500,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	0,00	403.466.600,00	1.800.000,00	405.266.600,00	(9.726.100,00)	97,60
		0,00	393.780.500,00	1.760.000,00	395.540.500,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	65.000.000,00	476.400.100,00	40.500.000,00	581.900.100,00	(4.544.326,00)	99,22
		64.700.000,00	472.358.374,00	40.297.400,00	577.355.774,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	0,00	152.970.000,00	0,00	152.970.000,00	(1.925.796,00)	98,74
		0,00	151.044.204,00	0,00	151.044.204,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	0,00	16.443.800,00	0,00	16.443.800,00	(198.300,00)	98,79
		0,00	16.245.500,00	0,00	16.245.500,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	65.000.000,00	142.034.000,00	0,00	207.034.000,00	(671.208,00)	99,68
		64.700.000,00	141.662.792,00	0,00	206.362.792,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	0,00	4.341.050,00	0,00	4.341.050,00	(375.550,00)	91,35
		0,00	3.965.500,00	0,00	3.965.500,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 25	Pengkajian dampak lingkungan dan pengawasan jenis usaha / kegiatan	0,00	34.504.500,00	0,00	34.504.500,00	(276.258,00)	99,20
		0,00	34.228.242,00	0,00	34.228.242,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 27	Pendukung Operasional Laboratorium	0,00	67.165.000,00	17.300.000,00	84.465.000,00	(375.464,00)	99,56
		0,00	66.892.136,00	17.197.400,00	84.089.536,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 28	Pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3	0,00	17.218.750,00	0,00	17.218.750,00	(109.250,00)	99,37
		0,00	17.109.500,00	0,00	17.109.500,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 29	Gerakan SUMBAR Bersih (GSB)	0,00	41.723.000,00	23.200.000,00	64.923.000,00	(612.500,00)	99,06
		0,00	41.210.500,00	23.100.000,00	64.310.500,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	0,00	81.689.300,00	0,00	81.689.300,00	(1.366.250,00)	98,33
		0,00	80.323.050,00	0,00	80.323.050,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	0,00	36.556.050,00	0,00	36.556.050,00	(205.500,00)	99,44
		0,00	36.350.550,00	0,00	36.350.550,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 21	Pengembangan Dampak Perubahan Iklim	0,00	36.537.500,00	0,00	36.537.500,00	(21.750,00)	99,94
		0,00	36.515.750,00	0,00	36.515.750,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 22	Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	0,00	8.595.750,00	0,00	8.595.750,00	(1.139.000,00)	86,75
		0,00	7.456.750,00	0,00	7.456.750,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.000.000,00	164.313.250,00	0,00	165.313.250,00	(954.948,00)	99,42
		1.000.000,00	163.358.302,00	0,00	164.358.302,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	1.000.000,00	82.242.750,00	0,00	83.242.750,00	(868.348,00)	98,96
		1.000.000,00	81.374.402,00	0,00	82.374.402,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 07	Inventarisasi Penyusunan Data Base Pengelolaan Lingkungan	0,00	25.855.500,00	0,00	25.855.500,00	(82.500,00)	99,68
		0,00	25.773.000,00	0,00	25.773.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 12	Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)	0,00	56.215.000,00	0,00	56.215.000,00	(4.100,00)	99,99
		0,00	56.210.900,00	0,00	56.210.900,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	0,00	27.677.900,00	2.000.000,00	29.677.900,00	(39.721,00)	99,87
		0,00	27.658.179,00	1.980.000,00	29.638.179,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	0,00	27.677.900,00	2.000.000,00	29.677.900,00	(39.721,00)	99,87
		0,00	27.658.179,00	1.980.000,00	29.638.179,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25	Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan	7.050.000,00	945.138.160,00	0,00	952.188.160,00	(370.160,00)	99,96
		6.900.000,00	944.918.000,00	0,00	951.818.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 01	Penanaman Pohon Bambu dan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (DBH DR)	7.050.000,00	945.138.160,00	0,00	952.188.160,00	(370.160,00)	99,96
		6.900.000,00	944.918.000,00	0,00	951.818.000,00		
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	838.130.000,00	1.780.819.850,00	1.324.265.400,00	3.943.215.250,00	(48.651.067,00)	98,77
		819.550.000,00	1.751.036.614,00	1.323.977.569,00	3.894.564.183,00		
2.06 . 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	838.130.000,00	1.780.819.850,00	1.324.265.400,00	3.943.215.250,00	(48.651.067,00)	98,77
		819.550.000,00	1.751.036.614,00	1.323.977.569,00	3.894.564.183,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.06 . 2.06.01 . 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	838.130.000,00	1.780.819.850,00	1.324.265.400,00	3.943.215.250,00	(48.651.067,00)	98,77
		819.550.000,00	1.751.036.614,00	1.323.977.569,00	3.894.564.183,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	523.980.000,00	641.419.650,00	0,00	1.165.399.650,00	(19.792.576,00)	98,30
		517.500.000,00	628.107.074,00	0,00	1.145.607.074,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	(162.000,00)	95,74
		0,00	3.638.000,00	0,00	3.638.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	202.800.000,00	0,00	202.800.000,00	(9.329.598,00)	95,40
		0,00	193.470.402,00	0,00	193.470.402,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	(28.000,00)	99,94
		0,00	45.972.000,00	0,00	45.972.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	(625.950,00)	84,35
		0,00	3.374.050,00	0,00	3.374.050,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	523.480.000,00	0,00	0,00	523.480.000,00	(6.480.000,00)	98,76
		517.000.000,00	0,00	0,00	517.000.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	46.641.650,00	0,00	46.641.650,00	(132.250,00)	99,72
		0,00	46.509.400,00	0,00	46.509.400,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	500.000,00	151.290.000,00	0,00	151.790.000,00	(725.200,00)	99,52
		500.000,00	150.564.800,00	0,00	151.064.800,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	(6.000,00)	99,67
		0,00	1.821.000,00	0,00	1.821.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	25.010.000,00	0,00	25.010.000,00	(191.000,00)	99,24
		0,00	24.819.000,00	0,00	24.819.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	154.371.000,00	0,00	154.371.000,00	(2.112.578,00)	98,63
		0,00	152.258.422,00	0,00	152.258.422,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.500.000,00	90.990.200,00	1.202.565.400,00	1.295.055.600,00	(11.497.600,00)	99,11
		1.500.000,00	79.760.000,00	1.202.298.000,00	1.283.558.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	500.000,00	0,00	930.360.000,00	930.860.000,00	0,00	100,00
		500.000,00	0,00	930.360.000,00	930.860.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	41.600.000,00	41.600.000,00	(70.000,00)	99,83
		0,00	0,00	41.530.000,00	41.530.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	500.000,00	0,00	81.400.000,00	81.900.000,00	0,00	100,00
		500.000,00	0,00	81.400.000,00	81.900.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	500.000,00	0,00	149.205.400,00	149.705.400,00	(197.400,00)	99,87
		500.000,00	0,00	149.008.000,00	149.508.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	90.990.200,00	0,00	90.990.200,00	(11.230.200,00)	87,66
		0,00	79.760.000,00	0,00	79.760.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	(241.894,00)	98,39
		0,00	14.758.106,00	0,00	14.758.106,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	(241.894,00)	98,39
		0,00	14.758.106,00	0,00	14.758.106,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	312.650.000,00	1.033.410.000,00	121.700.000,00	1.467.760.000,00	(17.118.997,00)	98,83
		300.550.000,00	1.028.411.434,00	121.679.569,00	1.450.641.003,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	550.000,00	256.970.000,00	0,00	257.520.000,00	(1.385.750,00)	99,46
		0,00	256.134.250,00	0,00	256.134.250,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 11	Sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.050.000,00	36.525.000,00	0,00	53.575.000,00	0,00	100,00
		17.050.000,00	36.525.000,00	0,00	53.575.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 39	Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (SI AK)	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	(210.000,00)	99,46
		0,00	38.790.000,00	0,00	38.790.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 42	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	0,00	303.781.000,00	0,00	303.781.000,00	(223.494,00)	99,93
		0,00	303.557.506,00	0,00	303.557.506,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 46	Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online	500.000,00	18.000.000,00	121.700.000,00	140.200.000,00	(3.505.753,00)	97,50
		500.000,00	14.514.678,00	121.679.569,00	136.694.247,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 47	Pelayanan Dokumen Kependudukan	293.550.000,00	0,00	0,00	293.550.000,00	(11.550.000,00)	96,07
		282.000.000,00	0,00	0,00	282.000.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 48	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	1.000.000,00	379.134.000,00	0,00	380.134.000,00	(244.000,00)	99,94
		1.000.000,00	378.890.000,00	0,00	379.890.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	418.530.000,00	2.314.551.500,00	54.100.000,00	2.787.181.500,00	(12.140.419,00)	99,56
		415.220.000,00	2.305.721.081,00	54.100.000,00	2.775.041.081,00		
2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	418.530.000,00	2.314.551.500,00	54.100.000,00	2.787.181.500,00	(12.140.419,00)	99,56
		415.220.000,00	2.305.721.081,00	54.100.000,00	2.775.041.081,00		
2.07 . 2.07.01 . 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	418.530.000,00	2.314.551.500,00	54.100.000,00	2.787.181.500,00	(12.140.419,00)	99,56
		415.220.000,00	2.305.721.081,00	54.100.000,00	2.775.041.081,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	359.580.000,00	494.155.600,00	0,00	853.735.600,00	(7.114.476,00)	99,17
		357.120.000,00	489.501.124,00	0,00	846.621.124,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	6.030.000,00	0,00	6.030.000,00	0,00	100,00
		0,00	6.030.000,00	0,00	6.030.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	47.700.000,00	0,00	47.700.000,00	(2.035.276,00)	95,73
		0,00	45.664.724,00	0,00	45.664.724,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	(1.003.200,00)	81,14
		0,00	4.316.800,00	0,00	4.316.800,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	359.580.000,00	0,00	0,00	359.580.000,00	(2.460.000,00)	99,32
		357.120.000,00	0,00	0,00	357.120.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	(50.000,00)	99,34
		0,00	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	82.640.600,00	0,00	82.640.600,00	(3.500,00)	100,00
		0,00	82.637.100,00	0,00	82.637.100,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	74.050.000,00	0,00	74.050.000,00	(30.800,00)	99,96
		0,00	74.019.200,00	0,00	74.019.200,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00	(145.000,00)	95,96
		0,00	3.445.000,00	0,00	3.445.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	9.676.000,00	0,00	9.676.000,00	(1.172.000,00)	87,89
		0,00	8.504.000,00	0,00	8.504.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	28.030.000,00	0,00	28.030.000,00	(151.000,00)	99,46
		0,00	27.879.000,00	0,00	27.879.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	224.725.000,00	0,00	224.725.000,00	(59.700,00)	99,97
		0,00	224.665.300,00	0,00	224.665.300,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	0,00	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00	(4.000,00)	99,92
		0,00	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	141.232.000,00	54.100.000,00	195.332.000,00	(72.304,00)	99,96
		0,00	141.159.696,00	54.100.000,00	195.259.696,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	37.700.000,00	37.700.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	141.232.000,00	0,00	141.232.000,00	(72.304,00)	99,95
		0,00	141.159.696,00	0,00	141.159.696,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	19.000.750,00	0,00	19.000.750,00	(120.750,00)	99,36
		0,00	18.880.000,00	0,00	18.880.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	19.000.750,00	0,00	19.000.750,00	(120.750,00)	99,36
		0,00	18.880.000,00	0,00	18.880.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	33.350.000,00	523.678.050,00	0,00	557.028.050,00	(2.161.835,00)	99,61
		33.300.000,00	521.566.215,00	0,00	554.866.215,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 17	Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan dan Aset Nagari	0,00	31.935.000,00	0,00	31.935.000,00	(56.750,00)	99,82
		0,00	31.878.250,00	0,00	31.878.250,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 19	Pembinaan Administrasi Program (PAP) Dana Desa	17.700.000,00	263.997.700,00	0,00	281.697.700,00	(892.385,00)	99,68
		17.700.000,00	263.105.315,00	0,00	280.805.315,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 20	Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Perdesaan	0,00	31.200.500,00	0,00	31.200.500,00	(525.500,00)	98,32
		0,00	30.675.000,00	0,00	30.675.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 23	Gerakan Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM)	900.000,00	59.141.250,00	0,00	60.041.250,00	(86.850,00)	99,86
		900.000,00	59.054.400,00	0,00	59.954.400,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 24	Pokjanal Posyandu	1.000.000,00	61.238.600,00	0,00	62.238.600,00	(74.350,00)	99,88
		1.000.000,00	61.164.250,00	0,00	62.164.250,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 25	Pembinaan Nagari Berprestasi	12.150.000,00	59.967.000,00	0,00	72.117.000,00	(293.250,00)	99,59
		12.100.000,00	59.723.750,00	0,00	71.823.750,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 26	Fasilitasi Kemitraan dan Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat dengan Perguruan Tinggi	1.600.000,00	16.198.000,00	0,00	17.798.000,00	(232.750,00)	98,69
		1.600.000,00	15.965.250,00	0,00	17.565.250,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	5.400.000,00	131.258.000,00	0,00	136.658.000,00	(1.000.100,00)	99,27
		5.400.000,00	130.257.900,00	0,00	135.657.900,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 09	Pemberdayaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari(BUMNAG)*	5.400.000,00	117.795.000,00	0,00	123.195.000,00	(989.600,00)	99,20
		5.400.000,00	116.805.400,00	0,00	122.205.400,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 14	Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/ Nagari	0,00	13.463.000,00	0,00	13.463.000,00	(10.500,00)	99,92
		0,00	13.452.500,00	0,00	13.452.500,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	8.550.000,00	28.793.250,00	0,00	37.343.250,00	(776.250,00)	97,92
		8.550.000,00	28.017.000,00	0,00	36.567.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 12	Koordinasi Pembinaan LPM Nagari	1.000.000,00	8.502.000,00	0,00	9.502.000,00	(330.000,00)	96,53
		1.000.000,00	8.172.000,00	0,00	9.172.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 16	Pelatihan Pembinaan Teknis PemerintahanDesa/Nagari (PTPD) di Kecamatan	7.550.000,00	20.291.250,00	0,00	27.841.250,00	(446.250,00)	98,40
		7.550.000,00	19.845.000,00	0,00	27.395.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 22	Program penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	3.750.000,00	910.093.850,00	0,00	913.843.850,00	(777.204,00)	99,91
		3.000.000,00	910.066.646,00	0,00	913.066.646,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 22 . 01	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga	3.750.000,00	910.093.850,00	0,00	913.843.850,00	(777.204,00)	99,91
		3.000.000,00	910.066.646,00	0,00	913.066.646,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 23	Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	7.900.000,00	66.340.000,00	0,00	74.240.000,00	(117.500,00)	99,84
		7.850.000,00	66.272.500,00	0,00	74.122.500,00		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 23 . 03	Peningkatan Kemampuan dan kemandirian LKAAM	7.900.000,00	66.340.000,00	0,00	74.240.000,00	(117.500,00)	99,84
		7.850.000,00	66.272.500,00	0,00	74.122.500,00		
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	662.940.000,00	2.474.418.250,00	739.200.000,00	3.876.558.250,00	(104.837.367,00)	97,30
		643.430.000,00	2.426.215.883,00	702.075.000,00	3.771.720.883,00		
2.08 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KB	662.940.000,00	2.474.418.250,00	739.200.000,00	3.876.558.250,00	(104.837.367,00)	97,30
		643.430.000,00	2.426.215.883,00	702.075.000,00	3.771.720.883,00		
2.08 . 1.06.01 . 01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLI	662.940.000,00	2.474.418.250,00	739.200.000,00	3.876.558.250,00	(104.837.367,00)	97,30
		643.430.000,00	2.426.215.883,00	702.075.000,00	3.771.720.883,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.08 . 1.06.01 . 01 . 15	Program Keluarga Berencana	662.040.000,00	2.449.932.650,00	739.200.000,00	3.851.172.650,00	(104.691.267,00)	97,28
		642.530.000,00	2.401.876.383,00	702.075.000,00	3.746.481.383,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	8.700.000,00	30.168.250,00	0,00	38.868.250,00	(25.000,00)	99,94
		8.700.000,00	30.143.250,00	0,00	38.843.250,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 06	Pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)	5.000.000,00	429.800.000,00	739.200.000,00	1.174.000.000,00	(56.644.000,00)	95,18
		4.600.000,00	410.681.000,00	702.075.000,00	1.117.356.000,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 12	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	648.340.000,00	1.880.980.000,00	0,00	2.529.320.000,00	(47.715.460,00)	98,11
		629.230.000,00	1.852.374.540,00	0,00	2.481.604.540,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 13	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	0,00	108.984.400,00	0,00	108.984.400,00	(306.807,00)	99,72
		0,00	108.677.593,00	0,00	108.677.593,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	900.000,00	24.485.600,00	0,00	25.385.600,00	(146.100,00)	99,42
		900.000,00	24.339.500,00	0,00	25.239.500,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 16 . 01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	900.000,00	16.895.800,00	0,00	17.795.800,00	(123.050,00)	99,31
		900.000,00	16.772.750,00	0,00	17.672.750,00		
2.08 . 1.06.01 . 01 . 16 . 03	Temu Kreatif Remaja Saka Kencana	0,00	7.589.800,00	0,00	7.589.800,00	(23.050,00)	99,70
		0,00	7.566.750,00	0,00	7.566.750,00		
2.09	Perhubungan	1.879.940.000,00	1.121.034.350,00	787.961.650,00	3.788.936.000,00	(335.836.416,00)	91,14
		1.799.340.000,00	1.004.839.984,00	648.919.600,00	3.453.099.584,00		
2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	1.879.940.000,00	1.121.034.350,00	787.961.650,00	3.788.936.000,00	(335.836.416,00)	91,14
		1.799.340.000,00	1.004.839.984,00	648.919.600,00	3.453.099.584,00		
2.09 . 2.09.01 . 01	DINAS PERHUBUNGAN	1.879.940.000,00	1.121.034.350,00	787.961.650,00	3.788.936.000,00	(335.836.416,00)	91,14
		1.799.340.000,00	1.004.839.984,00	648.919.600,00	3.453.099.584,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.825.690.000,00	649.076.450,00	5.000.000,00	2.479.766.450,00	(127.888.666,00)	94,84
		1.751.290.000,00	595.697.784,00	4.890.000,00	2.351.877.784,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00	100,00
		0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	94.800.000,00	0,00	94.800.000,00	(44.708.243,00)	52,84
		0,00	50.091.757,00	0,00	50.091.757,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	51.732.950,00	0,00	51.732.950,00	(8.553.850,00)	83,47
		0,00	43.179.100,00	0,00	43.179.100,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.825.690.000,00	0,00	0,00	1.825.690.000,00	(74.400.000,00)	95,92
		1.751.290.000,00	0,00	0,00	1.751.290.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	0,00	100,00
		0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	36.170.500,00	0,00	36.170.500,00	0,00	100,00
		0,00	36.170.500,00	0,00	36.170.500,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	144.325.000,00	0,00	144.325.000,00	0,00	100,00
		0,00	144.325.000,00	0,00	144.325.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	100,00
		0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	21.748.000,00	5.000.000,00	26.748.000,00	(110.000,00)	99,59
		0,00	21.748.000,00	4.890.000,00	26.638.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(2.000,00)	99,99
		0,00	29.998.000,00	0,00	29.998.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	227.920.000,00	0,00	227.920.000,00	(114.573,00)	99,95
		0,00	227.805.427,00	0,00	227.805.427,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.150.000,00	197.407.000,00	595.695.800,00	798.252.800,00	(49.592.700,00)	93,79
		1.950.000,00	154.514.500,00	592.195.600,00	748.660.100,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	700.000,00	0,00	226.805.000,00	227.505.000,00	(855.000,00)	99,62
		700.000,00	0,00	225.950.000,00	226.650.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	250.000,00	0,00	39.750.500,00	40.000.500,00	0,00	100,00
		250.000,00	0,00	39.750.500,00	40.000.500,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	197.407.000,00	0,00	197.407.000,00	(42.892.500,00)	78,27
		0,00	154.514.500,00	0,00	154.514.500,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4.200.000,00	0,00	329.140.300,00	333.340.300,00	(5.845.200,00)	98,25
		1.000.000,00	0,00	326.495.100,00	327.495.100,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	57.715.500,00	0,00	57.715.500,00	(5.950.800,00)	89,69
		0,00	51.764.700,00	0,00	51.764.700,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	57.715.500,00	0,00	57.715.500,00	(5.950.800,00)	89,69
		0,00	51.764.700,00	0,00	51.764.700,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.900.000,00	4.974.750,00	55.000.000,00	61.874.750,00	(4.340.250,00)	92,99
		1.000.000,00	4.700.500,00	51.834.000,00	57.534.500,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 30	Pembangunan Pelataran, Sarana dan Prasarana Parkir terpadu	1.900.000,00	4.974.750,00	55.000.000,00	61.874.750,00	(4.340.250,00)	92,99
		1.000.000,00	4.700.500,00	51.834.000,00	57.534.500,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2.100.000,00	35.008.000,00	132.265.850,00	169.373.850,00	(137.227.850,00)	18,98
		0,00	32.146.000,00	0,00	32.146.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	2.100.000,00	35.008.000,00	132.265.850,00	169.373.850,00	(137.227.850,00)	18,98
		0,00	32.146.000,00	0,00	32.146.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	44.700.000,00	71.756.000,00	0,00	116.456.000,00	(10.452.250,00)	91,02
		44.700.000,00	61.303.750,00	0,00	106.003.750,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya	43.950.000,00	10.595.000,00	0,00	54.545.000,00	0,00	100,00
		43.950.000,00	10.595.000,00	0,00	54.545.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	0,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	(8.613.000,00)	20,98
		0,00	2.287.000,00	0,00	2.287.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 33	Pemilihan dan Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan	750.000,00	50.261.000,00	0,00	51.011.000,00	(1.839.250,00)	96,39
		750.000,00	48.421.750,00	0,00	49.171.750,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	400.000,00	105.096.650,00	0,00	105.496.650,00	(383.900,00)	99,64
		400.000,00	104.712.750,00	0,00	105.112.750,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	400.000,00	105.096.650,00	0,00	105.496.650,00	(383.900,00)	99,64
		400.000,00	104.712.750,00	0,00	105.112.750,00		
2.10	Komunikasi dan Informatika	286.485.000,00	5.050.706.350,00	593.190.000,00	5.930.381.350,00	(85.402.900,00)	98,56
		270.545.000,00	4.984.073.450,00	590.360.000,00	5.844.978.450,00		
2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	273.985.000,00	2.023.626.350,00	543.190.000,00	2.840.801.350,00	(65.241.900,00)	97,70
		258.045.000,00	1.977.004.450,00	540.510.000,00	2.775.559.450,00		
2.10 . 2.10.01 . 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	273.985.000,00	2.023.626.350,00	543.190.000,00	2.840.801.350,00	(65.241.900,00)	97,70
		258.045.000,00	1.977.004.450,00	540.510.000,00	2.775.559.450,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	270.185.000,00	1.181.054.850,00	38.000.000,00	1.489.239.850,00	(37.328.780,00)	97,49
		254.245.000,00	1.160.266.070,00	37.400.000,00	1.451.911.070,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	(220.000,00)	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	645.560.000,00	38.000.000,00	683.560.000,00	(3.376.273,00)	99,51
		0,00	642.783.727,00	37.400.000,00	680.183.727,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	(828.100,00)	74,12
		0,00	2.371.900,00	0,00	2.371.900,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	270.185.000,00	145.083.000,00	0,00	415.268.000,00	(32.473.000,00)	92,18
		254.245.000,00	128.550.000,00	0,00	382.795.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	4.551.000,00	0,00	4.551.000,00	(87.000,00)	98,09
		0,00	4.464.000,00	0,00	4.464.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	(40.000,00)	99,56
		0,00	9.060.000,00	0,00	9.060.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	27.138.650,00	0,00	27.138.650,00	(17.340,00)	99,94
		0,00	27.121.310,00	0,00	27.121.310,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	21.825.200,00	0,00	21.825.200,00	(47.000,00)	99,78
		0,00	21.778.200,00	0,00	21.778.200,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	4.295.000,00	0,00	4.295.000,00	(15.000,00)	99,65
		0,00	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	4.472.000,00	0,00	4.472.000,00	(8.000,00)	99,82
		0,00	4.464.000,00	0,00	4.464.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	(51.000,00)	99,86
		0,00	37.449.000,00	0,00	37.449.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	275.350.000,00	0,00	275.350.000,00	(166.067,00)	99,94
		0,00	275.183.933,00	0,00	275.183.933,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	118.043.000,00	123.360.000,00	241.403.000,00	(2.406.300,00)	99,00
		0,00	117.031.700,00	121.965.000,00	238.996.700,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	17.060.000,00	17.060.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	17.060.000,00	17.060.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	83.000.000,00	83.000.000,00	(440.000,00)	99,47
		0,00	0,00	82.560.000,00	82.560.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	23.300.000,00	23.300.000,00	(955.000,00)	95,90
		0,00	0,00	22.345.000,00	22.345.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	23.703.000,00	0,00	23.703.000,00	(303.000,00)	98,72
		0,00	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	94.340.000,00	0,00	94.340.000,00	(708.300,00)	99,25
		0,00	93.631.700,00	0,00	93.631.700,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	30.360.000,00	0,00	30.360.000,00	(97.885,00)	99,68
		0,00	30.262.115,00	0,00	30.262.115,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	30.360.000,00	0,00	30.360.000,00	(97.885,00)	99,68
		0,00	30.262.115,00	0,00	30.262.115,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	0,00	536.410.000,00	381.830.000,00	918.240.000,00	(23.054.808,00)	97,49
		0,00	514.040.192,00	381.145.000,00	895.185.192,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	0,00	320.260.000,00	0,00	320.260.000,00	(20.964.100,00)	93,45
		0,00	299.295.900,00	0,00	299.295.900,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 25	Pembangunan Jaringan antar Organisasi Pemerintah Daerah	0,00	104.375.000,00	381.830.000,00	486.205.000,00	(1.653.958,00)	99,66
		0,00	103.406.042,00	381.145.000,00	484.551.042,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 29	Pemeliharaan Jaringan antar OPD	0,00	111.775.000,00	0,00	111.775.000,00	(436.750,00)	99,61
		0,00	111.338.250,00	0,00	111.338.250,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	3.800.000,00	60.258.500,00	0,00	64.058.500,00	(1.447.500,00)	97,74
		3.800.000,00	58.811.000,00	0,00	62.611.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 06	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	2.700.000,00	13.590.000,00	0,00	16.290.000,00	(495.250,00)	96,96
		2.700.000,00	13.094.750,00	0,00	15.794.750,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 08	Pembinaan dan peningkatan peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	1.100.000,00	46.668.500,00	0,00	47.768.500,00	(952.250,00)	98,01
		1.100.000,00	45.716.250,00	0,00	46.816.250,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	0,00	97.500.000,00	0,00	97.500.000,00	(906.627,00)	99,07
		0,00	96.593.373,00	0,00	96.593.373,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Prasarana Komunikasi	0,00	97.500.000,00	0,00	97.500.000,00	(906.627,00)	99,07
		0,00	96.593.373,00	0,00	96.593.373,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.10 . 4.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	12.500.000,00	3.027.080.000,00	50.000.000,00	3.089.580.000,00	(20.161.000,00)	99,35
		12.500.000,00	3.007.069.000,00	49.850.000,00	3.069.419.000,00		
2.10 . 4.01.02 . 01	SEKRETARIAT DAERAH	12.500.000,00	3.027.080.000,00	50.000.000,00	3.089.580.000,00	(20.161.000,00)	99,35
		12.500.000,00	3.007.069.000,00	49.850.000,00	3.069.419.000,00		
2.10 . 4.01.02 . 01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	12.500.000,00	3.027.080.000,00	50.000.000,00	3.089.580.000,00	(20.161.000,00)	99,35
		12.500.000,00	3.007.069.000,00	49.850.000,00	3.069.419.000,00		
2.10 . 4.01.02 . 01 . 15 . 30	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi media cetak dan elektronik	0,00	1.282.667.000,00	0,00	1.282.667.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.282.667.000,00	0,00	1.282.667.000,00		
2.10 . 4.01.02 . 01 . 15 . 31	Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi KDH/ WKDH	0,00	394.426.000,00	50.000.000,00	444.426.000,00	(150.000,00)	99,97
		0,00	394.426.000,00	49.850.000,00	444.276.000,00		
2.10 . 4.01.02 . 01 . 15 . 32	Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2.700.000,00	416.259.000,00	0,00	418.959.000,00	(20.001.000,00)	95,23
		2.700.000,00	396.258.000,00	0,00	398.958.000,00		
2.10 . 4.01.02 . 01 . 15 . 33	Peningkatan Hubungan Dengan Media Massa/ Media Relations	4.550.000,00	149.167.000,00	0,00	153.717.000,00	0,00	100,00
		4.550.000,00	149.167.000,00	0,00	153.717.000,00		
2.10 . 4.01.02 . 01 . 15 . 34	Pembinaan Kompetensi SDM Jurnalistik	5.250.000,00	53.450.000,00	0,00	58.700.000,00	0,00	100,00
		5.250.000,00	53.450.000,00	0,00	58.700.000,00		
2.10 . 4.01.02 . 01 . 15 . 35	Pengadaan Media Internal	0,00	731.111.000,00	0,00	731.111.000,00	(10.000,00)	100,00
		0,00	731.101.000,00	0,00	731.101.000,00		
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	439.140.000,00	1.334.982.250,00	18.700.000,00	1.792.822.250,00	(25.834.212,00)	98,56
		436.230.000,00	1.312.058.038,00	18.700.000,00	1.766.988.038,00		
2.11 . 2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	439.140.000,00	1.334.982.250,00	18.700.000,00	1.792.822.250,00	(25.834.212,00)	98,56
		436.230.000,00	1.312.058.038,00	18.700.000,00	1.766.988.038,00		
2.11 . 2.11.01 . 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PI	439.140.000,00	1.334.982.250,00	18.700.000,00	1.792.822.250,00	(25.834.212,00)	98,56
		436.230.000,00	1.312.058.038,00	18.700.000,00	1.766.988.038,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	361.940.000,00	600.448.750,00	0,00	962.388.750,00	(3.363.941,00)	99,65
		360.380.000,00	598.644.809,00	0,00	959.024.809,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	60.600.000,00	0,00	60.600.000,00	(1.257.241,00)	97,93
		0,00	59.342.759,00	0,00	59.342.759,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	361.940.000,00	0,00	0,00	361.940.000,00	(1.560.000,00)	99,57
		360.380.000,00	0,00	0,00	360.380.000,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	48.930.750,00	0,00	48.930.750,00	0,00	100,00
		0,00	48.930.750,00	0,00	48.930.750,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	29.115.000,00	0,00	29.115.000,00	0,00	100,00
		0,00	29.115.000,00	0,00	29.115.000,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	100,00
		0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	15.804.000,00	0,00	15.804.000,00	0,00	100,00
		0,00	15.804.000,00	0,00	15.804.000,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	(460.000,00)	66,67
		0,00	920.000,00	0,00	920.000,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	79.700.000,00	0,00	79.700.000,00	(40.000,00)	99,95
		0,00	79.660.000,00	0,00	79.660.000,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	344.179.000,00	0,00	344.179.000,00	(46.700,00)	99,99
		0,00	344.132.300,00	0,00	344.132.300,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	157.300.000,00	18.700.000,00	176.000.000,00	(130.298,00)	99,93
		0,00	157.169.702,00	18.700.000,00	175.869.702,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	18.700.000,00	18.700.000,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 19	Pengadaan Jasa Sewa Kantor	0,00	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	104.300.000,00	0,00	104.300.000,00	(130.298,00)	99,88
		0,00	104.169.702,00	0,00	104.169.702,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(41.749,00)	99,92
		0,00	49.958.251,00	0,00	49.958.251,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(41.749,00)	99,92
		0,00	49.958.251,00	0,00	49.958.251,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19	Program peningkatan daya saing koperasi dan UKM	77.200.000,00	498.603.000,00	0,00	575.803.000,00	(20.075.474,00)	96,51
		75.850.000,00	479.877.526,00	0,00	555.727.526,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 05	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	0,00	47.682.000,00	0,00	47.682.000,00	(417.700,00)	99,12
		0,00	47.264.300,00	0,00	47.264.300,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 22	Pembinaan & Penilaian KSP Koperasi	0,00	37.085.000,00	0,00	37.085.000,00	(561.150,00)	98,49
		0,00	36.523.850,00	0,00	36.523.850,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 25	Pembinaan peningkatan dan pengembangan kemitraan usaha bagi UMKM	0,00	133.036.000,00	0,00	133.036.000,00	(344.792,00)	99,74
		0,00	132.691.208,00	0,00	132.691.208,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 30	Kegiatan Pembinaan Manajemen Pengelolaan koperasi/KUD	42.650.000,00	106.836.000,00	0,00	149.486.000,00	(288.650,00)	99,81
		42.650.000,00	106.547.350,00	0,00	149.197.350,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 31	Kegiatan Pelatihan Akuntansi Koperasi	4.650.000,00	59.830.000,00	0,00	64.480.000,00	(2.077.750,00)	96,78
		4.650.000,00	57.752.250,00	0,00	62.402.250,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 32	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM	29.900.000,00	114.134.000,00	0,00	144.034.000,00	(16.385.432,00)	88,62
		28.550.000,00	99.098.568,00	0,00	127.648.568,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	0,00	28.630.500,00	0,00	28.630.500,00	(2.222.750,00)	92,24
		0,00	26.407.750,00	0,00	26.407.750,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 02	Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi	0,00	28.630.500,00	0,00	28.630.500,00	(2.222.750,00)	92,24
		0,00	26.407.750,00	0,00	26.407.750,00		
2.12	Penanaman Modal	445.160.000,00	1.100.182.100,00	102.000.000,00	1.647.342.100,00	(36.878.648,00)	97,76
		441.730.000,00	1.068.243.453,00	100.489.999,00	1.610.463.452,00		
2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	445.160.000,00	1.100.182.100,00	102.000.000,00	1.647.342.100,00	(36.878.648,00)	97,76
		441.730.000,00	1.068.243.453,00	100.489.999,00	1.610.463.452,00		
2.12 . 2.12.01 . 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAI	445.160.000,00	1.100.182.100,00	102.000.000,00	1.647.342.100,00	(36.878.648,00)	97,76
		441.730.000,00	1.068.243.453,00	100.489.999,00	1.610.463.452,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	441.210.000,00	513.844.650,00	0,00	955.054.650,00	(11.854.947,00)	98,76
		438.030.000,00	505.169.703,00	0,00	943.199.703,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	(1.000,00)	99,96
		0,00	2.759.000,00	0,00	2.759.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	134.700.000,00	0,00	134.700.000,00	(8.491.847,00)	93,70
		0,00	126.208.153,00	0,00	126.208.153,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	(30.100,00)	98,12
		0,00	1.569.900,00	0,00	1.569.900,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	441.210.000,00	0,00	0,00	441.210.000,00	(3.180.000,00)	99,28
		438.030.000,00	0,00	0,00	438.030.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	8.066.400,00	0,00	8.066.400,00	(3.000,00)	99,96
		0,00	8.063.400,00	0,00	8.063.400,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00	(25.000,00)	99,82
		0,00	14.075.000,00	0,00	14.075.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	57.539.900,00	0,00	57.539.900,00	(6.800,00)	99,99
		0,00	57.533.100,00	0,00	57.533.100,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	40.270.000,00	0,00	40.270.000,00	(6.800,00)	99,98
		0,00	40.263.200,00	0,00	40.263.200,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	8.208.000,00	0,00	8.208.000,00	(9.000,00)	99,89
		0,00	8.199.000,00	0,00	8.199.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	2.416.000,00	0,00	2.416.000,00	(10.000,00)	99,59
		0,00	2.406.000,00	0,00	2.406.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	25.650.000,00	0,00	25.650.000,00	(55.500,00)	99,78
		0,00	25.594.500,00	0,00	25.594.500,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	218.534.350,00	0,00	218.534.350,00	(35.900,00)	99,98
		0,00	218.498.450,00	0,00	218.498.450,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	62.942.000,00	102.000.000,00	164.942.000,00	(1.553.001,00)	99,06
		0,00	62.899.000,00	100.489.999,00	163.388.999,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	91.500.000,00	91.500.000,00	(475.000,00)	99,48
		0,00	0,00	91.025.000,00	91.025.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	(1.035.001,00)	87,06
		0,00	0,00	6.964.999,00	6.964.999,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	50.092.000,00	0,00	50.092.000,00	(43.000,00)	99,91
		0,00	50.049.000,00	0,00	50.049.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 52	Penyediaan Perlengkapan Kantor	0,00	12.850.000,00	2.500.000,00	15.350.000,00	0,00	100,00
		0,00	12.850.000,00	2.500.000,00	15.350.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	21.140.000,00	0,00	21.140.000,00	(69.600,00)	99,67
		0,00	21.070.400,00	0,00	21.070.400,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	21.140.000,00	0,00	21.140.000,00	(69.600,00)	99,67
		0,00	21.070.400,00	0,00	21.070.400,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	0,00	207.880.350,00	0,00	207.880.350,00	(3.808.850,00)	98,17
		0,00	204.071.500,00	0,00	204.071.500,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 16	Pemantauan, pembinaan dan pengawasan	0,00	46.095.100,00	0,00	46.095.100,00	(396.700,00)	99,14
		0,00	45.698.400,00	0,00	45.698.400,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 18	Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal (Tim Task Force)	0,00	38.984.500,00	0,00	38.984.500,00	(435.400,00)	98,88
		0,00	38.549.100,00	0,00	38.549.100,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 19	Penyelenggaraan Promosi dan investasi	0,00	122.800.750,00	0,00	122.800.750,00	(2.976.750,00)	97,58
		0,00	119.824.000,00	0,00	119.824.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	3.950.000,00	280.275.600,00	0,00	284.225.600,00	(8.176.250,00)	97,12
		3.700.000,00	272.349.350,00	0,00	276.049.350,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	0,00	35.696.750,00	0,00	35.696.750,00	(17.900,00)	99,95
		0,00	35.678.850,00	0,00	35.678.850,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	0,00	76.994.000,00	0,00	76.994.000,00	(1.206.831,00)	98,43
		0,00	75.787.169,00	0,00	75.787.169,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 10	Penyusunan kajian pengembangan potensi dan peluang investasi daerah	0,00	29.030.000,00	0,00	29.030.000,00	(407.950,00)	98,59
		0,00	28.622.050,00	0,00	28.622.050,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 14	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP Secara Elektronik	0,00	56.340.500,00	0,00	56.340.500,00	(1.539.697,00)	97,27
		0,00	54.800.803,00	0,00	54.800.803,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 15	Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	3.950.000,00	58.004.950,00	0,00	61.954.950,00	(3.242.250,00)	94,77
		3.700.000,00	55.012.700,00	0,00	58.712.700,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 16	Peningkatan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Perizinan (Banchmarketing)	0,00	24.209.400,00	0,00	24.209.400,00	(1.761.622,00)	92,72
		0,00	22.447.778,00	0,00	22.447.778,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,00	14.099.500,00	0,00	14.099.500,00	(11.416.000,00)	19,03
		0,00	2.683.500,00	0,00	2.683.500,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 01	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,00	14.099.500,00	0,00	14.099.500,00	(11.416.000,00)	19,03
		0,00	2.683.500,00	0,00	2.683.500,00		
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	328.075.000,00	4.911.277.500,00	138.600.000,00	5.377.952.500,00	(64.154.488,00)	98,81
		319.889.000,00	4.855.309.012,00	138.600.000,00	5.313.798.012,00		
2.13 . 2.16.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	328.075.000,00	4.911.277.500,00	138.600.000,00	5.377.952.500,00	(64.154.488,00)	98,81
		319.889.000,00	4.855.309.012,00	138.600.000,00	5.313.798.012,00		
2.13 . 2.16.01 . 01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	328.075.000,00	4.911.277.500,00	138.600.000,00	5.377.952.500,00	(64.154.488,00)	98,81
		319.889.000,00	4.855.309.012,00	138.600.000,00	5.313.798.012,00		
2.13 . 2.16.01 . 01 . 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	203.275.000,00	996.186.000,00	138.600.000,00	1.338.061.000,00	(18.788.560,00)	98,60
		195.289.000,00	985.383.440,00	138.600.000,00	1.319.272.440,00		
2.13 . 2.16.01 . 01 . 15 . 11	Seleksi pendidikan dan pelatihan paskibra	203.275.000,00	996.186.000,00	138.600.000,00	1.338.061.000,00	(18.788.560,00)	98,60
		195.289.000,00	985.383.440,00	138.600.000,00	1.319.272.440,00		
2.13 . 2.16.01 . 01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	49.400.000,00	285.870.500,00	0,00	335.270.500,00	(31.804.950,00)	90,51
		49.200.000,00	254.265.550,00	0,00	303.465.550,00		
2.13 . 2.16.01 . 01 . 16 . 16	Kirab dan Jambore Pemuda	0,00	88.750.500,00	0,00	88.750.500,00	(18.945.050,00)	78,65
		0,00	69.805.450,00	0,00	69.805.450,00		
2.13 . 2.16.01 . 01 . 16 . 17	Kursus Mahir Lanjut (KML) Pembina Pramuka dan Jambore Daerah	19.400.000,00	129.064.000,00	0,00	148.464.000,00	(12.735.900,00)	91,42
		19.200.000,00	116.528.100,00	0,00	135.728.100,00		
2.13 . 2.16.01 . 01 . 16 . 18	Pelatihan Pemuda Kreatif	30.000.000,00	68.056.000,00	0,00	98.056.000,00	(124.000,00)	99,87
		30.000.000,00	67.932.000,00	0,00	97.932.000,00		
2.13 . 2.16.01 . 01 . 20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	0,00	120.321.500,00	0,00	120.321.500,00	(2.138.081,00)	98,22
		0,00	118.183.419,00	0,00	118.183.419,00		
2.13 . 2.16.01 . 01 . 20 . 07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	0,00	120.321.500,00	0,00	120.321.500,00	(2.138.081,00)	98,22
		0,00	118.183.419,00	0,00	118.183.419,00		
2.13 . 2.16.01 . 01 . 21	Program Pembinaan dan Permayarakatan Olah Raga	75.400.000,00	3.508.899.500,00	0,00	3.584.299.500,00	(11.422.897,00)	99,68
		75.400.000,00	3.497.476.603,00	0,00	3.572.876.603,00		
2.13 . 2.16.01 . 01 . 21 . 01	Pengembangan Olahraga Rekreasi	75.400.000,00	324.537.500,00	0,00	399.937.500,00	(3.506.697,00)	99,12
		75.400.000,00	321.030.803,00	0,00	396.430.803,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.13 . 2.16.01 . 01 . 21 . 02	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	0,00	431.612.000,00	0,00	431.612.000,00	(7.916.200,00)	98,17
		0,00	423.695.800,00	0,00	423.695.800,00		
2.13 . 2.16.01 . 01 . 21 . 04	Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	0,00	2.752.750.000,00	0,00	2.752.750.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.752.750.000,00	0,00	2.752.750.000,00		
2.14	Statistik	23.850.000,00	183.635.000,00	0,00	207.485.000,00	(574.054,00)	99,72
		23.650.000,00	183.260.946,00	0,00	206.910.946,00		
2.14 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.850.000,00	183.635.000,00	0,00	207.485.000,00	(574.054,00)	99,72
		23.650.000,00	183.260.946,00	0,00	206.910.946,00		
2.14 . 2.10.01 . 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.850.000,00	183.635.000,00	0,00	207.485.000,00	(574.054,00)	99,72
		23.650.000,00	183.260.946,00	0,00	206.910.946,00		
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	20.100.000,00	100.130.000,00	0,00	120.230.000,00	(327.304,00)	99,73
		20.000.000,00	99.902.696,00	0,00	119.902.696,00		
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 10	Kompilasi Produk Adminstrasi Bidang Sosial	14.000.000,00	55.485.000,00	0,00	69.485.000,00	(105.554,00)	99,85
		14.000.000,00	55.379.446,00	0,00	69.379.446,00		
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 11	Sosialilasi Statistik Daerah	6.100.000,00	44.645.000,00	0,00	50.745.000,00	(221.750,00)	99,56
		6.000.000,00	44.523.250,00	0,00	50.523.250,00		
2.14 . 2.10.01 . 01 . 16	Pengembangan Statistik Sektoral	3.750.000,00	83.505.000,00	0,00	87.255.000,00	(246.750,00)	99,72
		3.650.000,00	83.358.250,00	0,00	87.008.250,00		
2.14 . 2.10.01 . 01 . 16 . 02	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	3.750.000,00	83.505.000,00	0,00	87.255.000,00	(246.750,00)	99,72
		3.650.000,00	83.358.250,00	0,00	87.008.250,00		
2.15	Persandian	0,00	104.520.000,00	0,00	104.520.000,00	(3.218.345,00)	96,92
		0,00	101.301.655,00	0,00	101.301.655,00		
2.15 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	104.520.000,00	0,00	104.520.000,00	(3.218.345,00)	96,92
		0,00	101.301.655,00	0,00	101.301.655,00		
2.15 . 2.10.01 . 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	104.520.000,00	0,00	104.520.000,00	(3.218.345,00)	96,92
		0,00	101.301.655,00	0,00	101.301.655,00		
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah	0,00	98.820.000,00	0,00	98.820.000,00	(3.072.595,00)	96,89
		0,00	95.747.405,00	0,00	95.747.405,00		
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01	Penyediaan Kebijakan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	0,00	18.990.000,00	0,00	18.990.000,00	(974.750,00)	94,87
		0,00	18.015.250,00	0,00	18.015.250,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 02	Pengelolaan Peralatan Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi yang Digunakan Pemerintah Daerah	0,00	19.960.000,00	0,00	19.960.000,00	(109.750,00)	99,45
		0,00	19.850.250,00	0,00	19.850.250,00		
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	0,00	59.870.000,00	0,00	59.870.000,00	(1.988.095,00)	96,68
		0,00	57.881.905,00	0,00	57.881.905,00		
2.15 . 2.10.01 . 01 . 16	Program Persandian Daerah	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	(145.750,00)	97,44
		0,00	5.554.250,00	0,00	5.554.250,00		
2.15 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01	IT Security Aseessment pada Aplikasi yang di gunakan Pemerintah Daerah	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	(145.750,00)	97,44
		0,00	5.554.250,00	0,00	5.554.250,00		
2.16	Kebudayaan	761.760.000,00	2.594.838.425,00	104.522.000,00	3.461.120.425,00	(81.968.061,00)	97,63
		746.458.000,00	2.528.253.364,00	104.441.000,00	3.379.152.364,00		
2.16 . 2.16.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	761.760.000,00	2.594.838.425,00	104.522.000,00	3.461.120.425,00	(81.968.061,00)	97,63
		746.458.000,00	2.528.253.364,00	104.441.000,00	3.379.152.364,00		
2.16 . 2.16.01 . 01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	761.760.000,00	2.594.838.425,00	104.522.000,00	3.461.120.425,00	(81.968.061,00)	97,63
		746.458.000,00	2.528.253.364,00	104.441.000,00	3.379.152.364,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	670.210.000,00	619.122.675,00	0,00	1.289.332.675,00	(17.702.762,00)	98,63
		659.258.000,00	612.371.913,00	0,00	1.271.629.913,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	132.840.000,00	0,00	132.840.000,00	(2.453.632,00)	98,15
		0,00	130.386.368,00	0,00	130.386.368,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	28.471.000,00	0,00	28.471.000,00	(20.000,00)	99,93
		0,00	28.451.000,00	0,00	28.451.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(2.361.050,00)	52,78
		0,00	2.638.950,00	0,00	2.638.950,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	670.210.000,00	0,00	0,00	670.210.000,00	(10.952.000,00)	98,37
		659.258.000,00	0,00	0,00	659.258.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	100,00
		0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	46.795.375,00	0,00	46.795.375,00	(13.200,00)	99,97
		0,00	46.782.175,00	0,00	46.782.175,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	56.807.500,00	0,00	56.807.500,00	(30.110,00)	99,95
		0,00	56.777.390,00	0,00	56.777.390,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	17.968.800,00	0,00	17.968.800,00	(8.800,00)	99,95
		0,00	17.960.000,00	0,00	17.960.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	(180.000,00)	91,43
		0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	29.850.000,00	0,00	29.850.000,00	(123.000,00)	99,59
		0,00	29.727.000,00	0,00	29.727.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	286.790.000,00	0,00	286.790.000,00	(1.560.970,00)	99,46
		0,00	285.229.030,00	0,00	285.229.030,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	129.038.500,00	95.022.000,00	224.060.500,00	(230.100,00)	99,90
		0,00	128.889.400,00	94.941.000,00	223.830.400,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	18.837.000,00	18.837.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	18.837.000,00	18.837.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	33.895.000,00	33.895.000,00	(45.000,00)	99,87
		0,00	0,00	33.850.000,00	33.850.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	76.106.000,00	0,00	76.106.000,00	(25.200,00)	99,97
		0,00	76.080.800,00	0,00	76.080.800,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	52.932.500,00	0,00	52.932.500,00	(123.900,00)	99,77
		0,00	52.808.600,00	0,00	52.808.600,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 52	Penyediaan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	42.290.000,00	42.290.000,00	(36.000,00)	99,91
		0,00	0,00	42.254.000,00	42.254.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	(2.640.000,00)	87,89
		0,00	19.160.000,00	0,00	19.160.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	(2.640.000,00)	87,89
		0,00	19.160.000,00	0,00	19.160.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	21.975.000,00	0,00	21.975.000,00	(514.100,00)	97,66
		0,00	21.460.900,00	0,00	21.460.900,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	21.975.000,00	0,00	21.975.000,00	(514.100,00)	97,66
		0,00	21.460.900,00	0,00	21.460.900,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	7.300.000,00	140.793.250,00	0,00	148.093.250,00	(24.000,00)	99,98
		7.300.000,00	140.769.250,00	0,00	148.069.250,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	7.300.000,00	140.793.250,00	0,00	148.093.250,00	(24.000,00)	99,98
		7.300.000,00	140.769.250,00	0,00	148.069.250,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	39.600.000,00	110.285.000,00	9.500.000,00	159.385.000,00	(82.254,00)	99,95
		39.600.000,00	110.202.746,00	9.500.000,00	159.302.746,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 16 . 16	Pelestarian Kawasan Cagar Budaya	39.600.000,00	110.285.000,00	9.500.000,00	159.385.000,00	(82.254,00)	99,95
		39.600.000,00	110.202.746,00	9.500.000,00	159.302.746,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	44.650.000,00	1.477.655.000,00	0,00	1.522.305.000,00	(59.079.845,00)	96,12
		40.300.000,00	1.422.925.155,00	0,00	1.463.225.155,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	3.200.000,00	39.520.000,00	0,00	42.720.000,00	(1.044.000,00)	97,56
		3.150.000,00	38.526.000,00	0,00	41.676.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	3.800.000,00	62.615.000,00	0,00	66.415.000,00	(3.011.952,00)	95,46
		1.950.000,00	61.453.048,00	0,00	63.403.048,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	35.650.000,00	1.360.335.000,00	0,00	1.395.985.000,00	(54.441.693,00)	96,10
		33.200.000,00	1.308.343.307,00	0,00	1.341.543.307,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 12	Workshop Penetapan Cagar Budaya	2.000.000,00	15.185.000,00	0,00	17.185.000,00	(582.200,00)	96,61
		2.000.000,00	14.602.800,00	0,00	16.602.800,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 19	Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya	0,00	74.169.000,00	0,00	74.169.000,00	(1.695.000,00)	97,71
		0,00	72.474.000,00	0,00	72.474.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 01	Pengadaan sarana dan prasarana kesenian	0,00	65.545.000,00	0,00	65.545.000,00	(1.480.000,00)	97,74
		0,00	64.065.000,00	0,00	64.065.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 02	Pembuatan dokumen budaya daerah	0,00	8.624.000,00	0,00	8.624.000,00	(215.000,00)	97,51
		0,00	8.409.000,00	0,00	8.409.000,00		
2.17	Perpustakaan	304.630.000,00	766.101.950,00	251.983.000,00	1.322.714.950,00	(38.135.663,00)	97,12
		296.685.000,00	742.983.287,00	244.911.000,00	1.284.579.287,00		
2.17 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	304.630.000,00	766.101.950,00	251.983.000,00	1.322.714.950,00	(38.135.663,00)	97,12
		296.685.000,00	742.983.287,00	244.911.000,00	1.284.579.287,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.17 . 2.17.01 . 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	304.630.000,00	766.101.950,00	251.983.000,00	1.322.714.950,00	(38.135.663,00)	97,12
		296.685.000,00	742.983.287,00	244.911.000,00	1.284.579.287,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	302.430.000,00	402.920.500,00	7.500.000,00	712.850.500,00	(20.386.994,00)	97,14
		294.485.000,00	391.478.506,00	6.500.000,00	692.463.506,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	31.080.000,00	0,00	31.080.000,00	(3.957.250,00)	87,27
		0,00	27.122.750,00	0,00	27.122.750,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	16.954.000,00	0,00	16.954.000,00	(5.465.850,00)	67,76
		0,00	11.488.150,00	0,00	11.488.150,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	302.430.000,00	3.000.000,00	0,00	305.430.000,00	(7.955.000,00)	97,40
		294.485.000,00	2.990.000,00	0,00	297.475.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	5.175.500,00	0,00	5.175.500,00	(60.000,00)	98,84
		0,00	5.115.500,00	0,00	5.115.500,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	(574.000,00)	93,86
		0,00	8.776.000,00	0,00	8.776.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	15.309.600,00	0,00	15.309.600,00	(93.000,00)	99,39
		0,00	15.216.600,00	0,00	15.216.600,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	25.150.900,00	0,00	25.150.900,00	(557.900,00)	97,78
		0,00	24.593.000,00	0,00	24.593.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	21.248.000,00	7.500.000,00	28.748.000,00	(1.052.000,00)	96,34
		0,00	21.196.000,00	6.500.000,00	27.696.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	18.050.000,00	0,00	18.050.000,00	0,00	100,00
		0,00	18.050.000,00	0,00	18.050.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	252.642.500,00	0,00	252.642.500,00	(671.994,00)	99,73
		0,00	251.970.506,00	0,00	251.970.506,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	105.119.600,00	184.483.000,00	289.602.600,00	(12.183.750,00)	95,79
		0,00	98.957.850,00	178.461.000,00	277.418.850,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	50.735.000,00	50.735.000,00	(200.000,00)	99,61
		0,00	0,00	50.535.000,00	50.535.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	133.748.000,00	133.748.000,00	(5.822.000,00)	95,65
		0,00	0,00	127.926.000,00	127.926.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	67.119.600,00	0,00	67.119.600,00	(6.161.750,00)	90,82
		0,00	60.957.850,00	0,00	60.957.850,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	0,00	36.250.000,00	0,00	36.250.000,00	(1.382.419,00)	96,19
		0,00	34.867.581,00	0,00	34.867.581,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	36.250.000,00	0,00	36.250.000,00	(1.382.419,00)	96,19
		0,00	34.867.581,00	0,00	34.867.581,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07	<i>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</i>	2.200.000,00	221.811.850,00	60.000.000,00	284.011.850,00	(4.182.500,00)	98,53
		2.200.000,00	217.679.350,00	59.950.000,00	279.829.350,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 01	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan	0,00	26.840.000,00	0,00	26.840.000,00	(732.500,00)	97,27
		0,00	26.107.500,00	0,00	26.107.500,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 07	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	2.200.000,00	40.315.000,00	0,00	42.515.000,00	(201.750,00)	99,53
		2.200.000,00	40.113.250,00	0,00	42.313.250,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 08	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	0,00	39.331.600,00	60.000.000,00	99.331.600,00	(1.676.250,00)	98,31
		0,00	37.705.350,00	59.950.000,00	97.655.350,00		
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 12	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	0,00	115.325.250,00	0,00	115.325.250,00	(1.572.000,00)	98,64
		0,00	113.753.250,00	0,00	113.753.250,00		
2.18	Kearsipan	17.650.000,00	195.568.000,00	0,00	213.218.000,00	(184.750,00)	99,91
		17.650.000,00	195.383.250,00	0,00	213.033.250,00		
2.18 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	17.650.000,00	195.568.000,00	0,00	213.218.000,00	(184.750,00)	99,91
		17.650.000,00	195.383.250,00	0,00	213.033.250,00		
2.18 . 2.17.01 . 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	17.650.000,00	195.568.000,00	0,00	213.218.000,00	(184.750,00)	99,91
		17.650.000,00	195.383.250,00	0,00	213.033.250,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15	<i>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</i>	17.650.000,00	110.285.000,00	0,00	127.935.000,00	(97.250,00)	99,92
		17.650.000,00	110.187.750,00	0,00	127.837.750,00		
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 06	Kajian sistem administrasi kearsipan	8.050.000,00	41.076.000,00	0,00	49.126.000,00	(52.250,00)	99,89
		8.050.000,00	41.023.750,00	0,00	49.073.750,00		
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 10	Bintek Penyusunan JRA Subtantif	9.600.000,00	69.209.000,00	0,00	78.809.000,00	(45.000,00)	99,94
		9.600.000,00	69.164.000,00	0,00	78.764.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 01 . 16	<i>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</i>	0,00	85.283.000,00	0,00	85.283.000,00	(87.500,00)	99,90
		0,00	85.195.500,00	0,00	85.195.500,00		
2.18 . 2.17.01 . 01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	0,00	85.283.000,00	0,00	85.283.000,00	(87.500,00)	99,90
		0,00	85.195.500,00	0,00	85.195.500,00		
3	Urusan Pilihan	2.215.080.000,00	15.361.551.252,00	37.154.408.396,00	54.731.039.648,00	(5.306.986.776,29)	90,30
		2.168.225.000,00	14.884.486.368,00	32.371.341.503,71	49.424.052.871,71		
3.01	Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	1.697.357.102,00	448.372.596,00	2.148.729.698,00	(40.034.312,00)	98,14
		3.000.000,00	1.659.361.886,00	446.333.500,00	2.108.695.386,00		
3.01 . 2.03.01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	3.000.000,00	1.697.357.102,00	448.372.596,00	2.148.729.698,00	(40.034.312,00)	98,14
		3.000.000,00	1.659.361.886,00	446.333.500,00	2.108.695.386,00		
3.01 . 2.03.01 . 01	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	3.000.000,00	1.697.357.102,00	448.372.596,00	2.148.729.698,00	(40.034.312,00)	98,14
		3.000.000,00	1.659.361.886,00	446.333.500,00	2.108.695.386,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 16	<i>Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan</i>	0,00	47.360.850,00	0,00	47.360.850,00	(713.300,00)	98,49
		0,00	46.647.550,00	0,00	46.647.550,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 16 . 02	Pembinaan dan Pokmaswas Perairan umum	0,00	47.360.850,00	0,00	47.360.850,00	(713.300,00)	98,49
		0,00	46.647.550,00	0,00	46.647.550,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 20	<i>Program pengembangan kawasan budidaya perikanan</i>	0,00	1.267.463.902,00	448.372.596,00	1.715.836.498,00	(15.110.998,00)	99,12
		0,00	1.254.392.000,00	446.333.500,00	1.700.725.500,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 20 . 11	Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)	0,00	365.175.004,00	0,00	365.175.004,00	(5.940.204,00)	98,37
		0,00	359.234.800,00	0,00	359.234.800,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 20 . 12	Pembangunan Kolam Budidaya	0,00	399.949.998,00	0,00	399.949.998,00	(1.960.048,00)	99,51
		0,00	397.989.950,00	0,00	397.989.950,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
3.01 . 2.03.01 . 01 . 20 . 13	Bantuan Benih dan Pakan	0,00	49.162.500,00	0,00	49.162.500,00	(968.900,00)	98,03
		0,00	48.193.600,00	0,00	48.193.600,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 20 . 14	Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Budidaya Perikanan (DAPBD + AK 2019)	0,00	445.726.400,00	0,00	445.726.400,00	(1.671.250,00)	99,63
		0,00	444.055.150,00	0,00	444.055.150,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 20 . 15	Rehabilitasi sarana dan prasarana Balai Benih Ikan (DAPBD + AK 2019)	0,00	7.450.000,00	448.372.596,00	455.822.596,00	(4.570.596,00)	99,00
		0,00	4.918.500,00	446.333.500,00	451.252.000,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	3.000.000,00	247.197.750,00	0,00	250.197.750,00	(23.957.064,00)	90,42
		3.000.000,00	223.240.686,00	0,00	226.240.686,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 23 . 05	Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemarikan	3.000.000,00	247.197.750,00	0,00	250.197.750,00	(23.957.064,00)	90,42
		3.000.000,00	223.240.686,00	0,00	226.240.686,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 27	Program Pengembangan dan Peningkatan Instalasi Pembenihan Ikan	0,00	135.334.600,00	0,00	135.334.600,00	(252.950,00)	99,81
		0,00	135.081.650,00	0,00	135.081.650,00		
3.01 . 2.03.01 . 01 . 27 . 01	Operasional UPTD BBI	0,00	135.334.600,00	0,00	135.334.600,00	(252.950,00)	99,81
		0,00	135.081.650,00	0,00	135.081.650,00		
3.02	Pariwisata	47.650.000,00	774.129.200,00	1.859.262.000,00	2.681.041.200,00	(199.623.516,15)	92,55
		46.450.000,00	767.394.513,00	1.667.573.170,85	2.481.417.683,85		
3.02 . 2.16.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	47.650.000,00	774.129.200,00	1.859.262.000,00	2.681.041.200,00	(199.623.516,15)	92,55
		46.450.000,00	767.394.513,00	1.667.573.170,85	2.481.417.683,85		
3.02 . 2.16.01 . 01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	47.650.000,00	774.129.200,00	1.859.262.000,00	2.681.041.200,00	(199.623.516,15)	92,55
		46.450.000,00	767.394.513,00	1.667.573.170,85	2.481.417.683,85		
3.02 . 2.16.01 . 01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	47.650.000,00	669.393.950,00	0,00	717.043.950,00	(6.672.435,00)	99,07
		46.450.000,00	663.921.515,00	0,00	710.371.515,00		
3.02 . 2.16.01 . 01 . 15 . 16	Dukungan Event Tour d' Singkarak	11.800.000,00	421.084.150,00	0,00	432.884.150,00	(3.280.751,00)	99,24
		11.750.000,00	417.853.399,00	0,00	429.603.399,00		
3.02 . 2.16.01 . 01 . 15 . 17	Pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kabupaten Dharmasraya	34.350.000,00	139.936.200,00	0,00	174.286.200,00	(1.537.423,00)	99,12
		33.200.000,00	139.548.777,00	0,00	172.748.777,00		
3.02 . 2.16.01 . 01 . 15 . 18	Fasilitasi Event - event kepariwisataan	1.500.000,00	15.245.000,00	0,00	16.745.000,00	(200.000,00)	98,81
		1.500.000,00	15.045.000,00	0,00	16.545.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
3.02 . 2.16.01 . 01 . 15 . 19	Promosi pariwisata dalam dan luar negeri	0,00	93.128.600,00	0,00	93.128.600,00	(1.654.261,00)	98,22
		0,00	91.474.339,00	0,00	91.474.339,00		
3.02 . 2.16.01 . 01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	0,00	94.475.000,00	1.859.262.000,00	1.953.737.000,00	(191.822.831,15)	90,18
		0,00	94.340.998,00	1.667.573.170,85	1.761.914.168,85		
3.02 . 2.16.01 . 01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	0,00	0,00	1.679.262.000,00	1.679.262.000,00	(181.947.829,15)	89,17
		0,00	0,00	1.497.314.170,85	1.497.314.170,85		
3.02 . 2.16.01 . 01 . 16 . 19	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata	0,00	94.475.000,00	180.000.000,00	274.475.000,00	(9.875.002,00)	96,40
		0,00	94.340.998,00	170.259.000,00	264.599.998,00		
3.02 . 2.16.01 . 01 . 17	Program pengembangan Kemitraan dan Ekonomi Kreatif	0,00	10.260.250,00	0,00	10.260.250,00	(1.128.250,00)	89,00
		0,00	9.132.000,00	0,00	9.132.000,00		
3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 11	Peningkatan dan Pengembangan Gerakan Kelompok Sadar Wisata	0,00	10.260.250,00	0,00	10.260.250,00	(1.128.250,00)	89,00
		0,00	9.132.000,00	0,00	9.132.000,00		
3.03	Pertanian	1.743.210.000,00	10.908.164.950,00	1.962.344.800,00	14.613.719.750,00	(478.302.952,70)	96,73
		1.702.635.000,00	10.625.981.115,00	1.806.800.682,30	14.135.416.797,30		
3.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN	1.743.210.000,00	10.908.164.950,00	1.962.344.800,00	14.613.719.750,00	(478.302.952,70)	96,73
		1.702.635.000,00	10.625.981.115,00	1.806.800.682,30	14.135.416.797,30		
3.03 . 3.03.01 . 01	DINAS PERTANIAN	1.743.210.000,00	10.908.164.950,00	1.962.344.800,00	14.613.719.750,00	(478.302.952,70)	96,73
		1.702.635.000,00	10.625.981.115,00	1.806.800.682,30	14.135.416.797,30		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.600.600.000,00	1.135.125.800,00	7.000.000,00	2.742.725.800,00	(101.656.554,00)	96,29
		1.569.185.000,00	1.064.934.246,00	6.950.000,00	2.641.069.246,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	13.740.000,00	0,00	13.740.000,00	(12.000,00)	99,91
		0,00	13.728.000,00	0,00	13.728.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	171.500.000,00	7.000.000,00	178.500.000,00	(27.597.113,00)	84,54
		0,00	143.952.887,00	6.950.000,00	150.902.887,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	61.650.000,00	0,00	61.650.000,00	(42.408.650,00)	31,21
		0,00	19.241.350,00	0,00	19.241.350,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.600.600.000,00	0,00	0,00	1.600.600.000,00	(31.415.000,00)	98,04
		1.569.185.000,00	0,00	0,00	1.569.185.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	11.965.000,00	0,00	11.965.000,00	(1.000,00)	99,99
		0,00	11.964.000,00	0,00	11.964.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	60.150.000,00	0,00	60.150.000,00	(50.000,00)	99,92
		0,00	60.100.000,00	0,00	60.100.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	109.653.300,00	0,00	109.653.300,00	0,00	100,00
		0,00	109.653.300,00	0,00	109.653.300,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	73.985.000,00	0,00	73.985.000,00	0,00	100,00
		0,00	73.985.000,00	0,00	73.985.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	10.912.500,00	0,00	10.912.500,00	0,00	100,00
		0,00	10.912.500,00	0,00	10.912.500,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	183.060.000,00	0,00	183.060.000,00	(5.000,00)	100,00
		0,00	183.055.000,00	0,00	183.055.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	438.510.000,00	0,00	438.510.000,00	(167.791,00)	99,96
		0,00	438.342.209,00	0,00	438.342.209,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	808.216.000,00	316.400.000,00	1.124.616.000,00	(2.231.324,00)	99,80
		0,00	806.805.676,00	315.579.000,00	1.122.384.676,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	0,00	207.300.000,00	207.300.000,00	(550.000,00)	99,73
		0,00	0,00	206.750.000,00	206.750.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	0,00	109.100.000,00	109.100.000,00	(271.000,00)	99,75
		0,00	0,00	108.829.000,00	108.829.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	808.216.000,00	0,00	808.216.000,00	(1.410.324,00)	99,83
		0,00	806.805.676,00	0,00	806.805.676,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	22.700.000,00	0,00	22.700.000,00	(77.000,00)	99,66
		0,00	22.623.000,00	0,00	22.623.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	22.700.000,00	0,00	22.700.000,00	(77.000,00)	99,66
		0,00	22.623.000,00	0,00	22.623.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.575.000,00	289.493.700,00	0,00	292.068.700,00	(5.288.403,00)	98,19
		1.600.000,00	285.180.297,00	0,00	286.780.297,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 12	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (Pengendalian OPT)	0,00	2.524.900,00	0,00	2.524.900,00	(900,00)	99,96
		0,00	2.524.000,00	0,00	2.524.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 13	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (Pendamping Air Irigasi Pertanian)	975.000,00	169.060.000,00	0,00	170.035.000,00	(3.456.703,00)	97,97
		0,00	166.578.297,00	0,00	166.578.297,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 14	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	0,00	39.225.000,00	0,00	39.225.000,00	(1.202.750,00)	96,93
		0,00	38.022.250,00	0,00	38.022.250,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 15	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani	1.600.000,00	78.683.800,00	0,00	80.283.800,00	(628.050,00)	99,22
		1.600.000,00	78.055.750,00	0,00	79.655.750,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	0,00	500.477.400,00	49.995.000,00	550.472.400,00	(3.221.250,00)	99,41
		0,00	497.256.150,00	49.995.000,00	547.251.150,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 15	Promosi atas hasil produksi pertanian	0,00	444.211.600,00	49.995.000,00	494.206.600,00	(70.550,00)	99,99
		0,00	444.141.050,00	49.995.000,00	494.136.050,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 21	Desa Pertanian Organik	0,00	56.265.800,00	0,00	56.265.800,00	(3.150.700,00)	94,40
		0,00	53.115.100,00	0,00	53.115.100,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	118.875.000,00	5.217.995.200,00	26.000.000,00	5.362.870.200,00	(136.158.072,00)	97,46
		118.350.000,00	5.082.502.128,00	25.860.000,00	5.226.712.128,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan (Perkebunan*)	0,00	593.786.000,00	0,00	593.786.000,00	(10.578.550,00)	98,22
		0,00	583.207.450,00	0,00	583.207.450,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 05	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	0,00	43.740.000,00	0,00	43.740.000,00	(126.500,00)	99,71
		0,00	43.613.500,00	0,00	43.613.500,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 13	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Pendamping Ditjenbun)	0,00	17.225.000,00	0,00	17.225.000,00	(725.000,00)	95,79
		0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 26	Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian/ Perkebunan	19.050.000,00	2.620.135.000,00	0,00	2.639.185.000,00	(767.633,00)	99,97
		19.050.000,00	2.619.367.367,00	0,00	2.638.417.367,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 27	Pembangunan Demplot Tanaman Kelapa Sawit	0,00	93.110.000,00	0,00	93.110.000,00	(614.000,00)	99,34
		0,00	92.496.000,00	0,00	92.496.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 29	Pendataan Ubinan Statistik Pertanian	0,00	20.190.000,00	0,00	20.190.000,00	(1.034.450,00)	94,88
		0,00	19.155.550,00	0,00	19.155.550,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 32	pengawasan dan pengembangan alsintan	0,00	21.210.000,00	0,00	21.210.000,00	(254.150,00)	98,80
		0,00	20.955.850,00	0,00	20.955.850,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 34	Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan (Jalan Usaha Tani/ DAK 2019)	99.825.000,00	1.582.109.200,00	0,00	1.681.934.200,00	(121.267.650,00)	92,79
		99.300.000,00	1.461.366.550,00	0,00	1.560.666.550,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 35	Pendamping Replenting	0,00	226.490.000,00	26.000.000,00	252.490.000,00	(790.139,00)	99,69
		0,00	225.839.861,00	25.860.000,00	251.699.861,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1.300.000,00	479.245.700,00	1.521.299.800,00	2.001.845.500,00	(158.881.915,70)	92,06
		1.150.000,00	474.836.902,00	1.366.976.682,30	1.842.963.584,30		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	1.300.000,00	30.985.000,00	0,00	32.285.000,00	(1.749.750,00)	94,58
		1.150.000,00	29.385.250,00	0,00	30.535.250,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 21	Penyusunan Programa dan RDKK Penyuluh	0,00	65.504.200,00	0,00	65.504.200,00	(935.950,00)	98,57
		0,00	64.568.250,00	0,00	64.568.250,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 32	Penunjang Operasional BP3K	0,00	382.756.500,00	232.800.000,00	615.556.500,00	(2.068.098,00)	99,66
		0,00	380.883.402,00	232.605.000,00	613.488.402,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 40	Pembangunan Kantor BPP Pertanian (DAK 2019)	0,00	0,00	1.288.499.800,00	1.288.499.800,00	(154.128.117,70)	88,04
		0,00	0,00	1.134.371.682,30	1.134.371.682,30		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	0,00	403.772.000,00	12.000.000,00	415.772.000,00	(2.213.188,00)	99,47
		0,00	401.568.812,00	11.990.000,00	413.558.812,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 08	Pengendalian dan pemberantasan Penyakit Strategis	0,00	80.030.000,00	0,00	80.030.000,00	(358.177,00)	99,55
		0,00	79.671.823,00	0,00	79.671.823,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 09	Operasional Puskesmas	0,00	80.202.000,00	0,00	80.202.000,00	(1.264.560,00)	98,42
		0,00	78.937.440,00	0,00	78.937.440,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 10	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies	0,00	94.190.000,00	0,00	94.190.000,00	(331.473,00)	99,65
		0,00	93.858.527,00	0,00	93.858.527,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 11	Pengadaan Peralatan dan Obat-obatan Puskesmas	0,00	149.350.000,00	12.000.000,00	161.350.000,00	(258.978,00)	99,84
		0,00	149.101.022,00	11.990.000,00	161.091.022,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3.960.000,00	1.087.460.400,00	0,00	1.091.420.400,00	(52.126.896,00)	95,22
		1.050.000,00	1.038.243.504,00	0,00	1.039.293.504,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 14	Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio	0,00	64.369.200,00	0,00	64.369.200,00	(1.397.308,00)	97,83
		0,00	62.971.892,00	0,00	62.971.892,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 15	Operasional UPT Pembibitan	0,00	242.882.300,00	0,00	242.882.300,00	(1.052.300,00)	99,57
		0,00	241.830.000,00	0,00	241.830.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 16	Operasional Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan	0,00	34.750.000,00	0,00	34.750.000,00	(1.725.500,00)	95,03
		0,00	33.024.500,00	0,00	33.024.500,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 17	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	0,00	189.420.000,00	0,00	189.420.000,00	(7.092.250,00)	96,26
		0,00	182.327.750,00	0,00	182.327.750,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 18	Budidaya Sapi Potong	3.960.000,00	556.038.900,00	0,00	559.998.900,00	(40.859.538,00)	92,70
		1.050.000,00	518.089.362,00	0,00	519.139.362,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 31	Pengembangan Agribisnis Pertanian	5.000.000,00	97.771.700,00	0,00	102.771.700,00	(2.260.950,00)	97,80
		4.500.000,00	96.010.750,00	0,00	100.510.750,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 31 . 10	Kegiatan Sekolah Lapangan Tanaman Hortikultura (salak)	5.000.000,00	42.355.000,00	0,00	47.355.000,00	(1.782.500,00)	96,24
		4.500.000,00	41.072.500,00	0,00	45.572.500,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 31 . 12	Pemasyarakatan Tanaman Holtikultura (Sayur-Sayuran)	0,00	55.416.700,00	0,00	55.416.700,00	(478.450,00)	99,14
		0,00	54.938.250,00	0,00	54.938.250,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 33	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pembangunan Pertanian/Peternakan/Perkebunan	9.400.000,00	835.981.550,00	29.650.000,00	875.031.550,00	(12.926.900,00)	98,52
		5.800.000,00	826.854.650,00	29.450.000,00	862.104.650,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 33 . 06	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pola Partisipatif	9.400.000,00	835.981.550,00	29.650.000,00	875.031.550,00	(12.926.900,00)	98,52
		5.800.000,00	826.854.650,00	29.450.000,00	862.104.650,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 36	kesehatan masyarakat veteriner	1.500.000,00	29.925.500,00	0,00	31.425.500,00	(1.260.500,00)	95,99
		1.000.000,00	29.165.000,00	0,00	30.165.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 36 . 02	Pengawasan peredaran pangan asal hewan (PAH) yang aman,sehat,utuh,dan Halal (ASUH)	1.500.000,00	29.925.500,00	0,00	31.425.500,00	(1.260.500,00)	95,99
		1.000.000,00	29.165.000,00	0,00	30.165.000,00		
3.06	Perdagangan	10.800.000,00	274.508.000,00	3.566.764.000,00	3.852.072.000,00	(457.117.377,44)	88,13
		10.800.000,00	273.171.561,00	3.110.983.061,56	3.394.954.622,56		
3.06 . 2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	10.800.000,00	274.508.000,00	3.566.764.000,00	3.852.072.000,00	(457.117.377,44)	88,13
		10.800.000,00	273.171.561,00	3.110.983.061,56	3.394.954.622,56		
3.06 . 2.11.01 . 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PI	10.800.000,00	274.508.000,00	3.566.764.000,00	3.852.072.000,00	(457.117.377,44)	88,13
		10.800.000,00	273.171.561,00	3.110.983.061,56	3.394.954.622,56		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	10.800.000,00	122.644.000,00	0,00	133.444.000,00	(698.058,00)	99,48
		10.800.000,00	121.945.942,00	0,00	132.745.942,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	10.800.000,00	122.644.000,00	0,00	133.444.000,00	(698.058,00)	99,48
		10.800.000,00	121.945.942,00	0,00	132.745.942,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
3.06 . 2.11.01 . 01 . 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	0,00	84.210.000,00	3.566.764.000,00	3.650.974.000,00	(455.802.219,44)	87,52
		0,00	84.188.719,00	3.110.983.061,56	3.195.171.780,56		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 22 . 04	Peningkatan Prasarana Pasar Rakyat (DAK Penugasan)	0,00	84.210.000,00	3.566.764.000,00	3.650.974.000,00	(455.802.219,44)	87,52
		0,00	84.188.719,00	3.110.983.061,56	3.195.171.780,56		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 23	Program pengembangan perdagangan	0,00	67.654.000,00	0,00	67.654.000,00	(617.100,00)	99,09
		0,00	67.036.900,00	0,00	67.036.900,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 23 . 01	Pemantauan dan pengendalian sembako dan barang strategis lainnya	0,00	50.714.000,00	0,00	50.714.000,00	(541.350,00)	98,93
		0,00	50.172.650,00	0,00	50.172.650,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 23 . 03	Operasional retribusi pasar & kerjasama kemitraan dengan pengurus pasar	0,00	16.940.000,00	0,00	16.940.000,00	(75.750,00)	99,55
		0,00	16.864.250,00	0,00	16.864.250,00		
3.07	Perindustrian	3.500.000,00	1.081.926.000,00	29.294.115.000,00	30.379.541.000,00	(3.979.320.905,00)	86,90
		3.500.000,00	1.080.619.006,00	25.316.101.089,00	26.400.220.095,00		
3.07 . 2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	3.500.000,00	1.081.926.000,00	29.294.115.000,00	30.379.541.000,00	(3.979.320.905,00)	86,90
		3.500.000,00	1.080.619.006,00	25.316.101.089,00	26.400.220.095,00		
3.07 . 2.11.01 . 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PI	3.500.000,00	1.081.926.000,00	29.294.115.000,00	30.379.541.000,00	(3.979.320.905,00)	86,90
		3.500.000,00	1.080.619.006,00	25.316.101.089,00	26.400.220.095,00		
3.07 . 2.11.01 . 01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	3.500.000,00	1.081.926.000,00	29.294.115.000,00	30.379.541.000,00	(3.979.320.905,00)	86,90
		3.500.000,00	1.080.619.006,00	25.316.101.089,00	26.400.220.095,00		
3.07 . 2.11.01 . 01 . 16 . 02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	0,00	898.065.000,00	0,00	898.065.000,00	(827.090,00)	99,91
		0,00	897.237.910,00	0,00	897.237.910,00		
3.07 . 2.11.01 . 01 . 16 . 16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendamping DAK)	0,00	129.975.000,00	29.294.115.000,00	29.424.090.000,00	(3.978.059.865,00)	86,48
		0,00	129.929.046,00	25.316.101.089,00	25.446.030.135,00		
3.07 . 2.11.01 . 01 . 16 . 17	Pelatihan Teknologi Informasi bagi Industri Kecil dan Menengah.	3.500.000,00	26.866.000,00	0,00	30.366.000,00	(168.200,00)	99,45
		3.500.000,00	26.697.800,00	0,00	30.197.800,00		
3.07 . 2.11.01 . 01 . 16 . 18	Pengendalian dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah.	0,00	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00	(265.750,00)	99,02
		0,00	26.754.250,00	0,00	26.754.250,00		
3.07 . 2.11.01 . 01 . 16 . 19	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
3.08	Transmigrasi	406.920.000,00	625.466.000,00	23.550.000,00	1.055.936.000,00	(152.587.713,00)	85,55
		401.840.000,00	477.958.287,00	23.550.000,00	903.348.287,00		
3.08 . 3.08.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	406.920.000,00	625.466.000,00	23.550.000,00	1.055.936.000,00	(152.587.713,00)	85,55
		401.840.000,00	477.958.287,00	23.550.000,00	903.348.287,00		
3.08 . 3.08.01 . 01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	406.920.000,00	625.466.000,00	23.550.000,00	1.055.936.000,00	(152.587.713,00)	85,55
		401.840.000,00	477.958.287,00	23.550.000,00	903.348.287,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	406.920.000,00	394.250.000,00	0,00	801.170.000,00	(28.485.113,00)	96,44
		401.840.000,00	370.844.887,00	0,00	772.684.887,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	85.200.000,00	0,00	85.200.000,00	(10.084.067,00)	88,16
		0,00	75.115.933,00	0,00	75.115.933,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	(2.080.250,00)	53,77
		0,00	2.419.750,00	0,00	2.419.750,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	406.920.000,00	0,00	0,00	406.920.000,00	(5.080.000,00)	98,75
		401.840.000,00	0,00	0,00	401.840.000,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	10.376.000,00	0,00	10.376.000,00	(50.000,00)	99,52
		0,00	10.326.000,00	0,00	10.326.000,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	(3.100.000,00)	67,37
		0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	32.955.550,00	0,00	32.955.550,00	(102.000,00)	99,69
		0,00	32.853.550,00	0,00	32.853.550,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	39.174.000,00	0,00	39.174.000,00	(2.136.700,00)	94,55
		0,00	37.037.300,00	0,00	37.037.300,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	6.905.000,00	0,00	6.905.000,00	0,00	100,00
		0,00	6.905.000,00	0,00	6.905.000,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	(3.390.000,00)	79,82
		0,00	13.410.000,00	0,00	13.410.000,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	158.429.450,00	0,00	158.429.450,00	(2.168.414,00)	98,63
		0,00	156.261.036,00	0,00	156.261.036,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 01 . 36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	0,00	30.410.000,00	0,00	30.410.000,00	(293.682,00)	99,03
		0,00	30.116.318,00	0,00	30.116.318,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
3.08 . 3.08.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	93.880.000,00	23.550.000,00	117.430.000,00	(3.799.800,00)	96,76
		0,00	90.080.200,00	23.550.000,00	113.630.200,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	17.550.000,00	17.550.000,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	(550.000,00)	98,63
		0,00	39.450.000,00	0,00	39.450.000,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	53.880.000,00	0,00	53.880.000,00	(3.249.800,00)	93,97
		0,00	50.630.200,00	0,00	50.630.200,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 20	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	0,00	137.336.000,00	0,00	137.336.000,00	(120.302.800,00)	12,40
		0,00	17.033.200,00	0,00	17.033.200,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 20 . 06	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Transmigrasi	0,00	15.864.000,00	0,00	15.864.000,00	(10.354.800,00)	34,73
		0,00	5.509.200,00	0,00	5.509.200,00		
3.08 . 3.08.01 . 01 . 20 . 07	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	0,00	121.472.000,00	0,00	121.472.000,00	(109.948.000,00)	9,49
		0,00	11.524.000,00	0,00	11.524.000,00		
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	12.437.093.000,00	57.400.834.857,00	6.664.745.189,00	76.502.673.046,00	(3.051.031.924,00)	96,01
		11.975.072.000,00	54.902.344.381,00	6.574.224.741,00	73.451.641.122,00		
4.01	Administrasi Pemerintahan	7.899.505.000,00	45.496.782.457,00	5.760.655.189,00	59.156.942.646,00	(2.376.037.391,00)	95,98
		7.612.663.000,00	43.483.472.242,00	5.684.770.013,00	56.780.905.255,00		
4.01 . 4.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	4.252.565.000,00	21.723.496.442,00	4.347.536.000,00	30.323.597.442,00	(56.200.072,00)	99,81
		4.227.045.000,00	21.700.276.470,00	4.340.075.900,00	30.267.397.370,00		
4.01 . 4.01.02 . 01	SEKRETARIAT DAERAH	4.252.565.000,00	21.723.496.442,00	4.347.536.000,00	30.323.597.442,00	(56.200.072,00)	99,81
		4.227.045.000,00	21.700.276.470,00	4.340.075.900,00	30.267.397.370,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.434.750.000,00	9.855.355.842,00	0,00	13.290.105.842,00	(440.564,00)	100,00
		3.434.536.000,00	9.855.129.278,00	0,00	13.289.665.278,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	37.700.000,00	0,00	37.700.000,00	0,00	100,00
		0,00	37.700.000,00	0,00	37.700.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	825.600.000,00	0,00	825.600.000,00	0,00	100,00
		0,00	825.600.000,00	0,00	825.600.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	(75.635,00)	99,96
		0,00	199.924.365,00	0,00	199.924.365,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	98.250.000,00	0,00	98.250.000,00	0,00	100,00
		0,00	98.250.000,00	0,00	98.250.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.434.750.000,00	36.000.000,00	0,00	3.470.750.000,00	(217.000,00)	99,99
		3.434.536.000,00	35.997.000,00	0,00	3.470.533.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	660.350.000,00	0,00	660.350.000,00	(91.529,00)	99,99
		0,00	660.258.471,00	0,00	660.258.471,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	86.000.000,00	0,00	86.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	86.000.000,00	0,00	86.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	169.081.800,00	0,00	169.081.800,00	(1.300,00)	100,00
		0,00	169.080.500,00	0,00	169.080.500,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	143.350.000,00	0,00	143.350.000,00	(5.100,00)	100,00
		0,00	143.344.900,00	0,00	143.344.900,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	1.910.000.000,00	0,00	1.910.000.000,00	(44.000,00)	100,00
		0,00	1.909.956.000,00	0,00	1.909.956.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	53.250.000,00	0,00	53.250.000,00	0,00	100,00
		0,00	53.250.000,00	0,00	53.250.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	2.999.600.000,00	0,00	2.999.600.000,00	(6.000,00)	100,00
		0,00	2.999.594.000,00	0,00	2.999.594.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	2.336.174.042,00	0,00	2.336.174.042,00	0,00	100,00
		0,00	2.336.174.042,00	0,00	2.336.174.042,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 01 . 27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20.000.000,00	2.014.537.000,00	4.268.048.500,00	6.302.585.500,00	(5.776.600,00)	99,91
		20.000.000,00	2.014.482.000,00	4.262.326.900,00	6.296.808.900,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	2.859.582.500,00	2.859.582.500,00	(800.000,00)	99,97
		0,00	0,00	2.858.782.500,00	2.858.782.500,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	145.400.000,00	121.000.000,00	266.400.000,00	(1.083.000,00)	99,59
		0,00	145.400.000,00	119.917.000,00	265.317.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	0,00	0,00	153.000.000,00	153.000.000,00	(1.318.000,00)	99,14
		0,00	0,00	151.682.000,00	151.682.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	165.900.000,00	165.900.000,00	(600.000,00)	99,64
		0,00	0,00	165.300.000,00	165.300.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	(640.000,00)	99,71
		0,00	0,00	219.360.000,00	219.360.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	0,00	160.000.000,00	50.000.000,00	210.000.000,00	(40.000,00)	99,98
		0,00	160.000.000,00	49.960.000,00	209.960.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,00	60.000.000,00	698.566.000,00	778.566.000,00	(1.240.600,00)	99,84
		20.000.000,00	60.000.000,00	697.325.400,00	777.325.400,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	0,00	379.108.000,00	0,00	379.108.000,00	0,00	100,00
		0,00	379.108.000,00	0,00	379.108.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	1.236.029.000,00	0,00	1.236.029.000,00	(55.000,00)	100,00
		0,00	1.235.974.000,00	0,00	1.235.974.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Listrik, Air dan Telepon	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	449.000.000,00	0,00	449.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	449.000.000,00	0,00	449.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	449.000.000,00	0,00	449.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	449.000.000,00	0,00	449.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.790.000,00	85.962.300,00	0,00	96.752.300,00	(90.000,00)	99,91
		10.775.000,00	85.887.300,00	0,00	96.662.300,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 05 . 27	Peningkatkan kompetensi SDM Aparatur bidang keprotokolan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.02 . 01 . 05 . 28	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah	10.790.000,00	85.962.300,00	0,00	96.752.300,00	(90.000,00)	99,91
		10.775.000,00	85.887.300,00	0,00	96.662.300,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	99.700.000,00	5.080.441.900,00	10.000.000,00	5.190.141.900,00	(1.311.778,00)	99,97
		99.700.000,00	5.079.931.122,00	9.199.000,00	5.188.830.122,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 16 . 05	Kunjungan kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah.	0,00	584.600.000,00	0,00	584.600.000,00	0,00	100,00
		0,00	584.600.000,00	0,00	584.600.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 16 . 06	Kordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.	0,00	3.424.774.000,00	0,00	3.424.774.000,00	0,00	100,00
		0,00	3.424.774.000,00	0,00	3.424.774.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 16 . 17	Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan	0,00	113.416.000,00	10.000.000,00	123.416.000,00	(801.878,00)	99,35
		0,00	113.415.122,00	9.199.000,00	122.614.122,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 16 . 18	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan KDH/ WKDH	99.700.000,00	957.651.900,00	0,00	1.057.351.900,00	(509.900,00)	99,95
		99.700.000,00	957.142.000,00	0,00	1.056.842.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 22	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*)	0,00	29.057.500,00	0,00	29.057.500,00	0,00	100,00
		0,00	29.057.500,00	0,00	29.057.500,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 22 . 01	PATEN*)	0,00	29.057.500,00	0,00	29.057.500,00	0,00	100,00
		0,00	29.057.500,00	0,00	29.057.500,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	86.240.000,00	670.558.850,00	0,00	756.798.850,00	(26.470.201,00)	96,50
		66.010.000,00	664.318.649,00	0,00	730.328.649,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 26 . 12	Publikasi Peraturan Perundang-undangan*)	5.048.000,00	74.644.100,00	0,00	79.692.100,00	(146.385,00)	99,82
		5.018.000,00	74.527.715,00	0,00	79.545.715,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 26 . 15	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan*)	26.440.000,00	249.085.500,00	0,00	275.525.500,00	(223.250,00)	99,92
		26.244.000,00	249.058.250,00	0,00	275.302.250,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 26 . 17	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan OPD	13.250.000,00	118.925.000,00	0,00	132.175.000,00	(95.567,00)	99,93
		13.250.000,00	118.829.433,00	0,00	132.079.433,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 26 . 18	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari	15.800.000,00	22.782.500,00	0,00	38.582.500,00	(4.200,00)	99,99
		15.796.000,00	22.782.300,00	0,00	38.578.300,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 26 . 19	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan	20.000.000,00	117.569.450,00	0,00	137.569.450,00	(26.000.000,00)	81,10
		0,00	111.569.450,00	0,00	111.569.450,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.02 . 01 . 26 . 20	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	3.850.000,00	59.859.800,00	0,00	63.709.800,00	(799,00)	100,00
		3.850.000,00	59.859.001,00	0,00	63.709.001,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 26 . 21	Fasilitasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	1.852.000,00	27.692.500,00	0,00	29.544.500,00	0,00	100,00
		1.852.000,00	27.692.500,00	0,00	29.544.500,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	24.300.000,00	273.927.200,00	0,00	298.227.200,00	(306.651,00)	99,90
		24.300.000,00	273.620.549,00	0,00	297.920.549,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 27 . 09	Pembakuan Nama Rupa Bumi	0,00	31.222.700,00	0,00	31.222.700,00	(53.400,00)	99,83
		0,00	31.169.300,00	0,00	31.169.300,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 27 . 13	Penyusunan Analisis Jabatan OPD	0,00	123.954.500,00	0,00	123.954.500,00	(178.500,00)	99,86
		0,00	123.776.000,00	0,00	123.776.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 27 . 17	Penyusunan Evaluasi Jabatan OPD	24.300.000,00	118.750.000,00	0,00	143.050.000,00	(74.751,00)	99,95
		24.300.000,00	118.675.249,00	0,00	142.975.249,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 54	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur *)	17.400.000,00	86.304.950,00	0,00	103.704.950,00	(65.000,00)	99,94
		17.400.000,00	86.239.950,00	0,00	103.639.950,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 54 . 17	Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/ Berprestasi	7.900.000,00	31.598.000,00	0,00	39.498.000,00	(65.000,00)	99,84
		7.900.000,00	31.533.000,00	0,00	39.433.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 54 . 18	Penilaian Nagari Terbaik Bidang Keagamaan dan Ketertiban	9.500.000,00	18.317.500,00	0,00	27.817.500,00	0,00	100,00
		9.500.000,00	18.317.500,00	0,00	27.817.500,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 54 . 21	Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan PMD, PPKB, Transmigrasi dan Dukcapil	0,00	36.389.450,00	0,00	36.389.450,00	0,00	100,00
		0,00	36.389.450,00	0,00	36.389.450,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 55	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan *)	1.820.000,00	71.647.500,00	4.900.000,00	78.367.500,00	(1.574,00)	100,00
		1.820.000,00	71.645.926,00	4.900.000,00	78.365.926,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 55 . 02	Fasilitasi dan Pelaporan Rencana Aksi HAM	1.820.000,00	71.647.500,00	4.900.000,00	78.367.500,00	(1.574,00)	100,00
		1.820.000,00	71.645.926,00	4.900.000,00	78.365.926,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 59	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	0,00	27.900.700,00	0,00	27.900.700,00	(109.100,00)	99,61
		0,00	27.791.600,00	0,00	27.791.600,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 59 . 29	koordinasi Bidang Perhubungan	0,00	27.900.700,00	0,00	27.900.700,00	(109.100,00)	99,61
		0,00	27.791.600,00	0,00	27.791.600,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.02 . 01 . 60	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	55.015.000,00	1.026.624.500,00	17.587.500,00	1.099.227.000,00	(1.209.525,00)	99,89
		55.015.000,00	1.026.002.475,00	17.000.000,00	1.098.017.475,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 60 . 01	Penyusunan Analisa Standar Belanja	51.000.000,00	149.000.000,00	0,00	200.000.000,00	(66.450,00)	99,97
		51.000.000,00	148.933.550,00	0,00	199.933.550,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 60 . 02	Penyusunan standar satuan harga	0,00	63.639.500,00	0,00	63.639.500,00	(395.000,00)	99,38
		0,00	63.244.500,00	0,00	63.244.500,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 60 . 75	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)	1.555.000,00	257.445.000,00	17.587.500,00	276.587.500,00	(728.575,00)	99,74
		1.555.000,00	257.303.925,00	17.000.000,00	275.858.925,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 60 . 77	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah	2.460.000,00	556.540.000,00	0,00	559.000.000,00	(19.500,00)	100,00
		2.460.000,00	556.520.500,00	0,00	558.980.500,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 61	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	33.600.000,00	110.090.000,00	0,00	143.690.000,00	(39.904,00)	99,97
		33.600.000,00	110.050.096,00	0,00	143.650.096,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 61 . 05	Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah, Pihak Ketiga dan Luar Negeri	33.600.000,00	110.090.000,00	0,00	143.690.000,00	(39.904,00)	99,97
		33.600.000,00	110.050.096,00	0,00	143.650.096,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 65	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	0,00	24.438.000,00	0,00	24.438.000,00	(82.500,00)	99,66
		0,00	24.355.500,00	0,00	24.355.500,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 65 . 01	Dialog Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota LSM/ Organisasi Sosial	0,00	24.438.000,00	0,00	24.438.000,00	(82.500,00)	99,66
		0,00	24.355.500,00	0,00	24.355.500,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 66	Program Pengembangan Wilayah	0,00	136.236.600,00	0,00	136.236.600,00	(144.864,00)	99,89
		0,00	136.091.736,00	0,00	136.091.736,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 66 . 01	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah dan Batas Nagari	0,00	136.236.600,00	0,00	136.236.600,00	(144.864,00)	99,89
		0,00	136.091.736,00	0,00	136.091.736,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 67	Program Optimalisasi Lelang terpadu	342.930.000,00	666.462.500,00	47.000.000,00	1.056.392.500,00	(6.258.983,00)	99,41
		338.605.000,00	664.878.517,00	46.650.000,00	1.050.133.517,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 67 . 01	Operasional LPSE	84.000.000,00	11.369.000,00	0,00	95.369.000,00	(4.004.000,00)	95,80
		80.000.000,00	11.365.000,00	0,00	91.365.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 67 . 02	Operasional ULP	258.930.000,00	96.098.000,00	35.000.000,00	390.028.000,00	(904.656,00)	99,77
		258.605.000,00	95.868.344,00	34.650.000,00	389.123.344,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.02 . 01 . 67 . 04	Performance Management Monitoring ULP	0,00	34.107.000,00	0,00	34.107.000,00	(6.100,00)	99,98
		0,00	34.100.900,00	0,00	34.100.900,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 67 . 05	Peningkatan SDM Penyelenggaran dan Penyedia Barang dan Jasa	0,00	79.423.000,00	0,00	79.423.000,00	(301.326,00)	99,62
		0,00	79.121.674,00	0,00	79.121.674,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 67 . 06	Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE	0,00	57.710.000,00	0,00	57.710.000,00	(92.069,00)	99,84
		0,00	57.617.931,00	0,00	57.617.931,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 67 . 08	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	0,00	152.840.000,00	12.000.000,00	164.840.000,00	(573.303,00)	99,65
		0,00	152.266.697,00	12.000.000,00	164.266.697,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 67 . 09	Penanganan Permasalahan PBJ	0,00	65.036.500,00	0,00	65.036.500,00	(193.164,00)	99,70
		0,00	64.843.336,00	0,00	64.843.336,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 67 . 10	KoordinasiPembinaan, Peningkatan kelembagaan bidang PBJ	0,00	169.879.000,00	0,00	169.879.000,00	(184.365,00)	99,89
		0,00	169.694.635,00	0,00	169.694.635,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 68	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam	0,00	159.747.500,00	0,00	159.747.500,00	(463.900,00)	99,71
		0,00	159.283.600,00	0,00	159.283.600,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 68 . 01	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	0,00	85.148.500,00	0,00	85.148.500,00	(408.900,00)	99,52
		0,00	84.739.600,00	0,00	84.739.600,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 68 . 02	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	0,00	74.599.000,00	0,00	74.599.000,00	(55.000,00)	99,93
		0,00	74.544.000,00	0,00	74.544.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 69	Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah	700.000,00	341.076.100,00	0,00	341.776.100,00	(7.716.099,00)	97,74
		0,00	334.060.001,00	0,00	334.060.001,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 69 . 01	Koordinasi Bidang Perekonomian	700.000,00	281.575.100,00	0,00	282.275.100,00	(1.534.499,00)	99,46
		0,00	280.740.601,00	0,00	280.740.601,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 69 . 02	Monitoring dan Pengendalian Inflasi	0,00	59.501.000,00	0,00	59.501.000,00	(6.181.600,00)	89,61
		0,00	53.319.400,00	0,00	53.319.400,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 70	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	0,00	83.242.500,00	0,00	83.242.500,00	(5.428.018,00)	93,48
		0,00	77.814.482,00	0,00	77.814.482,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 70 . 01	Pengawasan Barang Barang Bersubsdi	0,00	83.242.500,00	0,00	83.242.500,00	(5.428.018,00)	93,48
		0,00	77.814.482,00	0,00	77.814.482,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 72	Program pengembangan promosi dan kerja sama investasi	0,00	36.691.000,00	0,00	36.691.000,00	0,00	100,00
		0,00	36.691.000,00	0,00	36.691.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.02 . 01 . 72 . 01	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (CSR)	0,00	36.691.000,00	0,00	36.691.000,00	0,00	100,00
		0,00	36.691.000,00	0,00	36.691.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 73	Program Pelaksanaan Pembangunan Daerah	119.620.000,00	466.472.000,00	0,00	586.092.000,00	(284.811,00)	99,95
		119.584.000,00	466.223.189,00	0,00	585.807.189,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 73 . 01	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	45.650.000,00	158.970.000,00	0,00	204.620.000,00	(64.107,00)	99,97
		45.650.000,00	158.905.893,00	0,00	204.555.893,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 73 . 03	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	25.150.000,00	49.877.000,00	0,00	75.027.000,00	0,00	100,00
		25.150.000,00	49.877.000,00	0,00	75.027.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 73 . 04	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	48.820.000,00	171.516.250,00	0,00	220.336.250,00	(106.362,00)	99,95
		48.784.000,00	171.445.888,00	0,00	220.229.888,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 73 . 07	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	0,00	15.309.750,00	0,00	15.309.750,00	0,00	100,00
		0,00	15.309.750,00	0,00	15.309.750,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 73 . 10	Fasilitasi Nagari Binaan Perantau Kerjasama Rantau	0,00	54.995.000,00	0,00	54.995.000,00	(114.342,00)	99,79
		0,00	54.880.658,00	0,00	54.880.658,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 73 . 11	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Kerjasama Daerah	0,00	15.804.000,00	0,00	15.804.000,00	0,00	100,00
		0,00	15.804.000,00	0,00	15.804.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 74	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.700.000,00	27.722.000,00	0,00	33.422.000,00	0,00	100,00
		5.700.000,00	27.722.000,00	0,00	33.422.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 01 . 74 . 01	Bimtek Penyusunan LPPD	5.700.000,00	27.722.000,00	0,00	33.422.000,00	0,00	100,00
		5.700.000,00	27.722.000,00	0,00	33.422.000,00		
4.01 . 4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	1.629.440.000,00	19.906.537.500,00	1.086.000.000,00	22.621.977.500,00	(2.286.114.456,00)	89,89
		1.382.428.000,00	17.935.139.244,00	1.018.295.800,00	20.335.863.044,00		
4.01 . 4.01.04 . 01	SEKRETARIAT DPRD	1.629.440.000,00	19.906.537.500,00	1.086.000.000,00	22.621.977.500,00	(2.286.114.456,00)	89,89
		1.382.428.000,00	17.935.139.244,00	1.018.295.800,00	20.335.863.044,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.399.840.000,00	2.267.206.000,00	3.500.000,00	3.670.546.000,00	(525.429.999,00)	85,69
		1.202.713.000,00	1.938.903.001,00	3.500.000,00	3.145.116.001,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	32.175.000,00	0,00	32.175.000,00	(6.816.250,00)	78,82
		0,00	25.358.750,00	0,00	25.358.750,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	438.000.000,00	0,00	438.000.000,00	(75.251.178,00)	82,82
		0,00	362.748.822,00	0,00	362.748.822,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.000.000,00	216.837.500,00	0,00	222.837.500,00	(10.287.250,00)	95,38
		2.500.000,00	210.050.250,00	0,00	212.550.250,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0,00	103.486.500,00	0,00	103.486.500,00	(89.937.750,00)	13,09
		0,00	13.548.750,00	0,00	13.548.750,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	(20.869.850,00)	81,03
		0,00	89.130.150,00	0,00	89.130.150,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.393.840.000,00	0,00	0,00	1.393.840.000,00	(193.627.000,00)	86,11
		1.200.213.000,00	0,00	0,00	1.200.213.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	60.887.000,00	3.500.000,00	64.387.000,00	(7.499.000,00)	88,35
		0,00	53.388.000,00	3.500.000,00	56.888.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	105.950.000,00	0,00	105.950.000,00	(47.625.000,00)	55,05
		0,00	58.325.000,00	0,00	58.325.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	60.055.000,00	0,00	60.055.000,00	(21.500,00)	99,96
		0,00	60.033.500,00	0,00	60.033.500,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	189.150.000,00	0,00	189.150.000,00	(20.852.100,00)	88,98
		0,00	168.297.900,00	0,00	168.297.900,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	31.850.000,00	0,00	31.850.000,00	(3.550.000,00)	88,85
		0,00	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	(17.825.000,00)	86,29
		0,00	112.175.000,00	0,00	112.175.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	304.000.000,00	0,00	304.000.000,00	(565.000,00)	99,81
		0,00	303.435.000,00	0,00	303.435.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	113.050.000,00	0,00	113.050.000,00	(26.818.000,00)	76,28
		0,00	86.232.000,00	0,00	86.232.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	371.765.000,00	0,00	371.765.000,00	(3.885.121,00)	98,95
		0,00	367.879.879,00	0,00	367.879.879,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	474.111.500,00	1.082.500.000,00	1.556.611.500,00	(232.054.354,00)	85,09
		0,00	309.761.346,00	1.014.795.800,00	1.324.557.146,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	(2.400.000,00)	96,00
		0,00	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	342.000.000,00	342.000.000,00	(36.770.000,00)	89,25
		0,00	0,00	305.230.000,00	305.230.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	55.654.500,00	195.500.000,00	251.154.500,00	(31.796.900,00)	87,34
		0,00	24.514.600,00	194.843.000,00	219.357.600,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	0,00	189.708.000,00	0,00	189.708.000,00	(62.438.254,00)	67,09
		0,00	127.269.746,00	0,00	127.269.746,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	225.999.000,00	0,00	225.999.000,00	(68.022.000,00)	69,90
		0,00	157.977.000,00	0,00	157.977.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	2.750.000,00	485.000.000,00	487.750.000,00	(30.627.200,00)	93,72
		0,00	0,00	457.122.800,00	457.122.800,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	0,00	463.500.000,00	0,00	463.500.000,00	(22.620.000,00)	95,12
		0,00	440.880.000,00	0,00	440.880.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	463.500.000,00	0,00	463.500.000,00	(22.620.000,00)	95,12
		0,00	440.880.000,00	0,00	440.880.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	0,00	381.488.500,00	0,00	381.488.500,00	(194.716.400,00)	48,96
		0,00	186.772.100,00	0,00	186.772.100,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	381.488.500,00	0,00	381.488.500,00	(194.716.400,00)	48,96
		0,00	186.772.100,00	0,00	186.772.100,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	<i>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</i>	229.600.000,00	16.320.231.500,00	0,00	16.549.831.500,00	(1.311.293.703,00)	92,08
		179.715.000,00	15.058.822.797,00	0,00	15.238.537.797,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01	Pembahasan rancangan peraturan daerah dan Peraturan lainnya	13.600.000,00	6.137.225.000,00	0,00	6.150.825.000,00	(548.325.106,00)	91,09
		8.715.000,00	5.593.784.894,00	0,00	5.602.499.894,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	0,00	423.700.000,00	0,00	423.700.000,00	(113.167.500,00)	73,29
		0,00	310.532.500,00	0,00	310.532.500,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 05	Kegiatan Reses	0,00	419.627.500,00	0,00	419.627.500,00	(174.400.600,00)	58,44
		0,00	245.226.900,00	0,00	245.226.900,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	0,00	6.267.200.000,00	0,00	6.267.200.000,00	(190.851.575,00)	96,95
		0,00	6.076.348.425,00	0,00	6.076.348.425,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	0,00	2.597.360.000,00	0,00	2.597.360.000,00	(137.338.610,00)	94,71
		0,00	2.460.021.390,00	0,00	2.460.021.390,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 11	Fasilitasi Penyusunan Standar Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 12	Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD	0,00	471.498.000,00	0,00	471.498.000,00	(98.589.312,00)	79,09
		0,00	372.908.688,00	0,00	372.908.688,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 13	Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli	216.000.000,00	3.621.000,00	0,00	219.621.000,00	(48.621.000,00)	77,86
		171.000.000,00	0,00	0,00	171.000.000,00		
4.01 . 4.01.05	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	176.410.000,00	374.696.250,00	0,00	551.106.250,00	(358.208,00)	99,94
		176.230.000,00	374.518.042,00	0,00	550.748.042,00		
4.01 . 4.01.05 . 01	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	176.410.000,00	374.696.250,00	0,00	551.106.250,00	(358.208,00)	99,94
		176.230.000,00	374.518.042,00	0,00	550.748.042,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	176.410.000,00	330.298.900,00	0,00	506.708.900,00	(354.408,00)	99,93
		176.230.000,00	330.124.492,00	0,00	506.354.492,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	16.716.000,00	0,00	16.716.000,00	(78.247,00)	99,53
		0,00	16.637.753,00	0,00	16.637.753,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(48.500,00)	98,38
		0,00	2.951.500,00	0,00	2.951.500,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	176.410.000,00	0,00	0,00	176.410.000,00	(180.000,00)	99,90
		176.230.000,00	0,00	0,00	176.230.000,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	3.291.500,00	0,00	3.291.500,00	0,00	100,00
		0,00	3.291.500,00	0,00	3.291.500,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	100,00
		0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	36.898.200,00	0,00	36.898.200,00	0,00	100,00
		0,00	36.898.200,00	0,00	36.898.200,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	14.924.000,00	0,00	14.924.000,00	0,00	100,00
		0,00	14.924.000,00	0,00	14.924.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	1.391.500,00	0,00	1.391.500,00	0,00	100,00
		0,00	1.391.500,00	0,00	1.391.500,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	8.045.000,00	0,00	8.045.000,00	0,00	100,00
		0,00	8.045.000,00	0,00	8.045.000,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	(5.000,00)	99,81
		0,00	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	61.670.000,00	0,00	61.670.000,00	0,00	100,00
		0,00	61.670.000,00	0,00	61.670.000,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	174.612.700,00	0,00	174.612.700,00	(42.661,00)	99,98
		0,00	174.570.039,00	0,00	174.570.039,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	28.783.550,00	0,00	28.783.550,00	0,00	100,00
		0,00	28.783.550,00	0,00	28.783.550,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	28.783.550,00	0,00	28.783.550,00	0,00	100,00
		0,00	28.783.550,00	0,00	28.783.550,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	15.613.800,00	0,00	15.613.800,00	(3.800,00)	99,98
		0,00	15.610.000,00	0,00	15.610.000,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 57 . 01	Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	12.083.800,00	0,00	12.083.800,00	(3.800,00)	99,97
		0,00	12.080.000,00	0,00	12.080.000,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 57 . 02	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan	0,00	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00	0,00	100,00
		0,00	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00		
4.01 . 4.01.06	KECAMATAN SITIUNG	143.910.000,00	295.190.000,00	25.000.000,00	464.100.000,00	(306.700,00)	99,93
		143.910.000,00	294.883.300,00	25.000.000,00	463.793.300,00		
4.01 . 4.01.06 . 01	KECAMATAN SITIUNG	143.910.000,00	295.190.000,00	25.000.000,00	464.100.000,00	(306.700,00)	99,93
		143.910.000,00	294.883.300,00	25.000.000,00	463.793.300,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	133.160.000,00	220.851.200,00	25.000.000,00	379.011.200,00	(116.300,00)	99,97
		133.160.000,00	220.734.900,00	25.000.000,00	378.894.900,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	100,00
		0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	(3.100,00)	99,95
		0,00	5.996.900,00	0,00	5.996.900,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	(30.950,00)	97,79
		0,00	1.369.050,00	0,00	1.369.050,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	133.160.000,00	0,00	0,00	133.160.000,00	0,00	100,00
		133.160.000,00	0,00	0,00	133.160.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	2.682.700,00	0,00	2.682.700,00	(700,00)	99,97
		0,00	2.682.000,00	0,00	2.682.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	4.427.500,00	0,00	4.427.500,00	(500,00)	99,99
		0,00	4.427.000,00	0,00	4.427.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	12.203.000,00	0,00	12.203.000,00	(50,00)	100,00
		0,00	12.202.950,00	0,00	12.202.950,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	8.618.500,00	0,00	8.618.500,00	(5.000,00)	99,94
		0,00	8.613.500,00	0,00	8.613.500,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	100,00
		0,00	373.000,00	0,00	373.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	3.000.000,00	25.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	3.000.000,00	25.000.000,00	28.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	26.008.000,00	0,00	26.008.000,00	0,00	100,00
		0,00	26.008.000,00	0,00	26.008.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	151.938.500,00	0,00	151.938.500,00	(76.000,00)	99,95
		0,00	151.862.500,00	0,00	151.862.500,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.750.000,00	54.358.800,00	0,00	65.108.800,00	(60.400,00)	99,91
		10.750.000,00	54.298.400,00	0,00	65.048.400,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.750.000,00	34.250.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	100,00
		10.750.000,00	34.250.000,00	0,00	45.000.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	20.108.800,00	0,00	20.108.800,00	(60.400,00)	99,70
		0,00	20.048.400,00	0,00	20.048.400,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	0,00	100,00
		0,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	0,00	100,00
		0,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	8.730.000,00	0,00	8.730.000,00	(130.000,00)	98,51
		0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 57 . 01	Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	8.630.000,00	0,00	8.630.000,00	(30.000,00)	99,65
		0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 57 . 02	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.07	KECAMATAN KOTO BARU	248.640.000,00	282.602.800,00	64.719.789,00	595.962.589,00	(3.688.964,00)	99,38
		245.860.000,00	281.693.837,00	64.719.788,00	592.273.625,00		
4.01 . 4.01.07 . 01	KECAMATAN KOTO BARU	248.640.000,00	282.602.800,00	64.719.789,00	595.962.589,00	(3.688.964,00)	99,38
		245.860.000,00	281.693.837,00	64.719.788,00	592.273.625,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	228.840.000,00	236.057.600,00	46.293.910,00	511.191.510,00	(3.590.964,00)	99,30
		226.060.000,00	235.246.637,00	46.293.909,00	507.600.546,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	(337.337,00)	95,98
		0,00	8.062.663,00	0,00	8.062.663,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	(122.450,00)	92,80
		0,00	1.577.550,00	0,00	1.577.550,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	226.590.000,00	0,00	0,00	226.590.000,00	(2.780.000,00)	98,77
		223.810.000,00	0,00	0,00	223.810.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	4.609.000,00	0,00	4.609.000,00	0,00	100,00
		0,00	4.609.000,00	0,00	4.609.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	17.042.000,00	0,00	17.042.000,00	0,00	100,00
		0,00	17.042.000,00	0,00	17.042.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	6.866.800,00	0,00	6.866.800,00	0,00	100,00
		0,00	6.866.800,00	0,00	6.866.800,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	2.779.000,00	0,00	2.779.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.779.000,00	0,00	2.779.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	8.000.000,00	46.293.910,00	54.293.910,00	(1,00)	100,00
		0,00	8.000.000,00	46.293.909,00	54.293.909,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	517.800,00	0,00	517.800,00	0,00	100,00
		0,00	517.800,00	0,00	517.800,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	(14.000,00)	99,95
		0,00	29.486.000,00	0,00	29.486.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.250.000,00	152.843.000,00	0,00	155.093.000,00	(337.176,00)	99,78
		2.250.000,00	152.505.824,00	0,00	154.755.824,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.800.000,00	29.745.200,00	18.425.879,00	67.971.079,00	(48.000,00)	99,93
		19.800.000,00	29.697.200,00	18.425.879,00	67.923.079,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	18.425.879,00	18.425.879,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	18.425.879,00	18.425.879,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19.800.000,00	24.745.200,00	0,00	44.545.200,00	(48.000,00)	99,89
		19.800.000,00	24.697.200,00	0,00	44.497.200,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.07 . 01 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	(50.000,00)	99,49
		0,00	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 57 . 01	Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	7.310.000,00	0,00	7.310.000,00	(50.000,00)	99,32
		0,00	7.260.000,00	0,00	7.260.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 57 . 02	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00		
4.01 . 4.01.08	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	152.750.000,00	293.351.400,00	28.615.000,00	474.716.400,00	(2.903.387,00)	99,39
		152.750.000,00	290.448.013,00	28.615.000,00	471.813.013,00		
4.01 . 4.01.08 . 01	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	152.750.000,00	293.351.400,00	28.615.000,00	474.716.400,00	(2.903.387,00)	99,39
		152.750.000,00	290.448.013,00	28.615.000,00	471.813.013,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	152.750.000,00	220.996.400,00	7.975.000,00	381.721.400,00	(658.387,00)	99,83
		152.750.000,00	220.338.013,00	7.975.000,00	381.063.013,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	(8.000,00)	99,95
		0,00	15.292.000,00	0,00	15.292.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	1.729.900,00	0,00	1.729.900,00	(438.900,00)	74,63
		0,00	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	152.750.000,00	0,00	0,00	152.750.000,00	0,00	100,00
		152.750.000,00	0,00	0,00	152.750.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	2.866.000,00	0,00	2.866.000,00	(5.000,00)	99,83
		0,00	2.861.000,00	0,00	2.861.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	6.967.500,00	0,00	6.967.500,00	0,00	100,00
		0,00	6.967.500,00	0,00	6.967.500,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	16.778.100,00	0,00	16.778.100,00	0,00	100,00
		0,00	16.778.100,00	0,00	16.778.100,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	7.759.900,00	0,00	7.759.900,00	(9.150,00)	99,88
		0,00	7.750.750,00	0,00	7.750.750,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	7.975.000,00	7.975.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	(34.000,00)	99,88
		0,00	29.366.000,00	0,00	29.366.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	136.615.000,00	0,00	136.615.000,00	(163.337,00)	99,88
		0,00	136.451.663,00	0,00	136.451.663,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	0,00	43.605.000,00	20.640.000,00	64.245.000,00	(2.240.000,00)	96,51
		0,00	41.365.000,00	20.640.000,00	62.005.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	20.640.000,00	20.640.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	20.640.000,00	20.640.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	26.605.000,00	0,00	26.605.000,00	(2.240.000,00)	91,58
		0,00	24.365.000,00	0,00	24.365.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 03	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	(5.000,00)	99,97
		0,00	16.995.000,00	0,00	16.995.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	(5.000,00)	99,97
		0,00	16.995.000,00	0,00	16.995.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 57	<i>Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa</i>	0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	0,00	100,00
		0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 57 . 01	Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	0,00	100,00
		0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 57 . 02	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.09	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	151.230.000,00	286.252.400,00	30.500.000,00	467.982.400,00	(2.541.584,00)	99,46
		151.230.000,00	283.861.191,00	30.349.625,00	465.440.816,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.09 . 01	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	151.230.000,00	286.252.400,00	30.500.000,00	467.982.400,00	(2.541.584,00)	99,46
		151.230.000,00	283.861.191,00	30.349.625,00	465.440.816,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	151.230.000,00	209.350.100,00	4.500.000,00	365.080.100,00	(2.032.934,00)	99,44
		151.230.000,00	207.336.291,00	4.480.875,00	363.047.166,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	(1.253.750,00)	79,10
		0,00	4.746.250,00	0,00	4.746.250,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	(349.550,00)	87,95
		0,00	2.550.450,00	0,00	2.550.450,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	151.230.000,00	0,00	0,00	151.230.000,00	0,00	100,00
		151.230.000,00	0,00	0,00	151.230.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	100,00
		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	0,00	100,00
		0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	12.762.300,00	0,00	12.762.300,00	(118.734,00)	99,07
		0,00	12.643.566,00	0,00	12.643.566,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	10.288.800,00	0,00	10.288.800,00	(17.425,00)	99,83
		0,00	10.271.375,00	0,00	10.271.375,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	(19.125,00)	99,58
		0,00	0,00	4.480.875,00	4.480.875,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	19.728.000,00	0,00	19.728.000,00	0,00	100,00
		0,00	19.728.000,00	0,00	19.728.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	149.228.000,00	0,00	149.228.000,00	(274.350,00)	99,82
		0,00	148.953.650,00	0,00	148.953.650,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	49.038.800,00	26.000.000,00	75.038.800,00	(234.250,00)	99,69
		0,00	48.935.800,00	25.868.750,00	74.804.550,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	(100.000,00)	99,47
		0,00	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	(31.250,00)	99,55
		0,00	0,00	6.968.750,00	6.968.750,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	(11.500,00)	99,86
		0,00	7.988.500,00	0,00	7.988.500,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	41.038.800,00	0,00	41.038.800,00	(91.500,00)	99,78
		0,00	40.947.300,00	0,00	40.947.300,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00	0,00	100,00
		0,00	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00	0,00	100,00
		0,00	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	16.313.500,00	0,00	16.313.500,00	(274.400,00)	98,32
		0,00	16.039.100,00	0,00	16.039.100,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 57 . 01	Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	12.155.000,00	0,00	12.155.000,00	(215.900,00)	98,22
		0,00	11.939.100,00	0,00	11.939.100,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 57 . 02	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan	0,00	4.158.500,00	0,00	4.158.500,00	(58.500,00)	98,59
		0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00		
4.01 . 4.01.10	KECAMATAN TIMPEH	150.220.000,00	318.297.950,00	11.000.000,00	479.517.950,00	(804.850,00)	99,83
		150.220.000,00	317.563.600,00	10.929.500,00	478.713.100,00		
4.01 . 4.01.10 . 01	KECAMATAN TIMPEH	150.220.000,00	318.297.950,00	11.000.000,00	479.517.950,00	(804.850,00)	99,83
		150.220.000,00	317.563.600,00	10.929.500,00	478.713.100,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150.220.000,00	279.765.950,00	8.000.000,00	437.985.950,00	(756.350,00)	99,83
		150.220.000,00	279.080.100,00	7.929.500,00	437.229.600,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	2.846.000,00	0,00	2.846.000,00	(20.500,00)	99,28
		0,00	2.825.500,00	0,00	2.825.500,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	(14.350,00)	98,90
		0,00	1.285.650,00	0,00	1.285.650,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	150.220.000,00	0,00	0,00	150.220.000,00	0,00	100,00
		150.220.000,00	0,00	0,00	150.220.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	(20.000,00)	99,29
		0,00	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	12.671.950,00	0,00	12.671.950,00	(221.950,00)	98,25
		0,00	12.450.000,00	0,00	12.450.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	7.235.000,00	0,00	7.235.000,00	(96.000,00)	98,67
		0,00	7.139.000,00	0,00	7.139.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	(70.500,00)	99,12
		0,00	0,00	7.929.500,00	7.929.500,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	100,00
		0,00	612.000,00	0,00	612.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	21.485.000,00	0,00	21.485.000,00	(10.000,00)	99,95
		0,00	21.475.000,00	0,00	21.475.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	226.415.000,00	0,00	226.415.000,00	(303.050,00)	99,87
		0,00	226.111.950,00	0,00	226.111.950,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	25.520.000,00	3.000.000,00	28.520.000,00	(48.500,00)	99,83
		0,00	25.471.500,00	3.000.000,00	28.471.500,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	(40.000,00)	98,40
		0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	23.020.000,00	0,00	23.020.000,00	(8.500,00)	99,96
		0,00	23.011.500,00	0,00	23.011.500,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.10 . 01 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	13.012.000,00	0,00	13.012.000,00	0,00	100,00
		0,00	13.012.000,00	0,00	13.012.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 57 . 01	Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	3.762.000,00	0,00	3.762.000,00	0,00	100,00
		0,00	3.762.000,00	0,00	3.762.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 57 . 02	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	0,00	100,00
		0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00		
4.01 . 4.01.11	KECAMATAN KOTO SALAK	170.010.000,00	320.726.900,00	58.467.200,00	549.204.100,00	(88.093,00)	99,98
		169.960.000,00	320.688.807,00	58.467.200,00	549.116.007,00		
4.01 . 4.01.11 . 01	KECAMATAN KOTO SALAK	170.010.000,00	320.726.900,00	58.467.200,00	549.204.100,00	(88.093,00)	99,98
		169.960.000,00	320.688.807,00	58.467.200,00	549.116.007,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	170.010.000,00	289.226.900,00	58.467.200,00	517.704.100,00	(79.093,00)	99,98
		169.960.000,00	289.197.807,00	58.467.200,00	517.625.007,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	(7.000,00)	99,93
		0,00	10.493.000,00	0,00	10.493.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	170.010.000,00	0,00	0,00	170.010.000,00	(50.000,00)	99,97
		169.960.000,00	0,00	0,00	169.960.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	3.124.000,00	0,00	3.124.000,00	0,00	100,00
		0,00	3.124.000,00	0,00	3.124.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	8.293.000,00	0,00	8.293.000,00	0,00	100,00
		0,00	8.293.000,00	0,00	8.293.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	17.215.900,00	0,00	17.215.900,00	(900,00)	99,99
		0,00	17.215.000,00	0,00	17.215.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	9.477.500,00	0,00	9.477.500,00	0,00	100,00
		0,00	9.477.500,00	0,00	9.477.500,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	3.957.500,00	0,00	3.957.500,00	0,00	100,00
		0,00	3.957.500,00	0,00	3.957.500,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	58.467.200,00	58.467.200,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	58.467.200,00	58.467.200,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00	(10.000,00)	99,96
		0,00	23.090.000,00	0,00	23.090.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	210.209.000,00	0,00	210.209.000,00	(11.193,00)	99,99
		0,00	210.197.807,00	0,00	210.197.807,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	(9.000,00)	99,96
		0,00	23.491.000,00	0,00	23.491.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	100,00
		0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	(9.000,00)	99,94
		0,00	15.991.000,00	0,00	15.991.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	100,00
		0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	100,00
		0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	100,00
		0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 57 . 01	Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	100,00
		0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.12	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	153.190.000,00	354.060.500,00	12.950.000,00	520.200.500,00	(2.384.921,00)	99,54
		152.050.000,00	352.815.579,00	12.950.000,00	517.815.579,00		
4.01 . 4.01.12 . 01	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	153.190.000,00	354.060.500,00	12.950.000,00	520.200.500,00	(2.384.921,00)	99,54
		152.050.000,00	352.815.579,00	12.950.000,00	517.815.579,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	153.190.000,00	303.565.500,00	12.950.000,00	469.705.500,00	(1.504.570,00)	99,68
		152.050.000,00	303.200.930,00	12.950.000,00	468.200.930,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	(32.250,00)	99,40
		0,00	5.367.750,00	0,00	5.367.750,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	(59.250,00)	97,18
		0,00	2.040.750,00	0,00	2.040.750,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	153.190.000,00	7.470.000,00	0,00	160.660.000,00	(1.165.000,00)	99,27
		152.050.000,00	7.445.000,00	0,00	159.495.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	2.349.500,00	0,00	2.349.500,00	0,00	100,00
		0,00	2.349.500,00	0,00	2.349.500,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	15.788.000,00	0,00	15.788.000,00	(1.000,00)	99,99
		0,00	15.787.000,00	0,00	15.787.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	6.776.000,00	0,00	6.776.000,00	(1.800,00)	99,97
		0,00	6.774.200,00	0,00	6.774.200,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	877.000,00	0,00	877.000,00	0,00	100,00
		0,00	877.000,00	0,00	877.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	12.950.000,00	12.950.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	45.900.000,00	0,00	45.900.000,00	(10.000,00)	99,98
		0,00	45.890.000,00	0,00	45.890.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	213.825.000,00	0,00	213.825.000,00	(235.270,00)	99,89
		0,00	213.589.730,00	0,00	213.589.730,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	30.095.000,00	0,00	30.095.000,00	(880.350,00)	97,07
		0,00	29.214.650,00	0,00	29.214.650,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	30.095.000,00	0,00	30.095.000,00	(880.350,00)	97,07
		0,00	29.214.650,00	0,00	29.214.650,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	(1,00)	100,00
		0,00	13.399.999,00	0,00	13.399.999,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.12 . 01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	(1,00)	100,00
		0,00	13.399.999,00	0,00	13.399.999,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 57 . 01	Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		
4.01 . 4.01.13	KECAMATAN KOTO BESAR	156.250.000,00	393.075.644,00	14.900.000,00	564.225.644,00	(1.038.300,00)	99,82
		156.250.000,00	392.037.344,00	14.900.000,00	563.187.344,00		
4.01 . 4.01.13 . 01	KECAMATAN KOTO BESAR	156.250.000,00	393.075.644,00	14.900.000,00	564.225.644,00	(1.038.300,00)	99,82
		156.250.000,00	392.037.344,00	14.900.000,00	563.187.344,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	156.250.000,00	338.315.644,00	14.900.000,00	509.465.644,00	(788.300,00)	99,85
		156.250.000,00	337.527.344,00	14.900.000,00	508.677.344,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	(32.500,00)	99,23
		0,00	4.167.500,00	0,00	4.167.500,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	(719.300,00)	53,29
		0,00	820.700,00	0,00	820.700,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	156.250.000,00	0,00	0,00	156.250.000,00	0,00	100,00
		156.250.000,00	0,00	0,00	156.250.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	4.358.400,00	0,00	4.358.400,00	(4.950,00)	99,89
		0,00	4.353.450,00	0,00	4.353.450,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	21.629.050,00	0,00	21.629.050,00	(350,00)	100,00
		0,00	21.628.700,00	0,00	21.628.700,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	15.140.000,00	0,00	15.140.000,00	(31.200,00)	99,79
		0,00	15.108.800,00	0,00	15.108.800,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	9.500.000,00	14.900.000,00	24.400.000,00	0,00	100,00
		0,00	9.500.000,00	14.900.000,00	24.400.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	100,00
		0,00	660.000,00	0,00	660.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	34.160.000,00	0,00	34.160.000,00	0,00	100,00
		0,00	34.160.000,00	0,00	34.160.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	241.719.194,00	0,00	241.719.194,00	0,00	100,00
		0,00	241.719.194,00	0,00	241.719.194,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	30.110.000,00	0,00	30.110.000,00	0,00	100,00
		0,00	30.110.000,00	0,00	30.110.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	100,00
		0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	25.610.000,00	0,00	25.610.000,00	0,00	100,00
		0,00	25.610.000,00	0,00	25.610.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	0,00	100,00
		0,00	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	0,00	100,00
		0,00	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 57 . 01	Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.14	KECAMATAN PADANG LAWEH	138.940.000,00	279.901.671,00	34.967.200,00	453.808.871,00	(1.723.606,00)	99,62
		137.720.000,00	279.398.065,00	34.967.200,00	452.085.265,00		
4.01 . 4.01.14 . 01	KECAMATAN PADANG LAWEH	138.940.000,00	279.901.671,00	34.967.200,00	453.808.871,00	(1.723.606,00)	99,62
		137.720.000,00	279.398.065,00	34.967.200,00	452.085.265,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	138.940.000,00	237.571.500,00	17.900.000,00	394.411.500,00	(1.693.585,00)	99,57
		137.720.000,00	237.097.915,00	17.900.000,00	392.717.915,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.363.000,00	0,00	3.363.000,00	0,00	100,00
		0,00	3.363.000,00	0,00	3.363.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	(17.500,00)	99,31
		0,00	2.502.500,00	0,00	2.502.500,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	8.000.000,00	16.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	8.000.000,00	16.000.000,00	24.000.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	138.940.000,00	0,00	0,00	138.940.000,00	(1.220.000,00)	99,12
		137.720.000,00	0,00	0,00	137.720.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	8.196.200,00	0,00	8.196.200,00	(100.700,00)	98,77
		0,00	8.095.500,00	0,00	8.095.500,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00	(70.100,00)	99,05
		0,00	7.324.900,00	0,00	7.324.900,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	(900,00)	99,92
		0,00	1.087.100,00	0,00	1.087.100,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	1.344.500,00	1.900.000,00	3.244.500,00	(60.500,00)	98,14
		0,00	1.284.000,00	1.900.000,00	3.184.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	16.740.000,00	0,00	16.740.000,00	0,00	100,00
		0,00	16.740.000,00	0,00	16.740.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	185.374.800,00	0,00	185.374.800,00	(223.885,00)	99,88
		0,00	185.150.915,00	0,00	185.150.915,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	29.010.171,00	17.067.200,00	46.077.371,00	(30.021,00)	99,93
		0,00	28.980.150,00	17.067.200,00	46.047.350,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	17.067.200,00	17.067.200,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	17.067.200,00	17.067.200,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	29.010.171,00	0,00	29.010.171,00	(30.021,00)	99,90
		0,00	28.980.150,00	0,00	28.980.150,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	13.320.000,00	0,00	13.320.000,00	0,00	100,00
		0,00	13.320.000,00	0,00	13.320.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 57 . 01	Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	8.290.000,00	0,00	8.290.000,00	0,00	100,00
		0,00	8.290.000,00	0,00	8.290.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 01 . 57 . 02	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan	0,00	5.030.000,00	0,00	5.030.000,00	0,00	100,00
		0,00	5.030.000,00	0,00	5.030.000,00		
4.01 . 4.01.15	KECAMATAN TIUMANG	206.050.000,00	326.737.250,00	30.000.000,00	562.787.250,00	(1.581.038,00)	99,72
		205.550.000,00	325.656.212,00	30.000.000,00	561.206.212,00		
4.01 . 4.01.15 . 01	KECAMATAN TIUMANG	206.050.000,00	326.737.250,00	30.000.000,00	562.787.250,00	(1.581.038,00)	99,72
		205.550.000,00	325.656.212,00	30.000.000,00	561.206.212,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	206.050.000,00	266.939.300,00	30.000.000,00	502.989.300,00	(1.464.932,00)	99,71
		205.550.000,00	265.974.368,00	30.000.000,00	501.524.368,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	(674.735,00)	91,97
		0,00	7.725.265,00	0,00	7.725.265,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	(50.932,00)	96,60
		0,00	1.449.068,00	0,00	1.449.068,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	206.050.000,00	1.875.000,00	0,00	207.925.000,00	(500.000,00)	99,76
		205.550.000,00	1.875.000,00	0,00	207.425.000,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	2.746.000,00	0,00	2.746.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.746.000,00	0,00	2.746.000,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	100,00
		0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	12.774.500,00	0,00	12.774.500,00	0,00	100,00
		0,00	12.774.500,00	0,00	12.774.500,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	13.145.500,00	0,00	13.145.500,00	(130.955,00)	99,00
		0,00	13.014.545,00	0,00	13.014.545,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	21.120.000,00	0,00	21.120.000,00	(2.000,00)	99,99
		0,00	21.118.000,00	0,00	21.118.000,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	199.358.300,00	0,00	199.358.300,00	(106.310,00)	99,95
		0,00	199.251.990,00	0,00	199.251.990,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	24.004.950,00	0,00	24.004.950,00	(6.606,00)	99,97
		0,00	23.998.344,00	0,00	23.998.344,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	22.504.950,00	0,00	22.504.950,00	(6.606,00)	99,97
		0,00	22.498.344,00	0,00	22.498.344,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	19.275.000,00	0,00	19.275.000,00	0,00	100,00
		0,00	19.275.000,00	0,00	19.275.000,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	19.275.000,00	0,00	19.275.000,00	0,00	100,00
		0,00	19.275.000,00	0,00	19.275.000,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 57	Program penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	16.518.000,00	0,00	16.518.000,00	(109.500,00)	99,34
		0,00	16.408.500,00	0,00	16.408.500,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 57 . 01	Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	0,00	10.903.000,00	0,00	10.903.000,00	(64.500,00)	99,41
		0,00	10.838.500,00	0,00	10.838.500,00		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 57 . 02	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan	0,00	5.615.000,00	0,00	5.615.000,00	(45.000,00)	99,20
		0,00	5.570.000,00	0,00	5.570.000,00		
4.01 . 4.01.16	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	169.900.000,00	341.855.750,00	16.000.000,00	527.755.750,00	(16.303.212,00)	96,91
		161.460.000,00	334.492.538,00	15.500.000,00	511.452.538,00		
4.01 . 4.01.16 . 01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	169.900.000,00	341.855.750,00	16.000.000,00	527.755.750,00	(16.303.212,00)	96,91
		161.460.000,00	334.492.538,00	15.500.000,00	511.452.538,00		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	169.900.000,00	283.745.750,00	0,00	453.645.750,00	(13.946.411,00)	96,93
		161.460.000,00	278.239.339,00	0,00	439.699.339,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	17.580.000,00	0,00	17.580.000,00	(213.410,00)	98,79
		0,00	17.366.590,00	0,00	17.366.590,00		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	(153.350,00)	80,83
		0,00	646.650,00	0,00	646.650,00		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	169.900.000,00	0,00	0,00	169.900.000,00	(8.440.000,00)	95,03
		161.460.000,00	0,00	0,00	161.460.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	(650.000,00)	88,18
		0,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	16.220.000,00	0,00	16.220.000,00	(1.000,00)	99,99
		0,00	16.219.000,00	0,00	16.219.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	37.831.250,00	0,00	37.831.250,00	(50,00)	100,00
		0,00	37.831.200,00	0,00	37.831.200,00		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00	(40.000,00)	97,94
		0,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00	(44.000,00)	99,44
		0,00	7.876.000,00	0,00	7.876.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	(1.170.000,00)	92,78
		0,00	15.030.000,00	0,00	15.030.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	177.499.500,00	0,00	177.499.500,00	(3.234.601,00)	98,18
		0,00	174.264.899,00	0,00	174.264.899,00		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	58.110.000,00	16.000.000,00	74.110.000,00	(2.356.801,00)	96,82
		0,00	56.253.199,00	15.500.000,00	71.753.199,00		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	83,33
		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	33.110.000,00	0,00	33.110.000,00	(1.856.801,00)	94,39
		0,00	31.253.199,00	0,00	31.253.199,00		
4.02	Pengawasan	850.580.000,00	1.266.622.000,00	0,00	2.117.202.000,00	(35.417.841,00)	98,33
		833.288.000,00	1.248.496.159,00	0,00	2.081.784.159,00		
4.02 . 4.02.01	INSPEKTORAT KABUPATEN	850.580.000,00	1.266.622.000,00	0,00	2.117.202.000,00	(35.417.841,00)	98,33
		833.288.000,00	1.248.496.159,00	0,00	2.081.784.159,00		
4.02 . 4.02.01 . 01	INSPEKTORAT KABUPATEN	850.580.000,00	1.266.622.000,00	0,00	2.117.202.000,00	(35.417.841,00)	98,33
		833.288.000,00	1.248.496.159,00	0,00	2.081.784.159,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	251.480.000,00	588.524.150,00	0,00	840.004.150,00	(11.163.321,00)	98,67
		242.924.000,00	585.916.829,00	0,00	828.840.829,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	(842.504,00)	90,74
		0,00	8.257.496,00	0,00	8.257.496,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	86.400.000,00	0,00	86.400.000,00	(263.500,00)	99,70
		0,00	86.136.500,00	0,00	86.136.500,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	(45.350,00)	99,12
		0,00	5.104.650,00	0,00	5.104.650,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	251.480.000,00	0,00	0,00	251.480.000,00	(8.556.000,00)	96,60
		242.924.000,00	0,00	0,00	242.924.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	12.150.400,00	0,00	12.150.400,00	(400,00)	100,00
		0,00	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	30.100.000,00	0,00	30.100.000,00	(35.000,00)	99,88
		0,00	30.065.000,00	0,00	30.065.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	11.625.000,00	0,00	11.625.000,00	(45.000,00)	99,61
		0,00	11.580.000,00	0,00	11.580.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	14.695.000,00	0,00	14.695.000,00	0,00	100,00
		0,00	14.695.000,00	0,00	14.695.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	(145.000,00)	93,96
		0,00	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	48.400.000,00	0,00	48.400.000,00	(953.000,00)	98,03
		0,00	47.447.000,00	0,00	47.447.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	318.503.750,00	0,00	318.503.750,00	(277.567,00)	99,91
		0,00	318.226.183,00	0,00	318.226.183,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	90.232.500,00	0,00	90.232.500,00	(26.000,00)	99,97
		0,00	90.206.500,00	0,00	90.206.500,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	90.232.500,00	0,00	90.232.500,00	(26.000,00)	99,97
		0,00	90.206.500,00	0,00	90.206.500,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	599.100.000,00	525.095.350,00	0,00	1.124.195.350,00	(22.208.991,00)	98,02
		590.364.000,00	511.622.359,00	0,00	1.101.986.359,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	409.760.000,00	89.225.750,00	0,00	498.985.750,00	(1.993.000,00)	99,60
		408.650.000,00	88.342.750,00	0,00	496.992.750,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	18.120.000,00	0,00	0,00	18.120.000,00	(3.050.000,00)	83,17
		15.070.000,00	0,00	0,00	15.070.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	0,00	20.824.600,00	0,00	20.824.600,00	(476.850,00)	97,71
		0,00	20.347.750,00	0,00	20.347.750,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 18	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	2.000.000,00	122.725.000,00	0,00	124.725.000,00	(484.870,00)	99,61
		1.984.000,00	122.256.130,00	0,00	124.240.130,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 19	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah daerah	21.320.000,00	2.595.000,00	0,00	23.915.000,00	(3.706.000,00)	84,50
		18.740.000,00	1.469.000,00	0,00	20.209.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 20	Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja	137.900.000,00	29.400.000,00	0,00	167.300.000,00	(5.165.750,00)	96,91
		135.920.000,00	26.214.250,00	0,00	162.134.250,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 21	Monitoring Program dan Kegiatan SKPD	0,00	63.620.000,00	0,00	63.620.000,00	(2.173.250,00)	96,58
		0,00	61.446.750,00	0,00	61.446.750,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 22	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi (UPG)	0,00	25.198.000,00	0,00	25.198.000,00	(1.260.171,00)	95,00
		0,00	23.937.829,00	0,00	23.937.829,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 23	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)	0,00	30.893.000,00	0,00	30.893.000,00	(278.250,00)	99,10
		0,00	30.614.750,00	0,00	30.614.750,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 24	SPIP	7.000.000,00	43.755.000,00	0,00	50.755.000,00	(463.600,00)	99,09
		7.000.000,00	43.291.400,00	0,00	50.291.400,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 25	Kapabilitas APIP	0,00	41.155.000,00	0,00	41.155.000,00	(501.500,00)	98,78
		0,00	40.653.500,00	0,00	40.653.500,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 26	Sapu Bersih Pungutan Liar	3.000.000,00	55.704.000,00	0,00	58.704.000,00	(2.655.750,00)	95,48
		3.000.000,00	53.048.250,00	0,00	56.048.250,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	0,00	62.770.000,00	0,00	62.770.000,00	(2.019.529,00)	96,78
		0,00	60.750.471,00	0,00	60.750.471,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21 . 01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan *)	0,00	62.770.000,00	0,00	62.770.000,00	(2.019.529,00)	96,78
		0,00	60.750.471,00	0,00	60.750.471,00		
4.03	Perencanaan	1.238.790.000,00	3.738.162.300,00	242.140.000,00	5.219.092.300,00	(117.098.838,00)	97,76
		1.231.788.000,00	3.630.025.734,00	240.179.728,00	5.101.993.462,00		
4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.238.790.000,00	3.620.162.300,00	208.140.000,00	5.067.092.300,00	(116.969.188,00)	97,69
		1.231.788.000,00	3.512.155.384,00	206.179.728,00	4.950.123.112,00		
4.03 . 4.03.01 . 01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA	1.238.790.000,00	3.620.162.300,00	208.140.000,00	5.067.092.300,00	(116.969.188,00)	97,69
		1.231.788.000,00	3.512.155.384,00	206.179.728,00	4.950.123.112,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	518.140.000,00	884.841.400,00	64.140.000,00	1.467.121.400,00	(26.706.066,00)	98,18
		511.138.000,00	867.084.606,00	62.192.728,00	1.440.415.334,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	(75.000,00)	97,58
		0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	142.505.000,00	0,00	142.505.000,00	(1.655.912,00)	98,84
		0,00	140.849.088,00	0,00	140.849.088,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	3.513.900,00	0,00	3.513.900,00	(6.900,00)	99,80
		0,00	3.507.000,00	0,00	3.507.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	518.140.000,00	9.210.000,00	0,00	527.350.000,00	(7.002.300,00)	98,67
		511.138.000,00	9.209.700,00	0,00	520.347.700,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	11.016.000,00	0,00	11.016.000,00	(140.000,00)	98,73
		0,00	10.876.000,00	0,00	10.876.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	(850.000,00)	90,76
		0,00	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	97.498.400,00	0,00	97.498.400,00	(58.000,00)	99,94
		0,00	97.440.400,00	0,00	97.440.400,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	35.160.000,00	0,00	35.160.000,00	(2.539.200,00)	92,78
		0,00	32.620.800,00	0,00	32.620.800,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	(74.000,00)	98,83
		0,00	6.276.000,00	0,00	6.276.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	64.140.000,00	64.140.000,00	(1.947.272,00)	96,96
		0,00	0,00	62.192.728,00	62.192.728,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	(144.091,00)	99,28
		0,00	19.955.909,00	0,00	19.955.909,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	(55.000,00)	98,69
		0,00	4.145.000,00	0,00	4.145.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	42.600.000,00	0,00	42.600.000,00	(35.000,00)	99,92
		0,00	42.565.000,00	0,00	42.565.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	500.388.100,00	0,00	500.388.100,00	(12.123.391,00)	97,58
		0,00	488.264.709,00	0,00	488.264.709,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	92.664.600,00	136.500.000,00	229.164.600,00	(329.215,00)	99,86
		0,00	92.348.385,00	136.487.000,00	228.835.385,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	92.664.600,00	0,00	92.664.600,00	(316.215,00)	99,66
		0,00	92.348.385,00	0,00	92.348.385,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	(13.000,00)	99,99
		0,00	0,00	99.987.000,00	99.987.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	80.375.000,00	0,00	80.375.000,00	(342.262,00)	99,57
		0,00	80.032.738,00	0,00	80.032.738,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	80.375.000,00	0,00	80.375.000,00	(342.262,00)	99,57
		0,00	80.032.738,00	0,00	80.032.738,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Program pengembangan data/informasi	0,00	36.563.200,00	0,00	36.563.200,00	(1.047.500,00)	97,14
		0,00	35.515.700,00	0,00	35.515.700,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 08	Fasilitasi dan Penguatan Gugus Tugas Informasi Geospasial Daerah	0,00	36.563.200,00	0,00	36.563.200,00	(1.047.500,00)	97,14
		0,00	35.515.700,00	0,00	35.515.700,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	Program perencanaan kota-kota menengah dan besar	0,00	42.073.000,00	0,00	42.073.000,00	(874.047,00)	97,92
		0,00	41.198.953,00	0,00	41.198.953,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	0,00	42.073.000,00	0,00	42.073.000,00	(874.047,00)	97,92
		0,00	41.198.953,00	0,00	41.198.953,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	670.650.000,00	1.246.396.200,00	0,00	1.917.046.200,00	(17.760.379,00)	99,07
		670.650.000,00	1.228.635.821,00	0,00	1.899.285.821,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 03	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	0,00	201.277.000,00	0,00	201.277.000,00	(976.526,00)	99,51
		0,00	200.300.474,00	0,00	200.300.474,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 04	Penetapan RKPD	0,00	31.810.000,00	0,00	31.810.000,00	(34.000,00)	99,89
		0,00	31.776.000,00	0,00	31.776.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD	234.000.000,00	175.640.000,00	0,00	409.640.000,00	(370.918,00)	99,91
		234.000.000,00	175.269.082,00	0,00	409.269.082,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 17	Monitoring dan evaluasi pengendalian pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	0,00	46.120.000,00	0,00	46.120.000,00	(1.172.081,00)	97,46
		0,00	44.947.919,00	0,00	44.947.919,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 21	Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Anggaran	436.650.000,00	617.828.500,00	0,00	1.054.478.500,00	(1.575.750,00)	99,85
		436.650.000,00	616.252.750,00	0,00	1.052.902.750,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 22	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	0,00	67.818.000,00	0,00	67.818.000,00	(1.171.304,00)	98,27
		0,00	66.646.696,00	0,00	66.646.696,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 23	Implementasi Sistem Informasi e-Planning	0,00	52.002.700,00	0,00	52.002.700,00	(450.700,00)	99,13
		0,00	51.552.000,00	0,00	51.552.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 25	Inovasi Daerah	0,00	53.900.000,00	0,00	53.900.000,00	(12.009.100,00)	77,72
		0,00	41.890.900,00	0,00	41.890.900,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	0,00	217.170.200,00	0,00	217.170.200,00	(2.443.000,00)	98,88
		0,00	214.727.200,00	0,00	214.727.200,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	0,00	51.699.400,00	0,00	51.699.400,00	(1.003.000,00)	98,06
		0,00	50.696.400,00	0,00	50.696.400,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 13	Penyusunan ICOR	0,00	67.088.800,00	0,00	67.088.800,00	(411.000,00)	99,39
		0,00	66.677.800,00	0,00	66.677.800,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 15	Penyusunan Analisis Tabel Input Output Daerah	0,00	98.382.000,00	0,00	98.382.000,00	(1.029.000,00)	98,95
		0,00	97.353.000,00	0,00	97.353.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	0,00	412.277.500,00	0,00	412.277.500,00	(4.540.684,00)	98,90
		0,00	407.736.816,00	0,00	407.736.816,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 11	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	0,00	171.841.000,00	0,00	171.841.000,00	(1.255.270,00)	99,27
		0,00	170.585.730,00	0,00	170.585.730,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 12	Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	0,00	154.144.500,00	0,00	154.144.500,00	(707.464,00)	99,54
		0,00	153.437.036,00	0,00	153.437.036,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 13	Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,00	49.452.000,00	0,00	49.452.000,00	(322.950,00)	99,35
		0,00	49.129.050,00	0,00	49.129.050,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 14	Fasilitasi Tim Koordinasi Kemiskinan	0,00	36.840.000,00	0,00	36.840.000,00	(2.255.000,00)	93,88
		0,00	34.585.000,00	0,00	34.585.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 31	Program Perencanaan Tata ruang	50.000.000,00	556.552.300,00	7.500.000,00	614.052.300,00	(62.239.035,00)	89,86
		50.000.000,00	494.313.265,00	7.500.000,00	551.813.265,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 31 . 01	Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, RTBL	0,00	110.449.800,00	0,00	110.449.800,00	(53.764.270,00)	51,32
		0,00	56.685.530,00	0,00	56.685.530,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 31 . 02	Legislasi perda RevisiRTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2031	50.000.000,00	446.102.500,00	7.500.000,00	503.602.500,00	(8.474.765,00)	98,32
		50.000.000,00	437.627.735,00	7.500.000,00	495.127.735,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 32	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	0,00	51.248.900,00	0,00	51.248.900,00	(687.000,00)	98,66
		0,00	50.561.900,00	0,00	50.561.900,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 32 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)	0,00	51.248.900,00	0,00	51.248.900,00	(687.000,00)	98,66
		0,00	50.561.900,00	0,00	50.561.900,00		
4.03 . 4.01.02	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	118.000.000,00	34.000.000,00	152.000.000,00	(129.650,00)	99,91
		0,00	117.870.350,00	34.000.000,00	151.870.350,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.03 . 4.01.02 . 01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	118.000.000,00	34.000.000,00	152.000.000,00	(129.650,00)	99,91
		0,00	117.870.350,00	34.000.000,00	151.870.350,00		
4.03 . 4.01.02 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	0,00	118.000.000,00	34.000.000,00	152.000.000,00	(129.650,00)	99,91
		0,00	117.870.350,00	34.000.000,00	151.870.350,00		
4.03 . 4.01.02 . 01 . 21 . 24	Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan	0,00	118.000.000,00	34.000.000,00	152.000.000,00	(129.650,00)	99,91
		0,00	117.870.350,00	34.000.000,00	151.870.350,00		
4.04	Keuangan	1.983.297.000,00	4.180.176.250,00	615.500.000,00	6.778.973.250,00	(290.223.328,00)	95,72
		1.859.932.000,00	4.025.992.922,00	602.825.000,00	6.488.749.922,00		
4.04 . 4.04.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	1.983.297.000,00	4.180.176.250,00	615.500.000,00	6.778.973.250,00	(290.223.328,00)	95,72
		1.859.932.000,00	4.025.992.922,00	602.825.000,00	6.488.749.922,00		
4.04 . 4.04.01 . 01	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)	1.983.297.000,00	4.180.176.250,00	615.500.000,00	6.778.973.250,00	(290.223.328,00)	95,72
		1.859.932.000,00	4.025.992.922,00	602.825.000,00	6.488.749.922,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	799.970.000,00	1.521.790.690,00	0,00	2.321.760.690,00	(85.190.944,00)	96,33
		749.802.000,00	1.486.767.746,00	0,00	2.236.569.746,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00
		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	227.180.000,00	0,00	227.180.000,00	(26.240.287,00)	88,45
		0,00	200.939.713,00	0,00	200.939.713,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	(8.065.850,00)	36,99
		0,00	4.734.150,00	0,00	4.734.150,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	799.970.000,00	30.186.000,00	0,00	830.156.000,00	(50.168.000,00)	93,96
		749.802.000,00	30.186.000,00	0,00	779.988.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	63.940.000,00	0,00	63.940.000,00	(37.000,00)	99,94
		0,00	63.903.000,00	0,00	63.903.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	64.600.000,00	0,00	64.600.000,00	0,00	100,00
		0,00	64.600.000,00	0,00	64.600.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	157.533.000,00	0,00	157.533.000,00	(58.584,00)	99,96
		0,00	157.474.416,00	0,00	157.474.416,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	236.305.300,00	0,00	236.305.300,00	(25.200,00)	99,99
		0,00	236.280.100,00	0,00	236.280.100,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	30.280.000,00	0,00	30.280.000,00	(8.000,00)	99,97
		0,00	30.272.000,00	0,00	30.272.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	6.340.000,00	0,00	6.340.000,00	(100.000,00)	98,42
		0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	91.996.840,00	0,00	91.996.840,00	(41.340,00)	99,96
		0,00	91.955.500,00	0,00	91.955.500,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	600.429.550,00	0,00	600.429.550,00	(446.683,00)	99,93
		0,00	599.982.867,00	0,00	599.982.867,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	236.466.200,00	207.500.000,00	443.966.200,00	(26.413.950,00)	94,05
		0,00	221.602.250,00	195.950.000,00	417.552.250,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	(250.000,00)	99,00
		0,00	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	152.600.000,00	152.600.000,00	(10.200.000,00)	93,32
		0,00	0,00	142.400.000,00	142.400.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	29.900.000,00	29.900.000,00	(1.100.000,00)	96,32
		0,00	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	(45.000,00)	99,95
		0,00	94.955.000,00	0,00	94.955.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	141.466.200,00	0,00	141.466.200,00	(14.818.950,00)	89,52
		0,00	126.647.250,00	0,00	126.647.250,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	156.168.500,00	0,00	156.168.500,00	(205.905,00)	99,87
		0,00	155.962.595,00	0,00	155.962.595,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	156.168.500,00	0,00	156.168.500,00	(205.905,00)	99,87
		0,00	155.962.595,00	0,00	155.962.595,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.183.327.000,00	2.265.750.860,00	408.000.000,00	3.857.077.860,00	(178.412.529,00)	95,37
		1.110.130.000,00	2.161.660.331,00	406.875.000,00	3.678.665.331,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	0,00	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00	(45.949,00)	99,55
		0,00	10.164.051,00	0,00	10.164.051,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2020	285.960.000,00	292.965.000,00	0,00	578.925.000,00	(17.676.092,00)	96,95
		268.436.000,00	292.812.908,00	0,00	561.248.908,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2019	295.310.000,00	313.550.000,00	0,00	608.860.000,00	(20.425.699,00)	96,65
		276.792.000,00	311.642.301,00	0,00	588.434.301,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD *)	53.830.000,00	127.302.350,00	0,00	181.132.350,00	(5.600,00)	100,00
		53.825.000,00	127.301.750,00	0,00	181.126.750,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	136.500.000,00	147.220.860,00	408.000.000,00	691.720.860,00	(1.286.916,00)	99,81
		136.500.000,00	147.058.944,00	406.875.000,00	690.433.944,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.	33.200.000,00	121.755.000,00	0,00	154.955.000,00	(28.684.169,00)	81,49
		21.120.000,00	105.150.831,00	0,00	126.270.831,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah.	12.036.000,00	158.991.750,00	0,00	171.027.750,00	(9.237.146,00)	94,60
		12.000.000,00	149.790.604,00	0,00	161.790.604,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	42.345.000,00	159.840.000,00	0,00	202.185.000,00	(7.777.500,00)	96,15
		38.855.000,00	155.552.500,00	0,00	194.407.500,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 40	Penatausahaan Barang Milik Daerah	24.100.000,00	190.055.450,00	0,00	214.155.450,00	(1.388.437,00)	99,35
		24.000.000,00	188.767.013,00	0,00	212.767.013,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 73	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	12.036.000,00	36.799.950,00	0,00	48.835.950,00	(1.523.386,00)	96,88
		12.000.000,00	35.312.564,00	0,00	47.312.564,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 74	Pengelolaan penyaluran belanja PPKD (Hibah Bansos)	13.675.000,00	86.984.500,00	0,00	100.659.500,00	(10.582.000,00)	89,49
		13.640.000,00	76.437.500,00	0,00	90.077.500,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 75	Operasional pajak daerah	56.400.000,00	126.187.000,00	0,00	182.587.000,00	(27.297.250,00)	85,05
		39.264.000,00	116.025.750,00	0,00	155.289.750,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 76	Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	22.700.000,00	17.374.850,00	0,00	40.074.850,00	(1.636.915,00)	95,92
		21.750.000,00	16.687.935,00	0,00	38.437.935,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 77	Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PLL	0,00	101.745.000,00	0,00	101.745.000,00	(16.747.058,00)	83,54
		0,00	84.997.942,00	0,00	84.997.942,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 78	Penyusunan Potensi dan Dokumen Pendapatan Daerah	7.020.000,00	32.305.000,00	0,00	39.325.000,00	(9.912.300,00)	74,79
		4.420.000,00	24.992.700,00	0,00	29.412.700,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 79	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (IKPD)	80.920.000,00	56.172.500,00	0,00	137.092.500,00	(637.737,00)	99,53
		80.920.000,00	55.534.763,00	0,00	136.454.763,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 80	Analisis Dokumen Anggaran Perubahan APBD 2019	9.545.000,00	15.832.650,00	0,00	25.377.650,00	(1.246.841,00)	95,09
		9.522.000,00	14.608.809,00	0,00	24.130.809,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 81	Analisis Dokumen Anggaran APBD 2020	10.830.000,00	24.330.000,00	0,00	35.160.000,00	(1.172.708,00)	96,66
		10.598.000,00	23.389.292,00	0,00	33.987.292,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 82	Penyusunan Laporan Semesteran Pelaksanaan APBD	22.080.000,00	48.071.000,00	0,00	70.151.000,00	(3.979.136,00)	94,33
		22.080.000,00	44.091.864,00	0,00	66.171.864,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 83	Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS	30.140.000,00	57.000.000,00	0,00	87.140.000,00	(764.550,00)	99,12
		29.900.000,00	56.475.450,00	0,00	86.375.450,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 84	Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	34.700.000,00	72.093.000,00	0,00	106.793.000,00	(5.524.840,00)	94,83
		34.508.000,00	66.760.160,00	0,00	101.268.160,00		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 85	Penyusunan Produk Hukum Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	0,00	68.965.000,00	0,00	68.965.000,00	(10.860.300,00)	84,25
		0,00	58.104.700,00	0,00	58.104.700,00		
4.05	Kepegawaian	464.921.000,00	2.719.091.850,00	46.450.000,00	3.230.462.850,00	(232.254.526,00)	92,81
		437.401.000,00	2.514.357.324,00	46.450.000,00	2.998.208.324,00		
4.05 . 4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	464.921.000,00	2.719.091.850,00	46.450.000,00	3.230.462.850,00	(232.254.526,00)	92,81
		437.401.000,00	2.514.357.324,00	46.450.000,00	2.998.208.324,00		
4.05 . 4.05.01 . 01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBE	464.921.000,00	2.719.091.850,00	46.450.000,00	3.230.462.850,00	(232.254.526,00)	92,81
		437.401.000,00	2.514.357.324,00	46.450.000,00	2.998.208.324,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	313.480.000,00	394.979.200,00	0,00	708.459.200,00	(8.198.960,00)	98,84
		311.296.000,00	388.964.240,00	0,00	700.260.240,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	(801.000,00)	90,29
		0,00	7.449.000,00	0,00	7.449.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	51.660.000,00	0,00	51.660.000,00	(4.592.563,00)	91,11
		0,00	47.067.437,00	0,00	47.067.437,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	(127.950,00)	94,67
		0,00	2.272.050,00	0,00	2.272.050,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	313.480.000,00	0,00	0,00	313.480.000,00	(2.184.000,00)	99,30
		311.296.000,00	0,00	0,00	311.296.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	7.349.200,00	0,00	7.349.200,00	(200,00)	100,00
		0,00	7.349.000,00	0,00	7.349.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	(75.000,00)	99,41
		0,00	12.675.000,00	0,00	12.675.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	49.910.700,00	0,00	49.910.700,00	(42.700,00)	99,91
		0,00	49.868.000,00	0,00	49.868.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	29.896.300,00	0,00	29.896.300,00	(6.300,00)	99,98
		0,00	29.890.000,00	0,00	29.890.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	4.008.000,00	0,00	4.008.000,00	(53.000,00)	98,68
		0,00	3.955.000,00	0,00	3.955.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	26.160.000,00	0,00	26.160.000,00	(40.000,00)	99,85
		0,00	26.120.000,00	0,00	26.120.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	202.595.000,00	0,00	202.595.000,00	(276.247,00)	99,86
		0,00	202.318.753,00	0,00	202.318.753,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	67.138.000,00	46.450.000,00	113.588.000,00	(5.513.400,00)	95,15
		0,00	61.624.600,00	46.450.000,00	108.074.600,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	31.050.000,00	31.050.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	67.138.000,00	0,00	67.138.000,00	(5.513.400,00)	91,79
		0,00	61.624.600,00	0,00	61.624.600,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.888.000,00	1.106.995.600,00	0,00	1.117.883.600,00	(23.214.861,00)	97,92
		10.864.000,00	1.083.804.739,00	0,00	1.094.668.739,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 05	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD *)	7.650.000,00	992.350.000,00	0,00	1.000.000.000,00	(22.895.961,00)	97,71
		7.636.000,00	969.468.039,00	0,00	977.104.039,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 27	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	3.238.000,00	114.645.600,00	0,00	117.883.600,00	(318.900,00)	99,73
		3.228.000,00	114.336.700,00	0,00	117.564.700,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.05 . 4.05.01 . 01 . 30	Program Pendidikan Kedinasan *)	0,00	267.590.400,00	0,00	267.590.400,00	(1.257.902,00)	99,53
		0,00	266.332.498,00	0,00	266.332.498,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 05	Pendidikan Penjenjangan Struktural *)	0,00	205.500.400,00	0,00	205.500.400,00	(266.400,00)	99,87
		0,00	205.234.000,00	0,00	205.234.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 06	Pendidikan dan Pelatihan Teknis *)	0,00	62.090.000,00	0,00	62.090.000,00	(991.502,00)	98,40
		0,00	61.098.498,00	0,00	61.098.498,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur *)	140.553.000,00	882.388.650,00	0,00	1.022.941.650,00	(194.069.403,00)	81,03
		115.241.000,00	713.631.247,00	0,00	828.872.247,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 01	Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) *)	90.675.000,00	329.325.000,00	0,00	420.000.000,00	(155.837.848,00)	62,90
		69.020.000,00	195.142.152,00	0,00	264.162.152,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 02	Pemberian Penghargaan pada ASN yang Berprestasi *)	4.600.000,00	26.975.000,00	0,00	31.575.000,00	(75.967,00)	99,76
		4.596.000,00	26.903.033,00	0,00	31.499.033,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 14	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN *)	9.752.000,00	39.726.500,00	0,00	49.478.500,00	(201.000,00)	99,59
		9.751.000,00	39.526.500,00	0,00	49.277.500,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 22	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan *)	2.460.000,00	36.710.000,00	0,00	39.170.000,00	(96.123,00)	99,75
		2.460.000,00	36.613.877,00	0,00	39.073.877,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 26	Penempatan ASN *)	16.485.000,00	200.419.800,00	0,00	216.904.800,00	(35.395.059,00)	83,68
		12.949.000,00	168.560.741,00	0,00	181.509.741,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 29	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	4.500.000,00	28.150.000,00	0,00	32.650.000,00	(411.039,00)	98,74
		4.464.000,00	27.774.961,00	0,00	32.238.961,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 30	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	1.870.000,00	30.370.000,00	0,00	32.240.000,00	(214.622,00)	99,33
		1.850.000,00	30.175.378,00	0,00	32.025.378,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 31	Pelayanan SKPP Pengabdian dan SK Pensiun	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	(917.867,00)	97,45
		0,00	35.082.133,00	0,00	35.082.133,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 32	Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	2.901.000,00	39.010.750,00	0,00	41.911.750,00	(20.000,00)	99,95
		2.901.000,00	38.990.750,00	0,00	41.891.750,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 33	Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan TASPEN	1.600.000,00	26.890.000,00	0,00	28.490.000,00	(42.767,00)	99,85
		1.600.000,00	26.847.233,00	0,00	28.447.233,00		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 34	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	2.670.000,00	61.500.000,00	0,00	64.170.000,00	(428.761,00)	99,33
		2.660.000,00	61.081.239,00	0,00	63.741.239,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 . 36	Pengelolaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	3.040.000,00	27.311.600,00	0,00	30.351.600,00	(428.350,00)	98,59
		2.990.000,00	26.933.250,00	0,00	29.923.250,00		
JUMLAH		48.750.243.200,00	249.761.976.140,00	245.369.609.493,25	543.881.828.833,25	(26.512.953.242,10)	95,13
		46.376.909.869,00	242.274.872.344,23	228.717.093.377,92	517.368.875.591,15		

Pulau Punjung,
BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKHA TUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran I.4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor :
Tanggal :
Perihal : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN							
KODE			URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
01			PELAYANAN UMUM	287.828.314.233,00	280.351.538.699,00	(7.476.775.534,00)	97,40
01	2	03	Pangan	4.091.835.500,00	3.958.811.868,00	(133.023.632,00)	96,75
01	2	10	Komunikasi dan Informatika	8.144.816.350,00	7.993.337.581,00	(151.478.769,00)	98,14
01	2	14	Statistik	207.485.000,00	206.910.946,00	(574.054,00)	99,72
01	2	15	Persandian	104.520.000,00	101.301.655,00	(3.218.345,00)	96,92
01	2	18	Kearsipan	213.218.000,00	213.033.250,00	(184.750,00)	99,91
01	4	01	Administrasi Pemerintahan	99.467.973.496,00	94.312.545.073,00	(5.155.428.423,00)	94,82
01	4	02	Pengawasan	4.968.004.000,00	4.859.874.826,00	(108.129.174,00)	97,82
01	4	03	Perencanaan	8.220.226.300,00	8.020.123.051,00	(200.103.249,00)	97,57
01	4	04	Keuangan	154.886.258.737,00	153.672.018.394,00	(1.214.240.343,00)	99,22
01	4	05	Kepegawaian	7.523.976.850,00	7.013.582.055,00	(510.394.795,00)	93,22
03			KETERTIBAN DAN KEAMANAN	12.050.583.875,00	11.831.940.576,00	(218.643.299,00)	98,19
03	1	05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	12.050.583.875,00	11.831.940.576,00	(218.643.299,00)	98,19
04			EKONOMI	88.795.528.332,00	81.925.626.988,86	(6.869.901.343,14)	92,26
04	2	01	Tenaga Kerja	944.904.700,00	855.390.675,00	(89.514.025,00)	90,53
04	2	07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.924.189.500,00	5.681.698.673,00	(242.490.827,00)	95,91
04	2	09	Perhubungan	6.920.105.334,00	6.450.660.794,00	(469.444.540,00)	93,22
04	2	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.476.436.250,00	4.345.893.476,00	(130.542.774,00)	97,08
04	2	12	Penanaman Modal	3.866.473.100,00	3.760.721.459,00	(105.751.641,00)	97,26
04	3	01	Kelautan dan Perikanan	2.148.729.698,00	2.108.695.386,00	(40.034.312,00)	98,14
04	3	03	Pertanian	26.581.595.750,00	25.552.598.147,30	(1.028.997.602,70)	96,13
04	3	06	Perdagangan	3.852.072.000,00	3.394.954.622,56	(457.117.377,44)	88,13
04	3	07	Perindustrian	30.379.541.000,00	26.400.220.095,00	(3.979.320.905,00)	86,90
04	3	08	Transmigrasi	3.701.481.000,00	3.374.793.661,00	(326.687.339,00)	91,17
05			LINGKUNGAN HIDUP	6.558.656.360,00	6.365.684.333,00	(192.972.027,00)	97,06
LAMPIRAN 1.4 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA							
Halaman 1							

KODE			URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
05	2	04	Pertanahan	269.362.000,00	251.881.394,00	(17.480.606,00)	93,51
05	2	05	Lingkungan Hidup	6.289.294.360,00	6.113.802.939,00	(175.491.421,00)	97,21
06			PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	154.851.339.882,25	143.369.101.039,27	(11.482.238.842,98)	92,58
06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	147.990.815.442,25	136.789.512.321,34	(11.201.303.120,91)	92,43
06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.860.524.440,00	6.579.588.717,93	(280.935.722,07)	95,91
07			KESEHATAN	202.306.841.498,00	195.048.629.904,40	(7.258.211.593,60)	96,41
07	1	02	Kesehatan	198.430.283.248,00	191.276.909.021,40	(7.153.374.226,60)	96,40
07	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.876.558.250,00	3.771.720.883,00	(104.837.367,00)	97,30
08			PARIWISATA DAN BUDAYA	8.680.809.625,00	8.330.571.522,85	(350.238.102,15)	95,97
08	2	16	Kebudayaan	5.999.768.425,00	5.849.153.839,00	(150.614.586,00)	97,49
08	3	02	Pariwisata	2.681.041.200,00	2.481.417.683,85	(199.623.516,15)	92,55
10			PENDIDIKAN	302.116.252.527,75	294.049.798.379,77	(8.066.454.147,98)	97,33
10	1	01	Pendidikan	292.886.368.077,75	285.003.208.798,77	(7.883.159.278,98)	97,31
10	2	13	Kepemudaan dan Olah Raga	5.377.952.500,00	5.313.798.012,00	(64.154.488,00)	98,81
10	2	17	Perpustakaan	3.851.931.950,00	3.732.791.569,00	(119.140.381,00)	96,91
11			PERLINDUNGAN SOSIAL	15.620.245.926,00	15.280.519.268,00	(339.726.658,00)	97,83
11	1	06	Sosial	7.934.417.776,00	7.724.930.476,00	(209.487.300,00)	97,36
11	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	868.540.900,00	854.591.221,00	(13.949.679,00)	98,39
11	2	06	Administrasi Kependudukan dan Capil	6.817.287.250,00	6.700.997.571,00	(116.289.679,00)	98,29
JUMLAH				1.078.808.572.259,00	1.036.553.410.711,15	(42.255.161.547,85)	96,08

Pulau Punjung,

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKHA TUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 Agustus 2020
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	Ref	2019	2018
1	2	3	4
Saldo Anggaran Lebih Awal	V.B	23.588.791.075,98	31.647.424.869,24
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		23.588.791.075,98	31.647.424.869,24
Subtotal		-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		3.893.451.613,32	23.588.791.075,98
Subtotal		3.893.451.613,32	23.588.791.075,98
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-Lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir		3.893.451.613,32	23.588.791.075,98

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 Agustus 2020
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

3. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	Ref	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	V.D.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	V.D.1.a				
Pendapatan Pajak Daerah	V.D.1.a.1	21.331.271.199,67	29.277.905.533,86	(7.946.634.334,19)	(27,14)
Pendapatan Retribusi Daerah	V.D.1.a.2	2.911.433.570,20	2.625.248.959,22	286.184.610,99	10,90
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.D.1.a.3	7.646.750.200,00	3.177.292.290,00	4.469.457.910,00	140,67
Lain-lain PAD yang Sah	V.D.1.a.4	54.692.559.575,69	53.531.014.936,02	1.161.644.639,67	2,17
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		86.582.014.545,56	88.611.461.719,10	(2.029.447.173,53)	(2,29)
PENDAPATAN TRANSFER	V.D.1.b				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil Pajak	V.D.1.b	16.404.803.089,00	17.647.991.094,00	(1.243.188.005,00)	(7,04)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.D.1.b	2.495.745.158,00	1.729.956.123,00	765.789.035,00	44,27
Dana Alokasi Umum (DAU)	V.D.1.b	524.888.502.000,00	501.889.284.000,00	22.999.218.000,00	4,58
Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.D.1.b	220.914.062.329,00	187.705.190.546,00	33.208.871.783,00	17,69
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO					
Dana Penyesuaian - LO	V.D.1.b	97.546.293.000	60.749.031.000	36.797.262.000,00	60,57
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan		862.249.405.576,00	769.721.452.763,00	92.527.952.813,00	12,02
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					

URAIAN	Ref	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.D.1.b	47.055.986.944,00	39.465.140.797,00	7.590.846.147,00	19,23
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi lainnya		-	-	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		47.055.986.944,00	39.465.140.797,00	7.590.846.147,00	19,23
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		909.305.392.520,00	809.186.593.560,00	100.118.798.960,00	12,37
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	V.D.1.c	34.748.278.793,00	35.987.862.444,00	(1.239.583.651,00)	(3,44)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		34.748.278.793,00	35.987.862.444,00	(1.239.583.651,00)	(3,44)
JUMLAH PENDAPATAN		1.030.635.685.858,57	933.785.917.723,10	96.849.768.135,46	10,37
BEBAN	V.D.2				
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	V.D.2.a	452.306.900.751,32	356.626.647.760,00	95.680.252.991,32	26,83
Beban Persediaan	V.D.2.b.	68.946.555.652,95	73.333.550.104,00	(4.386.994.451,05)	(5,98)
Beban Jasa	V.D.2.c	49.437.197.781,24	102.202.474.958,32	(52.765.277.177,08)	(51,63)
Beban Sewa	V.D.2.d	4.867.540.019,38	4.915.599.920,15	(48.059.900,77)	(0,98)
Beban Pemeliharaan	V.D.2.e	11.934.277.601,00	8.573.234.812,00	3.361.042.789,00	39,20
Beban Perjalanan Dinas	V.D.2.f	54.878.825.962,00	45.503.094.681,00	9.375.731.281,00	20,60
Beban Hibah	V.D.2.g	62.152.815.287,80	26.049.285.624,00	36.103.529.663,80	138,60
Beban Bantuan Sosial	V.D.2.h	3.132.000.000,00	194.500.000,00	2.937.500.000,00	1.510,28
Beban Penyusutan/Amortisasi	V.D.2.i	176.161.565.175,25	126.199.507.725,47	49.962.057.449,78	39,59
Beban Penyisihan Piutang	V.D.2.j	1.123.543.214,28	960.222.927,44	163.320.286,84	17,01
Beban Transfer	V.D.2.k	119.973.216.566,00	106.260.905.175,00	13.712.311.391,00	12,90
Beban Lain-Lain		-	-	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASI		1.004.914.438.011,22	850.819.023.687,38	154.095.414.323,84	18,11
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	V.D.3	25.721.247.847,34	82.966.894.035,72	(57.245.646.188,38)	(69,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	V.D.4				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	V.D.4	198.608.000,00	240.722.850,00	(42.114.850,00)	(17,50)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-		

URAIAN	Ref	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		198.608.000,00	240.722.850,00	(42.114.850,00)	(17,50)
Jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		25.919.855.847,34	83.207.616.885,72	(57.287.761.038,38)	(68,85)
POS LUAR BIASA	V.D.5				
Pendapatan Luar Biasa		-	-		
Beban Luar Biasa	V.D.5	24.176.925,00	744.340.724,00	(720.163.799,00)	(96,75)
Jumlah Pos Luar Biasa		(24.176.925,00)	(744.340.724,00)	(720.163.799,00)	(96,75)
SURPLUS/DEFISIT LO	V.D.6	25.895.678.922,34	82.463.276.161,72	(56.567.597.239,38)	(68,60)



BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 NOMOR : 1 TAHUN 2020
 TANGGAL : 26 Agustus 2020

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	Ref	2019	2018
1	2	3	4
Ekuitas Awal	V.F	2.408.920.868.365,27	2.211.548.909.331,78
Surplus/Defisit-LO		25.895.678.922,34	82.463.276.161,72
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan		-	-
b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar		(10.371.525.284,58)	(114.908.682.871,77)
Ekuitas Akhir		2.424.445.022.003,03	2.408.920.868.365,27



BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 Agustus 2020
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

5. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	Reff	SALDO 31 DES 2019	SALDO 31 DES 2018
1	2	3	4
ASET	V.C.1		
ASET LANCAR	V.C.1.a		
Kas di Kas Daerah	V.C.1.a.1	88.799.569,52	14.533.461.147,98
Kas di Bendahara Pengeluaran	V.C.1.a.2	-	2.900.300,00
Kas di Bendahara Penerimaan	V.C.1.a.3	5.395.063,00	8.231.091,00
Kas di BLUD	V.C.1.a.4	1.094.990.941,80	8.565.179.881,00
Setara Kas	V.C.1.a.5	2.695.211.372,00	483.693.923,00
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang Pajak	V.C.1.a.6	32.002.201.142,00	29.849.894.172,00
Penyisihan Piutang Pajak		(21.818.557.651,65)	(20.772.960.296,81)
Piutang Pajak Netto		10.183.643.490,35	9.076.933.875,19
Piutang Retribusi	V.C.1.a.7	138.133.361,00	307.156.861,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(110.949.906,00)	(211.492.741,50)
Piutang Retribusi Netto		27.183.455,00	95.664.119,50
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.C.1.a.8	4.063.752.034,00	7.315.914,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		(21.313.705,91)	(3.657.957,00)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto		4.042.438.328,10	3.657.957,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	V.C.1.a.9	12.310.601.825,87	10.450.525.379,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(546.175.917,56)	(533.763.430,83)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		11.764.425.908,31	9.916.761.948,17
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	V.C.1.a.10	3.072.369.696,00	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	V.C.1.a.11	3.389.783.336,00	3.931.933.883,00
Piutang Pendapatan Lainnya	V.C.1.a.12	13.050.752,00	13.050.752,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		(1.305.075,20)	(1.305.075,20)
Piutang Lainnya Netto		11.745.676,80	11.745.676,80
Belanja Dibayar Dimuka	V.C.1.a.13	169.315.624,28	225.628.660,29
Persediaan	V.C.1.a.14	37.729.072.702,63	29.120.337.338,00
Jumlah Aset Lancar		74.274.375.163,78	75.976.129.800,93
INVESTASI JANGKA PANJANG	V.C.1.b		
Investasi Non Permanen			
Jumlah Investasi Nonpermanen			
Investasi Permanen			

URAIAN	Reff	SALDO 31 DES 2019	SALDO 31 DES 2018
1	2	3	4
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.C.1.b.1	27.452.000.000,00	24.952.000.000,00
Investasi Permanen Lainnya			
Jumlah Investasi Permanen		27.452.000.000,00	24.952.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		27.452.000.000,00	24.952.000.000,00
ASET TETAP	V.C.1.c		
Tanah	V.C.1.c.1	650.764.357.447,00	655.393.508.247,00
Peralatan dan Mesin	V.C.1.c.2	260.565.316.331,44	222.496.461.150,44
Gedung dan Bangunan	V.C.1.c.3	620.623.140.974,09	581.063.337.161,28
Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.C.1.c.4	1.215.452.774.013,34	1.147.788.515.477,00
Aset Tetap Lainnya	V.C.1.c.5	72.876.409.916,00	54.193.283.668,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	V.C.1.c.6	87.268.272.715,93	36.917.332.394,00
Akumulasi Penyusutan		(776.317.976.515,57)	(607.306.006.626,54)
Aset Tetap Setelah Akumulasi Penyusutan		2.131.232.294.882,23	2.090.546.431.471,18
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	V.C.1.d	-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA	V.C.1.e		
Tuntutan Ganti Rugi	V.C.1.e.1	302.120.251,44	329.220.283,44
Aset Tak Berwujud	V.C.1.e.2	3.778.739.886,00	2.630.689.317,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(1.231.263.297,99)	(957.349.055,25)
Aset Tak Berwujud Setelah Amortisasi		2.547.476.588,01	1.673.340.261,75
Aset Lain-Lain	V.C.1.e.3	221.011.350.127,84	239.673.937.094,84
Penyusutan Aset Lain-Lain		(3.745.411.425,00)	(3.697.443.389,00)
Aset Lain-Lain Setelah Penyusutan		217.265.938.702,84	235.976.493.705,84
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		-	-
Jumlah Aset Lainnya		220.115.535.542,29	237.979.054.251,03
JUMLAH ASET		2.453.074.205.588,30	2.429.453.615.523,15
KEWAJIBAN	V.C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	V.C.2.a		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.C.2.a.1	601.085,00	17.723.019,00
Pendapatan Diterima Dimuka	V.C.2.a.2	59.368.059,68	81.213.447,88
Utang Belanja	V.C.2.a.3	25.959.697.767,73	19.668.717.484,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	V.C.2.a.4	2.609.516.672,86	765.093.207,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		28.629.183.585,27	20.532.747.157,88
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	V.C.2.b		
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		28.629.183.585,27	20.532.747.157,88

URAIAN	Reff	SALDO 31 DES 2019	SALDO 31 DES 2018
1	2	3	4
EKUITAS	V.C.3	2.424.445.022.003,03	2.408.920.868.365,27
JUMLAH EKUITAS		2.424.445.022.003,03	2.408.920.868.365,27
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.453.074.205.588,30	2.429.453.615.523,15



BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKHA TUANKU KERAJAAN, S.E.

6. LAPORAN ARUS KAS

Lampiran VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 Agustus 2020

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	Ref	TAHUN 2019	TAHUN 2018
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.E.1		
Arus Masuk Kas	V.E.1.a		
Penerimaan Pajak Daerah		19.178.964.229,67	29.231.341.838,86
Penerimaan Retribusi Daerah		3.054.849.682,00	2.655.851.485,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.590.314.080,00	3.177.292.290,00
Lain-Lain PAD yang Sah		52.860.183.160,82	48.810.995.398,02
Dana Bagi Hasil Pajak		13.711.561.010,00	17.647.991.094,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.116.617.541,00	1.729.956.123,00
Dana Alokasi Umum		524.888.502.000,00	501.889.284.000,00
Dana Alokasi Khusus		220.914.062.329,00	187.705.190.546,00
Dana Otonomi Khusus		-	-
Dana Penyesuaian		97.546.293.000,00	60.749.031.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak. Provinsi		47.598.137.491,00	38.744.280.024,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Bantuan Keuangan/Subsidi Pembangunan Provinsi		-	-
Penerimaan Lainnya dari Provinsi		-	-
Penerimaan Hibah		33.699.978.725,00	30.959.015.373,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.019.159.463.248,49	923.300.229.171,88
Arus Keluar Kas	V.E.1.b		
Pembayaran Pegawai		430.141.092.583,00	354.423.781.676,00
Pembayaran Barang		207.300.127.555,20	225.062.809.753,00
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		49.451.249.739,30	29.666.160.706,00
Pembayaran Bantuan Sosial		3.132.000.000,00	194.500.000,00

Pembayaran Bantuan Keuangan		718.106.992,00	866.040.075,00
Pembayaran Tak Terduga		24.176.925,00	744.340.724,00
Pembayaran Bantuan Transfer ke Pemerintah Nagari		119.188.567.000,00	105.394.865.100,00
Jumlah Arus Keluar Kas		809.955.320.794,50	716.352.498.034,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		209.204.142.453,99	206.947.731.137,88
Arus Kas dari Aktifitas Investasi	V.E.2		
Arus Masuk Kas	V.E.2.a		
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		188.228.000,00	240.722.850,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		10.380.000,00	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		198.608.000,00	240.722.850,00
Arus Keluar Kas	V.E.2.b		
Perolehan Tanah		0,00	35.301.400,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		45.512.218.370,50	30.578.214.530,14
Perolehan Gedung dan Bangunan		112.232.961.295,51	63.739.669.415,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		61.210.263.507,34	113.686.666.098,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		7.642.646.743,30	8.717.052.616,00
Perolehan Aset Lainnya			
Jumlah Arus Keluar Kas		226.598.089.916,65	216.756.904.059,14
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(226.399.481.916,65)	(216.516.181.209,14)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.E.3		
Arus Masuk Kas	V.E.3.a		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Penerimaan Piutang Daerah			
Jumlah Arus Masuk Kas			
Arus Keluar Kas	V.E.3.b		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.500.000.000,00	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		2.500.000.000,00	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(2.500.000.000,00)	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.E.4		
Arus Masuk Kas	V.E.4.a		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		40.440.250.504,00	54.150.231.616,57
Kesalahan Kredit Bank		-	7.291.300,00
Pencairan Deposito		-	-
Penerimaan Pengembalian Belanja		-	1.528.028.126,00
Jumlah Arus Masuk Kas		40.440.250.504,00	55.685.551.042,57
Arus Keluar Kas	V.E.4.b		
Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		40.457.372.438,00	54.132.508.597,57
Penempatan Deposito		-	13.372.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		40.457.372.438,00	54.145.880.597,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(17.121.934,00)	1.539.670.445,00
Kenaikan/Penurunan Kas		(19.712.461.396,66)	(8.028.779.626,26)
Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas		14.544.592.538,98	25.821.006.820,24
Saldo Awal Kas di BLUD		8.565.179.881,00	5.664.320.829,00
Saldo Awal Kas di Dana BOS		483.693.923,00	136.918.320,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah dan Setara Kas		88.799.569,52	14.533.461.147,98
Saldo Akhir Kas di BLUD		1.094.990.941,80	8.565.179.881,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	2.900.300,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		5.395.063,00	8.231.091,00
Saldo Akhir Kas di Dana BOS		2.695.211.372,00	483.693.923,00
Saldo Piutang pada Pihak Ketiga		-	-
Saldo Akhir Kas		3.884.396.946,32	23.593.466.342,98

 **BUPATI DHARMASRAYA**

SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, S.E.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Informasi Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran 1.01. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Kerangka tersebut di atas dapat dimaknai bahwa Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut.

1. mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Memenuhi ketentuan dimaksud, maka Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019 memberikan gambaran ringkas pencapaian kebijakan keuangan dan target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang disinkronkan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi satu kesatuan (*omnibus regulation*) dan pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keuangan (*financial accountability*) tetapi juga kaidah-kaidah yang baik (*best practices*), serta bertanggung jawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (*performance accountability*), dalam bentuk efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance and Clean Government*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 dalam satu kesatuan laporan yang terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan dan handal mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama Tahun 2019 sehingga dapat dievaluasi dan dinilai kinerjanya oleh *stake holder*, dan tujuan secara umum adalah memberikan informasi dalam rangka:

1. pembuatan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bahan bukti pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. informasi kinerja Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya yang berhubungan dengan anggaran/keuangan daerah sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi baik dari segi manajerial maupun organisasi untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di masa yang akan datang;
3. melaporkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta kinerja keuangan daerah selama periode tahun 2019;
4. menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek;
5. menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit kerja pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya, dalam satu tahun anggaran;
6. memonitor kinerja, dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang telah disyaratkan;
7. perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional;
8. mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi, antara lain: untuk menentukan biaya pelaksanaan program, fungsi dan aktivitas suatu satker sehingga mempermudah dalam melakukan analisis dan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja sebelumnya dengan kinerja unit pemerintahan, mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan serta target yang telah ditetapkan.

C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan konsolidasi dari laporan keuangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019;
33. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
34. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
35. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019.

D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Agar laporan keuangan dapat dipahami oleh para *stake holder* secara luas, tidak terbatas pada kepentingan tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan serta menghindari kesalahpahaman dan multitafsir dalam memahami laporan maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai pengungkapan hal-hal penting yang diperlukan dalam penyajian Laporan Keuangan, dimana secara umum bertujuan untuk:

1. Laporan keuangan mudah dipahami;
2. Menghindari kesalahpahaman;
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas;
5. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*).

Untuk lebih mudah memahami Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019, maka CaLK disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan

APBD dan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran, kebijakan keuangan yang ditetapkan, dan keberhasilan pencapaian target APBD.

- Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program.
- Bab IV : Kebijakan Akuntansi, menjelaskan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
- Bab V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan.
- Bab VI : Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya.
- Bab VII : Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kabupaten Dharmasraya yang berjalan pada periode sebelumnya. Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBD. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya sebagai ancar-ancar dalam menghitung postur APBD, namun dalam kondisi tertentu, asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dicapai. Berkaitan dengan itu, menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi keharusan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD. APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara makro yang terjadi pada Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2018. Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya yang direncanakan dalam APBD mempunyai asumsi tetap dalam masa anggaran berjalan. Sedangkan apabila terdapat perubahan atas kondisi perekonomian maupun pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan perubahan mendasar maka dilaksanakan penyesuaian dalam perencanaan anggaran didalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun berjalan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD.

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah dapat dilihat melalui indikator ekonomi makro daerah yang terdiri dari pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB perkapita, indeks gini, persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

A.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan asumsi penyusunan APBD yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah atau merupakan nilai barang dan jasa akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pada Tahun 2018 PDRB Kabupaten Dharmasraya harga berlaku adalah sebesar Rp9.917.021,29 juta dan PDRB Kabupaten Dharmasraya harga konstan sebesar Rp7.208.321,66 juta.

Nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018, mengalami kenaikan sebesar Rp 2.761.687,7 juta atau 27,84%, dan untuk lebih jelasnya perkembangan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018 menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel berikut.

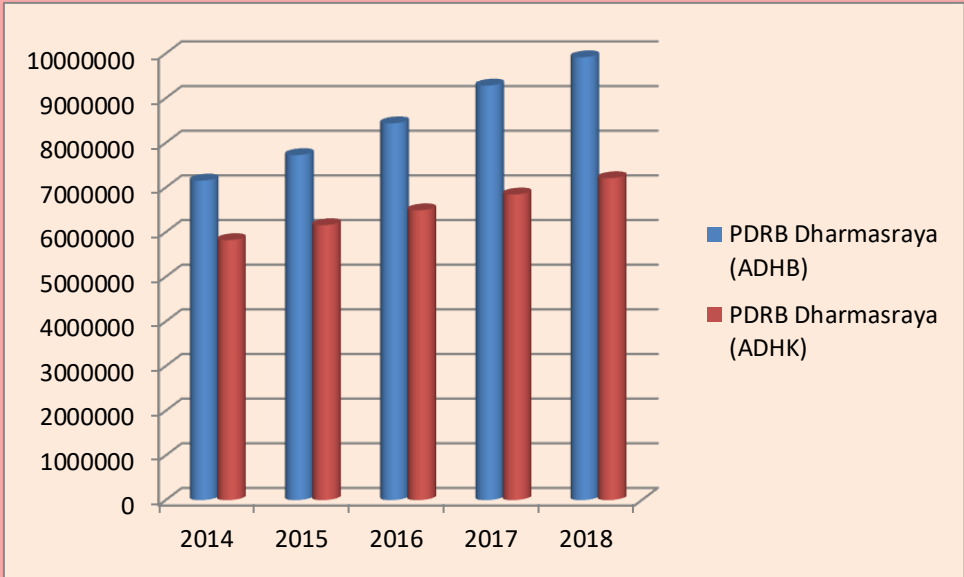
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2014-2018 (Jutaan Rupiah)

PDRB	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.227.638,69	2.400.594,59	2.646.716,98	2.852.097,92	2.949.573,35
B. Pertambangan dan Penggalian	782.141,90	762.109,02	684.589,75	674.407,94	700.488,64
C. Industri Pengolahan	430.231,75	468.344,95	511.210,21	564.907,91	578.751,87
D. Pengadaan Listrik dan Gas	48,09	1.666,85	79,24	91,70	2.371,90
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38,77	1.047,66	48,15	52,73	1.343,69
F. Konstruksi	847.271,37	984.511,83	1.113.105,74	1.242.481,06	1.368.732,37
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	905.204,22	1.017.082,34	1.159.040,84	1.309.136,86	1.431.109,11
H. Transportasi dan Pergudangan	414.210,09	449.949,54	494.720,46	556.334,00	606.728,93
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58.735,13	67.558,79	80.131,22	90.275,81	98.432,60
J. Informasi dan Komunikasi	389.940,76	400.236,26	447.286,33	546.480,60	604.748,84
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	160.529,90	177.984,51	194.795,27	208.172,57	218.323,35
L. Real Estat	150.886,17	169.449,64	186.751,97	204.116,27	219.837,17
M,N. Jasa Perusahaan	60,10	67,96	1.800,81	80,08	2.055,70
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	445.414,19	450.372,60	492.819,73	540.821,72	594.587,38
P. Jasa Pendidikan	176.585,97	196.627,02	224.760,10	262.198,82	287.288,26
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	114.071,62	123.177,80	135.148,05	154.792,33	172.267,78
R,S,T,U. Jasa lainnya	48.945,19	53.125,66	61.726,42	70.837,91	80.380,33
PDRB Dharmasraya (ADHB)	7.155.333,63	7.725.469,65	8.437.660,72	9.282.449,03	9.917.021,29
PDRB Dharmasraya (ADHK)	5.821.733,94	6.156.752,05	6.490.285,83	6.844.131,09	7.208.321,66

Sumber : www.bps.go.id

Untuk perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Tahun 2014-2018, dapat dilihat di Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1
Grafik Nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018



Dari grafik di atas terlihat bahwa PDRB Kabupaten Dharmasraya baik ADHB maupun ADHK selalu meningkat tiap tahunnya. Dilihat berdasarkan struktur ekonomi Kabupaten Dharmasraya menurut lapangan usaha masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 29,74%. Hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Dharmasraya, kemudian diikuti lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6%. Sementara lapangan usaha lainnya memiliki kontribusi dibawah 6%. Untuk lebih jelasnya kontribusi PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018 dapat dilihat di tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHB)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018

PDRB	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,30	1,30	1,32	30.73	29.74
B. Pertambangan dan Penggalian	0,48	0,43	0,34	0,31	0,30
C. Industri Pengolahan	0,25	0,25	0,25	0,26	0,27
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Konstruksi	0,52	0,55	0,55	0,57	0,60
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,55	0,55	0,59	0,59	0,61
H. Transportasi dan Pergudangan	0,26	0,27	0,27	0,28	0,26
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
J. Informasi dan Komunikasi	0,24	0,22	0,23	0,27	0,26
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

PDRB	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
L. Real Estat	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
M,N. Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,27	0,27	0,27	0,27	6,00
P. Jasa Pendidikan	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
PDRB Dharmasraya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : dharmasrayakab.bps.go.id

A.2. Laju Pertumbuhan PDRB

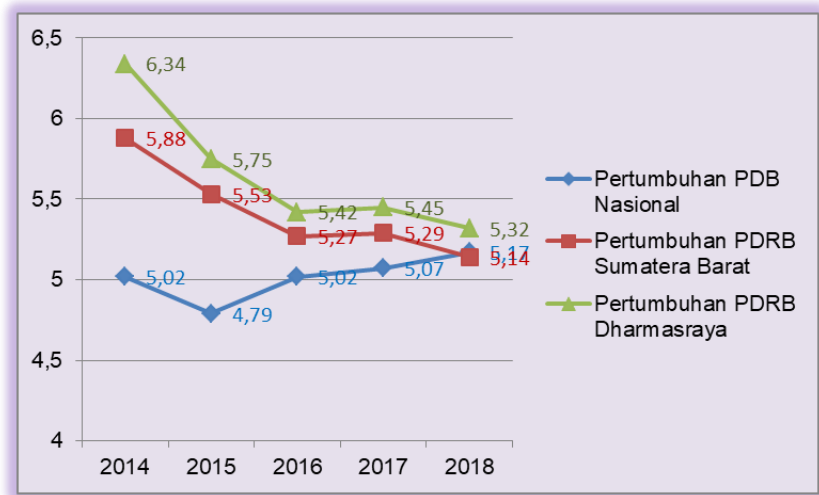
Pertumbuhan PDRB Menunjukkan pertumbuhan/perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Biasanya perhitungan pertumbuhan PDRB dihitung pada nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).

Tabel 2.3
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018 (ADHK Tahun 2010)

No.	Pertumbuhan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertumbuhan PDB Nasional	5,02	4,79	5,02	5,07	5,17
2	Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat	5,88	5,53	5,27	5,29	5,14
3	Pertumbuhan PDRB Dharmasraya	6,34	5,75	5,42	5,45	5,32

Sumber : www.bps.go.id

Gambar 2.2
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018



Dilihat dari tabel maupun grafik di atas, posisi pertumbuhan ekonomi Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat maupun nasional mengalami perlambatan, jika pada tahun 2014, ketiga wilayah ini memiliki pertumbuhan yang hampir sama yaitu berkisar antara 5,02 % hingga 6,34%, namun perkembangannya hingga

Tahun 2016, ketiga wilayah ini mengalami perlambatan pertumbuhan PDRB. Dibandingkan pertumbuhan sumbar dan nasional, maka pertumbuhan ekonomi Dharmasraya masih relatif lebih tinggi, begitu juga dengan Sumbar masih memiliki masih tumbuh di atas nasional.

A.3. Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita menunjukkan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, atau secara umum dapat menggambarkan perkembangan pendapatan perkapita penduduk secara tahunan yang dihitung berdasarkan nilai PDRB ADHB.

Tabel 2.4
PDRB Pendapatan Perkapita
Nasional, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Pendapatan Perkapita (Rp. Juta)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	PDRB perkapita Nasional (non migas)	41,92	45,14	47,96	51,89	56,00
2	Provinsi Sumatera Barat	32,13	34,41	37,21	40,32	42,83
3	Kabupaten Dharmasraya	33,05	34,83	36,77	39,50	41,05

Sumber : <http://www.bps.go.id>, data diolah

PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2014 hingga Tahun 2016 terlihat selalu berada di atas namun dibandingkan dengan PDRB perkapita nasional, maka angka ini berada di bawah angka nasional, artinya kesejahteraan masyarakat Dharmasraya berada di atas rata-rata kesejahteraan ekonomi provinsi, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Sementara pada Tahun 2017 dan 2018 Pendapatan Perkapita Kabupaten Dharmasraya berada dibawah PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat dan PDRB perkapita nasional, artinya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dharmasraya berada dibawah rata-rata nasional dan provinsi. Melihat pada perkembangan perekonomian di atas dan potensi ekonomi yang ada, maka tingkat kesejahteraan ekonomi yang diukur dari nilai PDRB ini masih akan dapat meningkat dengan baik di tahun-tahun berikutnya.

A.4. Inflasi

Laju inflasi digunakan untuk memperlihatkan perkembangan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dengan belum adanya perhitungan inflasi untuk Kabupaten Dharmasraya, maka berpedoman terhadap nilai inflasi provinsi serta 2 kota lainnya, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang sudah dihitung sejak 2014. Perkembangan inflasi tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah.

Tabel 2.5
Perkembangan Inflasi Nasional, Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang,
dan Kota Bukittinggi Tahun 2014-2018

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nasional	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13
2	Sumatera Barat	11,90	10,87	5,02	2,11	2,60
3	Kota Padang	11,90	0,85	2,11	1,45	0,16
4	Kota Bukittinggi	9,24	2,79	1,37	0,43	0,41

Sumber : Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional berbagai tahun edisi 2014 s.d. 2018

Ditinjau dari perkembangan inflasi Tahun 2014 sampai dengan 2018 nilai inflasi Provinsi Sumbar maupun dua kota lainnya berada di atas nasional, namun pada tahun 2016 terlihat nilainya turun sangat rendah bahkan tercatat sebagi angka terendah se-Indonesia. Berdasarkan analisa kajian ekonomi regional Bank Indonesia, rendahnya angka inflasi ini karena melambatnya perekonomian yang berasal dari penurunan kinerja industri pertanian, perdagangan, pengolahan dan industri transportasi dan komunikasi. Melambatnya perekonomian ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

A.5. Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini digunakan mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah, angkanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Artinya semakin mendekati angka 1 maka kesenjangan semakin besar, begitupun sebaliknya. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, maka gini rasio dengan nilai di atas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4 - 0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, sedangkan apabila rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah.

Tabel 2.6
Indeks Gini Rasio Nasional, Provinsi Sumatera Barat,
dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018

No.	Indeks Gini	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Nasional	0,41	0,41	0,40	0,40	0,38
2	Provinsi Sumatera Barat	0.32	0.34	0.33	0.32	0.32
3	Kabupaten Dharmasraya	0.32	0.36	0.30	0.25	0.26

Sumber : sumbar.bps.go.id

Berdasarkan data di atas, maka terlihat Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya maupun Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori ketimpangan rendah (lebih baik) dibandingkan angka nasional, dimana Indeks Gini Nasional berada pada tingkat ketimpangan sedang. Berdasarkan perkembangan nilai, dari tahun 2014 hingga 2018 indeks Gini Kabupaten Dharmasraya dan Provinsi Sumatera Barat sedikit mengalami fluktuatif. Dalam mencapai tujuan yang lebih baik, maka Indeks Gini diusahakan agar semakin mendekati nol, sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat antar golongan semakin kecil, atau pemerataan pendapatan semakin baik.

A.6. Tingkat Kemiskinan

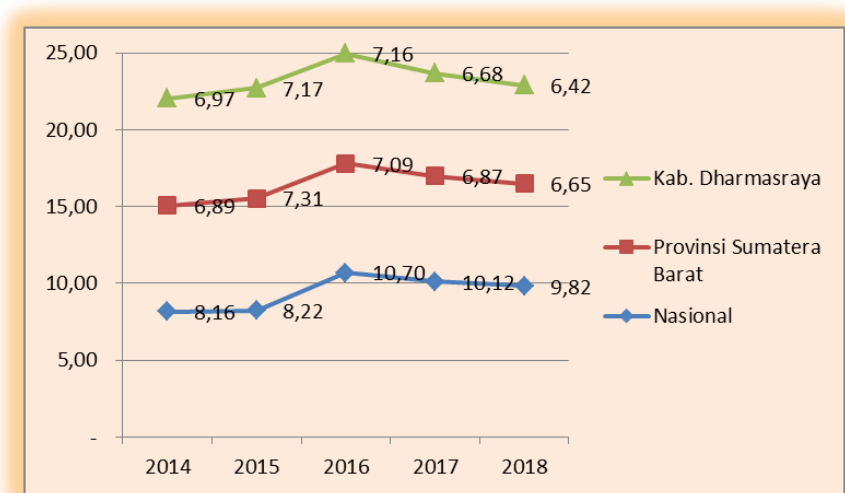
Dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dengan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi, hal ini telah mampu menekan tingkat kemiskinan hingga mencapai 6,68% di Tahun 2017. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di awal pemekaran pada Tahun 2005 sebesar 13,01%. Penurunan tingkat kemiskinan ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai upaya dan kebijakan yang berpihak kepada Rumah Tangga Miskin atau disebut juga dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai program dan kegiatan yang strategis dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Adapun perkembangan persentase maupun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018

Keterangan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Nasional	8,16	8,22	10,70	10,12	9,82
Provinsi Sumatera Barat	6.89	7.31	7.09	6.87	6.65
Tingkat Kemiskinan (persen) Kab. Dharmasraya	6,97	7,17	7,16	6,68	6,42
Jumlah Penduduk miskin (jiwa)	15.220	15.890	16.240	15.630	15.418
Jumlah penduduk (jiwa)	216.905	223.112	229.313	235.476	241.571

Sumber : sumbar.bps.go.id

Gambar 2.3
Grafik Perkembangan Penduduk Miskin
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018



Dilihat dari tabel maupun grafik di atas, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Dharmasraya berada di bawah nasional, namun masih berada di atas Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari garis tren pada grafik, maka garis kecenderungan penurunan kemiskinan Kabupaten Dharmasraya lebih tajam dibandingkan dengan nasional dan provinsi, sehingga untuk ke depannya ekspektasi penurunan persentase kemiskinan akan lebih baik. Pada Tahun 2015, ketiga wilayah menunjukkan perkembangan yang negatif yang ditunjukkan oleh meningkatnya persentase penduduk miskin. Peningkatan tersebut disebabkan lebih oleh kondisi ekonomi internasional dan regional, terutama penurunan komoditi perkebunan.

A.7. Tingkat Pengangguran

Daya saing tenaga kerja merupakan kata kunci dalam peningkatan kinerja bidang ketenaga kerjaan, dengan semakin membaiknya pembangunan ekonomi daerah, maka hal ini juga berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran, meskipun angka ini masih berfluktuasi dan masih dalam jumlah yang dapat dikendalikan. Untuk itu ke depan pasar tenaga kerja semakin dituntut untuk menghasilkan tenaga kerja yang terdidik, berkeahlian dan kerketerampilan, oleh sebab itu perlu berbagai inovasi yang sejalan dengan perkembangan zaman. Usaha itu dapat dilakukan melalui berbagai bentuk pelatihan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja sekaligus hendaknya dapat langsung disalurkan pada dunia kerja.

Saat ini Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 64,53 % dengan tingkat pengangguran 3,69% pada Tahun 2018. Tingkat pengangguran ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan jika

dibandingkan dari Tahun 2014 yang berjumlah 2,05 % merupakan peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 2.8
Tingkat Pengangguran Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,94	3,51	3,38	3,69	3,94
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,59	65,88	66,50	66,96	64,53
	Angkatan kerja15 tahun keatas	105.322	102.851	102.861	103.472	103.060
	Jumlah penduduk usia15 tahun keatas	151.347	156.118	156.130	156.368	165.837
3.	Persentase tenaga kerja yang tersalurkan	8,34	6,73	8.34	6,73	9,23

Sumber: Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

Untuk lebih jelasnya, berikut gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2.9
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2017-2018

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang
			2017	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	PDRB (Harga Berlaku)	Jutaan Rupiah	9282449.03	9917021.29	634572,26
2.	PDRB (Harga Konstan)	Jutaan Rupiah	6844131.09	7208321.66	364190,57
3.	PDRB Perkapita ADHB (Juta)	Rp	39,50	41,05	1,55
5.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,45	5,32	-0,13
6.	Tingkat Inflasi (Bukittinggi)	%	0,43	0,41	-0,02
7.	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	30.73	29.74	-0,99
B	Pertambangan dan Penggalian	%	0,31	0,30	-0,01
C	Industri Pengolahan	%	0,26	0,27	0,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	%	0,57	0,60	0,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	0,59	0,61	0,02
H	Transportasi dan Pergudangan	%	0,28	0,26	-0,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	0,07	0,07	0,00
J	Informasi dan Komunikasi	%	0,27	0,26	-0,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	0,10	0,10	0,00
L	Real Estat	%	0,10	0,10	0,00
M,N	Jasa Perusahaan	%	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	0,27	6,00	5,73
P	Jasa Pendidikan	%	0,14	0,15	0,01

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang
			2017	2018	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	0,09	0,09	0,00
R, S, T, U	Jasa lainnya	%	0,05	0,06	0,01
10.	Gini Rasio	Indeks	0.25	0.26	0,01
11.	Prosentase Penduduk Miskin	%	6,68	6,42	-0,26
12.	Tingkat Pengangguran	%	3,69	3,94	0,25

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan tabel indikator ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya di atas terlihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2017 ke Tahun 2018 mengalami perlambatan dari 5,45% di Tahun 2017 menjadi 5,32 di Tahun 2018.

Meskipun pertumbuhan melambat, kinerja ekonomi daerah positif ditunjukkan dengan naiknya nilai PDRB setiap tahunnya. Seiring dengan naiknya nilai PDRB tersebut juga mendorong meningkatnya pendapatan perkapita, jika dibandingkan Tahun 2017 yang hanya sebesar Rp.39.500.000,00 menjadi Rp.41.050.000,00 di Tahun 2018.

Berdasarkan struktur PDRB, maka sektor pertanian masih menduduki kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya.

Dilihat berdasarkan rasio gini untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk, pada Tahun 2017 yaitu 0,25 dan Tahun 2018 sebesar 0,26 artinya indeks ini dikategorikan rendah dimana pemerataan pendapatan penduduk Kabupaten Dharmasraya tiap tahunnya semakin membaik.

Semakin baiknya indikator perekonomian secara umum, maka hal ini juga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan daerah. Pada Tahun 2017 tercatat sebanyak 6,68% dan menurun menjadi 6,42% di Tahun 2018. Melihat capaian keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut maka inilah yang dapat meningkatkan daya saing Dharmasraya semakin baik di tingkat regional maupun nasional.

B. Kebijakan Keuangan Daerah

B.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan Dilakukan Tahun 2019

Dalam menjelaskan dan menganalisis arah kebijakan pendapatan, Kabupaten Dharmasraya mempedomani Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. Pada bagian ini dijelaskan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi Tahun 2016 dan Tahun 2017 serta Anggaran Tahun 2018, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara Nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan Pendapatan Daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari: Sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.

Kebijakan Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Optimalisasi dan Inventarisasi sumber sumber Pendapatan Daerah. Berdasarkan realisasi tahun-tahun anggaran sebelumnya, menunjukkan bahwa realisasi PAD telah mampu mencapai target secara optimal atau telah melebihi 90 persen dan sebesar 91,56% di Tahun 2017, sedangkan untuk dua sumber pendapatan lainnya target yang ditetapkan sudah hampir mencapai 100 persen. Pendapatan itu terdiri dari Dana Perimbangan yang realisasinya mencapai 92,35% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 89,81% untuk Tahun 2017.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - b) Penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masing-masing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
 - d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

- f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
 - h) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - i) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - j) Pemerintah Daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan TA 2019 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan

- b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah
- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
 - b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
 - c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
 - d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

B. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
 - a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-Pajak tiga tahun terakhir yaitu TA 2017, TA 2016, dan TA 2015. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah

harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2019.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT tiga tahun terakhir yaitu TA 2017, TA 2016, dan TA 2015. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2019.
- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA TA 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA TA 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-SDA tiga tahun terakhir, yaitu TA 2017, TA 2016, dan TA 2015, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi TA 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2019. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA di luar Dana Reboisasi TA 2019 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan TA 2018, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam

peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2019.

- d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2018. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2019.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2019 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2019 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2019.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2018 dengan memperhatikan realisasi TA 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi

Khusus TA 2019 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2019.

- b. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD TA 2019, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS TA 2018 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi TA 2019.
- c. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah TA 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah TA 2019 belum ditetapkan, penganggaran TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG TA 2018 dengan memperhatikan realisasi TA 2017. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah TA 2019 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2019 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- d. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa TA 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa TA 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa TA 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa

dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2019.

- e. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2019.
- f. Pendapatan sumbangan yang bersumber dari pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi sumbangan sesuai kode rekening berkenaan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi TA 2019. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2019 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2019, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2017, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target TA 2018, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2019.

Tabel 2.10
Pendapatan Daerah Kabupaten DharmaSraya Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019

Kode Rekening	Uraian	APBD 2018	Proyeksi 2019
4.	PENDAPATAN DAERAH	896,502,300,652	709.202.610.652
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	80,085,859,652	90,085,859,652
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah ¹⁾	18,669,577,916	24.966.772.393
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah ¹⁾	5,941,998,325	7.147.648.325
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,144,283,411	4.641.438.934
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	50.330.000.000	53.330.000.000

Kode Rekening	Uraian	APBD 2018	Proyeksi 2019
4.2.	DANA PERIMBANGAN	714,426,147,000	519,172,720,000
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18,537,327,000	16,874,635,000
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	502,298,085,000	502,298,085,000
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	191.366.518.000	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	101,990,294,000	99,944,031,000
4.3.1.	Pendapatan Hibah	2,200,000,000	1,500,000,000
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39,041,263,000	37,695,000,000
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60,749,031,000	60,749,031,000
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-

Sumber : KUA PPAS Tahun 2019

B.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

B.2.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya, yang dialokasikan dalam belanja langsung.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
2. Belanja Pegawai
 - a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan, pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan.
 - b. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
3. Belanja Barang dan Jasa.
 - a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
 - b. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.

- c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- d. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2018.
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan *medical check-up* sebanyak satu kali dalam satu tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan *medical check-up* sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check-up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- f. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN,

dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- h. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan perundangundangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut.
 - Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat

- tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan.
 - Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- k. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- l. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi.
- pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - unsur lainnya seperti tenaga ahli,
- diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- m. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- n. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Belanja Modal.

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada TA 2018 Rp217,48 triliun atau 19,26% dari total belanja daerah, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp59,40 triliun atau 16,99% dari total belanja daerah, dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp158,08 triliun atau 20,28% dari total belanja daerah.
- b. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan, sejalan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, dan membatasi pengadaan kendaraan dinas, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- d. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
- e. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- f. Penganggaran Belanja Modal untuk prioritas pembangunan daerah untuk Sosial Budaya, dimana akan dibangun *Islamic Centre* yang akan dilakukan dengan pola *Multiyears*.

5. Surplus/Defisit APBD.

- a. Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional

terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah, maka pemerintah daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

B.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga

1. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan gaji ke 13 dan 14.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD TA 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Standar satuan biaya Tambahan Penghasilan PNSD dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2019 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2019.

3. Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD TA 2019, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pemerintah daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Pada TA 2019, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merencanakan penganggaran untuk Rehabilitasi Rumah Gadang dan Bantuan Sosial untuk Orang Tua Lanjut Usia.

5. Belanja Bagi Hasil Pajak.

- a. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada TA 2019, sedangkan pelampauan target TA 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD TA 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2019.

- b. Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.
6. Belanja Bantuan Keuangan.
 - a. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD TA 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
 - b. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2019 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD TA 2019 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan

bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/ kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/ kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

- c. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

7. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Tabel. 2.11
Belanja Daerah Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019

Kode Rekening	Uraian	APBD 2018	Prediksi 2019
5.	BELANJA DAERAH	929.502.300.652	706.702.610.652
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	476.935.178.945	444.783.426.122
5.1.1.	Belanja Pegawai	358.479.307.870	322.028.047.257
5.1.2.	Belanja Bunga	-	-
5.1.3.	Belanja Subsidi	-	-
5.1.4.	Belanja Hibah	10.794.200.000	6.550.000.000
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	184.000.000	3.500.000.000
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1.200.000.000	2.027.707.790

Kode Rekening	Uraian	APBD 2018	Prediksi 2019
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	104.777.671.075	104.777.671.075
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	5.900.000.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	452.567.121.707	261.919.184.530
5.2.1.	Belanja Pegawai	697.928.000	477.928.000
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	210.204.839.297	92.012.869.912
5.2.3.	Belanja Modal	241.664.354.410	169.428.386.618

Sumber : KUA PPAS Tahun 2019

B.3. Pembiayaan Daerah

B.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA TA 2018.
- b. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Dharmasraya yaitu berusaha untuk meminimalisai SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Dharmasraya untuk kurun waktu 2019 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut.

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) diasumsikan sebesar Rp. 0.
- b. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

B.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Dharmasraya selama Tahun 2019 diarahkan untuk.

- 1. Penyertaan Modal.
Pemerintah daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada

badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

2. Pembiayaan Netto.

Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

B.3.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SLPA) Tahun Berjalan.

- a. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SLPA) Tahun Anggaran 2019 bersaldo nihil.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel 2.12
Pembiayaan Daerah Tahun 2018 dan Prediksi Tahun 2019

Kode Rekening	Uraian	APBD 2018	Prediksi 2019
6.	Pembiayaan Daerah	33.000.000.000	(2.500.000.000)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	34.000.000.000	0
6.2.	Pengeluaran pembiayaan Daerah	(1.000.000.000)	(2.500.000.000)

Sumber : KUA PPAS Tahun 2019

C. Pencapaian Target Kinerja APBD

Target penerimaan Pendapatan TA 2019 sebesar Rp1.064.900.986.783,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.019.358.071.248,49 atau sebesar 95,72%/ terdiri atas.

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp100.170.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp78.882.919.152,49 atau 78,75%;
- 2. Pendapatan Transfer sebesar Rp930.336.586.783,00 dengan realisasi sebesar Rp906.775.173.371,00 atau 97,42 %;
- 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp34.394.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp33.699.978.725,00 atau 97,98%.

Anggaran Belanja Daerah pada Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp1.085.989.777.859,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp536.092.919.025,75 dan Belanja Langsung sebesar Rp549.896.858.833,25

Dari total target Belanja Daerah tersebut terealisasi sebesar Rp1.036.553.410.711,15 atau 95,45% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp519.184.535.120,00 atau 96,85% dan Belanja Langsung sebesar Rp517.368.875.591,15 atau 94,08%.

Sementara dari nilai pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp21.088.791.076,00 terealisasi sebesar Rp21.088.791.075,98 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp.0,00 terealisasi sebesar Rp23.588.791.075,98 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah di Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2019 dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2019 dengan Target dan Realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2019

URAIAN	APBD TA. 2019	REALISASI
Pendapatan	1.064.900.986.783,00	1.019.358.071.248,49
Belanja	1.085.989.777.859,00	1.036.553.410.711,15
Surplus/Defisit	(21.088.791.076,00)	(17.195.339.462,66)

Persentase Target dan Realisasi capaian keuangan sebagaimana Tabel 3.1 di atas yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat di Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Persentase Pendapatan dan Belanja SKPD TA 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA
1	Dinas Pendidikan	229,83	96,22
2	Dinas Kesehatan	98,74	95,14
3	Rumah Sakit Umum Daerah	89,45	95,50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	30,61	92,43
5	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	64,16	95,81
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	97,75
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	0,00	97,68
8	Dinas Pangan Perikanan	18,45	97,23
9	Dinas Lingkungan Hidup	176,24	97,21
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	98,29
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	95,91
12	Dinas Perhubungan	68,28	93,22
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	102,25	97,48
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	64,50	88,20
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	55,58	97,26
16	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	0,00	97,05
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	97,06
18	Dinas Pertanian	37,66	96,13
19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	111,40	91,04
20	Inspektorat Kabupaten	0,00	97,82
21	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	97,52
22	Badan Keuangan Daerah	68,64	93,75

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	93,22
24	Sekretariat Daerah	98,54	98,82
25	Sekretariat DPRD	0,00	90,05
26	Kecamatan Pulau Punjung	79,88	97,82
27	Kecamatan Sitiung	83,16	97,21
28	Kecamatan Koto Baru	100,47	97,89
29	Kecamatan Sungai Rumbai	128,79	96,83
30	Kecamatan IX Koto	100,00	97,80
31	Kecamatan Timpeh	78,94	98,78
32	Kecamatan Koto Salak	534,00	97,22
33	Kecamatan Asam Jujuhan	0,00	97,66
34	Kecamatan Koto Besar	99,14	95,38
35	Kecamatan Padang Laweh	16,67	98,30
36	Kecamatan Tiumang	87,20	96,14
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	93,86
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	95,76
39	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	97,98
40	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	87,84
41	PPKD	97,11	98,85

Untuk lebih rinci, Target Penerimaan dari masing-masing Perangkat Daerah di atas dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.3
Target Pencapaian Kinerja APBD Kabupaten Dharmasraya TA 2019

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TARGET APBD-P 2019 (Rp)	REALISASI 2019	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.000.000,00	91.933.000,00	229,83%	51.933.000,00
	a. Retribusi Daerah	40.000.000,00	91.933.000,00	229,83%	51.933.000,00
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	40.000.000,00	91.933.000,00	229,83%	51.933.000,00
2	DINAS KESEHATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.577.524.800,00	10.712.659.192,00	101,28%	(135.134.392,00)
	a. Retribusi Daerah	879.680.000,00	695.541.250,00	79,07%	184.138.750,00
	1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	800.000.000,00	646.306.000,00	80,79%	153.694.000,00
	Lab. Kesda JKN	800.000.000,00	646.306.000,00	80,79%	153.694.000,00
	2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	79.680.000,00	49.235.250,00	61,79%	30.444.750,00
	b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.697.844.800,00	10.017.117.942,00	103,30%	(319.273.142,00)
	1 Pendapatan BLUD Puskesmas	2.668.940.000,00	3.053.078.166,00	114,42%	(384.138.166,00)
	2 Dana Kapitasi dari JKN	7.028.904.800,00	6.964.039.776,00	99,08%	64.865.024,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	42.366.637.951,00	37.896.805.592,00	89,45%	(4.469.832.359,00)
	a. Retribusi Daerah	7.900.000,00	11.230.200,00	142,15%	3.330.200,00

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TARGET APBD-P 2019 (Rp)	REALISASI 2019	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.400.000,00	8.730.000,00	161,67%	3.330.000,00
	2 Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.500.000,00	2.500.200,00	100,01%	200,00
	b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.358.737.951,00	37.885.575.392,00	89,44%	(4.473.162.559,00)
	1 Pendapatan BLUD RSUD	42.358.737.951,00	37.885.575.392,00	89,44%	(4.473.162.559,00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.298.367.267,00	1.315.733.686,56	30,61%	(2.982.633.580,44)
	a. Retribusi Daerah	1.698.367.267,00	520.564.500,00	30,65%	(1.177.802.767,00)
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.483.367.267,00	470.673.000,00	31,73%	(1.012.694.267,00)
	2 Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus	25.000.000,00	30.300.000,00	121,20%	5.300.000,00
	3 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	190.000.000,00	19.591.500,00	10,31%	(170.408.500,00)
	b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.600.000.000,00	795.169.186,56	30,58%	(1.804.830.813,44)
	1 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan/Bidang Pekerjaan Umum	2.000.000.000,00	176.613.086,56	8,83%	(1.823.386.913,44)
	2 Pendapatan dari Pelayanan Pemakaian Air Minum	600.000.000,00	618.556.100,00	103,09%	18.556.100,00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	190.560.000,00	122.268.800,00	64,16%	(68.291.200,00)
	a. Retribusi Daerah	190.560.000,00	122.268.800,00	64,16%	(68.291.200,00)
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	190.560.000,00	122.268.800,00	64,16%	(68.291.200,00)
6	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	874.000.000,00	161.270.000,00	18,45%	(712.730.000,00)
	a. Retribusi Daerah	874.000.000,00	161.270.000,00	18,45%	(712.730.000,00)
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	654.000.000,00	103.200.000,00	15,78%	(550.800.000,00)
	2 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	220.000.000,00	58.070.000,00	26,40%	(161.930.000,00)
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	45.000.000,00	79.310.000,00	176,24%	34.310.000,00
	a. Retribusi Daerah	45.000.000,00	79.310.000,00	176,24%	34.310.000,00
	1 Retribusi Pelayanan Pesampahan/ Kebersihan	45.000.000,00	79.310.000,00	176,24%	34.310.000,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	4.780.000,00	-	4.780.000,00
	a. Retribusi Daerah	-	4.780.000,00	-	4.780.000,00
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	4.780.000,00	-	4.780.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	467.500.000,00	319.230.000,00	68,28%	(148.270.000,00)
	a. Retribusi Daerah	467.500.000,00	319.230.000,00	68,28%	(148.270.000,00)
	1 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick-up	440.000.000,00	297.430.000,00	67,60%	(142.570.000,00)
	2 Retribusi Tempat Khusus Parkir	27.500.000,00	21.800.000,00	79,27%	(5.700.000,00)

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TARGET APBD-P 2019 (Rp)	REALISASI 2019	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	470.000.000,00	480.575.000,00	102,25%	10.575.000,00
	a. Retribusi Daerah	470.000.000,00	480.575.000,00	102,25%	10.575.000,00
	1 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	470.000.000,00	480.575.000,00	102,25%	10.575.000,00
11	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	125.000.000,00	80.629.000,00	64,50%	(44.371.000,00)
	a. Retribusi Daerah	125.000.000,00	80.629.000,00	64,50%	(44.371.000,00)
	1 Retribusi Pelayanan Pasar	125.000.000,00	80.049.000,00	64,04%	(44.951.000,00)
	2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		580.000,00	-	580.000,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	600.000.000,00	333.452.365,00	55,58%	(266.547.635,00)
	a. Retribusi Daerah	600.000.000,00	333.452.365,00	55,58%	(266.547.635,00)
	1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00	333.452.365,00	55,58%	(266.547.635,00)
13	DINAS PERTANIAN				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	130.000.000,00	48.952.600,00	37,66%	(81.047.400,00)
	a. Retribusi Daerah	130.000.000,00	48.952.600,00	37,66%	(81.047.400,00)
	1 Retribusi Pelayanan Pasar	50.000.000,00	7.840.000,00	15,68%	(42.160.000,00)
	2 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.000.000,00	41.112.600,00	54,82%	(33.887.400,00)
	3 Retribusi Rumah Potong Hewan	5.000.000,00	-	0,00%	(5.000.000,00)
14	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.980.000,00	15.574.217,00	111,40%	1.594.217,00
	a. Retribusi Daerah	13.980.000,00	15.574.217,00	111,40%	1.594.217,00
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13.980.000,00	15.574.217,00	111,40%	1.594.217,00
15	PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.951.438.934,00	7.940.522.720,26	66,44%	(4.010.916.213,74)
	a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.641.438.934,00	3.590.314.080,00	77,35%	(1.051.124.854,00)
	1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.641.438.934,00	3.590.314.080,00	77,35%	(1.051.124.854,00)
	b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.310.000.000,00	4.350.208.640,26	59,51%	(2.959.791.359,74)
	1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan	530.000.000,00	193.658.000,00	36,54%	(336.342.000,00)
	2 Jasa Giro Kas Daerah	3.150.000.000,00	867.181.505,00	27,53%	(2.282.818.495,00)
	3 Jasa Giro Kas Bendahara	100.000.000,00	138.913.184,00	138,91%	38.913.184,00
	4 Pendapaan Bunga Deposito Uang Daerah	2.500.000.000,00	1.263.006.209,00	50,52%	(1.236.993.791,00)
	5 Kerugian Uang Daerah	1.030.000.000,00	1.887.449.742,26	183,25%	857.449.742,26
	PENDAPATAN TRANSFER	930.336.586.783,00	906.775.173.371,00	97,47%	(23.561.413.412,00)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	781.832.120.600,00	761.630.742.880,00	97,42%	(20.201.377.720,00)

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TARGET APBD-P 2019 (Rp)	REALISASI 2019	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	1 Bagi Hasil Pajak	19.305.707.000,00	13.711.561.010,00	71,02%	(5.594.145.990,00)
	2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.072.411.000,00	2.116.617.541,00	68,89%	(955.793.459,00)
	3 Dana Alokasi Umum (DAU)	524.890.763.000,00	524.888.502.000,00	100,00%	(2.261.000,00)
	4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	234.563.239.600,00	220.914.062.329,00	94,18%	(13.649.177.271,00)
	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	97.546.293.000,00	97.546.293.000,00	100,00%	-
	Dana Penyesuaian	97.546.293.000,00	97.546.293.000,00	100,00%	-
	Transfer Pemerintah Provinsi	50.958.173.183,00	47.598.137.491,00	93,41%	(3.360.035.692,00)
	1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	48.899.228.183,00	47.598.137.491,00	97,34%	(1.301.090.692,00)
	2 Bantuan Keuangan	2.058.945.000,00	-	0,00%	(2.058.945.000,00)
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	34.394.400.000,00	33.699.978.725,00	97,98%	(694.421.275,00)
	Pendapatan Hibah	34.394.400.000,00	33.699.978.725,00	97,98%	(694.421.275,00)
16	BADAN KEUANGAN DAERAH				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	27.926.281.048,00	19.189.684.229,67	68,72%	(8.736.596.818,33)
	a. Pajak Daerah	27.926.281.048,00	19.178.964.229,67	68,68%	(8.747.316.818,33)
	1 Pajak Hotel	220.000.000,00	197.117.450,00	89,60%	(22.882.550,00)
	2 Pajak Restoran	1.850.000.000,00	1.894.628.432,00	102,41%	44.628.432,00
	3 Pajak Hiburan	50.000.000,00	7.975.000,00	15,95%	(42.025.000,00)
	4 Pajak Reklame	250.000.000,00	166.970.339,00	66,79%	(83.029.661,00)
	5 Pajak Penerangan Jalan PLN	14.200.000.000,00	10.797.828.618,00	76,04%	(3.402.171.382,00)
	6 Pajak Penerangan Jalan Non PLN	300.000.000,00	10.730.225,00	3,58%	(289.269.775,00)
	7 Pajak Parkir	50.000.000,00	200.000,00	0,40%	(49.800.000,00)
	8 Pajak Air Tanah	25.000.000,00	18.693.735,00	74,77%	(6.306.265,00)
	9 Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	2.400.000,00	4,80%	(47.600.000,00)
	10 PBB Perdesaan dan Perkotaan	5.320.000.000,00	2.534.754.352,00	72,42%	(2.785.245.648,00)
	11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.055.401.048,00	3.147.399.751,00	77,61%	(908.001.297,00)
	12 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.465.880.000,00	400.266.327,67	16,23%	(2.065.613.672,33)
	b. Lain-lain PAD Yang Sah	-	10.720.000,00	-	10.720.000,00
	1 Penjualan Hasil Pertanian	-	10.720.000,00	-	10.720.000,00
17	SEKRETARIAT DAERAH				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.000.000,00	23.650.000,00	98,54%	(350.000,00)
	a. Retribusi Daerah	24.000.000,00	23.650.000,00	98,54%	(350.000,00)
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	24.000.000,00	23.650.000,00	98,54%	(350.000,00)
18	KECAMATAN PULAU PUNJUNG				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19.560.000,00	15.625.000,00	79,88%	(3.935.000,00)
	a. Retribusi Daerah	19.560.000,00	15.625.000,00	79,88%	(3.935.000,00)
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.560.000,00	9.500.000,00	110,98%	940.000,00
	2 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.000.000,00	6.125.000,00	55,68%	(4.875.000,00)
19	KECAMATAN SITIUNG				-

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TARGET APBD-P 2019 (Rp)	REALISASI 2019	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19.460.000,00	16.183.000,00	83,16%	(3.277.000,00)
	a. Retribusi Daerah	19.460.000,00	16.183.000,00	83,16%	(3.277.000,00)
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.460.000,00	5.713.000,00	60,39%	(3.747.000,00)
	2 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000,00	10.470.000,00	104,70%	470.000,00
20	KECAMATAN KOTO BARU				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.600.000,00	3.617.000,00	100,47%	17.000,00
	a. Retribusi Daerah	3.600.000,00	3.617.000,00	100,47%	17.000,00
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.000,00	2.580.000,00	172,00%	1.080.000,00
	2 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.100.000,00	1.037.000,00	49,38%	(1.063.000,00)
21	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.180.000,00	13.111.250,00	128,79%	2.931.250,00
	a. Retribusi Daerah	10.180.000,00	13.111.250,00	128,79%	2.931.250,00
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.680.000,00	2.830.000,00	105,60%	150.000,00
	2 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.500.000,00	10.281.250,00	137,08%	2.781.250,00
22	KECAMATAN SEMBILAN KOTO				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	-
	a. Retribusi Daerah	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	-
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		1.250.000,00	-	1.250.000,00
	2 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.250.000,00	-	0,00%	(1.250.000,00)
23	KECAMATAN TIMPEH				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.160.000,00	4.862.500,00	78,94%	(1.297.500,00)
	a. Retribusi Daerah	6.160.000,00	4.862.500,00	78,94%	(1.297.500,00)
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.660.000,00	650.000,00	39,16%	(1.010.000,00)
	2 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.500.000,00	4.212.500,00	93,61%	(287.500,00)
24	KECAMATAN KOTO SALAK				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.000.000,00	5.340.000,00	534,00%	4.340.000,00
	a. Retribusi Daerah	1.000.000,00	5.340.000,00	534,00%	4.340.000,00
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		5.340.000,00	-	5.340.000,00
	2 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000,00	-	-	(1.000.000,00)
25	KECAMATAN ASAM JUJUHAN				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.000.000,00	-	0,00%	(1.000.000,00)
	a. Retribusi Daerah	1.000.000,00	-	0,00%	(1.000.000,00)
	1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000,00	-	0,00%	(1.000.000,00)
26	KECAMATAN KOTO BESAR				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.500.000,00	3.470.000,00	99,14%	(30.000,00)
	a. Retribusi Daerah	3.500.000,00	3.470.000,00	99,14%	(30.000,00)
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000,00	2.220.000,00	222,00%	1.220.000,00

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	TARGET APBD-P 2019 (Rp)	REALISASI 2019	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	2 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00%	(1.250.000,00)
27	KECAMATAN PADANG LAWEH				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.500.000,00	250.000,00	16,67%	(1.250.000,00)
	a. Retribusi Daerah	1.500.000,00	250.000,00	16,67%	(1.250.000,00)
	1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000,00	250.000,00	16,67%	(1.250.000,00)
28	KECAMATAN TIUMANG				-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.500.000,00	2.180.000,00	87,20%	(320.000,00)
	a. Retribusi Daerah	2.500.000,00	2.180.000,00	87,20%	(320.000,00)
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		1.605.000,00	-	1.605.000,00
	2 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000,00	575.000,00	23,00%	(1.925.000,00)
TOTAL		1.064.900.986.783,00	1.019.358.071.248,49	95,72%	(45.542.915.534,51)

Tabel 3.4
Target Pencapaian Kinerja APBD Kabupaten Dharmasraya Jenis Belanja
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2019

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	7	8
1	Dinas Pendidikan	Belanja Tak langsung	209.061.126.354,75	202.096.891.171,00	6.964.235.183,75	96,67
		Belanja Pegawai	209.061.126.354,75	202.096.891.171,00	6.964.235.183,75	96,67
		Belanja langsung	87.027.922.323,00	82.790.726.927,77	4.237.195.395,23	95,13
		Belanja Pegawai	8.404.355.000,00	7.919.069.000,00	485.286.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	29.892.656.773,00	28.989.319.395,00	903.337.378,00	96,98
		Belanja Modal	48.730.910.550,00	45.882.338.532,77	2.848.572.017,23	94,15
		Jumlah	296.089.048.677,75	284.887.618.098,77	11.201.430.578,98	96,22
2	Dinas Kesehatan	Belanja Tak langsung	49.102.182.000,00	47.613.202.299,00	1.488.979.701,00	96,97
		Belanja Pegawai	49.102.182.000,00	47.613.202.299,00	1.488.979.701,00	96,97
		Belanja langsung	53.118.124.128,00	49.622.847.900,20	3.495.276.227,80	93,42
		Belanja Pegawai	7.889.152.200,00	7.114.023.319	775.128.881,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	24.751.075.239,00	23.615.376.123,100	1.135.699.115,90	95,41
		Belanja Modal	20.477.896.689,00	18.893.448.458,10	1.584.448.230,90	92,26
		Jumlah	102.220.306.128,00	97.236.050.199,20	4.984.255.928,80	95,12
3	BLUD Puskesmas	Belanja Tak langsung				
		Belanja Pegawai				
		Belanja langsung	10.811.097.856,00	10.300.028.829,20	511.069.026,80	95,27
		Belanja Pegawai	-	-	-	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	10.030.913.401,00	9.519.844.374,20	511.069.026,80	94,91
		Belanja Modal	780.184.455,00	780.184.455,00	-	100
		Jumlah	10.811.097.856,00	10.300.028.829,20	511.069.026,80	95,27
4	Rumah Sakit Umum Daerah	Belanja Tak langsung	23.301.247.000,00	22.888.898.968,00	412.348.032,00	-
		Belanja Pegawai	23.301.247.000,00	22.888.898.968,00	412.348.032,00	98,23

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja langsung	21.493.706.313,00	18.292.639.215,00	3.201.067.098,00	85,11
		Belanja Pegawai	629.500.000	548.965.000	80.535.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100
		Belanja Modal	20.858.206.313,00	17.737.674.215,00	3.120.532.098,00	85,04
		Jumlah	44.794.953.313,00	41.181.538.183,00	3.613.415.130,00	91,93
5	BLUD RSUD	Belanja Tak langsung				
		Belanja Pegawai				
		Belanja langsung	42.890.955.951,00	42.559.291.810,00	331.664.141,00	99,23
		Belanja Pegawai				
		Belanja Barang dan Jasa	41.197.249.951,00	41.019.179.916,00	178.070.035,00	99,57
		Belanja Modal	1.693.706.000,00	1.540.111.894,00	153.594.106,00	90,93
		Jumlah	42.890.955.951,00	42.559.291.810,00	331.664.141,00	99,23
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Belanja Tak langsung	5.108.491.000,00	4.905.357.555,00	203.133.445,00	96,02
		Belanja Pegawai	5.108.491.000,00	4.905.357.555,00	203.133.445,00	96,02
		Belanja langsung	142.882.324.442,25	131.884.154.766,34	10.998.169.675,91	92,30
		Belanja Pegawai	2.916.130.000,00	2.740.811.000,00	175.319.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	33.224.534.696,00	29.924.076.331,00	3.300.458.365,00	90,07
		Belanja Modal	106.741.659.746,25	99.219.267.435,34	7.522.392.310,91	92,95
		Jumlah	147.990.815.442,25	136.789.512.321,34	11.201.303.120,91	92,43
5	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Belanja Tak langsung	1.902.036.000,00	1.786.496.019,00	115.539.981,00	93,93
		Belanja Pegawai	1.902.036.000,00	1.786.496.019,00	115.539.981,00	93,93
		Belanja langsung	5.227.850.440,00	5.044.974.092,93	182.876.347,07	96,50
		Belanja Pegawai	727.943.000,00	622.220.000,00	105.723.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	2.935.747.440,00	2.867.947.392,93	67.800.047,07	97,69
		Belanja Modal	1.564.160.000,00	1.554.806.700,00	9.353.300,00	99,40
		Jumlah	7.129.886.440,00	6.831.470.111,93	298.416.328,07	95,81
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Belanja Tak langsung	2.316.538.000,00	2.257.101.608,00	59.436.392,00	97,43
		Belanja Pegawai	2.316.538.000,00	2.257.101.608,00	59.436.392,00	97,43
		Belanja langsung	6.161.392.725,00	6.030.119.023,00	131.273.702,00	97,87
		Belanja Pegawai	4.184.580.000,00	4.158.237.550,00	26.342.450,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.883.262.725,00	1.781.205.598,00	102.057.127,00	94,58
		Belanja Modal	93.550.000,00	90.675.875,00	2.874.125,00	96,93
		Jumlah	8.477.930.725,00	8.287.220.631,00	190.710.094,00	97,75
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	Belanja Tak langsung	3.156.872.000,00	3.046.459.811,00	110.412.189,00	96,50
		Belanja Pegawai	3.156.872.000,00	3.046.459.811,00	110.412.189,00	96,50
		Belanja langsung	7.134.705.826,00	7.006.283.450,00	128.422.376,00	98,20
		Belanja Pegawai	1.483.510.000,00	1.457.890.000,00	25.620.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	4.885.545.826,00	4.819.868.450,00	65.677.376,00	98,66
		Belanja Modal	765.650.000,00	728.525.000,00	37.125.000,00	95,15
		Jumlah	10.291.577.826,00	10.052.743.261,00	238.834.565,00	97,68
8	Dinas Pangan Perikanan	Belanja Tak langsung	2.556.767.000,00	2.466.088.721,00	90.678.279,00	96,45
		Belanja Pegawai	2.556.767.000,00	2.466.088.721,00	90.678.279,00	96,45
		Belanja langsung	3.683.798.198,00	3.601.418.533,00	82.379.665,00	97,76

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Pegawai	573.180.000,00	548.220.000,00	24.960.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	2.642.110.602,00	2.586.730.033,00	55.380.569,00	97,90
		Belanja Modal	468.507.596,00	466.468.500,00	2.039.096,00	99,56
		Jumlah	6.240.565.198,00	6.067.507.254,00	173.057.944,00	97,23
9	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Tak langsung	2.674.965.000,00	2.525.695.945,00	149.269.055,00	94,42
		Belanja Pegawai	2.674.965.000,00	2.525.695.945,00	149.269.055,00	94,42
		Belanja langsung	3.614.329.360,00	3.588.106.994,00	26.222.366,00	99,27
		Belanja Pegawai	928.190.000,00	926.450.000,00	1.740.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	2.631.839.360,00	2.607.774.594,00	24.064.766,00	99,09
		Belanja Modal	54.300.000,00	53.882.400,00	417.600,00	99,23
		Jumlah	6.289.294.360,00	6.113.802.939,00	175.491.421,00	97,21
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belanja Tak langsung	2.874.072.000,00	2.806.433.388,00	67.638.612,00	97,65
		Belanja Pegawai	2.874.072.000,00	2.806.433.388,00	67.638.612,00	97,65
		Belanja langsung	3.943.215.250,00	3.894.564.183,00	48.651.067,00	98,77
		Belanja Pegawai	838.130.000,00	819.550.000,00	18.580.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.780.819.850,00	1.751.036.614,00	29.783.236,00	98,33
		Belanja Pegawai	1.324.265.400,00	1.323.977.569,00	287.831,00	99,98
		Jumlah	6.817.287.250,00	6.700.997.571,00	116.289.679,00	98,29
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Tak langsung	3.137.008.000,00	2.906.657.592,00	230.350.408,00	92,66
		Belanja Pegawai	3.137.008.000,00	2.906.657.592,00	230.350.408,00	92,66
		Belanja langsung	2.787.181.500,00	2.775.041.081,00	12.140.419,00	99,56
		Belanja Pegawai	418.530.000,00	415.220.000,00	3.310.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	2.314.551.500,00	2.305.721.081,00	8.830.419,00	99,62
		Belanja Modal	54.100.000,00	54.100.000,00	0,00	0,00
		Jumlah	5.924.189.500,00	5.681.698.673,00	242.490.827,00	95,91
12	Dinas Perhubungan	Belanja Tak langsung	3.131.169.334,00	2.997.561.210,00	133.608.124,00	95,73
		Belanja Pegawai	3.131.169.334,00	2.997.561.210,00	133.608.124,00	95,73
		Belanja langsung	3.788.936.000,00	3.453.099.584,00	335.836.416,00	91,14
		Belanja Pegawai	1.879.940.000,00	1.799.340.000,00	80.600.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.121.034.350,00	1.004.839.984,00	116.194.366,00	89,64
		Belanja Modal	787.961.650,00	648.919.600,00	139.042.050,00	82,35
		Jumlah	6.920.105.334,00	6.450.660.794,00	469.444.540,00	93,22
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belanja Tak langsung	2.214.435.000,00	2.148.359.131,00	66.075.869,00	97,02
		Belanja Pegawai	2.214.435.000,00	2.148.359.131,00	66.075.869,00	97,02
		Belanja langsung	3.152.806.350,00	3.083.772.051,00	69.034.299,00	97,81
		Belanja Pegawai	297.835.000,00	281.695.000,00	16.140.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	2.311.781.350,00	2.261.567.051,00	50.214.299,00	97,83
		Belanja Modal	543.190.000,00	540.510.000,00	2.680.000,00	99,51
		Jumlah	5.367.241.350,00	5.232.131.182,00	135.110.168,00	97,48
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Belanja Tak langsung	2.683.614.000,00	2.578.905.438,00	104.708.562,00	96,10
		Belanja Pegawai	2.683.614.000,00	2.578.905.438,00	104.708.562,00	96,10
		Belanja langsung	36.024.435.250,00	31.562.162.755,56	4.462.272.494,44	87,61
		Belanja Pegawai	453.440.000,00	450.530.000,00	2.910.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	2.691.416.250,00	2.665.848.605,00	25.567.645,00	99,05

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Modal	32.879.579.000,00	28.445.784.150,56	4.433.794.849,44	86,52
		Jumlah	38.708.049.250,00	34.141.068.193,56	4.566.981.056,44	88,20
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	Belanja Tak langsung	2.219.131.000,00	2.150.258.007,00	68.872.993,00	96,90
		Belanja Pegawai	2.219.131.000,00	2.150.258.007,00	68.872.993,00	96,90
		Belanja langsung	1.647.342.100,00	1.610.463.452,00	36.878.648,00	97,76
		Belanja Pegawai	445.160.000,00	441.730.000,00	3.430.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.100.182.100,00	1.068.243.453,00	31.938.647,00	97,10
		Belanja Modal	102.000.000,00	100.489.999,00	1.510.001,00	98,52
		Jumlah	3.866.473.100,00	3.760.721.459,00	105.751.641,00	97,26
16	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Belanja Tak langsung	2.538.648.000,00	2.470.001.475,00	68.646.525,00	97,30
		Belanja Pegawai	2.538.648.000,00	2.470.001.475,00	68.646.525,00	97,30
		Belanja langsung	11.520.114.125,00	11.174.368.059,85	345.746.065,15	97,00
		Belanja Pegawai	1.137.485.000,00	1.112.797.000,00	24.688.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	8.280.245.125,00	8.150.956.889,00	129.288.236,00	98,44
		Belanja Modal	2.102.384.000,00	1.910.614.170,85	191.769.829,15	90,88
		Jumlah	14.058.762.125,00	13.644.369.534,85	414.392.590,15	97,05
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belanja Tak langsung	2.529.217.000,00	2.448.212.282,00	81.004.718,00	96,80
		Belanja Pegawai	2.529.217.000,00	2.448.212.282,00	81.004.718,00	96,80
		Belanja langsung	1.535.932.950,00	1.497.612.537,00	38.320.413,00	97,51
		Belanja Pegawai	322.280.000,00	314.335.000,00	7.945.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	961.669.950,00	938.366.537,00	23.303.413,00	97,58
		Belanja Modal	251.983.000,00	244.911.000,00	7.072.000,00	0,00
		Jumlah	4.065.149.950,00	3.945.824.819,00	119.325.131,00	97,06
18	Dinas Pertanian	Belanja Tak langsung	11.967.876.000,00	11.417.181.350,00	550.694.650,00	95,40
		Belanja Pegawai	11.967.876.000,00	11.417.181.350,00	550.694.650,00	95,40
		Belanja langsung	14.613.719.750,00	14.135.416.797,30	478.302.952,70	96,73
		Belanja Pegawai	1.743.210.000,00	1.702.635.000,00	40.575.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	10.908.164.950,00	10.625.981.115,00	282.183.835,00	97,41
		Belanja Modal	1.962.344.800,00	1.806.800.682,30	155.544.117,70	92,07
		Jumlah	26.581.595.750,00	25.552.598.147,30	1.028.997.602,70	96,13
19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Belanja Tak langsung	2.645.545.000,00	2.471.445.374,00	174.099.626,00	93,42
		Belanja Pegawai	2.645.545.000,00	2.471.445.374,00	174.099.626,00	93,42
		Belanja langsung	2.000.840.700,00	1.758.738.962,00	242.101.738,00	87,90
		Belanja Pegawai	409.120.000,00	404.040.000,00	5.080.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.568.170.700,00	1.331.148.962,00	237.021.738,00	84,89
		Belanja Modal	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00
		Jumlah	4.646.385.700,00	4.230.184.336,00	416.201.364,00	91,04
20	Inspektorat Kabupaten	Belanja Tak langsung	2.850.802.000,00	2.778.090.667,00	72.711.333,00	97,45
		Belanja Pegawai	2.850.802.000,00	2.778.090.667,00	72.711.333,00	97,45
		Belanja langsung	2.117.202.000,00	2.081.784.159,00	35.417.841,00	98,33
		Belanja Pegawai	850.580.000,00	833.288.000,00	17.292.000,00	97,97
		Belanja Barang dan Jasa	1.266.622.000,00	1.248.496.159,00	18.125.841,00	98,57
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	4.968.004.000,00	4.859.874.826,00	108.129.174,00	97,82

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	7	8
21	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Belanja Tak langsung	3.001.134.000,00	2.918.129.589,00	83.004.411,00	97,23
		Belanja Pegawai	3.001.134.000,00	2.918.129.589,00	83.004.411,00	97,23
		Belanja langsung	5.067.092.300,00	4.950.123.112,00	116.969.188,00	97,69
		Belanja Pegawai	1.238.790.000,00	1.231.788.000,00	7.002.000,00	99,43
		Belanja Barang dan Jasa	3.620.162.300,00	3.512.155.384,00	108.006.916,00	97,02
		Belanja Modal	208.140.000,00	206.179.728,00	1.960.272,00	99,06
		Jumlah	8.068.226.300,00	7.868.252.701,00	199.973.599,00	97,52
22	PPKD	Belanja Tak langsung	136.992.631.590,00	135.420.352.406,00	1.572.279.184,00	98,85
		Belanja Hibah	12.809.900.000,00	12.357.501.489,00	452.398.511,00	96,47
		Belanja Bantuan Sosial	3.200.000.000,00	3.132.000.000,00	68.000.000,00	97,88
		Belanja Tansfer	120.182.731.590,00	119.906.673.992,00	276.057.598,00	99,77
		Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	24.176.925,00	775.823.075,00	3,02
		Belanja langsung	0,00	0,00		0,00
		Jumlah	136.992.631.590,00	135.420.352.406,00	1.572.279.184,00	98,85
23	Badan Keuangan Daerah	Belanja Tak langsung	12.690.453.897,00	11.762.916.066,00	927.537.831,00	92,69
		Belanja Pegawai	12.690.453.897,00	11.762.916.066,00	927.537.831,00	92,69
		Belanja langsung	6.778.973.250,00	6.488.749.922,00	290.223.328,00	95,72
		Belanja Pegawai	1.983.297.000,00	1.859.932.000,00	123.365.000,00	
		Belanja Barang dan Jasa	4.180.176.250,00	4.025.992.922,00	154.183.328,00	96,31
		Belanja Modal	615.500.000,00	602.825.000,00	12.675.000,00	97,94
		Jumlah	19.469.427.147,00	18.251.665.988,00	1.217.761.159,00	93,75
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belanja Tak langsung	4.293.514.000,00	4.015.373.731,00	278.140.269,00	93,52
		Belanja Pegawai	4.293.514.000,00	4.015.373.731,00	278.140.269,00	93,52
		Belanja langsung	3.230.462.850,00	2.998.208.324,00	232.254.526,00	92,81
		Belanja Pegawai	464.921.000,00	437.401.000,00	27.520.000,00	
		Belanja Barang dan Jasa	2.719.091.850,00	2.514.357.324,00	204.734.526,00	92,47
		Belanja Modal	46.450.000,00	46.450.000,00	0,00	0,00
		Jumlah	7.523.976.850,00	7.013.582.055,00	510.394.795,00	93,22
25	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Belanja Tak langsung	579.365.900,00	567.690.766,00	11.675.134,00	97,98
		Belanja Pegawai	579.365.900,00	567.690.766,00	11.675.134,00	97,98
		Belanja langsung	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	579.365.900,00	567.690.766,00	11.675.134,00	97,98
26	Sekretariat Daerah	Belanja Tak langsung	8.522.684.000,00	8.064.644.520,00	458.039.480,00	94,63
		Belanja Pegawai	8.522.684.000,00	8.064.644.520,00	458.039.480,00	94,63
		Belanja langsung	37.156.610.542,00	37.076.611.392,00	79.999.150,00	99,78
		Belanja Pegawai	4.265.065.000,00	4.239.545.000,00	25.520.000,00	99,40
		Belanja Barang dan Jasa	28.460.009.542,00	28.413.140.492,00	46.869.050,00	99,84
		Belanja Modal	4.431.536.000,00	4.423.925.900,00	7.610.100,00	99,83
		Jumlah	45.679.294.542,00	45.141.255.912,00	538.038.630,00	98,82
27	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Belanja Tak langsung	12.307.643.950,00	10.811.606.532,00	1.496.037.418,00	87,84
		Belanja Pegawai	12.307.643.950,00	10.811.606.532,00	1.496.037.418,00	87,84

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja langsung	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	12.307.643.950,00	10.811.606.532,00	1.496.037.418,00	87,84
28	Sekretariat DPRD	Belanja Tak langsung	2.315.473.000,00	2.121.485.680,00	193.987.320,00	91,62
		Belanja Pegawai	2.315.473.000,00	2.121.485.680,00	193.987.320,00	91,62
		Belanja langsung	22.621.977.500,00	20.335.863.044,00	2.286.114.456,00	89,89
		Belanja Pegawai	1.629.440.000,00	1.382.428.000,00	247.012.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	19.906.537.500,00	17.935.139.244,00	1.971.398.256,00	90,10
		Belanja Modal	1.086.000.000,00	1.018.295.800,00	67.704.200,00	93,77
		Jumlah	24.937.450.500,00	22.457.348.724,00	2.480.101.776,00	90,05
29	Kecamatan Pulau Punjung	Belanja Tak langsung	1.418.627.000,00	1.376.132.730,00	42.494.270,00	97,00
		Belanja Pegawai	1.418.627.000,00	1.376.132.730,00	42.494.270,00	97,00
		Belanja langsung	551.106.250,00	550.748.042,00	358.208,00	99,94
		Belanja Pegawai	176.410.000,00	176.230.000,00	180.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	374.696.250,00	374.518.042,00	178.208,00	99,95
		Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.969.733.250,00	1.926.880.772,00	42.852.478,00	97,82
30	Kecamatan Sitiung	Belanja Tak langsung	2.054.900.000,00	1.984.868.125,00	70.031.875,00	96,59
		Belanja Pegawai	2.054.900.000,00	1.984.868.125,00	70.031.875,00	96,59
		Belanja langsung	464.100.000,00	463.793.300,00	306.700,00	99,93
		Belanja Pegawai	143.910.000,00	143.910.000,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	295.190.000,00	294.883.300,00	306.700,00	99,90
		Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.519.000.000,00	2.448.661.425,00	70.338.575,00	97,21
31	Kecamatan Koto Baru	Belanja Tak langsung	1.723.394.000,00	1.678.175.313,00	45.218.687,00	97,38
		Belanja Pegawai	1.723.394.000,00	1.678.175.313,00	45.218.687,00	97,38
		Belanja langsung	595.962.589,00	592.273.625,00	3.688.964,00	99,38
		Belanja Pegawai	248.640.000,00	245.860.000,00	2.780.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	282.602.800,00	281.693.837,00	908.963,00	99,68
		Belanja Modal	64.719.789,00	64.719.788,00	1,00	100
		Jumlah	2.319.356.589,00	2.270.448.938,00	48.907.651,00	97,89
32	Kecamatan Sungai Rumbai	Belanja Tak langsung	1.653.280.000,00	1.588.629.315,00	64.650.685,00	96,09
		Belanja Pegawai	1.653.280.000,00	1.588.629.315,00	64.650.685,00	96,09
		Belanja langsung	474.716.400,00	471.813.013,00	2.903.387,00	99,39
		Belanja Pegawai	152.750.000,00	152.750.000,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	293.351.400,00	290.448.013,00	2.903.387,00	99,01
		Belanja Modal	28.615.000,00	28.615.000,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.127.996.400,00	2.060.442.328,00	67.554.072,00	96,83
33	Kecamatan IX Koto	Belanja Tak langsung	1.447.934.000,00	1.408.234.582,00	39.699.418,00	97,26
		Belanja Pegawai	1.447.934.000,00	1.408.234.582,00	39.699.418,00	97,26
		Belanja langsung	467.982.400,00	465.440.816,00	2.541.584,00	99,46
		Belanja Pegawai	151.230.000,00	151.230.000,00	0,00	0,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Barang dan Jasa	286.252.400,00	283.861.191,00	2.391.209,00	99,16
		Belanja Modal	30.500.000,00	30.349.625,00	150.375,00	99,51
		Jumlah	1.915.916.400,00	1.873.675.398,00	42.241.002,00	97,80
34	Kecamatan Timpeh	Belanja Tak langsung	1.238.947.000,00	1.218.762.145,00	20.184.855,00	98,37
		Belanja Pegawai	1.238.947.000,00	1.218.762.145,00	20.184.855,00	98,37
		Belanja langsung	479.517.950,00	478.713.100,00	804.850,00	99,83
		Belanja Pegawai	150.220.000,00	150.220.000,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	318.297.950,00	317.563.600,00	734.350,00	99,77
		Belanja Modal	11.000.000,00	10.929.500,00	70.500,00	0,00
		Jumlah	1.718.464.950,00	1.697.475.245,00	20.989.705,00	98,78
35	Kecamatan Koto Salak	Belanja Tak langsung	1.277.125.000,00	1.226.406.652,00	50.718.348,00	96,03
		Belanja Pegawai	1.277.125.000,00	1.226.406.652,00	50.718.348,00	96,03
		Belanja langsung	549.204.100,00	549.116.007,00	88.093,00	99,98
		Belanja Pegawai	170.010.000,00	169.960.000,00	50.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	320.726.900,00	320.688.807,00	38.093,00	99,99
		Belanja Modal	58.467.200,00	58.467.200,00	0,00	100
		Jumlah	1.826.329.100,00	1.775.522.659,00	50.806.441,00	97,22
36	Kecamatan Asam Jujuhan	Belanja Tak langsung	1.110.129.000,00	1.074.436.020,00	35.692.980,00	96,78
		Belanja Pegawai	1.110.129.000,00	1.074.436.020,00	35.692.980,00	96,78
		Belanja langsung	520.200.500,00	517.815.579,00	2.384.921,00	99,54
		Belanja Pegawai	153.190.000,00	152.050.000,00	1.140.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	354.060.500,00	352.815.579,00	1.244.921,00	99,65
		Belanja Modal	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.630.329.500,00	1.592.251.599,00	38.077.901,00	97,66
37	Kecamatan Koto Besar	Belanja Tak langsung	1.469.260.000,00	1.376.314.038,00	92.945.962,00	93,67
		Belanja Pegawai	1.469.260.000,00	1.376.314.038,00	92.945.962,00	93,67
		Belanja langsung	564.225.644,00	563.187.344,00	1.038.300,00	99,82
		Belanja Pegawai	156.250.000,00	156.250.000,00	0,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	393.075.644,00	392.037.344,00	1.038.300,00	99,74
		Belanja Modal	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100
		Jumlah	2.033.485.644,00	1.939.501.382,00	93.984.262,00	95,38
38	Kecamatan Padang Laweh	Belanja Tak langsung	1.090.163.000,00	1.065.602.531,00	24.560.469,00	97,75
		Belanja Pegawai	1.090.163.000,00	1.065.602.531,00	24.560.469,00	97,75
		Belanja langsung	453.808.871,00	452.085.265,00	1.723.606,00	99,62
		Belanja Pegawai	138.940.000,00	137.720.000,00	1.220.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	279.901.671,00	279.398.065,00	503.606,00	99,82
		Belanja Modal	34.967.200,00	34.967.200,00	0,00	0,00
		JUMLAH	1.543.971.871,00	1.517.687.796,00	26.284.075,00	98,30
39	Kecamatan Tiumang	Belanja Tak langsung	1.332.772.000,00	1.261.157.475,00	71.614.525,00	94,63
		Belanja Pegawai	1.332.772.000,00	1.261.157.475,00	71.614.525,00	94,63
		Belanja langsung	562.787.250,00	561.206.212,00	1.581.038,00	99,72
		Belanja Pegawai	206.050.000,00	205.550.000,00	500.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	326.737.250,00	325.656.212,00	1.081.038,00	99,67

NO	NAMA SKPD	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	7	8
		Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100
		JUMLAH	1.895.559.250,00	1.822.363.687,00	73.195.563,00	96,14
40	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja Tak langsung	769.333.000,00	707.493.394,00	61.839.606,00	91,96
		Belanja Pegawai	769.333.000,00	707.493.394,00	61.839.606,00	91,96
		Belanja langsung	904.670.800,00	863.793.511,00	40.877.289,00	95,48
		Belanja Pegawai	198.980.000,00	186.340.000,00	12.640.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	689.690.800,00	661.953.511,00	27.737.289,00	95,98
		Belanja Modal	16.000.000,00	15.500.000,00	500.000,00	0,00
		JUMLAH	1.674.003.800,00	1.571.286.905,00	102.716.895,00	93,86
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja Tak langsung	832.413.000,00	776.825.499,00	55.587.501,00	93,32
		Belanja Pegawai	832.413.000,00	776.825.499,00	55.587.501,00	93,32
		Belanja langsung	1.275.526.100,00	1.241.718.820,00	33.807.280,00	
		Belanja Pegawai	589.900.000,00	586.700.000,00	3.200.000,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	639.226.100,00	609.040.820,00	30.185.280,00	0,00
		Belanja Modal	46.400.000,00	45.978.000,00	422.000,00	0,00
		JUMLAH	2.107.939.100,00	2.018.544.319,00	89.394.781,00	95,76
REKAPITULASI		Belanja Tak langsung	536.092.919.025,75	519.184.535.120,00	16.908.383.905,75	96,85
		Belanja Pegawai	399.100.287.435,75	383.764.182.714,00	15.336.104.721,75	96,16
		Belanja Hibah	12.809.900.000,00	12.357.501.489,00	452.398.511,00	96,47
		Belanja Bantuan Sosial	3.200.000.000,00	3.132.000.000,00	68.000.000,00	97,88
		Belanja Transfer	120.182.731.590,00	119.906.673.992,00	276.057.598,00	99,77
		Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	24.176.925,00	775.823.075,00	3,02
		Belanja langsung	549.896.858.833,25	517.368.875.591,15	32.527.983.242,10	94,08
		Belanja Pegawai	48.750.243.200	46.376.909.869	2.373.333.331,00	95,13
		Belanja Barang dan Jasa	252.125.381.245,00	242.274.872.344,23	9.850.508.900,77	96,09
		Belanja Modal	249.021.234.388,25	228.717.093.377,92	20.304.141.010,33	91,85
		JUMLAH	1.085.989.777.859,00	1.036.553.410.711,15	49.436.367.147,85	95,45

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan

Secara umum, pelaksanaan masing masing program dan kegiatan berjalan lancar, ini dapat terlihat dalam target pencapaian kinerja APBD Tahun 2019, untuk belanja langsung capaian kinerjanya sebesar 94,92 %, akan tetapi masih ada beberapa kegiatan yang capaian kinerja keuangannya masih rendah, dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.
Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan Tahun 2019

No	Kode Rekening	OPD	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan / Kendala
1	1.01.01	Dinas Pendidikan				
	1.01 . 1.01.01.01 . 20 . 28	Pelatihan Operator sekolah	30.010.000,00	15.929.000,00	53,08	- Honor narasumber pusat tidak di cairkan, karena sosialisasi hanya dilakukan oleh narasumber kabupaten dan sewa gedung juga tidak di cairkan karena kegiatan dilaksanakan di aula dinas pendidikan saja sehingga efisiensi anggaran.
	1.01 . 1.01.01.01 . 20 . 30	Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan dan PGRI	155.040.000,00	50.297.875	32,44	- di dalam uraian kegiatan Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan dan PGRI terdapat kegiatan pelatihan siswa/i bahasa inggris untuk ke luar negeri, dinas pendidikan kabupaten dharmasraya tidak bisa melaksanakan karena sampai dengan tgl 20 Desember 2019 pihak ketiga tidak sanggup/bisa menyiapkan kelengkapan administrasi keuangan untuk pencairan LS dana tersebut
2	1.02.01	Dinas Kesehatan				
	1.02.1.02.01.42.01.	Rumah tunggu Bumil, Bulin dan Bufas (DAK non Fisik 2018)	1.916.000.000,00	1.075.663.981,00	56,14	- Masih rendahnya pemanfaatan RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) terutama yang berada di wilayah kerja puskesmas. Hal ini disebabkan perilaku masyarakat yang enggan untuk memanfaatkan RTK tapi lebih memilih untuk langsung ke Puskesmas.
						- Sosialisasi dan himbauan untuk memanfaatkan RTK yang dilaksanakan oleh Puskesmas belum maksimal sehingga informasi tentang keberadaan RTK juga belum maksimal diterima oleh masyarakat.
						- Capaian UHC JKN sebanyak 158.693 jiwa dari jumlah penduduk 212.652 jiwa (74,63%) juga mempengaruhi rendahnya pemanfaatan dana Jampersal (Jaminan Persalinan) oleh Bumil (Ibu Hamil). Artinya Bumil yang ada pada umumnya sudah terjamin oleh JKN baik PBI maupun Mandiri.
						- Jumlah Bumil yang bersalin dengan memanfaatkan dana Jampersal lebih sedikit dibandingkan jumlah sasaran Bulin (315 persalinan Jampersal dari 5.762 sasaran Bulin)..
3	1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)				

No	Kode Rekening	OPD	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan / Kendala
	1.02 . 1.02.02.01 . 02 . 66	Pengadaan Instalasi Air Bersih	288.800.000,00	10.580.000,00	3,66	ini disebabkan karena SPM yang tertunda sedangkan secara fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100%. Sehingga menimbulkan hutang belanja pada kegiatan tersebut antara lain adalah : 1. Belanja Modal Pengadaan Sumur Bor Nilai Kontrak Rp85.118.000,00 Fisik 100%. Nomor Kontrak 020/50/PL-Kontrak/APBD/RSUD-2019 tanggal 11 November 2019 an. CV. Yudit Construksi. 2. Belanja Modal Pengadaan Sistem Instalasi Air Dalam Gedung Nilai Kontrak Rp174.729.000,00 Fisik 100% Nomor Kontrak 020/49/PL-Kontrak/APBD/RSUD-2019 tanggal 11 November 2019 an. CV. Lian. 3. Pengawasan Nilai Kontrak 020/55/PL-Kontrak/PWS/APBD/RSUD-2019 tanggal 11 November 2019 an. CV. Dwi Consultant
4	1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang				
	1.03 . 1.03.01.01 . 27 . 08	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	157.319.000,00	87.125.350,00	55,38	Ini disebabkan karena perencanaannya masuk perubahan dan terbatasnya waktu dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
	1.03 . 1.03.01.01 . 35 . 01	Penataan RTH	840.350.000,00	297.549.129,00	35,41	ini disebabkan karena spmnya tertunda sebanyak 2 pkt fisik dan 2 pkt sedangkan fisik nya tercapai 100 % dan dibayarkan tahun 2020
	1.03 . 1.03.01.01 . 38 . 01	Perencanaan dan Pembinaan Teknis ke PU an	44.713.650,00	18.564.000,00	41,52	ini disebabkan karena spmnya tertundat sedangkan fisik nya terpai 100 % dan dibayarkan tahun 2020
	1.03 . 1.03.01.01 . 38 . 02	Pembinaan Jasa Konstruksi	73.650.000,00	32.922.464,00	44,70	Ini disebabkan karena kuranga perencanaan dan konsultan tidak sanggup untuk melaksanakannya dengan anggaran Rp. 50.000.000,-
5	1.04.01	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan				
	1.04 . 1.04.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.050.000,00	3.387.600,00	42,08	- ini disebabkan karena dalam perencanaan awal pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 (dua) adalah 5 (lima) unit, namun dalam pembayaran pajak hanya 3 (tiga) unit dikarenakan 2 (dua) unit lagi pembayarannya ditahun berikutnya.
	1.04.1.04.01.01.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	15.000.000,00	7.675.000,00	51,17	- Karena terbatasnya spesifikasi diklat yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai Dinas Perkintan. Ada pun Bimtek yang sesuai lokasi kegiatannya relatif jauh.

No	Kode Rekening	OPD	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan / Kendala
6	2 . 09 . 01	Dinas Perhubungan				
	2.09 . 2.09.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	94.800.000,00	50.091.757,00	52,84	- Adanya item pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan pada kegiatan ini yaitu pembayaran rekening listrik traffic light dan warning light karena terjadi pelebaran jalan yang menyebabkan pembongkaran hingga akhir tahun belum terselesaikan.
	2.09 . 2.09.01.01 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	169.373.850,00	32.146.000,00	8,98	- Karena gangguan jaringan internet pada server kominfo mengakibatkan gangguan jaringan internet di Dinas Perhubungan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan belum terkoneksi dengan SIM PKB Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta. Akibat hal tersebut maka belum bisa mengajukan SPP dan SPM pencairan.
	2.09 . 2.09.01.01 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	10.900.000,00	2.287.000,00	20,98	- Banyaknya kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh PPTK yang memegang kegiatan tersebut.
7	2 . 10 . 01	Dinas Komunikasi dan Informatika				
	2.10 . 2.10.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	220.000,00	-	-	- Hal ini disebabkan kerana pengiriman data atau surat dilakukan melalui via email dan WA, sehingga terjadi efisiensi anggaran.
8	2 . 12 . 01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	2.12 . 2.12.01.01 . 19 . 01	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	14.099.500,00	2.683.500,00	19,03	- Masih belum terkoordinirnya pengaduan masyarakat sehingga tupoksi TPP belum Maksimal - Pengaduan secara lisan masih belum bisa ditindaklanjuti melalui prosedur pengaduan karena masih dalam bentuk isu - Pengaduan Masyarakat terhadap Pelaku usaha yang belum mempunyai izin tidak bisa dilakukan.
9	2 . 16 . 01	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga				
	2.16 . 2.16.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00	2.638.950,00	52,78	Hal ini disebabkan kurang tepatnya dalam perencanaan anggaran dan penurunan nilai pajak kendaraan sehingga terjadi efisiensi anggaran
10	3 . 03 . 01	Dinas Pertanian				

No	Kode Rekening	OPD	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan / Kendala
	3.03 . 3.03.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	61.650.000,00	19.241.350,00	31,21	- Ada beberapa kendaraan yang kelengkapan suratnya tidak ada, sehingga tidak dapat dibayarkan pajak kendaraannya
						- Terlalu besar jumlah anggaran yang ditetapkan (kurang cermat dalam menetapkan target anggaran)
11	3 . 08 . 01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja				
	2.01 . 3.08.01.01 . 17 . 26	Pendataan Perusahaan dan Penyerapan Tenaga Kerja	17.128.750,00	9.569.150,00	55,87	- Hal ini disebabkan karena sosialisasi dan Pendataan perusahaan serta perusahaan yang melaksanakan pelaporan bisa dilaksanakan melalui online sehingga dapat menghemat anggaran.
	2.01 . 3.08.01.01 . 17 . 33	Pembinaan P2K3 dan LKS Bipartit	30.795.000,00	10.971.000,00	35,63	- Pembinaan P2K3 merupakan rumpun tugas pengawasan tenaga kerja, sedangkan LKS Bipartit merupakan rumpun tugas organisasi/kelembagaan hubungan industrial. sehingga sulit melaksanakan dua hal yang berbeda dalam satu kegiatan
	3.08 . 3.08.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.500.000,00	2.419.750,00	53,77	- Pada Kegiatan ini terkendala karena ada beberapa kendaraan dinas roda 2 yang STNKnya tidak ditemukan, maka terkendala untuk pembayaran pajaknya
	3.08 . 3.08.01.01 . 20 . 06	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Transmigrasi	15.864.000,00	5.509.200,00	4,73	- Perjalanan Dinas tidak terpakai/terlaksana karena efisiensi
12	4.03.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
	4.03 . 4.03.01.01 . 31 . 01	Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, RTBL	110.449.800,00	56.685.530,00	51,32	Hal ini disebabkan karena Asistensi dan supervisi peta dapat dilakukan via e_mail karena keterbatasan anggaran untuk melakukan asistensi dan supervisi langsung dengan Tim BIG. Sedangkan fisik kegiatan terlaksana dengan baik.
13	4 . 04 . 01	Badan Keuangan Daerah				
	4.04 . 4.04.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.800.000,00	4.734.150,00	36,99	Karena pada perencanaan awal membayar pajak dan mengganti Plat nomor kendaraan dinas , tapi yang terlaksana hanya pembayaran pajak kendaraan dinas saja sedangkan penggantian Plat belum bisa dilaksanakan karena menunggu regulasi pusat

No	Kode Rekening	OPD	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan / Kendala
14	4 . 01 . 04	Sekretariat DPRD				
	4.01 . 4.01.04.01 . 01 . 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	103.486.500,00	13.548.750,00	13,09	- Anggaran ini disediakan untuk medical chek up Pimpinan dan Anggota DPRD, sedangkan anggota DPRD hanya sebagian melakukan Medical Chek up.
	4.01 . 4.01.04.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	105.950.000,00	58.325.000,00	55,05	- Tidak terjadinya kesepakatan Harga dengan pihak Rekanan sehingga Realisasi kegiatan ini cukup rendah.
	4.07.4.07.04.01. 05.01.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	381.488.500,00	186.772.100,00	48,96	- Hal ini disebabkan karena tenaga PNS Sekretariat DPRD terfokus dalam rangka mendampingi dan memfasilitasi DPRD dalam rangka Pembuatan RANPERDA yang intensitasnya sangat tinggi.
	4.01 . 4.01.04.01 . 15 . 05	Kegiatan Reses	419.627.500,00	245.226.900,00	58,44	- Periode Reses pada Akhir Masa Kerja Anggota DPRD ditiadakan sehingga anggaran 3 kali melaksanakan reses hanya terealisasi sebanyak 2 kali.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur akuntansi pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Organisasi pemerintah daerah yang bertindak sebagai kantor pusat adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan yang bertindak sebagai kantor cabang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemilihan struktur ini disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 10 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189 ayat (1) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang Undang tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya telah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Susunan Perangkat Daerah yang berjumlah 35 Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, 3 Badan dan 11 Kecamatan. Selain 35 Perangkat Daerah tersebut, ada 3 SKPD yang masih tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Tahun 2010 yakni RSUD Sungai Dareh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kantor Kesbangpol. Ketiga SKPD tersebut tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukannya ditetapkan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 maka entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 41 entitas, yaitu.

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) RSUD Sungai Dareh
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
- 7) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
- 8) Dinas Pangan dan Perikanan
- 9) Dinas Lingkungan Hidup
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 12) Dinas Perhubungan
- 13) Dinas Komunikasi Dan Informatika
- 14) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 16) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
- 17) Dinas Perpustakaan Kearsipan
- 18) Dinas Pertanian
- 19) Dinas Transmisgrasi dan Tenaga Kerja
- 20) Inspektorat Kabupaten
- 21) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 22) Badan Keuangan Daerah
- 23) Kecamatan Pulau Punjung
- 24) Kecamatan Sitiung
- 25) Kecamatan Koto Baru
- 26) Kecamatan Sungai Rumbai
- 27) Kecamatan IX Koto
- 28) Kecamatan Timpeh
- 29) Kecamatan Koto Salak
- 30) Kecamatan Asam Jujuhan
- 31) Kecamatan Koto Besar
- 32) Kecamatan Padang Laweh
- 33) Kecamatan Tiumbang
- 34) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 35) Sekretariat Daerah
- 36) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- 37) Sekretariat DPRD
- 38) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 39) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 40) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 41) Pejabat Pengelola keuangan Daerah (PPKD)

Sebagai entitas pelaporan, maka Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPKD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah disusun merupakan gabungan dari seluruh Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPKD sebagai PPKD/Bendahara Umum Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda.

- *Angka Realisasi Pendapatan* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA. 2019 adalah menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah atas seluruh penerimaan uang yang masuk pada Rekening Kas Daerah dan ditambah

dengan realisasi pendapatan BLUD dan Dana BOS yang terdiri dari 144 SD Negeri dan 33 SMP Negeri yang tidak melalui Rekening Kas Daerah. Adapun BLUD yang dikelola sebanyak 14 BLUD yaitu.

1. BLUD RSUD Sungai Dareh.
 2. BLUD Puskesmas Sungai Rumbai.
 3. BLUD Puskesmas Sungai Limau.
 4. BLUD Puskesmas Sitiung II.
 5. BLUD Puskesmas Padang Laweh.
 6. BLUD Puskesmas Sungai Dareh.
 7. BLUD Puskesmas Silago.
 8. BLUD Puskesmas Gunung Medan.
 9. BLUD Puskesmas Sitiung I.
 10. BLUD Puskesmas Koto Baru.
 11. BLUD Puskesmas Timpeh.
 12. BLUD Puskesmas Sialang.
 13. BLUD Puskesmas Tiumbang.
 14. BLUD Puskesmas Koto Besar
- *Angka Realisasi Belanja* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 berdasarkan kompilasi realisasi belanja seluruh entitas (SKPD), dimana pengguna anggaran bertanggungjawab atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakan. Sedangkan data realisasi pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah berfungsi sebagai kontrol melalui rekonsiliasi dengan SKPKD, ditambah dengan realisasi belanja BLUD sebanyak 14 BLUD dan Dana BOS yang terdiri dari 144 SD Negeri dan 33 SMP Negeri yang tidak melalui rekening Kas Daerah
 - *Angka Realisasi Pembiayaan* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah

Dalam Laporan Realisasi Anggaran perlu dilakukan konversi agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran II) tentang SAP, Pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung APBD. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, kemudian konversinya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

b. Laporan Operasional

Laporan Finansial menyangkut laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut.

- a. Pendapatan- LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional;
- c. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- d. Pos luar biasa, bila ada;
- e. Surplus/defisit-LO.

Laporan Operasional disusun berdasarkan konsolidasi dari seluruh Laporan Operasional SKPD dan PPKD.

c. Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya disusun berdasarkan konsolidasi Neraca SKPD dan SKPKD/PPKD. Dalam Penyusunan Neraca, rekening-rekening yang sifatnya *reciprocal* (timbang balik antar unit dalam satu Pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun *reciprocal* tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun *reciprocal*. Akun-akun *reciprocal* yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK-SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap Neraca kedua unit tersebut yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansiserta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran untuk menilai pengaruh dari aktifitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Daerah.

e. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut.

- a) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan;
- d) Koreksi kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
- e) Lain-lain;
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos.

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,
- d) Ekuitas Akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian informasi yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Selain itu juga meliputi kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam LRA dan **basis akrual** untuk pengakuan beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan dan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk LO dan Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos (akun) dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos (akun) dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah.

D. Kebijakan Akuntansi

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

1.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Umum

1. Definisi Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Defenisi *pendapatan Perpajakan-LRA* adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. Klasifikasi

Jenis Pajak Daerah terdiri atas.

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Bawah Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- j. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

3. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di RKUD yang mencakup hal-hal sebagai berikut.

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan.

4. Pengukuran

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.

Akuntansi Perpajakan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Pajak Daerah-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

5. Penyajian

Ilustrasi Penyajian Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Pendapatan Perpajakan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas per jenis pajak dalam mata uang rupiah.

Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun berkenaan serta realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun sebelumnya.

6. Pengungkapan

Pendapatan Perpajakan-LRA yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut antara lain.

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan Perpajakan-LRA.
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- c. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LRA per jenis pajak.

Klasifikasi pendapatan-LRA berdasarkan kewenangan SKPD dan PPKD adalah sebagai berikut.

Adapun klasifikasi pendapatan dapat dirinci berdasarkan objek pendapatan, yaitu.

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Pajak Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah.
- 2) Retribusi Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang retribusi daerah.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pengelolaan aset lainnya, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan dan pendapatan dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah serta pendapatan BLUD.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan rinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya menurut obyek pendapatan ditetapkan oleh pemerintah, seperti dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dana BOS, tunjangan profesi guru, dana insentif daerah dan lain sejenisnya.
 - 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya menurut obyek pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pendapatan bagi hasil lainnya dan lain sejenisnya.
 - 4) Kelompok bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi lainnya atau Pemerintah Kabupaten terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi lainnya dan bantuan keuangan dari kabupaten.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Kelompok pendapatan hibah dirinci berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
 - 2) Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
 - 3) Pendapatan lainnya berupa pendapatan sumbangan pihak ketiga dan lain sejenisnya.

2. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan di RKUD atau entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

3. Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4. Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

5. Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah.

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan Nonperpajakan

Umum

1. Definisi pendapatan nonperpajakan diartikan sebagai pendapatan negara atau daerah yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan.

2. Klasifikasi Nonperpajakan

Klasifikasi Pendapatan Nonperpajakan dapat dibagi berdasarkan proses memperoleh pendapatan tersebut yang digolongkan menjadi.

- a. Pendapatan perizinan;
- b. Pendapatan layanan;
- c. Pendapatan pemanfaatan sumber daya alam
- d. Pendapatan hasil investasi;
- e. Pendapatan hasil investasi aset non keuangan;
- f. Pendapatan nonperpajakan lainnya.

Dalam rangka penyusunan LRA, basis akuntansi yang digunakan untuk mencatat pendapatan nonperpajakan adalah basis kas.

Pendapatan nonperpajakan-LRA adalah semua penerimaan pendapatan nonperpajakan pada rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

Secara umum pendapatan LRA diakui pada saat diterima di RKUD.

Pendapatan LRA yang berasal dari pendapatan nonperpajakan diakui pada saat.

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima telah melaporkan/mengesahkan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dokumen sumber pencatatan pengakuan pendapatan nonperpajakan basis kas adalah bukti setor seperti SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) atau dokumen lainnya yang dipersamakan setelah mendapat otorisasi dari bank/pos tempat menyetor, seperti Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau sejenisnya maupun dokumen lain yang ditetapkan oleh BUD sebagai dasar pengakuan pendapatan tersebut.

1.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan -LO

a. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat.

1. Timbulnya hak atas pendapatan;
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Contohnya adalah penetapan yang dilakukan atas kekurangan pembayaran Pajak Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contohnya adalah Wajib Pajak Daerah melakukan penyetoran atas kewajiban perpajakannya tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

1. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assesment system*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assessment system* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan *self assessment system* antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment system*

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan *official assessment system* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment system* antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah. Contoh dokumen sumber *official assessment system* antara lain: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

3. Pengembalian Pajak

Wajib Pajak dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan membayar ke Daerah lebih besar dari pada kewajibannya pada suatu masa atau tahun pajak. Untuk itu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajaknya.

Dokumen sumber pencatatan pengembalian Pajak-LO antara lain surat ketetapan kelebihan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan daerah. Contoh dokumen sumber pengembalian pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

b. Pengukuran

- Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu.
1. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk *self asesment*.
 2. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk *official assessment*.

Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukuka penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Pajak Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belumselesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c. Penyajian

Pendapatan Perpajakan-LO disajikan pada Laporan Operasional per jenis pajak dalam mata uang rupiah. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan membandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun berkenaan dengan realisasi tahun sebelumnya.

d. Pengungkapan

- Hal-hal yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO antara lain adalah sebagai berikut.
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran Pendapatan Pajak Daerah-LO;
 2. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO per jenis pajak.

2. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Tujuan kebijakan akuntansi beban dan belanja ialah mengatur perlakuan akuntansi beban dan belanja. Perlakuan akuntansi beban dan belanja mencakup definisi dan klasifikasi; pengakuan dan penilaian; serta penyajian dan pengungkapan belanja.

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu.

No	Beban	Belanja
a	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a.2. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

1. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
2. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
3. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja Sekretariat DPRD, belanja Sekretariat Daerah provinsi/kota/kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi/kota/kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/kota/kabupaten.

b. Pengakuan

Menurut PSAP Nomor 12 tentang Akuntansi Beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat.

1. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.
2. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Menurut PSAP Nomor 02 tentang Akuntansi Belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat.

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode Pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2. Metode Pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga.

c. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari RKUD dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

d. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

e. Penyajian

Penyajian Beban dan Belanja disesuaikan dengan format yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

f. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah.

1. rincian beban per SKPD.
2. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. rincian belanja per SKPD.
2. penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1. Definisi

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

- 3) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

a.2. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya terjadinya dan diklasifikasikan antara lain.

1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
3. Transfer Pemerintah Provinsi.
4. Transfer/Bagi Hasil ke Desa.
5. Transfer/Bantuan Keuangan.

b. Pengakuan

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

c. Pengukuran

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di RKUD.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari RKUD.

d. Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

e. Penyajian

Transfer disajikan sebagai pengeluaran transfer.

f. Pengungkapan

1. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah.
 - 1) penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer

masuk daerah;

- 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah.
 - 1) transfer keluar harus dirinci;
 - 2) penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain.
 - 1) Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1. Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

a.2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

c. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Penyajian di Laporan Keuangan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah contoh penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut.

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau

investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

a.2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari.

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
2. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUD.

b. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

d. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

6. Kebijakan Akuntansi Piutang

a. Definisi dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Buletin Teknis SAP Nomor 02 Tahun 2010 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari

seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

a.2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas.

- 1. Pungutan
Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas.
 - 1. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
 - 2. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 3. Piutang Retribusi;
 - 4. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- 2. Perikatan
Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas.
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas.
- 3. Transfer antar Pemerintahan
Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas.
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
 - 5) Piutang Transfer Lainnya;
 - 6) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi;
 - 7) Piutang Transfer antar Daerah;
 - 8) Piutang Kelebihan Transfer.
- 4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas.
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi Daerah
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

b. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika.

- 1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- 2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- 3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- 1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- 2. Jumlah piutang dapat diukur;
- 3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- 4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila.

- 1. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai

- dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
2. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memper-hitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

c. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut.

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh

- Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.

1. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
2. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
3. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
4. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut.

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari.

1. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan.

1. Kualitas lancar, dengan kriteria.

- a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang tiga sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 4. Kualitas Macet, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang tiga sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut.

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan satu bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang satu sampai dengan tiga bulan;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang tiga sampai dengan 12 bulan;
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan.

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

- 2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut.

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar.

- 1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- 2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4. Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar.

- 1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- 2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4. Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1. 0,5 % dari Piutang dengan kualitas lancar;
- 2. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3. 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4. 100% dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar

selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

e. Penyajian

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

f. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa.

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

7. Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Persediaan merupakan aset yang berwujud.

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. Barang yang disimpan untuk atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

a.2. Klasifikasi

1. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
2. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan bakupembuatan alat-alat pertanian.

3. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
4. Persediaan dapat terdiri dari.
 - a. Barang Konsumsi;
 - b. Barang pakai habis;
 - c. Barang cetakan
 - d. Perangko dan materai
 - e. Obat-obatan dan bahan farmasi
 - f. Amunisi;
 - g. Bahan untuk pemeliharaan;
 - h. Suku cadang;
 - i. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - j. Pita cukai dan leges;
 - k. Bahan Baku;
 - l. Barang dalam proses / setengah jadi;
 - m. Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
5. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
6. Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman
7. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang dan persediaan yang tidak lagi digunakan disebabkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Pengakuan

1. Pengakuan Persediaan
Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi, dan bersifat netral). Dokumen sumber adalah faktur, kwitansi, dan kwitansi, dan berita acara serah terima (BAST).
3. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun asset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.
4. Beban Persediaan diakui dengan dua pendekatan yaitu.
 - a. Pendekatan Aset
Pengakuan Beban Persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan Aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.

Contohnya antara lain adalah persediaan obat di Rumah Sakit, persediaan di Sekretariat SKPD.

b. Pendekatan Beban

Setiap pembelian Persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

5. Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
6. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka persediaan ini diperlukan sebagai beban.
7. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlukan sebagai kerugian daerah.

c. Metode Pencatatan

1. Metode Periodik yaitu pencatatan berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*) yang digunakan untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). barang habis pakai, barang cetakan, dan sejenisnya yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD. Dengan metode ini pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.
2. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

d. Pengukuran

1. Persediaan disajikan sebesar.
 - (a) Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian.
 - (b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan.
 - (a) Metode *First In First Out* (FIFO)
 - (b) Harga pembelian terakhir
3. Persediaan yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu.
 - a. Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis
 - b. Barang Konsumsi
 - c. Barang habis pakai
 - d. Barang cetakan
 - e. Perangko dan materai
 - f. Obat-obatan dan bahan farmasi

4. Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing
5. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan baik untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dinilai dengan menggunakan nilai wajar dan indeks nilai wajar dari Persediaan hewan dan tanaman tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait.
6. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

e. Beban Persediaan

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*)
2. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional
3. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan dalam jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
4. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
5. Selisih persediaan pencatatan antara hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dengan yang dibukukan yang disebabkan karena persediaan hilang, using, kadaluarsa ataupun rusak maka selisih persediaan ini dipertimbangkan sebagai suatu kejadian yang abnormal dan diperlakukan sebagai beban.

f. Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan.

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
- (b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (c) Kondisi Persediaan.

8. Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

a.2 Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Investasi antara lain.

a) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu.

1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

b. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*)

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu,

untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

c. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek
 - a) Investasi dalam bentuk surat berharga.
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu enam bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang
 - a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b) Investasi non permanen
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

d. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu.

1. Metode biaya.

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20%, menggunakan metode biaya.
- b) Kepemilikan 20 sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain.

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

f. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;

4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

9. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

UMUM

1. Definisi

Aset *tetap* adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*material*) dan perlengkapan (*supplies*).

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas dalam rangka penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah yang berkaitan dengan penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah maka untuk Laporan Barang Milik Daerah TA 2019 telah diharuskan untuk menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menerbitkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan adanya perubahan regulasi tersebut berakibat pada perubahan klasifikasi dan penyajian data aset tetap dengan ketentuan sebagai berikut.

- Nilai Aset Tetap yang tidak berubah sebagai akibat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.
 - Aset Tetap Tanah
 - Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - Kontruksi Dalam Pengerjaan
- Nilai Aset Tetap yang berubah sebagai akibat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.
 - KIB peralatan mesin dari 9 sub KIB menjadi 19 sub KIB
 - KIB Bangunan gedung dari 2 sub KIB menjadi 4 sub KIB
 - KIB Aset Tetap Lainnya dari 4 sub KIB menjadi 6 sub KIB
 - Aset tetap rambu-rambu yang semula dicatat pada KIB Bangunan Gedung, sub KIB monumen, pindah ke KIB Peralatan Mesin, sub KIB rambu-rambu

- Aset tetap peralatan olahraga yang semula dicatat pada KIB Aset Tetap Lainnya pindah ke KIB Peralatan Mesin sub KIB peralatan olahraga
- Saldo Aset Lain-Lain berubah mengikut pada perpindahan aset rambu-rambu dan alat olahraga

Pelaksanaan peraturan Bupati di atas efektif dilaksanakan 31 Desember 2019 dan seterusnya, sehingga khusus Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya TA. 2019 berdasarkan klasifikasi aset sebagai berikut.

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat bengkel, alat kantor, alat rumah tangga, alat kedokteran, alat kounikasi, rambu-rambu, alat olahraga dan lain sebagainya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin air conditioning), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan sejenis lainnya dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi

jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon serta sejenis lainnya dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, dan biota air. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

g. Akumulasi Penyusutan

Merupakan akumulasi dari penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
Suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
Aset tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.
- Merupakan objek pemeliharaan
Aset tetap tersebut merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai barang inventaris ekstrakomtabel.

1. Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah daerah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai

dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan.
- 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah wakaf yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Peralatan dan Mesin

Barang berwujud dapat diakui sebagai Peralatan dan Mesin apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.000.000,00

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

3. Gedung dan Bangunan

Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, suatu aset harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual

dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, merupakan objek pemeliharaan dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp20.000.000,00.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan dan merupakan objek pemeliharaan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap pakai.

Terhadap hewan dan tanaman memiliki batasan kapitalisasi sebesar Rp1.000.000,00. Hewan dan tanaman yang telah dikembangkan dimaksud untuk dijual kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap tetapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

Mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, diatur sebagai berikut.

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
- b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir (a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari satu tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.
- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir (a) dan (b) di atas, maka pengeluaran tersebut

dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir (a) dan (b) di atas adalah Rp.20.000.000,00.

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika.

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Peraturan Bupati ini memberikan pedoman sebagai berikut.

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- c. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggungjawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat di hapusbukukan.
- f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

- g. Khusus untuk konstruksi Jalan, Irigasi dan Jaringan, apabila BAST sudah ada namun pekerjaan belum selesai, dan telah bisa digunakan/dimanfaatkan namun karena keterbatasan waktu dan dana, pekerjaan tidak dilanjutkan akan diakui sebagai Aset Tetap Definitif.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan keuangan.

PENGUKURAN

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi,

serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah sebesar Rp1.000.000,00. Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp1.000.000,00 maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan BMD.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak honor tim, biaya perjalanan dinas. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00. artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari Rp20.000.000,00 maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMD dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas jalan, irigasi, dan jaringan diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Aset Tetap Lainnya

Khusus hewan dan tumbuhan memiliki batasan kapitalisasi sebesar Rp1.000.000,00. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan bangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi *force majeure*, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

Penyajian

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati

Hal-Hal Khusus Tentang Aset Tetap

1. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Setelah aset diperoleh, Pemerintah daerah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) seperti belanja rehabilitasi dan lain sejenisnya. Sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) seperti belanja pemeliharaan. Perbedaan antara *capital expenditure* atau *revenue expenditure* selain dari menambah manfaat atau tidak, juga dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran yang disebut dengan *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset) yang dapat diklasifikasi sebagai aset tetap. Kriteria suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) setelah perolehan pada aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 dan untuk gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00.

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kerja. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau

yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlukan sebagai biaya (*expense*).

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan, berupa pengembangan (*peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut*) dan penggantian utama (*memperbaharui bagian aset tetap*).

Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki resiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidak pastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, seperti pembangunan tanggul lumpur, tanggul pemecah gelombang, tanggul penahan lahar dan lain sejenisnya tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expense*).

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan *renovasi* berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pertukaran Aset Tetap

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan pertukaran, yaitu.

- Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpecah;
- Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang;
- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari Neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang

ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, dimana proses berada pada Bagian Aset dan pencatatan di PPKD.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah mendapatkan persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindah tanganan, dan dilakukan dengan cara.

- a. Dijual;
- b. Dipertukarkan;
- c. Dhibahkan; atau
- d. Dijadikan penyertaan modal daerah.

Renovasi Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait.

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pengecatan gedung, suku cadang dan lain sejenisnya, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu.

- a. *Renovasi aset tetap milik sendiri*, merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi aset.
- b. *Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan*, mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu SKPD yang

memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Pada SKPD yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai penambah nilai pelaporan aset tetap terkait dan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum di serahterimakan pekerjaannya, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Apabila akan diserahkan pada SKPD pemilik sesuai dokumen penyerahan yang telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD yang melakukan renovasi dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

- c. *Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan* yang meliputi renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya dan renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Sama halnya dengan huruf b diatas dan apabila pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik sesuai Berita Acara Penyerahan/dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

- a. **Reklasifikasi Aset Tetap**

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi aset.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode palaporan.

- b. **Koreksi Aset Tetap**

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

Aset Tetap Di Luar Negeri

Kebijakan umum pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri yang merupakan salah satu komponen utama dalam

memperjuangkan NKRI. Begitu juga halnya dengan hubungan adat dan kebudayaan.

Interaksi yang diciptakan pemerintah daerah dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat harus bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap saling pengertian dan menghormati di antara masyarakat bangsa-bangsa. Untuk melaksanakan kegiatan di luar negeri tersebut tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain wisma, dan aset tetap lainnya.

Pada prinsipnya pengakuan Aset Tetap di luar negeri sama dengan pengakuan aset tetap di dalam negeri, kecuali untuk tanah diatur khusus, yaitu *“pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengidikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen”*.

Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di neraca tersebut dengan tanpa batas waktu.

Apabila pembelian aset tetap dilakukan secara angsuran, maka aset tetap diakui ketika aset tetap yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

Pengakuan Aset Tetap Luar Negeri diukur dengan nilai perolehan atau apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain itu, karena pembelian aset tetap diluar negeri umumnya menggunakan mata uang asing, maka harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan diatur dalam Peraturan Bupati.

Perolehan secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Perolehan Aset Tetap dari Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut.

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan.
 - a. Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklamasi dan lain-lain);
 - b. Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklamasi dan lain-lain);
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
4. Informasi penyusutan, meliputi.
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan.
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
6. Untuk KDP diungkapkan.
 - a. Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca.
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
 - c. Jumlah biaya yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;
 - d. Uang Muka Kerja yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;
 - e. Jumlah retensi (yaitu % dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak).
7. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

10.Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Definisi dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

a.2 Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

b. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika.

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

c. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi.

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi.

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
4. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;

5. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat distribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi.

1. Asuransi;
2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi.

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.

Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

d. Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

11. Akuntansi Dana Cadangan

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup.

- 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- 4) Sumber dana cadangan; dan
- 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

a.2 Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

b. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

c. Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau

- dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
3. Pencairan Dana Cadangan
- Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- d. **Penyajian di Laporan Keuangan**
- Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset.
- e. **Pengungkapan**
- Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut.
1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
 2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
 3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 5. Sumber dana cadangan; dan
 6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

12.Kebijakan Aset Lainnya

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

a.2 Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna

Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi.

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi.

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

b. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut.

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

 - a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
 - b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

 - a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas.

a. *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

e. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (*intangible asset-work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika.

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan

dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer*-BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate*-BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

4. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari.

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah.

1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah.

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

5. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

d. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

e. Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.

f. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT, dan BTO);
- d. informasi lainnya yang penting.

13. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Definisi Dan Klasifikasi

a.1 Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah

dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

a.2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika.

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari.

- 1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
- 2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misalnya pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

c. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contohnya biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu.

1. Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.
2. Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

d. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva.

BAB V
PENJELASAN POS-POS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

V.A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan pada Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Bahwa dengan adanya tambahan dana transfer dari pusat dan usulan pergeseran anggaran dari Perangkat Daerah, maka dilakukanlah pergeseran anggaran yang dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019.

V.A.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan yang ditargetkan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.064.900.986.783,00 dengan realisasi sebesar Rp1.019.358.071.248,49 atau sebesar 95,72%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018, maka terdapat kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp95.817.119.226,61 atau 10,37% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019		%	Tahun 2018
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli Daerah	100.170.000.000,00	78.882.919.152,49	78,75	84.116.203.861,88
Pendapatan Transfer	930.336.586.783,00	906.775.173.371,00	97,47	808.465.732.787,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	34.394.400.000,00	33.699.978.725,00	97,98	30.959.015.373,00
JUMLAH	1.064.900.986.783,00	1.019.358.071.248,49	95,72	923.540.952.021,88

Selanjutnya anggaran dan realisasi akun-akun Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

V.A.1.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD – terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah – ditargetkan sebesar Rp100.170.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp78.882.919.152,49 atau sebesar 78,75%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018, maka terdapat penurunan sebesar Rp5.233.284.709,39 atau -6,22%.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

V.A.1.a.1. Pendapatan Pajak Daerah

Berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.1.1
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Hotel	220.000.000,00	197.117.450,00	89,60%	289.606.350,00
2	Pajak Restoran	1.850.000.000,00	1.894.628.432,00	102,41%	1.706.760.985,86
3	Pajak Hiburan	50.000.000,00	7.975.000,00	15,95%	9.450.000,00
4	Pajak Reklame	250.000.000,00	166.970.339,00	66,79%	177.391.347,00
5	Pajak Penerangan Jalan PLN	14.500.000.000,00	10.808.558.843,00	74,54%	10.715.360.162,00
6	Pajak Parkir	50.000.000,00	200.000,00	0,40%	900.000,00
7	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	8.693.735,00	74,77%	0,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	2.400.000,00	4,80%	7.200.000,00
9	PBB Perdesaan dan Perkotaan	4.410.000.000,00	2.534.754.352,00	57,48%	1.885.482.357,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.055.401.048,00	3.147.399.751,00	77,61%	14.108.234.909,00
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.465.880.000,00	400.266.327,67	16,23%	330.955.728,00
JUMLAH		27.926.281.048,00	19.178.964.229,67	68,68%	29.231.341.838,86

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp27.926.281.048,00 dan terealisasi sebesar Rp19.178.964.229,67 atau sebesar 68,68%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2018 sebesar Rp29.231.341.839,36, Pajak Daerah mengalami **penurunan** sebesar Rp10.052.377.609,69 atau -34,39%.

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019 berasal dari penerimaan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya dan penerimaan pajak Tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.1.2
Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019

No	Uraian	Piutang Pajak					2019	Jumlah (Rp)
		1996 s.d 2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Pajak Hotel					1.235.000	195.882.450,00	197.117.450,00
2	Pajak Restoran					6.613.000	1.888.015.432,00	1.894.628.432,00
3	Pajak Hiburan						7.975.000,00	7.975.000,00
4	Pajak Reklame						166.970.339,00	166.970.339,00
5	Pajak Penerangan Jalan PLN					975.703.392	9.832.855.451,00	10.808.558.843,00
6	Pajak Parkir						200.000,00	200.000,00

No	Uraian	Piutang Pajak					2019	Jumlah (Rp)
		1996 s.d 2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
7	Pajak Air Tanah						18.693.735,00	18.693.735,00
8	Pajak Sarang Burung Walet						2.400.000,00	2.400.000,00
9	PBB Perdesaan dan Perkotaan	116.487	139.649	16.087.541	9.186.804	221.638.037	2.287.585.834,00	2.534.754.352,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						3.147.399.751,00	3.147.399.751,00
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						400.266.327,67	400.266.327,67
JUMLAH		116.487	139.649	16.087.541	9.186.804	1.205.189.429	17.948.244.319,67	19.178.964.229,67

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 berasal dari penerimaan Tahun 2019 sebesar **Rp17.948.244.319,67** dan piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar **Rp1.230.719.910,00**. Berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019, dari **11** obyek pajak daerah terdapat **lima** obyek pajak mengalami **kenaikan** penerimaan dan **enam** obyek pajak mengalami **penurunan** dibandingkan dengan Tahun 2018, dengan uraian sebagai berikut.

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp197.117.450,00 atau mengalami **penurunan** penerimaan dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp92.488.900,00 atau - 31,94%. Sementara itu, Piutang Pajak Hotel Tahun 2018 yang diterima Tahun 2019 sebesar Rp1.235.000,00.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1.894.628.432,00 atau mengalami **kenaikan** penerimaan dengan target capaian 102,41%. Peningkatan penerimaan Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp187.867.445,64 atau 11,01%. Pajak Restoran meningkat pada Tahun 2019 disebabkan karena telah dilakukan pendataan ulang dan pemungutan Pajak Restoran sampai objek pajak yang berada di nagari-nagari yang jauh dari perkotaan. Sementara itu, Piutang Pajak Restoran Tahun 2018 yang diterima Tahun 2019 sebesar Rp6.613.000,00.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp7.975.000,00 atau mengalami **penurunan** penerimaan dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp1.475.000,00 atau - 15,61%. Capaian target/realisasi sebesar 15,95% dari anggaran pendapatan disebabkan karena karena jarang dan minimnya acara hiburan pada Tahun 2019.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp166.970.339,00 atau mengalami **penurunan** penerimaan dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp10.421.008,00 atau sebesar -5,87% yang disebabkan karena adanya pelebaran jalan menjadi dua jalur di Jalan Lintas Sumatera yang mengakibatkan harus dibongkarnya papan-papan reklame pada Tahun 2019.

e) Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp10.808.558.843,00 atau mengalami **kenaikan** penerimaan dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp93.198.681,00 atau 0,87%. Piutang PPJ PLN Tahun 2018 yang diterima Tahun

2019 sebesar Rp975.703.392,00. Sumber penerimaan PPJ Tahun 2019 terdiri atas PPJ PLN sebesar Rp10.797.828.618,00 dan PPJ Non PLN sebesar Rp10.730.225,00. Kenaikan penerimaan PPJ disebabkan karena adanya pemasangan listrik baru/pelanggan baru.

f) Pajak Parkir

Pajak Parkir Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp200.000,00 atau mengalami **penurunan** penerimaan dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp700.000,00 atau - 77,78% Penurunan ini disebabkan karena kebijakan yang tidak memperbolehkan lagi pemungutan pajak parkir di tepi jalan umum.

g) Pajak Air Tanah

Selama Tahun 2019 telah dilakukan upaya pemungutan atas Pajak Air Tanah dan diperoleh penerimaan sebesar Rp18.693.735,00 sedangkan Tahun 2018 tidak ada penerimaan dari Pajak Air Tanah. Upaya yang telah dilakukan adalah mensosialisasikan kembali kepada wajib pajak Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sedangkan Pajak Air Permukaan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

h) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp2.400.000,00 atau mengalami **penurunan** penerimaan dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp4.800.000,00 atau -66,67%. Rendahnya capaian pajak disebabkan karena rendahnya aktifitas panen sarang burung walet pada Tahun 2019.

i) PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp2.534.754.352,00 atau mengalami **kenaikan** penerimaan dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp649.271.995,00 atau 34,44%. Penerimaan PBB-P2 Tahun 2019 sebesar Rp2.534.754.352,00 terdiri dari penerimaan **Pokok Piutang** sebesar Rp2.517.468.142,00 dan penerimaan **Denda Piutang** PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp17.286.210,00.

Rincian penerimaan PBB-P2 Tahun 2019 terdiri dari.

Tahun	PBB-P2		Penerimaan PBB-P2
	Pokok	Denda	
2019	2.287.585.834,00	-	2.287.585.834,00
2018	210.531.906,00	11.106.131,00	221.638.037,00
2017	7.375.461,00	1.811.343,00	9.186.804,00
2016	11.801.875,00	4.285.666,00	16.087.541,00
2015	94.358,00	45.291,00	139.649,00
2014	74.358,00	35.691,00	110.049,00
1996-2013	4.350,00	2.088,00	6.438,00
Jumlah	2.517.468.142,00	17.286.210,00	2.534.754.352,00

j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp3.147.399.751,00 atau mengalami **penurunan** penerimaan dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp10.960.835.158,00 atau -77,69%. Pada Tahun 2018 terdapat perusahaan perkebunan sawit yang melakukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) atas kepemilikan lahan sawit sehingga penerimaan BPHTB pada Tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kondisi ini berbeda di Tahun 2019.

k) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp400.266.327,67 atau mengalami **kenaikan** penerimaan dibanding Tahun 2018 sebesar Rp69.310.599,67 atau 20,94%. Sementara itu, masih rendahnya capaian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target yang ditetapkan karena banyaknya pelaku usaha mineral bukan logam yang tidak memiliki izin atau izinnnya tidak berlaku lagi.

V.A.1.a.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Retribusi Daerah Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp5.635.697.267,00 dengan realisasi sebesar Rp3.054.849.682,00 atau 54,21%. Retribusi Daerah Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp398.998.197,00 atau sebesar 15,02%.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah yang dipungut serta yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.3
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
A	Retribusi Jasa Umum	1.930.000.000,00	1.591.110.000,00	82,44%	1.063.589.568,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	800.000.000,00	646.306.000,00	80,79%	222.052.568,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	45.000.000,00	79.310.000,00	176,24%	47.260.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	175.000.000,00	87.889.000,00	50,22%	90.077.000,00
4	Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor	440.000.000,00	297.030.000,00	67,51%	364.425.000,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	470.000.000,00	480.575.000,00	102,25%	339.775.000,00
B	Retribusi Jasa Usaha	3.060.847.267,00	1.096.086.567,00	35,81%	1.426.003.700,00
1	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	2.515.847.267,00	922.312.267,00	36,66%	1.253.742.000,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	30.000.000,00	24.700.200,00	82,33%	9.864.100,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.000.000,00	0,00	0,00%	40.000,00
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	485.000.000,00	118.774.100,00	24,49%	137.157.600,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	25.000.000,00	30.300.000,00	121,20%	25.200.000,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	644.850.000,00	367.653.115,00	57,01%	166.258.217,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	644.850.000,00	367.653.115,00	57,01%	166.258.217,00
JUMLAH		5.635.697.267,00	3.054.849.682,00	54,21%	2.655.851.485,00

Penerimaan Retribusi Tahun 2019 sebesar Rp3.054.849.682,00 berasal dari.

1. Penerimaan Retribusi Tahun 2019 sebesar Rp2.840.666.182,00;
2. Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2018 sebesar Rp120.279.500,00;

Terdiri atas Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp84.150.000,00, dan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp36.129.500,00 dengan rincian Retribusi Rumah Dinas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp33.617.000,00, Retribusi Kendaraan Dinas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.400.000,00 dan Retribusi Rumah Dinas pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp112.500,00.

3. Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2017 sebesar Rp93.904.000,00.
Terdiri atas Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp84.150.000,00 dan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Dinas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.754.000,00.

Berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2019, dari **11** obyek retribusi daerah terdapat **enam** obyek retribusi mengalami **kenaikan** penerimaan dan **lima** obyek retribusi mengalami **penurunan** dibandingkan dengan Tahun 2018, dengan uraian sebagai berikut.

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dari target yang ditetapkan sebesar Rp800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp646.306.000,00 atau sebesar 80,79%,. Penerimaan tahun ini terdapat **kenaikan** penerimaan dibanding tahun sebelumnya sebesar 191,06%. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan Labkesda dan pelayanan kesehatan RSUD Sungai Rumbai.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Dari target yang ditetapkan sebesar Rp45.000.000,00 terealisasi sebesar Rp79.310.000,00 atau sebesar 176,24%. Terdapat **kenaikan** penerimaan dibanding tahun sebelumnya sebesar 67,82%. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya area pelayanan persampahan/kebersihan di sektor perumahan.

c) Retribusi Pelayanan Pasar

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan disebabkan karena pelaksanaan pemungutan retribusi masih belum optimal, dibanding tahun sebelumnya terjadi **penurunan** pendapatan sebesar -2,43%.

d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2019 mengalami **penurunan** dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp66.995.000,00. Penerimaan belum

sepenuhnya terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan disebabkan karena pelaksanaan pemungutan retribusi masih belum optimal.

e) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Kenaikan penerimaan retribusi dibanding tahun sebelumnya sebesar 20,24% disebabkan karena semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan kakus.

f) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2019 sebesar Rp480.575.000,00 mengalami **kenaikan** yang berasal dari penerimaan piutang Tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp168.300.000,00 dan telah dioptimalkannya pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Tahun 2019.

g) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011.

Penurunan realisasi sebesar Rp331.429.733,00 dibandingkan tahun lalu disebabkan karena.

- alat berat yang ada di UPT Peralatan dan Kelengkapan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemakaian Alat Berat pada Dinas Pangan dan Perikanan banyak dalam keadaan rusak berat sehingga tidak optimal beroperasi.
- direvisinya perda tentang pemakaian kekayaan daerah yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimana tidak ada lagi pemungutan retribusi untuk pemakaian kendaraan dinas operasional terhitung bulan Oktober 2018.

h) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Target yang berada Dinas Perhubungan dan RSUD Sungai Dareh belum terealisasi sebagaimana mestinya karena lokasi parkir dikelola oleh masyarakat setempat serta minimnya kegiatan hiburan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

i) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Target yang berada di Dinas Pertanian ini tidak terealisasi disebabkan karena kondisi RPH yang jauh dari pasar sehingga para pedagang tidak mau untuk memotong hewan di RPH dan melakukan pemotongan di tempat pemotongan sendiri, mereka mau memotong di RPH jika disediakan mobil *cooll-box* untuk lansir hasil pemotongan hewan ke pasar-pasar.

j) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 mengalami **penurunan** sebesar Rp18.383.500,00 atau -13,40%. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya adanya perbaikan kolam, kekurangan debit air kolam akibat terganggunya jaringan irigasi karena perbaikan sehingga banyak benih dan induk ikan mati.

k) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Penerimaan Retribusi IMB tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 mengalami **kenaikan** sebesar Rp201.394.898,00 atau 121,13%. Sementara itu, tidak tercapainya realisasi sesuai target yang ditetapkan karena pemungutan belum dilakukan secara optimal.

V.A.1.a.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.1.4
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.641.438.934,00	3.590.314.080,00	77,35%	3.177.292.290,00

Pada akhir Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memiliki investasi permanen penyertaan modal sebesar Rp24.952.000.000,00. Pada Tahun 2019 dilakukan penambahan penyertaan modal pada PT BPD Sumatera Barat/Bank Nagari sebesar Rp2.500.000.000,00 sehingga nilai penyertaan modal menjadi Rp27.452.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal pada PT BPD Sumatera Barat/Bank Nagari sebesar Rp25.852.000.000,00, pada PT. Balairung Citra Jaya sebesar Rp1.500.000.000,00 dan pada PT. BPR Pulau Punjung sebesar Rp100.000.000,00.

Dari penyertaan modal tersebut, penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 direncanakan Rp4.641.438.934,00 dengan realisasi sebesar Rp3.590.314.080,00 atau sebesar 77,35% yang berasal dari penerimaan deviden Bank Nagari Tahun 2018 sebesar Rp3.582.998.166,00 dan penerimaan piutang deviden

PT Balairung Citra Jaya Tahun 2016 sebesar Rp7.315.914,00. Jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2018 sebesar Rp3.177.292.290,00 penerimaan untuk Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp413.021.790,00 atau 13%.

Secara umum kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada PT BPD Sumatera Barat mengalami kenaikan dari 1,44% pada Tahun 2018 menjadi sebesar 1,53% pada Tahun 2019 disebabkan adanya penambahan penyertaan modal pada Tahun 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00.

V.A.1.a.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.1.5
Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan	530.000.000,00	209.328.000,00	39,50%	240.722.850,00
2	Penerimaan Jasa Giro	3.250.000.000,00	1.006.094.689,00	30,96%	1.414.148.820,00
3	Penerimaan Bunga Deposito	2.500.000.000,00	1.263.006.209,00	50,52%	2.238.774.868,00
4	Pendapatan BLUD	45.027.677.951,00	40.938.653.558,00	90,92%	32.833.542.699,00
5	Dana Kapitasi	7.028.904.800,00	6.964.039.776,00	99,08%	6.889.008.382,00
6	Tuntutan Ganti kerugian Daerah	1.030.000.000,00	1.882.449.742,26	182,77%	2.277.462.819,02
7	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000,00	176.613.086,56	8,83%	2.656.628.771,00
8	Hasil Pengolahan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00%	600.000,00
9	Pengelolaan Air Minum	600.000.000,00	618.556.100,00	103,09%	500.810.700,00
JUMLAH		61.966.582.751,00	53.058.791.160,82	85,62%	49.051.699.909,02

Target Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp61.966.582.751,00 dengan realisasi Rp53.058.791.160,82 atau 85,62%. Terdapat kenaikan pendapatan dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp4.007.072.912,80 atau 8,17% dari penerimaan Tahun 2018.

Berdasarkan realisasi penerimaan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2019, dari **sembilan** obyek penerimaan terdapat **tiga** obyek penerimaan mengalami **kenaikan** penerimaan dan **enam** obyek penerimaan mengalami **penurunan** dibandingkan dengan Tahun 2018, dengan uraian sebagai berikut.

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan penjualan kendaraan dinas operasional yang dilakukan dengan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanggal 19 Desember 2019 telah dilakukan pelelangan sebesar Rp188.228.000,00, penjualan atas sisa bongkaran atap pada Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah sebesar Rp10.380.000,00 dan penerimaan atas hasil pengelolaan kebun karet milik pemda sebesar Rp10.720.000,00

2. **Penerimaan Jasa Giro**

Penerimaan Jasa Giro Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1.006.094.689,00 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp408.054.131,00 atau -28,86%. Hal ini disebabkan karena perputaran uang keluar tinggi dan tidak mengendap secara lama di Kas Daerah, adanya regulasi Transaksi Non Tunai (TNT) pada saat Bendahara Pengeluaran mengajukan Ganti Uang (GU) untuk pembayaran secara non tunai.

3. **Penerimaan Bunga Deposito**

Penerimaan bunga deposito berasal dari penempatan deposito selama Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.263.006.209,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.6
Penerimaan Bunga Deposito Tahun 2019

No	Nomor Rekening	Nomor Seri Bilyet	Jumlah	Bank Penempatan	Jangka Waktu	Suku bunga	tanggal pembuatan	Tanggal Pencairan	Total Penerimaan Bunga Deposito Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1403.0301.009270	SB 110147	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	07/09/2018	29/05/2019	333.064.505,00
2	0616.01.00436-406	DC 3717083	5.000.000.000	BRI KC Dharmasraya	1 bulan	7%	30/01/2019	10/07/2019	116.986.288,00
3	2173.01.000181409	DC 3717775	5.000.000.000	BRI KCP Pulau Punjung	1 bulan	7%	30/01/2019	29/05/2019	114.041.093,00
4	1403.0301.009561	SB 126650	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	27/03/2019	27/05/2019	105.000.000,00
5	1403.0301.009594	SB 126656	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	09/04/2019	24/05/2019	68.844.092,00
6	1403.0301.009605	SB 126655	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	09/04/2019	23/05/2019	67.641.931,00
7	1403.0301.009944	SB 126705	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	09/09/2019	13/11/2019	112.777.776,00
8	1403.0301.009933	SB 126704	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	09/09/2019	18/10/2019	46.666.667,00
9	1403.0301.009966	SB 126709	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	03/10/2019	22/11/2019	83.611.103,00
10	1403.0301.010040	SB 126718	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	29/10/2019	13/12/2019	85.555.549,00
11	1403.0301.010036	SB 126720	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	07/11/2019	25/11/2019	34.999.992,00
12	1403.0301.010051	SB 126721	10.000.000.000	Bank Nagari	1 bulan	7%	07/11/2019	31/12/2019	93.817.213,00
	JUMLAH		110.000.000.000						1.263.006.209,00

Turunnya nilai penerimaan Bunga Deposito pada Tahun 2019 salah satunya disebabkan karena adanya pemotongan pajak yang diterapkan oleh pihak Bank terhadap penerimaan bunga deposito, saat laporan keuangan ini disusun, pihak pemda telah mengirimkan surat ke Bank Nagari dan BRI Nomor 900/222-223/BKD-2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Konfirmasi Piutang Bunga Deposito.

4. **Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Kapitasi Puskesmas**

Penerimaan BLUD Tahun 2019 berasal dari 14 BLUD yang terdiri dari satu BLUD RSUD Sungai Dareh dan 13 BLUD Puskesmas.

BLUD RSUD Sungai Dareh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/460/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan RSUD Sungai Dareh untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh di Kabupaten Dharmasraya

Pada Tahun 2018 Bupati Dharmasraya menetapkan 13 UPT Puskesmas menjadi unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/148-160/KPTS-BUP/2018 tentang Penerapan UPT Puskesmas Silago s.d. Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan

Kuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Bertahap dan mencabut Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang penerapan UPT Puskesmas untuk melaksanakan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD secara penuh di Kabupaten Dharmasraya.

Pendapatan Jasa Layanan BLUD selama Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp45.027.677.951,00 terealisasi sebesar Rp40.938.653.558,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp8.105.110.859,00 atau 24,69% dibandingkan Tahun 2018. Pendapatan Kapitasi Puskesmas pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp7.028.904.800,00 terealisasi sebesar Rp6.964.039.776,00 atau 99,08% mengalami kenaikan sebesar Rp75.031.394,00 atau 1,09% dibandingkan Tahun 2018. Data dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.7
Pendapatan Jasa Layanan BLUD dan Kapitasi Puskesmas Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
I	Jasa Layanan BLUD	45.027.677.951,00	40.938.653.558,00	90,92%	32.833.542.699,00
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	42.358.737.951,00	37.885.575.392,00	89,44%	30.372.522.731,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	342.335.000,00	325.903.000,00	95,20%	363.748.800,00
3	BLUD Puskesmas Sungai Limau	229.181.000,00	213.562.240,00	93,18%	102.971.480,00
4	BLUD Puskesmas Sitiung II	95.175.000,00	103.753.650,00	109,01%	77.526.700,00
5	BLUD Puskesmas Padang Laweh	210.000.000,00	237.797.000,00	113,24%	140.524.700,00
6	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	238.230.000,00	146.153.000,00	61,35%	157.492.519,00
7	BLUD Puskesmas Silago	204.642.000,00	244.407.000,00	119,43%	276.611.860,00
8	BLUD Puskesmas Gunung Medan	110.000.000,00	91.234.020,00	82,94%	80.886.200,00
9	BLUD Puskesmas Sitiung I	336.315.000,00	494.791.000,00	147,12%	405.442.000,00
10	BLUD Puskesmas Koto Baru	430.517.000,00	694.485.256,00	161,31%	490.163.700,00
11	BLUD Puskesmas Timpeh	185.165.000,00	232.276.500,00	125,44%	166.386.000,00
12	BLUD Puskesmas Sialang	75.225.000,00	44.071.000,00	58,59%	35.129.500,00
13	BLUD Puskesmas Tiumbang	77.075.000,00	106.821.000,00	138,59%	58.864.000,00
14	BLUD Puskesmas Koto Besar	135.080.000,00	117.823.500,00	87,22%	105.272.509,00
II	Kapitasi Puskesmas	7.028.904.800,00	6.964.039.776,00	99,08%	6.889.008.382,00
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	535.947.000,00	595.736.250,00	111,16%	546.666.700,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	342.000.000,00	311.240.032,00	91,01%	325.568.868,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung II	538.933.800,00	584.518.500,00	108,46%	512.271.175,00
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh	210.000.000,00	200.848.600,00	95,64%	230.611.500,00
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	1.161.502.000,00	1.113.037.650,00	95,83%	1.174.912.531,00
6	BLUD Puskesmas Silago	517.457.000,00	491.083.669,00	94,90%	502.587.992,00
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan	511.000.000,00	488.410.950,00	95,58%	485.872.450,00
8	BLUD Puskesmas Sitiung I	568.195.000,00	580.019.700,00	102,08%	549.402.500,00
9	BLUD Puskesmas Koto Baru	841.119.000,00	846.074.550,00	100,59%	819.239.750,00
10	BLUD Puskesmas Timpeh	544.089.000,00	496.634.075,00	91,28%	492.333.650,00
11	BLUD Puskesmas Sialang	346.909.000,00	348.050.450,00	100,33%	331.775.200,00
12	BLUD Puskesmas Tiumbang	238.358.000,00	251.188.850,00	105,38%	233.167.625,00
13	BLUD Puskesmas Koto Besar	673.395.000,00	657.196.500,00	97,59%	684.598.441,00
JUMLAH		52.056.582.751,00	47.902.693.334,00	92,02%	39.722.551.081,00

Uraian realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas dapat dijelaskan pada **Lampiran 1** pada Laporan Keuangan ini.

5. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berasal dari pengembalian ke Kas Daerah atas temuan pemeriksaan oleh BPK, APIP, dan pengembalian belanja tahun sebelumnya. Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2019 sebesar Rp1.887.449.742,26 atau mengalami penurunan -17,12% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp2.277.462.819,02.

6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penerimaan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan berupa penerimaan dari penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Penerimaan denda keterlambatan Tahun 2019 sebesar Rp176.613.086,56 mengalami penurunan sebesar Rp2.480.015.684,44 dibandingkan penerimaan tahun 2018 sebesar Rp2.656.628.771,00 atau -93,35%.

7. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Dana Bergulir pengelolaannya berada pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Dana bergulir tersebut berasal dari hibah Pemerintah Kabupaten Sijunjung saat pemekaran dengan Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2004. Penerimaan Dana Bergulir Tahun 2019 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi sama sekali dari nilai piutang sebesar Rp554.897.679,00. Tidak adanya angsuran piutang yang tertagih disebabkan adanya alamat nasabah yang tidak ditemukan, pindah alamat, meninggal dunia, dan tidak mampu. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan berupaya untuk melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait piutang dana bergulir yang telah dikategorikan macet.

8. Pengelolaan Air Minum

Anggaran Pengelolaan Air Minum (UPT SPAM) Tahun 2019 sebesar Rp600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp618.556.100,00 terdiri dari penerimaan Tahun 2019 sebesar Rp548.887.500,00 yang terdiri sambungan baru sebesar Rp 45.856.000 dan pelanggan lama Rp503.022.600,00. Terdapat pembayaran pembulatan setoran yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp8.900,00 atas pembayaran pelanggan lama Tahun 2019, piutang Tahun 2018 sebesar Rp66.312.200,00, piutang Tahun 2017 sebesar Rp488.700,00 dan piutang Tahun 2015 sebesar Rp2.867.700,00.

V.A.1.b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diperoleh suatu entitas pelaporan dari entitas pelaporan lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Pendapatan transfer dianggarkan Rp930.336.586.783,00 dengan realisasi Rp906.775.173.371,00 atau sebesar 97,47%. Penganggaran Pendapatan Transfer dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp808.465.732.787,00 Pendapatan Transfer Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp98.309.440.584,00 atau

12,16% disebabkan karena meningkatnya penerimaan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk DAU, DAK, dan Dana Penyesuaian.

Rincian Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 2** pada Laporan Keuangan ini.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Transfer dapat diuraikan sebagai berikut.

V.A.1.b.1. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp781.832.120.600,00 dengan realisasi sebesar Rp761.630.742.880,00 atau 97,42%.

Tabel 5.1.8
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan
Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bagi Hasil Pajak	19.305.707.000,00	13.711.561.010,00	71,02	17.647.991.094,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.072.411.000,00	2.116.617.541,00	68,89	1.729.956.123,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	524.890.763.000,00	524.888.502.000,00	100,00	501.889.284.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	234.563.239.600,00	220.914.062.329,00	94,18	187.705.190.546,00
JUMLAH		781.832.120.600,00	761.630.742.880,00	97,42	708.972.421.763,00

Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan terkait lebih salur dan kurang salur yang masuk ke Kas Daerah Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.1.b.1.a Bagi Hasil Pajak	13.711.561.010,00	17.647.991.094,00

Pada Tahun Anggaran 2019 penerimaan Bagi Hasil Pajak dianggarkan Rp19.305.707.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.711.561.010,00 atau sebesar 71,02%. Penerimaan Bagi Hasil Pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.9
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
	Bagi Hasil Pajak				
a	DBH PPh Pasal 21		2.979.605.400,00		
b	DBH PPh Pasal 25/29 OP		113.863.010,00		
c	DBH PBB untuk Prov/Kab/Kota		6.944.960.031,00		
d	DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Prov/Kab/Kota		460.389.557,00		

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
e	DBH PBB Bag Pem Pusat yg dibagi rata ke Kab/ Kota		3.002.530.400,00		
f	DBH Cukai untuk Prov/Kab/Kota		210.212.612,00		
JUMLAH		19.305.707.000,00	13.711.561.010,00	71,02	17.647.991.094,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019 untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai penerimaan Bruto sebesar Rp18.884.430.387 terdapat Pemotongan sebesar Rp5.172.869.377,00 dengan penerimaan netto sebesar Rp13.711.561.010,00. Rincian pemotongan sebesar Rp4.357.011.166,00 merupakan kurang bayar DBH PBB Perkebunan Tahap II, sebesar Rp239.459.056,00 Tahap I, dan sebesar Rp576.399.155,00 DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagi rata ke Kabupaten/Kota.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.1.b.1.b Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.116.617.541,00	1.729.956.123,00

Pada Tahun Anggaran 2019 penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp3.072.411.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.116.617.541,00 atau 68,89%. Penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp318.622.724,00 atau 15,55% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp1.729.956.123,00. Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.10
Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam				
a	DBH Pertambangan Umum Iuran Tetap		94.348.973,00		
b	DBH Pertambangan Umum Royalty		1.232.924.008,00		
c	DBH Panas Bumi Iuran Tetap		50.620.360,00		
d	DBH Kehutanan PSDH untuk Prop/Kab/Kota		148.568.400,00		
e	DBH Perikanan untuk Kab/Kota		590.155.800,00		
JUMLAH		3.072.411.000,00	2.116.617.541,00	68,89%	1.729.956.123,00

Penerimaan bruto Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada penyaluran transfer ke daerah dan dana Tahun 2019 dari Kementerian Keuangan sebesar Rp2.732.798.714,00 pemotongan sebesar Rp616.181.173,00 dengan penerimaan netto sebesar Rp2.116.617.54,00. Pemotongan terdapat pada DBH Pertambangan Umum Iuran Tetap sebesar Rp16.346.193,00, DBH Pertambangan Umum Royalty sebesar Rp456.792.72,00 DBH Kehutanan PSDH untuk Prop/Kab/Kota sebesar Rp10.067.158,00, DBH Dana Reboisasi untuk Kab/Kota sebesar Rp33.790.430,00, DBH Perikanan untuk Kab/Kota sebesar Rp99.184.671,00.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.1.b.1.c. Dana Alokasi Umum	524.888.502.000,00	501.889.284.000,00

Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp522.603.733.000,00. Terdapat penambahan alokasi DAU berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, pada Kabupaten Dharmasyara dialokasikan sebesar Rp2.287.030.000,00 sehingga anggaran DAU menjadi sebesar Rp524.890.763.000,00. Perubahan anggaran ditetapkan pada Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019. Sesuai dengan ketentuan PMK tersebut, KPA BUN Transfer Dana Perimbangan melakukan penyaluran dan pemotongan DAU Tambahan Bantuan selisih Perubahan Iuran serta melakukan penyetoran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang pemotongannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KM.7/2019 tentang Pemotongan atas Penyaluran Dana Alokasi UmumTambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran dan Penyetoran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran, pada Kabupaten Dharmasraya dialokasikan dan dilakukan pemotongan sebesar Rp2.287.030.000,00.

Terdapat selisih lebih atas penyetoran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebesar Rp2.261.000,00 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KM.7/2019 tentang Selisih Kurang dan/atau Selisih Lebih atas Penyetoran Dana Bagi Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran, untuk selanjutnya BPJS Kesehatan menyetorkan selisih lebih atas DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran ke Rekening Kas Umum Negara.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.1.b.1.d Dana Alokasi Khusus	220.914.062.329,00	187.705.190.546,00

Pada Tahun Anggaran 2019 penerimaan Dana Alokasi Khusus direncanakan Rp234.563.239.600,00 dan terealisasi Rp220.914.062.329,00 atau sebesar 94,18%. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan Rp52.658.321.117,00 atau 7,43% dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 sebesar Rp187.705.190.546,00.

Tabel 5.1.11
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	135.034.097.000,00	130.475.189.776,00	96,62%	94.735.243.045,00
2	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan	11.563.021.000,00	10.204.511.039,00	88,25%	13.478.872.100,00
3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87.966.121.600,00	80.234.361.514,00	91,21%	79.491.075.401,00
JUMLAH		234.563.239.600,00	220.914.062.329,00	94,18%	187.705.190.546,00

1) DAK Fisik Reguler

Penerimaan DAK Fisik Reguler Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.12
Realisasi DAK Fisik Reguler Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	DAK Bidang Pendidikan SD	19.167.082.000,00	19.093.494.238,00	99,62	4.836.938.850,00
2	DAK Bidang Pendidikan SMP	14.144.540.000,00	13.952.165.676,00	98,64	6.010.221.230,00
3	DAK Bidang Pendidikan SKB	2.494.812.000,00	1.970.326.143,00	78,98	870.700.100,00
4	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Dasar	3.799.999.000,00	3.151.659.235,00	82,94	7.267.423.902,00
5	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Rujukan	29.517.574.000,00	28.923.624.536,00	97,99	6.147.551.000,00
6	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	2.254.565.000,00	2.027.848.479,00	89,94	3.221.345.637,00
7	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Keluarga Berencana	1.174.000.000,00	1.000.487.000,00	85,22	867.279.550,00
8	DAK Bidang Sanitasi	1.701.132.000,00	1.701.132.000,00	100,00	2.024.647.000,00
9	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	29.294.115.000,00	27.656.459.576,00	94,41	20.593.126.276,00
10	DAK Bidang Pertanian	2.947.064.000,00	2.675.321.383,00	90,78	2.936.231.500,00
11	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.256.565.000,00	1.250.931.100,00	99,55	1.218.818.500,00
12	DAK Bidang Pariwisata	1.679.262.000,00	1.488.423.410,00	88,64	1.018.429.000,00
13	DAK Bidang Jalan	25.603.387.000,00	25.583.317.000,00	99,92	34.797.488.000,00
14	Dana Alokasi Khusus Pendukung Imunisasi	-	-	-	742.500.000,00
15	Dana Alokasi Khusus Air Minum	-	-	-	796.450.000,00
16	Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar	-	-	-	1.386.092.500,00
JUMLAH		135.034.097.000,00	130.475.189.776,00	96,62	94.735.243.045,00

Penerimaan DAK Fisik Reguler Tahun 2019 tidak terealisasi 100% disebabkan pencairan dana berdasarkan nilai kontrak kegiatan.

2) DAK Fisik Penugasan

Penerimaan DAK Fisik Penugasan Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.13
Realisasi DAK Fisik Penugasan Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bidang Kesehatan dan KB - Penurunan Stunting	343.430.000,00	312.815.753,00	91,09	0,00
2	Bidang Kesehatan dan KB - Pengendalian Penyakit	285.057.000,00	-	0,00	0,00
3	Bidang Air Minum	3.233.598.000,00	3.043.598.000,00	94,12	0,00
4	Bidang Irigasi	2.787.754.000,00	2.396.711.974,00	85,97	0,00
5	Bidang Sanitasi	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100,00	6.559.688.000,00
6	Bidang Pasar	3.113.182.000	2.651.385.312,00	85,17	2.826.320.000,00
7	Bidang Irigasi Pendukung Kedaulatan Pangan	0,00	0,00	0,00	3.076.772.900,00
8	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.016.091.200,00
JUMLAH		11.563.021.000,00	10.204.511.039,00	88,25	13.478.872.100,00

3) DAK Non Fisik

Penerimaan DAK Non Fisik Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.14
Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.553.400.000,00	4.553.400.000,00	100,00%	4.445.400.000,00
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.242.100.000,00	1.242.100.000,00	100,00%	0,00
3	Tunjangan Profesi Guru	56.915.777.000,00	53.280.551.800,00	93,61%	53.790.306.280,00
4	Tambahan Penghasilan Guru	1.074.000.000,00	508.650.000,00	47,36%	870.075.000,00
5	Tunjangan Khusus Guru	5.542.733.600,00	5.542.733.600,00	100,00%	4.092.774.000,00
6	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Bantuan Operasional Kesehatan	11.048.971.000,00	9.160.260.695,00	82,91%	12.739.329.579,00
7	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bantuan Operasional KB	2.529.320.000,00	2.148.409.993,00	84,94%	2.604.222.750,00
8	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.070.040.000,00	1.069.548.818,00	99,95%	948.967.792,00
9	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Akreditasi Puskesmas	1.315.780.000,00	957.890.000,00	72,80%	0,00
10	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - AkreditasiLABKESDA	400.000.000,00	296.816.108,00	74,20%	0,00
11	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Jaminan Persalinan	1.916.000.000,00	1.116.000.500,00	58,25%	0,00
12	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	358.000.000,00	358.000.000,00	100,00%	0,00
JUMLAH		87.966.121.600,00	80.234.361.514,00	91,21%	79.491.075.401,00

Penerimaan bruto DAK Non Fisik Tahun 2019 pada penyaluran transfer ke daerah dan dana Tahun 2019 dari Kementerian Keuangan sebesar Rp83.765.546.400,00 terdapat pemotongan sebesar Rp3.531.184.886,00 dengan realisasi netto sebesar Rp80.234.361.514,00. Pemotongan terdapat pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp3.149.783.697,00, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp380.910.007,00 dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp491.182,00. Pemotongan dilakukan berdasarkan sisa DAK yang dialokasikan Tahun 2018 tidak terealisasi dan dikompensasikan terhadap penyaluran DAK Tahun 2019.

V.A.1.b.2.Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Dana Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya pada Tahun 2019 terdiri dari.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.1.b.2.a. Dana Penyesuaian	97.546.293.000,00	60.749.031.000,00

Pada Tahun Anggaran 2019 penerimaan Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp97.546.293.000,00 dengan realisasi Rp97.546.293.000,00 atau sebesar 100%. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan Dana Penyesuaian Tahun 2018 sebesar Rp36.797.262.000,00 atau 60,57%. Penerimaan Dana Penyesuaian dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.15
Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
A.	Dana Penyesuaian				
1	Dana Desa	51.593.117.000,00	51.593.117.000,00	100%	43.249.031.000,00
2	Dana Insentif Daerah	45.953.176.000,00	45.953.176.000,00	100%	17.500.000.000,00
a	Dana Insentif Daerah-Kemandirian	12.855.836.000,00	12.855.836.000,00		
b	Dana Insentif Daerah-Kategori Kualitas Belanja Modal	12.437.096.000,00	12.437.096.000,00		
c	Dana Insentif Daerah- Mandatory Spending	10.495.261.000,00	10.495.261.000,00		
d	Dana Insentif Daerah-Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	10.164.983.000,00	10.164.983.000,00		
JUMLAH		97.546.293.000,00	97.546.293.000,00	100%	60.749.031.000,00

V.A.1.b.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2019 terdiri dari.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.1.b.3.a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.598.137.491,00	38.744.280.024,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp48.899.228.183,00 dengan realisasi sebesar Rp47.598.137.491,00 atau sebesar 97,34%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2018 Rp38.744.280.024,00 terjadi kenaikan Rp8.853.857.467,00 atau sebesar 22,85%.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2019 sebesar Rp47.598.137.491,00 berasal dari penerimaan Tahun 2019 sebesar Rp43.666.203.608,00, penerimaan piutang kurang salur Tahun 2018 atas PKB, BBNKB, PBBKB, dan PAP sebesar Rp3.004.817.881,00 dan kekurangan salur Tahun 2017 atas Pajak Rokok sebesar Rp927.116.002,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.16
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2019

No	Jenis Bagi Hasil	Penerimaan Tahun 2019			Jumlah
		2019	Piutang 2018	Piutang 2017	
1	PKB	9.338.553.595,00	834.937.927,00	-	10.173.491.522,00
2	BBNKB	5.703.444.471,00	421.148.730,00	-	6.124.593.201,00
3	PBBKB	18.288.365.537,00	1.743.065.348,00	-	20.031.430.885,00

No	Jenis Bagi Hasil	Penerimaan Tahun 2019			Jumlah
		2019	Piutang 2018	Piutang 2017	
4	PAP	96.902.738,00	5.665.876,00	-	102.568.614,00
5	Pajak Rokok	10.238.937.267,00	-	927.116.002,00	11.166.053.269,00
	Jumlah	43.666.203.608,00	3.004.817.881,00	927.116.002,00	47.598.137.491,00

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.1.b.3.c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2018 Dana Bantuan Keuangan bersifat Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi dianggarkan sebesar Rp2.150.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-321-2018. Dana BKK tersebut diperuntukan bagi 16 paket pekerjaan di Kabupaten Dharmasraya yang telah selesai kegiatannya pada Tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp2.058.945.000,00. Sampai dengan dengan akhir Tahun 2018, tidak ada penerimaan BKK dari Pemerintah Provinsi. Setelah dilakukan konfirmasi, Pihak Provinsi tidak mencairkan bantuan keuangan disebabkan adanya Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Barat TA 2018 Nomor 700/49.LHP/IJ tanggal 22 Mei 2018 yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar tidak melakukan pencairan terhadap belanja bantuan keuangan sebelum terpenuhinya ketentuan yang dipersyaratkan dan hasil evaluasi dari OPD atas kelayakan dan kebutuhan kegiatan yang diusulkan. Menyikapi hal tersebut, pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 telah diungkapkan di Neraca per 31 Desember 2018 memiliki Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Belanja sebesar Rp2.058.945.000,00 berupa pekerjaan yang dananya berasal dari BKK dan telah dicatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/885/Angg/B.Keuda-2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut BKK Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengikuti saran yang disampaikan oleh Sekda Provinsi untuk melakukan rekonsiliasi data BKK antara Badan Keuangan Daerah bersama SKPD terkait dan Inspektorat guna memastikan pelaksanaan BKK Tahun 2018 betul dilaksanakan sesuai dengan realisasi fisik maupun keuangan dari masing-masing kegiatan yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Rekonsiliasi.

Pada Juni 2019, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan Keputusan Nomor 903-458-2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya TA 2019 dengan nilai sebesar Rp2.058.945.000,00. Kabupaten Dharmasraya mencantumkan penerimaan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 sebesar Rp2.058.945.000,00. Sampai dengan TA 2019 berakhir belum ada realisasi yang diterima atas alokasi Dana BKK tersebut.

V.A.1.c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Rencana penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp34.394.400.000,00 dengan realisasi Rp33.699.978.725,00 atau 97,98%. Jika

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp 30.959.015.373,00, Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.740.963.352,00 atau 8,85%.

Penerimaan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2019 dianggarkan Rp31.894.400.000,00 dengan realisasi penerimaan hibah sebesar Rp32.146.600.000,00 termasuk didalamnya penerimaan lebih salur Tahun 2019 sebesar Rp385.760.000,00. Penerima Hibah Dana BOS yang tercatat di Laporan Keuangan Pemda adalah Sekolah Negeri – tidak termasuk sekolah swasta – yang terdiri atas 144 Sekolah Dasar Negeri dan 33 Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Pendapatan hibah dari pihak ketiga Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp647.378.725,00, mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp55.271.596,00 atau 7,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemberi hibah adalah perusahaan sektor perkebunan dan perusahaan konstruksi yang melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini disebabkan tidak adanya penekanan kewajiban mengikat terhadap pemberian hibah oleh pihak ketiga, sehingga penerimaan hibah dari pihak ketiga setiap tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Selain itu pada akhir Tahun 2019 Pemkab Dharmasraya memperoleh hibah dari Kementerian Keuangan terkait dengan Program Kementerian PUPR berupa program hibah air limbah setempat untuk pembangunan jamban dan tangki septik bagi penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Tahun 2019 sebesar Rp906.000.000,00. Dana Hibah ini merupakan insentif atas biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh Pemda untuk pembangunan tangki septik yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pengawasan sampai terbangunnya tangki septik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat. Pendapatan hibah tersebut baru diperoleh apabila Pemda telah menyelesaikan pembangunan tangki septik dimaksud. Pendapatan tersebut tidak dianggarkan dalam APBD-P Tahun 2019 karena pada saat penyusunan anggaran perubahan belum dipastikan berapa nilai pendapatan hibah ini akan diperoleh.

Penerimaan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.17
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan hibah dari Pemerintah	0,00	906.000.000,00	0,00	1.682.178.500,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	2.500.000.000,00	647.378.725,00	25,90	702.650.321,00
3	Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31.894.400.000,00	32.146.600.000,00	100,79	28.574.186.552 ,00
JUMLAH		34.394.400.000,00	33.699.978.725,00	97,98	30.959.015.373,00

V.A.2. BELANJA DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2019 anggaran belanja dan transfer direncanakan Rp1.085.989.777.859,00 dengan realisasi Rp1.036.553.410.711,15 atau sebesar 95,45%. Belanja Daerah dianggarkan Rp966.583.860.859,00 dengan realisasi sebesar Rp917.364.843.711,15 atau sebesar 94,91%. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp119.405.917.000,00 dengan realisasi sebesar Rp119.188.567.000,00 atau 99,82%.

Anggaran dan Realisasi pos-pos Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.2.a. Belanja Operasi	690.742.576.869,50	609.833.419.156,00

Belanja Operasi TA 2019 direncanakan Rp718.384.456.036,84 dengan realisasi sebesar Rp690.742.576.869,50 atau sebesar 96,08%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp609.833.419.156,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 80.909.157.713,50 atau 13,27 %.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 terdiri dari.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.2.a.1. Belanja Pegawai	430.141.092.583,00	354.371.834.765,00

Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung (BL). Pada Tahun 2019 Belanja Pegawai BTL dianggarkan sebesar Rp399.100.287.435,75 dengan realisasi sebesar Rp383.764.182.714,00 atau sebesar 96,16%. Belanja Pegawai BL dianggarkan sebesar Rp48.750.243.200,00 dengan realisasi sebesar Rp46.376.909.869,00 atau sebesar 95,13%.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp430.141.092.583,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp354.371.834.765,00 terjadi peningkatan sebesar Rp75.769.257.818,00 atau 17,61%.

Belanja Pegawai Tahun 2019 dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 5.1.18
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	240.903.048.184,00	232.687.254.234,00	96,59	217.577.533.967,00
2	Tambahan Penghasilan	82.478.952.061,75	79.767.730.771,00	96,71	70.005.280.630,000
3	Sertifikasi	57.772.223.893,00	56.319.047.580,00	97,48	51.750.889.620,000
4	Non Sertifikasi	1.451.850.000,00	496.250.000,00	34,18	699.000.000,000
5	Penghasilan Insentif Dokter Jaga	1.840.000.000,00	1.732.800.000,00	94,17	1.709.850.000,000
6	Tunjangan Khusus Guru	5.562.868.400,00	4.676.637.600,00	84,07	4.377.194.000,000
7	Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.897.600.000,00	7.266.060.000,00	92,00	6.765.560.000,00
8	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.093.219.637,00	758.209.642,00	69,36	684.310.624,00
9	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah	100.525.260,00	60.192.887,00	59,88	75.234.424,00
10	Belanja Pegawai pada Belanja Langsung	48.750.243.200,00	46.376.909.869,00	95,13	726.981.500,00
	- Belanja Uang Lembur	872.583.000,00	811.529.000,00	93,00	726.981.500,00
	- Belanja Honor PNS	10.898.675.200,00	9.845.563.319,00	90,34	0,00
	- Belanja Honorarium Non PNS	36.978.985.000,00	35.719.817.550,00	96,59	0,00
JUMLAH		447.850.530.635,75	430.141.092.583,00	96,05	354.371.834.765,00

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.2.a.2. Belanja Barang dan Jasa	207.300.127.555,20	223.663.119.886,00

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja pembelian barang maupun jasa yang digunakan untuk memperlancar operasional seluruh kegiatan yang akhirnya dapat mempelancar tugas-tugas pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 21 menyatakan bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada CaLK dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa sebelum konversi ke Belanja Hibah pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp252.142.686.140,00 terealisasi sebesar Rp242.274.872.344,23 atau 96,06%. Termasuk di dalamnya adalah realisasi belanja sebesar Rp2.284.769.000,00 atas Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan dilakukan pemotongan atas penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019. Konversi anggaran Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Hibah adalah sebesar Rp37.706.826.858,00 dengan realisasi sebesar Rp34.974.744.789,03 atau 92,75%. Setelah dilakukan konversi, anggaran Belanja Barang dan Jasa menjadi Rp214.435.859.282,00 dengan realisasi sebesar Rp 207.300.127.555,20 atau 96,67%

Tahun 2019 realisasi Belanja Barang dan Jasa setelah konversi mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp16.363.072.330,80 atau -7,32%. Menurunnya Belanja Barang disebabkan karena penyesuaian terhadap standar analisa belanja serta meningkatnya penganggaran belanja barang dan jasa untuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat serta perpindahan akun belanja terhadap pembayaran honorarium PNS dan Non PNS Tahun 2018 dikelompokkan pada akun belanja 5.2.2 (Belanja Barang dan Jasa) pada Tahun 2019 menjadi akun 5.2.1 (Belanja Pegawai).

Belanja Barang dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.19
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	12.626.335.433,00	12.248.708.921,00	97,01	10.936.760.234,00
2	Belanja Bahan/Material	6.794.040.253,00	6.405.141.609,00	94,28	7.195.707.739,00
3	Belanja Jasa Kantor	21.433.204.907,00	20.023.120.605,00	93,42	44.931.371.617,00
4	Belanja Premi Asuransi	7.885.790.000,00	7.853.935.265,00	99,60	4.652.755.827,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.257.571.775,00	6.858.635.745,00	94,50	5.863.592.727,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.219.060.530,00	5.095.762.632,00	97,64	4.770.087.235,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.628.307.000,00	1.536.831.993,00	94,38	1.369.589.997,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	483.020.000,00	467.040.000,00	96,69	435.311.358,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	53.600.000,00	46.300.000,00	86,38	52.436.000,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	2.613.455.300,00	2.593.084.000,00	99,22	2.834.628.299,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	12.661.852.260,00	11.983.211.484,00	94,64	11.654.647.217,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	921.300.000,00	901.106.000,00	97,81	989.349.849,00
13	Belanja Pakaian Kerja	405.060.000,00	393.766.575,00	97,21	477.864.500,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.052.950.700,00	1.039.971.637,00	98,77	943.928.190,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	54.434.412.554,00	52.629.019.427,00	96,68	43.436.583.124,00
16	Belanja Pemeliharaan	2.632.923.200,00	2.371.076.458,00	90,05	1.813.065.188,00
17	Belanja Jasa Konsultansi	623.620.000,00	597.416.000,00	95,80	907.265.000,00
18	Belanja Barang Dana Bos	21.949.527.073,00	21.399.909.788,00	97,50	21.357.244.359,00

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
21	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00
22	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.608.040.050,00	2.317.725.126,00	88,87	3.162.088.517,00
23	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	14.764.108.002,00
24	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	31.023.710.073,00
25	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	250.886.875,00
26	Honorarium Panitia/Pelasana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	892.910.000,00
27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	51.151.788.247,00	50.538.364.290,20	98,80	8.429.514.959,00
28	Belanja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh	0,00	0,00	0,00	494.293.000,00
Jumlah		214.435.859.282,00	207.300.127.555,20	96,67	223.663.199.886,00

a. **Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp12.248.708.921,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.20
Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja alat tulis kantor	6.473.122.840,00	6.439.373.181,00	99,48	3.253.005.058,00
2	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	4.950.000,00	1.200.000,00	24,24	0,00
3	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	584.259.400,00	579.865.950,00	99,25	481.048.250,00
4	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	275.499.000,00	274.006.996,00	99,46	255.378.000,00
5	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	536.011.500,00	526.013.030,00	98,13	428.926.539,00
6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.095.844.893,00	3.774.631.383,00	92,16	5.103.706.247,00
7	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	0,00
8	Belanja pengisian tabung gas	78.916.000,00	78.013.000,00	98,86	26.886.500,00
9	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban, dst)	61.145.000,00	61.123.672,00	99,97	24.929.700,00
10	Belanja Peralatan Persampahan	11.627.000,00	11.453.500,00	98,51	0,00
11	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	298.891.000,00
12	Belanja Pemadam Api/racun api	0,00	0,00	0,00	89.250.000,00
13	Pengisian air gallon	0,00	0,00	0,00	22.371.000,00
14	Belanja Bahan habis pakai Pretek PBM	0,00	0,00	0,00	508.250.000,00
15	Belanja perlengkapan P3K	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
16	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	388.909.800,00	387.228.209,00	99,57	166.718.740,00
17	Bahan Habis Pakai Sarana dan Prasarana Perhubungan	103.550.000,00	103.300.000,00	99,76	8.000.000,00
18	Bahan habis pakai cendra mata	0,00	0,00	0,00	264.999.200,00
JUMLAH		12.626.335.433,00	12.248.708.921,00	97,01	10.936.760.234,00

b. Belanja Bahan/Material sebesar Rp6.405.141.609,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.21
Realisasi Belanja Bahan/Material Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja bahan baku bangunan	533.257.000,00	514.112.400,00	96,41	213.364.652,00
2	Belanja bahan/bibit tanaman	696.230.800,00	678.905.800,00	97,51	691.607.600,00
3	Belanja bibit ternak	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	41.914.000,00
4	Belanja bahan obat-obatan	2.999.693.978,00	2.708.715.873,00	90,30	3.592.005.337,00
5	Belanja bahan kimia	287.550.000,00	284.354.864,00	98,89	200.785.752,00
6	belanja bahan material makanan	58.600.000,00	58.600.000,00	100,00	68.808.000,00
7	Belanja Hadiah	476.515.000,00	464.817.500,00	97,55	1.383.284.000,00
8	Belanja Bahan Praktek Lapangan	10.250.000,00	9.902.000,00	96,60	0,00
9	Belanja Bahan Peralatan Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Bahan Kebutuhan Keperluan Bencana	12.630.000,00	12.630.000,00	100,00	0,00
11	Belanja Perlengkapan Olah Raga	12.600.000,00	8.940.000,00	70,95	25.858.000,00
12	Belanja Bahan Makanan/Sembako	153.975.000,00	140.025.000,00	90,94	0,00
13	Belanja Cinder Mata	253.000.000,00	252.998.000,00	100,00	0,00
14	Belanja Bahan Material untuk penghias ruangan dan peralatan	531.715.000,00	526.717.477,00	99,06	267.499.000,00
15	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	500.014.475,00	495.493.695,00	99,10	432.289.500,00
16	Belanja perlengkapan sekolah	260.009.000,00	240.929.000,00	92,66	0,00
17	Belanja Bahan Instalasi air (pemeliharaan)	0,00	0,00	0,00	2.048.800,00
18	Belanja Bahan Elektronika/Mekanikal	0,00	0,00	0,00	10.450.000,00
19	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	0,00	0,00	0,00	200.681.600,00
21	Belanja Peralatan Perikanan	0,00	0,00	0,00	16.861.500,00
22	Belanja bahan material untuk perkemahan	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
23	Belanja bahan praktikum	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
24	Belanja bahan Linen Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja peralatan SAR	0,00	0,00	0,00	10.249.998,00
JUMLAH		6.794.040.253,00	6.405.141.609,00	94,28	7.195.707.739,00

c. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp20.023.120.605,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.22
Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja telepon	762.776.000,00	725.245.608,00	95,08	774.936.188,00
2	Belanja air	44.364.000,00	34.926.770,00	78,73	21.956.900,00
3	Belanja listrik	8.890.978.000,00	8.342.378.842,00	93,83	7.947.906.525,00
4	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	6.000.000,00	1.275.000,00	21,25	6.550.000,00
5	Belanja surat kabar/majalah	1.455.650.000,00	1.453.610.000,00	99,86	1.216.565.000,00
6	Belanja kawat/faksimili/internet	1.097.280.000,00	989.658.155,00	90,19	741.576.781,00
7	Belanja paket/pengiriman	4.070.000,00	3.661.000,00	89,95	12.417.000,00
8	Belanja Sertifikasi	8.450.000,00	7.050.000,00	83,43	23.043.818,00

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
9	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.025.827.700,00	2.853.774.261,00	94,31	217.300.000,00
10	Belanja Jasa Dekorasi	300.204.000,00	271.917.000,00	90,58	730.102.400,00
11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	3.000.000,00	20,00	0
12	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	313.669.425,00	265.065.500,00	84,50	0
13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	237.294.832,00	148.438.800,00	62,55	26.999.902,00
14	Belanja jasa penyebarluasan Informasi	170.000.000,00	150.000.000,00	88,24	0
15	Belanja Jasa Upah Kerja	340.847.950,00	326.575.000,00	95,81	0
16	Belanja jasa penyelenggaraan mayat dan orang terlantar	7.200.000,00	7.200.000,00	100	0
17	Belanja jasa informasi,teks, audio dan visual	324.980.000,00	257.265.000,00	79,16	0
18	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	2.926.184.000,00	2.716.921.639,00	92,85	0
19	Belanja Jasa Cleaning Service/tenaga kebersihan	535.980.000,00	516.600.000,00	96,38	0
20	Belanja jasa pembuatan dan pemeliharaan Website/Aplikasi atau Peta	304.250.000,00	303.976.830,00	99,91	0
21	Belanja Jasa Hiburan Kesenian	13.500.000,00	13.500.000,00	100	0
22	Belanja Kontribusi	556.960.000,00	551.298.200,00	98,98	524.485.817,00
23	Belanja Visum et repertum	2.000.000,00	0	0	1.385.000,00
24	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	89.739.000,00	79.783.000,00	88,90	0
25	Belanja Jasa Kesehatan KDH/WKDH	0	0	0	49.996.000,00
26	Belanja jasa konsultan	0	0	0	399.955.000,00
27	Belanja Dokumentasi	0	0	0	63.904.730,00
28	Belanja Jasa Uji Sampel	0	0	0	30.097.000,00
29	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	0	0	0	153.364.050,00
30	Belanja Jasa Pengganti Transportasi	0	0	0	2.762.098.563,00
31	Belanja Jasa Entry Data	0	0	0	25.000.000,00
32	Belanja Promosi	0	0	0	1.259.275.924,00
33	Belanja Jasa Analisis	0	0	0	40.439.500,00
34	Belanja Jasa Seleksi	0	0	0	3.550.000,00
35	Belanja Jasa Pelayanan BLUD	0	0	0	27.878.179.519,00
36	Belanja Pembangunan Sistem Jaringan	0	0	0	3.300.000,00
37	Jasa Rias/Salon	0	0	0	2.000.000,00
38	Belanja Jasa Loundry	0	0	0	14.986.000,00
JUMLAH		21.433.204.907,00	20.023.120.605,00	93,42	44.931.371.617,00

d. **Belanja Premi Asuransi sebesar Rp7.856.196.265,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.23
Realisasi Belanja Premi Asuransi Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat	7.602.790.000,00	7.580.232.400,00	99,70	4.322.833.902,00
2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	283.000.000,00	275.963.865,00	97,51	329.921.925,00
JUMLAH		7.885.790.000,00	7.856.196.265,00	99,62	4.652.755.827,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp7.602.790.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.580.232.400,00 termasuk di dalamnya adalah realisasi belanja sebesar Rp2.287.030.000,00 atas Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019 dan dilakukan pemotongan atas penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019.

e. **Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.858.635.745,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.24
Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Service	1.511.302.998,00	1.475.796.236,00	97,65	2.230.410.335,00
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.167.382.371,00	3.128.842.028,00	98,78	3.167.270.164,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.010.732.656,00	1.876.861.163,00	93,34	113.285.838,00
4	Belanja Jasa KIR	31.150.000,00	1.776.000,00	5,70	1.127.000,00
5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	476.353.750,00	331.696.868,00	69,63	351.499.390,00
6	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	55.500.000,00	38.558.800,00	69,48	0,00
7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.150.000,00	5.104.650,00	99,12	0,00
JUMLAH		7.257.571.775,00	6.858.635.745,00	94,50	5.863.592.727,00

f. **Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp5.095.762.632,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.25
Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja cetak	3.786.156.580,00	3.676.158.827,00	97,13	3.085.049.846,00
2	Belanja Penggandaan	1.417.755.950,00	1.404.537.305,00	92,92	1.685.037.389,00
3	Belanja Jilid	15.148.000,00	15.066.500,00	0,00	0,00
JUMLAH		5.219.060.530,00	5.095.762.632,00	95,62	4.770.087.235,00

g. **Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp1.536.831.993,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.26
Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	147.034.997,00
3	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	950.865.000,00	879.048.993,00	92,45	674.785.000,00
4	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	534.790.000,00	518.206.000,00	96,90	420.215.000,00
5	Belanja sewa penginapan	50.252.000,00	47.577.000,00	94,68	19.055.000,00
6	Belanja Sewa Tanah untuk fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
7	Belanja Sewa Stan/Tempat Pameran	0,00	0,00	0,00	103.500.000,00
8	Belanja Sewa Tempat Pembuangan Sampah	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33	0,00
JUMLAH		1.628.307.000,00	1.536.831.993,00	94,38	1.369.589.997,00

h. **Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp467.040.000,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.27
Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	423.020.000,00	419.040.000,00	93,67	435.311.358,00
2	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	60.000.000,00	48.000.000,00	80,00	0,00
JUMLAH		483.020.000,00	467.040.000,00	93,67	435.311.358,00

i. **Belanja Sewa Alat Berat sebesar Rp46.300.000,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.28
Realisasi Belanja Sewa Alat Berat Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Ssewa Eskavator	53.600.000,00	46.300.000,00	66,67	39.936.000
2	Belanja Sewa Truk	0,00	0,00	0,00	12.500.000
JUMLAH		53.600.000,00	46.300.000,00	66,67	52.436.000,00

j. **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar Rp2.593.084.000,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.29
Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja sewa meja kursi	56.000.000,00	56.000.000,00	100,00	207.709.500,00
2	Belanja Sewa Komputer dan Printer	9.100.000,00	9.100.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Sewa Proyektor	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00
4	Belanja sewa generator	3.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5	Belanja sewa tenda	2.304.400.000,00	2.293.109.000,00	99,51	2.177.736.299,00
6	Belanja Sewa Sound System	136.855.300,00	136.850.000,00	100,00	430.532.500,00
7	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	57.700.000,00	51.625.000,00	89,47	3.750.000,00

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
8	sewa alat pelaksana sidang tera	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	5.400.000,00
9	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan olah raga	16.900.000,00	16.900.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Sewa Taman	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
JUMLAH		2.613.455.300,00	2.593.084.000,00	99,22	2.834.628.299,00

k. Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp11.983.211.484,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.30
Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.085.580.000,00	1.085.572.500,00	100,00	1.049.744.500,00
2	Belanja makanan dan minuman rapat	3.950.172.120,00	3.508.744.000,00	88,83	3.978.837.917,00
3	Belanja makanan dan minuman tamu	1.591.714.840,00	1.567.734.500,00	98,49	2.521.449.400,00
4	Belanja makanan dan minuman pelatihan	37.214.500,00	33.950.500,00	91,23	118.520.000,00
5	Belanja Makan dan Minum pasien	24.100.000,00	20.892.244,00	86,69	0,00
6	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.921.820.800,00	5.720.067.740,00	96,59	3.981.778.400,00
7	Belanja Makan dan Minuman PKK	0,00	0,00	0,00	4.317.000,00
8	Belanja Makan minum tambahan anak sekolah	51.250.000,00	46.250.000,00	90,24	0,00
JUMLAH		12.661.852.260,00	11.983.211.484,00	94,64	11.654.647.217,00

l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp901.106.000,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.31
Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	449.000.000,00	449.000.000,00	100,00	385.144.758,00
2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	96.000.000,00	80.130.000,00	83,47	79.970.000,00
3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	99.550.000,00
4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	238.280.091,00
5	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	152.800.000,00	148.476.000,00	97,17	140.755.000,00
6	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	55.500.000,00	55.500.000,00	100,00	45.650.000,00
JUMLAH		921.300.000,00	901.106.000,00	97,81	989.349.849,00

m. Belanja Pakaian Kerja sebesar Rp393.766.575,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.32
Realisasi Belanja Pakaian Kerja Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja pakaian kerja lapangan	373.760.000,00	362.466.575,00	96,98	477.864.500,00
2	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Pakaian Pelatihan/Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		405.060.000,00	393.766.575,00	97,21	477.864.500,00

n. **Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu sebesar Rp1.039.971.637,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.33
Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja pakaian adat daerah	121.500.000,00	119.460.000,00	98,32	242.347.498,00
2	Belanja pakaian batik tradisional	92.400.000,00	92.311.023,00	99,90	46.937.500,00
3	Belanja pakaian olahraga	579.600.700,00	571.813.299,00	98,66	243.240.500,00
4	Belanja Pakaian MTQ	259.450.000,00	256.387.315,00	98,82	235.615.192,00
5	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	167.490.000,00
6	Pakaian Sidang TPKD	0,00	0,00	0,00	8.297.500,00
JUMLAH		1.052.950.700,00	1.039.971.637,00	98,77	943.928.190,00

o. **Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp52.629.019.427,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.34
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.036.300.000,00	11.366.026.126,00	94,43	9.295.655.124
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.398.112.554,00	41.262.993.301,00	97,32	34.140.928.000
JUMLAH		54.434.412.554,00	52.629.019.427,00	96,68	43.436.583.124,00

p. **Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.371.076.458,00** terdiri dari

Tabel 5.1.35
Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	702.006.000,00	680.501.255,00	96,94	220.127.350,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan jaringan	769.008.800,00	615.250.677,00	80,01	247.525.500,00
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.047.808.400,00	1.014.420.126,00	96,81	266.136.479,00
5	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	114.100.000,00	60.904.400,00	53,38	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	66.420.250,00
7	Belanja pemeliharaan jaringan listrik, telepon dan internet	0,00	0,00	0,00	196.322.000,00
8	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Lampu Jalan	0,00	0,00	0,00	169.262.000,00
9	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	0,00	0,00	0,00	176.289.700,00
10	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	0,00	0,00	0,00	49.590.000,00
11	Belanja pemeliharaan AC	0,00	0,00	0,00	233.711.909,00
12	Belanja pemeliharaan Kulkas	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
13	Belanja pemeliharaan mebeler	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00
14	Belanja pemeliharaan Televisi	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
15	Belanja pemeliharaan infocus	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	Belanja pemeliharaan CCTV	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
17	Belanja pemeliharaan kamera digital	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
18	Belanja pemeliharaan jaringan komputer/ server/ aplikasi	0,00	0,00	0,00	152.750.000,00
JUMLAH		2.632.923.200,00	2.371.076.458,00	90,05	1.813.065.188,00

q. **Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp532.956.000,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.36
Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	300.000.000,00	282.535.000,00	94,18	208.000.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	220.740.000,00	155.221.000,00	70,32	413.147.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	102.880.000,00	95.200.000,00	92,53	260.118.000,00
4	Jasa hiburan	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
JUMLAH		623.620.000,00	532.596.000,00	85,46	907.265.000,00

r. **Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS Rp.2.317.725.126,00** terdiri dari.

Tabel 5.1.37
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	594.420.000,00	493.239.920,00	82,98	1.714.705.212,00
2	Belanja sosialisasi	58.800.000,00	48.800.000,00	82,99	59.654.000,00
3	Belanja bimbingan teknis	1.791.820.050,00	1.612.885.206,00	90,01	1.387.729.305,00
4	Belanja Kontribusi	163.000.000,00	162.800.000,00	99,88	0,00
JUMLAH		2.608.040.050,00	2.317.725.126,00	88,87	3.162.088.517,00

s. **Belanja Barang dan Jasa Dana BOS sebesar Rp21.399.909.788,00** terdiri dari :

Tabel 5.1.38
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS pada 144 Satuan Pendidikan Negeri SDN	15.266.049.831,00	14.887.659.377,00	97,52	15.134.739.489,00
2	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS pada 33 Satuan Pendidikan Negeri SMPN	6.683.477.242,00	6.512.250.411,00	97,44	6.222.504.870,00
JUMLAH		21.949.527.073,00	21.399.909.788,00	97,50	21.357.244.359,00

Pada awalnya anggaran pendapatan dan belanja BOS dianggarkan berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur Sumatera Barat Nomor 420-184-2019 tentang Penetapan Alokasi dan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 terdapat penerimaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sesuai dengan jumlah siswa sasaran prioritas persekolah pada SDN dan SMPN di Kabupaten

Dharmasraya sebesar Rp3.728.000.000,00 yang ditampung perubahan anggarannya pada Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2019.

Realisasi Belanja BOS Tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi penerimaannya dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.39
Realisasi Pendapatan dan Belanja BOS Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Saldo Awal	483.693.923,00	483.693.923,00	100	136.918.320,00
2	Pendapatan BOS	31.894.400.000,00	32.146.600.000,00	100,79	28.568.800.000,00
	Pendapatan BOS Reguler	28.166.400.000,00	28.418.600.000,00		
	Pendapatan BOS Afirmasi	3.304.000.000,00	3.304.000.000,00		
	Pendapatan BOS Kinerja	424.000.000,00	424.000.000,00		
3	Pendapatan Jasa Giro	0	0,00		0,00
4	Total Penerimaan	32.378.093.923,00	32.630.293.923,00	100,78	28.705.718.320,00
5	Belanja				
6	Belanja Barang dan Jasa BOS Reguler	21.949.527.073,00	21.399.909.788,00	97,50	21.357.244.359,00
7	Belanja Modal Dana BOS	10.428.566.850,00	8.535.172.763,00	81,84	6.864.780.038,00
	Belanja Modal BOS Reguler	6.700.566.850,00	6.649.280.763,00		
	Belanja Modal BOS Afirmasi	3.304.000.000,00	1.727.971.000,00		
	Belanja Modal BOS Kinerja	424.000.000,00	157.921.000,00		
8	Total Belanja	32.378.093.923,00	29.935.082.551,00	92,45	28.222.024.397,00
9	Surplus / Defisit	0,00	2.695.211.372,00		483.693.923,00

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2019 realisasi pendapatan BOS sebesar Rp32.630.293.923,00 berasal dari saldo awal BOS sebesar Rp483.693.923,00, penerimaan BOS Tahun 2019 atas satuan pendidikan sebanyak 144 SD Negeri dan 33 SMP Negeri sebesar Rp32.146.600.000,00. Belanja BOS Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp29.935.082.551,00, terdapat saldo akhir dana BOS sebesar Rp2.695.211.372,00. Kurangnya realisasinya belanja BOS Afirmasi dan Kinerja disebabkan penerimaan pendapatan yang diterima sekolah pada Bulan Desember 2019 sehingga realisasi belanja tidak optimal dilaksanakan.

Realisasi Pendapatan dan Belanja BOS Tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 3** pada Laporan Keuangan ini.

t. **Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp50.538.364.290,20** terdiri dari.

Tabel 5.1.40
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
I	BLUD RSUD Sungai Dareh	41.197.249.951,00	41.019.179.916,00	99,57	-
II	BLUD Puskesmas	9.954.538.296,00	9.519.184.374,20	95,63	8.429.515.459,00
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	855.995.996,00	855.995.813	100,00	916.020.131,00

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	559.561.201,00	478.757.309	85,56	410.100.557,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung II	636.661.527,00	636.661.527	100,00	535.191.295,00
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh	447.707.059,00	443.966.859	99,16	310.508.353,00
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	1.448.244.773,00	1.288.622.823	88,98	1.084.071.496,00
6	BLUD Puskesmas Silago	702.267.098,00	675.882.995	96,24	689.632.768,00
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan	604.204.934,00	572.567.498	94,76	535.139.031,00
8	BLUD Puskesmas Sitiung I	996.103.513,00	996.053.199	99,99	874.292.267,00
9	BLUD Puskesmas Koto Baru	1.416.258.119,00	1.406.486.091	99,31	1.159.739.631,00
10	BLUD Puskesmas Timpeh	735.974.118,00	693.128.841	94,18	577.699.092,00
11	BLUD Puskesmas Sialang	432.649.647,00	376.094.982	86,93	301.892.820,00
12	BLUD Puskesmas Tiumang	300.972.487,00	294.079.049	97,71	294.692.138,00
13	BLUD Puskesmas Koto Besar	817.937.824,00	800.887.388	97,92	740.535.880,00
Jumlah		51.151.788.247,00	50.538.364.290,20	98,80	8.429.515.459,00

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp51.151.788.247,00 terealisasi sebesar Rp50.538.364.290,20 atau 98,80%.

Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2018 dianggarkan pada Belanja Jasa Pelayanan BLUD sehingga realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2018 hanya tergambar Belanja Barang dan Jasa pada BLUD Puskesmas sebesar Rp8.429.515.459,00.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.2.a.3. Hibah	49.451.249.739,30	30.837.844.430,00

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2019 sebelum konversi dianggarkan sebesar Rp12.809.900.000,00 dengan realisasi Rp12.357.501.489,00 atau 96,47%. Setelah konversi anggaran Belanja Hibah menjadi Rp52.668.321.529,00 dengan realisasi Rp49.451.249.739,30 mengalami kenaikan sebesar Rp18.613.405.309,30 atau 60,36% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp30.837.844.430,00. Realisasi Belanja Hibah mencapai 93,89% merupakan hibah kepada Pemerintah Pusat, Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi, reklasifikasi dari Belanja Barang & Jasa dan Belanja Modal ke Belanja Hibah.

Rincian Realisasi Belanja Hibah pada Tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.1.41
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hibah	12.809.900.000,00	12.357.501.489,00	96,47	10.894.200.000,00
	a. Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.445.000.000,00	1.445.000.000,00	100,00	0,00
	b. Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi	7.364.900.000,00	7.012.501.489,00	95,22	0,00
	c. Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	4.000.000.000,00	3.900.000.000,00	97,50	10.894.200.000,00
2	Konversi Belanja Barang dan Jasa menjadi Belanja Hibah	37.706.826.858,00	34.974.744.789,03	92,18	18.771.960.706,00
	a. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	28.897.935.158,00	26.906.562.050,93	93,11	13.691.171.850,00

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
	b. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.822.431.700,00	5.081.722.738,10	87,28	4.571.568.856,00
	c. Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	212.410.000,00	212.410.000,00	100,00	0,00
	d. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	424.300.000,00
	e. Uang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	2.774.050.000,00	2.774.050.000,00	100,00	84.920.000,00
3	Konversi Belanja Modal menjadi Belanja Hibah	2.151.594.671,00	2.119.003.461,27	98,49	1.171.683.724,00
JUMLAH		52.668.321.529,00	49.451.249.739,30	93,89	30.837.844.430,00

1. Belanja yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat Rp1.445.000.000,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.42
Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
	Hibah Kepada Pemerintah Pusat				
a	KPU	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	
b	BAWASLU	445.000.000,00	445.000.000,00	100,00	
JUMLAH		1.445.000.000,00	1.445.000.000,00	100,00	

2. Belanja yang diserahkan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Rp7.012.501.489,00 terdiri dari.

Tabel 5.1.43
Realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi 2019	%	
	Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi				
a.	KORPRI	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
b.	BAZNAS	400.000.000,00	399.995.800,00	100,00	350.000.000,00
c.	MUI	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
d.	KONI	750.000.000,00	736.818.189,00	98,24	5.700.000.000,00
e.	BOP PAUD	4.023.600.000,00	3.980.700.000,00	98,93	3.994.200.000,00
f.	ORARI	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
g.	Kampus Unand III	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	
h.	Pemuda Pancasila	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
i.	RAPI	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
j.	Paket A, Paket B dan Paket C	976.300.000,00	679.987.500,00	69,65	
k.	Pondok Pesantren Muhammadiyah				100.000.000,00
l.	Pondok Pesantren Darussalam				100.000.000,00
m.	Pondok Pesantren Nurul Izzah				100.000.000,00
n.	Pondok Pesantren Ulul Albab				100.000.000,00
o.	Pondok Pesantren Nida'ul Ummah				100.000.000,00
p.	Yayasan Sakinah Dharmasraya				200.000.000,00
JUMLAH		7.364.900.000,00	7.012.501.489,00	95,22	10.894.200.000,00

3. Belanja yang diserahkan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Rp3.900.000.000,00

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dan Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/387/KPTS-BUP/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/11/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan Penerima Beserta Besaran Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019.

Belanja yang diserahkan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 4** pada Laporan Keuangan ini.

4. Belanja Hibah yang dikonversi dari Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp34.974.744.789,03 terdiri dari.

Tabel 5.1.44
Realisasi Belanja Hibah yang Dikonversi dari Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	28.897.935.158,00	26.906.562.050,93	93,11	13.691.171.850,00
b.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.822.431.700,00	5.081.722.738,10	87,28	4.571.568.856,00
c.	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	212.410.000,00	212.410.000,00	100,00	0,00
d.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga			0,00	84.920.000,00
e.	Uang untuk Diberikan kepada masyarakat	2.774.050.000,00	2.774.050.000,00	100,00	424.300.000,00
JUMLAH		37.706.826.858,00	34.974.744.789,03	92,75	18.771.960.706,00

Realisasi Belanja Hibah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp26.906.562.050,93, Belanja Hibah Untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp5.081.722.738,10, Belanja Hibah untuk Dijual kepada Masyarakat sebesar Rp212.410.000,00, dan Uang untuk Diberikan kepada masyarakat sebesar Rp2.774.050.000,00

Realisasi Belanja Hibah yang dikonversi dari Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga per Satuan Kerja Perangkat Daerah selengkapnya dapat dilihat di **Lampiran 5** pada Laporan Keuangan ini.

5. Belanja Hibah berasal dari konversi Belanja Modal yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp2.119.003.461,27.

Realisasi Belanja Hibah berasal dari konversi Belanja Modal per Satuan Kerja Perangkat Daerah selengkapnya dapat dilihat di **Lampiran 6** pada Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.2.a.4. Bantuan Sosial	3.132.000.000,00	194.500.000,00

Belanja Bantuan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp3.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.132.000.000,00 atau 97,875% yang terdiri dari Bantuan Sosial yang Direncanakan – berupa Bantuan Sosial untuk Masyarakat Lanjut Usia Kurang Mampu – dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan dianggarkan Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp132.000.000,00.

Bantuan Sosial untuk Masyarakat Lanjut Usia Kurang Mampu di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 sebanyak 3.000 orang dengan nominal penerimaan sebesar Rp1.000.000,00 per orang. ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/387/KPTS-BUP/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/11/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan Penerima Beserta Besaran Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019 tanggal 25 November 2019.

Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan terealisasi sebesar Rp132.000.000,00 dapat diuraikan sebagai berikut .

Tabel 5.1.45
Realisasi Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Tahun 2019

No	URAIAN	TOTAL (Rp)
1	Pembayaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk korban Angin Puting Beliung a.n. Dedi Syaril, Cs di bayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/103/KPTS-BUP/2019 tanggal 22 Februari 2019	13.000.000,00
2	Pembayaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk korban kebakaran a.n. Aprijon ,dkk dibayarkan Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/138/KPTS-BUP/2019 tanggal 12 Maret 2019	31.000.000,00
3	Pembayaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk korban kebakaran a.n. Rio Andika dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/297/KPTS-BUP/2019 tanggal 9 September 2019.	3.000.000,00
4	Pembayaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk korban kebakaran a.n. Nuzul Kurniati dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/293/KPTS-BUP/2019 tanggal 4 September 2019.	5.000.000,00
5	Pembayaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk korban angin puting beliung a.n. Jaswan,dkk dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.145/296/KPTS-BUP/2019 tgl 9 Sept 2019	8.000.000,00
6	Pembayaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk korban kebakaran a.n. Norna dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/395/KPTS-BUP/2019 tanggal 9 Desember 2019,	20.000.000,00
7	Pembayaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk korban kebakaran a.n. Syafrizal,dkk dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/396/KPTS-BUP/2019 tanggal 9 Desember 2019	40.000.000,00
8	Pembayaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk korban kebakaran Kab.Dharmasraya a.n. Yurnalis dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/460/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019,	10.000.000,00
9	Pembayaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk korban Tanah Longsor a.n. Kafrida Rahman dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/461/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019,	2.000.000,00
JUMLAH		132.000.000,00

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.2.a.4. Bantuan Keuangan	718.106.992,00	766.040.075,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp766.040.075,00 dengan realisasi sebesar Rp718.106.992,00 atau 92,44%. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2019 diberikan kepada 10 Partai Politik, setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif tanggal 17 April 2019 dan pelantikan Anggota DPRD Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019, terdapat penambahan satu partai politik sehingga jumlah partai politik menjadi 11. Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2019 diberikan kepada 11 Partai Politik yang dipergunakan untuk Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat DPD/DPC Partai Politik dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.46
Realisasi Belanja Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
			(Rp)	(Rp)
1	Partai Golongan Karya	136.681.640,00	126.719.381,00	136.681.640,00
2	Partai PDI Perjuangan	127.665.395,00	127.384.412,00	127.665.395,00
3	Partai NasDem	81.234.800,00	63.153.604,00	81.234.800,00
4	Partai Hati Nurani Rakyat	77.466.105,00	57.463.648,00	77.466.105,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	66.241.800,00	72.226.642,00	66.241.800,00
6	Partai Demokrat	65.621.635,00	61.855.915,00	65.621.635,00
7	Partai Amanat Nasional	61.668.935,00	67.830.398,00	61.668.935,00
8	Partai Kebangkitan Bangsa	39.322.550,00	35.372.257,00	39.322.550,00
9	Partai Keadilan Sejahtera	48.577.320,00	49.255.548,00	48.577.320,00
10	Partai Persatuan Pembangunan	61.559.895,00	41.039.930,00	61.559.895,00
11	Partai Berkarya		15.805.257,00	0,00
JUMLAH		766.040.075,00	718.106.992,00	766.040.075,00

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.2.b. Belanja Modal	226.598.089.916,65	215.526.960.835,14

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Belanja Modal Tahun 2019 sebelum konversi dianggarkan sebesar Rp249.003.929.493,25, dikonversi menjadi anggaran belanja hibah yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp2.151.594.671,00 sehingga anggaran Belanja Modal setelah konversi menjadi Rp246.852.334.822,25.

Tabel 5.1.47
Anggaran Belanja Modal Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019		
		Anggaran	Konversi ke Hibah	Anggaran setelah Konversi
1	2	3	4	5=3-4
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.695.854.945,00	23.860.000,00	50.671.994.945,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	126.298.711.605,00	1.123.000.000,00	125.175.711.605,00

No	Uraian	Tahun 2019		
		Anggaran	Konversi ke Hibah	Anggaran setelah Konversi
1	2	3	4	5=3-4
4	Belanja Modal Jalan Irigasi. dan Jaringan	63.915.789.247,25	804.734.671,00	63.111.054.576,25
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.093.573.696,00	200.000.000,00	7.893.573.696,00
JUMLAH		249.003.929.493,25	2.151.594.671,00	246.852.334.822,25

Realisasi Belanja Modal sebelum konversi sebesar Rp228.717.093.377,92 dikonversikan ke Belanja Hibah sebesar Rp2.119.003.461,27 sehingga Belanja Modal setelah konversi Tahun 2019 menjadi Rp226.598.089.916,65. Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp11.071.129.081,51 atau sebesar 5,14% dari realisasi Tahun 2018 sebesar Rp215.526.960.835,14. Belanja Modal tersebut terinci pada akun-akun aset berikut ini.

Tabel 5.1.48
Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Realisasi 2019	konversi ke hibah	Realisasi setelah konversi	
1	2	3	4	=3-4	6
1	Belanja Modal Tanah	0,00		0,00	35.301.400,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.536.060.188,50	23.841.818,00	45.512.218.370,50	30.558.561.030,14
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.331.151.680,68	1.098.190.385,17	112.232.961.295,51	63.559.869.415,00
4	Belanja Modal Jalan Irigasi. dan Jaringan	62.007.456.178,34	797.192.671,00	61.210.263.507,34	112.802.709.398,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.842.425.330,40	199.778.587,10	7.642.646.743,30	8.570.519.592,00
JUMLAH		228.717.093.377,92	2.119.003.461,27	226.598.089.916,65	215.526.960.835,14

Rincian Belanja Modal masing-masing SKPD Tahun 2019 terdapat pada **Lampiran 7** pada Laporan Keuangan ini.

Dari realisasi Belanja Modal sebelum konversi sebesar Rp228.717.093.377,92 yang menjadi Aset Tetap Intrakomptabel adalah sebesar Rp218.640.798.453,40 atau 95,59 % dari total Belanja Modal, menjadi Aset Tak Berwujud Rp731.415.569,00 atau 0,32%, menjadi Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp1.766.124.852,75 atau 0,77%, menjadi Aset yang Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp566.394.190,27 atau 0,25%, menjadi Persediaan sebesar Rp1.552.609.271,00 atau 0,68%, menjadi Belanja Operasional sebesar Rp1.400.000.000,00 atau 0,61%, menjadi Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp2.747.376.391,50 atau 1,20%, dan utang Belanja Modal Dana BKK yang tidak diterima Tahun 2018 dibebankan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp1.312.374.650,00. Adapun uraian realisasi Belanja Modal Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.49
Realisasi Belanja Modal sebelum Konversi ke Hibah Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian Belanja Modal	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Aset Tetap Intrakomptabel	218.640.798.453,40	95,59	200.635.043.751,34
2	Aset Tak Berwujud	731.415.569,00	0,32	506.850.000,00
3	Aset Lainnya	0,00	0	11.600.291.122,00
4	Aset Ekstrakomptabel	1.766.124.852,75	0,77	1.750.637.395,80
5	Aset yang diserahkan ke Masyarakat	566.394.190,27	0,25	1.171.683.724,00

No	Uraian Belanja Modal	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
6	Persediaan	1.552.609.271,00	0,68	64.955.000,00
7	Belanja Operasional	1.400.000.000,00	0,61	63.593.487,00
8	Barang Pakai Habis	2.747.376.391,50	1,20	905.590.079,00
9	Utang Tahun 2018	1.312.374.650,00	0,57	
JUMLAH		228.717.093.377,92	100,00	216.698.644.559,14

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.2.c. Belanja Tak Terduga	24.176.925,00	744.340.724,00

Belanja Tak Terduga dianggarkan Rp800.000.000.00 dan direalisasikan sebesar Rp24.176.925,00 atau sebesar 3,02%. Pembayaran Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2019 terealisasi untuk pembiayaan Kejadian Luar Biasa (KLB) penanganan pasien keracunan makanan di Puskesmas Gunung Medan dan RSUD Sungai Darah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/409/KPTS-BUP/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Korban Keracunan Makanan di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.3 Transfer	119.188.567.000,00	105.494.865.100,00

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2019 berupa Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi, Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Nagari dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dianggarkan sebesar Rp119.906.673.992,00 dan terealisasi sebesar Rp119.188.567.000,00 atau 99,82% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.50
Realisasi Transfer Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019			Realiasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
I.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan				
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.188.000.000,00	3.170.650.000,00	99,46	1.366.435.100,00
II.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Kabupaten/ Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	116.017.917.000,00	116.017.917.000,00	100,00	104.028.430.000,00
JUMLAH		119.405.917.000,00	119.188.567.000,00	99,82	105.494.865.100,00

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2019 dianggarkan Rp3.188.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.170.650.000,00 atau 99,46%. Uraian selengkapnya mengenai transfer bagi hasil pajak daerah dapat dilihat pada **Lampiran 8** pada Laporan Keuangan ini.

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dianggarkan sebesar Rp116.017.917.000,00 dan terealisasi sebesar Rp116.017.917.000,00 atau 100% yang diperuntukkan untuk 52 nagari. Dana Bantuan Keuangan ke Desa bersumber dari dana transfer APBN sebesar Rp51.593.117.000,00 dan Dana Desa yang bersumber dari dana APBD atau Alokasi

Dana Desa (ADD) sebesar Rp64.424.800.000,00. Adapun rincian penerimaan masing-masing nagari dapat dilihat pada **Lampiran 9** pada Laporan Keuangan ini.

V.A.4 Surplus/(Defisit)

Jumlah Surplus/(Defisit) LRA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah defisit sebesar (Rp17.195.339.462,66) sedangkan pada Tahun 2018 defisit sebesar (Rp8.058.633.793,26).

V.A.5 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Rencana dan realisasi pembiayaan daerah Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.5.a. Penerimaan Pembiayaan	23.588.791.075,98	31.647.424.869,24
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan Rp23.588.791.076,00 terealisasi sebesar Rp23.588.791.075,98 atau 100%.		
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 ini merupakan penerimaan SiLPA Tahun 2018. Secara rinci nilai penerimaan SiLPA Tahun 2018 adalah sebagai berikut:		
a. Kas di Kas Daerah	Rp	14.539.541.847,98
b. SP2D No.6778/ SP2D/LS/2018 kurang debet oleh Bank Nagari	Rp	(10.000.000,00)
c. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sungai Dareh	Rp	7.437.104.106,00
d. Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas	Rp	1.113.253.056,00
e. Saldo Akhir Dana BOS	Rp	489.098.814,00
f. Kas Di Bendahara Penerimaan	Rp	2.826.200,00
g. SP2D No.5658/SP2D/ LS/2018 terdebit 2 kali oleh Bank	Rp	4.500.000,00
h. SP2D No.6313/SP2D/ LS/2018 kelebihan debet oleh Bank	Rp	300.000,00
i. Piutang atas Pembatalan Kontrak Kerja Tahun 2017 No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017	Rp	13.050.752,00
j. Kesalahan Debet Bank atas Pendapatan Pajak Restoran	Rp	1.371.300,00
k. Kesalahan Transfer Bank Nagari tanggal 28 Desember 2018	Rp	(3.372.000,00)
l. SP2D No.5593/ LS/2017 terdebit 2 kali oleh Bank	Rp	1.120.000,00
m. SP2D No.5711/LS/2016 kekurangan debet oleh Bank Nagari	Rp	(3.000,00)
Jumlah	Rp	23.588.791.075,98

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.A.5.b. Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	0,00

Terdapat realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00 berupa Penyertaan Modal (Investasi Jangka Panjang) Pemerintah Daerah pada Bank

Nagari berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/33/KPTS-BUP/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun 2019.

V.A.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 sebesar Rp3.893.451.613,32 sedangkan SiLPA Tahun 2018 sebesar Rp23.588.791.075,98. Bila dibandingkan SiLPA Tahun 2019 dengan Tahun 2018 terjadi penurunan SiLPA sebesar (Rp19.695.339.462,66) atau 83,49 %.

Secara rinci Nilai SiLPA Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

a. Kas di Kas Daerah	Rp	67.974.346,52
b. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sungai Dareh	Rp	263.387.688,00
c. Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas	Rp	831.002.168,80
d. Saldo Akhir Dana BOS	Rp	2.309.451.372,00
e. Saldo Akhir Dana BOS Lebih Salur	Rp	385.760.000,00
f. SP2D No.03451/SP2D-1.03.01/2019 kelebihan debet oleh Bank	Rp	24.908.068,00
g. Salah setor Bank/ Penerimaan Puskesmas Beringin Sakti	Rp	(1.543.000,00)
h. Salah setor Bank/ zakat masuk ke rekening Kas Daerah	Rp	(1.467.242,00)
i. Salah setor Bank/ zakat masuk ke rekening Kas Daerah	Rp	(1.072.603,00)
j. Piutang atas Pembatalan Kontrak Kerja Tahun 2017 No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017	Rp	13.050.752,00
k. Kas di Bendahara Penerimaan / Jasa Giro BOS 2018	Rp	2.003.063,00
l. SP2D No.5711/LS/2016 kekurangan debet oleh Bank Nagari	Rp	(3.000,00)
Jumlah		Rp 3.893.451.613,32

Uraian Perhitungan SiLPA Tahun 2019 sebagai berikut:

Surplus/Defisit LRA	Rp	(17.195.339.462,66)
Pembiayaan Netto	Rp	21.088.791.075,98
SiLPA LRA Sebelum Koreksi	Rp	3.893.451.613,32
Koreksi SiLPA	Rp	0,00
SiLPA LRA Setelah Koreksi	Rp	3.893.451.613,32

V.B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menggambarkan perubahan atas Saldo Anggaran Lebih dimana pada akhir Tahun 2018 terdapat Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp23.588.791.075,98 dan terjadi penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2019 sebesar (Rp19.695.339.462,66) sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019 menjadi Rp3.893.451.613,32.

Rincian perhitungan LPSAL sebagai berikut.

Surplus/Defisit LRA	Rp	(17.195.339.462,66)
Pembiayaan Netto	Rp	<u>21.088.791.075,98</u>
SiLPA LRA sebelum koreksi	Rp	3.893.451.613,32
Koreksi Silpa:	Rp	0,00
Jumlah Koreksi	Rp	<u>0,00</u>
SiLPA LRA setelah koreksi	Rp	<u>3.893.451.613,32</u>

V.C. NERACA

V.C.1. ASET

Neraca Kabupaten Dharmasraya merupakan Neraca yang keempat belas kali disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Neraca Kabupaten Dharmasraya menggambarkan posisi keuangan Kabupaten Dharmasraya mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2018.

Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2019 memiliki Aset sebesar Rp2.453.074.205.588,30 Kewajiban sebesar Rp28.629.183.585,27 dan Ekuitas sebesar Rp2.424.445.022.003,03

Total Aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.453.074.205.588,30 naik sebesar Rp23.620.590.065,16 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.429.453.615.523,15 atau 0,97%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut..

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.1.a. Aset Lancar	74.274.375.163,78	75.976.129.800,93

Aset Lancar adalah kas dan setara kas, serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar adalah aset dalam bentuk Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Setara Kas, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Dibayar Dimuka dan Persediaan. Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp74.274.375.163,78 mengalami penurunan sebesar Rp(1.701.754.637,16) atau -2,24% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp75.976.129.800,93. Adapun rincian Aset Lancar pada Tahun 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018

Aset Lancar		Tahun 2019	Tahun 2018
a.	Kas di Kas Daerah	88.799.569,52	14.533.461.147,98
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	2.900.300,00
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	5.395.063,00	8.231.091,00
d.	Kas di BLUD	1.094.990.941,80	8.565.179.881,00
e.	Kas di BOS	2.695.211.372,00	483.693.923,00
f.	Investasi Jangka Pendek	-	-
g.	Piutang Pajak	32.002.201.142,00	29.849.894.172,00
h.	Penyisihan Piutang Pajak	(21.818.557.651,65)	(20.772.960.296,81)
i.	Piutang Retribusi	138.133.361,00	307.156.861,00
j.	Penyisihan Piutang Retribusi	(110.949.906,00)	(211.492.741,50)
k.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.063.752.034,00	7.315.914,00
l.	Penyisihan Piutang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	(21.313.705,91)	(3.657.957,00)

Aset Lancar		Tahun 2019	Tahun 2018
m.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.310.601.828,87	10.450.525.379,00
n.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(546.175.917,57)	(533.763.430,83)
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	3.072.369.696,00	
n.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3.389.783.336,00	3.931.933.883,00
o.	Biaya Dibayar Dimuka	169.315.624,28	225.628.660,29
p.	Piutang Lainnya	13.050.752,00	13.050.752,00
q.	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.305.075,20)	(1.305.075,20)
r.	Persediaan	37.729.072.702,63	29.120.337.338,00
	Jumlah	74.274.375.163,88	75.976.129.800,94

Saldo masing-masing Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.1.a.1 Kas di Kas Daerah	88.799.569,52	14.533.461.147,98

Kas di Kas Daerah merupakan rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan dhi. Bank Nagari Cabang Pulau Punjung. Penunjukan Bank Nagari sebagai bank umum untuk menyimpan uang daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/1/KPTS-BUP/2012 tanggal 2 Januari 2012 tetang penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung sebagai Kas Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan rekening nomor 1403.0101.00075-4, serta diperkuat dengan Perjanjian Kerjasama antara Bendahara Umum Kabupaten Dharmasraya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung Nomor 900/362/DPPKD-2012 dan Nomor PKS/001/PL/DIR06-2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Pelayanan Perbankan dan Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Saldo akhir Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 berdasarkan rekening koran Bank Nagari Cabang Pulau Punjung adalah Rp67.974.346,52, sedangkan saldo akhir di BUD sebesar Rp88.799.569,52, sehingga terdapat perbedaan data kas di BUD dan saldo di Bank sebesar Rp20.825.223,00. Rekonsiliasi telah dilakukan untuk mengetahui saldo yang benar antara BUD Kabupaten Dharmasraya dan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Kasda tanggal 3 Januari 2020.

Dari hasil rekonsiliasi diketahui bahwa.

1. Kesalahan transfer tanggal 17 September 2019 atas Pendapatan Retribusi Puskesmas Timpeh (Beringin Sakti) yang seharusnya disetor ke Rekening BLUD Puskesmas, oleh pihak Bank Nagari Cabang Koto Baru ditansfer ke rekening Kas Daerah sebesar Rp1.543.000,00. Telah ditindaklanjuti dengan Surat BUD kepada Bank Nagari perihal Pemindahbukuan dengan nomor 900/99/BKD-2020 tanggal 30 Januari 2020 dan telah dpindahbukukan sebesar Rp1.543.000,00 ke rekening UPT Puskesmas Timpeh.
2. Terdapat SP2D Nomor 1885/SP2D-4.01.13/2019 tanggal 1 Juni 2019 atas pembayaran gaji dan tunjangan PNS Kecamatan Padang Laweh bulan Juni 2019 pemotongan lainnya sebesar Rp1.072.603,00 dan SP2D Nomor 1890/SP2D-4.01.14/2019 tanggal 1 Juni 2019 atas pembayaran gaji dan tunjangan PNS Kecamatan Koto Besar bulan Juni 2019 pemotongan lainnya sebesar Rp1.0467.242,00 berupa pemotongan zakat gaji Juni 2019 yang disetor oleh

- Bank Nagari ke Kas Daerah yang seharusnya pemindahbukuan ke rekening Baznas. Telah ditindaklanjuti oleh BUD dengan Surat Perintah Pemindahbukuan Nomor 900/235/BKD-2020 dan Nomor 900/236/BKD-2020 tanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp1.072.603,00 dan Rp1.0467.242,00 ke rekening Badan Amil Zakat Kabupaten Dharmasraya.
3. Terdapat SP2D Nomor 03451/SP2D-1.03.01/2019 sebesar Rp228.323.955,17 atas pembayaran termin I, II dan III (100%) pada Dinas PUPR untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh CV Bahas, dibukukan oleh Bank Nagari sebesar Rp253.232.023,17 pada tanggal 25 September 2019, sehingga terdapat kelebihan debet sebesar Rp24.908.068,00. Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah pada tanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp24.908.068,00.

Tabel 5.2.2
Perbedaan Saldo Kas di Bank dan di BUD per 31 Desember 2019

Saldo Kasda di Bank per 31 Desember 2019	67.974.346,52
Koreksi:	
Kesalahan Transfer Bank Nagari tanggal 17 September 2019	(1.543.000,00)
Pemotongan zakat SP2D No.1885/SP2D-4.01.13/2019 salah setor ke Kasda	(1.072.603,00)
Pemotongan zakat SP2D No.1890/SP2D-4.01.14/2019 salah setor ke Kasda	(1.467.242,00)
SP2D No. 03451/SP2D-1.03.01/2019 kelebihan debet	24.908.068,00
Selisih Kasda antara Bank dan BUD	20.825.223,00
Saldo Akhir Kasda per 31 Desember 2019	88.799.569,52

Perbandingan nilai Kas di Neraca dan nilai SiLPA di LRA per 31 Desember 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

Neraca	Rp	3.881.004.946,32
Piutang atas Pembatalan Kontrak Kerja Tahun 2017	Rp	13.050.752,00
No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017		
SP2D No.5711/LS/2016 kekurangan debet oleh Bank Nagari	Rp	(3.000,00)
Utang PFK pada Bendahara BLUD	Rp	(601.085,00)
LRA	Rp	3.893.451.613,32

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.1.a.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.900.300,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Saldo di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum disetor kembali ke Kas Daerah pada akhir periode pembukuan. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp2.900.300,00.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.1.a.3 Kas di Bendahara Penerimaan	5.395.063,00	8.231.091,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2019.

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2019 sebesar Rp5.395.063,00 terdiri dari.

Tabel 5.2.3
Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2019

No	OPD/Uraian	Jumlah
1.	Kas di Bendahara Penerimaan atas penerimaan jasa giro dana BOS pada Dinas Pendidikan Tahun 2018	2.003.063,00
2.	Kas di Bendahara Penerimaan atas pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan tanggal 31 Desember 2019 belum disetor ke Kas Daerah Rp282.000,00	282.000,00
3.	Kas di Bendahara Penerimaan atas pungutan retribusi pelayanan kesehatan RSUD Sungai Rumbai tanggal 31 Desember 2019 belum disetor ke Kas Daerah	3.110.000,00
	Jumlah	5.395.063,00

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, poin B Pelaksanaan dan Penatausahaan nomor 6 disebutkan bahwa dalam hal tedapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS, bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Tahun 2018 nilai jasa giro pada BOS sebesar Rp5.404.891,00. Selama Tahun 2019 telah dilakukan pemindahbukuan oleh Bank Nagari dari rekening BOS ke Kasda sebesar Rp3.401.828,00 sehingga masih terdapat nilai jasa giro yang belum dipindahbukukan sebesar Rp2.003.063,00 per tanggal 31 Desember 2019. Rincian jasa giro Dana BOS Tahun 2018 yang belum dipindahbukukan per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 10** Laporan Keuangan ini. Pihak Pemda telah menyurati Bank Nagari Cabang Pulau Punjung untuk melakukan pemindahbukuan sisa bunga tabungan Dana BOS Tahun 2018 dengan Surat Nomor 900/169/BKD-2020 tanggal 18 Februari 2020.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.1.a.4 Kas di Kas BLUD	1.094.990.941,80	8.565.179.881,00

Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2019 memiliki 14 unit Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak pada bidang kesehatan yaitu 13 unit Badan Layanan Umum UPT Puskesmas dan 1 unit Badan Layanan Umum RSUD Sungai Dareh.

Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sungai Dareh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/460/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan RSUD Sungai Dareh untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh di Kabupaten Dharmasraya.

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPT Puskesmas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya dengan uraian sebagai berikut.

1. SK Nomor 188.45/148/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago
2. SK Nomor 188.45/149/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru.
3. SK Nomor 188.45/150/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh
4. SK Nomor 188.45/151/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar
5. SK Nomor 188.45/152/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh
6. SK Nomor 188.45/153/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang
7. SK Nomor 188.45/154/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Gunung Medan
8. SK Nomor 188.45/155/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I.
9. SK Nomor 188.45/156/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II
10. SK Nomor 188.45/157/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh dan Beringin Sakti.
11. SK Nomor 188.45/158/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumbang
12. SK Nomor 188.45/159/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai
13. SK Nomor 188.45/160/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau

Adapun rincian saldo yang ada direkening BLUD per 31 Desember 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.4
Saldo Kas di BLUD Tahun 2019

No	Uraian	Kas di BLUD Tahun 2019			Jumlah
		Kas Di Bank	Kas di Bendahara Penerimaan	Kas Di Bendahara Pengeluaran	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	263.387.688,00			263.387.688,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	43.357.433,00			43.357.433,00
3	BLUD Puskesmas Sungai Limau	35.198.564,00			35.198.564,00
4	BLUD Puskesmas Sitiung II	52.616.898,00		1.546.452,00	54.163.350,00
5	BLUD Puskesmas Padang Laweh	23.364.500,00			23.364.500,00
6	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	19.335.680,00			19.335.680,00
7	BLUD Puskesmas Silago	42.741.272,00			42.741.272,00
8	BLUD Puskesmas Gunung Medan	122.056,18			122.056,18
9	BLUD Puskesmas Sitiung I	171.176.513,62			171.176.513,62
10	BLUD Puskesmas Koto Baru	278.700.074,00	201.000,00		278.901.074,00
11	BLUD Puskesmas Timpeh	63.281.172,00			63.281.172,00
12	BLUD Puskesmas Sialang	48.492.615,00			48.492.615,00
13	BLUD Puskesmas Tiumang	50.680.288,00			50.680.288,00
14	BLUD Puskesmas Koto Besar	643.372,00		145.364,00	788.736,00
JUMLAH		1.093.098.125,80	201.000,00	1.691.816,00	1.094.990.941,80

Saldo di BLUD Tahun 2019 sebesar Rp1.094.990.941,80 terdiri atas Saldo Kas di Bank sebesar Rp1.093.098.125,80, saldo Kas di Bendahara Penerimaan BLUD sebesar Rp201.000,00, dan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD sebesar Rp1.691.816,00.

Atas saldo Kas BLUD di bank sebesar Rp1.093.098.125,80 terdapat saldo Utang PFK atas pajak negara yang belum disetorkan oleh Bendahara BLUD Puskesmas Timpeh sebesar Rp601.085,00. Sementara itu, Bendahara BLUD Puskesmas Timpeh membukukan saldo akhir sebesar Rp63.281.172,00 dan saldo akhir di rekening koran tercatat sebesar Rp61.738.172,00 atau terdapat selisih sebesar Rp1.543.000,00. Hal ini terjadi karena penyetoran retribusi ke Kas BLUD pada tanggal 17 September 2019 oleh pihak Bank Nagari dibukukan ke rekening Kas Daerah. BUD telah menyurati Bank Nagari dengan Surat Perintah Pemindahbukuan Nomor 900/99/ BKD-2020 ke rekening BLUD Puskesmas Timpeh dan telah dilakukan pemindahbukuan pada tanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp1.543.000,00

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.1.a.5 Setara Kas	2.695.211.372,00	483.693.923,00

Akun ini menampung kas selain sisa Uang Muka Kerja (Uang Persediaan/UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang merupakan pemotongan/pungutan PPN dan PPh yang timbul atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal yang belum disetor ke Kas Negara dan saldo Kas Dana BOS serta rekening operasional lainnya di sekolah negeri pada saat tanggal neraca.

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.695.211.372,00 yang berasal dari sisa Dana BOS yang masih ada di rekening 144 SD Negeri dan 33 SMP Negeri. Pada nilai saldo kas di BOS sebesar Rp2.695.211.372,00 terdapat

perhitungan lebih salur dana BOS Triwulan III dan IV Tahun 2019 sebesar Rp385.760.000,00. Rincian lebih salur BOS Triwulan III dan IV Tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 3** Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.1.a.6 Piutang Pajak	32.002.201.142,00	29.849.894.172,00

Piutang Pajak terdiri dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Piutang Pajak Hotel, dan Piutang Pajak Restoran. Piutang Pajak Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2019	2018
1	PBB-P2	30.925.575.425,00	28.866.342.780,00
2	Pajak Penerangan Jalan	1.076.625.717,00	975.703.392,00
3	Pajak Hotel	0,00	1.235.000,00
4	Pajak Restoran	0,00	6.613.000,00
	Jumlah	32.002.201.142,00	29.849.894.172,00

1. Piutang PBB-P2

Piutang PBB-P2 sebagian besar merupakan piutang sewaktu pelimpahan dari Pemerintah Pusat (KPP Pratama Solok) kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor BA-47/WPJ.27/KP.06/2014 pada tanggal 27 Februari 2014.

Penagihan Piutang PBB-P2 masih bersifat pasif dengan pola penagihan piutang dilakukan apabila ada yang mengurus BPHTB untuk diminta membayar seluruh tagihan PBB yang ada pada daftar piutang dan aplikasi SIMPBB.

Banyaknya nilai piutang PBB-P2 yang belum tertagih tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti belum optimalnya melakukan verifikasi dan validasi data piutang ke lapangan semenjak pengalihan PBB-P2 ke Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Verifikasi dan validasi data piutang dimaksud agar data-data piutang PBB-P2 tersebut diyakini kebenarannya dan objek pajaknya memang ada.

Surat Penetapan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp4.576.700.787,00. Penerimaan PBB-P2 Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.287.585.834,00. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2018 sebesar Rp28.866.342.780,00 ditambah dengan SKP Tahun 2019 sebesar Rp4.576.700.787,00 dikurangi penerimaan Tahun 2019 sebesar Rp2.287.585.834,00, maka saldo Piutang PBB-P2 Tahun 2019 sebesar Rp30.925.575.425,00. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.5
Piutang PBB-P2 Tahun 2019 dan 2018

No	Tahun Pajak	Piutang Per 31 Desember 2018	Ketetapan Tahun 2019	Penerimaan LRA 2019	Penerimaan Pokok Piutang PBB-P2	Penerimaan Denda PBB-P2	Saldo Piutang Per 31 Desember 2019
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=3+4-6
1	2019	-	4.576.700.787,00	2.287.585.834,00	2.287.585.834,00	-	2.289.114.953,00
2	2018	2.586.195.489,00	-	221.638.037,00	210.531.906,00	11.106.131,00	2.375.663.583,00
3	2017	2.046.821.009,00	-	9.186.804,00	7.375.461,00	1.811.343,00	2.039.445.548,00
4	2016	2.256.892.270,00	-	16.087.541,00	11.801.875,00	4.285.666,00	2.245.090.395,00
5	2015	2.309.701.420,00	-	139.649,00	94.358,00	45.291,00	2.309.607.062,00
6	2014	2.799.199.951,00	-	110.049,00	74.358,00	35.691,00	2.799.125.593,00
7	1996 - 2013	16.867.532.641,00	-	6.438,00	4.350,00	2.088,00	16.867.528.291,00
	Jumlah	28.866.342.780,00	4.576.700.787,00	2.534.754.352,00	2.517.468.142,00	17.286.210,00	30.925.575.425,00

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama Tahun 2019 sebesar Rp2.534.754.352,00 terdiri dari penerimaan Pokok Piutang sebesar Rp2.517.468.142,00 dan penerimaan Denda Piutang PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp17.286.210,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tahun	PBB-P2 Pokok	Denda	Penerimaan PBB-P2
2019	2.287.585.834,00	-	2.287.585.834,00
2018	210.531.906,00	11.106.131,00	221.638.037,00
2017	7.375.461,00	1.811.343,00	9.186.804,00
2016	11.801.875,00	4.285.666,00	16.087.541,00
2015	94.358,00	45.291,00	139.649,00
2014	74.358,00	35.691,00	110.049,00
1996-2013	4.350,00	2.088,00	6.438,00
Jumlah	2.517.468.142,00	17.286.210,00	2.534.754.352,00

2. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Piutang PPJ per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.076.625.717,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.6
Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2019

No	Nama Perusahaan	Tagihan Bulan	Piutang 2019	Penerimaan Piutang	Tanggal Penerimaan
1	2	3	4	5	6
1	PT PLN (Persero)	Des 2019	971.279.892,00	971.279.892,00	15/01/2020
2	PT Andalas Wahana Berjaya	1 Nov - 30 Nov 2019	3.650.800,00	3.650.800,00	02/01/2020
		1 Des - 31 Des 2019	4.851.387,00	4.851.387,00	18/02/2020
3	PT SMP (Selago Makmur Plantantion)	Sept - Des 2019	17.160.519,00	17.160.519,00	07/02/2020
4	PT Incasi Raya Pangian	Sept - Des 2019	12.114.520,00	12.114.520,00	26/02/2020
5	PT Sumbar Andalas Kencana	Agus - Des 2019	28.051.839,00	28.051.839	09/03/2020
6	PT Bina Pratama Sakato Jaya	Agus 2019	8.757.812,00	8.757.812,00	23/03/2020
		Sept 2019	7.833.388,00	7.833.388,00	23/03/2020
		Okt 2019	8.241.812,00	8.241.812,00	23/03/2020
		Nov2019	7.513.138,00	7.513.138,00	23/03/2020
		Des 2019	7.170.610,00	7.170.610,00	23/03/2020
	JUMLAH		1.076.625.717,00	1.076.625.717,00	

Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.076.625.717,00 terdiri dari Piutang PPJ PLN bulan Desember 2019 sebesar Rp971.279.892,00 yang telah diterima di Kas Daerah tanggal 15 Januari 2020 dan Piutang PPJ Non PLN sebesar Rp105.345.825,00 yang telah diterima penerimaannya pada Tahun 2020

3. Piutang Pajak Hotel dan Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Hotel dan Piutang Pajak Restoran Tahun 2019 sebesar Rp0,00 disebabkan karena penagihan pajak untuk bulan Desember 2019 dilaksanakan di akhir tahun dan telah disetorkan seluruhnya sebelum tanggal 31 Desember 2019.

Piutang Pajak Hotel Tahun 2018 sebesar Rp1.235.000,00 dan Piutang Pajak Restoran Tahun 2018 sebesar Rp6.613.000,00 telah disetor ke Kas Daerah selama Tahun 2019.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(21.818.557.651,65)	(20.772.960.296,81)

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.818.557.651,65 terdiri dari.

	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2019	2018
1	Penyisihan Piutang PBB-P2	(21.813.174.523,07)	(20.768.042.539,85)
2	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(5.383.128,58)	(4.878.516,96)
3	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	(6.175,00)
4	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	0,00	(33.065,00)
	Jumlah	(21.818.557.651,65)	(20.772.960.296,81)

Penyisihan Piutang PBB-P2 sampai Tahun 2019 sebesar Rp21.813.174.523,07 dengan rincian dan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.2.7
Penyisihan Piutang PBB-P2 Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Umur (Th)	Kualitas	% Cad.	Jumlah Penyisihan
1	Tahun Pajak 2019	2.289.114.953,00	< 1	Lancar	0,5	11.445.574,77
2	Tahun Pajak 2018	2.375.663.583,00	1 s.d 2	Kurang Lancar	10	237.566.358,30
3	Tahun Pajak 2017	2.039.445.548,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.019.722.774,00
4	Tahun Pajak 2016	2.245.090.395,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.122.545.197,50
5	Tahun Pajak 2015	2.309.607.062,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.154.803.531,00
6	Tahun Pajak 2014	2.799.125.593,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.399.562.796,50
7	Pajak 1996 s.d 2013	16.867.528.291,00	> 5	Macet	100	16.867.528.291,00
	Jumlah	30.925.575.425,00				21.813.174.523,07

Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2019 sebesar Rp5.383.128,59 dengan perhitungan sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Umur (Th)	Kualitas	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan
1	PPJ PLN	971.279.892,00	< 1	Lancar	0,5	4.856.399,46
2	PPJ Non PLN	17.160.519,00	< 1	Lancar	0,5	526.729,13
	Jumlah	988.440.411,00				5.383.128,59

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.1.a.7 Piutang Retribusi	138.133.361,00	307.156.861,00

Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp138.133.361,00 terdiri dari.

Uraian	2019	2018
a. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	24.805.000,00	3.050.000,00
b. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	30.096.361,00	195.646.361,00
c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	83.232.000,00	108.460.500,00
Jumlah	138.133.361,00	307.156.861,00

a. **Piutang Retribusi Pelayanan Pasar**

Piutang Retribusi Pasar Tahun 2019 dan 2018 berasal dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan yang bersumber dari MoU pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.8
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2019 dan 2018

No	Nama Pasar	Piutang 2019	Piutang 2018
1	Pasar Sitiung	500.000,00	
2	Pasar Koto Agung	-	
3	Pasar Lawai	375.000,00	
4	Pasar Pulau Punjung	5.300.000,00	
5	Pasar Sikabau	1.900.000,00	
6	Pasar Koto Laweh	1.800.000,00	
7	Pasar Koto Ranah	1.500.000,00	2.508.000,00
8	Pasar Sungai Limau	1.500.000,00	
9	Pasar Tanjung Alam	540.000,00	
10	Pasar Silago	-	365.000,00
11	Pasar Sialang Gaung	5.800.000,00	
12	Pasar Koto Baru	2.040.000,00	
13	Pasar Ampang Kuranji	-	177.000,00
14	Pasar Ampalu	500.000,00	
	Jumlah	21.755.000,00	3.050.000,00

Piutang Pasar Tahun 2019 sebesar Rp24.805.000,00 berasal dari target Tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp101.804.000,00 dan terealisasi sebesar Rp80.049.000,00 ditambah piutang Tahun 2018 sebesar Rp3.050.000,00 yang belum dibayarkan di Tahun 2019. Piutang Tahun 2018 sebesar Rp3.050.000,00 berasal dari piutang Pasar Koto Ranah sebesar Rp2.508.000,00, Pasar Silago sebesar Rp365.000,00, dan Pasar Ampang Kuranji sebesar Rp177.000,00.

b. **Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2019 sebesar Rp30.096.361,00. Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2.9
Daftar Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2019 dan 2018

No	Perusahaan	Piutang 2018	SKRD 2019	Penerimaan 2019	Piutang 2019	Tanggal Setor
1	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	-	79.475.000	79.475.000	-	15 Okt 2019
2	PT. Telkomsel	173.800.000	84.150.000	252.450.000	5.500.000	29 Jan 2019 20 Des 2019
3	PT. Tower Bersama	9.545.321	40.700.000	40.700.000	9.545.321	11 Nov 2019
4	PT. Indosat	12.301.040	20.075.000	20.075.000	12.301.040	26 Sep 2019
5	PT. Solusi Tunas Pratama	-	13.250.000	10.500.000	2.750.000	22 Nov 2019
6	PT. Excelindo Pratama	-	8.525.000	8.525.000	-	30 Sep 2019

No	Perusahaan	Piutang 2018	SKRD 2019	Penerimaan 2019	Piutang 2019	Tanggal Setor
7	PT. Protelindo	-	49.050.000	49.050.000	-	5 Sep 2019
8	PT. CMI		13.750.000	13.750.000	-	26 Jul 2019
9	PT Solusi Menara Ind		6.050.000	6.050.000		7 Nov 2019
	Jumlah	195.646.361	315.025.000	480.575.000	30.096.361	

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2019 sebesar Rp30.096.361,00 terdiri dari.

- 1) Piutang Tahun 2019 sebesar Rp2.750.000,00. Penerbitan SKRD Tahun 2019 sebanyak 105 SKRD sebesar Rp315.025.000,00, dilunasi sebanyak 104 SKRD sebesar Rp312.275.000,00, sehingga terdapat piutang atas satu SKRD Nomor 82 pada PT Solusi Tunas Pratama sebesar Rp2.750.000,00.
- 2) Piutang Tahun 2017 sebesar Rp6.050.000,00 berasal dari piutang PT Telkomsel sebesar Rp5.500.000,00 dan PT Tower Bersama sebesar Rp550.000,00.
- 3) Piutang Tahun 2015 sebesar Rp21.296.361,00 terdiri dari piutang PT Tower Bersama sebesar Rp8.995.321,00 dan PT Indosat sebesar Rp12.301.040,00.

c. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp83.232.000,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.10
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian Piutang	Piutang 2019	Piutang 2018
1	Dinas Pendidikan	80.449.000,00	105.348.000,00
	Rumah Dinas	80.449.000,00	105.348.000,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	2.400.000,00
	Kendaraan Dinas	0,00	2.400.000,00
3	Dinas Perkimtan	2.183.000,00	0,00
	Rusunawa	2.183.000,00	0,00
4	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		112.500,00
	Rumah Dinas		112.500,00
5	Kec. Koto Baru	600.000,00	600.000,00
	Kendaraan Dinas	600.000,00	600.000,00
	Jumlah	83.232.000,00	108.460.500,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp83.232.000,00 terdiri dari:

- 1) Retribusi pemakaian rumah dinas di Dinas Pendidikan sebesar Rp80.449.000,00 yang berasal dari piutang Tahun 2018 sebesar Rp61.977.000,00 ditambah Piutang Tahun 2019 sebesar Rp18.472.000,00.
- 2) Retribusi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp2.183.000,00.
- 3) Retribusi pemakaian kendaraan dinas Tahun 2018 di Kecamatan Koto Baru yang belum disetor sampai dengan akhir Tahun 2019 sebesar Rp600.000,00.

Rincian piutang pemakaian kekayaan daerah atas rumah dinas pada Dinas Pendidikan terdapat pada **Lampiran 11**.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Penyisihan Piutang Retribusi	(110.949.906,00)	(211.492.741,50)

Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2019 merupakan Penyisihan atas Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Penyisihan Piutang Rumah Susun Sewa Sederhana (rusunawa) pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018 pada Kecamatan Koto Baru dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.11
Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2019

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Retribusi Pelayanan Pasar				
Tahun 2018	3.050.000,00	Macet	100%	3.050.000,00
Tahun 2019	21.755.000,00	Diragukan	50 %	10.877.500,00
Jumlah	24.805.000,00			13.927.500,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
Tahun 2015	21.296.361,00	Macet	100%	21.296.361,00
Tahun 2017	6.050.000,00	Macet	100%	6.050.000,00
Tahun 2019	2.750.000,00	Diragukan	50,00%	1.375.000,00
Jumlah	30.096.361,00			28.721.361,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Tahun 2018	61.977.000,00	Macet	100%	61.977.000,00
Tahun 2019	2.783.000,00	Lancar	0,5%	13.915,00
Tahun 2019	1.746.000,00	Diragukan	50%	8.730,00
Tahun 2019	5.154.000,00	kurang lancar	10%	515.400,00
Tahun 2019	11.572.000,00	Diragukan	50%	5.786.000,00
Jumlah	83.232.000,00			68.301.045,00
Total	138.133.361,00			110.949.906,00

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.1.a.8 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.063.752.034,00	7.315.914,00

Nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.063.752.034,00. Piutang tahun 2019 bertambah sebesar Rp4.056.436.120,00. Adapun perubahan nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Penambahan Piutang Deviden Bank Nagari Tahun 2019 sebesar Rp4.043.805.181,00 diterima di Kas Daerah pada tanggal 30 April 2020.

- 2. Penambahan Piutang Deviden PT BPR Pulau Punjung sebesar Rp19.946.853,00 terdiri dari piutang Tahun 2019 sebesar Rp9.473.740,00 dan piutang Tahun 2016 s.d. 2018 sebesar Rp10.473.113,00 diterima di Kas Daerah pada tanggal 26 Maret 2020.
- 3. Pengurangan Piutang Deviden PT. Balairung Citrajaya Sumbar tahun 2019 sebesar Rp7.315.914,00 diterima di Kas Daerah pada tanggal 6 Maret 2019.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.313.705,91	(3.657.957,00)

Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.313.705,91 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.12
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Tahun 2018				
	Deviden PT. BPR Pulau Punjung	10.473.113,00	Kurang Lancar	10	1.047.311,30
	Jumlah	10.473.113,00			1.047.311,30
2	Tahun 2019				
	Deviden PT. BPR Pulau Punjung	9.473.740,00	Lancar	5	47.368,70
	Deviden Bank Nagari	4.043.805.181,00	Lancar	5	20.219.025,91
	Jumlah	4.053.278.921,00			20.266.394,61
	Total	4.063.752.034,00			21.313.705,91

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.1.a.9 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	12.310.601.825,87	10.450.525.379,00

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp12.310.601.825,87 dan sebesar Rp10.450.525.379,00 yang terdiri dari:

	Tahun 2019	Tahun 2018
a. Piutang BLUD		
- BLUD Puskesmas	499.089.400,00	583.035.400,00
- BLUD RSUD Sungai Dareh	6.611.198.992,00	9.116.406.950,00
b. Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00	554.897.679,00
c. Piutang Air Minum UPT SPAM	297.616.250,00	196.185.350,00
d. Piutang Bunga Deposito	100.205.473,00	0,00
e. Piutang TGR	4.246.994.031,87	0,00
f. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah	600.000,00	
Jumlah	12.310.601.825,87	10.450.525.379,00

a. Piutang BLUD

Piutang BLUD pada per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.110.288.392,00 terdiri dari piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp499.089.400,00 dan Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp6.611.198.992,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.13
Piutang BLUD Puskesmas Tahun 2019

No	BLUD Puskesmas	Piutang 2018	Piutang 2019	Jumlah Piutang 2019	Penerimaan Tahun 2020	Sisa Piutang 2019 yang belum diterima	Tanggal Pembayaran oleh BPJS
1	2	3	4	5	6	7=4-6	8
1	Sungai Rumbai		36.857.500	36.857.500,00	36.857.500,00	0,00	- 14.848.000 tgl 15 Jan2020 - 12.221.000 tgl 21 Jan2020 - 712.500 tgl 15 Jan 2020 - 9.076.000 tgl 30 Jan 2020
2	Sungai Limau		16.118.000	22.431.000,00	22.431.000,00	0,00	- 10.746.000 dan 4.178.000 tgl 02 Maret 2020 - 7.507.000 tgl 30 Maret 2020
3	Sitiung II		10.435.800	10.435.800,00	10.435.000,00	800,00	- 415.000 tgl 15 Jan 2020 - 7.305.000 tgl 21 Jan 2020 - 2.715.000 tgl 03 Maret 2020
4	Padang Laweh		32.215.000	32.215.000,00	25.502.000,00	6.713.000,00	- 25.502.000 tgl 2 Maret 2020
5	Sungai Dareh	21.775.000	24.972.200	46.747.200,00	24.860.000,00	21.887.200,00	-13.745.000 tgl 16 April 2020 -11.115.000 tgl 20 April 2020
6	Silago		96.877.600	96.877.600,00	38.040.600,00	58.837.000,00	-16.380.000 tgl 14 Jan 2020 - 21.522.000 tgl 02 Maret 2020 - 138.600 tgl 15 Januari 2020
7	Gunung Medan		3.971.800	3.971.800,00	3.971.800,00	0,00	- 3.611.500 tgl 10 Januari 2020 - 238.000 tgl 11 Maret 2020 - 118.800 tgl 15 Januari 2020
8	Sitiung I		76.020.000	76.020.000,00	76.020.000,00	0,00	- 75.000.000 tgl 11 Maret 2020 - 270.000 tgl 15 Januari 2020 - 750.000 tgl 21 Januari 2020
9	Koto Baru		94.649.100	94.649.100,00	94.649.100,00	0,00	- 30.315.000 tgl 30 Jan 2020 - 29.020.000 tgl 30 Jan 2020 - 35.105.000 tgl 11 Maret 2020 - 209.100 tgl 15 Januari 2020
10	Timpeh		28.041.200	28.041.200,00	28.041.200,00	0,00	- 9.140.000 tgl 21 Jan 2020 - 11.530.000 tgl 15 Jan 2020 - 7.220.000 tgl 02 Maret 2020 - 151.200 tgl 15 Januari 2020
11	Sialang	2.125.000	3.975.400	6.100.400,00	800.000,00	5.300.400,00	- 800.000 tgl 9 Januari 2020
12	Tiumang		7.989.000	7.989.000,00	7.989.000	0,00	- 1.575.000 tgl 14 Januari 2020 - 6.240.000 tgl 9 Januari 2020 - 174.000 tgl 15 Januari 2020
13	Koto Besar		36.753.800	36.753.800,00	26.165.000,00	10.588.800,00	- 16.719.000 tgl 15 Jan 2020 - 9.446.000 tgl 31 Maret 2020
		23.900.000,00	468.876.400,00	499.089.400,00	395.762.200,00	103.327.200,00	

Tabel 5.2.14
Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2019

NO	TANGGAL LUNAS	URAIAN	JUMLAH	DIBAYAR	KET
1	14-Jan-20	Klaim JKN Rawat.Jalan & Rawat Inap bulan Agustus 2019	2.940.090.900	2.940.090.900	Lunas
		Klaim JKN R.Jalan & R.Inap bulan Agustus 2019			
2	11-Feb-20	Klaim JKN Rawat.Jalan & Rawat Inap bulan September 2019	2.744.477.600	2.744.477.600	Lunas
		Klaim JKn Rawat Jalan & Rawat Inap bulan September 2019			
3	09-Jan-20	Klaim JKN Pending bulan Juni 2019	215.903.100	215.903.100	Lunas
		Klaim JKN Pending bulan Juni 2019			
4	05-Feb-20	Klaim JKN Pending bulan Juli 2019	255.192.200	255.192.200	Lunas
		Klaim JKN Pending bulan Juni 2019			
5	14-Feb-20	Klaim Obat Kronis Mei 2019	89.655.732	89.655.732	Lunas
		Klaim Obat Kronis Mei 2019			
6	20-Feb-20	Klaim Obat Kronis Juni 2019	65.885.966	65.885.966	Lunas
		Klaim Obat Kronis Juni 2019			

NO	TANGGAL LUNAS	URAIAN	JUMLAH	DIBAYAR	KET
7		Klaim Obat Kronis Juli I 2019	22.293.353		Lunas
	20-Feb-20	Klaim Obat Kronis Juli 2019		22.293.353	
8		Klaim Obat Kronis Juli II 2019	94.287.540		Lunas
	20-Feb-20	Klaim Obat Kronis Juli II 2019		94.287.540	
9		Klaim Obat Kronis Agustus 2019	84.469.926		Lunas
	20-Feb-20	Klaim Obat Kronis Agustus 2019		84.469.926	
10		Klaim Ambulance JKN bulan Oktober 2019	40.902.000		Lunas
	04-Feb-20	Klaim Ambulance JKN bulan Oktober 2019		40.902.000	
11		Klaim Ambulance JKN bulan November 2019	26.962.000		Lunas
	20-Feb-20	Klaim Ambulance JKN bulan November 2019		26.962.000	
12		Klaim Pasien In Health bulan November 2019	47.750		Lunas
	05-Feb-20	Klaim Pasien In Health bulan November 2019		47.750	
13		Klaim Pasien In Health bulan Desember I (satu) 2019	186.525		Lunas
	05-Feb-20	Klaim Pasien In Health bulan Desember 2019		186.525	
14		Klaim Pasien In Health bulan Desember II (dua) 2019	205.000		Lunas
	17-Feb-20	Klaim In Health bulan Desember II (dua) 2019		205.000	
15		Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019	19.980.800		Belum Lunas
	30-Jan-20	Klaim BPJS Tenagakerjaan Tahun 2019		15.172.700	
	07-Feb-20	Klaim BPJS Tenagakerjaan Tahun 2019		476.600	
	18-Feb-20	Klaim BPJS Tenagakerjaan Tahun 2019		184.300	
	20-Feb-20	Klaim BPJS Tenagakerjaan a.n Nursiati 19		614.000	
	27-Feb-20	Klaim BPJS Tenagakerjaan a.n Bahyu Wahyudi 19		3.454.200	
16		Klaim Suku Anak Dalam	5.784.900		
17		Klaim Jampersal bulan Desember 2019	4.873.700		
		Jumlah	6.611.198.992	6.600.461.000	

b. Piutang Dana Bergulir

Piutang Dana Bergulir merupakan piutang tagihan dana bergulir yang ada pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Dana bergulir tersebut berasal dari hibah Pemerintah Kabupaten Sijunjung saat pemekaran Kabupaten Dharmasraya. Piutang Dana Bergulir Tahun 2019 sebesar Rp554.897.679,00 tidak ada perubahan nilai piutang dari Tahun 2018. Tidak dilakukannya penagihan atas Piutang Dana Bergulir disebabkan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan serta tidak adanya piutang yang dapat ditagih dari debitur. Hal lain tidak bisanya dilakukan penagihan disebabkan alamat yang tidak ditemukan, pindah alamat, meninggal dunia, dan tidak mampu. Adapun rincian Piutang Dana Bergulir Tahun 2019 dan 2018 terdapat pada **Lampiran 12**.

c. Piutang Air Minum UPT SPAM

Piutang Air Minum UPT SPAM per 31 Desember 2019 sebesar Rp297.616.250,00 berasal dari piutang Tahun 2018 sebesar Rp196.185.350,00 dikurangi dengan penerimaan piutang Tahun 2019 Rp69.688.600,00 dan penambahan piutang Tahun 2019 sebesar Rp171.099.500,00 Piutang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.2.15
Piutang Air Minum UPT SPAM Tahun 2019

No	Tahun Tunggakan	Saldo 31 Desember 2018 (Rp)	Penerimaan Tahun 2019 (Rp)	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)
1	Tahun 2012	13.130.300	-	13.130.300
2	Tahun 2013	2.667.800	-	2.667.800
3	Tahun 2014	22.578.050	-	22.578.050
4	Tahun 2015	13.801.600	2.867.700 -	10.933.900
5	Tahun 2016	3.523.500	-	3.523.500
6	Tahun 2017	33.580.900	488.700	33.092.200
7	Tahun 2018	106.903.200	66.312.200	40.591.000
8	Januari s.d November 2019			111.471.100,00
9	Desember 2019			59.330.258,00
JUMLAH		196.185.350,00	69.668.600,00	297.616.250,00

d. Piutang Bunga Deposito

Piutang Bunga Deposito sebesar Rp100.205.473,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.16
Piutang Bunga Deposito Tahun 2019

No	Nomor Rekening	Nomor Seri Bilyet	Jumlah	Bank Penempatan	Tanggal Penerbitan	Tanggal Pencairan	Piutang Bunga Deposito 2019
1	0616.01.00436-406	DC 3717083	5.000.000.000	BRI KC Dharmasraya	30/01/2019	10/07/2019	37.397.256
2	2173.01.000181409	DC 3717775	5.000.000.000	BRI KCP Pulau Punjung	30/01/2019	29/05/2019	27.808.219
3	1403.0301.009944	SB 126705	10.000.000.000	Bank Nagari Pulau Punjung	09/09/2019	13/11/2019	11.666.666
4	1403.0301.009933	SB 126704	10.000.000.000	Bank Nagari Pulau Punjung	09/09/2019	18/10/2019	11.666.666
5	1403.0301.009966	SB 126709	10.000.000.000	Bank Nagari Pulau Punjung	03/10/2019	22/11/2019	11.666.666
JUMLAH			40.000.000.000				100.205.473

Piutang Bunga Deposito sebesar Rp100.205.473,00 terdiri dari piutang bunga deposito pada BRI sebesar Rp65.205.475,00 adalah piutang deposito yang terlambat disetorkan ke Kas Daerah dan piutang bunga deposito Bank Nagari sebesar Rp34.999.998,00 adalah pemotongan pajak bunga deposito dari pokok bunga deposito yang seharusnya tidak dilakukan pemotongan pajak atas penerimaan bunga deposito bulan Oktober dan November 2019. Piutang bunga deposito Bank Nagari dibayarkan tanggal 13 Januari 2020 sebesar Rp34.999.998,00 dan Piutang Bunga Deposito BRI sebesar Rp65.205.478,00,00 yang dibayarkan tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp27.808.219,00 dan sebesar Rp9.589.040,00, serta sebesar Rp27.808.216,00 yang dibayarkan tanggal 23 Maret 2020.

e. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

Piutang TGR selama Tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Tahun 2018, karena adanya penetapan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) selama Tahun 2019 sebesar Rp4.246.994.031,87. Adapun rincian mengenai Piutang TGR Tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 13** pada laporan keuangan ini.

f. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah

Piutang hasil penjualan aset daerah sebesar Rp600.000,00 berupa penjualan sisa bongkaran atas gedung dan bangunan yang telah ditetapkan oleh Tim Penaksir Harga Penjualan Barang Milik Daerah pada SMPN 2 Pulau Punjung

berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 030/1816/BKD/XI-2019 tanggal 26 November 2019 perihal Tindak lanjut sisa bongkaran bangunan gedung yang belum disetor ke Kas Daerah oleh Pengguna Barang SMPN 2 Pulau Punjung sampai tanggal 31 Desember 2019.

Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp)

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (546.175.917,56) (533.763.430,83)

Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp545.826.345,57 per 31 Desember 2018 terdiri dari:

a.	Penyisihan Piutang BLUD	(37.821.941,96)	(55.872.869,75)
b.	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(462.518.051,08)	(462.518.051,08)
c.	Penyisihan Piutang Air Minum UPT SPAM	(24.096.927,00)	(15.372.510,00)
d.	Bunga Deposito	(501.027,38)	-
e.	Penyisihan Piutang TGR	(21.234.970,16)	-
f.	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan	(3.000,00)	
	Jumlah	(546.175.917,56)	(533.763.430,83)

- a) Penyisihan Piutang BLUD sebesar Rp37.821.941,96
Penyisihan Piutang BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp37.821.941,96 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.17
Penyisihan Piutang BLUD Tahun 2019

No.	Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Jasa Layanan BLUD Puskesmas				
	Tahun 2019	475.189.400,00	Lancar	0,50%	2.375.947,00
	Tahun 2018	23.900.000,00	Kurang lancar	10%	2.390.000,00
2	Jasa Layanan BLUD RSUD Sungai Dareh				
	Tahun 2019	6.611.198.992,00	Lancar	0,50%	33.055.994,96
	Jumlah	7.110.288.392,00			37.821.941,96

- b) Penyisihan Piutang Dana Bergulir sebesar Rp462.518.051,08
Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2019 sebesar Rp462.518.051,08 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.18
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2019

No	Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	(%) Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang
	1	2	3	4	5
1	Kec. Pulau Punjung				
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo	Lancar		0,5	
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	20.644.139,00	10	2.064.413,90
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	25.969.285,00	50	12.984.642,50
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	75.735.857,00	100	75.735.857,00

No	Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	(%) Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang
	1	2	3	4	5
2	Kec. Sitiung				
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo	Lancar	-	0,5	-
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	-	10	-
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	-	50	-
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	42.186.005,00	100	42.186.005,00
3	Kec. Koto Baru				
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo	Lancar	1.104.335,00	0,5	5.521,68
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	38.498.010,00	10	3.849.801,00
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	38.211.068,00	50	19.105.534,00
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	261.491.484,00	100	261.491.484,00
4	Kec. Sungai Rumbai				
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo	Lancar	-	0,5	-
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	-	10	5.962.704,00
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	11.925.408,00	50	39.132.088,00
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	39.132.088,00	100	-
	Jumlah		554.897.679,00		462.518.051,08

- c) Penyisihan Piutang Air Minum UPT SPAM sebesar Rp24.096.927,00
 Penyisihan Piutang Air Minum UPT SPAM per 31 Desember 2019 sebesar Rp24.096.927,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.2.19
 Penyisihan Piutang Air PDAM Tahun 2019

No.	Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Tahun 2012	13.130.300,00	Kurang Lancar	10,00%	1.313.030,00
2	Tahun 2013	2.667.800,00	Kurang Lancar	10,00%	266.780,00
3	Tahun 2014	22.578.050,00	Kurang Lancar	10,00%	2.257.805,00
4	Tahun 2015	13.801.600,00	Kurang Lancar	10,00%	1.093.390,00
5	Tahun 2016	3.523.500,00	Kurang Lancar	10,00%	352.350,00
6	Tahun 2017	33.580.900,00	Kurang Lancar	10,00%	3.309.220,00
7	Tahun 2018	40.591.000,00	Kurang Lancar	10,00%	4.059.100,00
8	Jan sd Nov 2019	111.471.100,00	Kurang Lancar	10,00%	11.147.110,00
9	Desember 2019	59.628.400,00	Lancar	0,5 %	298.142,00
	Jumlah	297.616.250,00			24.096.927,00

- d) Penyisihan Piutang Bunga Deposito adalah sebesar Rp501.027,38 dari perhitungan (0,5% x Rp100.205.476,00.)
- e) Penyisihan Piutang TGR sebesar Rp21.234.970,16 Rp21.234.970,16 dari perhitungan (0,5%xRp4.246.994.032,00)
- f) Penyisihan Piutang hasil penjualan aset daerah sebesar Rp3.000,00 dari perhitungan (0,5%xRp600.000,00).

		Tahun 2018
		(Rp)
V.C.1.a.10 Piutang	Tahun 2019 (Rp)	
Pemerintah Pusat	Transfer 3.072.369.696,00	0,00

Transfer Pemerintah Pusat adalah Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Dana Bagi Hasil Kurang Bayar yang dituangkan dalam PMK Nomor 20 /PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020 dan PMK Nomor 36/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.20
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2019

No	Uraian	Nilai Kurang Bayar	Keterangan	PMK
1	PPH 21 dan PPH 25/29 Tahun 2018		DBH Pajak	PMK 20/2020
	- PPh 25/29	12.413.544,00		
2	Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018		DBH Pajak	PMK 20/2020
	- Bagi Rata	585.974.334,00		
	- Kehutanan	96.070.780,00		
	- Minyak Bumi dan Gas Bumi	4.277.128,00		
	- Sektor Lainnya	37.346.498,00		
	- Kehutanan	2.668.633,00		
	- Minyak Bumi dan Gas Bumi	118.810,00		
	- Sektor Lainnya	1.037.403,00		
3	DBH CHT tahun 2018	7.190.444,00	DBH Pajak	PMK 20/2020
4	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2018		DBH SDA	PMK 20/2020
	- PSDH	19.664.913,00		
5	DBH Sumber Daya Alam Perikanan Tahun 2018	3.677.289,00	DBH SDA	PMK 20/2020
6	DBH TA.2019 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 PPH 21 dan PPH 25		DBH Pajak	PMK 36/2020
	- PPH 21	872.850.442,00		
	- PPH 25/29	93.654.177,00		
7	DBH TA.2019 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 Pajak Bumi dan Bangunan		DBH Pajak	PMK 36/2020
	- Bagi Rata	196.640.935,00		
	- Perkebunan	509.950.371,00		
	- Kehutanan	75.172.377,00		
	- Minyak Bumi dan Gas Bumi	128.558.781,00		
	- Non Minyak Bumi dan Gas Bumi lainnya	17.708.212,00		
	- Sektor Lainnya	23.555.748,00		
	- Perkebunan	21.248.024,00		
	- Kehutanan	2.088.172,00		
	- Minyak Bumi dan Gas Bumi	3.570.922,00		
	- Non Minyak Bumi dan Gas Bumi lainnya	491.973,00		
	- Sektor Lainnya	654.371,00		
11	DBH TA.2019 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 Sumber Daya Alam Kehutanan		DBH SDA	PMK 36/2020
	- IUPH	-		

No	Uraian	Nilai Kurang Bayar	Keterangan	PMK
	- PSDH	173.329.556,00		
12	DBH TA.2019 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara		DBH SDA	PMK 36/2020
	- Royalti	6.571.539,00		
14	DBH TA.2019 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 Sumber Daya Alam Panas Bumi		DBH SDA	PMK 36/2020
	- Iuran Tetap	5.256.417,00		
15	DBH TA.2019 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 Sumber Daya Perikanan	170.627.903,00	DBH SDA	PMK 36/2020
	Total	3.072.369.696,00		

		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.1.a.11	Piutang Pemerintah Lainnya	Transfer Daerah 3.389.783.336,00	3.931.933.883,00

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah berupa Dana Bagi Hasil Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2019 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/09/Pjk-B.Keuda/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/ Kota Se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Keputusan tersebut, Kabupaten Dharmasraya memiliki alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp47.055.986.944,00. Kekurangan salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2019 sebesar Rp3.389.783.336,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.21
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	DBH Tahun 2019		Piutang	
		Alokasi Defenitif	Penerimaan LRA	Tahun 2019	Tahun 2018
1	PKB	10.533.087.123,00	9.338.553.595,00	1.194.533.528,00	834.937.927,00
2	BBNKB	6.229.877.074,00	5.703.444.471,00	526.432.603,00	421.148.730,00
3	PBBKB	19.946.372.781,00	18.288.365.537,00	1.658.007.244,00	1.743.065.348,00
4	PAP	107.712.699,00	96.902.738,00	10.809.961,00	5.665.876,00
5	PAJAK ROKOK	10.238.937.267,00	10.238.937.267,00	0,00	927.116.002,00
Jumlah		47.055.986.944,00	43.666.203.608,00	3.389.783.336,00	3.931.933.883,00

Penerimaan Dana Bagi hasil Provinsi yang telah diterima di Kas Daerah selama Tahun 2019 adalah sebesar sebesar Rp47.598.137.491,00 berasal dari penerimaan tahun 2019 sebesar Rp43.666.203.608,00, penerimaan piutang kurang salur Tahun 2018 atas PKB, BBNKB, PBBKB, dan PAP sebesar Rp3.004.817.881,00 dan kekurangan salur Tahun 2017 atas Pajak Rokok sebesar Rp927.116.002,00. Piutang kurang salur Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2019 adalah sebesar Rp3.389.783.336,00.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.1.a.12 Piutang Lainnya	13.050.752,00	13.050.752,00

Berdasarkan Berita Acara Pembatalan Pelaksanaan Pekerjaan No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017 tanggal 31 Oktober 2017 atas Pekerjaan Turap/Penahan Tebing Ampang Kuranji dengan Nomor Kontrak 610.2/21-PU-PR/PPk-AIR/PJI-PTAK/APBD/VIII-2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp398.773.000,00 telah disetor ke rekening kontraktor sebanyak uang muka 30% yaitu sebesar Rp119.631.900,00 (termasuk PPN dan PPh), pihak kontraktor atas nama CV.Artha Mandiri bersedia mengembalikan uang muka pelaksanaan pekerjaan dengan SPP No.931.DPU-PR/2017 tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp106.581.148,00 diluar PPN dan PPh sebesar Rp13.050.752,00.

CV. Artha Mandiri telah mengembalikan uang muka sebesar Rp106.581.148,00 ke Kas Daerah dengan dua kali penyetotan yaitu tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp90.000.000,00 dan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp16.581.148,00. Masih terdapat sisa piutang sebesar Rp13.050.752,00 yang merupakan kompensasi pajak untuk penggantian pembayaran pajak yang telah terlanjur disetor ke Kas Negara untuk dikompensasi dengan penyetoran ke Kas Daerah oleh CV Artha Mandiri.

Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp1.305.075,20 (13.050.752,00 x 10%).

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.1.a.13 Belanja Dibayar Dimuka	169.315.624,28	225.628.660,29

Belanja Dibayar Dimuka pada Tahun 2019 dan 2018 terdiri dari.

	2019	2018
a) Belanja Jasa Dibayar Dimuka	149.643.493,13	208.204.002,76
b) Belanja Sewa Dibayar Dimuka	19.672.131,15	17.424.657,53
Jumlah	169.315.624,28	225.628.660,29

- a) Belanja Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp149.643.493,13
 Beban Jasa Dibayar Dimuka pada Tahun 2019 merupakan pembayaran premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah sebesar Rp130.321.980,83 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp19.321.512,30.

Tabel 5.2.22
 Belanja Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2019

No	SKPD	Asuransi Dibayar Dimuka 2019			Beban Asuransi
		Total Kontrak	TMT Kontrak	Asuransi dibayar dimuka	
1	Sekretariat Daerah	61.088.750,00	02 April 2019 s.d 02 April 2020	15.522.551,23	45.566.198,77
		15.798.675,00	22 Agustus 2019 s.d 22 Agustus 2020	10.143.957,99	5.654.717,01
		8.816.400,00	15 Februari 2019 s.d 15 Februari 2020	1.111.107,95	7.705.292,05
		6.789.700,00	07 Oktober 2019 s.d 22 07 Oktober 2020	5.212.857,10	1.576.842,90
		107.430.840,00	30 November 2019 s.d 30 November 2020	98.331.506,56	9.099.333,44
2	Sekretariat DPRD	76.039.500,00	02 April 2019 s.d 02 April 2020	19.321.512,30	56.717.987,70
	Jumlah	275.963.865,00		149.643.493,13	126.320.371,87

b) Belanja Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp19.672.131,15

Belanja Sewa Dibayar Dimuka Tahun 2019 berupa sewa atas gedung kantor yang dibayar pada Tahun 2019 dan sampai akhir Tahun 2019 masih terdapat saldo yang masih dapat dinikmati oleh SKPD beberapa bulan ke depan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.23
Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Tahun 2019

NO	SKPD	Belanja dibayar dimuka 2019			Beban Sewa 2019
		Total Kontrak	TMT kontrak	Sewa dibayar dimuka	
1	KUMPERDAG	50.000.000,00	02 April 2019 s.d 02 April 2020	12.431.693,99	37.568.306,01
2	KESBANGPOL	25.000.000,00	15 April 2019 s.d 15 April 2020	7.240.437,16	17.759.562,84
Jumlah		75.000.000,00		19.672.131,15	55.327.868,85

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.1.a.13 Persediaan	37.729.072.702,63	29.120.337.338,00

Akun persediaan digunakan untuk mencatat barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan/digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.2.24
Persediaan Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Persediaan Bahan Habis Pakai		294.244.797,00	213.797.883,00
1	Alat Tulis Kantor	109.177.734,00	68.376.783,00
2	Alat Listrik	1.993.833,00	4.171.500,00
3	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.788.000,00	834.000,00
4	Alat Rumah Tangga	4.641.000,00	0,00
5	Alat Kebersihan	13.204.500,00	5.659.500,00
6	Barang Cetakan	146.639.730,00	134.756.100,00
7	Baju adat Daerah	16.800.000,00	0,00
Persediaan Bahan/Material		11.998.505.096,05	13.702.092.177,00
1	Bahan Baku Bangunan	0,00	4.902.682.900,00
2	Bibit ternak	46.755.000,00	0,00
3	Obat- obatan	5.517.690.860,00	7.501.060.361,00
4	Bahan Kedokteran	469.285.248,00	477.394.753,00
5	Gas Medis	11.814.000,00	4.822.400,00
6	Bahan labor	296.368.174,00	413.425.087,00
7	Bahan material Peternakan/Pertanian/Pekerjaan Umum	5.443.645.008,50	69.661.189,00
8	Bibit Perikanan	0,00	68.410.000,00
9	Bahan Kimia	200.967.147,00	133.181.547,00
10	Bahan Bakar Minyak	11.979.658,55	131.453.940,00
Persediaan Barang Lainnya		25.436.322.809,58	15.204.447.278,00
1	Persediaan barang yang berasal dari BM yang akan diberikan ke masyarakat/pihak ketiga	682.189.314,00	589.271.723,00

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
2	Persediaan yang akan diserahkan ke Masyarakat	17.608.161.126,00	12.469.436.005,00
3	Persediaan yang akan diserahkan ke Pihak ketiga	7.145.972.369,58	2.145.739.550,00
Jumlah		37.729.072.702,63	29.120.337.338,00

Dengan rincian persediaan per SKPD Tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 5.2.25
 Persediaan per SKPD Tahun 2019

No	SKPD	Persediaan Habis Pakai	Persediaan Bahan Material	Persediaan Barang Lainnya			Total Persediaan
				Persediaan barang berasal BM yang akan diberikan pada masyarakat/ pihak ketiga	Persediaan barang akan diberikan kepada Masyarakat	Persediaan barang akan diberikan kepada pihak ketiga	
1	DINAS PENDIDIKAN	642.000,00	70.000,00	-	-	-	712.000,00
2	DINAS KESEHATAN	6.825.000,00	4.508.732.315,00	-	-	-	4.515.557.315,00
3	BLUD PUSKESMAS	5.326.200,00	-	-	-	-	5.326.200,00
4	RSUD	-	-	-	-	-	-
5	BLUD RSUD	25.521.917,00	1.775.374.875,00	-	-	-	1.800.896.792,00
6	DINAS PUPR	2.355.000,00	5.489.841.767,05	653.067.714,00	16.395.143.126,00	7.144.212.369,58	29.684.619.976,63
7	DINAS PERKIMTAN	1.397.280,00	-	29.121.600,00	368.060.000,00	-	398.578.880,00
8	DINAS SATPOL PP & DAMKAR	280.000,00	-	-	-	-	280.000,00
9	DINSOSP3APPKB	1.657.000,00	-	-	-	-	1.657.000,00
10	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	827.000,00	5.761.400,00	-	-	-	6.588.400,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.096.000,00	22.119.614,00	-	844.958.000,00	1.760.000,00	869.933.614,00
12	DISDUKCAPIL	110.411.800,00	-	-	-	-	110.411.800,00
13	DINAS PMD	278.500,00	-	-	-	-	278.500,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	65.342.750,00	-	-	-	-	65.342.750,00
15	DINAS KOMINFO	180.000,00	-	-	-	-	180.000,00
16	DISKUMPERDAG	1.933.750,00	-	-	-	-	1.933.750,00
17	DINAS DPMPSTSP	2.593.600,00	-	-	-	-	2.593.600,00
18	DINAS BUDPARPORA	18.929.500,00	-	-	-	-	18.929.500,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-
20	DINAS PERTANIAN	4.588.000,00	196.605.125,00	-	-	-	201.193.125,00
21	DINAS TRANSNAKER	784.750,00	-	-	-	-	784.750,00
22	INSPEKTORAT	1.552.000,00	-	-	-	-	1.552.000,00
23	BAPPEDA	2.728.850,00	-	-	-	-	2.728.850,00
24	BKD	32.520.300,00	-	-	-	-	32.520.300,00
25	BKPSDM	426.500,00	-	-	-	-	426.500,00
26	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	-	-	-
27	SEKRETARIAT DAERAH	1.979.600,00	-	-	-	-	1.979.600,00
28	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-	-	-
29	SEKRETARIAT DPRD	614.000,00	-	-	-	-	614.000,00
30	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	191.000,00	-	-	-	-	191.000,00
31	KECAMATAN SITIUNG	280.000,00	-	-	-	-	280.000,00
32	KECAMATAN KOTO BARU	362.000,00	-	-	-	-	362.000,00
33	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	571.000,00	-	-	-	-	571.000,00
34	KECAMATAN IX KOTO	228.000,00	-	-	-	-	228.000,00
35	KECAMATAN TIMPEH	94.000,00	-	-	-	-	94.000,00
36	KECAMATAN KOTO SALAK	-	-	-	-	-	-
37	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Persediaan Habis Pakai	Persediaan Bahan Material	Persediaan Barang Lainnya			Total Persediaan
				Persediaan barang berasal BM yang akan diberikan pada masyarakat/ pihak ketiga	Persediaan barang akan diberikan kepada Masyarakat	Persediaan barang akan diberikan kepada pihak ketiga	
38	KECAMATAN KOTO BESAR	547.500,00	-	-	-	-	547.500,00
39	KECAMATAN PADANG LAWEH	-	-	-	-	-	-
40	KECAMATAN TIUMANG	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
41	KESBANGPOL	607.000,00	-	-	-	-	607.000,00
42	BPBD	493.000,00	-	-	-	-	493.000,00
	JUMLAH	294.244.797,00	11.998.505.096,05	682.189.314,00	17.608.161.126,00	7.145.972.369,58	37.729.072.702,63

Nilai Persediaan Tahun 2019 sebesar Rp 37.729.072.702,63 mengalami kenaikan sebesar Rp8.608.735.364,63 atau 29,56% dibanding Tahun 2018 sebesar Rp29.120.337.338,00. Kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2019 terjadi pada persediaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Persediaan Tahun 2019 senilai Rp29.684.619.976,63 mengalami kenaikan sebesar Rp16.222.777.918,63 atau 120,51% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp13.461.842.058,00. Hal ini disebabkan terdapatnya persediaan yang berasal dari belanja barang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada Dinas PUPR per 31 Desember 2019 sebesar Rp24.192.423.210,00 merupakan Belanja Barang yang belum diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga karena masih dalam masa pemeliharaan, direncanakan penyerahan setelah berakhirnya masa pemeliharaan sehingga belum ada Berita Acara Serah Terima Barang per 31 Desember 2019

Rincian Persediaan Barang Lainnya yang akan diberikan kepada masyarakat dan pihak ketiga sebesar Rp25.436.322.809,58 ada pada **Lampiran 14**.

Sementara itu, berdasarkan dari hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan obat-obatan di Dinas Kesehatan per 31 Desember 2019 terdapat 164 item obat-obatan yang sudah kadaluarsa sebesar Rp562.391.468,00.

		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.1.b.1.	Investasi Jangka Panjang	27.452.000.000,00	24.952.000.000,00

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp27.452.000.000,00 merupakan Investasi Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Sumatera Barat (Bank Nagari), PT Balairung Citrajaya Sumbar, dan BPR Pulau Punjung. Adapun perkembangan penyertaan modal pada ketiga *investee* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Nagari			
Saldo Per 31 Desember 2018	Rp	23.352.000.000,00	
Penambahan selama Tahun 2019	Rp	2.500.000.000,00	
Saldo Per 31 Desember 2019	Rp	25.852.000.000,00	

Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Nagari tersebut terdiri dari.

- a) Tahun 2007 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000013 dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,00;

- b) Tahun 2009 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000033 dengan nilai nominal Rp322.000.000,00;
- c) Tahun 2010 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000052 dengan nilai nominal Rp9.678.000.000,00;
- d) Tahun 2012 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000088 dengan nilai nominal Rp3.200.000.000,00 dan Surat Kolektif Saham Nomor A.000102 dengan nilai nominal Rp36.000.000,00;
- e) Tahun 2013 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000118 dengan nilai nominal Rp5.369.000.000,00 dan Surat Kolektif Saham Nomor A.000131 dengan nilai nominal Rp31.000.000,00.
- f) Tahun 2017 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.1427724-1431444 dengan nilai nominal Rp3.716.000.000,00.
- g) Tahun 2019 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000232 dengan nilai nominal Rp2.500.000.000,00

2) Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Balairung Citrajaya Sumbar

Saldo Per 31 Desember 2018	Rp	1.500.000.000,00
Penambahan selama Tahun 2019	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2019	Rp	1.500.000.000,00

PT Balairung Citrajaya Sumbar merupakan BUMD Pemerintah Provinsi Sumater Barat yang bergerak pada bidang usaha hotel. Restoran, dan fasilitas pendukung lainnya. Penyertaan modal pada PT Balairung Citrajaya Sumbar sesuai dengan Surat Saham Gabungan Nomor 012 dengan nilai nominal Rp1.500.000.000,00.

3) Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung

Saldo Per 31 Desember 2018	Rp	100.000.000,00
Penambahan selama Tahun 2019	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2019	Rp	100.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah pada BPR Pulau Punjung pada Tahun 2012 sesuai dengan Surat Saham Biasa Nomor Seri B 0542 dengan nilai nominal Rp100.000.000,00.

V.C.1.c. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Dalam rangka penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah yang berkaitan dengan klasifikasi Aset Tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun demikian, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah maka untuk Laporan Barang Milik Daerah TA 2019 diharuskan untuk menerapkan kodefikasi dan penggolongan berdasarkan peraturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menerbitkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Dengan demikian, perubahan regulasi tersebut berakibat pada perubahan klasifikasi dan penyajian data aset tetap dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Nilai Aset Tetap yang tidak berubah sebagai akibat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.
 - a. Aset Tetap Tanah;
 - b. Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
 - c. Kontruksi Dalam Pengerjaan
2. Nilai Aset Tetap yang berubah sebagai akibat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.
 - a. KIB Peralatan dan Mesin dari sembilan sub KIB menjadi 19 sub KIB;
 - b. KIB Gedung dan Bangunan dari dua sub KIB menjadi empat sub KIB;
 - c. KIB Aset Tetap Lainnya dari empat sub KIB menjadi enam sub KIB;
 - d. Aset Tetap-Rambu-rambu yang semula dicatat pada KIB Gedung dan Bangunan (sub KIB Monumen) pindah ke KIB Peralatan dan Mesin sub KIB Rambu-rambu;
 - e. Aset Tetap-Peralatan Olahraga yang semula dicatat pada KIB Aset Tetap Lainnya pindah ke KIB Peralatan dan Mesin sub KIB Peralatan Olahraga; dan
 - f. Saldo Aset Lain-Lain berubah mengikut pada perpindahan aset rambu-rambu dan alat olahraga.

Pelaksanaan Peraturan Bupati di atas efektif dilaksanakan pada 31 Desember 2019 dan seterusnya, sehingga khusus Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya TA. 2019 dijelaskan dengan urutan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018, penambahan dan pengurangan saldo Aset Tetap (versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007), Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 (versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007), koreksi penambahan/pengurangan (versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016) dan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 (versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016).

Rekapitulasi Saldo Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2019 versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 serta saldo per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2019 (Permendagri 108)	31 Desember 2019 (Permendagri 17)	31 Desember 2018	Tren
	Rp.	Rp.	Rp.	%
ASET TETAP	2.907.550.271.397,80	2.907.190.078.108,80	2.697.852.438.097,72	107.77%
a. Tanah	650.764.357.447,00	650.764.357.447,00	655.393.508.247,00	99.29%
b. Peralatan dan Mesin	260.565.316.331,44	258.412.070.501,44	222.496.461.150,44	117.11%
c. Gedung dan Bangunan	620.623.140.974,09	621.581.032.224,09	581.063.337.161,28	106.81%
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.215.452.774.013,34	1.215.452.774.013,34	1.147.788.515.477,00	105.90%
e. Aset Tetap Lainnya	72.876.409.916,00	73.711.571.207,00	54.193.283.668,00	134.47%
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	87.268.272.715,93	87.268.272.715,93	36.917.332.394,00	236.39%
Akumulasi Penyusutan	(776.317.976.515,57)	(775.933.868.242,50)	(607.306.006.626,54)	128.01%
Nilai Buku Aset Tetap	2.131.232.294.882,23	2.131.256.209.866,30	2.090.546.431.471,18	101.89%

Dari tabel diatas jika dibandingkan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 (versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016) terjadi kenaikan sebesar Rp209.697.833.300,08.

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan koreksi terkait penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 berdasarkan jenis aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.26
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Berdasarkan Jenis Aset Tetap

KIB/Sub KIB	Permendagri Nomor 17 Tahun 2007				Permendagri Nomor 108 Tahun 2016	
	Saldo Aset Tetap Tahun 2018	Penambahan Aset Tetap Tahun 2019	Pengurangan Aset Tetap Tahun 2019	Saldo Aset Tetap Tahun 2019	Penambahan/ Pengurangan/ Reklas Aset Tetap	Saldo Aset Tetap Tahun 2019
ASET TETAP	2.697.852.438.097,72	286.582.732.772,91	77.245.092.761,83	2.907.190.078.108,80	360.193.289,00	2.907.550.271.397,80
Tanah	655.393.508.247,00	18.321.687.762,00	22.950.838.562,00	650.764.357.447,00	-	650.764.357.447,00
Tanah	655.393.508.247,00	18.321.687.762,00	22.950.838.562,00	650.764.357.447,00	-	650.764.357.447,00
Peralatan dan Mesin	222.496.461.150,44	48.846.198.314,00	12.930.588.963,00	258.412.070.501,44	2.153.245.830,00	260.565.316.331,44
Alat Besar	24.602.016.276,00	1.529.917.214,00	9.367.732,00	26.122.565.758,00	676.237.923,00	26.798.803.681,00
Alat Angkut	60.343.416.993,00	11.661.831.700,00	5.392.507.569,00	66.612.741.124,00	-	66.612.741.124,00
Alat Bengkel	4.303.870.067,00	3.595.291.448,00	183.835.250,00	7.715.326.265,00	(163.294.510,00)	7.552.031.755,00
Alat Pertanian	1.332.957.279,00	125.480.400,00	19.024.000,00	1.439.413.679,00	13.598.775,00	1.453.012.454,00
Alat Kantor/RT	69.682.970.210,50	14.434.246.970,00	2.908.584.694,00	81.208.632.486,50	(34.212.046.923,00)	46.996.585.563,50
Alat Studio	8.897.461.340,00	2.937.482.340,00	361.798.280,00	11.473.145.400,00	6.402.650.376,00	17.875.795.776,00
Alat Kedokteran	33.219.504.542,74	10.689.399.812,00	313.932.330,00	43.594.972.024,74	(2.826.765.395,00)	40.768.206.629,74
Alat Laboratorium	19.776.535.212,20	3.684.798.430,00	3.741.539.108,00	19.719.794.534,20	136.551.972,00	19.856.346.506,20
ALAT PERSENJATAAN	337.729.230,00	187.750.000,00	-	525.479.230,00	(467.598.890,00)	57.880.340,00
KOMPUTER	-	-	-	-	29.893.754.642,00	29.893.754.642,00
ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-
ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-
ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-
ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	546.912.030,00	546.912.030,00
ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-
RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	1.722.751.150,00	1.722.751.150,00
PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	430.494.680,00	430.494.680,00
Gedung dan Bangunan	581.063.337.161,28	68.665.991.770,81	28.148.296.708,00	621.581.032.224,09	(957.891.250,00)	620.623.140.974,09
Bangunan Gedung	574.486.884.097,28	66.451.991.320,81	28.148.296.708,00	612.790.578.710,09	(23.086.575.086,09)	589.704.003.624,00
Monumen	6.576.453.064,00	2.214.000.450,00	-	8.790.453.514,00	(2.348.239.146,00)	6.442.214.368,00
BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	3.102.481.906,00	3.102.481.906,00
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-	-	-	21.374.441.076,09	21.374.441.076,09
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.147.788.515.477,00	68.220.922.202,34	556.663.666,00	1.215.452.774.013,34	-	1.215.452.774.013,34
Jalan dan Jembatan	930.998.910.036,00	57.779.999.838,00	490.462.000,00	988.288.447.874,00	-	988.288.447.874,00

KIB/Sub KIB	Permendagri Nomor 17 Tahun 2007				Permendagri Nomor 108 Tahun 2016	
	Saldo Aset Tetap Tahun 2018	Penambahan Aset Tetap Tahun 2019	Pengurangan Aset Tetap Tahun 2019	Saldo Aset Tetap Tahun 2019	Penambahan/ Pengurangan/ Reklas Aset Tetap	Saldo Aset Tetap Tahun 2019
Bangunan Air/Irigasi	162.824.870.967,00	8.514.146.636,34	13.260.000,00	171.325.757.603,34	-	171.325.757.603,34
Instalasi	28.050.143.115,00	709.656.028,00	2.250.000,00	28.757.549.143,00	-	28.757.549.143,00
Jaringan	25.914.591.359,00	1.217.119.700,00	50.691.666,00	27.081.019.393,00	-	27.081.019.393,00
Aset Tetap Lainnya	54.193.283.668,00	20.040.253.376,00	521.965.837,00	73.711.571.207,00	(835.161.291,00)	72.876.409.916,00
Buku Perpustakaan	21.541.810.126,00	9.215.499.561,00	472.968.145,00	30.284.341.542,00	-	30.284.341.542,00
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLA HRAGA	2.337.488.871,00	1.254.462.590,00	36.915.292,00	3.555.036.169,00	(835.161.291,00)	2.719.874.878,00
HEWAN	228.712.000,00	-	3.502.400,00	225.209.600,00	(65.552.000,00)	159.657.600,00
BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-	-
TANAMAN	-	-	-	-	65.552.000,00	65.552.000,00
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Renovasi/ Pemugaran	30.085.272.671,00	9.570.291.225,00	8.580.000,00	39.646.983.896,00	-	39.646.983.896,00
KDP	36.917.332.394,00	62.487.679.347,76	12.136.739.025,83	87.268.272.715,93	-	87.268.272.715,93
Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.917.332.394,00	62.487.679.347,76	12.136.739.025,83	87.268.272.715,93	-	87.268.272.715,93
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(607.306.006.626,54)	177.643.117.511,96	9.015.255.896,00	(775.933.868.242,50)	(384.108.273,07)	(776.317.976.515,57)
Nilai Buku	2.090.546.431.471,18	464.225.850.284,87	86.260.348.657,83	2.131.256.209.866,30	(23.914.984,07)	2.131.232.294.882,23

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan reklas terkait penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.27
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tahun 2019

Saldo 31 Desember 2018		2.697.852.438.097,72
Penambahan 2019		286.582.732.772,91
1	Belanja Modal Menjadi Aset	209.672.800.883,40
2	Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset	200.412.728,00
3	Hibah Pusat Menjadi Aset	1.007.600.068,00
4	Hibah Masyarakat Menjadi Aset	40.700.000,00
5	Dana Bos Menjadi Aset	5.151.889.612,00
6	Dana BLUD Menjadi Aset	1.939.215.958,00
7	Honor Pokja Menjadi Aset	174.196.021,83
8	Hutang 2019	2.759.531.718,00
9	Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	4.306.957.000,00
10	Penilaian Hibah Provinsi	167.085.000,00
11	Penilaian Hibah Masyarakat	1.350.000.000,00
12	Belanja Modal BOSDA	40.627.000,00
13	Kurang Catat	400.864.100,00
14	Mutasi Antar SKPD Menambah Aset	41.549.250.410,00
15	Mutasi Honor Pokja Antar SKPD	168.886.021,82
16	Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	215.318.000,00
17	BOP PAUD	3.500.000,00
18	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	12.742.874.524,00
19	Persediaan 2018 menjadi aset	204.615.055,00
20	BOS Afirmasi	1.718.971.000,00
21	BOS Kinerja	157.921.000,00
22	Retensi	2.609.516.672,86
Pengurangan 2019		77.245.092.761,83
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	12.742.874.524,00
2	Pengurangan Mutasi Antar SKPD	41.549.250.410,00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	168.886.021,83
4	Pengurangan Koreksi Pencatatan	1.850.078.304,00
5	Lelang dan Penjualan	772.961.400,00
6	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	6.113.649.205,00
7	Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal	14.047.392.897,00
Saldo 31 Desember 2019 (17)		2.907.190.078.108,80
Penambahan/Pengurangan Koreksi Aset Tetap		360.193.289,00
Saldo Aset Tetap 2019		2.907.550.271.397,80

Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.28
Penambahan dan Pengurangan serta Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan 2018		607.306.006.626,54
Penambahan Penyusutan 2019		177.643.117.511,96
1	Penambahan Penyusutan pindah SKPD	2.191.508.894,00
2	Penambahan Penyusutan Koreksi	-
3	Penyusutan Semester I	73.780.842.549,98
4	Penyusutan Semester II	101.670.766.067,98
Pengurangan Penyusutan 2019		9.015.255.896,00
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar SKPD	2.191.508.894,00
2	Pengurangan Penyusutan Reklas	3.616.562.232,00
3	Pengurangan Penyusutan Lelang dan Penjualan	583.078.486,00
4	Pengurangan Penyusutan Hibah ke Instansi Vertikal	2.492.277.174,00
5	Pengurangan Penyusutan Koreksi	131.829.110,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 (17)		775.933.868.242,50
Nilai Buku 31 Desember 2019 (17)		2.131.256.209.866,30
Penambahan/Pengurangan Koreksi Penyusutan		384.108.273,07
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019		776.317.976.515,57
Nilai Buku 31 Desember 2019		2.131.232.294.882,23

Rincian Aset Tetap menurut Jenis dan Perangkat Daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

V.C.1.c.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap pakai. Adapun saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

	31 Desember 2019 Permendagri (17) /(108) Rp	31 Desember 2018 Rp	Tren %
Tanah	650,764,357,447.00	655,393,508,247.00	99.29%

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp650.764.357.447,00 atau turun sebesar Rp4.629.150.800,00 dibandingkan saldo tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp655.393.508.247,00. Penyebab turunnya saldo tanah secara signifikan adalah karena pelaksanaan hibah kepada instansi vertikal.

Adapun Penambahan dan pengurangan nilai tanah per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2.29
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah per SKPD

No.	Nama SKPD Baru	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019 (17/108)
1	Sekretariat DPRD	2,500,000,000.00	1,214,125,740.00	-	3,714,125,740.00
2	Sekretariat Daerah	433,886,330,125.00	1,217,550,000.00	22,247,472,400.00	412,856,407,725.00
3	Kec. Pulau Punjung	987,500,000.00	-	-	987,500,000.00
4	Kec. Sitiung	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
5	Kec. Koto Baru	1,488,000,000.00	-	-	1,488,000,000.00
6	Kec. Sngai Rumbai	1,120,000,000.00	-	-	1,120,000,000.00
7	Kec. IX Koto	17,875,000.00	-	-	17,875,000.00
8	Kec. Timpeh	14,000,000.00	400,000,000.00	14,000,000.00	400,000,000.00
9	Kec. Padang Laweh	20,020,000.00	-	-	20,020,000.00
10	Kec Tiumang	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	461,087,771.00	-	-	461,087,771.00
12	Kec Koto Salak	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00
13	Kec. Asam Jujuhan	71,500,000.00	-	-	71,500,000.00
14	Dinas PUPR	160,639,321,767.00	1,848,597,362.00	502,982,740.00	161,984,936,389.00
15	Dinas PERKIMTAN	-	1,299,185,160.00	-	1,299,185,160.00
16	Dinas Perhubungan	2,993,200,000.00	2,968,200,000.00	-	5,961,400,000.00
17	Dinas Kesehatan	2,536,097,100.00	303,875,000.00	-	2,839,972,100.00
18	RSUD	4,000,000,000.00	6,683,462,500.00	-	10,683,462,500.00
19	Dinas Pendidikan	24,160,160,334.00	186,400,000.00	-	24,346,560,334.00
20	Dinas BUDPARPORA	901,793,010.00	213,542,000.00	-	1,115,335,010.00
21	Dinas TRANSNAKER	2,121,000,000.00	-	-	2,121,000,000.00
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00

No.	Nama SKPD Baru	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019 (17/108)
24	Dinas PMD	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	9,764,412,258.00	1,986,750,000.00	186,383,422.00	11,564,778,836.00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	1,281,870,882.00	-	-	1,281,870,882.00
27	Dinas KUMPERDAG	1,176,340,000.00	-	-	1,176,340,000.00
28	BKD	-	-	-	-
29	DPMTSP	-	-	-	-
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-
31	BAPPEDA	-	-	-	-
32	DLH	4,028,000,000.00	-	-	4,028,000,000.00
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-
36	BKPSDM	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-
Jumlah		655,393,508,247.00	18,321,687,762.00	22,950,838,562.00	650,764,357,447.00

Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap tanah berdasarkan asal perolehan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.30
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Berdasarkan Asal Perolehan

Saldo 31 Desember 2018		655,393,508,247
Penambahan 2019		18,321,687,762
1	Belanja Modal Menjadi Aset	826,844,862.00
2	Honor Pokja Menjadi Aset	2,550,000.00
3	Hutang 2019	278,677,000.00
4	Penilaian Kurang Catat	26,400,000.00
5	Penilaian Hibah Masyarakat	1,350,000,000.00
6	Mutasi Antar SKPD Menambah Aset	15,442,522,900.00
7	Mutasi Honor Pokja Antar SKPD	2,550,000.00
8	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	392,143,000.00
Pengurangan 2019		22,950,838,562
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	253,000,000.00
2	Pengurangan Mutasi Antar SKPD	15,442,522,900.00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	2,550,000.00
4	Pengurangan Koreksi Pencatatan	1,707,200,000.00
5	Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal	5,545,565,662.00
Saldo Tanah 31 Desember 2019 (17)/(108)		650,764,357,447

Rincian penambahan aset tetap tanah sebesar Rp18.321.687.762,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.31
Penambahan Aset Tetap Tanah per SKPD

No	Nama SKPD/asal penambahan	Nilai
1	Belanja Modal Menjadi Aset	826,844,862.00
-	Dinas PUPR	787,044,862.00
-	Dinas PERKIMTAN	39,800,000.00
2	Honor Pokja Menjadi Aset	2,550,000.00
-	Sekretariat Daerah	2,550,000.00
3	Hutang 2019	278,677,000.00
-	Dinas PUPR	278,677,000.00
4	Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	26,400,000.00
-	Dinas Pendidikan	26,400,000.00
5	Penilaian Hibah Masyarakat Menjadi Aset	1,350,000,000.00
-	Sekretariat Daerah	1,215,000,000.00
-	Dinas PERKIMTAN	135,000,000.00
6	Mutasi Antar SKPD Menambah Aset	15,442,522,900.00
-	Sekretariat DPRD	821,982,740.00
-	Kec. Timpeh	400,000,000.00
-	Dinas PUPR	780,325,500.00
-	Dinas PERKIMTAN	1,124,385,160.00
-	Dinas Perhubungan	2,968,200,000.00
-	Dinas Kesehatan	303,875,000.00
-	RSUD	6,683,462,500.00
-	Dinas Pendidikan	160,000,000.00
-	Dinas BUDPARPORA	213,542,000.00
-	Dinas Pertanian	1,986,750,000.00

No	Nama SKPD/asal penambahan	Nilai
7	Mutasi Honor Pokja Antar SKPD	2,550,000.00
-	Dinas PUPR	2,550,000.00
8	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	392,143,000.00
-	Sekretariat DPRD	392,143,000.00
Jumlah Penambahan Aset Tetap Tanah		18,321,687,762.00

Penambahan aset tetap tanah yang berasal dari utang senilai Rp278.677.000,00 berasal dari Dinas PUPR dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.32
Penambahan Aset Tetap Tanah dari Utang

No	Uraian	Jumlah
1	Penataan Kawasan (Land Scape RSUD)	264.146.000,00
2	Pengawasan Penataan Kawasan (Land Scape RSUD)	14.531.000,00
Jumlah		278.677.000,00

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan penilaian untuk menentukan nilai neraca melalui tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/72/KPTS-BUP/2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019. Adapun yang dilakukan penilaian adalah aset yang berasal dari kurang catat tanah SD Negeri 3 Sitiung seluas 5.000 m² dengan nilai Rp26.4000.000,00 dan hibah tanah dari masyarakat seluas 155.000 m² (15,5 Ha) dengan nilai Rp1.350.000.000,00. Berikut rincian hasil penilaian aset tetap tanah yang berasal dari hibah masyarakat.

Tabel 5.2.33
Rincian Penambahan Aset Tetap Tanah dari Penilaian Hibah Masyarakat

No	Nama SKPD	Nilai Perolehan (Rp)	Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Alamat	Ket
1.	Dinas Perkimtan					
	Tanah untuk Pembangunan Rusunawa Sungai Rumbai	135.000.000,00	5.000	2019	Jorong Talago Permai, Nagari Sungai Rumbai kec.Sungai Rumbai	Rusunawa Sungai Rumbai
2.	Sekretariat Daerah					
	Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan (Sekolah)	715.000.000,00	100.000	2019	Nagari Tebing Tinggi Kec.Pulau Punjung	Bumi Perkemahan Pramuka
	Tanah kosong lainnya	500.000.000,00	50,000	2019	Jorong Tanjung Pakis Alam,Nagari Koto Ranah Kec.Koto Besar	Fasilitas Umum
Jumlah		1.350.000.000,00	155.000			

Pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp22.950.838.562,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.34
Pengurangan Aset Tetap Tanah

No	Nama SKPD/Asal Perolehan	Nilai
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	253,000,000.00
-	Dinas PUPR	253,000,000.00
2	Pengurangan Mutasi Antar SKPD	15,442,522,900.00
-	Sekretariat Daerah	15,191,030,000.00
-	Dinas PUPR	249,982,740.00
-	Dinas Pertanian	1,510,160.00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	2,550,000.00
-	Sekretariat Daerah	2,550,000.00
4	Pengurangan Koreksi / Pencatatan	1,707,200,000.00
-	Sekretariat Daerah	1,693,200,000.00
-	Kec. Timpeh	14,000,000.00
5	Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal	5,545,565,662.00
-	Sekretariat Daerah	5,360,692,400.00
-	Dinas Pertanian	184,873,262.00
Jumlah Pengurangan Aset Tetap Tanah		22,950,838,562.00

Dalam rangka mewujudkan dan mendekatkan pelayanan umum kepada masyarakat maka di Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memberikan hibah aset tetap tanah kepada beberapa instansi vertikal dan Perguruan Tinggi Negeri dengan total luas 55.961 m² (5,5961 Ha) dan nilai perolehan Rp5.545.565.662,00 yang digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung kantor instansi vertikal serta perkuliahan bagi Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya). pelaksanaan hibah ini dilakukan pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pertanian dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.35
Hibah Aset Tetap Tanah pada Sekretariat Daerah

No	Nama Instansi	Luas (M2)	Lokasi	Tahun Perolehan	Penggunaan	Nilai Perolehan	Penerima Hibah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5,761	Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung	2009	Pembangunan Pengadilan Negeri Pulau Punjung	964,967,500	Mahkamah Agung
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5,000	Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung	2009	Pembangunan Pengadilan Agama Pulau Punjung	837,500,000	Mahkamah Agung
3	Tanah yang sudah diperuntukkan	16,581	Jorong Sungai Kambut Nagari IV Koto Pulau Punjung	2008	Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Dharmasraya	1,954,899,900	Kejaksaan Negeri Dharmasraya
4	Tanah yang sudah diperuntukkan	2,500	Jorong Pinang Jaya Kenagariaan Tabek Kec. Timpeh	2005	Pembangunan Kantor KUA Timpeh	6,125,000	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5,000	Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru	2015	Pembangunan Kantor Loka POM Dharmasraya	798,600,000	BPOM RI
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5,000	Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru	2015	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Koto Baru	798,600,000	Kantor Perwakilan Dirjen Pajak Sumbar dan Jambi
Jumlah		39,842				5,360,692,400	

Tabel 5.2.36
Hibah Aset Tetap Tanah pada Dinas Pertanian

No	Nama Instansi	Luas (M2)	Lokasi	Tahun Perolehan	Penggunaan	Nilai Perolehan	Penerima Hibah
1	Tanah Kebun	1,500.00	Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung	2018	Pembangunan Kantor KUA Sitiung	113,262	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,619.00	Km 4 Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung	2005	Pembangunan Kampus UNAND III Dharmasraya	184,760,000	Kementerian Riset dan Dikti RI
Jumlah		6,119.00				184,873,262	

V.A.1.c.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capilization trheshold*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu Rp1.000.000,00.

Terkait penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 maka saldo aset tetap peralatan mesin mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh.

1. Bertambahnya sub KIB peralatan mesin dari sembilan menjadi 19;
2. Reklas aset rambu-rambu dari KIB Bangunan dan Gedung ke KIB Peralatan dan Mesin;
3. Reklas aset peralatan olahraga dari KIB Aset Tetap Lainnya ke KIB Peralatan dan Mesin;
4. Koreksi nilai penyusutan sebagai akibat reklas aset rambu-rambu dan peralatan olahraga.

Perubahan sub KIB pada Peralatan Mesin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.37
Perubahan Sub KIB Peralatan Mesin terkait
PenerapanPermendagri Nomor 108 Tahun 2016

No	Nama Sub KIB Peralatan Mesin versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007	Nama Sub KIB Peralatan Mesin versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016
1	Alat Besar	Alat Besar
2	Alat Angkut	Alat Angkut
3	Alat Bengkel	Alat Bengkel
4	Alat Pertanian	Alat Pertanian
5	Alat Kantor/RT	Alat Kantor/RT
6	Alat Studio	Alat Studio
7	Alat Kedokteran	Alat Kedokteran
8	Alat Laboratorium	Alat Laboratorium
9	Alat Persenjataan Keamanan	Alat Persenjataan
10		Komputer
11		Alat Eksplorasi
12		Alat Pengeboran
13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
14		Alat bantu eksplorasi
15		Alat keselamatan kerja
16		Alat peraga
17		Peralatan proses/Produksi
18		Rambu-rambu
19		Peralatan Olahraga

Nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016, dan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2019 (Permendagri 108) Rp	31 Desember 2019 (Permendagri 17) Rp	31 Desember 2018 Rp	Tren (108) %
Peralatan dan Mesin	260.565.316.331,44	258,412,070,501.44	222,496,461,150.44	117.11%
Akumulasi Penyusutan	(156.940.942.950,57)	(156,453,249,612.50)	(136,810,434,429.54)	114.71%
Nilai Buku	103.624.373.380,87	101,958,820,888.94	85,686,026,720.90	120,93%

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 versi Permendagri 108 Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesarRp17.938.346.659,97,00.

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016, dan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Sub KIB Peralatan Mesin	31 Desember 2019 (108) Rp	31 Desember 2019 (17) Rp	31 Desember 2018 Rp	Tren (108) %
Alat Besar	26.798.803.681,00	26.122.565.758,00	24,602,016,276.00	108.93%
Alat Angkut	66.612.741.124,00	66.612.741.124,00	60,343,416,993.00	110.39%
Alat Bengkel	7.552.031.755,00	7.715.326.265,00	4,303,870,067.00	175.47%
Alat Pertanian	1.453.012.454,00	1.439.413.679,00	1,332,957,279.00	109.01%
Alat Kantor/RT	46.996.585.563,50	81.208.632.486,50	69,682,970,210.50	67.44%
Alat Studio	17.875.795.776,00	11.473.145.400,00	8,897,461,340.00	200.91%
Alat Kedokteran	40.768.206.629,74	43.594.972.024,74	33,219,504,542.74	122.72%
Alat Laboratorium	19.856.346.506,20	19.719.794.534,20	19,776,535,212.20	100.40%
Alat persenjataan	57.880.340,00	525.479.230,00	337,729,230.00	17.14%

keamanan/alat persenjataan				
Komputer	29.893.754.642,00	-	-	
Alat eksplorasi	-	-	-	
Alat pengeboran	-	-	-	
Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	-	-	-	
Alat bantu eksplorasi	-	-	-	
Alat keselamatan kerja	546.912.030,00	-	-	
Alat peraga	-	-	-	
Peralatan proses/produksi	-	-	-	
Rambu - rambu	1.722.751.150,00	-	-	
Peralatan olah raga	430.494.680,00	-	-	
Akumulasi Penyusutan	(156.940.942.950,57)	(156.453.249.612,50)	(136,810,434,429.54)	114.71%
Nilai Buku	103,624,373,380.87	101,958,820,888.94	85,686,026,720.90	120.93%

Rincian penambahan, pengurangan dan koreksi penambahan/pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016, dan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.38
Penambahan, Pengurangan dan Koreksi Penambahan/Pengurangan Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019 (17)	Penambahan/Pengurangan Reklas (108)	Saldo 31 Desember 2019 (108)
1	Sekretariat DPRD	11,345,423,479.00	1,100,355,200.00	467,302,000.00	11,978,476,679.00	-	11,978,476,679.00
2	Sekretariat Daerah	27,066,896,652.00	4,640,799,020.00	3,542,987,089.00	28,164,708,583.00	-	28,164,708,583.00
3	Kec. Pulau Punjung	632,607,825.00	-	-	632,607,825.00	-	632,607,825.00
4	Kec. Sitiung	327,327,400.00	277,172,365.00	90,000,000.00	514,499,765.00	-	514,499,765.00
5	Kec. Koto Baru	342,025,136.00	308,572,608.00	90,000,000.00	560,597,744.00	-	560,597,744.00
6	Kec. Sungai Rumbai	384,325,010.00	256,947,365.00	90,000,000.00	551,272,375.00	-	551,272,375.00
7	Kec. IX Koto	558,346,178.00	28,349,625.00	-	586,695,803.00	-	586,695,803.00
8	Kec. Timpeh	403,389,475.00	10,279,500.00	29,772,500.00	383,896,475.00	-	383,896,475.00
9	Kec. Padang Laweh	365,869,010.00	34,967,200.00	-	400,836,210.00	-	400,836,210.00
10	Kec. Tiumang	411,232,425.00	30,000,000.00	-	441,232,425.00	-	441,232,425.00
11	Kec. Koto Besar	359,234,166.00	267,472,365.00	157,950,000.00	468,756,531.00	-	468,756,531.00
12	Kec. Koto Salak	468,769,925.00	64,467,200.00	-	533,237,125.00	-	533,237,125.00
13	Kec. Asam Jujuhan	550,043,625.00	26,360,000.00	3,500,000.00	572,903,625.00	-	572,903,625.00
14	Dinas PUPR	31,045,717,931.00	799,550,313.00	25,750,000.00	31,819,518,244.00	-	31,819,518,244.00
15	Dinas Perkimtan	982,940,200.00	217,603,500.00	-	1,200,543,700.00	-	1,200,543,700.00
16	Dinas Perhubungan	1,940,415,226.00	624,318,000.00	-	2,564,733,226.00	1,722,751,150.00	4,287,484,376.00
17	Dinas Kesehatan	30,772,053,530.14	11,543,740,215.00	21,210,000.00	42,294,583,745.14	-	42,294,583,745.14
18	RSUD	26,443,773,286.60	10,306,867,133.00	-	36,750,640,419.60	-	36,750,640,419.60
19	Dinas Pendidikan	28,898,457,267.00	7,903,677,689.00	4,357,743,309.00	32,444,391,647.00	430,494,680.00	32,874,886,327.00
20	Disbuparpora	932,514,501.00	184,691,000.00	-	1,117,205,501.00	-	1,117,205,501.00
21	Disnakertrans	918,434,642.00	61,070,000.00	193,500,000.00	786,004,642.00	-	786,004,642.00
22	DSP3AP2KB	3,011,995,080.00	715,785,000.00	990,070,000.00	2,737,710,080.00	-	2,737,710,080.00
23	Disdukcapil	1,919,218,305.00	1,084,059,137.00	-	3,003,277,442.00	-	3,003,277,442.00
24	Dinas PMD	1,065,869,800.00	39,700,000.00	16,200,000.00	1,089,369,800.00	-	1,089,369,800.00
25	Dinas Pertanian	8,495,723,676.00	240,195,000.00	2,214,315,485.00	6,521,603,191.00	-	6,521,603,191.00
26	Dinas Pangan & Perikanan	4,946,425,447.50	23,710,000.00	-	4,970,135,447.50	-	4,970,135,447.50
27	Diskumperdag	9,712,621,902.20	5,311,020,687.00	-	15,023,642,589.20	-	15,023,642,589.20
28	BKD	4,323,031,010.00	403,225,000.00	177,400,000.00	4,548,856,010.00	-	4,548,856,010.00
29	DPMPSTSP	931,775,092.00	206,689,999.00	-	1,138,465,091.00	-	1,138,465,091.00
30	Inspektorat Daerah	1,226,840,781.00	157,950,000.00	-	1,384,790,781.00	-	1,384,790,781.00
31	Bappeda	1,617,682,214.00	106,192,728.00	6,000,000.00	1,717,874,942.00	-	1,717,874,942.00
32	DLH	6,165,702,087.00	127,776,000.00	138,597,000.00	6,154,881,087.00	-	6,154,881,087.00
33	Kankesbangpol	243,682,000.00	15,500,000.00	-	259,182,000.00	-	259,182,000.00
34	Dinas Satpol PP dan Damkar	6,224,624,221.00	275,225,875.00	3,500,000.00	6,496,350,096.00	-	6,496,350,096.00

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019 (17)	Penambahan/Pengurangan Reklas (108)	Saldo 31 Desember 2019 (108)
35	BPBD	2,841,996,350.00	251,628,000.00	136,830,000.00	2,956,794,350.00	-	2,956,794,350.00
36	BKPSDM	1,064,379,131.00	46,450,000.00	-	1,110,829,131.00	-	1,110,829,131.00
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1,492,066,495.00	529,245,590.00	51,961,580.00	1,969,350,505.00	-	1,969,350,505.00
38	Dinas Kominfo	2,063,030,669.00	624,585,000.00	126,000,000.00	2,561,615,669.00	-	2,561,615,669.00
Jumlah		222,496,461,150.44	48,846,198,314.00	12,930,588,963.00	258,412,070,501.44	2,153,245,830.00	260,565,316,331.44

Rincian nilai buku aset tetap peralatan mesin per SKPD per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.39
Nilai Buku Aset Tetap Peralatan Mesin per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007

No	Nama SKPD Lama	Saldo 31 Desember 2019	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 (17)	Nilai Buku 31 Desember 2019 (17)
1	Sekretariat DPRD	11,978,476,679.00	6,802,760,461.00	1,373,282,844.00	273,176,165.00	7,902,867,140.00	4,075,609,539.00
2	Sekretariat Daerah	28,164,708,583.00	15,161,967,463.00	4,119,137,860.00	873,593,044.00	18,407,512,279.00	9,757,196,304.00
3	Kec. Pulau Punjung	632,607,825.00	435,897,195.00	59,690,057.00	-	495,587,252.00	137,020,573.00
4	Kec. Sitiung	514,499,765.00	268,589,875.00	35,780,153.00	90,000,000.00	214,370,028.00	300,129,737.00
5	Kec. Koto Baru	560,597,744.00	248,498,721.00	33,651,328.00	65,357,143.00	216,792,906.00	343,804,838.00
6	Kec. Sungai Rumbai	551,272,375.00	348,300,970.00	26,184,172.00	90,000,000.00	284,485,142.00	266,787,233.00
7	Kec. IX Koto	586,695,803.00	471,620,811.00	29,977,435.00	-	501,598,246.00	85,097,557.00
8	Kec. Timpeh	383,896,475.00	377,764,955.00	14,182,447.00	29,772,500.00	362,174,902.00	21,721,573.00
9	Kec. Padang Laweh	400,836,210.00	320,232,190.00	26,596,282.00	-	346,828,472.00	54,007,738.00
10	Kec. Tiumang	441,232,425.00	340,450,511.00	28,754,913.00	-	369,205,424.00	72,027,001.00
11	Kec. Koto Besar	468,756,531.00	320,456,935.00	34,300,146.00	157,950,000.00	196,807,081.00	271,949,450.00
12	Kec. Koto Salak	533,237,125.00	429,707,813.00	31,794,371.00	-	461,502,184.00	71,734,941.00
13	Kec. Asam Jujuhan	572,903,625.00	516,128,605.00	30,544,312.00	1,516,667.00	545,156,250.00	27,747,375.00
14	Dinas PUPR	31,819,518,244.00	23,898,599,582.00	1,334,266,115.00	15,020,835.00	25,217,844,862.00	6,601,673,382.00
15	Dinas Perkimtan	1,200,543,700.00	597,793,954.00	148,231,297.00	-	746,025,251.00	454,518,449.00
16	Dinas Perhubungan	2,564,733,226.00	1,564,139,233.00	226,197,668.00	-	1,790,336,901.00	774,396,325.00
17	Dinas Kesehatan	42,294,583,745.14	18,720,788,159.04	4,666,719,409.96	21,210,000.00	23,366,297,569.00	18,928,286,176.14
18	RSUD	36,750,640,419.60	14,402,736,845.00	4,059,538,501.00	-	18,462,275,346.00	18,288,365,073.60
19	Dinas Pendidikan	32,444,391,647.00	15,425,466,322.00	4,442,103,648.00	3,360,448,355.00	16,507,121,615.00	15,937,270,032.00
20	Disbuparpora	1,117,205,501.00	495,697,604.00	159,308,402.00	-	655,006,006.00	462,199,495.00
21	Disnakertrans	786,004,642.00	789,332,264.00	75,995,999.00	188,395,833.00	676,932,430.00	109,072,212.00
22	DSP3AP2KB	2,737,710,080.00	1,815,615,714.00	279,545,003.00	25,007,085.00	2,070,153,632.00	667,556,448.00
23	Disdukcapil	3,003,277,442.00	1,149,446,281.00	311,187,068.00	-	1,460,633,349.00	1,542,644,093.00

No	Nama SKPD Lama	Saldo 31 Desember 2019	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 (17)	Nilai Buku 31 Desember 2019 (17)
24	Dinas PMD	1,089,369,800.00	913,214,851.00	59,023,366.00	12,693,750.00	959,544,467.00	129,825,333.00
25	Dinas Pertanian	6,521,603,191.00	6,835,695,211.00	617,249,019.00	2,169,975,633.00	5,282,968,597.00	1,238,634,594.00
26	Dinas Pangan & Perikanan	4,970,135,447.50	3,968,489,816.50	429,767,895.00	-	4,398,257,711.50	571,877,736.00
27	Diskumperdag	15,023,642,589.20	939,690,067.00	1,323,809,547.00	-	2,263,499,614.00	12,760,142,975.20
28	BKD	4,548,856,010.00	2,726,409,847.00	669,855,258.00	174,833,333.00	3,221,431,772.00	1,327,424,238.00
29	DPMPSTP	1,138,465,091.00	781,222,921.00	185,248,389.00	-	966,471,310.00	171,993,781.00
30	Inspektorat Daerah	1,384,790,781.00	905,363,706.00	312,826,644.00	-	1,218,190,350.00	166,600,431.00
31	Bappeda	1,717,874,942.00	955,202,599.00	234,992,781.00	3,000,000.00	1,187,195,380.00	530,679,562.00
32	DLH	6,154,881,087.00	4,389,594,588.00	464,805,253.00	115,497,608.00	4,738,902,233.00	1,415,978,854.00
33	Kankesbangpol	259,182,000.00	240,761,166.00	4,758,334.00	-	245,519,500.00	13,662,500.00
34	Dinas Satpol PP dan Damkar	6,496,350,096.00	3,555,962,978.00	896,019,374.00	641,666.00	4,451,340,686.00	2,045,009,410.00
35	BPBD	2,956,794,350.00	2,634,278,690.00	195,310,307.00	135,546,667.00	2,694,042,330.00	262,752,020.00
36	BKPSDM	1,110,829,131.00	923,375,390.00	79,908,231.00	-	1,003,283,621.00	107,545,510.00
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1,969,350,505.00	1,111,591,429.00	221,777,447.00	51,961,580.00	1,281,407,296.00	687,943,209.00
38	Dinas Kominfo	2,561,615,669.00	1,027,588,707.00	382,091,771.00	126,000,000.00	1,283,680,478.00	1,277,935,191.00
Jumlah		258,412,070,501.44	136,810,434,429.54	27,624,413,046.96	7,981,597,864.00	156,453,249,612.50	101,958,820,888.94

Rincian nilai buku aset tetap peralatan mesin per SKPD per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.40
Nilai Buku Aset Tetap Peralatan Mesin per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016

No.	Nama SKPD	Saldo 31 Desember 2019 (108)	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 (17)	Penambahan/Pengurangan Koreksi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 (108)	Nilai Buku 31 Desember 2019 (108)
1	Sekretariat DPRD	11.978.476.679,00	7.902.867.140,00	(152.329.843,52)	7.750.537.296,48	4.227.939.382,52
2	Sekretariat Daerah	28.164.708.583,00	18.407.512.279,00	(284.387.829,88)	18.123.124.449,12	10.041.584.133,88
3	Kec. Pulau Punjung	632.607.825,00	495.587.252,00	-	495.587.252,00	137.020.573,00
4	Kec. Sitiung	514.499.765,00	214.370.028,00	(1.998.000,00)	212.372.028,00	302.127.737,00
5	Kec. Koto Baru	560.597.744,00	216.792.906,00	-	216.792.906,00	343.804.838,00
6	Kec. Sungai Rumbai	551.272.375,00	284.485.142,00	(3.643.947,92)	280.841.194,08	270.431.180,92
7	Kec. IX Koto	586.695.803,00	501.598.246,00	-	501.598.246,00	85.097.557,00
8	Kec. Timpeh	383.896.475,00	362.174.902,00	(3.860.747,92)	358.314.154,08	25.582.320,92
9	Kec. Padang Laweh	400.836.210,00	346.828.472,00	(2.672.619,05)	344.155.852,95	56.680.357,05
10	Kec. Tiumbang	441.232.425,00	369.205.424,00	(2.975.000,00)	366.230.424,00	75.002.001,00
11	Kec. Koto Besar	468.756.531,00	196.807.081,00	-	196.807.081,00	271.949.450,00
12	Kec. Koto Salak	533.237.125,00	461.502.184,00	(3.577.270,83)	457.924.913,17	75.312.211,83

No.	Nama SKPD	Saldo 31 Desember 2019 (108)	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 (17)	Penambahan/Pengurangan Koreksi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 (108)	Nilai Buku 31 Desember 2019 (108)
13	Kec. Asam Jujuhan	572.903.625,00	545.156.250,00	(261.905,00)	544.894.345,00	28.009.280,00
14	Dinas PUPR	31.819.518.244,00	25.217.844.862,00	(35.021.082,67)	25.182.823.779,33	6.636.694.464,67
15	Dinas Perkimtan	1.200.543.700,00	746.025.251,00	(1.401.129,33)	744.624.121,67	455.919.578,33
16	Dinas Perhubungan	4.287.484.376,00	1.790.336.901,00	1.170.992.279,93	2.961.329.180,93	1.326.155.195,07
17	Dinas Kesehatan	42.294.583.745,14	23.366.297.569,00	(158.784.739,12)	23.207.512.829,88	19.087.070.915,26
18	RSUD	36.750.640.419,60	18.462.275.346,00	(156.399.928,05)	18.305.875.417,95	18.444.765.001,65
19	Dinas Pendidikan	32.874.886.327,00	16.507.121.615,00	408.990.595,26	16.916.112.210,26	15.958.774.116,74
20	Disbuparpora	1.117.205.501,00	655.006.006,00	(465.679,86)	654.540.326,14	462.665.174,86
21	Disnakertrans	786.004.642,00	676.932.430,00	-	676.932.430,00	109.072.212,00
22	DSP3AP2KB	2.737.710.080,00	2.070.153.632,00	-	2.070.153.632,00	667.556.448,00
23	Disdukcapil	3.003.277.442,00	1.460.633.349,00	(82.850.645,33)	1.377.782.703,67	1.625.494.738,33
24	Dinas PMD	1.089.369.800,00	959.544.467,00	-	959.544.467,00	129.825.333,00
25	Dinas Pertanian	6.521.603.191,00	5.282.968.597,00	(765.440,67)	5.282.203.156,33	1.239.400.034,67
26	Dinas Pangan & Perikanan	4.970.135.447,50	4.398.257.711,50	(12.598.928,57)	4.385.658.782,93	584.476.664,57
27	Diskumperdag	15.023.642.589,20	2.263.499.614,00	(62.670.346,17)	2.200.829.267,83	12.822.813.321,37
28	BKD	4.548.856.010,00	3.221.431.772,00	(38.358.984,58)	3.183.072.787,42	1.365.783.222,58
29	DPMPTSP	1.138.465.091,00	966.471.310,00	-	966.471.310,00	171.993.781,00
30	Inspektorat Daerah	1.384.790.781,00	1.218.190.350,00	-	1.218.190.350,00	166.600.431,00
31	Bappeda	1.717.874.942,00	1.187.195.380,00	(769.167,67)	1.186.426.212,33	531.448.729,67
32	DLH	6.154.881.087,00	4.738.902.233,00	(3.091.428,57)	4.735.810.804,43	1.419.070.282,57
33	Kankesbangpol	259.182.000,00	245.519.500,00	-	245.519.500,00	13.662.500,00
34	Dinas Satpol PP dan Damkar	6.496.350.096,00	4.451.340.686,00	-	4.451.340.686,00	2.045.009.410,00
35	BPBD	2.956.794.350,00	2.694.042.330,00	(7.529.166,67)	2.686.513.163,33	270.281.186,67
36	BKPSDM	1.110.829.131,00	1.003.283.621,00	(1.133.776,00)	1.002.149.845,00	108.679.286,00
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.969.350.505,00	1.281.407.296,00	(740.832,33)	1.280.666.463,67	688.684.041,33
38	Dinas Kominfo	2.561.615.669,00	1.283.680.478,00	(74.001.097,42)	1.209.679.380,58	1.351.936.288,42
Jumlah		260.565.316.331,44	156.453.249.612,50	487.693.338,07	156.940.942.950,57	103.624.373.380,87

Pada tabel di bawah ini dapat dijelaskan penambahan dan pengurangan nilai aset tetap peralatan mesin sehingga menghasilkan saldo aset tetap Peralatan Mesin per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.2.41
Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin 31 Desember 2018		222,496,461,150.44
Penambahan Peralatan dan Mesin		48,846,198,314.00
1	Belanja Modal Menjadi Aset	37,503,796,083.00
2	Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset	169,011,204.00
3	Hibah Pusat Menjadi Aset	517,259,590.00
4	Hibah Masyarakat Menjadi Aset	10,700,000.00
5	Dana Bos Menjadi Aset	1,307,498,036.00
6	Dana BLUD Menjadi Aset	1,746,054,628.00
7	Honor Pokja Menjadi Aset	36,116,520.00
8	Utang 2019	392,639,000.00
9	Belanja Modal BOSDA	40,627,000.00
10	Kurang Catat	166,325,500.00
11	Mutasi Antar SKPD Menambah Aset	4,990,423,096.00
12	Mutasi Honor Pokja Antar SKPD	33,356,520.00
13	Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	6,400,000.00
14	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	45,599,137.00
15	BOP PAUD	3,500,000.00
16	BOS Afirmasi	1,718,971,000.00
17	BOS Kinerja	157,921,000.00
Pengurangan Peralatan dan Mesin		12,930,588,963
1	Pengurangan Mutasi Antar SKPD	4,990,423,096.00
2	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	33,356,520.00
3	Pengurangan Koreksi Pencatatan	16,200,000.00
4	Lelang dan Penjualan	557,405,000.00
5	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	5,118,888,862.00
6	Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal	2,214,315,485.00
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 (17)		258,412,070,501.44

Rincian penambahan aset tetap peralatan dan mesin per SKPD sebesar Rp48.846.198.314,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.42
Penambahan Peralatan dan Mesin per SKPD

No	SKPD/Sub KIB		Nilai
1	Belanja Modal Menjadi Aset		37,503,796,083.00
	Alat Besar		1,529,540,750.00
	1	Dinas PUPR	25,200,000.00
	2	Dinas KUMPERDAG	1,504,340,750.00
	Alat Angkut		7,132,584,467.00
	1	Sekretariat DPRD	57,600,000.00
	2	Sekretariat Daerah	2,858,782,500.00
	3	Kec. Koto Baru	18,425,879.00
	4	Kec. IX Koto	18,900,000.00
	5	Kec. Padang Laweh	17,067,200.00
	6	Kec Koto Salak	17,067,200.00
	7	Dinas PUPR	210,294,688.00
	8	Dinas PERKIMTAN	36,800,000.00
	9	Dinas Kesehatan	1,539,490,000.00
	10	RSUD	625,700,000.00
	11	Dinas Pendidikan	593,000,000.00
	12	Dinas BUDPARPORA	18,837,000.00
	13	DISDUKCAPIL	928,660,000.00
	14	Dinas Pertanian	138,400,000.00
	15	BAPPPEDA	36,500,000.00
	16	Dinas KOMINFO	17,060,000.00
	Alat Bengkel		3,542,554,104.00
	1	Dinas PUPR	199,009,687.00
	2	Dinas Perhubungan	7,000,000.00
	3	Dinas KUMPERDAG	3,268,203,417.00
	4	BKD	40,885,000.00
	5	DPMPSTP	14,465,000.00
	6	DLH	4,991,000.00
	7	BPBD	8,000,000.00
	Alat Kantor/RT		11,107,911,346.00
	1	Sekretariat DPRD	429,323,000.00

No	SKPD/Sub KIB		Nilai
	2	Sekretariat Daerah	561,798,000.00
	3	Kec. Sitiung	12,000,000.00
	4	Kec. Koto Baru	43,974,364.00
	5	Kec. Sngai Rumbai	10,775,000.00
	6	Kec. IX Koto	6,968,750.00
	7	Kec. Timpeh	10,279,500.00
	8	Kec. Padang Laweh	17,900,000.00
	9	Kec Tiumang	30,000,000.00
	10	Kec Koto Besar	14,900,000.00
	11	Kec Koto Salak	40,200,000.00
	12	Kec. Asam Jujuhan	5,000,000.00
	13	Dinas PUPR	300,428,763.00
	14	Dinas PERKIMTAN	148,990,000.00
	15	Dinas Perhubungan	196,130,500.00
	16	Dinas Kesehatan	1,507,172,072.00
	17	RSUD	3,077,876,000.00
	18	Dinas Pendidikan	2,556,720,704.00
	19	Dinas BUDPARPORA	165,854,000.00
	20	Dinas TRANSTAKER	18,600,000.00
	21	DSP3KB	713,025,000.00
	22	DISDUKCAPIL	108,100,000.00
	23	Dinas PMD	39,700,000.00
	24	Dinas Pertanian	94,845,000.00
	25	Dinas Pangan dan Perikanan	23,710,000.00
	26	Dinas KUMPERDAG	14,000,000.00
	27	BKD	241,350,000.00
	28	DPMPSTP	83,054,999.00
	29	BAPPPEDA	62,181,819.00
	30	DLH	15,895,000.00
	31	Kantor KESBANGPOL	15,500,000.00
	32	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	72,725,875.00
	33	BPBD	31,992,000.00
	34	BKPSDM	46,450,000.00
	35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	184,961,000.00
	36	Dinas KOMINFO	205,530,000.00
	Alat Studio		920,543,909.00
	1	Sekretariat DPRD	41,030,000.00
	2	Sekretariat Daerah	111,650,000.00
	3	Kec. Sitiung	13,000,000.00
	4	Kec. Asam Jujuhan	7,950,000.00
	5	Dinas PERKIMTAN	7,113,500.00
	6	Dinas Perhubungan	22,000,000.00
	7	RSUD	179,808,500.00
	8	Dinas Pendidikan	187,650,000.00
	9	Dinas Pertanian	6,950,000.00
	10	BKD	3,500,000.00
	11	DPMPSTP	2,970,000.00
	12	BAPPPEDA	7,510,909.00
	13	DLH	6,930,000.00
	14	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	4,500,000.00
	15	BPBD	5,986,000.00
	16	Dinas KOMINFO	311,995,000.00
	Alat Kedokteran		9,477,309,417.00
	1	Dinas Kesehatan	5,184,232,237.00
	2	RSUD	4,293,077,180.00
	Alat Laboratorium		3,625,402,090.00
	1	Kec. IX Koto	2,480,875.00
	2	Kec Koto Salak	1,200,000.00
	3	Dinas PUPR	64,617,175.00
	4	Dinas Kesehatan	1,833,454,427.00
	5	RSUD	478,473,300.00
	6	Dinas Pendidikan	720,976,313.00
	7	DISDUKCAPIL	1,700,000.00
	8	Dinas KUMPERDAG	522,500,000.00
	ALAT PERSENJATAAN		167,950,000.00
	1	Dinas PERKIMTAN	24,700,000.00
	2	RSUD	136,250,000.00
	3	BKD	7,000,000.00
2	Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset		169,011,204.00
	Alat Angkut		1,900,000.00
	1	Sekretariat DPRD	700,000.00
	2	Sekretariat Daerah	1,200,000.00
	Alat Pertanian		99,960,000.00

No	SKPD/Sub KIB		Nilai
	1	DLH	99,960,000.00
	Alat Kantor/RT		36,242,213.00
	1	Sekretariat DPRD	20,414,359.00
	2	Sekretariat Daerah	250,000.00
	3	Dinas Kesehatan	10,077,854.00
	4	BKD	3,500,000.00
	5	BPBD	2,000,000.00
	Alat Studio		22,112,841.00
	1	Sekretariat DPRD	4,127,841.00
	2	Dinas Kesehatan	17,985,000.00
	Alat Kedokteran		8,185,042.00
	1	Dinas Kesehatan	8,185,042.00
	Alat Laboratorium		611,108.00
	1	Dinas Kesehatan	611,108.00
3	Hibah Pusat Menjadi Aset		517,259,590.00
	Alat Angkut		478,100,000.00
	1	BPBD	170,000,000.00
	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	308,100,000.00
	Alat Kantor/RT		28,795,000.00
	1	Dinas Pendidikan	1,000,000.00
	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27,795,000.00
	Alat Studio		10,364,590.00
	1	Dinas Pendidikan	1,975,000.00
	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8,389,590.00
4	Hibah Masyarakat Menjadi Aset		10,700,000.00
	Alat Kantor/RT		6,700,000.00
	1	Dinas Pendidikan	6,700,000.00
	Alat Studio		4,000,000.00
	1	Dinas Pendidikan	4,000,000.00
5	Dana BOS Menjadi Aset		1,307,498,036.00
	Alat Bengkel		46,974,000.00
	1	Dinas Pendidikan	46,974,000.00
	Alat Pertanian		25,520,400.00
	1	Dinas Pendidikan	25,520,400.00
	Alat Kantor/RT		1,138,003,636.00
	1	Dinas Pendidikan	1,138,003,636.00
	Alat Studio		53,800,000.00
	1	Dinas Pendidikan	53,800,000.00
	Alat Laboratorium		23,400,000.00
	1	Dinas Pendidikan	23,400,000.00
	Alat Keamanan/PERSENJATAAN		19,800,000.00
	1	Dinas Pendidikan	19,800,000.00
6	Dana BLUD Menjadi Aset		1,746,054,628.00
	Alat Bengkel		2,375,000.00
	1	RSUD	2,375,000.00
	Alat Kantor/RT		810,649,275.00
	1	Dinas Kesehatan	422,091,275.00
	2	RSUD	388,558,000.00
	Alat Studio		26,700,000.00
	1	RSUD	26,700,000.00
	Alat Kedokteran		903,820,353.00
	1	Dinas Kesehatan	18,801,200.00
	2	RSUD	885,019,153.00
	Alat Laboratorium		2,510,000.00
	1	Dinas Kesehatan	1,010,000.00
	2	RSUD	1,500,000.00
7	Honor Pokja Menjadi Aset		36,116,520.00
	Alat Besar		188,232.00
	1	Sekretariat Daerah	188,232.00
	Alat Angkut		11,040,000.00
	1	Sekretariat Daerah	11,040,000.00
	Alat Bengkel		1,694,172.00
	1	Sekretariat Daerah	1,694,172.00
	Alat Kantor/RT		11,220,000.00
	1	Sekretariat Daerah	11,220,000.00
	Alat Laboratorium		11,974,116.00
	1	Sekretariat Daerah	11,974,116.00
8	Hutang 2019		392,639,000.00
	Alat Kantor/RT		203,070,000.00
		RSUD	203,070,000.00
	Alat Kantor/RT		36,000,000.00
		Dinas Pendidikan	36,000,000.00
	Alat Studio		153,569,000.00

No	SKPD/Sub KIB		Nilai
		Dinas Pendidikan	153,569,000.00
9	Belanja Modal BOSDA		40,627,000.00
	Alat Kantor/RT		34,700,000.00
	1	Dinas Pendidikan	34,700,000.00
	Alat Laboratorium		5,927,000.00
	1	Dinas Pendidikan	5,927,000.00
10	Kurang Catat		166,325,500.00
	Alat Angkut		45,650,000.00
	1	Kec. Sitiung	6,000,000.00
	2	Kec Koto Salak	6,000,000.00
	3	BPBD	33,650,000.00
	Alat Kantor/RT		113,175,500.00
	1	Dinas Pendidikan	113,175,500.00
	Alat Studio		4,500,000.00
	1	Dinas Pendidikan	4,500,000.00
	Alat Laboratorium		3,000,000.00
	1	Dinas Pendidikan	3,000,000.00
11	Mutasi Antar SKPD Menambah Aset		4,990,423,096.00
	Alat Angkut		3,938,678,096.00
	1	Sekretariat DPRD	547,160,000.00
	2	Sekretariat Daerah	1,061,202,000.00
	3	Kec. Sitiung	246,172,365.00
	4	Kec. Koto Baru	246,172,365.00
	5	Kec. Sngai Rumbai	246,172,365.00
	6	Kec Koto Besar	246,172,365.00
	7	Kec. Asam Jujuhan	13,410,000.00
	8	Dinas Perhubungan	399,187,500.00
	9	Dinas Pendidikan	283,294,136.00
	10	BKD	97,585,000.00
	11	DPMPTSP	106,200,000.00
	12	Inspektorat Kabupaten	157,950,000.00
	13	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	198,000,000.00
	14	Dinas KOMINFO	90,000,000.00
	Alat Kantor/RT		751,660,000.00
	1	Sekretariat Daerah	9,800,000.00
	2	Dinas Kesehatan	689,985,000.00
	3	Dinas TRANSSAKER	42,470,000.00
	4	BKD	9,405,000.00
	Alat Kedokteran		300,085,000.00
	1	Dinas Kesehatan	300,085,000.00
12	Mutasi Honor Pokja Antar SKPD		33,356,520.00
	Alat Besar		188,232.00
	1	Dinas KUMPERDAG	188,232.00
	Alat Angkut		8,280,000.00
	1	Dinas Kesehatan	5,520,000.00
	2	RSUD	2,760,000.00
	Alat Bengkel		1,694,172.00
	1	Dinas KUMPERDAG	1,694,172.00
	Alat Kantor/RT		11,220,000.00
	1	Dinas Kesehatan	5,040,000.00
	2	RSUD	3,420,000.00
	3	DSP3KB	2,760,000.00
	Alat Laboratorium		11,974,116.00
	1	RSUD	2,280,000.00
	2	Dinas Pendidikan	9,600,000.00
	3	Dinas KUMPERDAG	94,116.00
13	Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra		6,400,000.00
	Alat Kantor/RT		6,400,000.00
	1	Kec Koto Besar	6,400,000.00
14	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap		45,599,137.00
	Alat Angkut		45,599,137.00
	1	DISDUKCAPIL	45,599,137.00
15	BOP PAUD		3,500,000.00
	Alat Kantor/RT		3,500,000.00
	1	Dinas Pendidikan	3,500,000.00
16	BOS Afirmasi		1,718,971,000.00
	Alat Kantor/RT		135,000,000.00
	1	Dinas Pendidikan	135,000,000.00
	Alat Studio		1,583,971,000.00
	1	Alat Studio	1,583,971,000.00
17	BOS Kinerja		157,921,000.00
	Alat Studio		157,921,000.00
	1	Dinas Pendidikan	157,921,000.00

Penambahan peralatan mesin yang berasal dari utang sebesar Rp392.639.000,00 terdapat pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp203.070.000,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp189.569.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.43
Penambahan Peralatan Mesin dari Utang pada RSUD Sungai Dareh

No	Uraian	Jumlah
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	203,070,000.00
	Pengadaan plank Merek Rumah Sakit	195,095,000.00
	Pengawasan Plank Merek	7,975,000.00
Jumlah		203,070,000.00

Tabel 5.2.44
Penambahan Peralatan Mesin dari Utang pada Dinas Pendidikan

No	Nama Sekolah / Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	SDN 09 KOTO SALAK				
	Tablet EVERCOSS Bravo Tab.	14	Unit	1,999,000	27,986,000.00
2	SDN 07 KOTO SALAK				
	Tablet EVERCOSS Bravo Tab.	13	Unit	1,999,000	25,987,000.00
3	SDN 09 TIMPEH				
	Laptop Lenovo V130-14	1	Unit	7,100,000	7,100,000.00
	PC Lenovo V530-15ICB	1	Unit	8,900,000	8,900,000.00
	Infocus Classroom Projector XGA (1024x768) 3800 IN114XV	1	Unit	5,820,000	5,820,000.00
	D-LINK Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router [DIR-842]	1	Unit	1,100,000	1,100,000.00
	Toshiba Canvio Ready 3.0 Portable Hard Drive 1TB Black	1	Unit	900,000	900,000.00
4	SDN 03 KOTO SALAK				
	Laptop Lenovo V130-14	1	Unit	7,100,000	7,100,000.00
	PC Lenovo V530-15ICB	1	Unit	8,900,000	8,900,000.00
	Infocus Classroom Projector XGA (1024x768) 3800 IN114XV	1	Unit	5,820,000	5,820,000.00
	D-LINK Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router [DIR-842]	1	Unit	1,100,000	1,100,000.00
	Toshiba Canvio Ready 3.0 Portable Hard Drive 1TB Black	1	Unit	900,000	900,000.00
5	SMPN 1 PADANG LAWEH				
	Tablet EVERCOSS Bravo Tab.	44	Unit	1,999,000	87,956,000.00
Jumlah					189,569,000.00

Rincian pengurangan aset tetap peralatan mesin per SKPD sebesar Rp12.930.588.963,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.45
Pengurangan Peralatan dan Mesin per SKPD

No	Nama SKPD/Sub KIB	Jumlah
1	Pengurangan Mutasi Antar SKPD	4,990,423,096.00
	Alat Angkut	3,938,678,096.00
1	1 Sekretariat DPRD	465,902,000.00
2	2 Sekretariat Daerah	2,333,941,096.00
3	3 Kec. Sitiung	90,000,000.00
4	4 Kec. Koto Baru	90,000,000.00
5	5 Kec. Sngai Rumbai	90,000,000.00
6	6 Kec Koto Besar	157,950,000.00
7	7 Dinas PUPR	25,750,000.00
8	8 Dinas Kesehatan	7,585,000.00
9	9 Dinas Pendidikan	238,500,000.00
10	10 Dinas TRANSNAKER	165,000,000.00
11	11 BKD	148,050,000.00
12	12 Dinas KOMINFO	126,000,000.00
	Alat Kantor/RT	751,660,000.00
1	1 Sekretariat Daerah	43,405,000.00
2	2 Dinas TRANSNAKER	9,800,000.00
3	3 DSP3KB	689,985,000.00
4	4 BKD	8,470,000.00
	Alat Kedokteran	300,085,000.00
1	1 DSP3KB	300,085,000.00

No	Nama SKPD/Sub KIB		Jumlah
2	Pengurangan Mutasi Honor Pokja		33,356,520.00
	Alat Besar		188,232.00
	1	Sekretariat Daerah	188,232.00
	Alat Angkut		8,280,000.00
	1	Sekretariat Daerah	8,280,000.00
	Alat Bengkel		1,694,172.00
	1	Sekretariat Daerah	1,694,172.00
	Alat Kantor/RT		11,220,000.00
	1	Sekretariat Daerah	11,220,000.00
	Alat Laboratorium		11,974,116.00
	1	Sekretariat Daerah	11,974,116.00
3	Pengurangan Koreksi Pencatatan		16,200,000.00
	Alat Angkut		16,200,000.00
	1	Dinas TRANSNAKER	16,200,000.00
4	Lelang dan Penjualan		557,405,000.00
	Alat Angkut		536,525,000.00
	1	Sekretariat Daerah	488,250,000.00
	2	Dinas Kesehatan	13,625,000.00
	3	DLH	34,650,000.00
	Alat Kantor/RT		20,880,000.00
	1	BKD	20,880,000.00
5	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra		5,118,888,862.00
	Alat Besar		9,179,500.00
	1	Dinas Pendidikan	9,179,500.00
	Alat Angkut		892,824,473.00
	1	Sekretariat Daerah	644,034,473.00
	2	Dinas Pendidikan	21,113,000.00
	3	Dinas TRANSNAKER	2,500,000.00
	4	DLH	103,947,000.00
	5	BPBD	121,230,000.00
	Alat Bengkel		44,141,078.00
	1	Dinas Pendidikan	44,141,078.00
	Alat Pertanian		16,524,000.00
	1	Dinas Pendidikan	16,524,000.00
	Alat Kantor/RT		2,004,584,694.00
	1	Sekretariat DPRD	1,400,000.00
	2	Kec. Timpeh	26,897,500.00
	3	Kec. Asam Jujuhan	3,500,000.00
	4	Dinas Pendidikan	1,900,293,614.00
	5	Dinas PMD	9,900,000.00
	6	BAPPEDA	6,000,000.00
	7	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	3,500,000.00
	8	BPBD	15,600,000.00
	9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37,493,580.00
	Alat Studio		361,798,280.00
	1	Kec. Timpeh	2,875,000.00
	2	Dinas Pendidikan	339,798,280.00
	3	Dinas PMD	6,300,000.00
	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12,825,000.00
	Alat Kedokteran		13,847,330.00
	1	Dinas Pendidikan	13,847,330.00
	Alat Laboratorium		1,775,989,507.00
	1	Dinas Pendidikan	1,774,346,507.00
	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,643,000.00
6	Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal		2,214,315,485.00
	Alat Bengkel		138,000,000.00
	1	Dinas Pertanian	138,000,000.00
	Alat Pertanian		2,500,000.00
	1	Dinas Pertanian	2,500,000.00
	Alat Kantor/RT		120,240,000.00
	1	Dinas Pertanian	120,240,000.00
	Alat Laboratorium		1,953,575,485.00
	1	Dinas Pertanian	1,953,575,485.00
Jumlah Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin			12,930,588,963.00

Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin sebesar Rp557.405.000,00 berasal dari penjualan/lelang dengan rincian sebagai berikut.

1. Penjualan kontruksi baliho Badan Keuangan Daerah senilai Rp20.880.000,00. Penjualan ini dilakukan karena kontruksi baliho tersebut telah keropos dan tidak

- dapat digunakan lagi. Terkait ini telah dilakukan penjualan konstruksi tersebut dengan nilai penjualan Rp464.200,00
2. Lelang peralatan mesin pada Sekretariat Daerah berupa tiga unit kendaraan dinas roda empat dengan total nilai perolehan Rp488.250.000,00, satu unit kendaraan dinas roda dua pada dinas kesehatan dengan nilai perolehan Rp13.625.000,00, dan satu unit kendaraan dinas roda tiga pada Dinas Lingkungan Hidup dengan nilai perolehan Rp34.650.000,00.

Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.214.315.485,00,00 adalah berupa hibah ke Kementerian Riset dan Dikti melalui Naskah Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Kementerian Riset dan Dikti nomor 030/114/BKD/X-2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang digunakan sebagai gedung perkuliahan dan kantor Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya yang tercatat pada Dinas Pertanian.

Adapun Penambahan dan Pengurangan Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 adalah sebagai berikut .

Tabel 5.2.46
Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2018		136,810,434,429.54
Penambahan Penyusutan Peralatan dan Mesin 2019		27,624,413,046.96
1	Penambahan Penyusutan pindah SKPD	1,708,755,105.00
3	Penyusutan Semester I	12,348,434,931.98
4	Penyusutan Semester II	13,567,223,009.98
Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2019		7,981,597,864.00
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar SKPD	1,708,755,105.00
2	Pengurangan Penyusutan Reklas	3,531,828,793.00
3	Pengurangan Penyusutan Lelang dan Penjualan	554,838,333.00
4	Pengurangan Penyusutan Hibah ke Instansi Vertikal	2,169,975,633.00
5	Pengurangan Penyusutan Koreksi	16,200,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019 (17)		156,453,249,612.50
Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019 (17)		101,958,820,888.94

Rincian Penambahan Penyusutan aset tetap peralatan mesin sebesar Rp27.624.413.046,96 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.47
Penambahan Penyusutan Peralatan dan Mesin per SKPD

No	Nama SKPD/Asal Penambahan	Jumlah
1	Penambahan Penyusutan pindah SKPD	1,708,755,105.00
	Alat Angkut	1,661,177,187.00
	1 Sekretariat Daerah	856,347,000.00
	2 Kec. Asam Jujuhan	13,410,000.00
	3 Dinas Perhubungan	61,779,018.00
	4 Dinas Pendidikan	104,549,026.00
	5 BKD	97,585,000.00
	6 DPMPTSP	106,200,000.00
	7 Inspektorat Kabupaten	157,950,000.00
	8 Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	198,000,000.00
	9 Dinas KOMINFO	65,357,143.00
	Alat Kantor/RT	22,570,833.00
	1 Sekretariat Daerah	4,695,833.00
	2 Dinas TRANSTRAKER	8,470,000.00
	3 BKD	9,405,000.00
	Alat Kedokteran	25,007,085.00
	1 Dinas Kesehatan	25,007,085.00
2	Penyusutan Semester I	12,348,434,931.98
	Alat Besar	473,848,513.00
	1 Dinas PUPR	289,957,659.00
	2 Dinas Pendidikan	1,402,519.00
	3 Dinas Pangan dan Perikanan	131,725,000.00
	4 Dinas KUMPERDAG	6,777,435.00
	5 Inspektorat Kabupaten	957,857.00
	6 DLH	39,908,810.00
	7 BPBD	3,119,233.00
	Alat Angkut	2,416,570,056.00

No	Nama SKPD/Asal Penambahan		Jumlah
	1	Sekretariat DPRD	191,358,402.00
	2	Sekretariat Daerah	490,877,917.00
	3	Kec. Pulau Punjung	15,579,754.00
	4	Kec. Sitiung	5,876,715.00
	5	Kec. Koto Baru	7,662,142.00
	6	Kec. Sngai Rumbai	1,208,733.00
	7	Kec. IX Koto	3,606,833.00
	8	Kec. Timpeh	2,207,723.00
	9	Kec. Padang Laweh	1,615,095.00
	10	Kec Tiumang	999,817.00
	11	Kec Koto Besar	2,129,393.00
	12	Kec Koto Salak	4,151,019.00
	13	Kec. Asam Jujuhan	1,121,625.00
	14	Dinas PUPR	204,232,420.00
	15	Dinas PERKIMTAN	28,864,194.00
	16	Dinas Perhubungan	57,522,843.00
	17	Dinas Kesehatan	281,200,864.00
	18	RSUD	111,129,285.00
	19	Dinas BUDPARPORA	22,896,800.00
	20	DSP3KB	94,686,546.00
	21	DISDUKCAPIL	20,189,334.00
	22	Dinas Pertanian	78,154,382.00
	23	Dinas Pangan dan Perikanan	35,972,852.00
	24	Dinas KUMPERDAG	81,382,591.00
	25	BKD	23,241,637.00
	26	DPMPTSP	1,167,752.00
	27	Inspektorat Kabupaten	20,907,857.00
	28	BAPPPEDA	22,890,524.00
	29	DLH	56,580,580.00
	30	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	292,083,486.00
	31	BPBD	136,193,737.00
	32	BKPSDM	21,457,857.00
	33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	95,530,775.00
	34	Dinas KOMINFO	1,888,572.00
	Alat Bengkel		253,014,015.00
	1	Sekretariat Daerah	1,346,000.00
	2	Dinas PUPR	13,059,428.00
	3	Dinas PERKIMTAN	500,000.00
	4	Dinas Perhubungan	635,000.00
	5	RSUD	230,000.00
	6	Dinas Pendidikan	21,319,605.00
	7	Dinas BUDPARPORA	1,482,500.00
	8	DISDUKCAPIL	874,500.00
	9	Dinas PMD	1,241,000.00
	10	Dinas Pertanian	30,685,240.00
	11	Dinas Pangan dan Perikanan	1,084,500.00
	12	Dinas KUMPERDAG	174,610,175.00
	13	BKD	100,000.00
	14	DPMPTSP	1,162,167.00
	15	BAPPPEDA	1,010,000.00
	16	DLH	2,026,233.00
	17	BPBD	954,167.00
	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50,000.00
	19	Dinas KOMINFO	643,500.00
	Alat Pertanian		87,869,612.00
	1	Dinas PUPR	12,187,500.00
	2	Dinas PERKIMTAN	4,276,250.00
	3	Dinas Pendidikan	48,982,522.00
	4	Dinas Pertanian	7,550,123.00
	5	DLH	14,873,217.00
	Alat Kantor/RT		5,288,844,722.00
	1	Sekretariat DPRD	415,458,970.00
	2	Sekretariat Daerah	986,829,332.00
	3	Kec. Pulau Punjung	14,803,728.00
	4	Kec. Sitiung	11,050,001.00
	5	Kec. Koto Baru	9,691,696.00
	6	Kec. Sngai Rumbai	9,785,500.00
	7	Kec. IX Koto	7,742,696.00
	8	Kec. Timpeh	4,620,813.00
	9	Kec. Padang Laweh	10,362,933.00
	10	Kec Tiumang	12,600,749.00
	11	Kec Koto Besar	15,064,133.00

No	Nama SKPD/Asal Penambahan		Jumlah
	12	Kec Koto Salak	11,839,583.00
	13	Kec. Asam Jujuhan	7,942,125.00
	14	Dinas PUPR	99,853,294.00
	15	Dinas PERKIMTAN	33,919,625.00
	16	Dinas Perhubungan	15,165,785.00
	17	Dinas Kesehatan	685,031,146.00
	18	RSUD	226,966,231.00
	19	Dinas Pendidikan	1,490,563,386.00
	20	Dinas BUDPARPORA	43,879,397.00
	21	Dinas TRANSTAKER	31,804,258.00
	22	DSP3KB	34,769,445.00
	23	DISDUKCAPIL	106,850,375.00
	24	Dinas PMD	24,892,766.00
	25	Dinas Pertanian	160,938,596.00
	26	Dinas Pangan dan Perikanan	35,658,028.00
	27	Dinas KUMPERDAG	84,873,836.00
	28	BKD	242,891,094.00
	29	DPMPTSP	29,623,051.00
	30	Inspektorat Kabupaten	51,912,468.00
	31	BAPPPEDA	84,234,651.00
	32	DLH	62,584,246.00
	33	Kantor KESBANGPOL	2,854,167.00
	34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	54,324,646.00
	35	BPBD	11,995,540.00
	36	BKPSDM	13,857,758.00
	37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28,706,811.00
	38	Dinas KOMINFO	112,901,863.00
	Alat Studio		592,865,291.00
	1	Sekretariat DPRD	100,998,749.00
	2	Sekretariat Daerah	98,423,246.00
	3	Kec. Pulau Punjung	600,000.00
	4	Kec. Sitiung	433,333.00
	5	Kec. Koto Baru	840,000.00
	6	Kec. Sngai Rumbai	540,000.00
	7	Kec. IX Koto	3,486,018.00
	8	Kec. Padang Laweh	1,150,000.00
	9	Kec Tiumang	790,000.00
	10	Kec Koto Besar	360,000.00
	11	Kec. Asam Jujuhan	655,000.00
	12	Dinas PUPR	23,116,734.00
	13	Dinas PERKIMTAN	2,155,292.00
	14	Dinas Perhubungan	2,160,000.00
	15	Dinas Kesehatan	352,000.00
	16	RSUD	17,667,500.00
	17	Dinas Pendidikan	150,835,185.00
	18	Dinas BUDPARPORA	6,347,224.00
	19	Dinas TRANSTAKER	300,000.00
	20	DSP3KB	10,822,000.00
	21	Dinas PMD	3,080,000.00
	22	Dinas Pertanian	37,165,743.00
	23	Dinas Pangan dan Perikanan	8,571,940.00
	24	Dinas KUMPERDAG	55,574,638.00
	25	BKD	7,085,224.00
	26	DPMPTSP	3,532,500.00
	27	Inspektorat Kabupaten	4,429,640.00
	28	BAPPPEDA	9,884,932.00
	29	DLH	4,915,250.00
	30	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	747,000.00
	31	BPBD	3,299,533.00
	32	BKPSDM	3,211,000.00
	33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	536,250.00
	34	Dinas KOMINFO	28,799,360.00
	Alat Kedokteran		2,385,902,780.98
	1	Sekretariat Daerah	6,998,500.00
	2	Dinas Kesehatan	1,033,610,309.98
	3	RSUD	1,334,481,317.00
	4	Dinas Pendidikan	4,445,760.00
	5	Dinas Pertanian	6,101,975.00
	6	Dinas KUMPERDAG	264,919.00
	Alat Laboratorium		816,592,275.00
	1	Sekretariat Daerah	1,876,563.00
	2	Dinas PUPR	16,437,549.00

No	Nama SKPD/Asal Penambahan		Jumlah
	3	Dinas Kesehatan	20,176,542.00
	4	RSUD	199,999,271.00
	5	Dinas Pendidikan	272,512,814.00
	6	DSP3KB	100,000.00
	7	Dinas Pertanian	814,366.00
	8	Dinas Pangan dan Perikanan	3,075,714.00
	9	Dinas KUMPERDAG	238,110,635.00
	10	BKD	250,000.00
	11	DPMPTSP	80,000.00
	12	DLH	63,158,821.00
	Alat Keamanan/PERSENJATAAN		32,927,667.00
	1	Sekretariat Daerah	4,592,000.00
	2	Dinas PUPR	2,967,889.00
	3	Dinas PERKIMTAN	1,646,667.00
	4	Dinas Kesehatan	12,823,000.00
	5	RSUD	1,000,000.00
	6	Dinas Pendidikan	2,350,778.00
	7	DISDUKCAPIL	500,000.00
	8	Dinas Pertanian	2,814,000.00
	9	BKD	1,733,333.00
	10	DPMPTSP	1,000,000.00
	11	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	1,500,000.00
3	Penyusutan Semester II		13,567,223,009.98
	Alat Besar		486,616,554.00
	1	Dinas PUPR	290,167,660.00
	2	Dinas Pendidikan	1,402,517.00
	3	Dinas Pangan dan Perikanan	131,725,000.00
	4	Dinas KUMPERDAG	19,335,480.00
	5	Inspektorat Kabupaten	957,857.00
	6	DLH	39,908,810.00
	7	BPBD	3,119,230.00
	Alat Angkut		2,476,687,001.00
	1	Sekretariat DPRD	141,971,355.00
	2	Sekretariat Daerah	557,179,759.00
	3	Kec. Pulau Punjung	15,401,182.00
	4	Kec. Sitiung	8,095,104.00
	5	Kec. Koto Baru	1,982,382.00
	6	Kec. Sngai Rumbai	7,069,980.00
	7	Kec. IX Koto	4,731,832.00
	8	Kec. Timpeh	2,207,724.00
	9	Kec. Padang Laweh	2,427,819.00
	10	Kec Tiumang	833,180.00
	11	Kec Koto Besar	7,812,069.00
	12	Kec Koto Salak	3,467,936.00
	13	Kec. Asam Jujuhan	934,687.00
	14	Dinas PUPR	205,451,904.00
	15	Dinas PERKIMTAN	26,692,170.00
	16	Dinas Perhubungan	57,522,843.00
	17	Dinas Kesehatan	351,638,108.00
	18	RSUD	118,610,952.00
	19	Dinas Pendidikan	68,708,687.00
	20	Dinas BUDPARPORA	23,345,300.00
	21	DSP3KB	92,903,711.00
	22	DISDUKCAPIL	66,403,095.00
	23	Dinas Pertanian	81,163,205.00
	24	Dinas Pangan dan Perikanan	35,696,067.00
	25	Dinas KUMPERDAG	78,051,638.00
	26	BKD	23,063,065.00
	27	DPMPTSP	1,167,752.00
	28	Inspektorat Kabupaten	20,907,858.00
	29	BAPPPEDA	23,325,048.00
	30	DLH	46,680,794.00
	31	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	292,083,487.00
	32	BPBD	24,494,818.00
	33	BKPSDM	21,457,858.00
	34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47,848,632.00
	35	Dinas KOMINFO	15,355,000.00
	Alat Bengkel		270,306,617.00
	1	Sekretariat Daerah	1,346,000.00
	2	Dinas PUPR	13,388,460.00
	3	Dinas PERKIMTAN	500,000.00
	4	Dinas Perhubungan	868,333.00

No	Nama SKPD/Asal Penambahan		Jumlah
	5	RSUD	348,750.00
	6	Dinas Pendidikan	24,963,683.00
	7	Dinas BUDPARPORA	1,482,500.00
	8	DISDUKCAPIL	874,500.00
	9	Dinas PMD	1,241,000.00
	10	Dinas Pertanian	13,486,091.00
	11	Dinas Pangan dan Perikanan	903,750.00
	12	Dinas KUMPERDAG	201,975,866.00
	13	BKD	1,530,917.00
	14	DPMPTSP	2,013,167.00
	15	BAPPPEDA	1,010,000.00
	16	DLH	2,192,600.00
	17	BPBD	1,487,500.00
	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50,000.00
	19	Dinas KOMINFO	643,500.00
	Alat Pertanian		84,654,980.00
	1	Dinas PUPR	12,187,500.00
	2	Dinas PERKIMTAN	4,276,250.00
	3	Dinas Pendidikan	47,422,608.00
	4	Dinas Pertanian	6,291,772.00
	5	DLH	14,476,850.00
	Alat Kantor/RT		5,778,893,561.00
	1	Sekretariat DPRD	430,524,473.00
	2	Sekretariat Daerah	994,055,283.00
	3	Kec. Pulau Punjung	12,705,393.00
	4	Kec. Sitiung	9,675,000.00
	5	Kec. Koto Baru	12,635,108.00
	6	Kec. Sngai Rumbai	7,039,959.00
	7	Kec. IX Koto	7,039,312.00
	8	Kec. Timpeh	5,146,187.00
	9	Kec. Padang Laweh	9,890,435.00
	10	Kec Tiumang	12,741,167.00
	11	Kec Koto Besar	8,574,551.00
	12	Kec Koto Salak	12,295,833.00
	13	Kec. Asam Jujuhan	5,560,875.00
	14	Dinas PUPR	108,062,854.00
	15	Dinas PERKIMTAN	40,670,749.00
	16	Dinas Perhubungan	27,283,846.00
	17	Dinas Kesehatan	805,742,535.00
	18	RSUD	301,872,765.00
	19	Dinas Pendidikan	1,712,302,138.00
	20	Dinas BUDPARPORA	53,527,457.00
	21	Dinas TRANSNAKER	35,121,741.00
	22	DSP3KB	35,491,301.00
	23	DISDUKCAPIL	114,938,597.00
	24	Dinas PMD	25,488,600.00
	25	Dinas Pertanian	147,831,624.00
	26	Dinas Pangan dan Perikanan	34,486,314.00
	27	Dinas KUMPERDAG	83,458,450.00
	28	BKD	253,084,762.00
	29	DPMPTSP	34,491,500.00
	30	Inspektorat Kabupaten	50,405,134.00
	31	BAPPPEDA	82,536,387.00
	32	DLH	56,959,644.00
	33	Kantor KESBANGPOL	1,904,167.00
	34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	54,933,755.00
	35	BPBD	6,947,949.00
	36	BKPSDM	17,247,925.00
	37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	46,790,359.00
	38	Dinas KOMINFO	119,429,432.00
	Alat Studio		645,791,025.00
	1	Sekretariat DPRD	92,970,895.00
	2	Sekretariat Daerah	102,667,167.00
	3	Kec. Pulau Punjung	600,000.00
	4	Kec. Sitiung	650,000.00
	5	Kec. Koto Baru	840,000.00
	6	Kec. Sngai Rumbai	540,000.00
	7	Kec. IX Koto	3,246,700.00
	8	Kec. Padang Laweh	1,150,000.00
	9	Kec Tiumang	790,000.00
	10	Kec Koto Besar	360,000.00
	11	Kec. Asam Jujuhan	920,000.00

No	Nama SKPD/Asal Penambahan		Jumlah
	12	Dinas PUPR	23,116,735.00
	13	Dinas PERKIMTAN	2,260,100.00
	14	Dinas Perhubungan	3,260,000.00
	15	Dinas Kesehatan	801,625.00
	16	RSUD	21,925,975.00
	17	Dinas Pendidikan	194,032,747.00
	18	Dinas BUDPARPORA	6,347,224.00
	19	Dinas TRANSNAKER	300,000.00
	20	DSP3KB	10,672,000.00
	21	Dinas PMD	3,080,000.00
	22	Dinas Pertanian	34,521,561.00
	23	Dinas Pangan dan Perikanan	7,793,016.00
	24	Dinas KUMPERDAG	55,574,638.00
	25	BKD	7,435,226.00
	26	DPMPTSP	3,730,500.00
	27	Inspektorat Kabupaten	4,397,973.00
	28	BAPPPEDA	10,101,239.00
	29	DLH	5,146,250.00
	30	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	847,000.00
	31	BPBD	3,698,600.00
	32	BKPSDM	2,675,833.00
	33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,264,620.00
	34	Dinas KOMINFO	37,073,401.00
	Alat Kedokteran		2,878,728,391.98
	1	Sekretariat Daerah	6,998,500.00
	2	Dinas Kesehatan	1,344,223,978.98
	3	RSUD	1,516,978,495.00
	4	Dinas Pendidikan	4,160,525.00
	5	Dinas Pertanian	6,101,975.00
	6	Dinas KUMPERDAG	264,918.00
	Alat Laboratorium		908,604,163.00
	1	Sekretariat Daerah	312,760.00
	2	Kec. IX Koto	124,044.00
	3	Kec Koto Salak	40,000.00
	4	Dinas PUPR	17,110,640.00
	5	Dinas Kesehatan	93,289,216.00
	6	RSUD	205,057,127.00
	7	Dinas Pendidikan	289,346,153.00
	8	DSP3KB	100,000.00
	9	DISDUKCAPIL	56,667.00
	10	Dinas Pertanian	814,366.00
	11	Dinas Pangan dan Perikanan	3,075,714.00
	12	Dinas KUMPERDAG	243,554,328.00
	13	BKD	250,000.00
	14	DPMPTSP	80,000.00
	15	DLH	55,393,148.00
	Alat Keamanan/PERSENJATAAN		36,940,717.00
	1	Sekretariat Daerah	4,592,000.00
	2	Dinas PUPR	2,967,889.00
	3	Dinas PERKIMTAN	2,470,000.00
	4	Dinas Kesehatan	12,823,000.00
	5	RSUD	3,270,833.00
	6	Dinas Pendidikan	2,802,995.00
	7	DISDUKCAPIL	500,000.00
	8	Dinas Pertanian	2,814,000.00
	9	BKD	2,200,000.00
	10	DPMPTSP	1,000,000.00
	11	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	1,500,000.00

Rincian Pengurangan Penyusutan aset tetap peralatan mesin sebesar Rp7.981.597.864,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.48
 Pengurangan Penyusutan Peralatan dan Mesin Per SKPD

Pengurangan Penyusutan Peralatan dan Mesin 2019			7,981,597,864.00
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar SKPD		1,708,755,105.00
	Alat Angkut		1,661,177,187.00
	1	Sekretariat DPRD	271,776,165.00
	2	Sekretariat Daerah	285,938,044.00
	3	Kec. Sitiung	90,000,000.00
	4	Kec. Koto Baru	65,357,143.00
	5	Kec. Sngai Rumbai	90,000,000.00

	6	Kec Koto Besar	157,950,000.00
	7	Dinas PUPR	15,020,835.00
	8	Dinas Kesehatan	7,585,000.00
	9	Dinas Pendidikan	238,500,000.00
	10	Dinas TRANSSAKER	165,000,000.00
	11	BKD	148,050,000.00
	12	Dinas KOMINFO	126,000,000.00
		Alat Kantor/RT	22,570,833.00
	1	Sekretariat Daerah	9,405,000.00
	2	Dinas TRANSSAKER	4,695,833.00
	3	BKD	8,470,000.00
		Alat Kedokteran	25,007,085.00
	1	DSP3KB	25,007,085.00
2		Pengurangan Penyusutan Reklas	3,531,828,793.00
		Alat Besar	4,043,351.00
	1	Dinas Pendidikan	4,043,351.00
		Alat Angkut	315,690,608.00
	1	Sekretariat Daerah	90,000,000.00
	2	Dinas Pendidikan	21,113,000.00
	3	Dinas TRANSSAKER	2,500,000.00
	4	DLH	80,847,608.00
	5	BPBD	121,230,000.00
		Alat Bengkel	31,364,626.00
	1	Dinas Pendidikan	31,364,626.00
		Alat Pertanian	10,248,688.00
	1	Dinas Pendidikan	10,248,688.00
		Alat Kantor/RT	1,702,384,018.00
	1	Sekretariat DPRD	1,400,000.00
	2	Kec. Timpeh	26,897,500.00
	3	Kec. Asam Jujuhan	1,516,667.00
	4	Dinas Pendidikan	1,610,724,188.00
	5	Dinas PMD	6,393,750.00
	6	BAPPPEDA	3,000,000.00
	7	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	641,666.00
	8	BPBD	14,316,667.00
	9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37,493,580.00
		Alat Studio	240,767,534.00
	1	Kec. Timpeh	2,875,000.00
	2	Dinas Pendidikan	218,767,534.00
	3	Dinas PMD	6,300,000.00
	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12,825,000.00
		Alat Kedokteran	13,663,997.00
	1	Dinas Pendidikan	13,663,997.00
		Alat Laboratorium	1,213,665,971.00
	1	Dinas Pendidikan	1,212,022,971.00
	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,643,000.00
3		Pengurangan Penyusutan Lelang dan Penjualan	554,838,333.00
		Alat Angkut	536,525,000.00
	1	Sekretariat Daerah	488,250,000.00
	2	Dinas Kesehatan	13,625,000.00
	3	DLH	34,650,000.00
		Alat Kantor/RT	18,313,333.00
	1	BKD	18,313,333.00
4		Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal	2,169,975,633.00
		Alat Bengkel	125,350,000.00
	1	Dinas Pertanian	125,350,000.00
		Alat Pertanian	2,500,000.00
	1	Dinas Pertanian	2,500,000.00
		Alat Kantor/RT	120,240,000.00
	1	Dinas Pertanian	120,240,000.00
		Alat Laboratorium	1,921,885,633.00
	1	Dinas Pertanian	1,921,885,633.00
5		Pengurangan Penyusutan Koreksi	16,200,000.00
		Alat Angkut	16,200,000.00
	1	Dinas Pertanian	16,200,000.00

Dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah, maka terjadi perubahan saldo dan nilai penyusutan Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

1. KIB Peralatan dan Mesin dari sembilan sub KIB menjadi 19 sub KIB;

2. Aset Tetap Rambu-rambu yang semula dicatat pada KIB Gedung dan Bangunan sub KIB Monumen pindah ke KIB Peralatan dan Mesin sub KIB Rambu-rambu; dan
3. Aset Tetap Peralatan Olahraga yang semula dicatat pada KIB Aset Tetap Lainnya pindah ke KIB Peralatan Mesin.

Dengan diterapkannya Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 maka terdapat koreksi reklas nilai perolehan dan penyusutan yang terjadi pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat perubahan saldo Peralatan dan Mesin sebagai akibat penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

Tabel 5.2.49 Perubahan Saldo Peralatan Mesin terkait Penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016

No	Nama SKPD Lama	Saldo 31 Des 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2019 (17)	Penambahan/Pengurangan Reklas	Saldo 31 Des 2019 (108)
1	Sekretariat DPRD	11,345,423,479.00	1,100,355,200.00	467,302,000.00	11,978,476,679.00	-	11,978,476,679.00
2	Sekretariat Daerah	27,066,896,652.00	4,640,799,020.00	3,542,987,089.00	28,164,708,583.00	-	28,164,708,583.00
3	Kec. Pulau Punjung	632,607,825.00	-	-	632,607,825.00	-	632,607,825.00
4	Kec. Sitiung	327,327,400.00	277,172,365.00	90,000,000.00	514,499,765.00	-	514,499,765.00
5	Kec. Koto Baru	342,025,136.00	308,572,608.00	90,000,000.00	560,597,744.00	-	560,597,744.00
6	Kec. Sungai Rumbai	384,325,010.00	256,947,365.00	90,000,000.00	551,272,375.00	-	551,272,375.00
7	Kec. IX Koto	558,346,178.00	28,349,625.00	-	586,695,803.00	-	586,695,803.00
8	Kec. Timpeh	403,389,475.00	10,279,500.00	29,772,500.00	383,896,475.00	-	383,896,475.00
9	Kec. Padang Laweh	365,869,010.00	34,967,200.00	-	400,836,210.00	-	400,836,210.00
10	Kec. Tiumang	411,232,425.00	30,000,000.00	-	441,232,425.00	-	441,232,425.00
11	Kec. Koto Besar	359,234,166.00	267,472,365.00	157,950,000.00	468,756,531.00	-	468,756,531.00
12	Kec. Koto Salak	468,769,925.00	64,467,200.00	-	533,237,125.00	-	533,237,125.00
13	Kec. Asam Jujuhan	550,043,625.00	26,360,000.00	3,500,000.00	572,903,625.00	-	572,903,625.00
14	Dinas PUPR	31,045,717,931.00	799,550,313.00	25,750,000.00	31,819,518,244.00	-	31,819,518,244.00
15	Dinas Perkintan	982,940,200.00	217,603,500.00	-	1,200,543,700.00	-	1,200,543,700.00
16	Dinas Perhubungan	1,940,415,226.00	624,318,000.00	-	2,564,733,226.00	1,722,751,150.00	4,287,484,376.00
17	Dinas Kesehatan	30,772,053,530.14	11,543,740,215.00	21,210,000.00	42,294,583,745.14	-	42,294,583,745.14
18	RSUD	26,443,773,286.60	10,306,867,133.00	-	36,750,640,419.60	-	36,750,640,419.60
19	Dinas Pendidikan	28,898,457,267.00	7,903,677,689.00	4,357,743,309.00	32,444,391,647.00	430,494,680.00	32,874,886,327.00
20	Disbuparpora	932,514,501.00	184,691,000.00	-	1,117,205,501.00	-	1,117,205,501.00
21	Disnakertrans	918,434,642.00	61,070,000.00	193,500,000.00	786,004,642.00	-	786,004,642.00
22	DSP3AP2KB	3,011,995,080.00	715,785,000.00	990,070,000.00	2,737,710,080.00	-	2,737,710,080.00
23	Disdukcapil	1,919,218,305.00	1,084,059,137.00	-	3,003,277,442.00	-	3,003,277,442.00
24	Dinas PMD	1,065,869,800.00	39,700,000.00	16,200,000.00	1,089,369,800.00	-	1,089,369,800.00
25	Dinas Pertanian	8,495,723,676.00	240,195,000.00	2,214,315,485.00	6,521,603,191.00	-	6,521,603,191.00
26	Dinas Pangan & Perikanan	4,946,425,447.50	23,710,000.00	-	4,970,135,447.50	-	4,970,135,447.50
27	Diskumperdag	9,712,621,902.20	5,311,020,687.00	-	15,023,642,589.20	-	15,023,642,589.20
28	BKD	4,323,031,010.00	403,225,000.00	177,400,000.00	4,548,856,010.00	-	4,548,856,010.00
29	DPMPTSP	931,775,092.00	206,689,999.00	-	1,138,465,091.00	-	1,138,465,091.00
30	Inspektorat Daerah	1,226,840,781.00	157,950,000.00	-	1,384,790,781.00	-	1,384,790,781.00
31	Bappeda	1,617,682,214.00	106,192,728.00	6,000,000.00	1,717,874,942.00	-	1,717,874,942.00
32	DLH	6,165,702,087.00	127,776,000.00	138,597,000.00	6,154,881,087.00	-	6,154,881,087.00
33	Kankesbangpol	243,682,000.00	15,500,000.00	-	259,182,000.00	-	259,182,000.00
34	Dinas Satpol PP dan Damkar	6,224,624,221.00	275,225,875.00	3,500,000.00	6,496,350,096.00	-	6,496,350,096.00
35	BPBD	2,841,996,350.00	251,628,000.00	136,830,000.00	2,956,794,350.00	-	2,956,794,350.00
36	BKPSDM	1,064,379,131.00	46,450,000.00	-	1,110,829,131.00	-	1,110,829,131.00
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1,492,066,495.00	529,245,590.00	51,961,580.00	1,969,350,505.00	-	1,969,350,505.00
38	Dinas Kominfo	2,063,030,669.00	624,585,000.00	126,000,000.00	2,561,615,669.00	-	2,561,615,669.00
Jumlah		222,496,461,150.44	48,846,198,314.00	12,930,588,963.00	258,412,070,501.44	2,153,245,830.00	260,565,316,331.44

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Terdapat reklas penambahan nilai Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebagai akibat penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Hal ini terjadi karena reklas nilai alat olahraga dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp835.161.291.00,00 (intrakompatabel) dan Aset Lain-lain sebesar Rp45.721.624,00 masuk ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp430.494.680,00 (intrakompatabel) dan Rp450.388.235,00 (ekstrakompatabel). Perbedaan nilai reklas tersebut terjadi karena perbedaan batasan nilai kapitalisasi alat olahraga pada Aset Tetap Lainnya tidak memiliki batasan nilai kapitalisasi sedangkan alat olahraga pada Peralatan Mesin memiliki batasan kapitalisasi Rp1.000.000,00;
2. Terdapat reklas penambahan nilai Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan sebagai akibat penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Hal ini terjadi karena reklas nilai rambu-rambu dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp957.891.250,00 (intrakompatabel) dan Rp764.859.900,00 (ekstrakompatabel) masuk ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.722.751.150 (intrakompatabel). Perbedaan nilai reklas tersebut terjadi karena perbedaan batasan nilai kapitalisasi rambu-rambu pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.000.000,00 sedangkan rambu-rambu pada Peralatan dan Mesin memiliki batasan kapitalisasi Rp1.000.000,00.

Nilai buku dan penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin juga berubah terkait penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat perubahan nilai buku sebagai akibat koreksi reklas penambahan/pengurangan dari KIB selain Peralatan dan Mesin maupun antar Sub KIB di dalam KIB Peralatan dan Mesin serta koreksi reklas penambahan/pengurangan penyusutan.

Tabel 5.2.50
Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016

No.	SKPD	Saldo 31 Desember 2019 (108)	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 (17)	Penambahan/Pengurangan Koreksi Penyusutan (108)	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 (108)	Nilai Buku 31 Desember 2019 (108)
1	Sekretariat DPRD	11.978.476.679,00	7.902.867.140,00	(152.329.843,52)	7.750.537.296,48	4.227.939.382,52
2	Sekretariat Daerah	28.164.708.583,00	18.407.512.279,00	(284.387.829,88)	18.123.124.449,12	10.041.584.133,88
3	Kec. Pulau Punjung	632.607.825,00	495.587.252,00	-	495.587.252,00	137.020.573,00
4	Kec. Sitiung	514.499.765,00	214.370.028,00	(1.998.000,00)	212.372.028,00	302.127.737,00
5	Kec. Koto Baru	560.597.744,00	216.792.906,00	-	216.792.906,00	343.804.838,00
6	Kec. Sungai Rumbai	551.272.375,00	284.485.142,00	(3.643.947,92)	280.841.194,08	270.431.180,92
7	Kec. IX Koto	586.695.803,00	501.598.246,00	-	501.598.246,00	85.097.557,00
8	Kec. Timpeh	383.896.475,00	362.174.902,00	(3.860.747,92)	358.314.154,08	25.582.320,92
9	Kec. Padang Laweh	400.836.210,00	346.828.472,00	(2.672.619,05)	344.155.852,95	56.680.357,05
10	Kec. Tiurang	441.232.425,00	369.205.424,00	(2.975.000,00)	366.230.424,00	75.002.001,00
11	Kec. Koto Besar	468.756.531,00	196.807.081,00	-	196.807.081,00	271.949.450,00
12	Kec. Koto Salak	533.237.125,00	461.502.184,00	(3.577.270,83)	457.924.913,17	75.312.211,83

No.	SKPD	Saldo 31 Desember 2019 (108)	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 (17)	Penambahan/Pengurangan Koreksi Penyusutan (108)	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 (108)	Nilai Buku 31 Desember 2019 (108)
13	Kec. Asam Jujuhan	572.903.625,00	545.156.250,00	(261.905,00)	544.894.345,00	28.009.280,00
14	Dinas PUPR	31.819.518.244,00	25.217.844.862,00	(35.021.082,67)	25.182.823.779,33	6.636.694.464,67
15	Dinas Perkimtan	1.200.543.700,00	746.025.251,00	(1.401.129,33)	744.624.121,67	455.919.578,33
16	Dinas Perhubungan	4.287.484.376,00	1.790.336.901,00	1.170.992.279,93	2.961.329.180,93	1.326.155.195,07
17	Dinas Kesehatan	42.294.583.745,14	23.366.297.569,00	(158.784.739,12)	23.207.512.829,88	19.087.070.915,26
18	RSUD	36.750.640.419,60	18.462.275.346,00	(156.399.928,05)	18.305.875.417,95	18.444.765.001,65
19	Dinas Pendidikan	32.874.886.327,00	16.507.121.615,00	408.990.595,26	16.916.112.210,26	15.958.774.116,74
20	Disbuparpora	1.117.205.501,00	655.006.006,00	(465.679,86)	654.540.326,14	462.665.174,86
21	Disnakertrans	786.004.642,00	676.932.430,00	-	676.932.430,00	109.072.212,00
22	DSP3AP2KB	2.737.710.080,00	2.070.153.632,00	-	2.070.153.632,00	667.556.448,00
23	Disdukcapil	3.003.277.442,00	1.460.633.349,00	(82.850.645,33)	1.377.782.703,67	1.625.494.738,33
24	Dinas PMD	1.089.369.800,00	959.544.467,00	-	959.544.467,00	129.825.333,00
25	Dinas Pertanian	6.521.603.191,00	5.282.968.597,00	(765.440,67)	5.282.203.156,33	1.239.400.034,67
26	Dinas Pangan & Perikanan	4.970.135.447,50	4.398.257.711,50	(12.598.928,57)	4.385.658.782,93	584.476.664,57
27	Diskumperdag	15.023.642.589,20	2.263.499.614,00	(62.670.346,17)	2.200.829.267,83	12.822.813.321,37
28	BKD	4.548.856.010,00	3.221.431.772,00	(38.358.984,58)	3.183.072.787,42	1.365.783.222,58
29	DPMPTSP	1.138.465.091,00	966.471.310,00	-	966.471.310,00	171.993.781,00
30	Inspektorat Daerah	1.384.790.781,00	1.218.190.350,00	-	1.218.190.350,00	166.600.431,00
31	Bappeda	1.717.874.942,00	1.187.195.380,00	(769.167,67)	1.186.426.212,33	531.448.729,67
32	DLH	6.154.881.087,00	4.738.902.233,00	(3.091.428,57)	4.735.810.804,43	1.419.070.282,57
33	Kankesbangpol	259.182.000,00	245.519.500,00	-	245.519.500,00	13.662.500,00
34	Dinas Satpol PP dan Damkar	6.496.350.096,00	4.451.340.686,00	-	4.451.340.686,00	2.045.009.410,00
35	BPBD	2.956.794.350,00	2.694.042.330,00	(7.529.166,67)	2.686.513.163,33	270.281.186,67
36	BKPSDM	1.110.829.131,00	1.003.283.621,00	(1.133.776,00)	1.002.149.845,00	108.679.286,00
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.969.350.505,00	1.281.407.296,00	(740.832,33)	1.280.666.463,67	688.684.041,33
38	Dinas Kominfo	2.561.615.669,00	1.283.680.478,00	(74.001.097,42)	1.209.679.380,58	1.351.936.288,42
Jumlah		260.565.316.331,44	156.453.249.612,50	487.693.338,07	156.940.942.950,57	103.624.373.380,87

V.A.1.c.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, merupakan objek pemeliharaan dan harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp20.000.000,00.

Saldo Gedung dan Bangunan mengalami perubahan sebagai akibat implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Perubahan saldo Gedung dan Bangunan terjadi pada Dinas Perhubungan. Pemberlakuan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 juga menyebabkan bertambahnya sub KIB pada Gedung dan Bangunan yaitu dari dua sub KIB menjadi empat sub KIB. Adapun saldo Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2019 (Permendagri 108) Rp	31 Desember 2019 (Permendagri 17) Rp	31 Desember 2018 Rp	Tren %
Gedung dan Bangunan	620,623,140,974.09	621,581,032,224.09	581,063,337,161.28	106.81%
Akumulasi Penyusutan	(71,728,064,053.00)	(71,831,649,118.00)	(60,208,335,886.00)	119.13%
Nilai Buku	548,895,076,921.09	549,749,383,106.09	520,855,001,275.28	105.38%

Adapun saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan sub KIB adalah sebagai berikut.

Gedung dan Bangunan :	31 Desember 2019 (108) Rp	31 Desember 2019 (17) Rp	31 Desember 2018 Rp	Tren %
Bangunan gedung	589.704.003.624,00	612.790.578.710,09	574,486,884,097.28	102.65%
Monumen	6.442.214.368,00	8.790.453.514,00	6,576,453,064.00	97.96%
Bangunan menara	3.102.481.906,00	-	-	
Tugu titik kontrol/pasti	21.374.441.076,09	-	-	
Akumulasi Penyusutan	(71.728.064.053,00)	(71.831.649.118,00)	(60,208,335,886.00)	119.13%
Nilai Buku	548.895.076.921,09	549.749.383.106,09	520,855,001,275.28	105.38%

Adapun penambahan dan pengurangan 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 serta koreksi penambahan/pengurangan 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.51
Penambahan, Pengurangan, dan Koreksi Penambahan/Pengurangan Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019 (17)	Penambahan Koreksi Aset Tetap	Saldo Aset Tetap 2019
1	Sekretariat DPRD	38.668.259.675,00	2.871.067.855,00	392.143.000,00	41.147.184.530,00	-	41.147.184.530,00
2	Sekretariat Daerah	27.662.722.388,00	12.289.897.599,00	244.244.000,00	39.708.375.987,00	-	39.708.375.987,00
3	Kec. Pulau Punjung	1.146.199.720,00	-	-	1.146.199.720,00	-	1.146.199.720,00
4	Kec. Sitiung	506.918.100,00	-	-	506.918.100,00	-	506.918.100,00
5	Kec. Koto Baru	1.247.767.942,00	-	-	1.247.767.942,00	-	1.247.767.942,00
6	Kec. Sungai Rumbai	996.061.950,00	395.318.228,00	-	1.391.380.178,00	-	1.391.380.178,00
7	Kec. IX Koto	-	89.790.000,00	-	89.790.000,00	-	89.790.000,00
8	Kec. Timpeh	2.046.610.796,00	-	-	2.046.610.796,00	-	2.046.610.796,00
9	Kec. Padang Laweh	1.421.972.473,00	-	-	1.421.972.473,00	-	1.421.972.473,00
10	Kec Tiumang	2.417.904.859,00	-	-	2.417.904.859,00	-	2.417.904.859,00
11	Kec Koto Besar	1.986.529.750,00	200.965.000,00	-	2.187.494.750,00	-	2.187.494.750,00
12	Kec Koto Salak	1.791.379.099,00	181.440.000,00	-	1.972.819.099,00	-	1.972.819.099,00
13	Kec. Asam Jujuhan	2.639.643.500,00	200.865.000,00	-	2.840.508.500,00	-	2.840.508.500,00
14	Dinas PUPR	41.298.397.126,00	1.564.853.508,00	22.351.797.582,00	20.511.453.052,00	-	20.511.453.052,00
15	Dinas PERKIMTAN	349.919.250,00	-	-	349.919.250,00	-	349.919.250,00
16	Dinas Perhubungan	4.139.099.841,00	324.606.900,00	-	4.463.706.741,00	(957.891.250,00)	3.505.815.491,00
17	Dinas Kesehatan	51.532.937.236,00	9.642.938.977,10	34.445.000,00	61.141.431.213,10	-	61.141.431.213,10
18	RSUD	12.144.051.892,00	205.102.000,00	-	12.349.153.892,00	-	12.349.153.892,00
19	Dinas Pendidikan	216.137.297.305,28	24.546.044.857,00	436.975.240,00	240.246.366.922,28	-	240.246.366.922,28
20	Dinas BUDPARPORA	93.573.660.557,00	7.502.276.661,85	-	101.075.937.218,85	-	101.075.937.218,85
21	Dinas TRANSTAKER	3.206.927.439,00	152.290.000,00	-	3.359.217.439,00	-	3.359.217.439,00
22	DSP3KB	2.173.571.518,00	-	-	2.173.571.518,00	-	2.173.571.518,00
23	DISDUKCAPIL	657.548.680,00	183.453.000,00	-	841.001.680,00	-	841.001.680,00
24	Dinas PMD	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	16.858.895.685,00	4.416.712.682,30	4.371.245.136,00	16.904.363.231,30	-	16.904.363.231,30
26	Dinas Pangan dan Perikanan	8.068.107.437,00	442.955.441,00	-	8.511.062.878,00	-	8.511.062.878,00
27	Dinas KUMPERDAG	36.095.048.646,00	3.113.217.311,56	-	39.208.265.957,56	-	39.208.265.957,56
28	BKD	5.569.724.000,00	24.750.000,00	-	5.594.474.000,00	-	5.594.474.000,00
29	DPMPSTP	810.939.000,00	-	-	810.939.000,00	-	810.939.000,00
30	Inspektorat Kabupaten	1.535.427.000,00	-	-	1.535.427.000,00	-	1.535.427.000,00
31	BAPPEDA	-	317.446.750,00	317.446.750,00	-	-	-
32	DLH	2.135.752.292,00	-	-	2.135.752.292,00	-	2.135.752.292,00
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan	-	-	-	-	-	-

No.	SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019 (17)	Penambahan Koreksi Aset Tetap	Saldo Aset Tetap 2019
	DAMKAR						
35	BPBD	-	-	-	-	-	-
36	BKPSDM	937.677.005,00	-	-	937.677.005,00	-	937.677.005,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.306.385.000,00	-	-	1.306.385.000,00	-	1.306.385.000,00
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-	-	-
Jumlah		581.063.337.161,28	68.665.991.770,81	28.148.296.708,00	621.581.032.224,09	(957.891.250,00)	620.623.140.974,09

Akumulasi penyusutan dan nilai buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan koreksi penyusutan versi Permendagri 108 Tahun 2016 per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.52
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 (17)

No.	SKPD	Saldo 31 Desember 2019 (17)	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 2019 (17)
1	Sekretariat DPRD	41,147,184,530.00	3,863,654,461.00	902,421,455.00	19,872,422.00	4,746,203,494.00
2	Sekretariat Daerah	39,708,375,987.00	3,161,478,900.00	669,564,757.00	42,407,764.00	3,788,635,893.00
3	Kec. Pulau Punjung	1,146,199,720.00	215,371,938.00	24,798,344.00	-	240,170,282.00
4	Kec. Sitiung	506,918,100.00	95,875,935.00	10,692,764.00	-	106,568,699.00
5	Kec. Koto Baru	1,247,767,942.00	160,472,263.00	25,615,517.00	-	186,087,780.00
6	Kec. Sngai Rumbai	1,391,380,178.00	202,442,531.00	26,240,670.00	-	228,683,201.00
7	Kec. IX Koto	89,790,000.00	-	1,945,450.00	-	1,945,450.00
8	Kec. Timpeh	2,046,610,796.00	229,734,132.00	40,932,216.00	-	270,666,348.00
9	Kec. Padang Laweh	1,421,972,473.00	166,034,147.00	28,439,450.00	-	194,473,597.00
10	Kec Tiumbang	2,417,904,859.00	132,916,368.00	48,695,235.00	-	181,611,603.00
11	Kec Koto Besar	2,187,494,750.00	293,030,723.00	40,448,964.00	-	333,479,687.00
12	Kec Koto Salak	1,972,819,099.00	174,539,796.00	39,859,032.00	-	214,398,828.00
13	Kec. Asam Jujuhan	2,840,508,500.00	321,572,987.00	53,234,771.00	-	374,807,758.00
14	Dinas PUPR	20,511,453,052.00	1,446,463,530.00	412,126,626.00	574,240,687.00	1,284,349,469.00
15	Dinas PERKIMTAN	349,919,250.00	5,746,118.00	6,998,385.00	-	12,744,503.00
16	Dinas Perhubungan	4,463,706,741.00	442,475,647.00	85,872,489.00	-	528,348,136.00
17	Dinas Kesehatan	61,141,431,213.10	4,763,459,173.00	1,485,118,318.00	3,100,050.00	6,245,477,441.00
18	RSUD	12,349,153,892.00	2,269,840,516.00	375,139,681.00	-	2,644,980,197.00
19	Dinas Pendidikan	240,246,366,922.28	27,009,253,648.00	4,330,346,538.00	79,424,203.00	31,260,175,983.00
20	Dinas BUDPARPORA	101,075,937,218.85	7,355,114,433.00	2,314,228,905.00	-	9,669,343,338.00
21	Dinas TRANSNAKER	3,359,217,439.00	696,662,495.00	99,887,584.00	-	796,550,079.00

No.	SKPD	Saldo 31 Desember 2019 (17)	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 2019 (17)
22	DSP3KB	2,173,571,518.00	185,565,926.00	43,471,430.00	-	229,037,356.00
23	DISDUKCAPIL	841,001,680.00	236,531,263.00	42,419,910.00	-	278,951,173.00
24	Dinas PMD	-	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	16,904,363,231.30	2,085,784,031.00	392,821,738.00	309,303,670.00	2,169,302,099.00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	8,511,062,878.00	1,838,931,128.00	173,041,814.00	-	2,011,972,942.00
27	Dinas KUMPERDAG	39,208,265,957.56	1,809,709,779.00	728,809,914.00	-	2,538,519,693.00
28	BKD	5,594,474,000.00	330,101,685.00	111,982,297.00	-	442,083,982.00
29	DPMPTSP	810,939,000.00	109,711,615.00	16,576,230.00	-	126,287,845.00
30	Inspektorat Kabupaten	1,535,427,000.00	94,684,665.00	30,708,540.00	-	125,393,205.00
31	BAPPPEDA	-	-	-	-	-
32	DLH	2,135,752,292.00	295,705,509.00	43,975,138.00	-	339,680,647.00
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-	-
36	BKPSDM	937,677,005.00	135,928,469.00	19,120,166.00	-	155,048,635.00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,306,385,000.00	79,542,075.00	26,127,700.00	-	105,669,775.00
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-	-
Jumlah		621,581,032,224.09	60,208,335,886.00	12,651,662,028.00	1,028,348,796.00	71,831,649,118.00

Tabel 5.2.53
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 (108)

No.	SKPD	Saldo 31 Desember 2019 (108)	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 (17)	Koreksi Penambahan/ Pengurangan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 (108)	Nilai Buku 31 Desember 2019 (108)
1	Sekretariat DPRD	41.147.184.530,00	4.746.203.494,00	-	4.746.203.494,00	36.400.981.036,00
2	Sekretariat Daerah	39.708.375.987,00	3.788.635.893,00	-	3.788.635.893,00	35.919.740.094,00
3	Kec. Pulau Punjung	1.146.199.720,00	240.170.282,00	-	240.170.282,00	906.029.438,00
4	Kec. Sitiung	506.918.100,00	106.568.699,00	-	106.568.699,00	400.349.401,00
5	Kec. Koto Baru	1.247.767.942,00	186.087.780,00	-	186.087.780,00	1.061.680.162,00
6	Kec. Sungai Rumbai	1.391.380.178,00	228.683.201,00	-	228.683.201,00	1.162.696.977,00
7	Kec. IX Koto	89.790.000,00	1.945.450,00	-	1.945.450,00	87.844.550,00
8	Kec. Timpeh	2.046.610.796,00	270.666.348,00	-	270.666.348,00	1.775.944.448,00
9	Kec. Padang Laweh	1.421.972.473,00	194.473.597,00	-	194.473.597,00	1.227.498.876,00
10	Kec. Tiumang	2.417.904.859,00	181.611.603,00	-	181.611.603,00	2.236.293.256,00
11	Kec Koto Besar	2.187.494.750,00	333.479.687,00	-	333.479.687,00	1.854.015.063,00

No.	SKPD	Saldo 31 Desember 2019 (108)	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 (17)	Koreksi Penambahan/ Pengurangan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 (108)	Nilai Buku 31 Desember 2019 (108)
12	Kec Koto Salak	1.972.819.099,00	214.398.828,00	-	214.398.828,00	1.758.420.271,00
13	Kec. Asam Jujuhan	2.840.508.500,00	374.807.758,00	-	374.807.758,00	2.465.700.742,00
14	Dinas PUPR	20.511.453.052,00	1.284.349.469,00	-	1.284.349.469,00	19.227.103.583,00
15	Dinas PERKIMTAN	349.919.250,00	12.744.503,00	-	12.744.503,00	337.174.747,00
16	Dinas Perhubungan	3.505.815.491,00	528.348.136,00	(103.585.065,00)	424.763.071,00	3.081.052.420,00
17	Dinas Kesehatan	61.141.431.213,10	6.245.477.441,00	-	6.245.477.441,00	54.895.953.772,10
18	RSUD	12.349.153.892,00	2.644.980.197,00	-	2.644.980.197,00	9.704.173.695,00
19	Dinas Pendidikan	240.246.366.922,28	31.260.175.983,00	(0,00)	31.260.175.983,00	208.986.190.939,28
20	Dinas BUDPARPORA	101.075.937.218,85	9.669.343.338,00	-	9.669.343.338,00	91.406.593.880,85
21	Dinas TRANSNAKER	3.359.217.439,00	796.550.079,00	-	796.550.079,00	2.562.667.360,00
22	DSP3KB	2.173.571.518,00	229.037.356,00	-	229.037.356,00	1.944.534.162,00
23	DISDUKCAPIL	841.001.680,00	278.951.173,00	-	278.951.173,00	562.050.507,00
24	Dinas PMD	-	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	16.904.363.231,30	2.169.302.099,00	-	2.169.302.099,00	14.735.061.132,30
26	Dinas Pangan dan Perikanan	8.511.062.878,00	2.011.972.942,00	-	2.011.972.942,00	6.499.089.936,00
27	Dinas KUMPERDAG	39.208.265.957,56	2.538.519.693,00	-	2.538.519.693,00	36.669.746.264,56
28	BKD	5.594.474.000,00	442.083.982,00	-	442.083.982,00	5.152.390.018,00
29	DPMPSTP	810.939.000,00	126.287.845,00	-	126.287.845,00	684.651.155,00
30	Inspektorat Kabupaten	1.535.427.000,00	125.393.205,00	-	125.393.205,00	1.410.033.795,00
31	BAPPPEDA	-	-	-	-	-
32	DLH	2.135.752.292,00	339.680.647,00	-	339.680.647,00	1.796.071.645,00
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-	-
36	BKPSDM	937.677.005,00	155.048.635,00	-	155.048.635,00	782.628.370,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.306.385.000,00	105.669.775,00	-	105.669.775,00	1.200.715.225,00
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-	-
Jumlah		620.623.140.974,09	71.831.649.118,00	(103.585.065,00)	71.728.064.053,00	548.895.076.921,09

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sehingga menghasilkan saldo per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 berdasarkan perolehan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.54
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007

Penambahan Gedung dan Bangunan 2019		68,665,991,770.81
1	Belanja Modal Menjadi Aset	42,212,290,989.81
2	Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset	13,389,232.00
3	Hibah Masyarakat Menjadi Aset	30,000,000.00
4	Dana Bos Menjadi Aset	58,885,000.00
5	Dana BLUD Menjadi Aset	150,981,330.00
6	Honor Pokja Menjadi Aset	34,740,000.00
7	Hutang 2019	194,184,000.00
8	Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	3,824,997,000.00
9	Kurang Catat	14,050,000.00
10	Mutasi Antar SKPD Menambah Aset	21,116,304,414.00
11	Mutasi Honor Pokja Antar SKPD	32,190,000.00
12	Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	208,918,000.00
13	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	570,446,750.00
14	Persediaan 2018 menjadi aset	204,615,055.00
Pengurangan Gedung dan Bangunan 2018		28,148,296,708.00
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	392,143,000.00
2	Pengurangan Mutasi Antar SKPD	21,116,304,414.00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	32,190,000.00
4	Pengurangan Koreksi Pencatatan	126,678,304.00
5	Lelang dan Penjualan	212,054,000.00
6	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	436,975,240.00
7	Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal	5,831,951,750.00
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 (17)		621,581,032,224.09

Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 per SKPD sebesar Rp68.665.991.770,81,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.55
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
versi Permendagri 17 Tahun 2007

No	SKPD/Asal Penambahan		Jumlah
1	Belanja Modal Menjadi Aset		42,212,290,989.81
	Bangunan Gedung		40,099,211,269.81
	1	Sekretariat DPRD	409,392,800.00
	2	Sekretariat Daerah	747,285,400.00
	3	Dinas PUPR	806,422,483.00
	4	Dinas Perhubungan	324,606,900.00
	5	Dinas Kesehatan	8,458,690,415.10
	6	RSUD	205,102,000.00
	7	Dinas Pendidikan	23,300,003,357.00
	8	Dinas BUDPARPORA	654,962,920.85
	9	DISDUKCAPIL	149,008,000.00
	10	Dinas Pertanian	1,540,805,682.30
	11	Dinas Pangan dan Perikanan	372,584,000.00
	12	Dinas KUMPERDAG	3,105,597,311.56
	13	BKD	24,750,000.00
	Monumen		2,113,079,720.00
	1	Dinas PUPR	106,631,970.00
	2	Dinas Pendidikan	1,143,106,500.00
	3	Dinas BUDPARPORA	863,341,250.00
2	Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset		13,389,232.00
	Bangunan Gedung		13,389,232.00
	1	Sekretariat DPRD	2,100,000.00
	2	Sekretariat Daerah	150,000.00
	3	Dinas Kesehatan	11,139,232.00
3	Hibah Masyarakat Menjadi Aset		30,000,000.00
	Bangunan Gedung		30,000,000.00
	1	Dinas Pendidikan	30,000,000.00
4	Dana Bos Menjadi Aset		58,885,000.00
	Bangunan Gedung		58,885,000.00
	1	Dinas Pendidikan	58,885,000.00
5	Dana BLUD Menjadi Aset		150,981,330.00
	Bangunan Gedung		61,944,600.00

No	SKPD/Asal Penambahan		Jumlah
	1	Dinas Kesehatan	61,944,600.00
		Monumen	89,036,730.00
	1	Dinas Kesehatan	89,036,730.00
6		Honor Pokja Menjadi Aset	34,740,000.00
		Bangunan Gedung	34,740,000.00
	1	Sekretariat Daerah	34,740,000.00
7		Utang 2019	194,184,000.00
		Bangunan Gedung	182,300,000.00
	1	Dinas PUPR	182,300,000.00
		Monumen	11,884,000.00
	1	Dinas PUPR	11,884,000.00
8		Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	3,824,997,000.00
		Bangunan Gedung	3,824,997,000.00
	1	Dinas Kesehatan	801,900,000.00
	2	Dinas TRANSTAKER	152,290,000.00
	3	Dinas Pertanian	2,870,807,000.00
9		Kurang Catat	14,050,000.00
		Bangunan Gedung	14,050,000.00
	1	Dinas Pendidikan	14,050,000.00
10		Mutasi Antar SKPD Menambah Aset	21,116,304,414.00
		Bangunan Gedung	21,116,304,414.00
	1	Sekretariat DPRD	2,459,575,055.00
	2	Sekretariat Daerah	11,507,722,199.00
	3	Kec. Sngai Rumbai	395,318,228.00
	4	Kec. IX Koto	89,790,000.00
	5	Kec Koto Besar	200,965,000.00
	6	Kec Koto Salak	181,440,000.00
	7	Kec. Asam Jujuhan	200,865,000.00
	8	Dinas BUDPARPORA	5,975,812,491.00
	9	DISDUKCAPIL	34,445,000.00
	10	Dinas Pangan dan Perikanan	70,371,441.00
11		Mutasi Honor Pokja Antar SKPD	32,190,000.00
		Bangunan Gedung	32,190,000.00
	1	Dinas Kesehatan	11,310,000.00
	2	Dinas BUDPARPORA	8,160,000.00
	3	Dinas Pertanian	5,100,000.00
	4	Dinas KUMPERDAG	7,620,000.00
12		Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	208,918,000.00
		Bangunan Gedung	208,918,000.00
	1	Dinas Kesehatan	208,918,000.00
13		Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	570,446,750.00
		Bangunan Gedung	570,446,750.00
	1	Dinas PUPR	253,000,000.00
	2	BAPPPEDA	317,446,750.00
14		Persediaan 2018 menjadi aset	204,615,055.00
		Bangunan Gedung	204,615,055.00
	1	Dinas PUPR	204,615,055.00

Rincian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Utang sebesar Rp194.184.000,00 terdapat pada Dinas PUPR adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.56
Uraian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Utang

No	Uraian	Jumlah
1	Taman Embung Nagari Sitiung	182,300,000.00
2	Pengawasan RTH Simpang Tabek dan Taman Embung Nagari Sitiung	11,884,000.00
J U M L A H		194,184,000.00

Rincian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Penilaian Kurang Catat sebesar Rp3.824.997.000,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.57
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Penilaian Kurang Catat

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Alamat/ Lokasi	Tahun Perolehan	Luas (M2)	NJOP	Nilai (Rp)
1	Dinas Pertanian					2,870,807,000.00
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	kenagarian Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung	1990	351	4,050,000	1,422,360,000.00
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	kenagarian Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung	1990	123	4,050,000	496,125,000.00
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	kenagarian Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung	1990	133	4,050,000	537,354,000.00

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Alamat/ Lokasi	Tahun Perolehan	Luas (M2)	NJOP	Nilai (Rp)
	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	kenagarian Sungai Kambut, Kec. Pulaui Punjung	1990	196	188,000	36,848,000.00
	Gedung Pos Jaga Permanen	kenagarian Sungai Kambut, Kec. Pulaui Punjung	2005	28	4,050,000	113,400,000.00
	Konstruksi Pagar	kenagarian Sungai Kambut, Kec. Pulaui Punjung	2005	276	960,000	264,720,000.00
2	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					152,290,000.00
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Komlek BLK kenagarian Sungai Kambut, Kec. Pulaui Punjung	2009	100	392,500	39,250,000.00
	Rumah Negara Golongan I Type D Permanen	Komlek BLK kenagarian Sungai Kambut, Kec. Pulaui Punjung	2009	144	392,500	56,520,000.00
	Rumah Negara Golongan I Type D Permanen	Komlek BLK kenagarian Sungai Kambut, Kec. Pulaui Punjung	2009	144	392,500	56,520,000.00
3	Dinas Pendidikan					801,900,000.00
	Bangunan kesehatan lainnya	Jorong Sitiung Kecamatan Sitiung	2000	81	4,050,000	328,050,000.00
	Bangunan kesehatan lainnya	Jorong Sungai Duo Kecamatan Sitiung	2000	117	4,050,000	473,850,000.00
J U M L A H						3,824,997,000.00

Penambahan nilai Bangunan Gedung yang berasal dari Persediaan sebesar Rp204.615.055 adalah berupa lanjutan pembangunan gedung perkuliahan Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya.

Adapun rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 per SKPD sebesar Rp28.148.296.708,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.58
 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
 versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007

Pengurangan Gedung dan Bangunan 2019		28,148,296,708.00
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	392,143,000.00
	Bangunan Gedung	392,143,000.00
1	Sekretariat DPRD	392,143,000.00
2	Pengurangan Mutasi Antar SKPD	21,116,304,414.00
	Bangunan Gedung	21,116,304,414.00
1	Dinas PUPR	20,694,041,223.00
2	Dinas Kesehatan	34,445,000.00
3	Dinas Pertanian	70,371,441.00
4	BAPPPEDA	317,446,750.00
3	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	32,190,000.00
	Bangunan Gedung	32,190,000.00
1	Dinas Kesehatan	11,310,000.00
2	Dinas BUDPARPORA	8,160,000.00
3	Dinas Pertanian	5,100,000.00
4	Dinas KUMPERDAG	7,620,000.00
4	Pengurangan Koreksi Pencatatan	126,678,304.00
	Bangunan Gedung	126,678,304.00
1	Dinas PUPR	126,678,304.00
5	Lelang dan Penjualan	212,054,000.00
	Bangunan Gedung	212,054,000.00
1	Sekretariat Daerah	212,054,000.00
6	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	436,975,240.00
	Bangunan Gedung	436,975,240.00
1	Dinas Pendidikan	436,975,240.00
7	Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal	5,831,951,750.00
	Bangunan Gedung	5,831,951,750.00
1	Dinas PUPR	1,531,078,055.00
2	Dinas Pertanian	4,300,873,695.00
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 (17)		621,581,032,224.09

Pengurangan saldo Gedung dan Bangunan yang berasal penjualan langsung berupa bangunan gedung serbaguna (Mushola dan Korpri) senilai Rp212.054.000,00 yang tidak dimanfaatkan lagi dan telah mengganggu rencana pengembangan gedung kantor Sekretariat Daerah sehingga di lakukan pembongkaran dan sisa bongkaran berupa atap seng telah dijual senilai Rp480.000,00.

Pengurangan saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.831.951.750,00 adalah berupa hibah ke Kementerian Riset dan Dikti melalui Naskah Hibah Daerah antara

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Kementerian Riset dan Dikti Nomor 030/114/BKD/X-2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang digunakan sebagai gedung perkuliahan dan kantor Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya yang tercatat pada Dinas Pertanian dan Dinas PUPR.

Penambahan dan pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.59
Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2018		60,208,335,886.00
Penambahan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2019		12,651,662,028.00
1	Penambahan Penyusutan pindah SKPD	482,753,789.00
2	Penyusutan Semester I	5,686,153,571.00
3	Penyusutan Semester II	6,482,754,668.00
Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2019		1,028,348,796.00
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar SKPD	482,753,789.00
2	Pengurangan Penyusutan Reklas	79,424,203.00
3	Pengurangan Penyusutan Lelang dan Penjualan	28,240,153.00
4	Pengurangan Penyusutan Hibah ke Instansi Vertikal	322,301,541.00
5	Pengurangan Penyusutan Koreksi	115,629,110.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 (17)		71,831,649,118.00
Nilai Buku Aset Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 (17)		549,749,383,106.09

Rincian Penambahan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.651.662.028,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.60
Penambahan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2019 (17)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2018		60,208,335,886.00
Penambahan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2019		12,651,662,028.00
1	Penambahan Penyusutan pindah SKPD	12,651,662,028.00
	Bangunan Gedung	482,753,789.00
1	Sekretariat DPRD	88,612,280.00
2	Sekretariat Daerah	18,317,960.00
3	Kec. Sngai Rumbai	658,864.00
4	Kec. IX Koto	149,650.00
5	Kec Koto Besar	334,942.00
6	Kec Koto Salak	302,400.00
7	Kec. Asam Jujuhan	334,775.00
8	Dinas BUDPARPORA	366,603,297.00
9	DISDUKCAPIL	3,100,050.00
10	Dinas Pangan dan Perikanan	4,339,571.00
2	Penyusutan Semester I	5,686,153,571.00
	Bangunan Gedung	5,620,389,039.00
1	Sekretariat DPRD	388,827,694.00
2	Sekretariat Daerah	288,652,638.00
3	Kec. Pulau Punjung	12,399,172.00
4	Kec. Sitiung	5,346,382.00
5	Kec. Koto Baru	12,807,758.00
6	Kec. Sngai Rumbai	12,644,089.00
7	Kec. Timpeh	20,466,108.00
8	Kec. Padang Laweh	14,219,725.00
9	Kec Tiumbang	24,347,618.00
10	Kec Koto Besar	20,029,749.00
11	Kec Koto Salak	17,963,916.00
12	Kec. Asam Jujuhan	26,439,314.00
13	Dinas PUPR	197,876,099.00
14	Dinas PERKIMTAN	3,499,192.00
15	Dinas Perhubungan	31,996,784.00
16	Dinas Kesehatan	547,404,294.00
17	RSUD	187,398,922.00
18	Dinas Pendidikan	2,089,085,616.00
19	Dinas BUDPARPORA	911,558,687.00
20	Dinas TRANSTAKER	34,587,884.00
21	DSP3KB	21,735,715.00
22	DISDUKCAPIL	17,560,919.00
23	Dinas Pertanian	164,666,288.00
24	Dinas Pangan dan Perikanan	82,952,136.00

	25	Dinas KUMPERDAG	361,810,608.00
	26	BKD	55,857,845.00
	27	DPMPTSP	8,288,115.00
	28	Inspektorat Kabupaten	15,354,270.00
	29	DLH	21,987,569.00
	30	BKPSDM	9,560,083.00
	31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13,063,850.00
	Monumen		65,764,532.00
	1	Sekretariat Daerah	398,670.00
	2	Dinas PUPR	4,359,004.00
	3	Dinas Perhubungan	9,578,913.00
	4	Dinas Pendidikan	51,427,945.00
3	Penyusutan Semester II		6,482,754,668.00
	Bangunan Gedung		6,413,094,125.00
	1	Sekretariat DPRD	424,981,481.00
	2	Sekretariat Daerah	361,796,819.00
	3	Kec. Pulau Punjung	12,399,172.00
	4	Kec. Sitiung	5,346,382.00
	5	Kec. Koto Baru	12,807,759.00
	6	Kec. Sngai Rumbai	12,937,717.00
	7	Kec. IX Koto	1,795,800.00
	8	Kec. Timpeh	20,466,108.00
	9	Kec. Padang Laweh	14,219,725.00
	10	Kec Tiumbang	24,347,617.00
	11	Kec Koto Besar	20,084,273.00
	12	Kec Koto Salak	21,592,716.00
	13	Kec. Asam Jujuhan	26,460,682.00
	14	Dinas PUPR	205,334,993.00
	15	Dinas PERKIMTAN	3,499,193.00
	16	Dinas Perhubungan	34,717,880.00
	17	Dinas Kesehatan	937,359,621.00
	18	RSUD	187,740,759.00
	19	Dinas Pendidikan	2,136,499,851.00
	20	Dinas BUDPARPORA	1,034,628,019.00
	21	Dinas TRANSSAKER	65,299,700.00
	22	DSP3KB	21,735,715.00
	23	DISDUKCAPIL	21,758,941.00
	24	Dinas Pertanian	228,155,450.00
	25	Dinas Pangan dan Perikanan	85,750,107.00
	26	Dinas KUMPERDAG	366,999,306.00
	27	BKD	56,124,452.00
	28	DPMPTSP	8,288,115.00
	29	Inspektorat Kabupaten	15,354,270.00
	30	DLH	21,987,569.00
	31	BKPSDM	9,560,083.00
	32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13,063,850.00
	Monumen		69,660,543.00
	1	Sekretariat Daerah	398,670.00
	2	Dinas PUPR	4,556,530.00
	3	Dinas Perhubungan	9,578,912.00
	4	Dinas Kesehatan	354,403.00
	5	Dinas Pendidikan	53,333,126.00
	6	Dinas BUDPARPORA	1,438,902.00

Rincian pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.028.348.796,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.61
Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2019(17)

Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2019			1,028,348,796.00
1	Pengurangan Penyusutan Mutasi Antar SKPD		482,753,789.00
	Bangunan Gedung		482,753,789.00
	1	Dinas PUPR	475,314,168.00
	2	Dinas Kesehatan	3,100,050.00
	3	Dinas Pertanian	4,339,571.00
2	Pengurangan Penyusutan Reklas		79,424,203.00
	Bangunan Gedung		79,424,203.00
	1	Dinas Pendidikan	79,424,203.00
3	Pengurangan Penyusutan Lelang dan Penjualan		28,240,153.00
	Bangunan Gedung		28,240,153.00
	1	Sekretariat Daerah	28,240,153.00
4	Pengurangan Penyusutan Hibah ke Instansi Vertikal		322,301,541.00
	Bangunan Gedung		322,301,541.00

	1	Dinas Pertanian	240,502,989.00
	2	Dinas PUPR	81,798,552.00
5	Pengurangan Penyusutan Koreksi		115,629,110.00
	Bangunan Gedung		115,629,110.00
	1	Sekretariat DPRD	19,872,422.00
	2	Sekretariat Daerah	14,167,611.00
	3	Dinas PUPR	17,127,967.00
	4	Dinas Pertanian	64,461,110.00

Dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah mengakibatkan perubahan saldo dan nilai penyusutan Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

1. Sub KIB Gedung dan Bangunan sebelumnya terdiri dari dua sub KIB (Bangunan Gedung dan Monumen) menjadi empat sub KIB (Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, dan Tugu Titik Kontrol);
2. Reklas Aset Rambu-rambu dari Bangunan Gedung ke Peralatan Mesin terjadi pada Dinas Perhubungan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2.62
Penambahan/Pengurangan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan
versi Permendagri 108 tahun 2016

No	Nama SKPD	SALDO 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019 (17)	Penambahan/ Pengurangan Reklas Aset Tetap (108)	Saldo 31 Desember 2019 (108)
1	Sekretariat DPRD	38,668,259,675.00	2,871,067,855.00	392,143,000.00	41,147,184,530.00	-	41,147,184,530.00
2	Sekretariat Daerah	27,662,722,388.00	12,289,897,599.00	244,244,000.00	39,708,375,987.00	-	39,708,375,987.00
3	Kec. Pulau Punjung	1,146,199,720.00	-	-	1,146,199,720.00	-	1,146,199,720.00
4	Kec. Sitiung	506,918,100.00	-	-	506,918,100.00	-	506,918,100.00
5	Kec. Koto Baru	1,247,767,942.00	-	-	1,247,767,942.00	-	1,247,767,942.00
6	Kec. Sngai Rumbai	996,061,950.00	395,318,228.00	-	1,391,380,178.00	-	1,391,380,178.00
7	Kec. IX Koto	-	89,790,000.00	-	89,790,000.00	-	89,790,000.00
8	Kec. Timpeh	2,046,610,796.00	-	-	2,046,610,796.00	-	2,046,610,796.00
9	Kec. Padang Laweh	1,421,972,473.00	-	-	1,421,972,473.00	-	1,421,972,473.00
10	Kec Tiumang	2,417,904,859.00	-	-	2,417,904,859.00	-	2,417,904,859.00
11	Kec Koto Besar	1,986,529,750.00	200,965,000.00	-	2,187,494,750.00	-	2,187,494,750.00
12	Kec Koto Salak	1,791,379,099.00	181,440,000.00	-	1,972,819,099.00	-	1,972,819,099.00
13	Kec. Asam Jujuhan	2,639,643,500.00	200,865,000.00	-	2,840,508,500.00	-	2,840,508,500.00
14	Dinas PUPR	41,298,397,126.00	1,564,853,508.00	22,351,797,582.00	20,511,453,052.00	-	20,511,453,052.00
15	Dinas PERKIMTAN	349,919,250.00	-	-	349,919,250.00	-	349,919,250.00
16	Dinas Perhubungan	4,139,099,841.00	324,606,900.00	-	4,463,706,741.00	(957,891,250.00)	3,505,815,491.00
17	Dinas Kesehatan	51,532,937,236.00	9,642,938,977.10	34,445,000.00	61,141,431,213.10	-	61,141,431,213.10
18	RSUD	12,144,051,892.00	205,102,000.00	-	12,349,153,892.00	-	12,349,153,892.00
19	Dinas Pendidikan	216,137,297,305.28	24,546,044,857.00	436,975,240.00	240,246,366,922.28	-	240,246,366,922.28
20	Dinas BUDPARPORA	93,573,660,557.00	7,502,276,661.85	-	101,075,937,218.85	-	101,075,937,218.85
21	Dinas TRANSAKER	3,206,927,439.00	152,290,000.00	-	3,359,217,439.00	-	3,359,217,439.00
22	DSP3KB	2,173,571,518.00	-	-	2,173,571,518.00	-	2,173,571,518.00
23	DISDUKCAPIL	657,548,680.00	183,453,000.00	-	841,001,680.00	-	841,001,680.00
24	Dinas PMD	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	16,858,895,685.00	4,416,712,682.30	4,371,245,136.00	16,904,363,231.30	-	16,904,363,231.30
26	Dinas Pangan dan Perikanan	8,068,107,437.00	442,955,441.00	-	8,511,062,878.00	-	8,511,062,878.00
27	Dinas KUMPERDAG	36,095,048,646.00	3,113,217,311.56	-	39,208,265,957.56	-	39,208,265,957.56
28	BKD	5,569,724,000.00	24,750,000.00	-	5,594,474,000.00	-	5,594,474,000.00
29	DPMPTSP	810,939,000.00	-	-	810,939,000.00	-	810,939,000.00
30	Inspektorat Kabupaten	1,535,427,000.00	-	-	1,535,427,000.00	-	1,535,427,000.00
31	BAPPPEDA	-	317,446,750.00	317,446,750.00	-	-	-
32	DLH	2,135,752,292.00	-	-	2,135,752,292.00	-	2,135,752,292.00

No	Nama SKPD	SALDO 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019 (17)	Penambahan/ Pengurangan Reklas Aset Tetap (108)	Saldo 31 Desember 2019 (108)
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-	-	-
36	BKPSDM	937,677,005.00	-	-	937,677,005.00	-	937,677,005.00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,306,385,000.00	-	-	1,306,385,000.00	-	1,306,385,000.00
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-	-	-
Jumlah		581,063,337,161.28	68,665,991,770.81	28,148,296,708.00	621,581,032,224.09	(957,891,250.00)	620,623,140,974.09

Saldo aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 (versi Permendagri Nomor 17 tahun 2007) jika dibandingkan dengan 31 Desember 2019 (versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016) terjadi penurunan sebesar Rp957.891.250,00 hal ini terjadi karena reklas nilai Aset Tetap Rambu-rambu (intrakompatabel) pada Dinas Perhubungan dari Bangunan Gedung ke Peralatan Mesin

Uraian Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 (versi Permendagri Nomor 17 tahun 2007) dan per 31 Desember 2019 (versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016) adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.63
Penambahan/Pengurangan Penyusutan
versi Permendagri 108 Tahun 2016

No	Nama SKPD	Saldo 31 Desember 2019 (108)	Akumulasi Penyusutan 2019 (17)	Koreksi Penambahan/Pengurangan Penyusutan (108)	Akumulasi Penyusutan 2019 (108)	Nilai Buku 31 Desember 2019 (108)
1	Sekretariat DPRD	41,147,184,530.00	4,746,203,494.00	-	4,746,203,494.00	36,400,981,036.00
2	Sekretariat Daerah	39,708,375,987.00	3,788,635,893.00	-	3,788,635,893.00	35,919,740,094.00
3	Kec. Pulau Punjung	1,146,199,720.00	240,170,282.00	-	240,170,282.00	906,029,438.00
4	Kec. Sitiung	506,918,100.00	106,568,699.00	-	106,568,699.00	400,349,401.00
5	Kec. Koto Baru	1,247,767,942.00	186,087,780.00	-	186,087,780.00	1,061,680,162.00
6	Kec. Sungai Rumbai	1,391,380,178.00	228,683,201.00	-	228,683,201.00	1,162,696,977.00
7	Kec. IX Koto	89,790,000.00	1,945,450.00	-	1,945,450.00	87,844,550.00
8	Kec. Timpeh	2,046,610,796.00	270,666,348.00	-	270,666,348.00	1,775,944,448.00
9	Kec. Padang Laweh	1,421,972,473.00	194,473,597.00	-	194,473,597.00	1,227,498,876.00
10	Kec Tiumbang	2,417,904,859.00	181,611,603.00	-	181,611,603.00	2,236,293,256.00

No	Nama SKPD	Saldo 31 Desember 2019 (108)	Akumulasi Penyusutan 2019 (17)	Koreksi Penambahan/Peng urangan Penyusutan (108)	Akumulasi Penyusutan 2019 (108)	Nilai Buku 31 Desember 2019 (108)
11	Kec Koto Besar	2,187,494,750.00	333,479,687.00	-	333,479,687.00	1,854,015,063.00
12	Kec Koto Salak	1,972,819,099.00	214,398,828.00	-	214,398,828.00	1,758,420,271.00
13	Kec. Asam Jujuhan	2,840,508,500.00	374,807,758.00	-	374,807,758.00	2,465,700,742.00
14	Dinas PUPR	20,511,453,052.00	1,284,349,469.00	-	1,284,349,469.00	19,227,103,583.00
15	Dinas PERKIMTAN	349,919,250.00	12,744,503.00	-	12,744,503.00	337,174,747.00
16	Dinas Perhubungan	3,505,815,491.00	528,348,136.00	(103,585,065.00)	424,763,071.00	3,081,052,420.00
17	Dinas Kesehatan	61,141,431,213.10	6,245,477,441.00	-	6,245,477,441.00	54,895,953,772.10
18	RSUD	12,349,153,892.00	2,644,980,197.00	-	2,644,980,197.00	9,704,173,695.00
19	Dinas Pendidikan	240,246,366,922.28	31,260,175,983.00	-	31,260,175,983.00	208,986,190,939.28
20	Dinas BUDPARPORA	101,075,937,218.85	9,669,343,338.00	-	9,669,343,338.00	91,406,593,880.85
21	Dinas TRANSNAKER	3,359,217,439.00	796,550,079.00	-	796,550,079.00	2,562,667,360.00
22	DSP3KB	2,173,571,518.00	229,037,356.00	-	229,037,356.00	1,944,534,162.00
23	DISDUKCAPIL	841,001,680.00	278,951,173.00	-	278,951,173.00	562,050,507.00
24	Dinas PMD	-	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	16,904,363,231.30	2,169,302,099.00	-	2,169,302,099.00	14,735,061,132.30
26	Dinas Pangan dan Perikanan	8,511,062,878.00	2,011,972,942.00	-	2,011,972,942.00	6,499,089,936.00
27	Dinas KUMPERDAG	39,208,265,957.56	2,538,519,693.00	-	2,538,519,693.00	36,669,746,264.56
28	BKD	5,594,474,000.00	442,083,982.00	-	442,083,982.00	5,152,390,018.00
29	DPMPSTSP	810,939,000.00	126,287,845.00	-	126,287,845.00	684,651,155.00
30	Inspektorat Kabupaten	1,535,427,000.00	125,393,205.00	-	125,393,205.00	1,410,033,795.00
31	BAPPPEDA	-	-	-	-	-
32	DLH	2,135,752,292.00	339,680,647.00	-	339,680,647.00	1,796,071,645.00
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-	-
36	BKPSDM	937,677,005.00	155,048,635.00	-	155,048,635.00	782,628,370.00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,306,385,000.00	105,669,775.00	-	105,669,775.00	1,200,715,225.00
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-	-
Jumlah		620,623,140,974.09	71,831,649,118.00	(103,585,065.00)	71,728,064,053.00	548,895,076,921.09

Apabila diperhatikan tabel di atas setelah dilakukan reklas dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 ke Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 terdapat perangkat daerah yang mengalami penurunan nilai penyusutan yaitu Dinas Perhubunga. Hal tersebut dapat terjadi karena reklas aset rambu-rambu pada Dinas Perhubungan dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin yang berdampak juga pada penurunan penyusutan nilai rambu-rambu tersebut. Nilai penurunan penyusutan sebesar Rp103.585.065,00 merupakan nilai penyusutan rambu-rambu yang pindah ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sehingga nilai tersebut harus dikurangi dari akumulasi penyusutan pasca reklas ke Permendagri Nomor 108 Tahun 2016.

Dari uraian diatas maka saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan setelah reklas berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019 (Permendagri 108) Rp	31 Desember 2019 (Permendagri 17) Rp	31 Desember 2018 Rp	Tren %
Bangunan Gedung	589,704,003,624.00	612,790,578,710.09	574,486,884,097.28	102.65%
Monumen	6,442,214,368.00	8,790,453,514.00	6,576,453,064.00	97.96%
Bangunan menara	3,102,481,906.00	-	-	0.00%
Tugu titik kontrol/pasti	21,374,441,076.09	-	-	0.00%
Akumulasi Penyusutan	(71,728,064,053.00)	(71,831,649,118.00)	(60,208,335,886.00)	119.13%
Nilai Buku	548,895,076,921.09	549,749,383,106.09	520,855,001,275.28	105.38%

V.A.1.c.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka jalan, irigasi, dan jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan dan merupakan objek pemeliharaan. Untuk Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak diatur mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, berapapun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi dan disajikan berdasarkan nilai perolehan dan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap tersebut. Metode penyusutannya garis lurus tidak ada nilai residu dan dihitung dengan pendekatan bulanan yang disajikan semesteran.

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) tidak mengalami perubahan sebagai akibat implementasi dari Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Adapun saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2019 (Permendagri 108) Rp.	31 Desember 2019 (Permendagri 17) Rp.	31 Desember 2018 Rp.	Tren %
Jalan Irigasi dan Jaringan	1,215,452,774,013.34	1,215,452,774,013.34	1,147,788,515,477.00	105.90%
Akumulasi Penyusutan	547,547,619,512.00	547,547,619,512.00	410,185,886,311.00	133.49%
Nilai Buku	667,905,154,501.34	667,905,154,501.34	737,602,629,166.00	90.55%

Adapun penambahan dan pengurangan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.64
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan per SKPD

No	SKPD	Saldo Aset Tetap 2018	Penambahan Aset Tetap 2019	Pengurangan Aset Tetap 2019	Saldo Aset Tetap 2019 (17)/(108)
1	Sekretariat DPRD	5,774,055,166.00	78,100,000.00	-	5,852,155,166.00
2	Sekretariat Daerah	4,636,454,940.00	48,162,000.00	48,162,000.00	4,636,454,940.00
3	Kec. Pulau Punjung	7,700,000.00	-	-	7,700,000.00
4	Kec. Sitiung	9,100,000.00	-	-	9,100,000.00
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	13,483,500.00	-	-	13,483,500.00
7	Kec. IX Koto	16,778,576.00	-	-	16,778,576.00

No	SKPD	Saldo Aset Tetap 2018	Penambahan Aset Tetap 2019	Pengurangan Aset Tetap 2019	Saldo Aset Tetap 2019 (17)/(108)
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-
10	Kec Tiumbang	700,000.00	-	-	700,000.00
11	Kec Koto Besar	18,400,000.00	-	-	18,400,000.00
12	Kec Koto Salak	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	1,111,500,970,748.00	65,908,063,117.34	-	1,177,409,033,865.34
15	Dinas PERKIMTAN	954,460,200.00	945,644,135.00	-	1,900,104,335.00
16	Dinas Perhubungan	171,534,319.00	74,952,200.00	-	246,486,519.00
17	Dinas Kesehatan	2,577,322,177.00	96,643,750.00	-	2,673,965,927.00
18	RSUD	567,111,000.00	365,397,000.00	-	932,508,000.00
19	Dinas Pendidikan	1,714,088,124.00	67,600,000.00	52,941,666.00	1,728,746,458.00
20	Dinas BUDPARPORA	-	157,269,000.00	-	157,269,000.00
21	Dinas TRANSSNAKER	461,741,500.00	-	-	461,741,500.00
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	34,853,500.00	-	-	34,853,500.00
24	Dinas PMD	26,390,000.00	-	-	26,390,000.00
25	Dinas Pertanian	1,345,100,007.00	455,560,000.00	455,560,000.00	1,345,100,007.00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	3,323,445,344.00	23,531,000.00	-	3,346,976,344.00
27	Dinas KUMPERDAG	34,500,000.00	-	-	34,500,000.00
28	BKD	-	-	-	-
29	DPMPSTP	14,330,500.00	-	-	14,330,500.00
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	48,453,000.00	-	-	48,453,000.00
32	DLH	122,253,800.00	-	-	122,253,800.00
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	11,717,000.00	-	-	11,717,000.00
35	BPBD	14,264,419,276.00	-	-	14,264,419,276.00
36	BKPSDM	6,995,000.00	-	-	6,995,000.00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19,690,000.00	-	-	19,690,000.00
38	Dinas KOMINFO	110,967,800.00	-	-	110,967,800.00
Jumlah		1,147,788,515,477.00	68,220,922,202.34	556,663,666.00	1,215,452,774,013.34

Nilai buku Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.65
Nilai Buku Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD

No	Nama SKPD	Saldo Aset Tetap 2019 (17)	Akumulasi Penyusutan 2018	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Aset 2019 (17)	Nilai Buku Aset Tetap 2019 (17)
1	Sekretariat DPRD	5,852,155,166.00	934,965,787.00	192,076,522.00	-	1,127,042,309.00	4,725,112,857.00
2	Sekretariat Daerah	4,636,454,940.00	508,700,280.00	118,118,313.00	-	626,818,593.00	4,009,636,347.00
3	Kec. Pulau Punjung	7,700,000.00	1,171,042.00	192,500.00	-	1,363,542.00	6,336,458.00
4	Kec. Sitiung	9,100,000.00	1,553,542.00	227,500.00	-	1,781,042.00	7,318,958.00
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	13,483,500.00	3,355,045.00	427,922.00	-	3,782,967.00	9,700,533.00
7	Kec. IX Koto	16,778,576.00	2,625,661.00	419,464.00	-	3,045,125.00	13,733,451.00
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-	-	-
10	Kec Tiurang	700,000.00	141,458.00	17,500.00	-	158,958.00	541,042.00
11	Kec Koto Besar	18,400,000.00	4,178,333.00	460,000.00	-	4,638,333.00	13,761,667.00
12	Kec Koto Salak	1,500,000.00	134,375.00	37,500.00	-	171,875.00	1,328,125.00
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	1,177,409,033,865.34	406,931,465,151.00	135,327,702,882.00	-	542,259,168,033.00	635,149,865,832.34
15	Dinas PERKIMTAN	1,900,104,335.00	7,953,835.00	102,528,411.00	-	110,482,246.00	1,789,622,089.00
16	Dinas Perhubungan	246,486,519.00	71,103,099.00	17,598,960.00	-	88,702,059.00	157,784,460.00
17	Dinas Kesehatan	2,673,965,927.00	302,854,135.00	116,407,726.00	-	419,261,861.00	2,254,704,066.00
18	RSUD	932,508,000.00	80,738,818.00	29,423,982.00	-	110,162,800.00	822,345,200.00
19	Dinas Pendidikan	1,728,746,458.00	169,037,312.00	92,446,958.00	5,309,236.00	256,175,034.00	1,472,571,424.00
20	Dinas BUDPARPORA	157,269,000.00	-	521,303.00	-	521,303.00	156,747,697.00
21	Dinas TRANSAKER	461,741,500.00	106,496,313.00	21,248,830.00	-	127,745,143.00	333,996,357.00
22	DSP3KB	-	-	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	34,853,500.00	7,342,800.00	871,338.00	-	8,214,138.00	26,639,362.00
24	Dinas PMD	26,390,000.00	5,387,958.00	659,750.00	-	6,047,708.00	20,342,292.00
25	Dinas Pertanian	1,345,100,007.00	243,298,252.00	54,375,232.00	-	297,673,484.00	1,047,426,523.00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	3,346,976,344.00	671,373,311.00	106,752,008.00	-	778,125,319.00	2,568,851,025.00
27	Dinas KUMPERDAG	34,500,000.00	95,833.00	1,150,000.00	-	1,245,833.00	33,254,167.00
28	BKD	-	-	-	-	-	-
29	DPMPTSP	14,330,500.00	3,668,442.00	617,900.00	-	4,286,342.00	10,044,158.00
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	48,453,000.00	4,946,244.00	1,211,325.00	-	6,157,569.00	42,295,431.00

No .	Nama SKPD	Saldo Aset Tetap 2019 (17)	Akumulasi Penyusutan 2018	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Aset 2019 (17)	Nilai Buku Aset Tetap 2019 (17)
32	DLH	122,253,800.00	12,173,936.00	3,056,345.00	-	15,230,281.00	107,023,519.00
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	11,717,000.00	2,391,897.00	361,934.00	-	2,753,831.00	8,963,169.00
35	BPBD	14,264,419,276.00	97,655,560.00	1,171,866,708.00	-	1,269,522,268.00	12,994,897,008.00
36	BKPSDM	6,995,000.00	899,700.00	152,400.00	-	1,052,100.00	5,942,900.00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19,690,000.00	2,871,458.00	984,500.00	-	3,855,958.00	15,834,042.00
38	Dinas KOMINFO	110,967,800.00	7,306,734.00	5,126,724.00	-	12,433,458.00	98,534,342.00
Jumlah		1,215,452,774,013.34	410,185,886,311.00	137,367,042,437.00	5,309,236.00	547,547,619,512.00	667,905,154,501.34

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.66
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

SALDO ASET TETAP 2018		1,147,788,515,477.00
PENAMBAHAN ASET TETAP 2019		68,220,922,202.34
1	Belanja Modal Menjadi Aset	54,921,138,995.34
2	Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset	18,012,292.00
3	Hibah Pusat Menjadi Aset	437,517,278.00
4	Dana Bos Menjadi Aset	33,600,000.00
5	Dana BLUD Menjadi Aset	42,180,000.00
6	Honor Pokja Menjadi Aset	48,162,000.00
7	Hutang 2019	474,404,000.00
8	Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	455,560,000.00
9	Kurang Catat	7,500,000.00
10	Mutasi Honor Pokja Antar SKPD	48,162,000.00
11	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	11,734,685,637.00
PENGURANGAN ASET TETAP 2019		556,663,666.00
1	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	48,162,000.00
2	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	52,941,666.00
3	Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal	455,560,000.00
SALDO ASET TETAP 2019 (17)/(108)		1,215,452,774,013.34

Uraian penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp68.220.922.202,34 terdiri dari.

Tabel 5.2.67
Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi, dan Jaringan per SKPD

SALDO ASET TETAP 2018		1,147,788,515,477.00
PENAMBAHAN ASET TETAP 2019		68,220,922,202.34
1	Belanja Modal Menjadi Aset	54,921,138,995.34
	Jalan dan Jembatan	45,967,120,575.00
1	Dinas PUPR	45,407,171,672.00
2	Dinas PERKIMTAN	559,948,903.00
	Bangunan Air/ Irigasi	7,603,624,970.34
1	Dinas PUPR	7,082,767,630.34
2	Dinas PERKIMTAN	275,755,140.00
3	Dinas Perhubungan	53,722,200.00
4	RSUD	10,580,000.00
5	Dinas BUDPARPORA	157,269,000.00
6	Dinas Pangan dan Perikanan	23,531,000.00
	Instalasi	159,273,750.00
1	Sekretariat DPRD	78,100,000.00
2	Dinas Perhubungan	21,230,000.00
3	Dinas Kesehatan	54,463,750.00
4	RSUD	5,480,000.00
	Jaringan	1,191,119,700.00
1	Dinas PUPR	1,072,691,900.00
2	Dinas PERKIMTAN	91,927,800.00
3	Dinas Pendidikan	26,500,000.00
2	Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset	18,012,292.00
	Jalan dan Jembatan	10,424,420.00
1	Dinas PERKIMTAN	10,424,420.00
	Bangunan Air/ Irigasi	7,587,872.00
1	Dinas PERKIMTAN	7,587,872.00
3	Hibah Pusat Menjadi Aset	437,517,278.00
	Instalasi	437,517,278.00
1	Dinas PUPR	437,517,278.00
4	Dana Bos Menjadi Aset	33,600,000.00
	Bangunan Air/ Irigasi	7,000,000.00
1	Dinas Pendidikan	7,000,000.00
	Instalasi	8,100,000.00
1	Dinas Pendidikan	8,100,000.00
	Jaringan	18,500,000.00
1	Dinas Pendidikan	18,500,000.00
5	Dana BLUD Menjadi Aset	42,180,000.00
	Bangunan Air/ Irigasi	19,775,000.00
1	Dinas Kesehatan	19,775,000.00
	Instalasi	22,405,000.00
1	Dinas Kesehatan	22,405,000.00

6	Honor Pokja Menjadi Aset	48,162,000.00
	Jalan dan Jembatan	34,902,000.00
	1 Sekretariat Daerah	34,902,000.00
	Bangunan Air/ Irigasi	13,260,000.00
	1 Sekretariat Daerah	13,260,000.00
7	Hutang 2019	474,404,000.00
	Bangunan Air/ Irigasi	392,044,000.00
	1 Dinas PUPR	125,067,000.00
	2 RSUD	266,977,000.00
	Instalasi	82,360,000.00
	1 RSUD	82,360,000.00
8	Penilaian BMD	455,560,000.00
	Jalan dan Jembatan	455,560,000.00
	1 Dinas Pertanian	455,560,000.00
9	Kurang Catat	7,500,000.00
	Jaringan	7,500,000.00
	1 Dinas Pendidikan	7,500,000.00
10	Mutasi Honor Pokja Antar SKPD	48,162,000.00
	Jalan dan Jembatan	34,902,000.00
	1 Dinas PUPR	34,902,000.00
	Bangunan Air/ Irigasi	13,260,000.00
	1 Dinas PUPR	13,260,000.00
11	Penambahan Reklas sesama Aset Tetap	11,734,685,637.00
	Jalan dan Jembatan	11,277,090,843.00
	1 Dinas PUPR	11,277,090,843.00
	Bangunan Air/ Irigasi	457,594,794.00
	1 Dinas PUPR	457,594,794.00

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Naskah Hibah Barang Milik Negara pada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3195/95/SBG/2019 memperoleh hibah berupa Sumur Bor Dalam yang terletak di Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai sebesar Rp437.517.278,00

Uraian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Utang sebesar Rp474.404.000,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.68
Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Utang

No	Uraian	Jumlah
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	125.067.000,00
	Drainase Perumahan Villa Tama Perdana	99.567.000,00
	Perencanaan Drainase Kawasan Sungai Rumbai, Koto Besar	25.500.000,00
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	349.337.000,00
	Pengadaan bangunan fisik dan instalasi IPAL	79.160.000,00
	Pengawasan	3.200.000,00
	Pengadaan sumur bor RSUD	85,118,000
	Pengadaan sistem instalasi air dalam gedung RSUD	174,729,000
	Pengawasan pengadaan instalasi air dalam gedung dan sumur bor	7,130,000
J U M L A H		474.404.000,00

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari penilaian kurang catat sebesar Rp455.560.000,00 merupakan jalan lingkungan/halaman yang terdapat di komplek Laboratorium Tanah dan Daun milik Dinas Pertanian.

Uraian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp556.663.666,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.69
Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan

PENGURANGAN ASET TETAP 2019		556,663,666.00
1	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	48,162,000.00
	Jalan dan Jembatan	34,902,000.00
	1 Sekretariat Daerah	34,902,000.00
	Bangunan Air/ Irigasi	13,260,000.00
	1 Sekretariat Daerah	13,260,000.00
2	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	52,941,666.00
	Instalasi	2,250,000.00
	1 Dinas Pendidikan	2,250,000.00
	Jaringan	50,691,666.00
	1 Dinas Pendidikan	50,691,666.00
3	Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal	455,560,000.00
	Jalan dan Jembatan	455,560,000.00
	1 Dinas Pertanian	455,560,000.00

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa jalan lingkungan pada Dinas Pertanian ke Kementerian Riset dan Dikti yang digunakan oleh Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya.

Tabel 5.2.70
Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

SALDO ASET TETAP 2019 (17)		1,215,452,774,013.34
AKUMULASI PENYUSUTAN 2018		410,185,886,311.00
Penambahan Penyusutan Aset Tetap Lainnya 2019		137,367,042,437.00
1	Penyusutan Semester I	55,746,254,047.00
2	Penyusutan Semester II	81,620,788,390.00
Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Lainnya 2019		5,309,236.00
1	Pengurangan Penyusutan Reklas	5,309,236.00
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET 2019 (17)/(108)		547,547,619,512.00
NILAI BUKU ASET TETAP 2019 (17)/(108)		667,905,154,501.34

Uraian penambahan Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp137.367.042.437,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.71
Penambahan Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

SALDO ASET TETAP 2019 (17)		1,215,452,774,013.34
AKUMULASI PENYUSUTAN 2018		410,185,886,311.00
Penambahan Penyusutan Aset Tetap Lainnya 2019		137,367,042,437.00
1	Penyusutan Semester I	55,746,254,047.00
	Jalan dan Jembatan	52,839,132,723.00
	1 Dinas PUPR	52,162,974,465.00
	2 Dinas PERKIMTAN	47,723,010.00
	3 RSUD	9,375,300.00
	4 Dinas Pendidikan	13,372,140.00
	5 Dinas TRANSNAKER	10,326,915.00
	6 Dinas Pertanian	14,751,500.00
	7 Dinas Pangan dan Perikanan	12,106,870.00
	8 BPBD	568,502,523.00
	Bangunan Air/ Irigasi	2,048,474,088.00
	1 Sekretariat Daerah	437,000.00
	2 Dinas PUPR	1,951,751,316.00
	3 Dinas Perhubungan	8,576,716.00
	4 RSUD	4,894,000.00
	5 Dinas Pendidikan	20,166,367.00
	6 Dinas BUDPARPORA	26,667.00
	7 Dinas TRANSNAKER	100,000.00
	8 Dinas Pertanian	7,424,480.00
	9 Dinas Pangan dan Perikanan	37,483,744.00
	10 Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	138,017.00
	11 BPBD	17,430,831.00
	12 BKPSDM	44,950.00
	Instalasi	470,808,193.00
	1 Sekretariat DPRD	66,475,482.00
	2 Sekretariat Daerah	3,410,626.00
	3 Kec. Pulau Punjung	96,250.00
	4 Kec. Sngai Rumbai	201,367.00
	5 Kec. IX Koto	209,732.00

	6	Kec Koto Besar	230,000.00
	7	Kec Koto Salak	18,750.00
	8	Dinas PUPR	336,159,970.00
	9	Dinas Kesehatan	57,750,814.00
	10	Dinas Pendidikan	1,549,263.00
	11	Dinas TRANSNAKER	197,500.00
	12	Dinas PMD	329,875.00
	13	Dinas Pertanian	1,843,706.00
	14	Dinas Pangan dan Perikanan	1,263,941.00
	15	Dinas KUMPERDAG	575,000.00
	16	DPMPTSP	74,250.00
	17	Dinas KOMINFO	421,667.00
		Jaringan	387,839,043.00
	1	Sekretariat DPRD	29,448,032.00
	2	Sekretariat Daerah	55,211,531.00
	3	Kec. Sitiung	113,750.00
	4	Kec. Sngai Rumbai	12,594.00
	5	Kec Tiumang	8,750.00
	6	Dinas PUPR	280,741,991.00
	7	Dinas Kesehatan	267,600.00
	8	Dinas Pendidikan	10,914,911.00
	9	DISDUKCAPIL	435,669.00
	10	Dinas Pertanian	3,167,928.00
	11	Dinas Pangan dan Perikanan	2,439,607.00
	12	DPMPTSP	234,700.00
	13	BAPPPEDA	605,662.00
	14	DLH	1,528,173.00
	15	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	42,950.00
	16	BKPSDM	31,250.00
	17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	492,250.00
	18	Dinas KOMINFO	2,141,695.00
2		Penyusutan Semester II	81,620,788,390.00
		Jalan dan Jembatan	78,627,924,375.00
	1	Dinas PUPR	77,947,013,007.00
	2	Dinas PERKIMTAN	52,476,120.00
	3	RSUD	9,375,300.00
	4	Dinas Pendidikan	13,372,140.00
	5	Dinas TRANSNAKER	10,326,915.00
	6	Dinas Pertanian	14,751,500.00
	7	Dinas Pangan dan Perikanan	12,106,870.00
	8	BPBD	568,502,523.00
		Bangunan Air/ Irigasi	2,122,417,573.00
	1	Sekretariat Daerah	437,000.00
	2	Dinas PUPR	2,021,891,140.00
	3	Dinas PERKIMTAN	2,137,765.00
	4	Dinas Perhubungan	8,845,327.00
	5	Dinas Kesehatan	65,917.00
	6	RSUD	5,535,382.00
	7	Dinas Pendidikan	20,224,700.00
	8	Dinas BUDPARPORA	494,636.00
	9	Dinas TRANSNAKER	100,000.00
	10	Dinas Pertanian	7,424,480.00
	11	Dinas Pangan dan Perikanan	37,647,428.00
	12	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	138,017.00
	13	BPBD	17,430,831.00
	14	BKPSDM	44,950.00
		Instalasi	476,702,944.00
	1	Sekretariat DPRD	66,704,976.00
	2	Sekretariat Daerah	3,410,626.00
	3	Kec. Pulau Punjung	96,250.00
	4	Kec. Sngai Rumbai	201,367.00
	5	Kec. IX Koto	209,732.00
	6	Kec Koto Besar	230,000.00
	7	Kec Koto Salak	18,750.00
	8	Dinas PUPR	341,021,274.00
	9	Dinas Perhubungan	176,917.00
	10	Dinas Kesehatan	58,055,795.00
	11	RSUD	244,000.00
	12	Dinas Pendidikan	1,627,318.00
	13	Dinas TRANSNAKER	197,500.00
	14	Dinas PMD	329,875.00
	15	Dinas Pertanian	1,843,706.00
	16	Dinas Pangan dan Perikanan	1,263,941.00
	17	Dinas KUMPERDAG	575,000.00

	18	DPMPTSP	74,250.00
	19	Dinas KOMINFO	421,667.00
		Jaringan	393,743,498.00
	1	Sekretariat DPRD	29,448,032.00
	2	Sekretariat Daerah	55,211,530.00
	3	Kec. Sitiung	113,750.00
	4	Kec. Sngai Rumbai	12,594.00
	5	Kec Tiumbang	8,750.00
	6	Dinas PUPR	286,149,719.00
	7	Dinas PERKIMTAN	191,516.00
	8	Dinas Kesehatan	267,600.00
	9	Dinas Pendidikan	11,220,119.00
	10	DISDUKCAPIL	435,669.00
	11	Dinas Pertanian	3,167,932.00
	12	Dinas Pangan dan Perikanan	2,439,607.00
	13	DPMPTSP	234,700.00
	14	BAPPPEDA	605,663.00
	15	DLH	1,528,172.00
	16	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	42,950.00
	17	BKPSDM	31,250.00
	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	492,250.00
	19	Dinas KOMINFO	2,141,695.00

Pengurangan penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.309.236,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.72
Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	PENGURANGAN ASET TETAP 2019		5,309,236.00
		Instalasi	684,375.00
	1	Dinas Pendidikan	684,375.00
		Jaringan	4,624,861.00
	1	Dinas Pendidikan	4,624,861.00

V.C.1.c.5 Aset TetapLainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Nilai Aset Tetap Lainnya mengalami perubahan sebagai akibat penerapan dari Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Adapun saldo Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2019 (Permendagri 108) Rp.	31 Desember 2019 (Permendagri 17) Rp.	31 Desember 2018 Rp.	Tren %
Aset Tetap Lainnya	72,876,409,916.00	73,711,571,207.00	54,193,283,668.00	134.47%
Akumulasi Penyusutan	(101,350,000.00)	(101,350,000.00)	(101,350,000.00)	100.00%
Nilai Buku	72,775,059,916.00	73,610,221,207.00	54,091,933,668.00	134.54%

Terdapat kenaikan saldo aset tetap lainnya apabila dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 dengan per 31 Desember 2019 versi Permendagri 108 tahun 2016 sebesar Rp18.683.126.248,00.

Rincian penambahan, pengurangan dan koreksi penambahan/pengurangan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016, dan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.73
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya per SKPD

No	Nama SKPD	Saldo Aset Tetap 2018	Penambahan Aset Tetap 2019	Pengurangan Aset Tetap 2019	Saldo Aset Tetap 2019 (17)	Penambahan/ Pengurangan Reklas Aset Tetap (108)	Saldo Aset Tetap 2019 (108)
1	Sekretariat DPRD	43,091,000.00	-	-	43,091,000.00	-	43,091,000.00
2	Sekretariat Daerah	-	13,620,000.00	13,620,000.00	-	-	-
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	1,425,000.00	-	-	1,425,000.00	-	1,425,000.00
7	Kec. IX Koto	104,050,000.00	-	-	104,050,000.00	-	104,050,000.00
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-	-	-
10	Kec Tiumbang	-	-	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	58,025,000.00	76,383,000.00	-	134,408,000.00	-	134,408,000.00
15	Dinas PERKIMTAN	1,350,000.00	9,310,000.00	-	10,660,000.00	-	10,660,000.00
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-
18	RSUD	29,443,810,671.00	9,552,401,225.00	-	38,996,211,896.00	-	38,996,211,896.00
19	Dinas Pendidikan	22,783,525,384.00	10,108,680,951.00	504,843,437.00	32,387,362,898.00	(835,161,291.00)	31,552,201,607.00
20	Dinas BUDPARPORA	68,250,000.00	-	-	68,250,000.00	-	68,250,000.00
21	Dinas TRANSAKER	-	-	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	1,774,000.00	-	-	1,774,000.00	-	1,774,000.00
24	Dinas PMD	288,520,000.00	-	-	288,520,000.00	-	288,520,000.00
25	Dinas Pertanian	467,067,000.00	-	3,502,400.00	463,564,600.00	-	463,564,600.00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	12,114,000.00	-	-	12,114,000.00	-	12,114,000.00
27	Dinas KUMPERDAG	-	-	-	-	-	-
28	BKD	-	-	-	-	-	-

No	Nama SKPD	Saldo Aset Tetap 2018	Penambahan Aset Tetap 2019	Pengurangan Aset Tetap 2019	Saldo Aset Tetap 2019 (17)	Penambahan/ Pengurangan Reklas Aset Tetap (108)	Saldo Aset Tetap 2019 (108)
29	DPMPTSP	6,019,850.00	-	-	6,019,850.00	-	6,019,850.00
30	Inspektorat Kabupaten	6,131,710.00	-	-	6,131,710.00	-	6,131,710.00
31	BAPPEDA	1,827,500.00	-	-	1,827,500.00	-	1,827,500.00
32	DLH	56,123,400.00	-	-	56,123,400.00	-	56,123,400.00
33	Kantor KESBANGPOL	36,500.00	-	-	36,500.00	-	36,500.00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-	-	-
36	BKPSDM	-	-	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	593,877,028.00	279,858,200.00	-	873,735,228.00	-	873,735,228.00
38	Dinas KOMINFO	256,265,625.00	-	-	256,265,625.00	-	256,265,625.00
Jumlah		54,193,283,668.00	20,040,253,376.00	521,965,837.00	73,711,571,207.00	(835,161,291.00)	72,876,409,916.00

Sedangkan nilai buku Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016, dan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.74
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Lainnya per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Aset Tetap 2019 (17)	Akumulasi Penyusutan Aset 2019 (17)	Koreksi Penambahan/Pengurangan Penyusutan (108)	Akumulasi Penyusutan Aset 2019 (17)	Nilai Buku 31 Desember 2019 (108)
1	Sekretariat DPRD	43,091,000.00	-	-	-	43,091,000.00
2	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	1,425,000.00	-	-	-	1,425,000.00
7	Kec. IX Koto	104,050,000.00	-	-	-	104,050,000.00
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-	-
10	Kec Tiumbang	-	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	134,408,000.00	-	-	-	134,408,000.00
15	Dinas PERKIMTAN	10,660,000.00	-	-	-	10,660,000.00

16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
17	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-
18	RSUD	38,996,211,896.00	-	-	-	38,996,211,896.00
19	Dinas Pendidikan	31,552,201,607.00	-	-	-	31,552,201,607.00
20	Dinas BUDPARPORA	68,250,000.00	-	-	-	68,250,000.00
21	Dinas TRANSSNAKER	-	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	1,774,000.00	-	-	-	1,774,000.00
24	Dinas PMD	288,520,000.00	-	-	-	288,520,000.00
25	Dinas Pertanian	463,564,600.00	101,350,000.00	-	101,350,000.00	362,214,600.00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	12,114,000.00	-	-	-	12,114,000.00
27	Dinas KUMPERDAG	-	-	-	-	-
28	BKD	-	-	-	-	-
29	DPMPTSP	6,019,850.00	-	-	-	6,019,850.00
30	Inspektorat Kabupaten	6,131,710.00	-	-	-	6,131,710.00
31	BAPPPEDA	1,827,500.00	-	-	-	1,827,500.00
32	DLH	56,123,400.00	-	-	-	56,123,400.00
33	Kantor KESBANGPOL	36,500.00	-	-	-	36,500.00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-	-
36	BKPSDM	-	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	873,735,228.00	-	-	-	873,735,228.00
38	Dinas KOMINFO	256,265,625.00	-	-	-	256,265,625.00
Jumlah		72,876,409,916.00	101,350,000.00	-	101,350,000.00	72,775,059,916.00

Rincian penambahan dan pengurangan saldo Aset Tetap Lainnya versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.75
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya
versi Permendagri 17 Tahun 2007

Saldo Aset Tetap 2018		54,193,283,668.00
Penambahan Aset Tetap 2019		20,040,253,376.00
1	Belanja Modal Menjadi Aset	14,818,473,000.00
2	Hibah Pusat Menjadi Aset	52,823,200.00
3	Dana Bos Menjadi Aset	3,751,906,576.00
4	Honor Pokja Menjadi Aset	13,620,000.00
5	Hutang 2019	1,009,737,000.00
6	Penilaian Hibah Provinsi	167,085,000.00
7	Kurang Catat	212,988,600.00
8	Mutasi Honor Pokja Antar SKPD	13,620,000.00
Pengurangan Aset Tetap 2019		521,965,837.00
1	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	13,620,000.00
2	Lelang dan Penjualan	3,502,400.00
3	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	504,843,437.00
Saldo Aset Tetap 2019 (17)		73,711,571,207.00

Penambahan saldo Aset Tetap Lainnya per SKPD sebesar Rp20.040.253.376,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.76
Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya per SKPD

No	Nama SKPD/Asal Penambahan	Jumlah
1	Belanja Modal Menjadi Aset	14,818,473,000.00
	Buku Perpustakaan	5,050,563,985.00
1	1 Dinas PUPR	76,383,000.00
2	2 Dinas Pendidikan	4,914,230,985.00
3	3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	59,950,000.00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1,224,514,790.00
1	1 Dinas Pendidikan	1,224,514,790.00
	Aset Tetap Renovasi/ Pemugaran	8,543,394,225.00
1	1 Dinas PERKIMTAN	9,310,000.00
2	2 RSUD	8,534,084,225.00
2	Hibah Pusat Menjadi Aset	52,823,200.00
	Buku Perpustakaan	52,823,200.00
1	1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	52,823,200.00
3	Dana Bos Menjadi Aset	3,751,906,576.00
	Buku Perpustakaan	3,732,038,776.00
1	1 Dinas Pendidikan	3,732,038,776.00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	19,867,800.00
1	1 Dinas Pendidikan	19,867,800.00
4	Honor Pokja Menjadi Aset	13,620,000.00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	5,040,000.00
1	1 Sekretariat Daerah	5,040,000.00
	Aset Tetap Renovasi/ Pemugaran	8,580,000.00
1	1 Sekretariat Daerah	8,580,000.00
5	Hutang 2019	1,009,737,000.00
	Aset Tetap Renovasi/ Pemugaran	1,009,737,000.00
1	1 RSUD	1,009,737,000.00
6	Penilaian Hibah Provinsi	167,085,000.00
	Buku Perpustakaan	167,085,000.00
1	1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	167,085,000.00
7	Kurang Catat	212,988,600.00
	Buku Perpustakaan	212,988,600.00
1	1 Dinas Pendidikan	212,988,600.00
8	Mutasi Honor Pokja Antar SKPD	13,620,000.00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	5,040,000.00
1	1 Dinas Pendidikan	5,040,000.00
	Aset Tetap Renovasi/ Pemugaran	8,580,000.00
1	1 RSUD	8,580,000.00

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) melalui Berita Acara Serah Terima Nomor 4095/IPLK.03.03/XII.2017 memperoleh hibah koleksi buku sebanyak 800 eksemplar dari Perpustakaan Nasional RI senilai Rp52.823.200,00

Penambahan saldo Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.009.737.000,00 berasal dari Utang pada RSUD Sungai Dareh yang merupakan kegiatan lanjutan pembangunan gedung baru RSUD Sungai Dareh.

Pengurangan saldo Aset Tetap lainnya berdasarkan perolehan per SKPD sebesar Rp521.965.837,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.77
Pengurangan Aset Tetap Lainnya per SKPD

Pengurangan Aset Tetap 2019		521,965,837.00
1	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	13,620,000.00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	5,040,000.00
	1 Sekretariat Daerah	5,040,000.00
	Aset Tetap Renovasi/ Pemugaran	8,580,000.00
	1 Sekretariat Daerah	8,580,000.00
2	Lelang dan Penjualan	3,502,400.00
	HEWAN	3,502,400.00
	1 Dinas Pertanian	3,502,400.00
3	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	504,843,437.00
	Buku Perpustakaan	472,968,145.00
	1 Dinas Pendidikan	472,968,145.00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	31,875,292.00
	1 Dinas Pendidikan	31,875,292.00
Saldo Aset Tetap 2019 (17)		73,711,571,207.00

Tabel 5.2.78
Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap 2019 (17)		73,711,571,207.00
Akumulasi Penyusutan 2018		101,350,000.00
Penambahan Penyusutan Aset Tetap Lainnya 2019		-
1	Penyusutan Semester I	-
2	Penyusutan Semester II	-
Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Lainnya 2019		-
Akumulasi Penyusutan Aset 2019 (17)		101,350,000.00
Nilai Buku Aset Tetap 2019 (17)		73,610,221,207.00

Dalam rangka penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 terjadi pengurangan saldo Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp835.161.291,00 akibat reklas aset olahraga ke Peralatan Kantor dan terdapat perbedaan klasifikasi pada Sub KIB Aset Tetap Lainnya dari empat sub KIB menjadi tujuh Sub KIB dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.2.79
Perbedaan Sub KIB Aset Tetap Lainnya
antara Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007

No	Nama Sub KIB Aset Tetap Lainnya versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007	Nama Sub KIB Aset Tetap Lainnya versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016
1	Buku dan Perpustakaan	Bahan Perpustakaan
2	Barang bercorak kebudayaan	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga
3	Hewan dan ternak serta tanaman	Hewan
4	Aset renovasi	Biota perairan
5		Tanaman
6		Barang koleksi non budaya
7		Aset Tetap Dalam renovasi

Adapun saldo dan nilai buku Aset Tetap Lainnya versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 sebagai berikut.

Tabel 5.2.80
Penambahan, Pengurangan, dan Reklas Saldo Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap 2018		54,193,283,668.00
Penambahan Aset Tetap 2019		20,040,253,376.00
1	Belanja Modal Menjadi Aset	14,818,473,000.00
2	Hibah Pusat Menjadi Aset	52,823,200.00
3	Dana Bos Menjadi Aset	3,751,906,576.00
4	Honor Pokja Menjadi Aset	13,620,000.00
5	Hutang 2019	1,009,737,000.00
6	Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	-
7	Penilaian Hibah Provinsi	167,085,000.00
8	Kurang Catat	212,988,600.00
9	Mutasi Honor Pokja Antar SKPD	13,620,000.00
Pengurangan Aset Tetap 2019		521,965,837.00
1	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	13,620,000.00
2	Lelang dan Penjualan	3,502,400.00
3	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	504,843,437.00
Saldo Aset Tetap 2019 (17)		73,711,571,207.00
Penambahan/ Pengurangan Reklas Aset Tetap (108)		(835,161,291.00)
Saldo Aset Tetap 2019 (108)		72,876,409,916.00

Tabel 5.2.81
Nilai Buku Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap 2019 (108)	72,876,409,916.00
Akumulasi Penyusutan Aset 2019 (17)	101,350,000.00
Penambahan/Pengurangan Penyusutan (108)	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 (108)	101,350,000.00
Nilai Buku 31 Desember 2019 (108)	72,775,059,916.00

V.A.1.c.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Nilai KDP tidak berpengaruh terhadap implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Adapun nilai KDP per 31 Desember 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2019 (Permendagri 108) Rp.	31 Desember 2019 (Permendagri 17) Rp.	31 Desember 2018 Rp.	Tren %
Konstruksi Dalam Pengerjaan	87,268,272,715.93	87,268,272,715.93	36,917,332,394.00	236.39%

Nilai KDP Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2019 bertambah sebesar Rp50.350.940.321,93. Hal ini terjadi karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai per 31 Desember 2019 terutama pada Dinas PUPR dan Dinas Kumperdag.

Penambahan dan pengurangan nilai KDP per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.82
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap KDP per SKPD

N o	Nama SKPD	Saldo Aset Tetap 2018	Penambahan Aset Tetap 2019	Pengurangan Aset Tetap 2019	Saldo Aset Tetap 2019 (17)/(108)
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
2	Sekretariat Daerah	-	39,007,501.83	39,007,501.83	-
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	-	-	-	-
7	Kec. IX Koto	-	-	-	-
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-
10	Kec. Tiumang	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-

N o	Nama SKPD	Saldo Aset Tetap 2018	Penambahan Aset Tetap 2019	Pengurangan Aset Tetap 2019	Saldo Aset Tetap 2019 (17)/(108)
14	Dinas PUPR	34,053,643,166.00	40,746,213,859.00	11,734,685,637.00	63,065,171,388.00
15	Dinas PERKIMTAN	186,935,550.00	179,713,000.00	-	366,648,550.00
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
17	Dinas Kesehatan	115,255,441.00	-	-	115,255,441.00
18	RSUD	80,895,000.00	478,764,728.00	-	559,659,728.00
19	Dinas Pendidikan	978,512,000.00	-	-	978,512,000.00
20	Dinas BUDPARPORA	-	-	-	-
21	Dinas TRANSAKER	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	45,599,137.00	-	45,599,137.00	-
24	Dinas PMD	-	-	-	-
25	Dinas Pertanian	-	-	-	-
26	Dinas Pangan dan Perikanan	-	-	-	-
27	Dinas KUMPERDAG	382,365,000.00	20,943,993,258.93	-	21,326,358,258.93
28	BKD	-	-	-	-
29	DPMPTSP	-	-	-	-
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	217,459,750.00	99,987,000.00	317,446,750.00	-
32	DLH	-	-	-	-
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-
36	BKPSDM	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	856,667,350.00	-	-	856,667,350.00
38	Dinas KOMINFO	-	-	-	-
Jumlah		36,917,332,394.00	62,487,679,347.76	12,136,739,025.83	87,268,272,715.93

Penambahan dan pengurangan KDP adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.83
 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap KDP

SALDO ASET TETAP 2018		36.917.332.394,00
PENAMBAHAN ASET TETAP 2019		62.487.679.347,76
1	Belanja Modal Menjadi Aset	59.390.256.953,25
2	Honor Pokja Menjadi Aset	39.007.501,83
3	Hutang 2019	409.890.718,00
4	Mutasi Honor Pokja Antar SKPD	39.007.501,82
5	Retensi	2.609.516.672.86
PENGURANGAN ASET TETAP 2019		12.136.739.025,83
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	12.097.731.524,00
2	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	39.007.501,83
SALDO ASET TETAP 2019 (17)/(108)		87.268.272.715,93

Penambahan nilai KDP senilai Rp62.487.679.347,76 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.84
 Penambahan Aset Tetap KDP per SKPD

SALDO ASET TETAP 2018		36,917,332,394.00
PENAMBAHAN ASET TETAP 2019		62,487,679,347.76
1	Belanja Modal Menjadi Aset	59,390,256,953.25
1	1 Dinas PUPR	39,142,237,254.00
2	2 Dinas PERKIMTAN	179,713,000.00
3	3 RSUD	65,814,010.00
4	4 Dinas KUMPERDAG	19,902,505,689.25
5	5 BAPPPEDA	99,987,000.00
2	Honor Pokja Menjadi Aset	39,007,501.83
1	1 Sekretariat Daerah	39,007,501.83
3	Utang 2019	409,890,718.00
1	1 RSUD	409,890,718.00
4	Mutasi Honor Pokja Antar SKPD	39,007,501.82
1	1 Dinas PUPR	18,968,000.00
2	2 RSUD	3,060,000.00
3	3 Dinas KUMPERDAG	16,979,501.82
5	Retensi	2,609,516,672.86
1	1 Dinas PUPR	1,585,008,605.00
2	2 Dinas KUMPERDAG	1,024,508,067.86

Penambahan KDP yang berasal dari utang senilai Rp409.890.718,00 berasal dari RSUD Sungai Dareh dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

Tabel 5.2.85
 Penambahan Aset Tetap KDP dari Utang

No	Uraian	Jumlah
1	Pengadaan Meubeleur dan Interior RSUD	380,708,268
2	Pengawasan Meubeleur dan Interior RSUD	29,182,450
J U M L A H		409,890,718

Pekerjaan yang menjadi utang pada RSUD Sungai Dareh sesuai nilai kontrak sebesar Rp944.920.000,00 dengan realisasi fisik 40,29% dan realisasi keuangan sebesar Rp0,00 per 31 Desember 2019.

Penambahan KDP yang berasal dari retensi senilai Rp2.609.516.672,86 berasal dari dua SKPD sebagai berikut.

- 1. KDP pada Dinas PUPR senilai Rp1.585.008.605,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.86
Penambahan Aset Tetap KDP pada Dinas PUPR

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan Kabupaten Lain-lain (Paket III)	282,579,150.00
2	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
	- Pembangunan Masjid Agung (Multi Years)	1,302,429,455.00
J U M L A H		1,585,008,605.00

- 2. KDP pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan senilai Rp1.024.508.067,86 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.87
Penambahan Aset Tetap KDP pada Dinas Kumperindag

No	Uraian	Jumlah
1	Pengadaan Bangunan Tempat Kerja Lainnya	
	- Pembangunan Gedung Produksi (DAK)	284,479,120.50
	- Pembangunan Infrastruktur Fisik dalam Sentra (DAK)	740,028,947.36
J U M L A H		1,024,508,067.86

Pengurangan nilai KDP senilai Rp84.310.386.432,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.88
Pengurangan Aset Tetap KDP

PENGURANGAN ASET TETAP 2019		12,136,739,025.83
1	Pengurangan Reklas Sesama Aset Tetap	12,097,731,524.00
1	Dinas PUPR	11,734,685,637.00
2	DISDUKCAPIL	45,599,137.00
3	BAPPPEDA	317,446,750.00
2	Pengurangan Mutasi Honor Pokja	39,007,501.83
1	Sekretariat Daerah	39,007,501.83
SALDO ASET TETAP 2019 (17)/(108)		87,268,272,715.93

Rincian KDP sebesar Rp87.268.272.715,93 dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

V.C.1.d ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Nilai Aset Lainnya mengalami pengaruh atau perubahan terkait implementasi dari Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 khususnya pada Aset Lain-lain , adapun rinciannya sebagai berikut.

	31 Desember 2019 (Permendagri 108) Rp.	31 Desember 2019 (Permendagri 17) Rp.	31 Desember 2018 Rp.	Tren %
Tuntutan Ganti Rugi	302.120.251,44	302.120.251,44	329.220.283,44	(8,23)%
Aset Tidak Berwujud	3,778,739,886.00	3,778,739,886.00	2,630,689,317.00	143.64%
Akumulasi Penyusutan (Amortisasi)	(1,231,263,297.99)	(1,231,263,297.99)	(957,349,055.25)	128.61%
Aset Lain-Lain	221,011,350,127.84	221,057,071,751.84	239,673,937,094.84	92.21%
Penyusutan Aset Lain-lain	(3,745,411,425.00)	(3,745,411,425.00)	(3,697,443,389.00)	101.30%
Kas yang Dibatasi Penggunaannya				
Jumlah	220.115.535.542,29	220.161.257.166,29	237,979,054,251.03	94.28%

V.C.1.d.1. Tuntutan Ganti Rugi

Pada Tahun 2019 terdapat penyetoran Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp 27.100.032,00. Adapun rincian Aset Lainnya berupa TGR per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2019 Rp.	31 Desember 2018 Rp.	Tren %
Tuntutan Ganti Rugi	302.120.251,44	329.220.283,44	97%

Rincian pengurangan TGR sebesar Rp27.100.032,00 merupakan SKTJM hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap beberapa LHP dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.89
Rincian Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 2018

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2019
1	961/17/SKTJM-2016 Tgl 08 Desember 2015	LAP-27/R/Inspektorat-2012	SYAMSUL BAHRI 19620303 198503 1 024 Dinas Pendidikan	Kekurangan fisik SMA Negeri 1 Koto Baru	8.261.288,44	8.261.288,44
2	961/001/SKTJM-2016 Tgl 18 Januari 2016	Lap-13/R/Inspektorat-2010	DODI SANDRA SYAM, SPT. M. Si 19750606 200604 1 010 Dinas Peternakan	Perbedaan volume antara RAB Dokumen Kualifikasi dengan RAB Penawaran	4.091.191,00	
3	961/002/SKTJM-2016 Tgl 18 Januari 2016	LAP-24/R/Inspektorat-2011	Ir. AMIYUSAR 19640517 199303 1 007 Dinas Peternakan	Kurang fisik pembangunan rumah kompos	8.951.234,00	5.951.234,00
4	961/003/SKTJM-2016 Tgl 18 Januari 2016	LAP-24/R/Inspektorat-2011	BUDI WALUYO 19661030 198703 1 003 Dinas Peternakan	Kekurangan fisik pekerjaan	20.008.841,00	
5	Surat Keputusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK Nomor 14.TP.04-2016/XIV/2016.S KPc tentang pencatatan kerugian negara tanggal 23 Jan 2017	LHP BPK RI No.212/S/XVII LPDG/11/2009	Neneng Elis Herlina, S.Si 19691026 200604 2 001 Bendahara Badan Lingkungan Hidup	Ketektoran Kas pada kas di bendahara pengeluaran SKPD Badan Lingkungan Hidup Tahun 2008 yang sampai pada LKPD Tahun 2014 berada pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran.	287.907.729,00	287.907.729,00
JUMLAH					329.220.283,44	302.120.251,44

V.C.1.d.2. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merupakan Aset Tak Berwujud Lainnya berupa *software* komputer. *Software* komputer adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu dan dapat digunakan di komputer lain. Adapun nilai Aset Tak Berwujud tidak mengalami perubahan terkait penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Saldo Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2019 (Permendagri 108) Rp.	31 Desember 2019 (Permendagri 17) Rp.	31 Desember 2018 Rp.	Tren %
Aset Tak Berwujud	3,778,739,886.00	3,778,739,886.00	2,630,689,317.00	143.64%
(Amortisasi)	(1,231,263,297.99)	(1,231,263,297.99)	(957,349,055.25)	128.61%
Jumlah	2,547,476,588.01	2,547,476,588.01	1,673,340,261.75	152.24%

Adapun rincian Aset Tak Berwujud per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.90
Penambahan dan Pengurangan Aset Tak Berwujud per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Aset Tak Berwujud 2018	Penambahan Aset Tak Berwujud 2019	Reklas Pengurangan Aset Tak Berwujud 2019	Saldo Aset Tidak Berwujud 2019 (17)/(108)
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
2	Sekretariat Daerah	145,750,000.00	-	-	145,750,000.00
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	-	-	-	-
7	Kec. IX Koto	-	-	-	-
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-
10	Kec Tiumbang	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	-	-	-	-
15	Dinas PERKIMTAN	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	64,850,000.00	131,500,000.00	-	196,350,000.00
17	Dinas Kesehatan	144,650,000.00	-	-	144,650,000.00
18	RSUD	199,485,000.00	-	-	199,485,000.00
19	Dinas Pendidikan	584,086,392.00	341,296,000.00	-	925,382,392.00
20	Dinas BUDPARPORA	-	-	-	-
21	Dinas TRANSSNAKER	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	24,668,150.00	121,679,569.00	-	146,347,719.00
24	Dinas PMD	52,675,000.00	-	-	52,675,000.00
25	Dinas Pertanian	-	-	-	-
26	Dinas Pangan dan Perikanan	-	-	-	-
27	Dinas KUMPERDAG	-	-	-	-
28	BKD	1,067,590,400.00	271,040,000.00	-	1,338,630,400.00
29	DPMPSTSP	-	-	-	-
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	-	-	-	-
32	DLH	1,650,000.00	-	-	1,650,000.00
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-
36	BKPSDM	142,000,000.00	-	-	142,000,000.00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
38	Dinas KOMINFO	203,284,375.00	282,535,000.00	-	485,819,375.00
Jumlah		2,630,689,317.00	1,148,050,569.00	-	3,778,739,886.00

Pada tahun 2019 terdapat penambahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.148.050.569,00. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.91
Penambahan Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud 2018	2,630,689,317.00
Penambahan Aset Tak Berwujud 2019	1,148,050,569.00
1 Belanja Modal Menjadi Aset	712,165,569.00
2 Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset	282,535,000.00
3 Dana Bos Menjadi Aset	19,250,000.00
4 Utang 2019	131,500,000.00
5 Kurang Catat	2,600,000.00
Saldo Aset Tak Berwujud 2019 (17)/(108)	3,778,739,886.00

Adapun rincian penambahan Aset Tak Berwujud berdasarkan perolehan dan SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.92
Penambahan Aset Tak Berwujud per SKPD

Saldo Aset Tak Berwujud 2018	2,630,689,317.00
Penambahan Aset Tak Berwujud 2019	1,148,050,569.00
1 Belanja Modal Menjadi Aset	712,165,569.00
1 Dinas Pendidikan	319,446,000.00
2 DISDUKAPIL	121,679,569.00
3 BKD	271,040,000.00
2 Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset	282,535,000.00
1 Dinas KOMINFO	282,535,000.00
3 Dana Bos Menjadi Aset	19,250,000.00
1 Dinas Pendidikan	19,250,000.00
4 Utang 2019	131,500,000.00
1 Dinas Perhubungan	131,500,000.00
5 Kurang Catat	2,600,000.00
1 Dinas Pendidikan	2,600,000.00
Saldo Aset Tak Berwujud 2019 (17)/(108)	3,778,739,886.00

Penambahan Aset Tak Berwujud yang berasal dari Utang merupakan kegiatan pengadaan SIM PKB pada Dinas Perhubungan sebesar Rp131.500.00,00.

Nilai amortisasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.93
Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019

N o	Nama SKPD	Saldo Aset Tak Berwujud 2019 (17)	Amortisasi 2018	Penambahan Amortisasi 2019	Pengurangan Amortisasi	Akumulasi Amortisasi 2019 (17)/(108)	Nilai Buku Aset Tak Berwujud 2019 (17)/(108)
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat Daerah	145,750,000.00	1,214,583.00	14,575,000.00	0.33	15,789,582.67	129,960,417.33
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-	-	-
6	Kec. Sngai Rumbai	-	-	-	-	-	-
7	Kec. IX Koto	-	-	-	-	-	-
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-	-	-
10	Kec Tiurang	-	-	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	-	-	-	-	-	-
15	Dinas PERKIMTAN	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	196,350,000.00	39,450,417.00	7,580,833.33	0.33	47,031,250.00	149,318,750.00
17	Dinas Kesehatan	144,650,000.00	85,584,583.33	14,465,000.00	-	100,049,583.33	44,600,416.67
18	RSUD	199,485,000.00	43,221,750.00	19,948,500.00	-	63,170,250.00	136,314,750.00
19	Dinas Pendidikan	925,382,392.00	241,277,946.92	70,161,987.21	-	311,439,934.13	613,942,457.87
20	Dinas BUDPARPORA	-	-	-	-	-	-
21	Dinas TRANSNAKER	-	-	-	-	-	-
22	DSP3KB	-	-	-	-	-	-
23	DISDUKAPIL	146,347,719.00	1,497,606.00	9,564,789.86	0.58	11,062,395.28	135,285,323.72
24	Dinas PMD	52,675,000.00	9,218,125.00	5,267,500.00	-	14,485,625.00	38,189,375.00
25	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pangan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-
27	Dinas KUMPERDAG	-	-	-	-	-	-
28	BKD	1,338,630,400.00	485,658,398.00	99,802,707.00	-	585,461,105.00	753,169,295.00
29	DPMP TSP	-	-	-	-	-	-
30	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-	-	-
31	BAPPPEDA	-	-	-	-	-	-
32	DLH	1,650,000.00	577,500.00	165,000.00	-	742,500.00	907,500.00
33	Kantor KESBANGPOL	-	-	-	-	-	-
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-	-	-
36	BKPSDM	142,000,000.00	18,024,995.00	14,200,000.00	(5.00)	32,225,000.00	109,775,000.00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-

N o	Nama SKPD	Saldo Aset Tak Berwujud 2019 (17)	Amortisasi 2018	Penambahan Amortisasi 2019	Pengurangan Amortisasi	Akumulasi Amortisasi 2019 (17)/(108)	Nilai Buku Aset Tak Berwujud 2019 (17)/(108)
38	Dinas KOMINFO	485,819,375.00	31,623,151.00	22,682,910.50	4,499,988.92	49,806,072.58	436,013,302.42
	Jumlah	3,778,739,886.00	957,349,055.25	278,414,227.90	4,499,985.16	1,231,263,297.99	2,547,476,588.01

V.C.1.d.3.Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif. Dalam rangka penerapan Permendagri 108 Tahun 2016 maka terdapat perubahan saldo aset lain-lain. Adapun saldo aset lain-lain versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan versi Permendagri 108 Tahun 2016 per 31 Desember 2019 serta per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

	31 Desember 2019 (Permendagri 108) Rp.	31 Desember 2019 (Permendagri 17) Rp.	31 Desember 2018 Rp.	Tren %
Aset Lain-Lain	221,011,350,127.84	221,057,071,751.84	239,673,937,094.84	92.21%
Penyusutan Aset Lain-lain	(3,745,411,425.00)	(3,745,411,425.00)	(3,697,443,389.00)	101.30%
Jumlah	217,265,938,702.84	217,311,660,326.84	235,976,493,705.84	92.07%

Adapun penambahan dan pengurangan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan reklas penambahan/pengurangan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.2.94
Aset Lain-lain per SKPD

No	Nama SKPD	Saldo Aset Lain-lain 2018	Penambahan Aset Lain-lain 2019	Pengurangan Aset Lain-lain 2019	Saldo Aset Lain-lain 2019 (17)	Penambahan/ Pengurangan Reklas Aset Lain-lain (108)	Saldo Aset Lain-lain 2019 (108)
1	Sekretariat DPRD	525,124,600.00	1,400,000.00	267,904,000.00	258,620,600.00	-	258,620,600.00
2	Sekretariat Daerah	7,998,657,092.00	967,341,473.00	1,150,336,276.00	7,815,662,289.00	-	7,815,662,289.00
3	Kec. Pulau Punjung	601,879,000.00	-	180,450,000.00	421,429,000.00	-	421,429,000.00
4	Kec. Sitiung	239,900,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	239,900,000.00	-	239,900,000.00
5	Kec. Koto Baru	402,111,800.00	-	-	402,111,800.00	-	402,111,800.00
6	Kec. Sngai Rumbai	485,398,000.00	-	-	485,398,000.00	-	485,398,000.00
7	Kec. IX Koto	309,220,000.00	-	-	309,220,000.00	-	309,220,000.00
8	Kec. Timpeh	344,419,450.00	29,772,500.00	6,750,000.00	367,441,950.00	-	367,441,950.00
9	Kec. Padang Laweh	291,598,000.00	-	21,105,000.00	270,493,000.00	-	270,493,000.00
10	Kec Tiumang	332,166,000.00	-	-	332,166,000.00	-	332,166,000.00
11	Kec Koto Besar	558,223,334.00	-	40,510,000.00	517,713,334.00	-	517,713,334.00
12	Kec Koto Salak	790,437,000.00	-	-	790,437,000.00	-	790,437,000.00
13	Kec. Asam Jujuhan	322,200,000.00	3,500,000.00	14,355,000.00	311,345,000.00	-	311,345,000.00
14	Dinas PUPR	125,052,976,051.00	-	233,214,029.00	124,819,762,022.00	-	124,819,762,022.00
15	Dinas PERKIMTAN	12,361,332,550.00	-	-	12,361,332,550.00	-	12,361,332,550.00
16	Dinas Perhubungan	1,846,646,530.00	-	158,040,000.00	1,688,606,530.00	-	1,688,606,530.00
17	Dinas Kesehatan	9,598,606,489.00	-	27,375,000.00	9,571,231,489.00	-	9,571,231,489.00
18	RSUD	9,230,974,996.00	-	-	9,230,974,996.00	-	9,230,974,996.00
19	Dinas Pendidikan	15,306,751,682.84	5,114,003,652.00	2,527,939,196.00	17,892,816,138.84	(45,721,624.00)	17,847,094,514.84
20	Dinas BUDPARPORA	66,390,282.00	36,864,029.00	47,410,000.00	55,844,311.00	-	55,844,311.00
21	Dinas TRANSNAKER	342,304,858.00	2,500,000.00	72,485,000.00	272,319,858.00	-	272,319,858.00
22	DSP3KB	1,838,135,275.00	283,294,138.00	533,798,750.00	1,587,630,663.00	-	1,587,630,663.00
23	DISDUKCAPIL	330,748,300.00	-	-	330,748,300.00	-	330,748,300.00
24	Dinas PMD	200,520,455.00	312,094,138.00	-	512,614,593.00	-	512,614,593.00
25	Dinas Pertanian	38,361,900,163.00	17,100,562.00	13,913,342,195.00	24,465,658,530.00	-	24,465,658,530.00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	7,157,250,769.00	-	6,187,883,969.00	969,366,800.00	-	969,366,800.00
27	Dinas KUMPERDAG	206,853,833.00	-	114,150,000.00	92,703,833.00	-	92,703,833.00
28	BKD	1,311,384,972.00	-	-	1,311,384,972.00	-	1,311,384,972.00
29	DPMPTSP	128,073,400.00	-	-	128,073,400.00	-	128,073,400.00
30	Inspektorat Kabupaten	120,509,490.00	-	85,939,000.00	34,570,490.00	-	34,570,490.00

No	Nama SKPD	Saldo Aset Lain-lain 2018	Penambahan Aset Lain-lain 2019	Pengurangan Aset Lain-lain 2019	Saldo Aset Lain-lain 2019 (17)	Penambahan/ Pengurangan Reklas Aset Lain-lain (108)	Saldo Aset Lain-lain 2019 (108)
31	BAPPPEDA	429,769,795.00	6,000,000.00	-	435,769,795.00	-	435,769,795.00
32	DLH	1,303,736,780.00	103,947,000.00	103,987,000.00	1,303,696,780.00	-	1,303,696,780.00
33	Kantor KESBANGPOL	160,291,700.00	-	-	160,291,700.00	-	160,291,700.00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	280,742,598.00	3,500,000.00	-	284,242,598.00	-	284,242,598.00
35	BPBD	547,230,000.00	136,830,000.00	-	684,060,000.00	-	684,060,000.00
36	BKPSDM	152,584,400.00	-	-	152,584,400.00	-	152,584,400.00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60,527,500.00	51,961,580.00	-	112,489,080.00	-	112,489,080.00
38	Dinas KOMINFO	76,359,950.00	-	-	76,359,950.00	-	76,359,950.00
Jumlah		239,673,937,094.84	7,077,909,072.00	25,694,774,415.00	221,057,071,751.84	(45,721,624.00)	221,011,350,127.84

Adapun penyusutan dan nilai buku aset Lain-lain 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 sebagai berikut.

Tabel 5.2.95
Nilai Buku Aset Lain-lain per SKPD versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007

No	Nama SKPD	Saldo Aset Lain-lain 2019 (17)	Akumulasi Penyusutan 2018	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 2019 (17)	Nilai Buku Aset Lain-lain 2019 (17)
1	Sekretariat DPRD	258,620,600.00	-	-	-	-	258,620,600.00
2	Sekretariat Daerah	7,815,662,289.00	2,834,902,162.00	40,061,370.00	-	2,874,963,532.00	4,940,698,757.00
3	Kec. Pulau Punjung	421,429,000.00	-	-	-	-	421,429,000.00
4	Kec. Sitiung	239,900,000.00	-	-	-	-	239,900,000.00
5	Kec. Koto Baru	402,111,800.00	-	-	-	-	402,111,800.00
6	Kec. Sngai Rumbai	485,398,000.00	-	-	-	-	485,398,000.00
7	Kec. IX Koto	309,220,000.00	-	-	-	-	309,220,000.00
8	Kec. Timpeh	367,441,950.00	-	-	-	-	367,441,950.00
9	Kec. Padang Laweh	270,493,000.00	-	-	-	-	270,493,000.00
10	Kec Tiumbang	332,166,000.00	-	-	-	-	332,166,000.00
11	Kec Koto Besar	517,713,334.00	-	-	-	-	517,713,334.00
12	Kec Koto Salak	790,437,000.00	-	-	-	-	790,437,000.00
13	Kec. Asam Jujuhan	311,345,000.00	-	-	-	-	311,345,000.00
14	Dinas PUPR	124,819,762,022.00	1,075,357.00	-	-	1,075,357.00	124,818,686,665.00
15	Dinas PERKIMTAN	12,361,332,550.00	-	-	-	-	12,361,332,550.00
16	Dinas Perhubungan	1,688,606,530.00	802,500,000.00	-	-	802,500,000.00	886,106,530.00
17	Dinas Kesehatan	9,571,231,489.00	18,770,370.00	-	-	18,770,370.00	9,552,461,119.00
18	RSUD	9,230,974,996.00	-	-	-	-	9,230,974,996.00

No	Nama SKPD	Saldo Aset Lain-lain 2019 (17)	Akumulasi Penyusutan 2018	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 2019 (17)	Nilai Buku Aset Lain- lain 2019 (17)
19	Dinas Pendidikan	17,892,816,138.84	14,103,500.00	-	-	14,103,500.00	17,878,712,638.84
20	Dinas BUDPARPORA	55,844,311.00	-	-	-	-	55,844,311.00
21	Dinas TRANSTAKER	272,319,858.00	-	-	-	-	272,319,858.00
22	DSP3KB	1,587,630,663.00	-	-	-	-	1,587,630,663.00
23	DISDUKCAPIL	330,748,300.00	-	-	-	-	330,748,300.00
24	Dinas PMD	512,614,593.00	-	-	-	-	512,614,593.00
25	Dinas Pertanian	24,465,658,530.00	-	-	-	-	24,465,658,530.00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	969,366,800.00	-	-	-	-	969,366,800.00
27	Dinas KUMPERDAG	92,703,833.00	-	-	-	-	92,703,833.00
28	BKD	1,311,384,972.00	-	-	-	-	1,311,384,972.00
29	DPMPTSP	128,073,400.00	-	-	-	-	128,073,400.00
30	Inspektorat Kabupaten	34,570,490.00	-	-	-	-	34,570,490.00
31	BAPPEDA	435,769,795.00	-	-	-	-	435,769,795.00
32	DLH	1,303,696,780.00	26,092,000.00	7,906,666.00	-	33,998,666.00	1,269,698,114.00
33	Kantor KESBANGPOL	160,291,700.00	-	-	-	-	160,291,700.00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	284,242,598.00	-	-	-	-	284,242,598.00
35	BPBD	684,060,000.00	-	-	-	-	684,060,000.00
36	BKPSDM	152,584,400.00	-	-	-	-	152,584,400.00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	112,489,080.00	-	-	-	-	112,489,080.00
38	Dinas KOMINFO	76,359,950.00	-	-	-	-	76,359,950.00
Jumlah		221,057,071,751.84	3,697,443,389.00	47,968,036.00	-	3,745,411,425.00	217,311,660,326.84

Penambahan dan pengurangan Aset lain-lain per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 sebagai berikut.

Tabel 5.2.96
Penambahan Pengurangan Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain 2018		239,673,937,094.84
Penambahan Aset Lain-lain 2019		7,077,909,072.00
1	Kurang Catat	348,207,562.00
2	Mutasi Antar SKPD Menambah Aset	616,052,305.00
3	Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	6,113,649,205.00
Pengurangan Aset Lain-lain 2019		25,694,774,415.00
1	Pengurangan Mutasi Antar SKPD	616,052,305.00
2	Pengurangan Koreksi / Pencatatan	194,805,000.00
3	Lelang dan Penjualan	1,591,411,664.00
4	Penghapusan P3D	2,004,467,532.00
5	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	6,400,000.00
6	Pengurangan Hibah ke Organosasi / Kelompok Masyarakat	20,680,186,104.00
7	Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal	601,451,810.00
Saldo Aset Lain-lain 2019 (17)/(108)		221,057,071,751.84

Rincian Penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp7.077.909.072,00,00 per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.97
Penambahan Aset Lain-lain per SKPD

Penambahan Aset Lain-lain 2019		7,077,909,072.00
1	Kurang Catat	348,207,562.00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	348,207,562.00
1	Sekretariat Daerah	323,307,000.00
2	Kec. Sitiung	7,800,000.00
3	Dinas Pertanian	17,100,562.00
2	Mutasi Antar SKPD Menambah Aset	616,052,305.00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	36,864,029.00
1	Dinas BUDPARPORA	36,864,029.00
	Aset yang dipinjam-pakai	579,188,276.00
1	DSP3KB	283,294,138.00
2	Dinas PMD	295,894,138.00
3	Penambahan reklas dari aset tetap/lainnya/ekstra	6,113,649,205.00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	5,469,614,732.00
1	Sekretariat DPRD	1,400,000.00
2	Kec. Timpeh	29,772,500.00
3	Kec. Asam Jujuhan	3,500,000.00
4	Dinas Pendidikan	5,114,003,652.00
5	Dinas TRANSNAKER	2,500,000.00
6	Dinas PMD	16,200,000.00
7	BAPPPEDA	6,000,000.00
8	DLH	103,947,000.00
9	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	3,500,000.00
10	BPBD	136,830,000.00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	51,961,580.00
	Aset yang dipinjam-pakai	644,034,473.00
1	Sekretariat Daerah	644,034,473.00

Penambahan Aset Lain-Lain merupakan aset yang dipinjam-pakai pada Sekretariat sebagai berikut.

1. Kendaraan Dinas Toyota Innova hasil pengadaan Tahun 2019 dengan nilai perolehan Rp308.034.473,00 yang dipinjam-pakai oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung tertuang dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 020/17/Umum&Perl/2019;
2. Kendaraan Dinas Toyota Rush hasil pengadaan Tahun 2019 dengan nilai perolehan Rp246.000.000,00 yang dipinjam-pakai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya tertuang dalam Perjanjian Pinjam Pakai Antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya Nomor 020/14/Umum&Perl/2019; dan

3. Kendaraan Dinas Isuzu Pather hasil pengadaan Tahun 2006 dengan nilai perolehan Rp90.000.000,00 yang dipinjamakai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya tertuang dalam Perjanjian Pinjam Pakai Antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya Nomor 020/25/Umum&Perl/2019.

Rincian pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp25.694.774.415,00 berdasarkan perolehan per SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.98
Pengurangan Aset Lain-lain per SKPD

Pengurangan Aset Lain-lain 2019		25,694,774,415.00
1	Pengurangan Mutasi Antar SKPD	616,052,305.00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	36,864,029.00
1	Dinas PUPR	36,864,029.00
	Aset yang dipinjamkaikan	579,188,276.00
1	Sekretariat Daerah	579,188,276.00
2	Pengurangan Koreksi / Pencatatan	194,805,000.00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	180,450,000.00
1	Kec. Pulau Punjung	180,450,000.00
	Aset yang dipinjamkaikan	14,355,000.00
1	Kec. Asam Jujuhan	14,355,000.00
3	Lelang dan Penjualan	1,591,411,664.00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	1,584,661,664.00
1	Sekretariat DPRD	223,957,000.00
2	Sekretariat Daerah	347,157,000.00
3	Kec. Sitiung	7,800,000.00
4	Kec. Timpeh	6,750,000.00
5	Kec. Padang Laweh	21,105,000.00
6	Kec Koto Besar	27,360,000.00
7	Dinas PUPR	196,350,000.00
8	Dinas Kesehatan	27,375,000.00
9	Dinas Pendidikan	523,471,664.00
10	Dinas TRANSSNAKER	13,410,000.00
11	Inspektorat Kabupaten	85,939,000.00
12	DLH	103,987,000.00
	Aset yang dipinjamkaikan	6,750,000.00
1	Kec Koto Besar	6,750,000.00
4	Penghapusan P3D	2,004,467,532.00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	2,004,467,532.00
1	Dinas Pendidikan	2,004,467,532.00
5	Pengurangan Reklas Ke Aset Tetap/Lainnya/ Ekstra	6,400,000.00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	6,400,000.00
1	Kec Koto Besar	6,400,000.00
6	Pengurangan Hibah ke Organisasi / Kelompok Masyarakat	20,680,186,104.00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	43,947,000.00
1	Sekretariat DPRD	43,947,000.00
	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat	20,636,239,104.00
1	Dinas Perhubungan	158,040,000.00
2	Dinas BUDPARPORA	47,410,000.00
3	Dinas TRANSSNAKER	59,075,000.00
4	DSP3KB	533,798,750.00
5	Dinas Pertanian	13,535,881,385.00
6	Dinas Pangan dan Perikanan	6,187,883,969.00
7	Dinas KUMPERDAG	114,150,000.00
7	Pengurangan Hibah ke Instansi Vertikal	601,451,810.00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	400,279,810.00
1	Sekretariat Daerah	70,091,000.00
2	Dinas Pertanian	330,188,810.00
	Aset yang dipinjamkaikan	153,900,000.00
1	Sekretariat Daerah	153,900,000.00
	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat	47,272,000.00
1	Dinas Pertanian	47,272,000.00

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan penjualan secara lelang atas aset lain-lain senilai Rp1.591.411.664,00 yang terdiri dari peralatan kantor dan kendaraan dinas. Pelaksanaan lelang ini difasilitasi oleh Tim Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang.

Rincian Pengurangan Aset lain-lain sebesar Rp2.004.467.532,00 merupakan sisa aset urusan konkuren pendidikan menengah. Pada Tahun 2019 aset ini telah dua kali diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan dengan rincian sebagai berikut.

1. Adendum II Berita Acara Serah Terima P3D dengan Nomor 030/280/BAST/BKD/IV-2019 tanggal 29 April 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.99
BAST P3D Pertama

No	Urusan	Nilai Aset (Bangunan Gedung
1	Sma Negeri 2 Pulau Pnjung	272,377,173.00
2	Sma Negeri 1 Sitiung	107,689,369.00
3	Smk Negeri 1 Koto Baru	109,440,543.00
4	Sma Unggul Dharmasraya	54,577,226.00
5	Sma Negeri 1 Sungai Rumbai	217,779,472.00
6	Sma Negeri 1 Koto Baru	163,610,640.00
7	Sma Negeri 2 Koto Baru	54,588,230.00
8	Sma Negeri 1 Pulau Punjung	107,680,260.00
9	Smk Negeri 1 Pulau Punjung	107,559,519.00
Total Urusan Pendidikan		1,195,302,432.00

2. Adendum Berita Acara Serah Terima P3D Nomor 030/194.A/BAST/BAP2BMD-III/ 2019 tanggal 18 November 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.100
BAST P3D kedua

No	Urusan	Jenis Aset pada Aset Lain-Lain			Total Aset Lain_lain
		Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	
1	SMAN 1 IX Koto	-	-	49,760,000.00	49,760,000.00
2	SMAN 1 Koto Baru	-	95,268,600.00	-	95,268,600.00
3	SMKN 1 Pulau Punjung	1,000,000.00	-	19,000,000.00	20,000,000.00
4	SMAN 1 Sungai Rumbai	32,058,000.00	79,849,800.00	-	111,907,800.00
5	SMKN 2 Pulau Punjung	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00
6	SMAN 1 Pulau Punjung	3,532,700.00	-	-	3,532,700.00
7	SMAN 2 Pulau Punjung	17,048,000.00	465,252,000.00	18,580,000.00	500,880,000.00
8	SMKN 1 Sungai Rumbai	22,316,000.00	-	-	22,316,000.00
Total Urusan Pendidikan		81,454,700.00	640,370,400.00	87,340,000.00	809,165,100.00

Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp20.680.186.104,00 merupakan pelaksanaan hibah kepada Organisasi/Kelompok masyarakat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.101
Hibah Aset Lain-lain ke Organisasi/Kelompok Masyarakat

No	Nama SKPD	Nilai Aset	Penerima Hibah	No. SK Penghapusan
1	Sekretariat DPRD	43,947,000.00	Yayasan Al Kautsar	953/144/KPTS-SEKDA/2019
2	Dinas Perhubungan	158,040,000.00	Ninik Mamak Kaum Melayu Gunung Medan	953/122/KPTS-SEKDA/2019
3	Dinas BudParPora	47,410,000.00	Perbakin	953/143/KPTS-SEKDA/2019
4	Dinas Transnaker	59,075,000.00	Masyarakat Jorong Sampola	953/120/KPTS-SEKDA/2019
5	Dinas Sosial P3KB	533,798,750.00	Kader Pembantu Pembina KB Desa	953/152/KPTS-SEKDA/2019
6	Dinas Pertanian	4,923,958,385.00	Pemerintah Nagari dan Kelompok Masyarakat	953/123/KPTS-SEKDA/2019
		8,611,923,000.00	Pemerintah Nagari dan Kelompok Masyarakat	953/146/KPTS-SEKDA/2019
7	Dinas Pangan dan Perikanan	6,187,883,969.00	Kelompok Masyarakat /Kelompok Tani	953/147/KPTS-SEKDA/2019
8	Dinas Kumperdag	114,150,000.00	Kelompok Masyarakat	953/121/KPTS-SEKDA/2019
Jumlah		20,680,186,104.00		

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menghibahkan aset lain-lain kepada Kementerian Riset dan Dikti melalui Naskah Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Kementerian Riset dan Dikti dengan Nomor 030/114/BKD/X-2019 tanggal 15 Oktober 2019. Adapun nilai aset lain-lain yang dihibahkan sebesar Rp601.451.810 tersebut ada pada Sekretariat Daerah dan

Dinas Pertanian. Aset lain-lain ini juga telah dihapuskan melalui Keputusan Pengelola Barang Nomor 953/145/KPTS-SEKDA/2019.

Nilai penyusutan Aset Lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2.102
Nilai Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain 2019 (17)		221,057,071,751.84
Akumulasi Penyusutan 2018		3,697,443,389.00
Penambahan Penyusutan Aset Lain-lain 2019		47,968,036.00
1	Penyusutan Semester I	23,984,018.00
2	Penyusutan Semester II	23,984,018.00
Akumulasi Penyusutan Aset 2019 (17)		3,745,411,425.00
Nilai Buku Aset Lain-lain 2019 (17)		217,311,660,326.84

Rincian penambahan penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp47.968.036,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.103
Penambahan Penyusutan Aset Lain-lain

Penambahan Penyusutan Aset Lain-lain 2019		47,968,036.00
1	Penyusutan Semester I	23,984,018.00
	Aset yang dipinjamkaikan	23,984,018.00
1	Sekretariat Daerah	20,030,685.00
2	DLH	3,953,333.00
2	Penyusutan Semester II	23,984,018.00
	Aset yang dipinjamkaikan	23,984,018.00
1	Sekretariat Daerah	20,030,685.00
2	DLH	3,953,333.00
Akumulasi Penyusutan Aset 2019 (17)		3,745,411,425.00

Dalam rangka penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 terdapat penurunan saldo aset lain-lain sebesar Rp45.721.624,00. Hal ini terjadi karena reklas aset lain-lain alat olahraga ke kelompok aset ekstrakompatabel peralatan mesin. Nilai asset ain-lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.104
Aset Lain-lain versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016

No	Nama SKPD	Saldo Aset Lain-lain 2018	Penambahan Aset Lain-lain 2019	Pengurangan Aset Lain-lain 2019	Saldo Aset Lain-lain 2019 (17)	Penambahan/ Pengurangan Reklas Aset Lain-lain (108)	Saldo Aset Lain-lain 2019 (108)
1	Sekretariat DPRD	525,124,600.00	1,400,000.00	267,904,000.00	258,620,600.00	-	258,620,600.00
2	Sekretariat Daerah	7,998,657,092.00	967,341,473.00	1,150,336,276.00	7,815,662,289.00	-	7,815,662,289.00
3	Kec. Pulau Punjung	601,879,000.00	-	180,450,000.00	421,429,000.00	-	421,429,000.00
4	Kec. Sitiung	239,900,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	239,900,000.00	-	239,900,000.00
5	Kec. Koto Baru	402,111,800.00	-	-	402,111,800.00	-	402,111,800.00
6	Kec. Sngai Rumbai	485,398,000.00	-	-	485,398,000.00	-	485,398,000.00
7	Kec. IX Koto	309,220,000.00	-	-	309,220,000.00	-	309,220,000.00
8	Kec. Timpeh	344,419,450.00	29,772,500.00	6,750,000.00	367,441,950.00	-	367,441,950.00
9	Kec. Padang Laweh	291,598,000.00	-	21,105,000.00	270,493,000.00	-	270,493,000.00
10	Kec Tiumang	332,166,000.00	-	-	332,166,000.00	-	332,166,000.00
11	Kec Koto Besar	558,223,334.00	-	40,510,000.00	517,713,334.00	-	517,713,334.00
12	Kec Koto Salak	790,437,000.00	-	-	790,437,000.00	-	790,437,000.00
13	Kec. Asam Jujuhan	322,200,000.00	3,500,000.00	14,355,000.00	311,345,000.00	-	311,345,000.00
14	Dinas PUPR	125,052,976,051.00	-	233,214,029.00	124,819,762,022.00	-	124,819,762,022.00
15	Dinas PERKIMTAN	12,361,332,550.00	-	-	12,361,332,550.00	-	12,361,332,550.00
16	Dinas Perhubungan	1,846,646,530.00	-	158,040,000.00	1,688,606,530.00	-	1,688,606,530.00
17	Dinas Kesehatan	9,598,606,489.00	-	27,375,000.00	9,571,231,489.00	-	9,571,231,489.00
18	RSUD	9,230,974,996.00	-	-	9,230,974,996.00	-	9,230,974,996.00
19	Dinas Pendidikan	15,306,751,682.84	5,114,003,652.00	2,527,939,196.00	17,892,816,138.84	(45,721,624.00)	17,847,094,514.84
20	Dinas BUDPARPORA	66,390,282.00	36,864,029.00	47,410,000.00	55,844,311.00	-	55,844,311.00
21	Dinas TRANSNAKER	342,304,858.00	2,500,000.00	72,485,000.00	272,319,858.00	-	272,319,858.00
22	DSP3KB	1,838,135,275.00	283,294,138.00	533,798,750.00	1,587,630,663.00	-	1,587,630,663.00
23	DISDUKCAPIL	330,748,300.00	-	-	330,748,300.00	-	330,748,300.00
24	Dinas PMD	200,520,455.00	312,094,138.00	-	512,614,593.00	-	512,614,593.00
25	Dinas Pertanian	38,361,900,163.00	17,100,562.00	13,913,342,195.00	24,465,658,530.00	-	24,465,658,530.00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	7,157,250,769.00	-	6,187,883,969.00	969,366,800.00	-	969,366,800.00
27	Dinas KUMPERDAG	206,853,833.00	-	114,150,000.00	92,703,833.00	-	92,703,833.00
28	BKD	1,311,384,972.00	-	-	1,311,384,972.00	-	1,311,384,972.00
29	DPMPTSP	128,073,400.00	-	-	128,073,400.00	-	128,073,400.00
30	Inspektorat Kabupaten	120,509,490.00	-	85,939,000.00	34,570,490.00	-	34,570,490.00

No	Nama SKPD	Saldo Aset Lain-lain 2018	Penambahan Aset Lain-lain 2019	Pengurangan Aset Lain-lain 2019	Saldo Aset Lain-lain 2019 (17)	Penambahan/ Pengurangan Reklas Aset Lain-lain (108)	Saldo Aset Lain-lain 2019 (108)
31	BAPPEDA	429,769,795.00	6,000,000.00	-	435,769,795.00	-	435,769,795.00
32	DLH	1,303,736,780.00	103,947,000.00	103,987,000.00	1,303,696,780.00	-	1,303,696,780.00
33	Kantor KESBANGPOL	160,291,700.00	-	-	160,291,700.00	-	160,291,700.00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	280,742,598.00	3,500,000.00	-	284,242,598.00	-	284,242,598.00
35	BPBD	547,230,000.00	136,830,000.00	-	684,060,000.00	-	684,060,000.00
36	BKPSDM	152,584,400.00	-	-	152,584,400.00	-	152,584,400.00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60,527,500.00	51,961,580.00	-	112,489,080.00	-	112,489,080.00
38	Dinas KOMINFO	76,359,950.00	-	-	76,359,950.00	-	76,359,950.00
Jumlah		239,673,937,094.84	7,077,909,072.00	25,694,774,415.00	221,057,071,751.84	(45,721,624.00)	221,011,350,127.84

Nilai buku dan penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2019 versi Permendagri Nomor 108 tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.105
Nilai Buku dan Penyusutan Aset Lain-lain versi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016

No	Nama SKPD	Saldo Aset Lain-lain 2019 (108)	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 2019 (17)	Koreksi Penambahan/Pengurangan Penyusutan (108)	Akumulasi Penyusutan Aset 2019 (108)	Nilai Buku 31 Desember 2019 (108)
1	Sekretariat DPRD	258,620,600.00	-	-	-	258,620,600.00
2	Sekretariat Daerah	7,815,662,289.00	2,874,963,532.00	-	2,874,963,532.00	4,940,698,757.00
3	Kec. Pulau Punjung	421,429,000.00	-	-	-	421,429,000.00
4	Kec. Sitiung	239,900,000.00	-	-	-	239,900,000.00
5	Kec. Koto Baru	402,111,800.00	-	-	-	402,111,800.00
6	Kec. Sngai Rumbai	485,398,000.00	-	-	-	485,398,000.00
7	Kec. IX Koto	309,220,000.00	-	-	-	309,220,000.00
8	Kec. Timpeh	367,441,950.00	-	-	-	367,441,950.00
9	Kec. Padang Laweh	270,493,000.00	-	-	-	270,493,000.00
10	Kec Tiumang	332,166,000.00	-	-	-	332,166,000.00
11	Kec Koto Besar	517,713,334.00	-	-	-	517,713,334.00
12	Kec Koto Salak	790,437,000.00	-	-	-	790,437,000.00
13	Kec. Asam Jujuhan	311,345,000.00	-	-	-	311,345,000.00
14	Dinas PUPR	124,819,762,022.00	1,075,357.00	-	1,075,357.00	124,818,686,665.00
15	Dinas PERKIMTAN	12,361,332,550.00	-	-	-	12,361,332,550.00
16	Dinas Perhubungan	1,688,606,530.00	802,500,000.00	-	802,500,000.00	886,106,530.00
17	Dinas Kesehatan	9,571,231,489.00	18,770,370.00	-	18,770,370.00	9,552,461,119.00

No	Nama SKPD	Saldo Aset Lain-lain 2019 (108)	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 2019 (17)	Koreksi Penambahan/Pengurang an Penyusutan (108)	Akumulasi Penyusutan Aset 2019 (108)	Nilai Buku 31 Desember 2019 (108)
18	RSUD	9,230,974,996.00	-	-	-	9,230,974,996.00
19	Dinas Pendidikan	17,847,094,514.84	14,103,500.00	-	14,103,500.00	17,832,991,014.84
20	Dinas BUDPARPORA	55,844,311.00	-	-	-	55,844,311.00
21	Dinas TRANSNAKER	272,319,858.00	-	-	-	272,319,858.00
22	DSP3KB	1,587,630,663.00	-	-	-	1,587,630,663.00
23	DISDUKCAPIL	330,748,300.00	-	-	-	330,748,300.00
24	Dinas PMD	512,614,593.00	-	-	-	512,614,593.00
25	Dinas Pertanian	24,465,658,530.00	-	-	-	24,465,658,530.00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	969,366,800.00	-	-	-	969,366,800.00
27	Dinas KUMPERDAG	92,703,833.00	-	-	-	92,703,833.00
28	BKD	1,311,384,972.00	-	-	-	1,311,384,972.00
29	DPMPTSP	128,073,400.00	-	-	-	128,073,400.00
30	Inspektorat Kabupaten	34,570,490.00	-	-	-	34,570,490.00
31	BAPPPEDA	435,769,795.00	-	-	-	435,769,795.00
32	DLH	1,303,696,780.00	33,998,666.00	-	33,998,666.00	1,269,698,114.00
33	Kantor KESBANGPOL	160,291,700.00	-	-	-	160,291,700.00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	284,242,598.00	-	-	-	284,242,598.00
35	BPBD	684,060,000.00	-	-	-	684,060,000.00
36	BKPSDM	152,584,400.00	-	-	-	152,584,400.00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	112,489,080.00	-	-	-	112,489,080.00
38	Dinas KOMINFO	76,359,950.00	-	-	-	76,359,950.00
Jumlah		221,011,350,127.84	3,745,411,425.00	-	3,745,411,425.00	217,265,938,702.84

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan penjualan barang milik daerah secara lelang yang difasilitasi oleh tim lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Padang. Penjualan ini dilakukan terhadap aset tetap peralatan mesin dan aset lain-lain yang memiliki nilai buku Rp0,00, dengan total nilai limit sebesar Rp95.648.000,00 dan hasil penjualan sebesar Rp188.228,000 dengan presentase kenaikan penjualan sebesar 96,7%. Rekapitulasi nilai perolehan dan hasil lelang yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.106
Nilai Aset Lain-lain yang Dilelang per SKPD

N O	SKPD	Peralatan Mesin	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Limit	Hasil Penjualan
	JUMLAH	536,525,000.00	1,591,411,664.00	2,127,936,664.00	2,127,936,664.00	-	95,648,000.00	188,228,000.00
1	Sekretariat Daerah	488,250,000.00	347,157,000.00	835,407,000.00	835,407,000.00	-		
2	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	-	13,410,000.00	13,410,000.00	13,410,000.00	-		
3	Dinas Lingkungan Hidup	34,650,000.00	103,987,000.00	138,637,000.00	138,637,000.00	-		
4	PUPR		196,350,000.00	196,350,000.00	196,350,000.00	-		
5	kec. Sitiung		7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	-		
6	kec. Koto besar		34,110,000.00	34,110,000.00	34,110,000.00	-		
7	kec. Padang lawah		21,105,000.00	21,105,000.00	21,105,000.00	-		
8	Timpeh		6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	-		
9	Dinas Kesehatan	13,625,000.00	27,375,000.00	41,000,000.00	41,000,000.00	-		
10	Dinas Pendidikan		523,471,664.00	523,471,664.00	523,471,664.00	-		
11	Inpektorat		85,939,000.00	85,939,000.00	85,939,000.00	-		
12	Sekretariat DPRD		223,957,000.00	223,957,000.00	223,957,000.00	-		

Adapun rincian barang yang dijual secara lelang tersebut di atas ada dalam **Lampiran 16.**

Selain penjualan secara lelang Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga melakukan penjualan secara langsung yang dilakukan terhadap sisa bongkaran bangunan gedung pada Sekretariat Daerah, hewan ternak (kambing) pada dinas pertanian, dan kontruksi baliho yang roboh pada Badan Keuangan Daerah.

V.C.2 KEWAJIBAN

Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.629.183.585,27 atau naik sebesar Rp8.096.436.427,39 atau 39,43% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp20.532.747.157,88. Jumlah tersebut terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.2.a Kewajiban Jangka Pendek	28.629.183.585,27	20.532.747.157,88

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga) utang bunga maupun utang perhitungan fihak ketiga (PFK).

Utang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.2.a.1 Utang kepada Pihak Ketiga (PFK)	601.085,00	17.723.019,00

Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2019 sebesar Rp601.085,00 merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Puskesmas Timpeh berupa Utang PPh 21 atas Jasa Pelayanan yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 28 Februari 2020.

Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018 sebesar Rp17.723.019,00 juga merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa Utang Pajak Pusat yang telah disetor ke kas negara selama Tahun 2019 disetorkan ke Kas Negara dapat dirinci sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.2.107
Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2019 dan 2018

No	SKPD/ Uraian	Utang per 31 Des 2019 (Rp)	Utang per 31 Des 2018 (Rp)	Keterangan
	Utang PPh Pusat		17.723.019,00	
a.	BLUD Puskesmas		14.822.719,00	
	- Puskesmas Timpeh		8.320.669,00	Telah disetor ke Kas Negara tanggal 28 Januari 2019
	PPN		6.941.738,00	
	PPh 21	601.085,00	299.999,00	
	PPh 22		1.078.932,00	
	- Puskesmas Sialang		160.300,00	Telah disetor ke Kas Negara tanggal 2 Januari 2019
	PPh 21		160.300,00	
	- Puskesmas Koto Besar		6.341.750,00	Telah disetor ke Kas Negara Rp5.558.750 tanggal 2 Januari 2019 dan sisa sebesar Rp783.000 pada tanggal 23 Januari 2019
	PPN		3.897.500,00	
	PPh 21		1.275.000,00	
	PPh 22		1.169.250,00	
b.	Kecamatan Padang Laweh		2.900.300,00	Telah disetor ke Kas Negara Rp2.187.300,00 tanggal 7 Januari 2019 dan
	PPN		2.307.000,00	

No	SKPD/ Uraian	Utang per 31 Des 2019 (Rp)	Utang per 31 Des 2018 (Rp)	Keterangan
	PPh 22		533.300,00	Rp713.000,00 tanggal 23 April 2019.
	PPh 23		60.000,00	
	Jumlah	601.085,00	17.732.019,00	

Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp)

V.C.2.a.2 Pendapatan Diterima Dimuka 59.368.059,68 81.213.447,88

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2019 sebesar Rp59.368.059,68 tersebut merupakan pendapatan diterima dimuka atas kerja sama pemakaian kekayaan daerah untuk pemakaian sewa gedung ATM pada beberapa SKPD dan sewa untuk bangunan menara telekomunikasi dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.108
Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Tahun 2019

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. tahun 2019
1	Dinas Kesehatan				
	ATM Bank Nagari Cabang Koto Baru	PKS/006/KB06-2016	20/06/2016 s.d. 31/12/2018		8.887.655,18
		20 Juni 2016 sd 20 Juni 2021	01/01/2020 s.d. 12/10/2020	2.521.613,79	
		5 Tahun	01/01/2021 s.d. 12/10/2021	1.178.131,03	
		Rp12.587.400,00			
		1827 hari			
I	Jumlah			3.699.744,82	
2	RSUD Sungai Dareh				
a.	Payment Point dan ATM Bank Nagari	445/789/RSUD-2016	01/02/2017 s.d. 31/12/2018		20.581.512,83
		1 Feb 2017 s.d 1 Feb 2022	01/01/2020 s.d. 31/12/2020	7.079.730,92	
		5 Tahun	01/01/2021 s.d. 31/12/2021	7.060.387,39	
		Rp35.340.624,00	01/01/2022 s.d. 01/02/2022	618.992,86	
		1827 hari			
b.	ATM BRI	05 Mei 2019 s.d. 04 Mei 2020	05/05/2019 s.d. 31/12/2019		2.436.338,80
		1 Tahun	01/01/2019 s.d. 04/05/2019	1.263.661,20	
		Rp3.330.000,00			
		366 hari			
II	Jumlah			16.022.772,37	
3	Badan Keuangan Daerah				
	Menara Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi	Nomor:415.4/14/BUP-2018 Nomor: 0001/DMT/RC-3/M-R010/VIII/2018	17/06/2018 s.d. 31/12/2018		9.712.212,47
		17 Juni 2018 s.d 16 Juni 2023	01/01/2020 s.d. 31/12/2020	6.313.800,66	
		5 Tahun	01/01/2021 s.d. 31/12/2021	6.296.549,84	
		Rp31.500.000,00	01/01/2022 s.d. 01/02/2022	6.296.549,84	
			01/01/2023 s.d. 16/06/2023	2.880.887,19	
	ATM Bank Nagari	030/654/BKD-XII/2017	01/12/2017 s.d. 31/12/2018		12.752.792,99
		20 Juni 2016 s.d 30 Nov 2022	01/01/2020 s.d. 31/12/2020	6.133.406,35	

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. tahun 2019
		5 tahun	01/01/2021 s.d. 31/12/2021	6.116.648,41	
		Rp30.600.000,00	01/01/2022 s.d. 01/02/2022	5.597.152,25	
		1826 hari			
III	Jumlah			39.634.994,54	
4	Sekretariat Daerah				
	ATM BRI	B.639-KC.III//LOG/04/2019			11.539.452,05
		2 Januari 2017 s.d 1 Januari 2020	01/01/2020	10.547,95	
		3 tahun			
		Rp.11.550.000,00			
		1095 hari			
IV	Jumlah			10.547,95	
	Total (I + II + III + IV)			59.368.059,68	65.909.964,32

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.2.a.3 Utang Belanja	25.959.697.767,73	19.668.717.484,00

Utang Belanja per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.959.697.767,73 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.2.109
Utang Belanja Tahun 2019

No	Utang Belanja	Uraian	Saldo Utang
a.	Belanja Pegawai		
1.	Dinas Pendidikan	Sertifikasi Guru Triwulan IV	14.263.247.400,00
2.	BKD	Utang Insentif Pajak Daerah TW IV	113.538.618,00
		Utang Insentif Retribusi Daerah TW IV	114.153.305,00
		Utang Insentif PBB TW IV	87.252.275,15
I	Jumlah		14.578.191.598,15
b.	Belanja Barang Jasa		-
1.	Belanja BLUD Puskesmas	Jasa Pelayanan dan Jasa Klaim BPJS	454.090.210,00
2.	BLUD RSUD Sungai Dareh	Utang Jasa Layanan 2019	1.065.664.272,00
		Utang obat dan bahan kedokteran	4.789.276.962,00
3.	Dinas PUPR	Utang Pihak Ketiga	2.064.165.433,58
II	Jumlah		8.373.196.877,58
c.	Belanja Modal		
1.	Dinas PUPR	Utang Belanja Modal	597.928.000,00
2.	BLUD Puskesmas	Utang Belanja Rehab Gedung Tahun 2018	50.735.000,00
3.	Dinas Pendidikan	Utang Belanja Modal BOS (Afirmasi)	189.569.000,00
4.	RSUD Sungai Dareh	Utang Belanja Modal	1.972.034.718,00
5.	Dinas Perhubungan	Utang Belanja jaringan SIM PKB	131.500.000,00
III	Jumlah		2.941.766.718,00
d.	Belanja Bantuan Keuangan		
IV	PPKD	Utang Belanja Partai Politik	66.542.574,00
JUMLAH (I + II + III + IV)			25.959.697.767,73

	Tahun 2019	Tahun2018
a. Utang Belanja Pegawai	14.490.939.323,00	12.954.550.580,00

Utang Belanja Pegawai Tahun 2019 berupa Sertifikasi Guru Triwulan IV yang belum dibayarkan sampai akhir Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp14.263.247.400,00. Utang ini telah dibayar pada tanggal 3 Januari 2020 dengan SP2D Nomor 00058/SP2D/LS/1.01.01/2020 sebesar Rp14.263.247.400,00.

Utang Belanja Pegawai pada BKD sebesar Rp314.944.198,15 sebagai berikut.

1. Utang insentif Pajak Daerah TW IV sebesar Rp113.538.618 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 862.1/122/KPTS-BKD/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Kekurangan Insentif Triwulan IV kepada Perangkat Daerah Pemungut/Pengelola Pajak Daerah di Kabupaten Dharmasraya TA 2019
2. Utang insentif Retribusi Daerah TW IV sebesar Rp114.15.305,00 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 862.1/123/KPTS-BKD/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Kekurangan Insentif Triwulan IV kepada Perangkat Daerah Pemungut/Pengelola Retribusi Daerah di Kabupaten Dharmasraya TA 2019.
3. Utang Insentif PBB Tahun 2019 sebesar Rp87.252.275,15 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 862.1/297/KPTS-BKD/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Kekurangan Insentif Kepada Pemungut/ Pengelola Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Tahun Anggaran 2019 Di Kabupaten Dharmasraya.

Uraian Utang Belanja Pegawai pada BKD dapat dijelaskan pada **Lampiran 17a, Lampiran 17b, dan Lampiran 17c.**

Sedangkan Utang Belanja Pegawai Tahun 2018 berupa Sertifikasi Guru Triwulan IV yang belum dibayarkan sampai akhir Tahun 2018 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp12.954.550.580,00. Utang ini telah dibayar pada tanggal 3 Januari 2019 dengan SP2D Nomor 00055/SP2D/LS/1.01.01/2019 sebesar Rp12.954.550.580,00.

	Tahun 2019	Tahun 2018
b. Utang Belanja Barang dan Jasa	8.373.196.877,58	4.823.405.604,00

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 terdiri dari.

1. Utang Belanja Tahun 2019 pada BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp5.854.941.234,00 terdiri atas utang jasa layanan sebesar Rp1.065.664.272,00 dan utang bahan habis pakai sebesar Rp4.789.276.962,00 yang terdiri dari utang bahan habis pakai/kedokteran sebesar Rp1.586.143.441, utang bahan obat Rp2.316.720.711, utang bahan laboratorium sebesar Rp843.820.810,00, dan utang gas medis sebesar Rp42.592.000,00.

Uraian utang belanja barang dan jasa sebesar Rp4.789.276.962,00 pada RSUD Sungai Dareh dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

- 2. Utang belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp454.090.210,00 merupakan Utang BLUD UPT Puskesmas atas utang klaim BPJS dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.110
Utang Belanja UPT Puskesmas Tahun 2019

No	Puskesmas	Klaim BPJS
1	Sungai Rumbai	39.192.500,00
2	Sungai Limau	13.458.610,00
3	Sitiung II	6.985.380,00
4	Padang Laweh	23.769.000,00
5	Sungai Dareh	92.971.880,00
6	Silago	58.126.560,00
7	Gunung Medan	2.383.080,00
8	Sitiung I	60.008.400,00
9	Koto Baru	63.075.000,00
10	Timpeh	22.662.000,00
11	Sialang	-
12	Tiumang	39.146.540,00
13	Koto Besar	32.311.260,00
JUMLAH		454.090.210,00

- 3. Utang belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas pihak ketiga sebesar Rp2.064.165.433,58 merupakan utang belanja barang yang akan diserahkan pada masyarakat sebesar Rp1.432.664.000,00 dan utang barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp631.501.433,58.

Uraian utang belanja barang dan jasa sebesar Rp2.064.165.433,58 pada Dinas PUPR dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018.

- 1) Utang tagihan listrik penerangan jalan umum per 31 Desember 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp182.842.415,00 telah dibayarkan pada Tahun 2019.
- 2) Utang belanja Tahun 2018 pada BLUD RSUD Sungai Dareh merupakan utang obat dan bahan habis pakai kedokteran sebesar Rp3.493.938.998,00. Utang ini telah dibayar sebesar Rp3.445.503.043,00 dan merupakan pengakuan utang Tahun 2018 sehingga terjadi koreksi pengakuan utang Tahun 2018 sebesar Rp48.435.955,00 disebabkan kesalahan pencatatan nilai piutang Tahun 2018.
- 3) Utang belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp649.395.891,00 merupakan Utang BLUD UPT Puskesmas atas utang klaim BPJS berupa pembayaran jasa pelayanan kepada pegawai dan telah dibayarkan selama Tahun 2019.
- 4) Utang belanja pada Dinas Pertanian merupakan utang kegiatan yang pada perencanaannya didanai dari BKK Provinsi Sumatera Barat

sebesar Rp497.228.000,00 telah dibayarkan pada tahun 2019 dengan menggunakan anggaran APBD Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp413.894.550,00. Koreksi pengakuan utang terkoreksi sebesar Rp83.333.450,00 disebabkan karena terdapat pekerjaan yang bobot pelaksanaannya hanya 50%.

Uraian mengenai pembayaran utang Pekerjaan dari Dana Bantuan Khusus (BKK) Provinsi Sumatera Barat 2018 yang dibayarkan dari APBDP Tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
c. Utang Belanja Modal	2.941.766.718,00	1.890.761.300,00

Utang Belanja Modal 2019 sebesar Rp2.941.766.718,00 merupakan utang yang terdiri dari.

- 1) Utang Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp597.928.000,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2019 yang belum dibayarkan s.d tahun berakhir pelaporan keuangan ini disebabkan verifikasi data dan kurangnya waktu yang tersedia dalam menyelesaikan pembayaran pekerjaan ini. Uraian dapat dilihat pada **Lampiran 21**.
- 2) Utang belanja modal pada BLUD Puskesmas Tahun 2019 sebesar Rp50.735.000,00 merupakan sisa utang Tahun 2018 atas rehabilitasi/pembangunan puskesmas. Uraian dapat dilihat pada **Lampiran 22**.
- 3) Utang belanja modal pada Dinas Pendidikan sebesar Rp189.569.000,00 merupakan utang belanja modal BOS Afirmasi yang belum dibayarkan karena keterlambatan pembayaran barang yang datang saat akhir tahun, pelunasan utang telah dilaksanakan pada Tahun 2020. Uraian dapat dilihat pada **Lampiran 23**.
- 4) Utang belanja modal pada RSUD sebesar Rp1.972.034.718,00 merupakan utang belanja modal pengadaan pada RSUD Sungai Dareh s.d. 31 Desember 2019. Dari total utang yang dinyatakan di atas sudah terbayar sampai dengan April 2020 adalah sebesar Rp675.611.500,00. Uraian dapat dilihat pada **Lampiran 24**.
- 5) Utang belanja modal pada Dinas Perhubungan sebesar Rp131.500.000,00 merupakan utang belanja modal yang berasal dari pengadaan SIM PKB, aset tak berwujud.

Utang Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp3.051.651.300,00 merupakan utang yang terdiri dari.

1. Utang Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan PR sebesar Rp1.590.310.000,00 yang terdiri dari Utang Kegiatan perencanaan yang asal pendanaannya berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Barat (BKK) sebesar Rp1.246.810.000,00 dan Utang Pengadaan tanah sebesar Rp343.500.000,00.
Penerimaan pendapatan dari BKK tidak terealisasi selama Tahun 2018 dan 2019, sehingga utang kegiatan BKK dibayarkan dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp1.246.910.000,00. Terdapat koreksi utang sebesar Rp100.000,00 disebabkan kesalahan pencatatan piutang pada LKPD 2018. Rincian utang dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

Utang Pengadaan Tanah sebesar Rp343.500.000,00 dibayarkan pada Tahun 2019 sebesar Rp309.637.000, utang terkoreksi sebesar Rp33.863.000,00 disebabkan adanya perhitungan ulang nilai pengadaan tanah. Utang dibayarkan berdasarkan SP2D No.1034/2019 sebesar Rp90.000.000,00, SP2D No. 5202/2019 sebesar Rp34.437.000,00 dan SP2D No. 5357/2019 sebesar Rp185.200.000,00.

- 2. Utang belanja modal pada BLUD Puskesmas Tahun 2018 sebesar Rp255.591.300,00 telah dibayarkan pada Tahun 2019 sebesar Rp204.856.300,00 atas kegiatan renovasi dan pembangunan ruang pertemuan, rumah dinas dan pagar puskesmas pada Puskesmas Sungai Limau, sedangkan sisanya sebesar Rp50.735.000,00 berupa perencanaan dan pengawasan rehab rumah dinas beberapa puskesmas. Kegiatan tersebut masih terutang pada Tahun 2019 disebabkan pihak rekanan belum menyelesaikan administrasi pelaksanaan pekerjaannya sebagai dasar pembayaran kegiatan.
- 3. Utang belanja modal pada Dinas Pertanian sebesar Rp298.360.000,00 merupakan utang belanja yang didanai BKK Provinsi Sumatera Barat yang telah dibayarkan dengan APBD Tahun 2019. Uraian pembayaran utang belanja modal Dinas Pertanian Tahun 2018 dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
d. Utang Belanja Bantuan Keuangan	66.542.574,00	0,00

Utang belanja bantuan Keuangan Tahun 2019 adalah utang belanja Partai Politik yang kurang bayar sebanyak satu bulan yaitu Desember 2019 sebesar Rp66.542.574,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Partai Politik	Kurang bayar bulan Desember 2019
1	Partai Demokrat	5.895.407,00
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	11.748.356,00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	13.229.483,00
4	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3.942.910,00
5	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3.070.021,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	8.397.648,00
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	7.965.464,00
8	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3.109.776,00
9	Partai Berkarya	3.952.564,00
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5.230.945,00
		66.542.574,00

V.C.2.a.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		2.609.516.672,86	765.093.207,00

Utang jangka pendek lainnya berupa utang retensi yang muncul karena adanya pekerjaan yang belum diselesaikan pada Tahun 2019 sebesar Rp2.609.516.672,86, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.111
Utang Retensi Tahun 2019

No	Pekerjaan	Nilai Kontrak	Utang Retensi
1	Pembangunan Gedung Produksi (DAK) Dinas Kumperdag	6.299.500.000,00	284.479.120,50
	CV Maringgerang Anging Mamiri		
2	Pembangunan Infrastruktur Fisik dalam Sentra (DAK) Dinas Kumperdag PT Telaga Pasir Kuta	15.497.988.426,29	740.028.947,36
3	Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten Lain-lain (Paket III) Dinas Pekerjaan Umum dan PR PT. Tri Jaya Putra	5.934.330.391,83	282.579.150,00
4	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Pembangunan Masjid Agung (Multi Years) Dinas Pekerjaan Umum dan PR PT Nidya Karya	97.824.054.000,00	1.302.429.455,00
	Jumlah	-	2.609.516.672.86

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.2.b Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.C.3 EKUITAS	2.424.445.022.003,03	2.408.920.868.365,27

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Total ekuitas akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.424.445.022.003,03 diperoleh dari ekuitas awal sebesar Rp2.408.920.868.365,27 ditambah surplus laporan operasional sebesar Rp25.895.678.922,34 dikurangi dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar Rp(10.371.525.284,58).

Ekuitas Awal	2.408.920.868.365,27
Surplus/Defisit LO	25.895.678.922,34
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	(10.371.525.284,58)
Ekuitas Akhir	2.424.445.022.003,03

V.D. Laporan Operasional

V.D.1. Pendapatan – LO

Rp.1.030.635.685.861,56

Pendapatan LO Tahun 2019 sebesar Rp1.030.635.685.861,57 terdiri dari.

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	86.582.014.545,56
- Pendapatan Transfer	Rp	909.305.392.520,00
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	34.748.278.793,00
Jumlah	Rp	1.030.635.685.858,56

V.D.1.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

- Pendapatan Pajak Daerah	Rp	21.331.271.199,67
- Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	2.911.433.570,20
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	7.646.750.200,00
- Lain-Lain PAD yang Sah	Rp	54.692.559.578,69
Jumlah	Rp	86.582.014.548,56

1. Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp21.331.271.199,67

Pendapatan Pajak Daerah pada LO sebesar Rp21.331.271.199,67, sedangkan pada LRA sebesar Rp19.178.964.229,67 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp2.152.306.970,00 yang disebabkan karena.

Penyesuaian penambahan sebesar Rp3.135.858.362,00 terdiri dari.

- a Adanya piutang pajak PPJ yang belum diterima pada Tahun 2019 sebesar Rp971.279.892,00
- b Adanya penambahan piutang PPJ non PLN Tahun 2019 yang diterima pada Tahun 2020 sebesar Rp105.345.825,00
- c Adanya piutang pajak PBB Tahun 2019 yang belum diterima sebesar Rp2.059.232.645,00

Penyesuaian pengurangan sebesar Rp983.551.392,00 terdiri dari.

- Adanya piutang pajak hotel Tahun 2018 yang diterima Tahun 2019 sebesar Rp1.235.000,00
- Adanya piutang pajak restoran Tahun 2018 yang diterima Tahun 2019 sebesar Rp6.613.000,00
- Adanya piutang pajak PPJ Tahun 2018 diterima Tahun 2019 sebesar Rp975.703.392,00

2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp2.911.433.570,20

Pendapatan Retribusi Daerah pada LO sebesar Rp2.911.433.570,20 sedangkan menurut LRA Rp3.054.849.682,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp143.416.111,80 dengan rincian seperti tabel di bawah ini.

Tabel. 5.3.1
Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah antara LO dan LRA Tahun 2019

NO	NAMA OPD	LO	LRA	SELISIH
1	2	4	3	5
1	Dinas Pendidikan	67.034.000,00	91.933.000,00	(24.899.000,00)
2	Dinas Kesehatan	698.765.974,15	695.541.250,00	3.224.724,15
3	Rumah Sakit Umum Daerah	18.288.213,77	11.230.200,00	7.298.013,77
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	520.564.500,00	520.564.500,00	-
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	124.451.800,00	122.268.800,00	2.183.000,00
6	Dinas Pangan dan Perikanan	161.270.000,00	161.270.000,00	-
7	Dinas Lingkungan Hidup	79.310.000,00	79.310.000,00	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.780.000,00	4.780.000,00	-
9	Dinas Perhubungan	319.512.000,00	319.230.000,00	282.000,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	315.025.000,00	480.575.000,00	(165.550.000,00)
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	102.384.000,00	80.629.000,00	21.755.000,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	333.452.365,00	333.452.365,00	-
13	Dinas Pertanian	48.952.600,00	48.952.600,00	-
14	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	15.461.717,00	15.574.217,00	(112.500,00)
15	Badan Keuangan Daerah	12.413.198,25	-	12.413.198,23
16	Sekretariat Daerah	23.639.452,05	23.650.000,00	(10.547,95)
17	Kecamatan Pulau Punjung	15625000,00	15625000,00	-
18	Kecamatan Sitiung	16.183.000,00	16.183.000,00	-
19	Kecamatan Koto Baru	3.617.000,00	3.617.000,00	-
20	Kecamatan Sungai Rumbai	13.111.250,00	13.111.250,00	-
21	Kecamatan Ix Koto	1.250.000,00	1.250.000,00	-
22	Kecamatan Timpeh	4.862.500,00	4.862.500,00	-
23	Kecamatan Koto Salak	5.340.000,00	5.340.000,00	-
24	Kecamatan Koto Besar	3.470.000,00	3.470.000,00	-
25	Kecamatan Padang Laweh	250.000,00	250.000,00	-
26	Kecamatan Tiumang	2.180.000,00	2.180.000,00	-
	Jumlah	2.911.433.570,20	3.054.849.682,00	(143.416.111,80)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO pada Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2019 sebesar Rp143.416.111,80 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Dinas Pendidikan terdapat selisih sebesar Rp(24.899.000,00)
 - Adanya penyesuaian penambahan atas piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun 2019 yang belum diterima sebesar Rp18.472.000,00
 - Adanya penyesuaian pengurangan atas piutang retribusi pemakaian daerah Tahun 2018 yang belum diterima pada Tahun 2019 sebesar Rp43.371.000,00

- 2) Dinas Kesehatan terdapat selisih sebesar Rp3.224.724,15 yang terdiri dari.
 - Adanya penyesuaian penambahan sebesar Rp5.624.724,15.
 - Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penerimaan sewa ATM Bank Nagari Cabang Koto Baru sesuai dengan kontrak tanggal 20 Juni 2016 s.d. 20 Juni 2021 sebesar Rp2.514.724,15.
 - Kas di Bendahara Penerimaan atas pungutan retribusi pelayanan kesehatan RSUD Sungai Rumbai tanggal 31 Desember 2019 yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp3.110.000,00.
 - Adanya penyesuaian pengurangan atas penerimaan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun 2018 yang disetor Tahun 2019 sebesar Rp2.400.000,00.
- 3) RSUD Sungai Dareh terdapat selisih sebesar Rp7.298.013,77 yang terdiri dari.
 - Adanya penyesuaian penambahan sebesar Rp8.435.308,85.
 - Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penerimaan Payment Point dan sewa ATM Bank Nagari sesuai dengan kontrak tanggal 20 Juni 2016 s.d 20 Juni 2021 sebesar Rp7.060.387,39.
 - Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penerimaan sewa ATM Bank Nagari sesuai dengan kontrak tanggal 5 Mei 2018 s.d. 4 Mei 2019 sebesar Rp1.131.287,58.
 - Adanya penyesuaian pengurangan atas retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa kerjasama sewa ATM BRI yang menjadi pendapatan diterima dimuka terhitung tanggal 1 Januari 2020 s.d 4 Mei 2020 sebesar Rp1.137.295,08.
- 4) Penyesuaian penambahan atas piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah (rusunawa) Tahun 2019 yang belum diterima sebesar Rp2.183.000,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
- 5) Dinas Komunikasi dan Informasi terdapat selisih sebesar Rp(165.550.000,00) yang terdiri dari.
 - Penyesuaian penambahan atas piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi Tahun 2019 yang belum diterima sebesar Rp2.750.000,00.
 - Penyesuaian pengurangan atas piutang retribusi menara telekomunikasi Tahun 2015 s.d. Tahun 2018 sebesar Rp168.300.000,00
- 6) Penyesuaian penambahan atas Kas di Bendahara Penerimaan berupa retribusi pengujian kendaraan bermotor yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp282.000,00 per 31 Desember 2019 pada Dinas Perhubungan.
- 7) Penyesuaian penambahan atas piutang retribusi pelayanan pasar Tahun 2019 yang belum diterima sebesar Rp21.755.000,00 pada Dinas Koperasi dan UKM.
- 8) Penyesuaian pengurangan atas piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun 2018 yang diterima Tahun 2019 sebesar Rp112.500,00 pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- 9) Badan Keuangan Daerah terdapat penyesuaian penambahan sebesar Rp12.413.198,25 yang terdiri dari.

- Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pendapatan sewa tanah menara telekomunikasi PT Dayamitra sebesar Rp6.296.549,83.
 - Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pendapatan sewa tanah ATM Bank Nagari yang terletak di samping Kantor Bupati sebesar Rp6.116.648,40.
- 10) Penyesuaian pengurangan atas penerimaan pendapatan retribusi kekayaan daerah berupa sewa ATM BRI berdasarkan kontrak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2020 sebesar Rp10.547,95 pada Sekretariat Daerah.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Sebesar Rp7.646.750.200,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada LO sebesar Rp7.646.750.200,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp3.590.314.080,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp4.056.436.120,00.

- Penyesuaian penambahan sebesar Rp4.043.752.034,00 yang terdiri dari piutang deviden PT BPR Pulau Punjung Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp19.946.853,00 dan deviden Bank Nagari Tahun 2019 sebesar Rp4.043.805.181,00.
- Penyesuaian pengurangan atas penerimaan piutang deviden PT Balairung Citra Jaya Tahun 2017 sebesar Rp7.315.914,00.

4. Lain-Lain PAD yang Sah – LO Sebesar Rp54.692.559.575,69

Lain-Lain PAD yang Sah pada LO sebesar Rp54.692.559.575,69 sedangkan pada LRA sebesar Rp53.058.791.160,82 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp1.633.768.414,87 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 5.3.2
Perbedaan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah antara LO dan LRA Tahun 2019

NO	NAMA OPD	LO	LRA	SELISIH
1	2	4	3	5
1	BLUD Puskesmas	9.933.504.342,00	10.017.117.942,00	(83.613.600,00)
2	BLUD RSUD Sungai Dareh	35.379.435.034,00	37.885.575.392,00	(2.506.140.358,00)
3	Dinas PUPR	896.600.086,56	795.169.186,56	101.430.900,00
4	Badan Keuangan Daerah	10.720.000,00	10.720.000,00	-
5	PPKD	8.472.300.113,13	4.350.208.640,26	4.122.091.472,87
	Jumlah	54.692.559.575,69	53.058.791.160,82	1.633.768.414,87

Adapun perbedaan sebesar Rp1.633.768.414,87 dapat dijelaskan sebagai berikut

- 1) Pada BLUD Puskesmas terdapat selisih sebesar Rp83.613.600,00 yang terdiri penambahan piutang BLUD Tahun 2019 sebesar Rp475.189.400,00 dan pengurangan piutang BLUD Tahun 2018 sebesar Rp558.803.000,00.
- 2) Pada BLUD RSUD Sungai Dareh terdapat selisih sebesar Rp2.506.140.358,00 yang terdiri dari penambahan piutang BLUD Tahun 2019 sebesar Rp6.611.198.992,00 dan pengurangan piutang BLUD sebesar Rp9.117.339.350,00 (piutang Tahun 2018 sebesar Rp9.116.406.950,00 dan piutang Tahun 2017 sebesar Rp932.400,00).

- 3) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat selisih sebesar Rp101.430.900,00 yang terdiri dari penambahan piutang SPAM Tahun 2019 sebesar Rp171.099.500,00 dan pengurangan piutang SPAM sebesar Rp69.668.600,00 (penerimaan piutang Tahun 2015 sebesar Rp2.867.700,00; penerimaan piutang Tahun 2017 sebesar Rp488.700,00; dan penerimaan piutang Tahun 2018 sebesar Rp66.312.200,00).
- 4) Pada PPKD terdapat selisih sebesar Rp4.122.091.472,87 yang terdiri dari.
 - Penyesuaian penambahan sebesar Rp4.347.799.504,87 yang terdiri dari.
 - ✓ Piutang TGR sebesar Rp4.246.994.031,87
 - ✓ Piutang Bunga Deposito sebesar Rp100.205.473,00
 - ✓ Piutang Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan sebesar Rp600.000,00
 - Penyesuaian pengurangan sebesar Rp225.708.032,00 yang terdiri dari.
 - ✓ Piutang TGR sebesar Rp27.100.032,00
 - ✓ Reklasifikasi pendapatan Hasil Penjualan Aset daerah- LO ke Surplus defisit penjualan aset Non lancar sebesar Rp 198.608.000,00

V.D.1.b. Pendapatan Transfer – LO Rp909.305.392.520,00

Pendapatan Transfer – LO terdiri dari.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	764.703.112.576,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO	97.546.293.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	47.055.986.944,00
Jumlah	909.305.392.520,00

Pendapatan Transfer pada LO terealisasi sebesar Rp909.305.392.520,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp906.775.173.371,00 terdapat perbedaan sebesar Rp2.530.219.149,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penambahan piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2019 yang belum diterima sebesar Rp3.389.783.336,00.
- Penambahan Piutang Transfer Pemerintah Pusat sesuai dengan PMK Nomor 20 Tahun 2020 dan PMK Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH Tahun 2019 dalam Rangka Penanganan Covid 19 sebesar Rp3.072.369.696,00.
- Pengurangan piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2017-2018 sebesar Rp3.931.933.883,00.

V.D.1.c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Rp34.748.278.793,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Hibah – LO sebesar Rp34.748.278.793,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp33.699.978.725,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp1.048.300.068,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Pada Dinas Pendidikan adanya penambahan aset dari dana hibah sebesar Rp43.675.000,00 terdiri dari peralatan mesin sebesar Rp13.675.000,00 dan gedung bangunan sebesar Rp30.000.000,00.

- 2. Pada Dinas PUPR adanya penambahan aset dari hibah sebesar Rp437.517.278,00 berasal dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
- 3. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat penambahan aset dari dana hibah sebesar Rp397.107.790,00 yang terdiri dari peralatan dan mesin sebesar Rp344.284.590,00 dan aset tetap lainnya sebesar Rp52.823.200,00.
- 4. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adanya penambahan aset dari dana hibah sebesar Rp170.000.000,00 yang berasal dari peralatan dan mesin.

V.D.2. Beban

Beban pada Laporan Operasional sesuai dengan format Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.	BEBAN	1,004,914.438.011,22	850,819,023,687.38	154,095.414.323,84

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Operasional Tahun 2019 dan Tahun 2018, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah, beban bantuan social, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban transfer. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, terdapat kenaikan sebesar Rp154.095.414.323,84 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.3
Beban Operasional Tahun 2019 dan 2018

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.	BEBAN	1.004.914.438.011,22	850,819,023,687.38	154.095.414.323,84
9.1.1.	Beban Pegawai	452,306,900,751.32	356,626,647,760.00	95,680,252,991.32
9.1.2	Beban Persediaan	68,946,555,652.95	73,333,550,104.00	(4,386,994,451.05)
9.1.2	Beban Jasa	49,437,197,781.24	102,202,474,958.32	(52,765,277,177.08)
9.1.2	Beban Sewa	4,867,540,019.38	4,915,599,920.15	(48,059,900.77)
9.1.2	Beban Pemeliharaan	11,934,277,601.00	8,573,234,812.00	3,361,042,789.00
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	54,878,825,962.00	45,503,094,681.00	9,375,731,281.00
9.1.5	Beban Hibah	62.152.815.287,80	26,049,285,624.00	36.103.529.663,80
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	3,132,000,000.00	194,500,000.00	2,937,500,000.00
9.1.7	Beban Penyusutan Aset tetap	175,835,716,891.03	125,923,431,779.54	49,912,285,111.49
9.1.7	Beban Penyusutan Aset lain-lain	62,168,036.00	66,153,370.00	(3,985,334.00)
9.1.7	Beban Amortisasi	263,680,248.22	209,922,575.93	53,757,672.29
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	1,123,543,214.28	960,222,927.44	163,320,286.84
9.1.9	Beban Transfer	119,973,216,566.00	106,260,905,175.00	13,712,311,391.00

a. Beban Pegawai

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.1.	Beban Pegawai	452.306.900.751,32	356.626.647.760,00	95,680.252.991,32

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, terdapat kenaikan sebesar Rp95.680.252.991,32 yang dipengaruhi antara lain oleh bertambahnya pegawai akibat penerimaan CPNS di Tahun 2019.

Beban Pegawai ini terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah, Uang Lembur, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Beban Pegawai BLUD, Beban Pegawai Dana BOS, dengan rincian sebagai berikut.

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.1	BEBAN	452,306.900.751,32	356.626.647.760,00	95,680.252.991,32
9.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan pegawai	232.687.254.234,00	216.830.159.149,00	15.857.095.085.00
9.1.1.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	144.301.162.771,00	129.120.183.730,00	15.180.979.041.00
9.1.1.03.	Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.266.060.000,00	6.765.560.000,00	500.500.000.00
9.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	959.000.535,15	684.310.624,00	274.689.911,15
9.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	174.346.192,00	75.234.424,00	99.111.768,00
9.1.1.07.	Uang Lembur PNS	811.529.000,00	726.981.500,00	84.547.500,00
9.1.1.08.	Honorarium PNS LO	9.429.598.261,17	-	9.429.598.261,17
	Honorarium Non PNS LO	35.719.817.550,00	-	35.719.817.550,00
	Beban Pegawai BLUD	20.958.132.208,00	2.424.218.333,00	18.533.913.875,00

Saldo Beban Pegawai tersebut adalah jumlah *netto* setelah dikurangnya pengembalian beban pegawai selama Tahun 2019.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 5.3.4
Perbedaan Belanja Pegawai antara LRA dan LO Tahun 2019

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA (Rp)	Belanja-LO (Rp)	Selisih +/- (Rp)
Beban Pegawai	450.033.560.519,00	452.306.900.751,32	(2.273.340.232,32)
Gaji dan Tunjangan pegawai	232.687.254.234,00	232.687.254.234,00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	142.992.465.951,00	144.301.162.771,00	(1.308.696.820,00)
Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.266.060.000,00	7.266.060.000,00	-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	758.209.642,00	959.000.535,15	(200.790.893,15)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.192.887,00	174.346.192,00	(114.153.305,00)
Uang Lembur PNS	811.529.000,00	811.529.000,00	-
Honorarium PNS LO	9.845.563.319,00	9.429.598.261,17	415.965.057,83
Honorarium Non PNS LO	35.719.817.550,00	35.719.817.550,00	-
Beban Pegawai BLUD	19.892.467.936,00	20.958.132.208,00	(1.065.664.272,00)

Penjelasan Selisih

- a. Penyesuaian untuk mengakui Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO tahun lalu dan tahun berjalan sebesar Rp1.308.696.820,00 berupa Belanja Sertifikasi Guru.

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan/ Sertifikasi Guru	14.263.247.400,00	12.954.550.580,00	(1.308.696.820,00)

Penambahan utang belanja pegawai Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan berupa Sertifikasi Guru Triwulan IV yang belum dibayarkan sampai akhir Tahun 2019 sebesar Rp14.263.247.400,00. Utang ini telah lunas dibayarkan dengan SP2D Nomor 00058/SP2D-1.01.01/2020 tanggal 3 Januari 2020.

Utang belanja pegawai Tahun 2018 pada Dinas Pendidikan berupa Sertifikasi Guru Triwulan IV yang belum dibayarkan sampai akhir Tahun 2018 sebesar Rp12.954.550.580,00. Utang ini telah lunas dibayarkan dengan SP2D Nomor 00055/SP2D/LS/1.01.01/2019 tanggal 3 Januari 2019.

- b. Adanya penambahan utang belanja pegawai pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan utang Insentif Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2019 sebesar Rp200.790.893,15 yang ditetapkan dengan.
 - Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 862.1/122/KPTS-BKD/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Kekurangan Insentif Triwulan IV kepada Perangkat Daerah Pemungut/Pengelola Pajak Daerah di Kabupaten Dharmasraya TA 2019 sebesar Rp113.538.618,00.
 - Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 862.1/297/KPTS-BKD/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Kekurangan Insentif kepada Pemungut/Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Tahun 2019 di Kabupaten Dharmasraya TA 2019 sebesar Rp87.252.275,15.
- c. Adanya penambahan utang belanja pegawai pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan utang insentif Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun 2019 sebesar Rp114.15.305,00 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 862.1/123/KPTS-BKD/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Kekurangan Insentif Triwulan IV kepada Perangkat Daerah Pemungut/Pengelola Retribusi Daerah di Kabupaten Dharmasraya TA 2019.
- d. Penyesuaian untuk mengakui beban Honorarium PNS-LO tahun lalu dan tahun berjalan sebesar Rp415.965.057,83 berupa Belanja Honor PNS menjadi persediaan dan aset tetap.

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Dinas PUPR		210.352.500,00	210.352.500,00
Dinas Kesehatan		10.816.536,00	10.816.536,00
Perkimtan	-	14.700.000,00	14.700.000,00
Sekretariat Daerah	-	175.796.021,83	175.796.021,83
Skretariat DPRD	-	4.300.000,00	4.300.000,00
Jumlah	-	415.965.057,83	415.965.057,83

- e. Penambahan utang jasa pelayanan kesehatan BLUD RSUD sebesar Rp1.065.664.272,00

Jika dihubungkan dengan saldo utang belanja pegawai di Neraca dengan beban pegawai, tidak terdapat selisih.

URAIAN	SALDO AWAL	LRA	LO	JUMLAH	SALDO AKHIR	SELISIH
Utang Pegawai	12.954.550.580,00	142.992.465.951,00	144.301.162.771,00	14.263.247.400	14.263.247.400,00	-

b. Beban Persediaan

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.2.b	Beban Persediaan	68.946.555.652,95	73.333.550.104,00	(4.386.994.451,05)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Persediaan dalam Tahun 2019 dan Tahun 2018. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, terdapat penurunan sebesar Rp4.386.994.451,05.

Beban Persediaan ini terdiri dari beban pakai habis, beban bahan material, beban cetak dan penggandaan serta beban persediaan BLUD dan beban persediaan BOS, yaitu :

Tabel 5.3.5
Rincian Beban Persediaan Tahun 2019 dan 2018

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
9.1.1	Beban Persediaan	68.946.555.652,95	73.333.550.104,00	(4.386.994.451,05)
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis	12.214.537.197,45	10.823.966.961,00	1.390.570.236,45
9.1.2.02.	Beban Bahan/Material	8.736.747.604,50	6.882.460.382,00	1.854.287.222,50
9.1.2.06.	Beban Cetak dan Penggandaan	5.079.390.202,00	4.783.975.135,00	295.415.067,00
9.1.2.11.	Beban Makanan dan Minuman	11.974.567.484,00	11.654.647.217,00	319.920.267,00
9.1.2.12.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	901.106.000,00	989.349.849,00	(88.243.849,00)
9.1.2.13.	Beban Pakaian Kerja	393.766.575,00	477.864.500,00	(84.097.925,00)
9.1.2.14.	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.023.171.637,00	943.928.190,00	79.243.447,00
9.1.2.20.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - LO		10.397.880.900,00	(10.397.880.900,00)
9.1.2.29.	Beban Persediaan Dana BLUD - LO	18.184.724.885,00	15.396.738.180,00	2.787.986.705,00
9.1.2.34.	Beban Persediaan Dana BOS - LO	10.438.544.068,00	10.982.738.790,00	(544.194.722,00)

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Persediaan)-LRA dengan Beban Persediaan-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.6
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Persediaan) LRA dan Beban Persediaan LO Tahun 2019

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Persediaan	65.430.291.214,00	68.946.555.652,95	(3.516.264.438.95)
Beban Persediaan alat tulis kantor - LO	6.439.373.181,00	6.341.929.614,00	97.443.567,00
Beban Dokumen/Administrasi Tender	1.200.000,00	1.200.000,00	-
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) - LO	579.865.950,00	540.908.052,00	38.957.898,00
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya - LO	274.006.996,00	274.093.996,00	(87.000,00)
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih - LO	526.013.030,00	525.371.530,00	641.500,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas - LO	3.774.631.383,00	3.887.365.624,45	(112.734.241,45)
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12.500.000,00	12.500.000,00	-
Beban Persediaan pengisian isi tabung gas - LO	139.136.672,00	139.136.672,00	-
Beban Alat Kesehatan Habis Pakai*)	-	-	-
Beban Peralatan Rumah Tangga*)	387.228.209,00	377.278.209,00	9.950.000,00
Beban Peralatan Persampahan*)	11.453.500,00	11.453.500,00	-
Beban Sarana dan Prasarana Perhubungan	103.300.000,00	103.300.000,00	-
Beban Persediaan bahan baku bangunan - LO	514.112.400,00	662.770.438,50	(148.658.038,50)
Beban Persediaan bahan/bibit tanaman - LO	678.905.800,00	678.905.800,00	-
Beban Persediaan bibit ternak - LO	5.000.000,00	59.865.000,00	(54.865.000,00)
Beban Persediaan bahan obat-obatan - LO	2.708.715.873,00	4.902.955.570,00	(2.194.239.697,00)
Beban Persediaan bahan kimia - LO	284.354.864,00	200.914.124,00	83.440.740,00

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Persediaan Makanan Pokok	58.600.000,00	73.895.400,00	(15.295.400,00)
Beban Hadiah - LO	464.817.500,00	464.817.500,00	-
Beban Bahan Praktek Lapangan*)	9.902.000,00	9.902.000,00	-
Beban Bahan Peralatan Pelatihan*)	-	-	-
Beban Bahan Kebutuhan Keperluan Bencana*)	12.630.000,00	12.630.000,00	-
Beban Persediaan Perlengkapan olah raga - LO	8.940.000,00	8.940.000,00	-
Belanja Bahan Makanan/Sembako*)	140.025.000,00	140.025.000,00	-
Belanja Cindera Mata*)	252.998.000,00	252.998.000,00	-
Belanja Bahan Dekorasi dan Publikasi*)	529.717.477,00	529.717.477,00	-
Beban Persediaan Bahan Material Peternakan/Perikanan - LO	495.493.695,00	497.482.295,00	(1.988.600,00)
Beban Persediaan bahan / alat perlengkapan kesehatan	-	-	-
Beban perlengkapan sekolah*)	240.929.000,00	240.929.000,00	-
Beban Cetak - LO	3.676.158.827,00	3.665.786.397,00	10.372.430,00
Beban Penggandaan - LO	1.404.537.305,00	1.398.537.305,00	6.000.000,00
Beban Penjilidan	15.066.500,00	15.066.500,00	-
Beban makanan dan minuman harian pegawai - LO	1.085.572.500,00	1.085.572.500,00	-
Beban makanan dan minuman rapat - LO	3.508.744.000,00	3.503.558.000,00	5.186.000,00
Beban makanan dan minuman tamu - LO	1.567.734.500,00	1.567.734.500,00	-
Beban makanan dan minuman pelatihan - LO	33.950.500,00	33.950.500,00	-
Beban Makan Minum Kegiatan*)	5.720.067.740,00	5.716.609.740,00	3.458.000,00
Beban Makan Minum Pasien*)	20.892.244,00	20.892.244,00	-
Beban Makan minum tambahan anak sekolah*)	46.250.000,00	46.250.000,00	-
Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH - LO	449.000.000,00	449.000.000,00	-
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) - LO	83.130.000,00	83.130.000,00	-
BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL) - LO	120.000.000,00	120.000.000,00	-
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) - LO	45.000.000,00	45.000.000,00	-
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) - LO	148.476.000,00	148.476.000,00	-
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR) - LO	55.500.000,00	55.500.000,00	-
Beban pakaian kerja lapangan - LO	362.466.575,00	362.466.575,00	-
Beban Pakaian Dinas Lapangan*)	24.500.000,00	24.500.000,00	-
Beban Pakaian Pelatihan/Kegiatan*)	6.800.000,00	6.800.000,00	-
Beban pakaian adat daerah - LO	119.460.000,00	102.660.000,00	16.800.000,00
Beban pakaian batik tradisional - LO	92.311.023,00	92.311.023,00	-
Beban pakaian olahraga	571.813.299,00	571.813.299,00	-
Beban Pakaian Kontingen*)	256.387.315,00	256.387.315,00	-
Beban Persediaan Dana BLUD - LO	16,924,078,288,00	18,184.724.885,00	(1,260.646.597,00)
Beban Persediaan Dana BOS - LO	10.438.544.068,00	10.438.544.068,00	-

Penjelasan perbedaan belanja persediaan-LRA dengan beban persediaan-LO jumlah sebesar Rp3.516.264.438,95, dapat dijelaskan sebagai berikut.

URAIAN	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Persediaan	14.440.206.783,00	12.292.749.893,05	(2.147.456.889,95)
Beban Persediaan menambah nilai aset	-	80.423.040,00	80.423.040,00
Utang belanja persediaan	4.837.712.917,00	3,493,938,998,00	(1,343.773.919,00)
Koreksi penambahan nilai persediaan	105.456.670,00	-	(105.456.670,00)
JUMLAH	19.383.376.370,00	15.867.111.931,05	(3.516.264.438,95)

- a.) Penyesuaian persediaan yang terpakai pada Tahun 2019 dan yang masih menjadi persediaan (*stock*) pada Tahun 2019 berdasarkan *stock opname* persediaan per 31 Desember 2019 pada SKPD sebesar Rp12.292.749.893,05, dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel. 5.3.7
Penyesuaian Belanja Barang dan Jasa (Persediaan) LRA dan Beban Persediaan LO Tahun 2019

SKPD	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
DINAS PENDIDIKAN	153.500,00	712.000,00	558.500,00
DINAS KESEHATAN	6.713.291.464,00	4.515.557.315,00	(2.197.734.149,00)
BLUD PUSKESMAS	-	5.326.200,00	5.326.200,00
RSUD	-	-	-
BLUD RSUD	1.711.025.670,00	1.800.896.792,00	89.871.122,00
DINAS PUPR	5.625.769.602,00	5.492.196.767,05	(133.572.834,95)
DINAS PERKIMTAN	1.160.500,00	1.397.280,00	236.780,00
DINAS SATPOLPP & DAMKAR	358.000,00	280.000,00	(78.000,00)
DINSOSP3APPKB	16.899.400,00	1.657.000,00	(15.242.400,00)
DINAS PANGAN DAN	63.305.000,00	6.588.400,00	(56.716.600,00)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.814.357,00	23.215.614,00	4.401.257,00
DISDUKCAPIL	12.550.000,00	110.411.800,00	97.861.800,00
DINAS PMD	562.000,00	278.500,00	(283.500,00)
DINAS PERHUBUNGAN	76.142.100,00	65.342.750,00	(10.799.350,00)
DINAS KOMINFO	-	180.000,00	180.000,00
DISKUMPERDAG	407.500,00	1.933.750,00	1.526.250,00
DINAS DPMP TSP	2.112.800,00	2.593.600,00	480.800,00
DINAS BUDPARPORA	1.829.500,00	18.929.500,00	17.100.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN	-	-	-
DINAS PERTANIAN	119.526.690,00	201.193.125,00	81.666.435,00
DINAS TRANSSNAKER	2.470.500,00	784.750,00	(1.685.750,00)
INSPEKTORAT	1.168.000,00	1.552.000,00	384.000,00
BAPPEDA	3.884.000,00	2.728.850,00	(1.155.150,00)
BKD	56.158.500,00	32.520.300,00	(23.638.200,00)
BKPSDM	460.500,00	426.500,00	(34.000,00)
KEPALA DAERAH DAN WAKIL	-	-	-
SEKRETARIAT DAERAH	1.494.200,00	1.979.600,00	485.400,00
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-
SEKRETARIAT DPRD	4.833.000,00	614.000,00	(4.219.000,00)
KECAMATANPULAU PUNJUNG	258.500,00	191.000,00	(67.500,00)
KECAMATAN SITIUNG	200.000,00	280.000,00	80.000,00
KECAMATAN KOTO BARU	956.000,00	362.000,00	(594.000,00)
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	1.231.000,00	571.000,00	(660.000,00)
KECAMATAN IX KOTO	157.000,00	228.000,00	71.000,00
KECAMATAN TIMPEH	315.000,00	94.000,00	(221.000,00)
KECAMATAN KOTO SALAK	-	-	-
KECAMATAN ASAM JUJUHAN	97.000,00	-	(97.000,00)
KECAMATAN KOTO BESAR	488.000,00	547.500,00	59.500,00
KECAMATAN PADANG LAWEH	-	-	-
KECAMATAN TIUMANG	406.000,00	80.000,00	(326.000,00)
KESBANGPOL	452.500,00	607.000,00	154.500,00
BPBD	1.269.000,00	493.000,00	(776.000,00)
Jumlah	14.440.206.783,00	12.292.749.893,05	(2.147.456.889,95)

b.) Penyesuaian belanja persediaan yang menambah nilai aset, yaitu.

SKPD	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
DINAS PENDIDIKAN	-	44.127.000,00	44.127.000,00
DINAS PUPR	-	30.648.250,00	30.648.250,00
DINAS PERKIMTAN	-	147.790,00	147.790,00
BADAN KEUANGAN DAERAH	-	3.500.000,00	3.500.000,00
BPBD	-	2.000.000,00	2.000.000,00
JUMLAH	-	80.423.040,00	80.423.040,00

c.) Penyesuaian utang belanja persediaan Tahun 2019 sebesar Rp4.789.276.962,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp3.493.938.998,00 dan koreksi pengakuan utang obat Tahun 2018 sebesar Rp48.435.955,00 pada BLUD RSUD Sungai Dareh, yaitu.

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
BLUD RSUD	-	-	-
- Utang belanja bahan pakai habis/ kedokteran	1.586.143.441,00	1.390.427.529,00	(195.715.912,00)
- Utang belanja bahan obat	2.316.720.711,00	1.389.651.866,00	(927.068.845,00)
- Utang belanja bahan labor	843.820.810,00	632.740.103,00	(211.080.707,00)
- Utang belanja gas medis	42.592.000,00	81.119.500,00	38.527.500,00
- koreksi pengurangan pengakuan utang obat 2018	48.435.955,00		(48.435.955,00)
JUMLAH	4.837.712.917,00	3.493.938.998,00	(1.343.773.919,00)

d.) Adanya koreksi penambahan nilai persediaan bahan material PJU berdasarkan *stock opname* fisik persediaan 31 Desember 2019 pada Dinas PUPR sebesar Rp72.246.670,00 dan penambahan atas pengembangan persedian bibit ternak pada Dinas Pertanian sebesar Rp33.210.000,00.

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Koreksi penambahan nilai persediaan bahan material PJU pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan <i>stock opname</i> fisik persediaan 31 Desember 2019	72.246.670,00		(72.246.670,00)
Koreksi penambahan nilai persediaan bibit ternak ayam pada Dinas Pertanian berdasarkan <i>stock opname</i> fisik persediaan 31 Desember 2019	33.210.000,00		(33.210.000,00)
JUMLAH	105.456.670,00	-	(105.456.670,00)

c. Beban Jasa

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.2.b	Beban Jasa	49.437.197.781,24	102.202.474.958,32	(52.765.277.177,08)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa Tahun 2019 dan Tahun 2018. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, terdapat penurunan sebesar Rp52.765.277.177,08.

Beban Jasa ini terdiri dari beban jasa kantor, beban premi asuransi, beban jasa konsultasi dan beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis serta beban jasa BLUD dan beban jasa BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Persediaan)-LRA dengan Beban Jasa-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.8
Perbedaan Belanja Jasa antara LRA dan LO Tahun 2019

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Jasa	50.067.673.665,20	49.437.197.781,24	630.475.883,96
Beban Jasa telepon - LO	725.245.608,00	725.245.608,00	-
Beban Jasa air - LO	34.926.770,00	34.926.770,00	-
Beban Jasa listrik - LO	8.342.378.842,00	8.159.536.127,00	182.842.715,00
Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang - LO	1.275.000,00	1.275.000,00	-
Beban Jasa surat kabar/majalah - LO	1.453.610.000,00	1.453.610.000,00	-
Beban Jasa kawat/faksimili/internet - LO	989.658.155,00	989.658.155,00	-
Beban Jasa paket/pengiriman - LO	3.661.000,00	3.438.000,00	223.000,00
Beban Jasa Sertifikasi - LO	7.050.000,00	7.050.000,00	-
Beban Transportasi dan Akomodasi*)	2.853.774.261,00	2.853.774.261,00	-
Beban Jasa Dekorasi/Makeup/Kesenian*)	271.917.000,00	271.917.000,00	-
Beban Jasa Pihak Ketiga*)	3.000.000,00	3.000.000,00	-
Beban Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)	265.065.500,00	265.065.500,00	-

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban jasa pelayanan kesehatan*)	148.438.800,00	148.438.800,00	-
Beban jasa penyebarluasan Informasi*)	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Beban BebanJasa Upah Kerja*)	326.575.000,00	326.575.000,00	-
Beban jasa penyelenggaraan mayat dan orang terlanjar*)	7.200.000,00	7.200.000,00	-
Beban jasa informasi,teks, audio dan visual*)	257.265.000,00	257.265.000,00	-
Beban Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Instruktur*)	2.716.921.639,00	2.716.921.639,00	-
Beban Jasa Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor *)	516.600.000,00	516.600.000,00	-
Beban jasa pembuatan dan pemeliharaan Website/Aplikasi atau Peta	303.976.830,00	303.976.830,00	-
Beban Jasa Hiburan Kesenian*)	13.500.000,00	13.500.000,00	-
Beban kontribusi*)	551.298.200,00	551.298.200,00	-
Beban Visum Et Repertum	-	-	-
Beban Jasa Pemeriksaan Laboratorium	79.783.000,00	79.783.000,00	-
Beban Paket Meeting	-	-	-
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan - LO	7.577.971.400,00	7.577.971.400,00	-
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	275.963.865,00	334.524.374,63	(58.560.509,63)
Beban Jasa Konsultansi Penelitian - LO	282.535.000,00	-	282.535.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan - LO	219.681.000,00	204.681.000,00	15.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan - LO	95.200.000,00	83.470.000,00	11.730.000,00
Beban beasiswa tugas belajar S2 - LO	-	-	-
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan - LO	493.239.920,00	493.239.920,00	-
Beban sosialisasi - LO	48.800.000,00	48.800.000,00	-
Beban bimbingan teknis - LO	1.612.885.206,00	1.612.885.206,00	-
Beban Kontribusi*)	162.800.000,00	162.800.000,00	-
Beban Jasa dana BLUD -LO	10.614.764.105,20	10.418.058.426,61	196.705.678,59
Beban Jasa dana BOS -LO	8.660.712.564,00	8.660.712.564,00	-

Penjelasan perbedaan belanja jasa-LRA dengan jasa-LO sebesar Rp630.475.853,96 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a.) Penyesuaian utang beban jasa disebabkan adanya penyesuaian utang belanja jasa Tahun 2018 yang merupakan utang tagihan listrik penerangan jalan umum sebesar Rp182.842.715,00 pada Dinas PUPR.
- b.) Penyesuaian beban jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah disebabkan adanya penyesuaian premi asuransi kendaraan dinas Tahun 2018 pada Sekretariat Daerah sebesar 190.836.419,20 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp17.367.583,56 , dan penyesuaian premi asuransi kendaraan dinas Tahun 2019 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp130.321.980,83 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp19.321.512,30, yaitu.

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah	190.836.419,20	130.321.980,83	(60.514.438,37)
Premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah	17.367.583,56	19.321.512,30	1.953.928,74
JUMLAH	208.204.002,76	149.643.493,13	(58.560.509,63)

- c.) Penyesuaian beban jasa menambah nilai aset sebesar Rp309.488.000,00, yaitu.

SKPD	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
DINAS PUPR			
- Beban Jasa paket/pengiriman-LO		223.000,00	223.000,00
DINAS KOMINFO			
- Beban Jasa Konsultansi Penelitian-LO		282.535.000,00	282.535.000,00

SKPD	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
DINAS PERTANIAN			
- Beban Jasa Konsultasi Perencanaan-LO		15.000.000,00	15.000.000,00
- Beban Jasa Konsultasi Pengawasan-LO		11.730.000,00	11.730.000,00
JUMLAH		309.488.000,00	309.488.000,00

d.) Selisih Beban Jasa dana BLUD - LO dan LRA sebesar Rp196.705.678,59 terdiri dari selisih utang klaim BPJS Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp195.305.681,00, koreksi beban Jasa BLUD sebesar Rp(2,41), dan beban jasa menambah nilai aset sebesar Rp1.400.000,00, yaitu.

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
BLUD PUSKESMAS			
Utang klaim BPJS	454.090.210,00	649.395.891,00	195.305.681,00
Koreksi beban Jasa BLUD	2,41		(2,41)
Beban jasa menambah nilai aset		1.400.000,00	1.400.000,00
JUMLAH	454.090.212,41	650.795.891,00	196.705.678,59

d. Beban Sewa

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.2.c	Beban Sewa	4.867.540.019,38	4.915.599.920,15	(48.059.900,77)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Sewa Tahun 2019 dan Tahun 2018. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, terdapat penurunan sebesar Rp48.059.900,77.

Beban sewa ini terdiri dari beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir, beban sewa sarana mobilitas, beban sewa alat berat dan beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor serta beban sewa BLUD dan beban jasa BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Sewa-LRA dengan Beban Sewa-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.9
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Sewa) LRA dan Beban Sewa LO Tahun 2019

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Sewa	4.869.417.493,00	4.867.540.019,38	1.877.473,62
Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas - LO	90.000.000,00	90.000.000,00	-
Beban sewa gedung/ kantor/tempat - LO	879.048.993,00	877.171.519,38	1.877.473,62
Beban sewa ruang rapat/pertemuan - LO	518.206.000,00	518.206.000,00	-
Beban Sewa Tempat Pembuangan Sampah*)	2.000.000,00	2.000.000,00	-
Beban sewa penginapan*)	47.577.000,00	47.577.000,00	-
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat - LO	419.040.000,00	419.040.000,00	-
Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	48.000.000,00	48.000.000,00	-
Beban Sewa Eskavator	46.300.000,00	46.300.000,00	-
Beban sewa meja kursi - LO	56.000.000,00	56.000.000,00	-
Beban Sewa Komputer dan Printer	9.100.000,00	9.100.000,00	-
Beban Sewa Proyektor	22.500.000,00	22.500.000,00	-
Beban sewa generator	-	-	-
Beban sewa tenda - LO	2.293.109.000,00	2.293.109.000,00	-
Beban sewa pakaian adat/tradisional - LO	51.625.000,00	51.625.000,00	-
Beban Sewa alat rumah tangga dan dekorasi*)	7.000.000,00	7.000.000,00	-

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban sewa peralatan dan perlengkapan olah raga*)	16.900.000,00	16.900.000,00	-
Beban Sewa Sound system dan perlengkapannya	136.850.000,00	136.850.000,00	-
Beban Sewa dana BLUD -LO	33.360.000,00	33.360.000,00	-
Beban Sewa dana BOS -LO	192.801.500,00	192.801.500,00	-

Penjelasan perbedaan belanja sewa-LRA dengan beban sewa-LO sebesar Rp1.877.473,62 disebabkan karena penyesuaian sewa dibayar dimuka sewa kantor Tahun 2018 sebesar Rp17.794.657,53 dan penyesuaian sewa dibayar dimuka Tahun 2019 sebesar Rp19.672.131,15 dan koreksi pencatatan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas sewa ATM BRI pada RSUD Sungai Dareh Tahun 2019 yang dipotong PPN 10% untuk sewa ATM yang dibebankan kepada pihak Pemkab Dharmasraya dapat dijelaskan sebagai berikut.

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Sewa dibayar dimuka :			-
Dinas Kumperdag	11.095.890,41	12.431.693,99	1.335.803,58
Kantor Kesbangpol	6.328.767,12	7.240.437,16	911.670,04
RSUD Sungai Dareh	370.000,00		(370.000,00)
JUMLAH	17.794.657,53	19.672.131,15	1.877.473,62

e. **Beban Pemeliharaan**

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.2.d	Beban Pemeliharaan	11.934.277.601,00	8.573.234.812,00	3.361.042.789,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan Tahun 2018. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, terdapat peningkatan sebesar Rp3.361.042.789,00.

Beban pemeliharaan ini terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor dan Beban Pemeliharaan serta beban pemeliharaan BLUD dan beban pemeliharaan BOS.

Tidak terdapat perbedaan jumlah Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.10
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan) LRA dan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2019

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliraan	11.934.277.601,00	11.934.277.601,00	-
Beban Jasa Service	1.475.796.236,00	1.475.796.236,00	-
Beban Penggantian Suku Cadang - LO	3.128.842.028,00	3.128.842.028,00	-
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - LO	1.876.861.163,00	1.876.861.163,00	-
Beban Jasa KIR - LO	1.776.000,00	1.776.000,00	-
Beban Pajak Kendaraan Bermotor - LO	336.801.518,00	336.801.518,00	-
Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	38.558.800,00	38.558.800,00	-
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	-	-

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO	1.014.420.126,00	1.014.420.126,00	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO	680.501.255,00	680.501.255,00	-
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	615.250.677,00	615.250.677,00	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	60.904.400,00	60.904.400,00	-
Beban Pemeliharaan dana BLUD -LO	1.814.039.412,00	1.814.039.412,00	-
Beban Pemeliharaan dana BOS -LO	890.525.986,00	890.525.986,00	-

f. Beban Perjalanan Dinas

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	54.878.825.962,00	45.503.094.681,00	9.375.731.281,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan Tahun 2018. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, terdapat peningkatan sebesar Rp9.375.731.281,00.

Beban perjalanan dinas ini terdiri dari beban perjalanan dinas dalam daerah, beban perjalanan dinas luar daerah, beban perjalanan dinas BLUD, dan beban perjalanan dinas dalam daerah BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Perjalanan dinas-LRA dengan Beban Perjalanan Dinas-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.11
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Perjalanan Dinas)-LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2019

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA Rp	Beban-LO Rp	Selisih +/- Rp
Beban Perjalanan Dinas	55.105.999.646,00	54.878.825.962,00	227.173.684,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah - LO	11.366.026.126,00	11.301.776.126,00	64.250.000,00
Beban perjalanan dinas luar daerah - LO	41.262.993.301,00	41.100.069.617,00	162.923.684,00
Beban Perjalanan Dinas dana BOS -LO	1.259.654.549,00	1.259.654.549,00	-
Beban Perjalanan Dinas dana BOS -LO	1.217.325.670,00	1.217.325.670,00	-

Penjelasan perbedaan belanja perjalanan dinas antara LRA dengan LO sebesar Rp227.173.684 disebabkan karena adanya beban perjalanan dinas yang menambah nilai aset pada Neraca, yaitu.

SKPD	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	200.966.982,00	200.966.982,00
Dinas Perkimtan	-	3.164.502,00	3.164.502,00
Sekretariat DPRD	-	23.042.200,00	23.042.200,00
JUMLAH	-	227.173.684,00	227.173.684,00

g. Beban Hibah

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.5	Beban Hibah	62.152.815.287,80	26.049.285.624,00	36.103.529.663,80

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2019 dan Tahun 2018. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, terdapat peningkatan sebesar Rp36.103.529.663,80.

Beban hibah ini terdiri dari beban hibah kepada Pemerintah Pusat , beban hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi, beban hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat serta reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal ke Belanja Hibah.

Saldo/jumlah beban hibah tersebut di atas adalah jumlah *netto* setelah dikurangnya pengembalian beban hibah selama Tahun 2019, yaitu.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO adalah sebagai berikut.

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA Rp	Beban-LO Rp	Selisih +/- Rp
Hibah	49.451.249.739,30	62.153.815.287,80	(12.701.565.548,50)

- Beban hibah sebelum konversi sebesar Rp12.357.501.489,00 setelah konversi beban hibah menjadi sebesarRp49.451.249.739,30
- Penambahan Beban hibah sebesar Rp37.093.748.250,30 atas reklas yang berasal dari konversi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp32.200.694.789,03, dari konversi Belanja Modal sebesar Rp2.119.003.461,27, dan dari konversi dari uang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp2.774.050.000,00.

Penjelasan perbedaan belanja hibah-LRA dengan beban hibah-LO sebesar Rp12.701.565.548,50, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Persediaan	14.680.130.555,00	25.436.322.809,58	10.756.192.254,58
Konversi dari beban jasa menambah nilai aset diserahkan ke masyarakat	26.730.000,00		(26.730.000,00)
Utang belanja hibah 2018		1.587.968.000,00	1.587.968.000,00
Utang belanja hibah 2019	2.064.165.433,58		(2.064.165.433,58)
Persediaan 2018 mjd Aset 2019		204.615.055,00	204.615.055,00
Persediaan diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga	1.748.250.055,00		(1.748.250.055,00)
Aset diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga	21.068.964.637,00		(21.068.964.637,00)
Konversi belanja Barjas menambah nilai persediaan diserahkan ke masyarakat	442.190.732,00		(442.190.732,00)
Beban barang yg diserahkan ke masyarakat menjadi aset		99.960.000,00	99.960.000,00
	40.030.431.412,58	27.328.865.864,58	(12.701.565.548,50)

a.) Penyesuaian atas penambahan beban hibah.

- Persediaan barang lainnya berdasarkan *stock opname* persediaan per 31 Desember 2018 pada SKPD sebesar Rp14.680.130.555,00, terdapat pada Dinas PUPR sebesar Rp7.836.072.456,00, Dinas Budparpora sebesar Rp64.955.000,00, Dinas Pertanian sebesar Rp6.396.095.149,00 dan pada Sekretariat daerah sebesar Rp383.007.950,00.
- Konversi dari beban jasa menambah nilai aset yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp26.730.000.
- Adanya penambahan utang Tahun 2019 pada Dinas PUPR atas pihak ketiga sebesar Rp2.064.165.433,58 merupakan utang belanja barang yang akan diserahkan pada masyarakat sebesar Rp1.432.664.000,00

- dan utang barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp631.501.433,58.
- Adanya persediaan diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga sebesar Rp1.748.250.055,00.
 - Adanya aset diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga sebesar Rp21.068.964.637,00
 - Penambahan persedian barang yang diserahkan kepada masyarakat Tahun 2019 dari konversi belanja barang dan jasa sebesar Rp442.190.732,00, terdiri dari beban pegawai sebesar Rp210.352.500, beban persediaan sebesar Rp30.648.250,00, beban jasa sebesar Rp223.000,00, dan beban perjalanan dinas sebesar Rp200.966.982,00.
- b.) Penyesuaian atas pengurangan beban hibah.
- Persediaan barang lainnya yang masih menjadi persediaan (*stock*) pada Tahun 2019 berdasarkan *stock opname* persediaan per 31 Desember 2019 pada SKPD sebesar Rp26.326.322.811,68, terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp890.000.002,10, Dinas PUPR sebesar Rp24.192.423.209,58, Dinas Perkimtan sebesar Rp397.181.600,00, dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp846.718.000,00.
 - Pengurangan utang beban hibah atas utang belanja Tahun 2018 (utang BKK) pada Dinas PUPR sebesar Rp792.380.000,00 dan pada Dinas Pertanian sebesar Rp795.588.000,00.
 - Adanya persediaan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga Tahun 2018 yaitu Lanjutan Pembangunan Kampus III Unand Dharmasraya yang sudah menjadi aset Tahun 2019 sebesar Rp204.615.055,00.
 - Barang yang diserahkan kepada masyarakat (pengadaan kontainer sampah) yang dicatat sebagai aset pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp99.960.000,00.

h. Beban Bantuan Sosial

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.6.	Beban Bantuan Sosial	3.132.000.000,00	194.500.000,00	2.937.500.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo beban bantuan sosial Tahun 2019 dan Tahun 2018. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, terdapat peningkatan sebesar Rp2.937.500.000,00, yang disebabkan adanya penambahan untuk bantuan sosial untuk Masyarakat Lanjut Usia Kurang Mampu di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 sebanyak 3.000 orang dengan nominal penerimaan sebesar Rp1.000.000,00 per orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/387/KPTS-BUP/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/11/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan Penerima Beserta Besaran Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2019 tanggal 25 November 2019.

Beban Bantuan Sosial terdiri dari Beban Bantuan Sosial yang direncanakan berupa Bantuan Sosial untuk Masyarakat Lanjut Usia Kurang Mampu sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebesar Rp132.000.000,00. Tidak ada perbedaan nilai Bantuan Sosial-LRA dengan Beban Bantuan Sosial-LO.

i. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	176.161.565.175,25	126.199.507.725,47	49.962.057.449,78

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2019 dan Tahun 2018. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, maka terdapat kenaikan sebesar Rp49.962.057.449,78.

Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari.

PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Beban Penyusutan dan Amortisasi	176.161.565.175,25	126.199.507.725,47	49.962.057.449,78
Beban Penyusutan Aset Tetap	175.835.716.891,03	125.923.431.779,54	49.912.285.111,49
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	62.168.036,00	66.153.370,00	(3.985.334,00)
Beban Penyusutan Amorisasi Aset Tak Berwujud	263.680.248,22	209.922.575,93	53.757.672,29

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok aset dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015.

j. **Beban Penyisihan Piutang**

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	1.123.543.214,28	960.222.927,44	163.320.286,84

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 dan Tahun 2018. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, terdapat kenaikan sebesar Rp163.320.286,84.

Beban Penyisihan Piutang ini terdiri dari beban penyisihan piutang pajak, beban penyisihan piutang retribusi, beban penyisihan piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan beban penyisihan piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Beban Penyisihan Piutang terdiri dari.

PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Beban Penyisihan Piutang	1.123.543.214,28	960.222.927,44	163.320.286,84
Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.045.597.354,85	210.003.722,92	835.152.705,40
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	24.319.727,00	211.492.741,50	(187.173.014,50)
Beban Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.313.705,91	3.657.957,00	17.655.748,91
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	32.312.426,52	535.068.506,02	(502.756.079,50)
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-

Dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel. 5.3.12
Penyesuaian Beban Penyisihan Piutang LO Tahun 2019

Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2019 Rp	Penyisihan Piutang 2019 Rp	Penyisihan Piutang 2018 Rp	Beban Penyisihan Piutang 2019 Rp
Beban Penyisihan Piutang		48.514.688.362,87	22.500.655.138,11	21.521.874.426,14	1.123.543.214,26
Piutang Pajak		32.002.201.142,00	21.818.557.651,33	20.772.960.296,81	1.045.597.354,85
- PBB-P2	BKD	30.925.575.425,00	21.813.174.523,07	20.768.042.539,85	1.045.131.983,22
- Pajak Penerangan Jalan	BKD	1.076.625.717,00	5.383.128,59	4.878.516,96	504.611,63
- Pajak Hotel	BKD	-	-	6.175,00	(6.175,00)
- Pajak Penerangan Jalan	BKD	-	-	33.065,00	(33.065,00)
Piutang Retribusi		138.133.361,00	110.949.906,00	211.492.741,50	24.319.727,00
Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas KUMPERD AG	24.805.000,00	13.927.500,00	554.540,00	13.372.960,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DINAS KOMINFO	30.096.361,00	28.721.361,00	153.571.361,00	(124.850.000,00)
'- Koreksi Penyisihan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Kominfo - LPE					124.850.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DINAS KOMINFO				
	DINAS PENDIDIKAN	80.449.000,00	68.287.130,00	57.351.278,00	10.935.852,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DINAS PERKIMTAN	2.183.000,00	10.915,00	-	10.915,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	KEC. KOTO BARU	600.000,00	3.000,00	3.000,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DINAS KESEHATAN			12.000,00	(12.000,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DINAS TRANSNAKER			562,50	(562,50)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Koreksi Penyisihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Keseharan dan Dinas Transnaker - LPE					12.562,50
Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan		4.063.752.034,00	24.971.662,91	3.657.957,00	21.313.705,91
Deviden PT Balairung Citrajaya	PPKD	-	-	3.657.957,00	(3.657.957,00)
- Koreksi piutang Deviden PT Balairung Citrajaya - LPE	PPKD		3.657.957,00		3.657.957,00
- Penambahan pencatatan nilai atas deviden Bank Nagari dan BPR Pulau Punjung	PPKD	4.063.752.034,00	21.313.705,91		21.313.705,91
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		12.310.601.825,87	546.175.917,56	533.763.430,83	32.312.426,52
Piutang BLUD Puskesmas	BLUD PUSKESMAS	499.089.400,00	4.765.947,00	2.916.935,00	1.849.012,00
Piutang BLUD RSUD	BLUD RSUD	6.611.198.992,00	33.055.994,96	52.955.934,75	(19.899.939,79)
- Koreksi penyisihan piutang Jasa Layanan-BLUD RSUD - LPE	BLUD RSUD				19.899.939,79
Piutang Dana Bergulir	PPKD	554.297.679,00	462.518.051,08	462.518.051,08	(0,00)
Piutang Air Minum UPT SPAM	DINAS PUPR	297.616.250,00	24.096.927,00	15.372.510,00	8.724.417,00
Piutang TGR	PPKD	4.246.994.031,87	21.234.970,16		21.234.970,16
Piutang Deposito	PPKD	100.205.473,00	501.027,37		501.027,37
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	PPKD	600.000,00	3.000,00		3.000,00

Beban Penyisihan untuk Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Piutang Lain-Lain PAD dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

k. **Beban Transfer**

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.2.	Beban Transfer	119.973.216.566,00	106.260.905.175,00	13.712.311.391,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Transfer dalam Tahun 2019 dan Tahun 2018. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, terdapat kenaikan sebesar Rp13.712.311.391,00.

Beban Transfer terdiri dari.

KODE REK	PERKIRAAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.2.	Beban Transfer	119.973.216.566,00	106.260.905.175,00	13.712.311.391,00
9.2.1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.170.650.000,00	1.366.435.100,00	1.804.214.900,00
9.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)
9.2.4.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa & Parpol	116.017.917.000,00	104.028.430.000,00	11.989.487.000,00
9.2.5.	Beban Bantuan Keuangan	784.649.566,00	766.040.075,00	18.609.491,00

Untuk perbedaan jumlah Belanja Transfer-LRA dengan Beban Transfer-LO adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.3.13
Perbedaan Belanja Transfer antara LRA dan LO Tahun 2019

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Transfer	119.906.673.992,00	119.973.216.566,00	(66.542.574,00)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.170.650.000,00	3.170.650.000,00	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa & Parpol	116.017.917.000,00	116.017.917.000,00	-
Beban Bantuan Keuangan	718.106.992,00	784.649.566,00	(66.542.574,00)

Penjelasan selisih sebesar Rp66.542.574,00 disebabkan penyesuaian utang beban bantuan keuangan Tahun 2019 yang merupakan utang belanja Partai Politik yang kurang bayar bulan Desember 2019. Rincian penjelasan ada di Necara bagian kewajiban pada utang belanja.

V.D.3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp25.721.247.847,34 merupakan surplus dari Pendapatan sebesar Rp1.030.635.685.858,56 dikurangi Beban Operasi sebesar Rp1.004.914.438.011,22.

V.D.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp198.608.000,00 merupakan reklasifikasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan atas penjualan Aset Tetap pada Tahun 2019 ke Surplus Penjualan Aset Nonlancar.

V.D.5. Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2019 sebesar Rp24.176.925,00 merupakan Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2019 yang terealisasi untuk pembiayaan Kejadian Luar Biasa (KLB) penanganan pasien keracunan makanan yang direklasifikasi ke beban luar biasa pada Laporan Operasional.

V.D.6. Surplus/Defisit LO

Surplus Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp25.895.678.922,34 merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit dari Operasi sebesar Rp25.721.247.847,34 dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp198.608.000,00 setelah Pengurangan beban transfer atas reklas pengakuan Belanja Tak Terduga pada LO dari Beban Tak Terduga ke Beban Luar Biasa sebesar Rp24.176.925,00.

Surplus Laporan Operasional Tahun 2019 sebesar Rp25.895.678.922,34 mengalami penurunan sebesar Rp56.567.597.239,38 bila dibandingkan dengan Surplus Laporan Operasional Tahun 2018 sebesar Rp82.463.276.161,72.

V.E PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang memberikan informasi arus kas masuk (*Cash In Flow*) dan arus kas keluar (*Cash Out Flow*) yang setara dalam Kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.

Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris selama satu periode akuntansi. Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 sebagai berikut.

V.E.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Posisi selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.E.1.a Arus Masuk Kas	1.019.159.463.248,49	923.300.229.171,88

Arus Masuk Kas merupakan pendapatan operasi yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah lainnya, Pendapatan Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan kas dari aktivitas operasi sebagai berikut.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	19.178.964.229,67	29.231.341.838,86
Penerimaan Retribusi Daerah	3.054.849.682,00	2.655.851.485,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.590.314.080,00	3.177.292.290,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	52.860.183.160,82	48.810.995.398,02
Dana Bagi Hasil Pajak	13.711.561.010,00	17.647.991.094,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.116.617.541,00	1.729.956.123,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	524.888.502.000,00	501.889.284.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	220.914.062.329,00	187.705.190.546,00
Dana Otonomi Khusus / Dana Penyesuaian	97.546.293.000,00	60.749.031.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	47.598.137.491,00	38.744.280.024,00
Bantuan Keuangan/Subsidi Pembangunan Provinsi	-	-
Penerimaan Hibah	33.699.978.725,00	30.959.015.373,00
Penerimaan Dana Darurat	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	1.019.159.463.248,49	923.300.229.171,88

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.E.1.b Arus Keluar Kas	809.955.320.794,50	716.352.498.034,00

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi mencakup seluruh pengeluaran kas untuk keperluan operasional pemerintahan. Berdasarkan SAP, pengeluaran ini mencakup belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah,

bantuan sosial, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil. Pada Tahun 2019 pengeluaran kas untuk aktivitas operasi sebagai berikut.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Pembayaran Pegawai	430.141.092.583,00	354.423.781.676,00
Pembayaran Barang	207.300.127.555,20	225.062.809.753,00
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	49.451.249.739,30	29.666.160.706,00
Pembayaran Bantuan Sosial	3.132.000.000,00	194.500.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	718.106.992,00	866.040.075,00
Pembayaran Tak Terduga	24.176.925,00	744.340.724,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota	3.170.650.000,00	0,00
Pembayaran Bantuan Transfer ke Pemerintah Nagari	116.017.917.000,00	105.394.865.100,00
Jumlah Arus Keluar Kas	809.955.320.794,50	716.352.498.034,00

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	209.204.142.453,99	206.947.731.137,88

Merupakan kenaikan/penurunan kas dari aktivitas operasi. Pada Tahun 2019 terjadi kenaikan kas (arus masuk kas - arus keluar kas) dari aktivitas operasi sebesar Rp209.204.142.453,99.

V.E.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.E.2.a Arus Masuk Kas	193.658.000,00	240.722.850,00

Pada Tahun 2019 terdapat penerimaan kas dari aktivitas investasi berupa pelepasan aset tetap atas pelelangan Peralatan dan Mesin melalui KPKNL sebesar Rp188.228.000,00 dan penjualan sisa bongkaran atap gedung dan bangunan sekolah dasar sebesar Rp5.430.000,00.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.E.2.b Arus Keluar Kas	226.598.089.916,65	216.756.904.059,14

Pada Tahun 2019 terdapat pengeluaran kas dari aktivitas investasi sebesar Rp227.144.694.106,92. Pengeluaran kas dimaksud ditujukan untuk perolehan aset tetap sebagai berikut.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Perolehan Tanah	0,00	35.301.400,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	45.512.218.370,50	30.578.214.530,14
Perolehan Gedung dan Bangunan	112.232.961.295,51	63.739.669.415,00

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.210.263.507,34	113.686.666.098,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.642.646.743,30	8.717.052.616,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	226.598.089.916,65	216.756.904.059,14

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(226.399.481.916,65)	216.516.181.209,14)
Merupakan kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Investasi. Pada Tahun 2019 arus kas bersih (arus masuk kas - arus keluar kas) dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sebesar Rp(226.399.481.916,65)		

V.E.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Posisi selama Tahun 2019 arus masuk kas dan arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan adalah.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.E.3.a Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Pada Tahun 2019 tidak terdapat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan yang diterima kembali.		

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.E.3.b Arus Keluar Kas	2.500.000.000,00	0,00
Pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan yang akan diterima kembali dan atau dibayar kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang dan utang jangka panjang. Pada Tahun 2019 arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2.500.000.000,00 atas penyertaan modal pemerintah daerah di Bank Nagari.		

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(2.500,000,000.00)	0,00
Merupakan kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Pendanaan. Pada Tahun 2019 arus kas bersih (arus masuk kas - arus keluar kas) dari aktivitas pendanaan sebesar Rp(2.500,000,000.00)		

V.E.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.E.4.a Arus Masuk Kas	40.440.250.504,00	55.685.551.042,57

Arus masuk kas selama Tahun 2019 sebesar Rp40.440.250.504,00 yang berasal dari.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Penerimaan PFK	40.440.250.504,00	54.150.231.616,57
Kesalahan Kredit Bank	0,00	7.291.300,00
Penerimaan Pengembalian Belanja	0,00	1.528.028.126,00
Jumlah	40.440.250.504,00	55.685.551.042,57

Penerimaan PFK Tahun 2019 terdiri dari.

Penerimaan IWP	Rp	3.345.476.947,00
Penerimaan TAPERUM	Rp	316.244.000,00
Penerimaan PPN	Rp	17.429882.014,00
Penerimaan PPh Psl 21	Rp	13.921.888.979,00
Penerimaan PPh Psl 22	Rp	1.185.747.995,00
Penerimaan PPh Psl 23	Rp	56.665.072,00
Penerimaan PPh Psl 4	Rp	4.184.345.497,00
Jumlah	Rp	40.440.250.504,00

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan penerimaan dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga.

Penerimaan PFK Tahun 2019 sebesar Rp40.440.250.504,00 dan terdapat utang PFK yang belum disetor ke Kas Negera atas Penerimaan PPh 21 sebesar Rp601.085,00.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.E.4.b Arus Keluar Kas	40.457.372.438,00	54.146.593.597,57

Arus keluar kas selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp40.457.372.438,00 yang berasal dari:

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
- Penyetoran PFK	40.457.372.438,00	54.133.221.597,57
- Kesalahan kredit Bank	0,00	13.372.000,00
Jumlah	40.457.372.438,00	54.146.593.597,57

Penyetoran PFK Tahun 2019 terdiri dari.

Penyetoran IWP	Rp	3.345.476.947,00
Penyetoran TAPERUM	Rp	316.244.000,00
Penyetoran PPN	Rp	17.443.028.252,00
Penyetoran PPh Psl 21	Rp	13.923.023.193,00
Penyetoran PPh Psl 22	Rp	1.188.529.477,00
Penyetoran PPh Psl 23	Rp	56.725.072,00
Penyetoran PPh Psl 4	Rp	4.184.345.497,00
Jumlah	Rp	40.457.372.438,00

Penyetoran PFK Tahun 2019 sebesar Rp40.457.372.438,00 terdapat penyetoran utang PFK Tahun 2018 ke Kas Negara sebesar Rp17.723.019,00 yang terdiri dari penyetoran PPN sebesar Rp13.146.238,00, PPh Psl 21 sebesar Rp1.134.214,00, PPh Psl 22 sebesar Rp2.781.482,00, dan PPh Psl 23 sebesar Rp60.000,00.

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(17.121.934,00)	1.539.670.445,00

Merupakan total kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Transitoris. Pada Tahun 2019 arus kas bersih (arus masuk kas – arus keluar kas) dari aktivitas transitoris sebesar Rp(17.121.934,00).

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Kenaikan / Penurunan Kas	(19.712.461.396,66)	(8.028.779.626,26)

Merupakan total kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Pada Tahun 2019 terjadi penurunan kas (arus masuk kas – arus keluar kas) sebesar Rp(19.712.461.396,66).

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	(19.712.461.396,66)	(8.028.779.626,26)
Saldo Awal Kas di Kas Daerah	14.533.461.147,98	25.821.006.820,24
Saldo Awal Kas di Kas BLUD	8.565.179.881,00	5.664.320.829,00
Saldo Awal Kas di Dana BOS	483.693.923,00	136.918.320,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	88.799.569,52	14.533.461.147,98
Saldo Akhir Kas di BLUD	1.094.990.941,80	8.565.179.881,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	2.900.300,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.395.063,00	8.231.091,00
Saldo Akhir pada Dana BOS	2.695.211.372,00	483.693.923,00
Saldo Piutang pada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	3.884.396.946,32	23.593.466.342,98

Perbedaan komponen yang terdapat pada Saldo Akhir Kas di LAK dan SiLPA di LRA Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

SALDO LRA	SALDO ARUS KAS
3.893.451.613,32	3.884.396.946,32
SELISIH	9.054.667,00

Saldo akhir kas di LAK sebesar Rp3.884.396.946,32 sedangkan SiLPA menurut LRA sebesar Rp3.881.004.946,32 sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.054.667,00 Selisih tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

No	Uraian	Rp
1.	SiLPA LRA	3.893.451.613,32
2.	Saldo Arus Kas	3.884.396.946,32
	Selisih	9.054.667,00

Rincian Selisih

a.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	(3.392.000,00)
c.	Utang PFK BLUD di Neraca	(601.085,00)
d.	Piutang atas Pembatalan Kontrak Kerja Tahun 2017 No.02.BA-PPP/AIR/DPU-PR/X-2017	13.050.752,00
e.	SP2D No.5711/LS/2016 kekurangan debet oleh Bank	(3.000,00)
Selisih		9.054.667,00

VF. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
V.F. Ekuitas	2.424.445.022.003,03	2.408.920.868.365,27
Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.424.445.022.003,03 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.408.920.868.365,27.		
Uraian dan rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut.		
Saldo awal ekuitas	Rp	2.408.920.868.365,27
Surplus/Defisit LO	Rp	25.895.678.922,34
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar		
a. Dampak Kumulatif perubahan Kebijakan	Rp	0,00
b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	Rp	(10.371.525.284,58)
Saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas	Rp	2.424.445.022.003,03

BAB VI

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

VI.A Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu [kabupaten](#) di Provinsi [Sumatera Barat, Indonesia](#). Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 dan merupakan pemekaran dari [Kabupaten Sijunjung](#). Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Visi

Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, mempunyai visi yaitu.

“Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya”

Misi

Berdasarkan VISI di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mempunyai enam misi, yaitu.

- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap, dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
- Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan, dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
- Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
- Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun.

Letak dan Luas Wilayah

Secara [geografi](#) Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat, dengan [topografi](#) daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m - 1.500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Dharmasraya mempunyai luas wilayah $\pm$ 2.961,13 Km atau 296.113 Ha. Secara geografis Kabupaten Dharmasraya berada pada posisi, 00 47'7" LS -- 141' 56", Lintang Selatan (LS) dan, 1019' 21", BT -- 1010 54' 27", Bujur Timur (BT).

Kabupaten Dharmasraya dilalui oleh jalur lalu lintas Sumatera dan berbatasan dengan.

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan

Penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut data Tahun 2015 berjumlah 223.112 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2014 meningkat 2,85% dengan kepadatan 105 jiwa/km² dan merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut suku bangsa diperoleh data Suku Minang 62,93%, Suku Jawa 32,96%, Suku Sunda 1,49%, Suku Batak 0,88%, Melayu 0,71% dan Suku lainnya 1,03%. Berdasarkan distribusi penduduk menurut tingkat usia, diperoleh data angkatan kerja (15-59 tahun) sebanyak 104.123 jiwa (61,30%) dengan tingkat ketergantungan 63,15%.

VI.B Susunan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 maka entitas akuntansi mengalami pergeseran dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya. Secara lebih rinci Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya dibagi dalam tiga tipe, yaitu.

1. Perangkat Daerah Tipe A, yaitu.
 - 1) Sekretariat Daerah
 - 2) Inspektorat
 - 3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 4) Badan Keuangan Daerah
 - 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 7) Dinas Pertanian
 - 8) Kecamatan Asam Jujuhan
 - 9) Kecamatan Koto Baru
 - 10) Kecamatan Koto Besar
 - 11) Kecamatan Koto Salak
 - 12) Kecamatan Pulau Punjung
 - 13) Kecamatan Sembilan Koto
 - 14) Kecamatan Sitiung
 - 15) Kecamatan Sungai Rumbai
 - 16) Kecamatan Timpeh
 - 17) Kecamatan Tiumang
2. Perangkat Daerah Tipe B, yaitu.
- 1) Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga
 - 3) Dinas Kesehatan
 - 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
 - 6) Dinas Komunikasi dan Informatika,
 - 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 8) Dinas Lingkungan Hidup
 - 9) Kecamatan Padang Laweh
 - 10) Dinas Pangan dan Perikanan
3. Perangkat Daerah Tipe C, yaitu.
- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 2) Sekretariat DPRD
 - 3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
 - 5) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 - 6) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan,dan
 - 7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - 8) Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berjumlah 35 Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, 3 Badan dan 11 Kecamatan. Selain 35 Perangkat Daerah tersebut, ada 3 SKPD yang masih tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Tahun 2010 yakni RSUD Sungai Dareh, BPBD, dan Kantor Kesbangpol. Ketiga SKPD tersebut tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukannya ditetapkan. Peraturan Daerah dimaksud di atas terdiri dari.

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Berikut rincian Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan/urusan penunjang, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
SKPD Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Urusan/Urusan Penunjang

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
1	Pendidikan	1.	Dinas Pendidikan
2	Kebudayaan	2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Kepemudaan dan Olahraga		
4	Pariwisata		
5	Kesehatan	3	Dinas Kesehatan
6	Sosial	4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
9	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
12	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Pol PP)		
13	Penanaman Modal	8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
15	Perindustrian		
16	Perdagangan		
17	Energi dan Sumber Daya Mineral		-
18	Transmigrasi	10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
19	Tenaga Kerja		
20	Komunikasi dan Informatika	11	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Statistik		
22	Persandian		
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
25	Pertanahan		
26	Perhubungan	14	Dinas Perhubungan
27	Lingkungan Hidup	15	Dinas Lingkungan Hidup
28	Kehutanan		-
29	Pangan	16	Dinas Pangan dan Perikanan
30	Pertanian	17	Dinas Pertanian
31	Kelautan dan Perikanan		
32	Perpustakaan	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
33	Kearsipan		
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	Perencanaan	20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
36	Penelitian dan Pengembangan		
37	Keuangan	21	Badan Keuangan Daerah
38	Sekretariat Daerah	22	Sekretariat Daerah
39	Sekretariat Dewan	23	Sekretariat DPRD
40	Inspektorat	24	Inspektorat
41	Kecamatan Asam Jujuhan	25	Kecamatan Asam Jujuhan
42	Kecamatan Koto Baru	26	Kecamatan Koto Baru
43	Kecamatan Koto Besar	27	Kecamatan Koto Besar
44	Kecamatan Koto Salak	28	Kecamatan Koto Salak
45	Kecamatan Padang Laweh	29	Kecamatan Padang Laweh
46	Kecamatan Pulau Punjung	30	Kecamatan Pulau Punjung
47	Kecamatan IX Koto	31	Kecamatan IX Koto
48	Kecamatan Sitiung	32	Kecamatan Sitiung
49	Kecamatan Sungai Rumbai	33	Kecamatan Sungai Rumbai
50	Kecamatan Timpeh	34	Kecamatan Timpeh
51	Kecamatan Tiumang	35	Kecamatan Tiumang

Kabupaten Dharmasraya telah melakukan Pemilu Legislatif pada tanggal 17 April 2019 dan pelantikan terhadap 30 orang anggota DPRD terpilih untuk periode 2019 s.d. 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019, sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya definif dilantik pada tanggal 20 November 2019.

Secara umum Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yaitu.

- 1) Bupati : Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E.
- 2) Wakil Bupati : H. Amrizal Dt. Rajo Medan, S.Sos.
- 3) Ketua DPRD : Pariyanto, S.H.
- 4) Sekretaris Daerah : H. Adlisman, S.Sos, M.Si.

VI.C Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pada Tahun 2019 Kabupaten Dharmasraya memiliki 14 unit Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak pada bidang kesehatan yaitu 1 unit Badan Layanan Umum RSUD Sungai Dareh dan 13 unit Badan Layanan Umum UPT Puskesmas

1. Badan Layanan Umum RSUD Sungai Dareh

Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sungai Dareh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/460/KPTS-BUP/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penetapan RSUD Sungai Dareh untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh di Kabupaten Dharmasraya. Pelaksanaan unit BLUD RSUD Sungai Dareh mulai berjalan pada 1 Januari 2015.

2. Badan Layanan Umum UPT Puskesmas

Tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya memiliki UPT Puskesmas Kabupaten Dharmasraya (*holding*) yang membawahi 13 Puskesmas sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya.

Adanya penetapan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, telah terjadi Perubahan Struktur Organisasi UPT Puskesmas melalui Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/147/KPTS-BUP/2018 tentang Pencabutan atas Keputusan Dharmasraya Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 18 April 2018.

Pencabutan keputusan tersebut diiringi dengan pembentukan UPT Puskesmas sebanyak 13 Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap dengan uraian sebagai berikut.

14. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/148/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago
15. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/149/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru.
16. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/150/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh
17. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/151/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar
18. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/152/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh
19. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/153/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang
20. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/154/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Gunung Medan
21. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/155/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I.
22. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/156/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II
23. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/157/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh dan Beringin Sakti.
24. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/158/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumang
25. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/159/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai
26. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/160/KPTS-BUP/2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pada akhir Tahun 2019 Kabupaten Dharmasraya telah menambah 2 unit BLUD yaitu UPT RSUD Sungai Rumbai dan UPT Puskesmas Beringin Sakti yang mulai berjalan pada tanggal 2 Januari 2020, dengan dasar penetapan sebagai berikut.

- a. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/462/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/476/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Beringin Sakti sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Pada TA 2020 Kabupaten Dharmasraya telah memiliki 16 unit BLUD yang semuanya bergerak pada bidang kesehatan. Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang tidak membagi BLUD dalam status “Bertahap” atau “Penuh, maka Keputusan Bupati Tahun 2018 tentang penetapan UPT Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Bertahap dicabut, digantikan dengan Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan uraian sebagai berikut.

1. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/463/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/464/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
3. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/465/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/466/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/467/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya SK Nomor 188.45/468/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/469/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/470/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

9. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/471/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumbang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/472/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/473/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/474/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/475/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

VI.D Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910-1867-SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Bupati Dharmasraya meneruskan dengan Instruksi Bupati Bupati Dharmasraya Nomor 188.55/1/INST-BUP/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai tanggal 28 Desember 2017. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Transaksi pembayaran melalui mekanisme non tunai dilakukan untuk pembayaran sebagai berikut.

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3. Belanja Makanan dan Minuman
4. Belanja Honorarium dan lembur PNS dan Non PNS
5. Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor, Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas
6. Belanja Alat Tulis Kantor, Alat Listrik, Alat Rumah Tangga, Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai habis, Seminar Kit, Belanja Cetak dan Penggandaan

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan pembayaran secara non tunai sebelum ditetapkannya Pelaksanaan Transaksi Non Tunai secara nasional untuk pembayaran Belanja Tidak langsung.

VI.E Revaluasi Aset Tetap

Kabupaten Dharmasraya belum menerapkan Revaluasi Aset Tetap seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi merupakan penilaian kembali aset tetap karena kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan. Revaluasi dapat berdampak meningkatkan nilai tercatat Aset Tetap atau menurunkan nilai tercatat Aset Tetap. Belum adanya penyusunan kebijakan akuntansi tentang Revaluasi Aset Tetap di Kabupaten Dharmasraya disebabkan karena belum adanya pedoman pelaksanaan penilaian kembali barang milik daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

VI.F Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Aset Tetap, KDP, dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020

Dengan adanya wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di seluruh dunia termasuk Indonesia dan perkembangannya yang cepat meluas serta menyebabkan jatuhnya banyak korban dan kerugian material yang telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, maka *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai Pandemic pada tanggal 11 Maret 2020. Pemerintah segera mengantisipasi menyebarnya virus corona di Wilayah Negara Kesatuan RI dengan dengan cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai tanggungjawab Pemerintah untuk melindungi segenap Warga Negara Indonesia di dalam dan luar negeri.

Sinergisitas antara Kementerian/Lembaga Pemerintah dalam bentuk aturan sebagai berikut.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tanggal 13 Maret 2020.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 14 Maret 2020.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasi, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Disease 2019 (COVID-19)* tanggal 16 Maret 2020.
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-247MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020 tanggal 27 Maret 2020.

Dengan adanya Surat Menteri Keuangan Nomor S-247MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran. 2020 berdampak pada pengadaan barang dan Jasa Tahun 2020 di Kabupaten Dharmasraya. Bupati Dharmasraya pun telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/300/BKD-2020 tanggal 1 April 2020 perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada APBD Tahun 2020. Namun, untuk Aset Tetap dan KDP terkait proyek infrastruktur serta kegiatan-kegiatan di Tahun 2019 tetap dilanjutkan pada Tahun 2020.

VI.G Rencana dan Program Penanganan Krisis

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/sj-Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Kepala Daerah dimintakan untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan target belanja daerah untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam APBD Tahun 2020, dengan melakukan pergeseran anggaran bulan April 2020, dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut.

- a. Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun berjalan agar menggunakan prinsip pengelolaan keuangan yang optimal, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
- b. Dampak adanya pengurangan pendapatan transfer dari pusat dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengakibatkan pengurangan terhadap belanja pada setiap perangkat daerah sehingga untuk penganggaran belanja operasional kantor termasuk perjalanan dinas bidang dan makan minum rapat ditempatkan pada satu kegiatan di Sekretariat, kecuali lingkup Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

VI.H Pergeseran APBD Tahun 2020

Pada Tahun 2020, dari Januari s.d. April 2020 sudah dilakukan pergeseran APBD Tahun 2020 sebanyak tiga kali yaitu.

1. Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2016 yang berbunyi pergeseran antar organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, serta perubahan pergeseran uraian rincian objek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam

peraturan daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

Adapun dalam Pergeseran ini dalam rangka mengakomodir adanya pekerjaan yang telah selesai Tahun 2019 dan dianggarkan pada APBD 2020 sebesar Rp.4.355.737.434,00 dengan Rincian sebagai berikut.

a. Dinas PUPR

Lanjutan Stadion Mini Sungai Rumbai	Rp	417.001.434,00
Rehab MCK Masjid Agung Babussalam PP	Rp	144.800.000,00
Rehab Rumah Gadang Dt. Kayo Bosou	Rp	67.700.000,00
Drainase Perumahan Villa Tama Perdana	Rp	99.567.000,00
Perencanaan Drainase Kawasan SR, KT Besar	Rp	25.500.000,00
Rigit Beton Jl. Trans I Sei. Kambut	Rp	139.650.000,00
Rigit Beton Jln Khamter Jr. Sei. Kambut	Rp	139.650.000,00
Pengerasan Jln TPU Taratak PP	Rp	89.800.000,00
Perbaikan Jalan Bukit Tambun	Rp	49.800.000,00
Pembukaan Jalan Baru Jr. Koto Nag. G Medan	Rp	189.157.000,00
Pengerasan Jl lingkungan Jr.Taratak Siguntur	Rp	89.800.000,00
Pembukaan Jalan Baru Jr. Kp. Dondan G Medan	Rp	139.620.000,00
Pembangunan Jalan Jorong Ganting G Medan	Rp	44.900.000,00
Rigit Beton Jr. Harapan Mulya Tiumang	Rp	89.386.000,00
Rigit Beton SP3 Tiumang Nagari Tiumang	Rp	139.816.000,00
Rigit Beton Jr. Sukoharjo Nag. Tiumang	Rp	84.500.000,00
Rigit Beton Jr. Sei. Kalang II Nag. Tiumang	Rp	84.635.000,00
Rigit Beton Jr. Sei. Kalang I Nag. Tiumang	Rp	57.300.000,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Rp	26.500.000,00
Pengawasan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Rp	17.900.000,00
Pemeliharaan, Perawatan RTH	Rp	50.000.000,00
Penataan Kawasan (Land Scape RSUD)	Rp	264.146.000,00
Taman Embung Nagari Sitiung	Rp	182.300.000,00
Pengawasan Land Scape RSUD	Rp	14.531.000,00
Pengawasan RTH Simpang Tabek Sitiung	Rp	<u>11.884.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.662.093.434,00

b. RSUD Sungai Dareh

Pengadaan sumur bor RSUD	Rp	85.118.000,00
Pengadaan sistem instalasi air gedung RSUD	Rp	174.729.000,00
Pengawasan pengadaan instalasi air	Rp	7.130.000,00
Pengadaan bangunan fisik dan instalasi IPAL	Rp	79.160.000,00
Pengawasan	Rp	3.200.000,00
Pembangunan lanjutan gedung RS baru (DAK)	Rp	489.800.000,00
Belanja DED Lanjutan RSUD	Rp	378.427.000,00

Pengadaan plank Merek Rumah Sakit	Rp	195.095.000,00
Pengawasan Plank Merek RSUD	Rp	7.975.000,00
Pengawasan Pembangunan Gedung RS Baru	Rp	<u>141.509.500,00</u>
Jumlah	Rp	1.562.144.000,00
c. Dinas Perhubungan		
SIM PKB	Rp	131.500.000,00
Jumlah Total	Rp	4.355.737.434,00
2. Pergeseran Kedua APBD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya TA 2020 dilakukan terhadap.		
a. Pekerjaan akibat pemberian kesempatan kerja kepada penyedia barang/jasa yang menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui TA 2020 sebesar Rp3.871.264.129,12 dengan Rincian sebagai berikut.		
a. Dinas PUPR		
Pekerjaan Jalan Kabupaten	Rp	565.326.541,83
b. RSUD Sungai Dareh		
Pengadaan Meubeleur dan Interior RSUD	Rp	944.920.000,00
Pengawasan	Rp	29.182.450,00
c. Dinas Komperdag		
Pembangunan Gedung Produksi (DAK)	Rp	894.396,711,00
Pembangunan Infrastruktur Sentra	Rp	<u>1.437.438.429,29</u>
JUMLAH	Rp	3.871.264.129,12
b. Kebijakan Pemerintah Pusat bersifat strategis		
Penambahan Pendapatan pada objek Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada DPA PPKD sebesar Rp30.951.100.000,00 dan penambahan Belanja Langsung pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp24.22.542.565,00 dan Belanja Modal sebesar Rp6.728.557.435,00 Penambahan pendapatan dan penambahan belanja tersebut adalah dari Belanja Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Tahun 2020 yang didasari dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 350.P/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang II Tahun 2020.		
3. Pergeseran Ketiga APBD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 23 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020.		
Didasari dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang		

Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, pada Diktum Keenam menyebutkan bahwa Penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pergeseran Ketiga ini dilakukan sebagai berikut.

a. Penyesuaian Target Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2020

Pada awal APBD Tahun 2020, Pendapatan Daerah sebesar Rp1.031.026.254.667,00. Pada penyesuaian APBD menjadi Rp945.475.986.750,00 atau berkurang sebesar Rp86.550.167.917,00 atau 8,30% yang meliputi.

- Pendapatan Asli Daerah pada alokasi awal APBD 2020 sebesar Rp104.794.164.000,00 menjadi sebesar Rp78.242.243.450,00 atau berkurang sebesar Rp26.552.920.550 atau 25,34%
- Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat, berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional terdapat pengurangan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp87.049.347.367,00 atau 9,93% dari pagu awal sebesar Rp876.864.696.367,00 menjadi Rp789.815.349.000,00. Penyesuaian Dana Transfer Pusat pada APBD Tahun 2020 berdasarkan PMK Nomor 35 Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 6.2
Penyesuaian Pendapatan Transfer Pusat pada APBD 2020

No	Uraian	APBD Tahun 2020	Penyesuaian APBD 2020 Berdasarkan PMK 35 Tahun 2020	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5=3-4
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
1	DBH (Dana Bagi Hasil)	18.349.221.367,00	18.273.210.000,00	(76.011.367,00)
2	DAU Formula	528.037.794.000,00	478.355.774.000,00	(49.682.020.000,00)
3	DAU Tambahan/ Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK	7.620.254.000,00	4.105.400.000,00	(3.514.854.000,00)
4	DAK	249.013.348.000,00	218.323.299.000,00	(30.690.049.000,00)
4.1	DAK Fisik / Reguler	141.361.632.000,00	124.985.625.000,00	(16.376.007.000,00)
4.2	DAK Fisik / Penugasan	20.991.642.000,00	7.435.831.000,00	(13.555.811.000,00)
4.3	DAK Non Fisik	86.660.074.000,00	85.901.843.000,00	(758.231.000,00)
	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya			
1	DID (Dana Insentif Daerah)	20.009.465.000,00	17.485.016.000,00	(2.524.449.000,00)
2	ADD (Alokasi Dana Desa)	53.834.614.000,00	53.272.650.000,00	(561.964.000,00)
	Jumlah	876.864.696.367,00	789.815.349.000,00	(87.049.347.367,00)

- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah bertambah sebesar Rp28.051.100.000,00 atau 56,82% awal dari pagu sebesar Rp49.367.294.300,00 menjadi Rp77.418.394.300,00
- b. Penyesuaian Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2020
- Rasionalisasi Belanja Pegawai
Belanja Daerah pada awal APBD Tahun 2020 sebesar Rp1.102.724.680.352,00 menjadi sebesar Rp952.564.664.280,00 atau berkurang sebesar Rp150.160.016.072,00 atau 13,62%.
 - Rasionalisasi Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa pada awal APBD Tahun 2020 sebesar Rp208.147.033.695,00 menjadi Rp185.872.141.194,00 atau berkurang sebesar Rp22.274.892.501,00 atau 10,70%.
 - Rasionalisasi Belanja Modal
Belanja Modal pada awal APBD Tahun 2020 sebesar Rp256.467.119.624,00 menjadi Rp180.830.275.982,00 atau berkurang sebesar Rp75.636.843.642,00 atau 29,49%.
- c. Pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun 2020
- Penerimaan Pembiayaan Daerah pada awal APBD Tahun 2020 sebesar Rp73.198.525.685,00 berkurang sebesar Rp66.109.848.155,00 sehingga pada Penyesuaian APBD Tahun 2020 menjadi Rp7.088.677.530,00.
 - Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada awal APBD Tahun 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp 1.500.000.000,00 sehingga pada Penyesuaian APBD sebesar Rp0,00.
- b. Alokasi Penyesuaian APBD Tahun 2020 untuk Penanganan *Carona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebesar Rp39.377.944.078,00 yakni berupa kegiatan di SKPD sebesar Rp17.089.654.128,00 dan pendanaan dari Belanja Tidak terduga sebesar Rp.22.288.289.950,00 yang dirinci dalam bentuk.
- Belanja Bidang Kesehatan
 - Dinas Kesehatan
 - Pembelian Logistik di Dinas Kesehatan Rp. 499.900.000,00
 - Penatalaksanaan Penanggulangan Wabah Rp. 4.489.960.000,00
 - BOK pada 14 Puskesmas Rp. 2.036.775.000,00
 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp. 200.000.000,00
 - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rp 627.329.128,00
 - Peningkatan Surveiand Rp 200.000.000,00
 - Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
Rp 409.900.000,00
 - Pembangunan Ruang Isolasi Rp 786.600.000,00
 - Cadangan Dana BTT untuk Dinkes Rp 1.429.000.000,00

Rumah Sakit Umum Daerah		
➤ Pembelian Logistik di RSUD	Rp.	350.000.000,00
➤ Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit	Rp.	1.235.300.000,00
➤ Pelaksanaan Penanggulangan Wabah	Rp	4.432.990.000,00
➤ Pemanfaatan Ruang Poliklinik	Rp	758.955.000,00
➤ Cadangan dana BTT untuk RSUD	<u>Rp</u>	<u>2.000.126.330,00</u>
Jumlah	Rp	19.956.709.128,00
- Penyediaan jaringan pengamanan sosial/ <i>social safety net</i>		
➤ Posko Siaga Penanganan Covid-19	Rp	1.790.000.000,00
➤ Pelayanan Duk Capil daring on line	Rp	62.600.000,00
➤ Sarana Prasarana Vidio Convergence	Rp	248.600.000,00
➤ Pengamanan Patroli	Rp	125.300.000,00
➤ Operasional persampahan	Rp	82.520.000,00
➤ Perbaikan ruang isolasi	Rp	140.000.000,00
➤ Pagar keliling R. Isolasi SKB dan SD 24 SK		
	Rp	342.000.000,00
➤ Saprasi Ruang Isolasi	Rp	163.000.000,00
➤ Pengadaan Masker gratis untuk Masyarakat		
	Rp	368.530.000,00
➤ Pengadaan Masker Gratis dan BTT	Rp	469.208.620,00
➤ Bantuan Langsung Tunai (BLT)	<u>Rp</u>	<u>15.584.600.000,00</u>
Jumlah	Rp	19.584.600.000,00
- Penanganan dampak ekonomi		
Pendistribusian beras CBD dari Bulog	Rp	544.650.000,00

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 yang dapat kami sampaikan.

Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean goverment*).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua, terutama dalam mengemban tugas amanah pengabdian kita kepada daerah, bangsa, dan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**BUPATI DHARMASRAYA**
SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 Agustus 2020

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JENIS PIUTANG	JENIS PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG	NRV
1	2	3	4	5
1	Piutang Pajak	32.002.201.142,00	(21.818.557.651,65)	
2	Piutang Retribusi	138.133.361,00	(110.949.906,00)	
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.063.752.034,00	21.313.705,91	
4	Piutang Lain-lain PAD yang sah	12.310.601.825,87	(546.175.917,56)	
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Pusat	3.072.369.696,00	-	
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3.389.783.336,00	-	
6	Piutang Lainnya	13.050.752,00	-	
	JUMLAH	54.989.892.146,87	(22.454.369.769,30)	-


BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 NOMOR : 1 TAHUN 2020
 TANGGAL : 26 Agustus 2020
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
 TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Tahun Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH							

NIHIL


BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 Agustus 2020
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SKPD/ Uraian	ASET LANCAR					
			Kualitas Piutang	Nilai Piutang	(%) Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang	31 Desember 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya	554.897.679,00					92.379.627,93
						462.518.051,08	
1.	Kec. Pulau Punjung	122.349.281,00					
a.	s/d tanggal Jatuh Tempo		Lancar	-	0,5	-	-
b.	1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan		Kurang Lancar	20.644.139,00	10	2.064.413,90	18.579.725,10
c.	1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan		Diragukan	25.969.285,00	50	12.984.642,50	12.984.642,50
d.	1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan		Macet	75.735.857,00	100	75.735.857,00	-
2.	Kec. Sitiung	42.186.005,00					
a.	s/d tanggal Jatuh Tempo		Lancar	-	0,5	-	-
b.	1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan		Kurang Lancar	-	10	-	-
c.	1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan		Diragukan	-	50	-	-
d.	1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan		Macet	42.186.005,00	100	42.186.005,00	-

NO	SKPD/ Uraian	ASET LANCAR					
			Kualitas Piutang	Nilai Piutang	(%) Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang	31 Desember 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Kec. Koto Baru	339.304.897,00					
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo		Lancar	1.104.335,00	0,5	5.521,68	1.098.813,33
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan		Kurang Lancar	38.498.010,00	10	3.849.801,00	34.648.209,00
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan		Diragukan	38.211.068,00	50	19.105.534,00	19.105.534,00
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan		Macet	261.491.484,00	100	261.491.484,00	-
	4. Kec. Sungai Rumbai	51.057.496,00					
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo		Lancar	-	0,5	-	-
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan		Kurang Lancar	-	10	-	-
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan		Diragukan	11.925.408,00	50	5.962.704,00	5.962.704,00
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan		Macet	39.132.088,00	100	39.132.088,00	-
	JUMLAH	554.897.679,00		554.897.679,00		462.518.051,08	92.379.627,93



 BUPATI DHARMASRAYA



 SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 Agustus 2020
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah Disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10	11	12	13 = 9-12
1	2006 dan 2007 2012 2013 2017	PT BPD Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari	Perda No. 2 Tahun 2009 Perda No.8 Tahun 2017	11.000 lembar saham Seri A 3.236 lembar saham Seri A 5.400 lembar saham seri A 3.716 lembar saham seri A	23.352.000.000,00	23.352.000.000,00	2.500.000.000,00	25.852.000.000,00	-		-	25.852.000.000,00
				saham seri A.000232 Saham Nomor A.000232				-				
2	2010	PT. Balairung Citra Jaya Sumbar	Surat Gubernur Sumbar	900 lembar saham Seri A 600.000 lembar Saham Seri B	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00
3	2012	PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung		10.000 lembar saham Seri B	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-		100.000.000,00
JUMLAH					24.952.000.000,00	24.952.000.000,00	2.500.000.000,00	27.452.000.000,00	-	-	-	27.452.000.000,00


BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 Agustus 2020
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	SALDO ASET TETAP 2018	PENAMBAHAN / PENGURANGAN			SALDO ASET TETAP 2019	AKUMULASI PENYUSUTAN 2019	NILAI BUKU 2019
			PENAMBAHAN	Reklas KDP	Pengurangan			
1	2	3	4	5		7	8	9
1	Tanah	655.393.508.247,00	18.321.687.762,00		22.950.838.562,00	650.764.357.447,00	-	650.764.357.447,00
2	Peralatan dan Mesin	222.496.461.150,44	93.268.543.057,00	45.599.137,00	55.245.287.013,00	260.565.316.331,44	156.940.942.950,57	103.624.373.380,87
	Alat Besar	24.602.016.276,00	2.206.155.137,00		9.367.732,00	26.798.803.681,00	20.194.858.705,89	6.603.944.975,11
	Alat Angkut	60.343.416.993,00	11.616.232.563,00	45.599.137,00	5.392.507.569,00	66.612.741.124,00	46.011.649.534,00	20.601.091.590,00
	Alat Bengkel	4.303.870.067,00	3.597.931.448,00		349.769.760,00	7.552.031.755,00	1.426.411.281,00	6.125.620.474,00
	Alat Pertanian	1.332.957.279,00	139.079.175,00		19.024.000,00	1.453.012.454,00	1.140.766.485,00	312.245.969,00
	Alat Kantor/RT	69.682.970.210,50	18.349.579.052,00		41.035.963.699,00	46.996.585.563,50	29.308.437.217,35	17.688.148.346,15
	Alat Studio	8.897.461.340,00	9.985.066.750,00		1.006.732.314,00	17.875.795.776,00	7.476.989.680,24	10.398.806.095,76
	Alat Kedokteran	33.219.504.542,74	10.714.767.920,00		3.166.065.833,00	40.768.206.629,74	22.810.571.319,00	17.957.635.310,74
	Alat Laboratorium	19.776.535.212,20	3.876.718.510,00		3.796.907.216,00	19.856.346.506,20	8.484.608.291,60	11.371.738.214,60
	Alat Persenjataan Keamanan / ALAT PERSENJATAAN	337.729.230,00	189.100.000,00		468.948.890,00	57.880.340,00	33.258.118,00	24.622.222,00
	KOMPUTER	-	29.893.754.642,00		-	29.893.754.642,00	17.934.239.856,00	11.959.514.786,00
	ALAT EKSPLORASI	-	-		-	-	-	-
	ALAT PENGEBORAN	-	-		-	-	-	-
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-		-	-	-	-
	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-		-	-	-	-
	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	546.912.030,00		-	546.912.030,00	535.404.530,33	11.507.499,67
	ALAT PERAGA	-	-		-	-	-	-
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-		-	-	-	-
	RAMBU - RAMBU	-	1.722.751.150,00		-	1.722.751.150,00	1.170.992.279,93	551.758.870,07
	PERALATAN OLAH RAGA	-	430.494.680,00		-	430.494.680,00	412.755.652,22	17.739.027,78
3	Gedung dan Bangunan	581.063.337.161,28	92.825.468.002,90	317.446.750,00	53.583.110.940,09	620.623.140.974,09	71.728.064.053,00	548.895.076.921,09
	Bangunan Gedung	574.486.884.097,28	66.134.544.570,81	317.446.750,00	51.234.871.794,09	589.704.003.624,00	69.922.549.586,00	519.781.454.038,00
	Monumen	6.576.453.064,00	2.214.000.450,00		2.348.239.146,00	6.442.214.368,00	138.547.648,00	6.303.666.720,00
	BANGUNAN MENARA	-	3.102.481.906,00		-	3.102.481.906,00	157.034.720,00	2.945.447.186,00
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	21.374.441.076,09		-	21.374.441.076,09	1.509.932.099,00	19.864.508.977,09
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.147.788.515.477,00	56.486.236.565,34	11.734.685.637,00	556.663.666,00	1.215.452.774.013,34	547.547.619.512,00	667.905.154.501,34
	Jalan dan Jembatan	930.998.910.036,00	46.502.908.995,00	11.277.090.843,00	490.462.000,00	988.288.447.874,00	517.448.788.486,00	470.839.659.388,00
	Bangunan Air/ Irigasi	162.824.870.967,00	8.056.551.842,34	457.594.794,00	13.260.000,00	171.325.757.603,34	22.040.439.148,00	149.285.318.455,34
	Instalasi	28.050.143.115,00	709.656.028,00		2.250.000,00	28.757.549.143,00	4.631.589.744,00	24.125.959.399,00
	Jaringan	25.914.591.359,00	1.217.119.700,00		50.691.666,00	27.081.019.393,00	3.426.802.134,00	23.654.217.259,00
5	Aset Tetap Lainnya	54.193.283.668,00	20.105.805.376,00	-	1.422.679.128,00	72.876.409.916,00	101.350.000,00	72.775.059.916,00
	Buku Perpustakaan	21.541.810.126,00	9.215.499.561,00		472.968.145,00	30.284.341.542,00	-	30.284.341.542,00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	2.337.488.871,00	1.254.462.590,00		872.076.583,00	2.719.874.878,00	-	2.719.874.878,00
	HEWAN	228.712.000,00	-		69.054.400,00	159.657.600,00	-	159.657.600,00
	BIOTA PERAIRAN	-	-		-	-	-	-
	TANAMAN	-	65.552.000,00		-	65.552.000,00	-	65.552.000,00
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-		-	-	-	-
	Aset Tetap Renovasi/ Pemugaran	30.085.272.671,00	9.570.291.225,00		8.580.000,00	39.646.983.896,00	101.350.000,00	39.545.633.896,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.917.332.394,00	62.487.679.347,76	(12.097.731.524,00)	39.007.501,83	87.268.272.715,93	-	87.268.272.715,93
	JUMLAH	2.697.852.438.097,72	343.495.420.111,00	-	133.797.586.810,92	2.907.550.271.397,80	776.317.976.515,57	2.131.232.294.882,23

 BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 Agustus 2020
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN
REKAPITULASI ASET TETAP KABUPATEN DHARMASRAYA

N0.	OPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
1	Sekretariat DPRD	3.714.125.740,00	11.978.476.679,00	41.147.184.530,00	5.852.155.166,00	43.091.000,00	-	62.735.033.115,00
2	Sekretariat Daerah	412.856.407.725,00	28.164.708.583,00	39.708.375.987,00	4.636.454.940,00	-	-	485.365.947.235,00
3	Kec. Pulau Punjung	987.500.000,00	632.607.825,00	1.146.199.720,00	7.700.000,00	-	-	2.774.007.545,00
4	Kec. Sitiung	1.000.000.000,00	514.499.765,00	506.918.100,00	9.100.000,00	-	-	2.030.517.865,00
5	Kec. Koto Baru	1.488.000.000,00	560.597.744,00	1.247.767.942,00	-	-	-	3.296.365.686,00
6	Kec. Sungai Rumbai	1.120.000.000,00	551.272.375,00	1.391.380.178,00	13.483.500,00	1.425.000,00	-	3.077.561.053,00
7	Kec. IX Koto	17.875.000,00	586.695.803,00	89.790.000,00	16.778.576,00	104.050.000,00	-	815.189.379,00
8	Kec. Timpeh	400.000.000,00	383.896.475,00	2.046.610.796,00	-	-	-	2.830.507.271,00
9	Kec. Padang Laweh	20.020.000,00	400.836.210,00	1.421.972.473,00	-	-	-	1.842.828.683,00
10	Kec. Tiumang	-	441.232.425,00	2.417.904.859,00	700.000,00	-	-	2.859.837.284,00
11	Kec Koto Besar	461.087.771,00	468.756.531,00	2.187.494.750,00	18.400.000,00	-	-	3.135.739.052,00
12	Kec Koto Salak	25.000.000,00	533.237.125,00	1.972.819.099,00	1.500.000,00	-	-	2.532.556.224,00
13	Kec. Asam Jujuhan	71.500.000,00	572.903.625,00	2.840.508.500,00	-	-	-	3.484.912.125,00
14	Dinas PUPR	161.984.936.389,00	31.819.518.244,00	20.511.453.052,00	1.177.409.033.865,34	134.408.000,00	63.065.171.388,00	1.454.924.520.938,34
15	Dinas PERKIMTAN	1.299.185.160,00	1.200.543.700,00	349.919.250,00	1.900.104.335,00	10.660.000,00	366.648.550,00	5.127.060.995,00
16	Dinas Perhubungan	5.961.400.000,00	4.287.484.376,00	3.505.815.491,00	246.486.519,00	-	-	14.001.186.386,00
17	Dinas Kesehatan	2.839.972.100,00	42.294.583.745,14	61.141.431.213,10	2.673.965.927,00	-	115.255.441,00	109.065.208.426,24
18	RSUD	10.683.462.500,00	36.750.640.419,60	12.349.153.892,00	932.508.000,00	38.996.211.896,00	559.659.728,00	100.271.636.435,60
19	Dinas Pendidikan	24.346.560.334,00	32.874.886.327,00	240.246.366.922,28	1.728.746.458,00	31.552.201.607,00	978.512.000,00	331.727.273.648,28
20	Dinas BUDPARPORA	1.115.335.010,00	1.117.205.501,00	101.075.937.218,85	157.269.000,00	68.250.000,00	-	103.533.996.729,85
21	Dinas TRANSSAKER	2.121.000.000,00	786.004.642,00	3.359.217.439,00	461.741.500,00	-	-	6.727.963.581,00
22	DSP3KB	-	2.737.710.080,00	2.173.571.518,00	-	-	-	4.911.281.598,00
23	DISDUKCAPIL	200.000.000,00	3.003.277.442,00	841.001.680,00	34.853.500,00	1.774.000,00	-	4.080.906.622,00
24	Dinas PMD	-	1.089.369.800,00	-	26.390.000,00	288.520.000,00	-	1.404.279.800,00
25	Dinas Pertanian	11.564.778.836,00	6.521.603.191,00	16.904.363.231,30	1.345.100.007,00	463.564.600,00	-	36.799.409.865,30
26	Dinas Pangan dan Perikanan	1.281.870.882,00	4.970.135.447,50	8.511.062.878,00	3.346.976.344,00	12.114.000,00	-	18.122.159.551,50
27	Dinas KUMPERDAG	1.176.340.000,00	15.023.642.589,20	39.208.265.957,56	34.500.000,00	-	21.326.358.258,93	76.769.106.805,69
28	BKD	-	4.548.856.010,00	5.594.474.000,00	-	-	-	10.143.330.010,00
29	DPMTSP	-	1.138.465.091,00	810.939.000,00	14.330.500,00	6.019.850,00	-	1.969.754.441,00
30	Inspektorat Kabupaten	-	1.384.790.781,00	1.535.427.000,00	-	6.131.710,00	-	2.926.349.491,00
31	BAPPPEDA	-	1.717.874.942,00	-	48.453.000,00	1.827.500,00	-	1.768.155.442,00
32	DLH	4.028.000.000,00	6.154.881.087,00	2.135.752.292,00	122.253.800,00	56.123.400,00	-	12.497.010.579,00
33	Kantor KESBANGPOL	-	259.182.000,00	-	-	36.500,00	-	259.218.500,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	-	6.496.350.096,00	-	11.717.000,00	-	-	6.508.067.096,00
35	BPBD	-	2.956.794.350,00	-	14.264.419.276,00	-	-	17.221.213.626,00
36	BKPSDM	-	1.110.829.131,00	937.677.005,00	6.995.000,00	-	-	2.055.501.136,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	1.969.350.505,00	1.306.385.000,00	19.690.000,00	873.735.228,00	856.667.350,00	5.025.828.083,00
38	Dinas KOMINFO	-	2.561.615.669,00	-	110.967.800,00	256.265.625,00	-	2.928.849.094,00
	Jumlah	650.764.357.447,00	260.565.316.331,44	620.623.140.974,09	1.215.452.774.013,34	72.876.409.916,00	87.268.272.715,93	2.907.550.271.397,80

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 Agustus 2020
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERITAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN KDP TAHUN 2019

No.	OPD	KDP 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	KDP 2019
1	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
2	SEKRETARIAT DAERAH	-	39.007.501,83	39.007.501,83	-
3	KEC. PULAU PUNJUNG	-	-	-	-
4	KEC. SITIUNG	-	-	-	-
5	KEC. KOTO BARU	-	-	-	-
6	KEC. SUNGAI RUMBAI	-	-	-	-
7	KEC. IX KOTO	-	-	-	-
8	KEC.TIMPEH	-	-	-	-
9	KEC. PADANG LAWEH	-	-	-	-
10	KEC.TIUMANG	-	-	-	-
11	KEC. KOTO BESAR	-	-	-	-
12	KEC.KOTO SALAK	-	-	-	-
13	KEC. ASAM JUJUHAN	-	-	-	-
14	DINAS PUPR	34.053.643.166,00	40.746.213.859,00	11.734.685.637,00	63.065.171.388,00
15	DINAS PERKINTAN	186.935.550,00	179.713.000,00	-	366.648.550,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
17	DINAS KESEHATAN	115.255.441,00	-	-	115.255.441,00
18	RSUD	80.895.000,00	478.764.728,00	-	559.659.728,00
19	DINAS PENDIDIKAN	978.512.000,00	-	-	978.512.000,00
20	DISBUDPARPORA	-	-	-	-
21	DISNAKERTRANS	-	-	-	-
22	DSP3AP2KB	-	-	-	-
23	DISDUKCAPIL	45.599.137,00	-	45.599.137,00	-
24	DINAS PMD	-	-	-	-
25	DINAS PERTANIAN	-	-	-	-
26	DINAS PANGAN & PERIKANAN	-	-	-	-
27	DISKUMPERDAG	382.365.000,00	20.943.993.258,93	-	21.326.358.258,93
28	BKD	-	-	-	-
29	Dinas Penanaman Modal	-	-	-	-
30	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-
31	BP3D	217.459.750,00	99.987.000,00	317.446.750,00	-
32	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
33	KANKESBANGPOL	-	-	-	-
34	DINAS SATPOL PP & DAMKAR	-	-	-	-
35	BPBD	-	-	-	-
36	BKPSDM	-	-	-	-
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	856.667.350,00	-	-	856.667.350,00
38	DISKOMIMFO	-	-	-	-
	JUMLAH	36.917.332.394,00	62.487.679.347,76	12.136.739.025,83	87.268.272.715,93


SUTAN RISKHA TUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 Agustus 2020
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERITAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI ASET LAINNYA TAHUN 2019

No.	OPD	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	Aset yang dipinjamkaikan	Aset yang dipinjamkaikan	Aset Tidak Berwujud	Jumlah Aset Lainnya
1	SEKRETARIAT DPRD	258.620.600,00	-	-	-	258.620.600,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	3.445.990.571,00	4.369.671.718,00	-	145.750.000,00	7.961.412.289,00
3	KEC. PULAU PUNJUNG	110.494.000,00	310.935.000,00	-	-	421.429.000,00
4	KEC. SITIUNG	38.030.000,00	201.870.000,00	-	-	239.900.000,00
5	KEC. KOTO BARU	125.578.800,00	276.533.000,00	-	-	402.111.800,00
6	KEC. SUNGAI RUMBAI	167.518.000,00	317.880.000,00	-	-	485.398.000,00
7	KEC. IX KOTO	46.300.000,00	262.920.000,00	-	-	309.220.000,00
8	KEC. TIMPEH	60.751.950,00	306.690.000,00	-	-	367.441.950,00
9	KEC. PADANG LAWEH	38.938.000,00	231.555.000,00	-	-	270.493.000,00
10	KEC. TIUMANG	84.608.000,00	247.558.000,00	-	-	332.166.000,00
11	KEC. KOTO BESAR	130.908.334,00	386.805.000,00	-	-	517.713.334,00
12	KEC.KOTO SALAK	416.997.000,00	373.440.000,00	-	-	790.437.000,00
13	KEC. ASAM JUJUHAN	36.755.000,00	274.590.000,00	-	-	311.345.000,00
14	DINAS PUPR	7.223.852.496,00	-	117.595.909.526,00	-	124.819.762.022,00
15	DINAS PERKINTAN	15.022.000,00	-	12.346.310.550,00	-	12.361.332.550,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	1.454.811.530,00	-	233.795.000,00	196.350.000,00	1.884.956.530,00
17	DINAS KESEHATAN	9.571.231.489,00	-	-	144.650.000,00	9.715.881.489,00
18	RSUD	9.230.974.996,00	-	-	199.485.000,00	9.430.459.996,00
19	DINAS PENDIDIKAN	17.847.094.514,84	-	-	925.382.392,00	18.772.476.906,84
20	DISBUDPARPORA	55.844.311,00	-	-	-	55.844.311,00
21	DISNAKERTRANS	272.319.858,00	-	-	-	272.319.858,00
22	DSP3AP2KB	1.304.336.525,00	283.294.138,00	-	-	1.587.630.663,00
23	DISDUKCAPIL	327.388.300,00	-	3.360.000,00	146.347.719,00	477.096.019,00
24	DINAS PMD	216.720.455,00	295.894.138,00	-	52.675.000,00	565.289.593,00
25	DINAS PERTANIAN	2.846.585.921,00	2.450.499.725,00	19.168.572.884,00	-	24.465.658.530,00
26	DINAS PANGAN & PERIKANAN	969.366.800,00	-	-	-	969.366.800,00
27	DISKUMPERDAG	92.703.833,00	-	-	-	92.703.833,00
28	BKD	1.311.384.972,00	-	-	1.338.630.400,00	2.650.015.372,00
29	Dinas Penanaman Modal	128.073.400,00	-	-	-	128.073.400,00
30	INSPEKTORAT DAERAH	34.570.490,00	-	-	-	34.570.490,00
31	BP3D	435.769.795,00	-	-	-	435.769.795,00
32	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.208.816.780,00	94.880.000,00	-	1.650.000,00	1.305.346.780,00
33	KANKESBANGPOL	160.291.700,00	-	-	-	160.291.700,00
34	DINAS SATPOL PP & DAMKAR	284.242.598,00	-	-	-	284.242.598,00
35	BPBD	684.060.000,00	-	-	-	684.060.000,00
36	BKPSDM	152.584.400,00	-	-	142.000.000,00	294.584.400,00
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip	74.720.580,00	-	37.768.500,00	-	112.489.080,00
38	DISKOMIMFO	76.359.950,00	-	-	485.819.375,00	562.179.325,00
	JUMLAH	60.940.617.948,84	10.685.015.719,00	149.385.716.460,00	3.778.739.886,00	224.790.090.013,84

 **BUPATI DHARMASRAYA**
[Signature]
SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 Agustus 2020
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Tahun Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH							

NIHIL

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 NOMOR : 1 TAHUN 2020
 TANGGAL : 26 Agustus 2020
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	17.723.019,00	0,00	17.121.934,00	601.085,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	81.213.447,88	0,00	21.845.388,20	59.368.059,68
3	Utang Belanja	19.668.717.484,00	6.290.980.283,73	0,00	25.959.697.767,73
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	765.093.207,00	1.844.423.465,86	0,00	2.609.516.672,86
	JUMLAH	20.532.747.157,88	8.135.403.749,59	38.967.322,20	28.629.183.585,27


BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran XVIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 Agustus 2020
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Tahun Pembentukan Kewajiban Jangka Panjang	Dasar Hukum Pembentukan	Jumlah Dana	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		NIHIL			-	-	
						-		
	JUMLAH		-	-	-		-	

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran XIX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 Agustus 2020
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN
DAN DIANGGARAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Nama Barang	Judul Kegiatan	s.d Realisasi Tahun n-3	Realisasi Tahun n-2	Realisasi Tahun n-1	Realisasi Tahun n	Jumlah Akumulasi Realisasi s/d Tahun n	Jumlah Yang Dianggarkan Dalam APBD Tahun Berrikutnya
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+5+6+7)	9
1	PERALATAN DAN MESIN							
	Meubeleur lainnya	Perencanaan Mobiler Interior RSUD Sungai Dareh				478.764.728,00	478.764.728,00	
2	GEDUNG DAN BANGUNAN							
	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Lanjutan Pembangunan SD Bertingkat (APBD)	978.512.000,00				978.512.000,00	
	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	DED Pembangunan Rumah Dinas Camat Padang Laweh		29.275.000,00			29.275.000,00	
		Sentra IKM Logam Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung				7.447.992.805,93	7.447.992.805,93	
	Bangunan Klinik/Puskesmas	Bangunan Klinik/Puskesmas /Laboratorium Puskesmas Gunung medan	115.255.441,00				115.255.441,00	
	Bangunan Oceanarium Lain-lain (dst)	Penyusunan Master Plen Kawasan Koto Padang	263.676.000,00				263.676.000,00	
	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Perencanaan Tugu Simpang Silago	39.606.000,00				39.606.000,00	
	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Master Plan/DED Pasar Sungai Rumbai		332.915.000,00	49.450.000,00		382.365.000,00	
	Bangunan Rumah Sakit Umum	Bangunan RSUD Sungai Dareh	80.895.000,00				80.895.000,00	
	Flat/rumah Lain-lain (dst)	DED Kawasan Rawan Bencana Kec.Pulau Punjung	49.910.000,00				49.910.000,00	
		DED Kawasan Kumuh Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung	49.920.000,00				49.920.000,00	
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	GEDUNG KANTOR KPAD KAB. DHARMASRAYA	836.767.350,00				836.767.350,00	
		GEDUNG UNIT LAYANAN PERPUSTAKAAN KAB. DHARMASRAYA	19.900.000,00				19.900.000,00	

NO	Nama Barang	Judul Kegiatan	s.d Realisasi Tahun n-3	Realisasi Tahun n-2	Realisasi Tahun n-1	Realisasi Tahun n	Jumlah Akumulasi Realisasi s/d Tahun n	Jumlah Yang Dianggarkan Dalam APBD Tahun Berrikutnya
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+5+6+7)	9
	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya		127.020.000,00			127.020.000,00	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya		125.059.000,00			125.059.000,00	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Dharmasraya		127.899.000,00			127.899.000,00	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya		123.920.000,00			123.920.000,00	
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Perencanaan Mesjid Agung		631.105.000,00		37.674.191.552,00	38.305.296.552,00	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	DED Pembangunan Gedung Kantor Kodim Dharmasraya				79.200.000,00	79.200.000,00	
		Perencanaan Pembangunan Command Center				79.696.000,00	79.696.000,00	
	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	DED Rumah Dinas Wakil Bupati				79.680.000,00	79.680.000,00	
		DED Rumah Dinas Sekda				79.720.000,00	79.720.000,00	
	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Perencanaan pembangunan Sarana olah raga nagari Sungai Duo		49.960.000,00			49.960.000,00	
	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai Lain-lain	Perencanaan RTH Batas Kabupaten Dharmasraya Sijunjung		46.453.000,00			46.453.000,00	
	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat Lain-lain (dst)	Rumah Susun				79.800.000,00	79.800.000,00	
3	JALAN							
	Jalan Nasional Arteri	Trotoar / Median Jalan Pulau Punjung - Sungai Rumbai				2.231.178.307,00		
	Jalan Kabupaten Arteri	DED Jalan Nasional		99.575.000,00			99.575.000,00	
	Jalan Desa	Perencanaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Permukiman Rawan Bencana	490.778.000,00				490.778.000,00	
	Jalan Desa Lain-lain	Perencanaan Rigit Beton APBN 2016 Kawasan Agro Politan Sitiung	49.660.000,00				49.660.000,00	
	Jalan Kabupaten Lain-lain	Perencanaan Paket Jalan	199.198.000,00	37.268.550,00		423.781.000,00	660.247.550,00	

NO	Nama Barang	Judul Kegiatan	s.d Realisasi Tahun n-3	Realisasi Tahun n-2	Realisasi Tahun n-1	Realisasi Tahun n	Jumlah Akumulasi Realisasi s/d Tahun n	Jumlah Yang Dianggarkan Dalam APBD Tahun Berrikutnya
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+5+6+7)	9
	Jalan Khusus Lainnya	DED Peningkatan Kualitas Pemungkiman		149.667.000,00			149.667.000,00	
		Jalan Beton Sentra IKM Logam Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung				6.254.156.415,00	6.254.156.415,00	
4	JEMBATAN							
	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	Perencanaan Pembanguann Jembatan	288.556.000,00	149.100.000,00			437.656.000,00	
	Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	49.750.000,00			139.380.000,00	189.130.000,00	
	Jembatan Khusus Lain-lain	Jembatan Sentra IKM Logam Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung				518.162.445,00	518.162.445,00	
5	BANGUNAN AIR/IRIGASI							
		DED / Perencanaan Bendungan Sungai Batang Pangian	375.830.000,00	14.585.379.762,00	2.316.335.429,00		17.277.545.191,00	
		DED / PerencanaanJaringan Irigasi Batang Mimpi Sei. Dareh (Belakang Kantor PU)	29.000.000,00				29.000.000,00	
		DED / Perencanaan Batang Siat Koto Baru	39.828.000,00				39.828.000,00	
	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	DED / Perencanaan Sungai koto Balai Koto Padang	39.828.000,00				39.828.000,00	
		DED Perencanaan Embung Koto Ranah	49.775.000,00				49.775.000,00	
		DED/Perencanaan Sungai Btg Hari lubuk Bulang	49.921.000,00				49.921.000,00	
		DED/Perencanaan Sungai Btg Momong Lubuk Karak	49.729.000,00				49.729.000,00	
		DED/Perencanaan Sungai Btg Hari Siguntur	49.851.000,00				49.851.000,00	
		DED/Perencanaan Sungai Btg Jujuhan Tanjung Alam Asam Jujuhan	49.900.000,00				49.900.000,00	
		DED Embung Koto Padang II		44.637.000,00			44.637.000,00	

NO	Nama Barang	Judul Kegiatan	s.d Realisasi Tahun n-3	Realisasi Tahun n-2	Realisasi Tahun n-1	Realisasi Tahun n	Jumlah Akumulasi Realisasi s/d Tahun n	Jumlah Yang Dianggarkan Dalam APBD Tahun Berrikutnya
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+5+6+7)	9
	Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai)	DED/ Perencanaan Sungai Batang Pangian		39.760.000,00			39.760.000,00	
		DED/ Perencanaan Sungai Batang Piruko		39.908.000,00			39.908.000,00	
		Survey Hidrologi Sungai Batang Hari		49.731.000,00			49.731.000,00	
		DED Sungai Batang Hari		49.939.000,00			49.939.000,00	
		UKL/ UPL Sungai Batang Hari		49.857.000,00			49.857.000,00	
		DED Pengaman Tebing Sungai Batang Siat Koto Baru		49.749.000,00			49.749.000,00	
		DED Pengaman Tebing Sungai Batang Piruko Jorong Seberang Piruko Koto Baru		49.833.000,00			49.833.000,00	
	Waduk Penyimpanan Air Baku	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Minum Bukit IX Asam Jujuhan	349.749.738,00				349.749.738,00	
		Perencanaan dan DED SPAM Koto Baru	147.752.000,00				147.752.000,00	
	Waduk Penyimpanan Air Baku	Perencanaan dan DED SPAM Sungai Rumbai	147.746.500,00				147.746.500,00	
		Perencanaan dan DED SPAM Pulau Punjung	147.812.500,00				147.812.500,00	
		Inventarisasi SPAM Kawasan Pulau Punjung	49.420.000,00				49.420.000,00	
		Perencanaan SPAM Lubuk Bulang	49.577.000,00				49.577.000,00	
		Perencanaan Embung Kurnia Selatan				59.300.000,00	59.300.000,00	
	Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	Perencanaan Drainase	143.180.000,00				143.180.000,00	
	Saluran Drainage	Saluran Drainase Sentra IKM Logam Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung				1.157.458.651,00	1.157.458.651,00	

NO	Nama Barang	Judul Kegiatan	s.d Realisasi Tahun n-3	Realisasi Tahun n-2	Realisasi Tahun n-1	Realisasi Tahun n	Jumlah Akumulasi Realisasi s/d Tahun n	Jumlah Yang Dianggarkan Dalam APBD Tahun Berrikutnya
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+5+6+7)	9
6	INTALASI AIR							
	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang	Perencanaan Optimalisasi SPAM		97.002.600,00			97.002.600,00	
		Instalasi Air Sentra IKM Logam Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung				2.000.233.322,00	2.000.233.322,00	
7	JARINGAN							
	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	Perencanaan sistem Tranmisi SPAM Gunung Medan	50.185.500,00				50.185.500,00	
		Perencanaan Jambatan Pipa Siguntur	50.135.500,00				50.135.500,00	
		Perencanaan lanjutan pipa Distribusi SPAM Sitiung (Pendamping Dana APBD)	37.064.500,00				37.064.500,00	
	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	Perencanaan Optimalisasi Sistem Transmisi SPAM IKK Pulau punjung	50.120.500,00				50.120.500,00	
	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	Jaringan Listrik Sentra IKM Logam Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung				3.565.989.620,00	3.565.989.620,00	
Jumlah			5.468.789.529,00	17.085.012.912,00	2.365.785.429,00	62.348.684.845,93	87.268.272.715,93	


 BUPATI DHARMASRAYA
 SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.

Lampiran xx : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor : 1 TAHUN 2020
Tanggal : 26 Agustus 2020
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN DHARMASRAYA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

No	Perusahaan Daerah Tahun	Sumber	Status	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

NIHIL

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.